PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU
https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2021





TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 - 2026

Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat

natural bengkulu

SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Pasal 270 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturanDaerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerahdan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjangDaerah, Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerahtentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi olehMenteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentangRPJMD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Permerintah 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20(dua puluh)tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021--2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai tahun 2026.
9. Rencana strategisPerangkatDaerahyang selanjutnya disingkat dengan RenstraPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Daerah;
e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
i. BAB IX : Penutup

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra PD tahun 2021–2026 dan perencanaan tahunan RKPD.

Pasal 5

(1) RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dalamrangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.
(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang tupoksinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(3) Perangkat Daerah berkewajiban menjaminkonsistensi antara dokumen RPJMDdengan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

BAB III

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Pembatasan jangka waktu perubahan RPJMD sebagaimana ayat (2) tidak berlaku jika terjadi perubahan mendasar.

(4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV
PEDOMAN TRANSISI

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2026, dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, guna pedoman penyusunan RKPD Tahun 2026.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 27 September 2021
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd

HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR: 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (5-162/2021);

Plt.KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

SUPRAN, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681221 199303 1 002

PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

PROVINSI
BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

GUBERNUR BENGKULU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan tepat waktu serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Tanggal 25 Februari 2021, saya DR. H. Rohidin Mersyah bersama Bapak DR. H. Rosjonsyah, dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu periode masa pengabdian 2021-2024. Kami memiliki Visi besar untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat. Meraih visi ini tentu tidak akan mudah. Kolaborasi dan sinergi pembangunan bersama stakeholder lainnya menjadi kunci penting dalam mewujudkan visi tersebut serta untuk dapat menembus keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu adalah milik kita bersama, yang kita bangun bersama-sama, sinergi dan kolaborasi, dengan satu tujuan yang sama yaitu Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat.

Sebagai instrumen mewujudkan Visi tersebut, kami menuangkannya kedalam misi dan program pembangunan untuk Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat pada dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 ini, menguraikan setiap strategi, arah kebijakan, program pembangunan dan pendanaan pembangunan disertai pengarusutamaan pembangunan dalam mencapai visi dan misi. RPJMD ini kemudian menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk bekerja. Setiap Perangkat Daerah harus berfokus kepada prioritas

pembangunan dan program prioritas yang inovatif dan betul-betul memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat dan mampu mewujudkan perubahan menuju kearah yang lebih baik. Program dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 disusun dan dirancang untuk fokus pada pembangunan strategis yang diharapkan akan memberikan akselerasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi Provinsi Bengkulu untuk berdaya saing dan inklusif.

Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu masa bhakti 2021-2024 adalah mari kita bersama-sama berbuat untuk membenahi dan menyejahterakan masyarakat Provinsi Bengkulu. Dengan bekerja keras dan dengan ketulusan hati serta penuh rasa tanggungjawab, *Insya Allah* kita dapat mewujudkan Visi "***Terwujudnya Bengkulu Yang Maju, Sejahtera dan Hebat***".

Sebagai penutup, saya DR. H. Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu dan Bapak DR. H. Rosjonsyah, Wakil Gubernur Bengkulu, menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menuntaskan penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 ini. Semoga segala upaya yang mulia dari kita dalam menata pembangunan Provinsi Bengkulu kedepan selalu mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT, sehingga membuahkan hasil yang berdayaguna dan memberikan maslahat bagi masyarakat Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, September 2021

GUBERNUR BENGKULU,

ROHIDIN MERSYAH

WAKIL GUBERNUR BENGKULU,

H. ROSJONSYAH

PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2021

DAFTAR ISI

PROVINSI
BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR GAMBAR		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1. LATAR BELAKANG	I - 1
	1.2. DASAR HUKUM	I - 6
	1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	I - 8
	1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I -13
	1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN	I - 14
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II – 1
	2.1. KONDISI UMUM KONDISI DAERAH	II – 1
	2.2. HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2020	II – 112
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
	3.1 KINERJA KUANGAN MASA LALU	III – 1
	3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	III – 60
	3.3 KERANGKA PENDANAAN	III – 102
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV – 1
	4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
	4.2. ISU STRATEGIS	IV – 160
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
	5.1. VISI	V - 1
	5.2. MISI	V - 1
	5.3 TUJUAN DAN SASARAN	V - 24

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..... VI - 1

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... VII – 1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VIII – 1

BAB IX PENUTUP ..... IX – 1

PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2021

DAFTAR TABEL

PROVINSI
BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Keselarasan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	I – 10
Tabel 1.2	Keselarasan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025	I – 11
Tabel 1.3	Keselarasan Fokus Pembangunan RPJPD Tahap IV dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	I – 12
Tabel 1.4	Keselarasan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan KLHS	I – 16
Tabel 2.1	Luas Wilayah Provinsi Bengkulu dirinci menurut Kabupaten/Kota	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa Provinsi Bengkulu Tahun 2020....	II-4
Tabel 2.3	Luas Hutan Menurut Fungsinya di Provinsi Bengkulu	II-6
Tabel 2.4	Luas Kasawasan Hutan per Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu sampai dengan 31 Oktober Tahun 2017 (Hektar)	II-8
Tabel 2.5	Luas Areal Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020.....	II-9
Tabel 2.6	Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020	II-10
Tabel 2.7	Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Bengkulu (dalam Ton) Tahun 2018-2019	II-12
Tabel 2.8	Jumlah Petani, Luas Areal, Produksi dan Produksi Rata-Rata Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	II-13
Tabel 2.9	Produksi dan Penjualan Batubara menurut Kabupaten/Kota (ton) Tahun 2020	II-14
Tabel 2.10	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020	II-16
Tabel 2.11	Potensi, Produksi, Tingkat Pemanfaatan dan Peluang pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020	II-17
Tabel 2.12	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Provinsi Bengkulu Tahun 2020	II-17
Tabel 2.13	Produksi dan Nilai produksi perikanan Budidaya di Provinsi Bengkulu Tahun 2020.....	II-17
Tabel 2.14	Potensi Bencana Alam di Provinsi Bengkulu	II-21

Tabel 2.15	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	II-23
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 ...	II-24
Tabel 2.17	Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 dan 2020	II-25
Tabel 2.18	Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2010 dan 2019	II-25
Tabel 2.19	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020	II-26
Tabel 2.20	PDRB ADHB per Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-27
Tabel 2.21	Pertumbuhan PDRB per Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-28
Tabel 2.22	Nilai PDRB per Kapita Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	II-29
Tabel 2.23	Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2021	II-29
Tabel 2.24	Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2013 – 2020	II-32
Tabel 2.25	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013-2020	II-32
Tabel 2.26	Kondisi Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2020	II-32
Tabel 2.27	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi Bengkulu Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2020	II-35
Tabel 2.28	Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020	II-36
Tabel 2.29	Perkembangan Jumlah Sanggar/Grup Kesenian di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-39
Tabel 2.30	Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-40
Tabel 2.31	Perkembangan Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-40
Tabel 2.32	Perkembangan Persentase Nomor Lomba Olahraga Prestasi yang dimenangkan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019	II-41
Tabel 2.33	Perkembangan Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-41
Tabel 2.34	Perkembangan APS Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-42
Tabel 2.35	Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020.....	II-42

Tabel 2.36 Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-43

Tabel 2.37 Perkembangan APK Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-43

Tabel 2.38 Perkembangan APK Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-44

Tabel 2.39 Perkembangan Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-44

Tabel 2.40 Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-45

Tabel 2.41 Perkembangan Murid Putus Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-46

Tabel 2.42 Perkembangan Guru yang Sudah Sertifikasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020..... II-46

Tabel 2.43 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-47

Tabel 2.44 Perkembangan Haraoan Lama Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019 ..... II-47

Tabel 2.45 Perkembangan Sekolah yang Sudah Akreditasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-48

Tabel 2.46 Perkembangan SMA yang Telah Akreditasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-48

Tabel 2.47 Perkembangan SMK yang Telah Akreditasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-49

Tabel 2.48 Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 KH di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-50

Tabel 2.49 Perkembangan AKB Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-50

Tabel 2.50 Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 . II-51

Tabel 2.51 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-52

Tabel 2.52 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-52

Tabel 2.53 Perkembangan Stunting di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-53

Tabel 2.54 Perkembangan Sarana Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-53

Tabel 2.55 Perkembangan Sarana Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-54

Tabel 2.56 Perkembangan Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-55

Tabel 2.57 Perkembangan Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-55

Tabel 2.58 Perkembangan Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-56

Tabel 2.59 Perkembangan Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-57

Tabel 2.60 Perkembangan Rumah Tangga yang terlayani Pengolahan Persampahan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-58

Tabel 2.61 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-58

Tabel 2.62 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-59

Tabel 2.63 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-60

Tabel 2.64 Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-60

Tabel 2.65 Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020 ..... II-62

Tabel 2.66 Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda Tertib Umum di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-64

Tabel 2.67 Perkembangan Rasio Satlinmas di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-65

Tabel 2.68 Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-66

Tabel 2.69 Perkembangan Indeks Resiko Bencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-67

Tabel 2.70 Perkembangan TPAK di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-67

Tabel 2.71 Perkembangan Tenaga Kerja yang Bekerja berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-68

Tabel 2.72 Perkembangan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-70

Tabel 2.73 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-70

Tabel 2.74 Perkembangan IPG Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-70

Tabel 2.75 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-71

Tabel 2.76 Perkembangan IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-71

Tabel 2.77 Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-72

Tabel 2.78 Perkembangan Ketahanan Pangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-73

Tabel 2.79 Perkembangan Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-74

Tabel 2.80 Perkembangan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-75

Tabel 2.81 Perkembangan Penduduk yang memiliki KTP-el Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-76

Tabel 2.82 Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-77

Tabel 2.83 Perkembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-78

Tabel 2.84 Perkembangan Perhubungan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-80

Tabel 2.85 Perkembangan Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-81

Tabel 2.86 Perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 II-82

Tabel 2.87 Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-83

Tabel 2.88 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-84

Tabel 2.89 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-85

Tabel 2.90 Perkembangan Persandian di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-86

Tabel 2.91 Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-87

Tabel 2.92 Perkembangan Kearsipan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-87

Tabel 2.93 Perkembangan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-87

Tabel 2.94 Perkembangan Pariwisata di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-89

Tabel 2.95 Perkembangan Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 ..... II-90

Tabel 2.96	Perkembangan Kehutanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.97	Perkembangan Lahan Kritis Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-92
Tabel 2.98	Perkembangan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.99	Perkembangan Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-94
Tabel 2.100	Perkembangan Perdagangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2.101	Perkembangan Perindustrian di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2.102	Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-96
Tabel 2.103	Perkembangan Transmigrasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.104	Perkembangan Kesekretariatan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-99
Tabel 2.105	Perkembangan Kesekretariatan DPRD di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-100
Tabel 2.106	Perkembangan Perencanaan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-101
Tabel 2.107	Perkembangan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-102
Tabel 2.108	Perkembangan Kepegawaian di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.109	Perkembangan Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.110	Perkembangan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020	II-104
Tabel 2.111	Perkembangan Penghubung di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-105
Tabel 2.112	Perkembangan Pengawasan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-106
Tabel 2.113	Perkembangan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-107
Tabel 2.114	Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-109
Tabel 2.115	Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-110
Tabel 2.116	Perkembangan Fokus Fasilitas Infrastruktur di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-113
Tabel 2.117	Perkembangan Investasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2020	II-114

Tabel 2.118	Statistik Kriminalitas di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2019	II-115
Tabel 2.119	Perkembangan Fokus Iklim Investasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-116
Tabel 2.120	Perkembangan Fokus Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-117
Tabel 2.121	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	II-118
Tabel 2.122	Kesesuaian Antara RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu	II-134
Tabel 2.123	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2020	II-136
Tabel 2.124	Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Provinsi Bengkulu Tahun 2020	II-152
Tabel 2.125	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020	II-153
Tabel 2.126	Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2020	II-154
Tabel 2.127	Permasalahan dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020	II-154
Tabel 2.128	Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020	II-155
Tabel 2.129	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020	II-155
Tabel 2.130	Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020	II-156
Tabel 2.131	Permasalahan dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020	II-156
Tabel 2.132	Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2020	II-158
Tabel 2.133	Permasalahan dalam Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2020	II-158
Tabel 2.134	Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020	II-159
Tabel 2.135	Permasalahan dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2020	II-160
Tabel 2.136	Kontribusi Tiap Sektor terhadap Emisi GRK di Provinsi Bengkulu	II-162
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-5
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-29
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-45

Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-47
Tabel 3.5	Rata-rata Pertumbuhan Rasio Likuiditas Neraca Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-53
Tabel 3.6	Rata-rata Pertumbuhan Rasio Solvabilitas Neraca Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-54
Tabel 3.7	Rata-rata Pertumbuhan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019	III-56
Tabel 3.8	Rata-rata Pertumbuhan Rasio Efektivitas dan Efesiensi Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-57
Tabel 3.9	Rata-rata Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-57
Tabel 3.10	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-63
Tabel 3.11	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2018	III-64
Tabel 3.12	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2020	III-74
Tabel 3.13	Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-90
Tabel 3.14	Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-93
Tabel 3.15	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-95
Tabel 3.16	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020	III-96
Tabel 3.17	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	III-100
Tabel 3.18	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	III-108
Tabel 3.19	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	III-113
Tabel 3.20	Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	III-115
Tabel 3.21	Proyeksi Kapsitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.....	III-117
Tabel 4.1	Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2014 – 2020	IV-4

Tabel 5.1	Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	V-1
Tabel 5.2	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	V-27
Tabel 5.3	Keterkaitan antara Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah	V-45
Tabel 5.4	Keterkaitan 5 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu dengan Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024	V-48
Tabel 5.5	Rumusan 18 Kegiatan Unggulan Janji Kampanye Dr. H. Rohidin Mersyah dan Dr. H Rosjonsyah pada RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	V-51
Tabel 5.6	Rumusan Kegiatan Unggulan per OPD pada RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	V-59
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Bengkulu	VI-1
Tabel 6.2	Strategi Pencapaian SDGs dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	VI-27
Tabel 7.1	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	VII-4

PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2021

DAFTAR GAMBAR

PROVINSI
BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Proses dan Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	I-4
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	I-9
Gambar 1.3	Keterkaitan Lingkup RTRW dengan RPJMD	I-15
Gambar 2.1	Peta Administratif Provinsi Bengkulu	II-3
Gambar 2.2	Ketinggian Tempat di Provinsi Bengkulu	II-5
Gambar 2.3	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bengkulu Tahun 2019 – 2020	II-30
Gambar 2.4	Perkembangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2020	II-31
Gambar 2.5	Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2012-2019	II-34
Gambar 2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020	II-37
Gambar 2.7	Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 – 2019	II-38
Gambar 2.8	Sebaran Pembangkit Listrik di Provinsi Bengkulu Tahun 2019	II-112
Gambar 2.9	Kontribusi Historis Sektoral terhadap Emisi GRK Bengkulu	II-162
Gambar 2.10	Kontribusi Baseline Tahun 2020 Sektoral terhadap Emisi GRK Provinsi Bengkulu	II-162
Gambar 3.1	Rata-rata Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019	III-7
Gambar 3.2	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019	III-9
Gambar 3.3	Rata-rata Struktur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019	III-9
Gambar 3.4	Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019	III-11
Gambar 3.5	Perkembangan Pendapatan Retribusi Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019	III-13
Gambar 3.6	Perkembangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019	III-14
Gambar 3.7	Perkembangan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019	III-15
Gambar 3.8	Perkembangan Pendapatan Transfer Prov. Bengkulu Tahun 2017-2019	III-16
Gambar 3.9	Rata-rata Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019	III-17

Gambar 3.10 Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-18

Gambar 3.11 Perkembangan DAU Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-19

Gambar 3.12 Perkembangan DBH Pajak Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-20

Gambar 3.13 Perkembangan DBH Bukan Pajak Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019..... III-21

Gambar 3.14 Perkembangan Dana Alokasi Khusus Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-23

Gambar 3.15 Perkembangan Dana Penyesuaian Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2019 ..... III-25

Gambar 3.16 Rata-rata Struktur Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-28

Gambar 3.17 Perkembangan Belanja Tidak Langsung Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-30

Gambar 3.18 Rata-rata Struktur Belanja Tidak Langsung Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019..... III-31

Gambar 3.19 Perkembangan Belanja Tidak Langsung Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-32

Gambar 3.20 Perkembangan Belanja Hibah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-34

Gambar 3.21 Perkembangan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019..... III-35

Gambar 3.22 Perkembangan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik Bengkulu Tahun 2017 2019 ..... III-36

Gambar 3.23 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-37

Gambar 3.24 Perkembangan Belanja Langsung Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-38

Gambar 3.25 Rata-rata Struktur Belanja Tidak Langsung Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019..... III-39

Gambar 3.26 Perkembangan Belanja Pegawai dalam Kelompok Belanja Langsung Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-40

Gambar 3.27 Perkembangan Belanja Barang dan Jasa Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-41

Gambar 3.28 Perkembangan Belanja Modal Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 ..... III-43

Gambar 4.1 IPM Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 ..... IV-3

Gambar 4.2 Kemiskinan Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 ..... IV-4

Gambar 5.1	Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Pertama	V-33
Gambar 5.2	Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Kedua	V-34
Gambar 5.3	Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Ketiga	V-35
Gambar 5.4	Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Keempat	V-37
Gambar 5.5	Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Keempat	V-38
Gambar 6.1	Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Pertama RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	VI-8
Gambar 6.2	Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Kedua RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	VI-12
Gambar 6.3	Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Ketiga RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	VI-16
Gambar 6.4	Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Keempat RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	VI-20
Gambar 6.5	Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Kelima RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	VI-23
Gambar 6.6	Kontribusi Historis Sektoral terhadap Emisi GRK Bengkulu	VI-41
Gambar 6.7	Kontribusi Baseline Tahun 2020 Sektoral terhadap Emisi GRK Provinsi Bengkulu	VI-41
Gambar 6.8	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	VI-54

PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2021

BAB I

Pendahuluan

PROVINSI

BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 telah menghasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2021-2024, yaitu pasangan DR. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA. dan Dr. E. H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Periode 2021-2024 tersebut dilantik pada tanggal 25 Februari 2021 oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah. Selain itu, sebagaimana ketentuan dalam diktum nomor (3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ, maka Periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Hal tersebut sesuai dengan amanat ayat (7) Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan

pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan

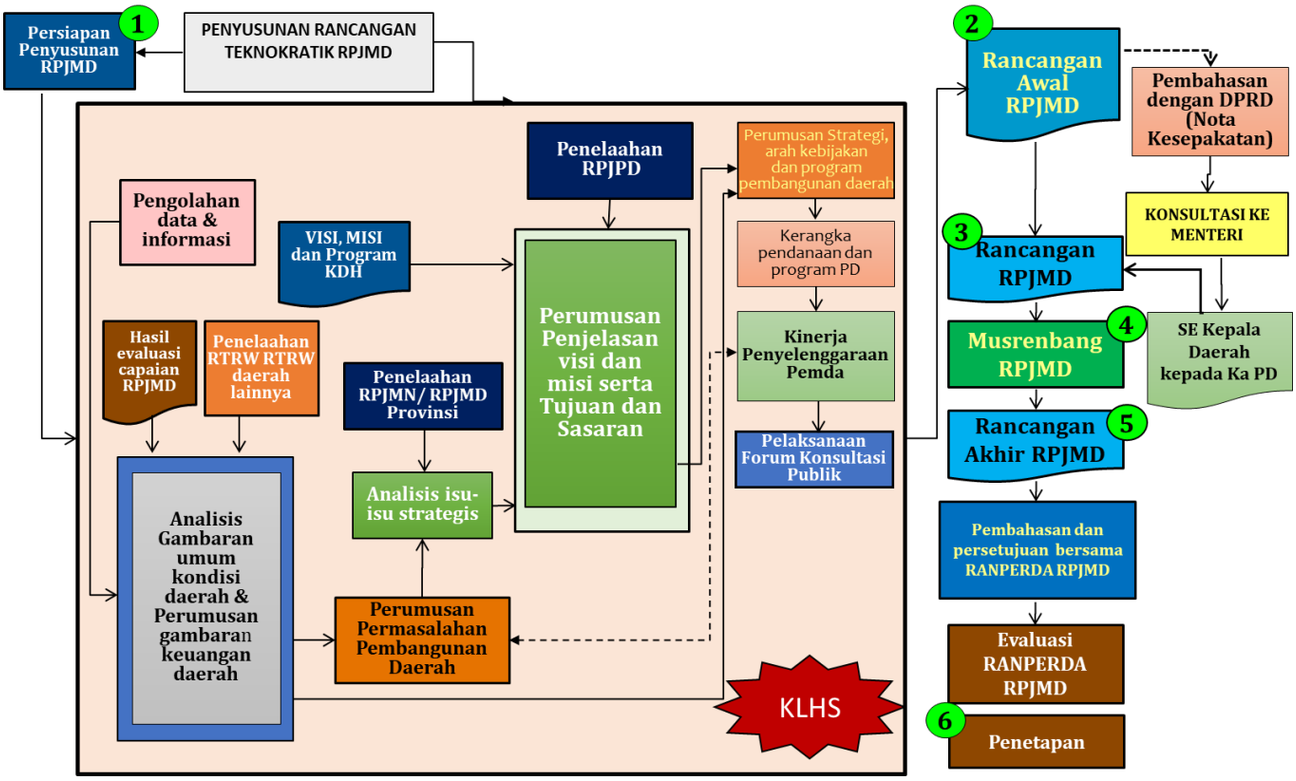
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

RPJMD Provinsi Bengkulu juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi, yaitu:

1. Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan Spasial/Ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. Menerapkan kebijakan anggaran belanja *money follow program*.

Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Gambar 1.1.
Proses dan Tahapan Penyusunan
RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026



Rancangan Awal RPJMD Provinsi Bengkulu yang telah disetujui DPRD dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal RPJMD juga disampaikan kepada semua Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Provinsi Bengkulu sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) PD sekaligus untuk mendapatkan *feedback* atau masukan dari PD. Seluruh masukan serta Rancangan Renstra seluruh PD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD dan menjadi Rancangan RPJMD, selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir RPJMD, yaitu proses penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Rancangan Perda ini kemudian dikonsultasikan kembali ke Menteri Dalam Negeri. Hasil akhir dari seluruh proses penyusunan RPJMD ini adalah ditetapkannya Perda Provinsi Bengkulu tentang RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan RPJMD, kondisi global dan nasional penting untuk diperhatikan. Kondisi global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan Bengkulu kedepan antara lain pemulihan perekonomian dampak dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan Provinsi Bengkulu khususnya telah memberikan tekanan yang sangat mempengaruhi perekonomian makro daerah. Pandemi Covid-19 menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam pengelolaan perekonomian daerah yang berdampak pada keuangan daerah. Bukan tidak mungkin, pandemi Covid-19 dan berserta dampaknya akan tetap berlanjut hingga ketahun-tahun berikutnya. Oleh karenanya, sebagai upaya mitigasi terhadap penyebaran virus dan penganganan dampak baik pada aspek ekonomi, kesehatan dan sosial, RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 disusun dengan memprioritaskan kepada pemulihan ekonomi pada tahun awal RPJMD, kemudian penanganan penanganan kesehatan, pemulihan dampak ekonomi serta penyediaan jaring pengaman sosial untuk jangka pendek dan menengah, dan sejalan dengan upaya implementasi adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19, dengan tetap optimis dalam mewujudkan visi dan misi.

Arah pembangunan dalam RPJMD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 mengikuti serta mengacu pada sasaran pokok pembangunan tahap IV (Periode 2020-2025) dalam RPJPD Provinsi Bengkulu 2005-2025. Kebijakan terkait penggunaan dan pemanfaatan tata ruang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026 juga mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu tahun 2012-2032. Selain itu, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 juga menjadikan RPJMN 2020–2024 sebagai acuan. Dengan demikian, kebijakan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tetap selaras dengan kebijakan RPJMN 2020-

2024 maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu lainnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 menjadi dokumen yang sangat strategis, sebab merupakan:

1. Instrumen untuk mengimplementasikan janji Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 periode atau tahap keempat;
3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;
4. Pedoman penyusunan RPJMD kabupaten/kota se-Bengkulu terutama yang melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember Tahun 2020;
5. Pedoman akhir dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
7. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
8. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 didasari melalui beberapa Peraturan Perundangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

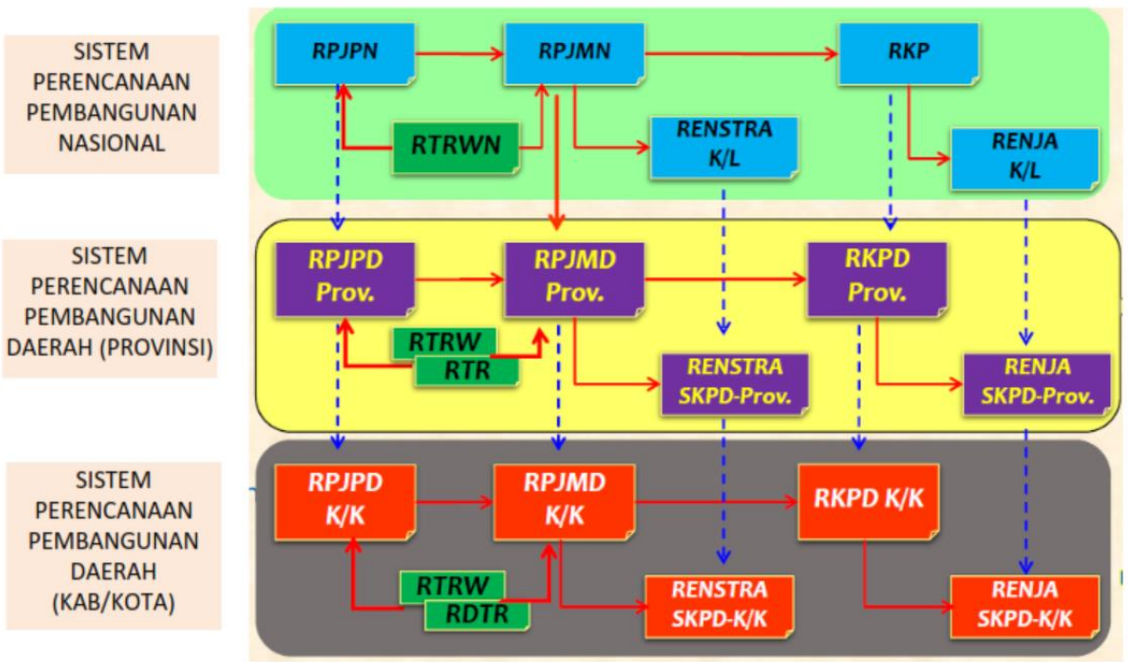
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Hubungan antar dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024**

   Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 juga memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Tabel 1.1.
Keselarasan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

No.	Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	Keterkaitan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024
1.	MISI 1: Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif	PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2.	MISI 2: Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan	PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
3.	MISI 3: Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik	PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	MISI 4: Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius	PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5.	MISI 5: Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta kelompok disabilitas secara terpadu	PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

2. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Tahun 2005-2025, RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Darah

Arah Pembangunan dalam RPJMD mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu tahun 2005-2025. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 mengikuti/mengacu pada sasaran pokok pembangunan tahap IV (Periode 2020-2025) dalam RPJPD Provinsi Bengkulu 2005-2025.

Tabel 1.2.
Keselarasan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025

No.	RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025
	VISI Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat	**VISI** Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu Pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa Serta perekonomian kokoh
1.	MISI 1: Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif	MISI 3: Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi MISI 2: Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata dan bermanfaat
2.	MISI 2: Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan	MISI 4: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan
3.	MISI 3: Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik	MISI 5: Mewujudkan masyarakat adil dan demokrasi
4.	MISI 4: Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius	MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEK dan IMTAQ

No.	RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025
5.	MISI 5: Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta kelompok disabilitas secara terpadu	MISI 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang menguasai IPTEk dan IMTAQ

Selain itu, Program Prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 juga merupakan penjabaran dari Fokus Pembangunan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 tahap IV, sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Keselarasan Fokus Pembangunan RPJPD Tahap IV dengan Program Prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

No.	Fokus Pembangunan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahap IV (2020-2025)	Program Prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026
1.	Meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan
2.	Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas kesehatan
3.	Meningkatnya tumbuh kembang, perlindungan anak dan terwujudnya kesetaraan gender	Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak
4.	Daya saing perekonomian yang kompeteitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam	Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, kehutanan dan pertambangan
5.	Berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka peningkatan perekonomian daerah	1. Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM 2. Peningkatan investasi
6.	Tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang terus menurun	1. Rehabilitasi, perlindungan, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial 2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja
7.	Terselenggaranya jaringan transportasi yang memadai	Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur strategis
8.	Tercapainya elektrifikasi perdesaan dan rumah tangga	Pemenuhan layanan infrastruktur dasar
9.	Terpenuhinya kebutuhan hunian	Pemenuhan layanan infrastruktur

No.	Fokus Pembangunan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahap IV (2020-2025)	Program Prioritas RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026
	yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung	dasar dan perkotaan
10.	Terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh	Pengembangan wawasan kebangsaan serta penegakan demokrasi
11.	Penegakan supremasi hukum	Penataan hukum dan peraturan perundang-undangan
12.	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa	1) Peningkatan akuntabilitas 2) Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik
13.	Terwujudnya birokrasi yang profesional	Peningkatan kompetensi SDM aparatur dan penataan birokrasi
14.	Memantapkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemeliharaan sumber daya alam	1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup 2) Peningkatan ketahanan dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana dan perubahan iklim

RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026 menjadi pedoman/acuan para PD untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2021-2026. Renstra PD merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

Selanjutnya, RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

3. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032

Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 memperhatikan RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2

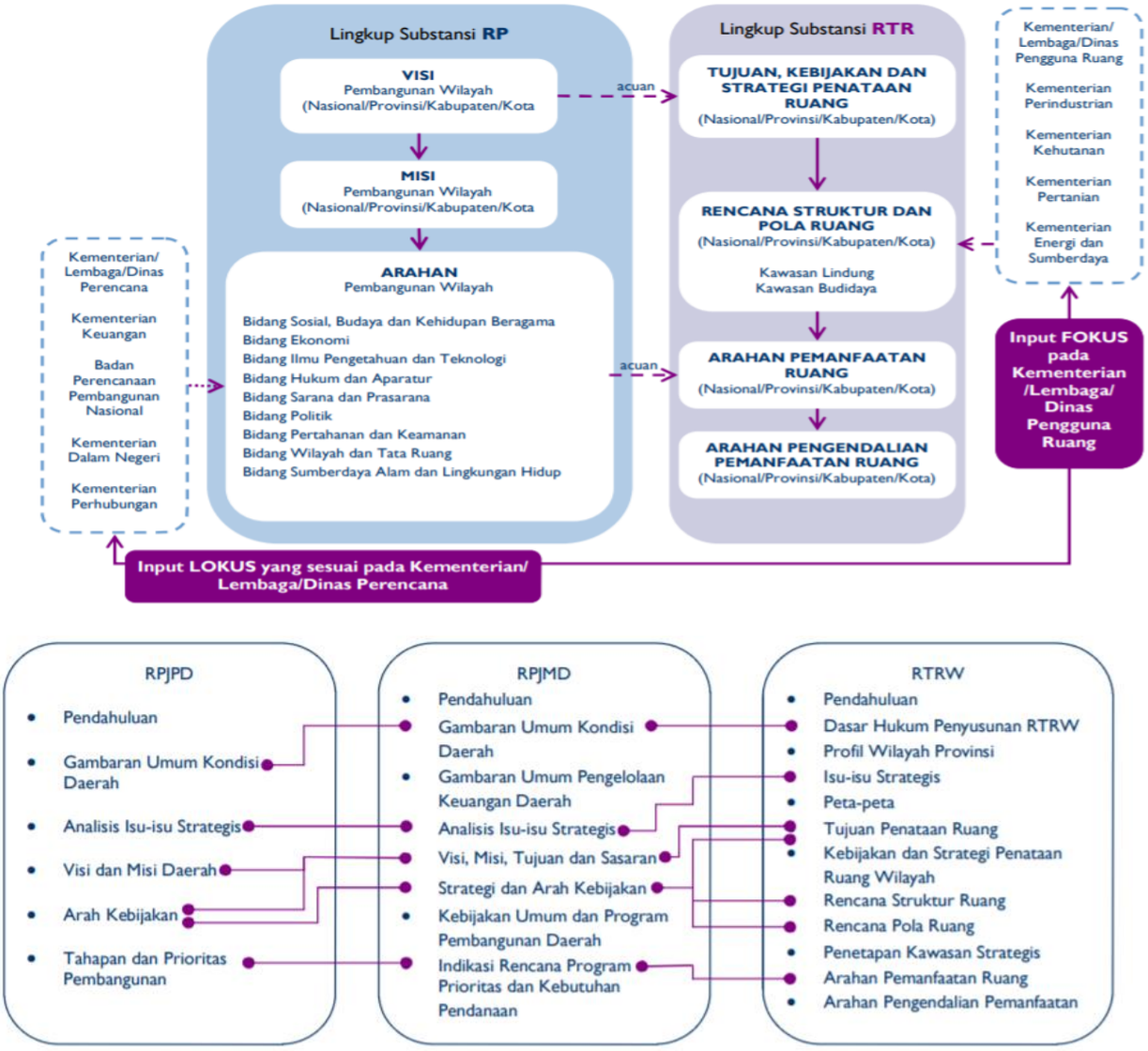
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Bengkulu dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

Rencana pembangunan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu mengakomodir program/kegiatan/kabijakan dari rencana pembangunan lain yang telah lebih dulu ditetapkan atau secara hierarki lebih tinggi. Keterpaduan rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi hal yang mutlak dilakukan demi pencapaian kualitas pembangunan di suatu kawasan/daerah.

RTR memberikan arahan pembangunan yang berimplikasi pada keruangan untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia. RTR adalah acuan bagi pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan yang memerlukan ruang melalui kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah. RTR terdiri atas: (1) rencana umum seperti RTRWN, RTRWP dan RTRWK; (2) rencana rinci seperti RTR Pulau, RTR KSN dan RDTR Kabupaten dan Kota.

Rencana Pembangunan menguraikan kebijakan dan program. Kebijakan dan program yang membutuhkan ruang yang diakomodir dalam RTR. Rencana Pembangunan Daerah disusun secara mandiri oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan sasaran nasional mengikuti skema yang disusun berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sedangkan RTR disusun secara hirarkis dari RTRWN, RTRWP dan RTRWK. RTRWK harus memperhatikan kepentingan nasional dan provinsi, terutama perencanaan KSN dan KSP. Rencana Pembangunan Daerah menentukan fokus (target sektoral) pembangunan, sedangkan RTR menentukan lokus (lokasi) pembangunan yang dilakukan oleh sektor.

Gambar 1.3.
Keterkaitan Lingkup RTRW dengan RPJMD



Rencana struktur ruang Provinsi Bengkulu adalah rencana kerangka tata ruang wilayah yang tersusun dari keterkaitan pusat-pusat kegiatan pelayanan (atau disebut juga sistem perkotaanyang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) yang berhierarki satu sama lain dan terhubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi untuk mengintegrasikan wilayah provinsi.

Pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi Bengkulu merupakan pusat pertumbuhan wilayah terdiri atas pusat kegiatan nasional (PKN) dan pusat kegiatan wilayah (PKW) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2017 beserta pusat kegiatan lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten.

4. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RPJMD mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD.

Tabel 1.4.
Keselarasan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan KLHS

No.	RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	Isu Strategis KLHS RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
1.	MISI 1: Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif	1. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, keagamaan, ruang terbuka hijau, persampahan, pasar. 2. Kurangnya ketersediaan fasilitas/infrastruktur penunjang ekonomi, akses pemodalan dan hilirisasi produk. 3. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kegiatan pemerintahan.
2.	MISI 2: Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan	1. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam akibat perubahan iklim, kerusakan kawasan lindung dan alih fungsi lahan. 2. Penurunan kualitas dan kuantitas DDDT-LH akibat pencemaran dari berbagai sumber.
3.	MISI 3: Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik	Belum optimalnya penerapan dan penyelenggaraan *e-government* dan tata kelola pemerintahan yang bersih, bermartabat dan bebas korupsi.
4.	MISI 4: Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya,	Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

No.	RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	Isu Strategis KLHS RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
	toleransi dan religius	
5.	MISI 5: Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta kelompok disabilitas secara terpadu	Rendahnya ketersediaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sesuai Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dokumen RPJMD memuat visi dan misi kepala daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bentuk respon terhadap janji politik dan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diwujudkan melalui penetapan program serta kegiatan prioritas daerah. RPJMD menjadi tolak ukur pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui RENSTRA PD. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur diukur dari pencapaian target RPJMD. Seluruh program prioritas selama lima tahun yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA PD.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulun Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu periode masa pemerintahan tahun 2021-2024 kedalam tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah serta program prioritas pembangunan daerah.
2. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis lima tahunan berupa program dan kegiatan yang mendukung

pencapaian prioritas RPJMD serta kinerja pelayanan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam dokumen RENSTRA PD.

3. Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu.
4. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
5. Merupakan instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah dan prioritas nasional.
6. Menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota se-Bengkulu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi program strategis pemerintah provinsi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.
7. Sebagai pedoman bagi *stakeholder* khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
8. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Provinsi Bengkulu berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.

1.5. Sistematika Dokumen

Adapun sistematika dokumen penyempurnaan RPJMD Provinsi Bengkulun Tahun 2021-2026 seusai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan penyempurnaan RPJMD Provinsi Bengkulun Tahun 2021-2026.

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan penyempurnaan RPJMD Provinsi Bengkulun Tahun 2021-2026.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RPJMD Teknokratik Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulun Tahun 2021-2026.

1.5. Sistematika

Memuat sistematika dokumen RPJMD Provinsi Bengkulun Tahun 2021-2026.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1. Aspek Demografi dan Geografi

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Pelayanan Umum urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.2. Pelayanan Umum urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang kondisi pengelolaan keuangan daerah saat ini, asumsi-asumsi perencanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Pada BAB III ini, struktur keuangan daerah menggunakan struktur sesuai PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

Menyajikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah sebagai dasar menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuandan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu

indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2021

BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

PROVINSI BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828). Pada awalnya, Provinsi Bengkulu merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sejak Tahun 1967, Provinsi Bengkulu mengalami beberapa kali pemekaran. Semula Provinsi Bengkulu terdiri dari 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota, akan tetapi sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), maka Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, dan 129 (seratus dua puluh sembilan) Kecamatan.

Provinsi Bengkulu terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Wilayah di bagian timur merupakan daerah berbukit-bukit yang merupakan bagian dari Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera dan bagian lainnya merupakan wilayah yang relatif datar. Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak di pantai barat Pulau Sumatera pada garis lintang 2°16´ - 3°31’ LS dan garis bujur 101°1´ - 103°41’ BT,sedangkan secara administratif berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat
2. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung.
3. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia.
4. Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun luas wilayahnya 32.225,24 Km² yang terdiri atas luas daratan lebih kurang 20.210,38Km² (dihitung berdasar hasil updating peta 2019) dan luas laut ± 11.667,6Km² (dihitung dari 12 Mil laut = 22,224 Km dikali panjang garis pantai 525 Km). Garis pantai sepanjang ± 525 km seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu. Dengan aturan 12 Mil Laut yang ditetapkan sebagai wilayah otoritas provinsi maka antara Pulau Enggano yang jarak lurusnya ke pantai Provinsi Bengkulu (pantai Manna) 120 Km (atau 64,79 Mil) terdapat wilayah yang di luar otoritas wilayah otonomi Provinsi Bengkulu seluas ± 52.332,4 Km² (525 X (120 – 22,224) Km). Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki pulau kecil yang berpenghuni yaitu Pulau Enggano, serta pulau-pulau lain yang tidak berpenghuni seperti Pulau Mega, Pulau Tikus, dan pulau-pulau kecil lainnya yang belum diberi nama.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Bengkulu dirinci menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/ kota	Luas darat (km²)	Ibukota
Kota			
1	Bengkulu	152,48	Bengkulu
Kabupaten			
1	Bengkulu Selatan	1.232,90	Manna
2	Rejang Lebong	1.554,52	Curup
3	Bengkulu Utara	4.498,32	Argamakmur
4	Kaur	2.611,32	Bintuhan
5	Seluma	2.452,24	Tais
6	Mukomuko	4.147,79	Mukomuko
7	Lebong	1.671,46	Tubei-Muaraaman
8	Kepahiang	752,38	Kepahiang
9	Bengkulu Tengah	1.136,97	Karang Tinggi
	Jumlah	**20.210,38**	

Sumber : Hasil hitung peta SHP hasil updating peta Provinsi Bengkulu, 2021

Keterangan :
Luas Pulau Enggano : 397.2 km²
Luas Pulau Mega : 3.1 km²
(kedua Pulau tersebut termasuk dalam wilayah administrasi Bengkulu Utara)

Berdasarkan luas wilayah, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten yang paling luas yang mencapai 4.498,32 km², atau sebesar 22,25% dari total wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan Kota Bengkulu memiliki wilayah terkecil dan menjadi satu-satunya kota administratif di Provinsi Bengkulu, yang juga menjadi Ibukota Provinsi.

Gambar 2.1
Peta Administratif Provinsi Bengkulu



Sumber : Raperda Perubahan RTRW Provinsi Bengkulu 2012-2032

Provinsi Bengkulu terdiri dari 129 Kecamatan dan 1.515 Desa/Kelurahan. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Provinsi Bengkulu Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Bengkulu Selatan	Manna	11	158
2	Rejang Lebong	Curup	15	156
3	Bengkulu Utara	Arga Makmur	19	220
4	Kaur	Bintuhan	15	195
5	Seluma	Tais	14	202
6	Mukomuko	Mukomuko	15	152
7	Lebong	Muara Aman	12	104
8	Kepahiang	Kepahiang	8	117
9	Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	10	143
10	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	9	67
J u m l a h			**129**	**1.514**

Sumber : *Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu, 2021.*

Secara geografis, Provinsi Bengkulu terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari utara ke selatan. Di sebelah Timur merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung, dan Samudera Indonesia di sebelah Barat serta dataran tinggi yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan dengan lebar ±50 Km. Dataran tinggi merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Provinsi Bengkulu memiliki bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai, dengan panjang garis pantai ±525 Km. Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat *(altitude)* berkisar antara 0-1.938 meter di atas permukaan laut (dpl). Titik terendah dijumpai di sepanjang pantai sedang titik tertinggi terletak di Puncak Gunung Kaba. Ditinjau berdasarkan kelas ketinggian tempat, maka wilayah Provinsi Bengkulu dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Wilayah dengan ketinggian tempat 0 - 250 m dpl, meliputi areal seluas 976.624 ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan dataran *aluvium*;

b. Wilayah dengan ketinggian tempat >250 - 500 m dpl, meliputi areal seluas 338.365 ha yang menyebar disepanjang pantai dari utara sampai bagian selatan yang merupakan peralihan dari *aluvium* ke perbukitan;

c. Wilayah dengan ketinggian tempat >500 - 750 m dpl, meliputi areal seluas 228.881 ha yang menyebar disebagian besar Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong;

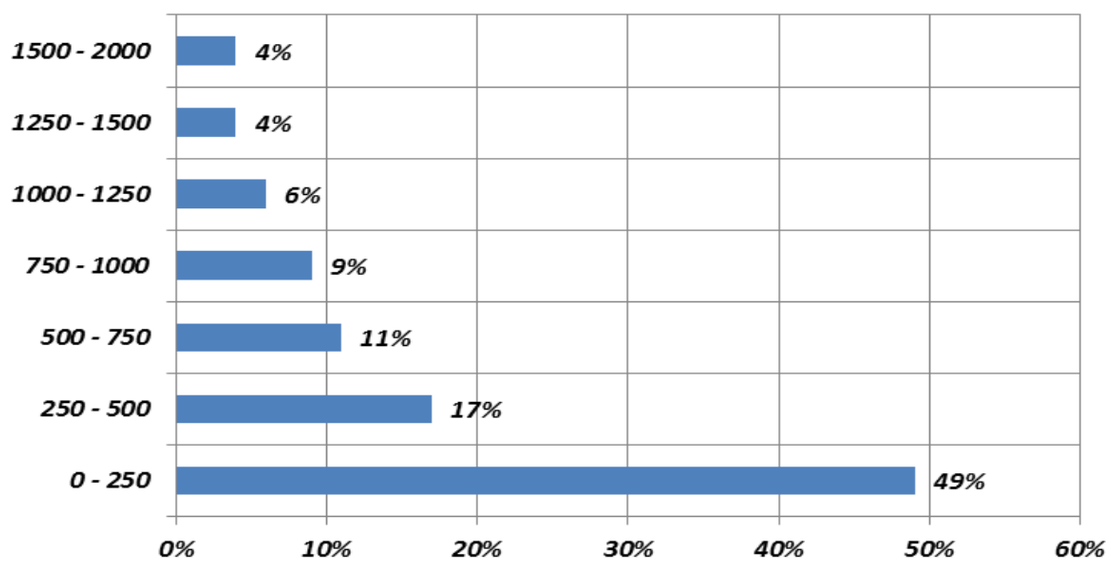
d. Wilayah dengan ketinggian tempat >750 - 1000 m dpl, meliputi areal seluas 181.548 ha yang menyebar di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Kaur yang merupakan Taman Nasional;

e. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.000 - 1.250 m dpl, meliputi areal seluas 128.664 ha di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan yang merupakan Taman Nasional;

f. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.250 - 1.500 m dpl, meliputi areal seluas 78.630 ha yang sebagian besar menyebar di sepanjang bagian bawah pegunungan bukit barisan di Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kaur;

g. Wilayah dengan ketinggian tempat >1.500 - 2.000 m dpl, meliputi areal seluas 70.338 ha yang merupakan puncak gunung-gunung di sepanjang pegunungan Bukit Barisan.

Gambar 2.2
Ketinggian Tempat di Provinsi Bengkulu



Sumber : *Bengkulu Dalam Angka Tahun 2020.*

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 6020/MenLhk-PKTL/kuh/pla.2/II/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor SK. 784/Menhut-II/2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu menetapkan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Seluas ± 924.144,8 hektar. Jika dirinci menurut fungsinya maka luasan masing-masing fungsi itu adalah sebagai berikut:

a) Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 462.478,8 hektar ;

b) Kawasan Hutan Lindung (HL) seluas ± 250.750 hektar ;

c) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 173.280 hektar ;

d) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 25.873 hektar ;

e) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), seluas ± 11.763 hektar.

Tabel 2.3
Luas Hutan Menurut Fungsinya di Provinsi Bengkulu

No	Fungsi / Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan (Ha)
A	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam	462.478,80
	- Cagar Alam	4,266.44
	- Taman Nasional	412,325.00
	- Taman Wisata Alam	27,175.36
	- Taman Hutan Raya	1,748.00
	- Taman Buru	16,962.00
B	Kawasan Hutan	461.666,00
	- Hutan Lindung	250.750,00
	- Hutan Produksi Terbatas	173.280,00
	- Hutan Produksi Tetap	25.873,00
	- Hutan Fungsi Khusus	11.763,00
Jumlah		**924,144.80**

Sumber : SK Menhut No. 6020/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2017

Kawasan hutan Provinsi Bengkulu tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luasan arealnya bervariasi menurut fungsinya. Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Bengkulu yang telah terbentuk yakni:

a) KPHP Bengkulu Utara Unit II, seluas ± 52.351 ha.
b) KPHL Lintas Kabupaten Unit III, seluas ± 96.125 ha.
c) KPHL Seluma Unit IV, seluas ± 82.242 ha.
d) KPHL Bengkulu Selatan Unit V, seluas ± 48.686 ha.
e) KPHL Kaur Unit VI, seluas ± 78.232 ha.
f) KPHL Bukit Balai Rejang Unit VIII, seluas ± 324.935 ha.

Kawasan hutan dengan masing-masing fungsi, baik konservasi, lindung, maupun produksi tersebut tersebar di Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Mukomuko. Adapun luas kawasan hutan yang paling besar termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Mukomuko yaitu seluas 228.378,06 ha.

Tabel 2.4
Luas Kawasan Hutan Per Kabupaten / Kota
di Provinsi Bengkulu sampai 31 Oktober Tahun 2017 (Hektar)

Kabupaten/ Kota	Kawasan Suaka Alam/ Pelestarian Alam					Hutan Produksi			
	Taman Nasional	Cagar Alam	Taman Wisata Alam	Taman Buru	Taman Hutan Raya	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan produksi dpt dikonservasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Bengkulu Selatan	0,00	0,00	8,72	0,00	586,01	32.756,20	14.244,64	1.704,23	0,00
2. Rejang Lebong	25.813,93	0,60	6.677,90	0,00	0,00	20.830,41	125,36	0,00	0,00
3. Bengkulu Utara	72.973,56	2.656,91	6.469,27	7.754,79	0,00	44.584,13	45.305,98	9.762,60	8.877,25
4. Kaur	66.483,10	0,0	77,82	0,00	0,00	44.593,4	31.565,40	2069,40	0,00
5. Seluma	0,00	748,60	0,00	5.415,13	0,00	66.527,61	15.708,58	0,00	0,00
6. Mukomuko	148.649,93	116,42	25.051,15	0,00	0,00	0,00	63.356,29	11.318,83	2.885,43
7. Lebong	98.404,10	154,10	2.724,46	0,00	0,00	17.557,60	46,68	0,00	0,00
8. Kepahiang	0,00	8,83	8.448,09	0,00	0,00	9.244,96	0,00	0,00	0,00
9. Bengkulu Tengah	0,00	3,74	0,00	3.792,40	1.161,73	18.427,65	2.927,23	1.017,73	0,00
10. Kota Bengkulu	0,00	577,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH (924.144,8)	**412.325**	**4.266,44**	**27.175,36**	**16.962**	**1.748**	**250.750**	**173.280**	**25.873**	**11.763**

Sumber : SK Menhut No. 6020/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2017

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

A. Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian memberikan peran penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2019 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu adalah 27,78 persen dengan nilai nominal 5.135,55 milyar rupiah (atas dasar harga berlaku). Cakupan kegiatan pertanian terdiri beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan.

Tabel 2.5
Luas Areal Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Nama Kab/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Bengkulu Selatan	9.887	10.653	10.527	8.149	8.103
Rejang Lebong	9.841	9.841	9.841	5.556	5.556
Bengkulu Utara	11.088	10.696	9.729	5.560	5.560
Kaur	8.062	5.951	5.951	6.313	6.313
Seluma	15.291	14.263	14.263	14.263	14.263
Muko-muko	7.020	8.972	8.625	6.233	3.849
Lebong	9.578	9.566	9.594	9.008	9.009
Kepahiang	5.225	5.205	5.205	5.108	5.204
Bengkulu Tengah	6.025	5.860	5.455	3.939	3.800
Kota Bengkulu	1.432	1.422	990	702	667
Total Provinsi	**83.449**	**82.429**	**80.179**	**64.830**	**62.324**

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

Pada tahun 2019, luas panen tanaman padi di Provinsi Bengkulu sebesar 64.406,86 hektar dengan produktivitasnya sebesar 46,03 kuintal/ hektar. Metode baru yang digunakan dalam penghitungan produksi padi adalah Kerangka Sampel Area. Berdasarkan survei tersebut, produksi padi di Provinsi Bengkulu sebesar 296.925 ton dan produksi berasnya 169.877,68 ton.

Tabel 2.6
Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2020

Kabupaten/ Kota	2019		2020	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton-GKG)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton-GKG)
Bengkulu Selatan	13.748,38	57.159	13.662	59.879
Rejang Lebong	5.567,60	28.018	5.182	28.757
Bengkulu Utara	5.897,22	25.992	5.111	22.354
Kaur	6.572,20	26.004	7.525	31.270
Seluma	11.850,35	44.508	11.629	41.672
Mukomuko	4.407,53	24.210	6.323	39.452
Lebong	9.444,06	58.244	8.222	41.768
Kepahiang	3.936,95	19.856	3.479	17.503
Bengkulu Tengah	2.025,29	7.525	1.787	7.985
Kota Bengkulu	957,28	4.957	1.217	6.284
JUMLAH	**64.406,86**	**296.472**	**64.137**	**296.925**

Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021.

Produksi padi di Provinsi Bengkulu sepanjang Januari hingga Desember 2020 sekitar 296.925 ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami kenaikan sekitar 453 ton dibandingkan 2019 yang sebesar 296.472 ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 55.985 ton sementara produksi terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 4.607 ton. Sama halnya dengan produksi pada 2020, produksi tertinggi pada 2019 terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 45.859 ton. Secara total luas panen dan produksi padi pada 2020 menurun dibandingkan 2019. Jika dilihat menurut subround, terjadi peningkatan produksi pada subround Mei-Agustus dan September-Desember 2020, yaitu masing-masing sebesar 8.541 ton GKG (9,09 persen) dan 41.643 ton GKG (74,80 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2019. Kenaikan produksi tersebut disumbang oleh kenaikan luas panen yang terjadi pada subround Mei-Agustus yang sebesar 2.697 hektar (13,14 persen) dan pada subround September-Desember yang sebesar 9.318 hektar (75,84 persen). Sementara itu, penurunan produksi padi hanya terjadi pada *subround* Januari-April, yakni sebesar 53.823 ton GKG (36,65 persen).

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, kenaikan produksi padi yang relatif besar pada 2020 terjadi di Kabupaten Mukomuko dan Kaur. Tiga kabupaten/kota dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2020 adalah Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma dan Lebong. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah adalah Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu.

B. Perkebunan

Sub sektor perkebunan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian di Provinsi Bengkulu terutama sebagai penghasil devisa, penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap produk domestik bruto. Dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lainlain. Pada tahun 2019, kelapa sawit, karet, dan kopi merupakan komoditas unggulan dengan produksi masing-masing 776.590 ton, 99.260 ton, dan 62.490 ton.

Tabel 2.7
Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Bengkulu (dalam Ton) Tahun 2018-2019

Kabupaten/ Kota	2018					2019				
	Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao
Bengkulu Selatan	36.840,00	885,00	2.801,00	2.044,00	530,00	38.460	1.270	2.420	2.040	520
Rejang Lebong	986,00	181,00	4.696,00	15.919,00	245,00	1.150	180	4.490	17.980	220
Bengkulu Utara	77.943,00	1.703,00	34.615,00	3.574,00	910,00	78.350	2.130	33.430	3.750	2.060
Kaur	16.000,00	3.164,00	11.000,00	6.021,00	925,00	19.570	3.330	12.400	6.190	1.250
Seluma	71.687,00	1.322,00	25.695,00	4.882,00	464,40	71.590	1.320	25.610	4.870	460
Mukomuko	502.345,00	391,00	8.417,00	50,17	1,45	533.850	390	8.040	40	0
Lebong	62,00	185,00	1.228,00	4.995,00	165,00	60	180	1.500	5.000	170
Kepahiang	230,00	128,00	53,00	19.236,00	9,00	249	130	50	19.130	10
Bengkulu Tengah	23.500,00	1.105,00	11.295,00	3.494,00	30,00	23.780	1.070	11.270	3.490	30
Kota Bengkulu	6.173,00	116,00	42,00	2,68	8,00	7.560	120	40	0	10
JUMLAH	**735.766,00**	**9.180,00**	**99.842,00**	**60.217,85**	**3.287,85**	**776.590**	**10.110**	**99.260**	**62.490**	**4.730**

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Bengkulu Dalam Angka Tahun 2020.

Tabel 2.8
Jumlah Petani, Luas Areal, Produksi dan Produksi Rata-Rata Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Bengkulu Tahun 2019

Jenis Tanaman	Petani (KK)	Keadaan Tanaman-Conditions of Plant (Ha)				Produksi - (Ton)	Produksi Rata-Rata (Kg/Ha)
		TBM	TM	TTM/TR	Jumlah		
Kelapa Sawit	7.122	1.439	7.562	-	9.001	23.500	3.108
Karet	7.931	1.959	8.503	35	10.497	11.295	1.328
Kopi Robusta	2.607	159	4.252	-	4.411	3.190	750
Kopi Arabika	345	-	300	-	300	304	1.013
Kakao	595	-	281	-	281	30	107
Kelapa	290	-	1.113	-	1.113	1.105	993
Lada	133	-	100	-	100	62	620
Cengkeh	-	-	-	-	-	-	-
Aren	12	-	7	-	7	6	857
Kayu Manis	160	6	74	-	80	62	886
Pinang	1.550	-	469	-	469	551	1.175
Kapuk	21	-	15	-	15	5	333
Kemiri	63	-	40	-	40	10	250
Panili	-	-	-	-	-	-	-
Pala	35	6	8	-	14	3	375
Jarak Pagar	15	-	-	-	-	-	-
Jumlah	**20.879**	**3.569**	**22.724**	**35**	**26.328**	**40.123**	**11.795**

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

Keterangan TBM : Tanaman Belum Menghasilkan
TM : Tanaman Menghasilkan
TTM/TR : Tanaman Tidak Menghasilkan/Tanaman Rusak

C. Pertambangan dan Industri

Subsektor pertambangan juga merupakan subsektor yang kecil peranannya dalam perekonomian Provinsi Bengkulu seperti terlihat dari relatif rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu. Selama waktu 2015-2020 peranan subsektor pertambangan dalam PDRB rata-rata berkisar di 3,27 persen saja per tahun. Rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam perekonomian disebabkan belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di bumi Provinsi Bengkulu. Jumlah perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) aktif di Provinsi Bengkulu tahun 2020 berjumlah 191 IUP.

Batubara merupakan hasil tambang unggulan pada subsektor pertambangan di Provinsi Bengkulu. Hingga kini produksi batubara di

Provinsi Bengkulu diperkirakan mencapai 3,7 juta ton. Pada tahun 2019 sebanyak 1,1 juta ton batubara Provinsi Bengkulu ditujukan untuk penjualan pasar dalam negeri, sisanya di ekspor ke negara lain. Seiring dengan terus meningkatnya produksi batubara, total volume ekspor batubara Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 mencapai 2,34 juta ton, ini mencapai 61,58% dari jumlah seluruh penjualan.

Tabel 2.9
Produksi dan Penjualan Batubara menurut Kabupaten/Kota (ton)
Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Produksi	Penjualan		
		Luar Negeri	Dalam Negeri	Jumlah Penjualan
Bengkulu selatan	-	-	-	-
Rejang Lebong	-	-	-	-
Bengkulu Utara	2.400.167,21	1.059.987,18	1.120.205,82	2.180.193
Kaur	-	-	-	-
Seluma	34.280,76	17.205,43	7.429,79	24.635,22
Muko-muko	-	-	-	-
Lebong	-	-	-	-
Kepahiang	-	-	-	-
Bengkulu Tengah	784.721,64	598.392,53	214.481,74	812.874,27
Kota Bengkulu	-	-	-	-
Bengkulu	**3.219.169,61**	**1.675.585,14**	**1.342.117,35**	**3.017.702,49**

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

Potensi tambang di Provinsi Bengkulu meliputi batubara, pasir besi, serta emas dan mineral pengikutnya. Kegiatan eksploitasi tambang batubara berada di Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma. Di Kabupaten Bengkulu Utara kegiatan eksplorasi batubara berada di beberapa wilayah seperti Kecamatan Ketahun, Kecamatan Batik Nau dan Kecamatan Lais. Sementara di Kabupaten Bengkulu Tengah eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Air Napal, Kecamatan Karang Tinggidan Kecamatan Taba Penanjung. Di Kabupaten Seluma eksplorasi batubara berada di wilayah kecamatan Sukaraja, Kecamatan Seluma danKecamatan Talo. Di Kabupaten Bengkulu Selatan eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Kedurang. Di Kabupaten Kaur eksplorasi batubara berada di wilayah Kecamatan Kaur Utara.

Kegiatan pertambangan pasir besi di Provinsi Bengkulu, pada umumnya terdapat di kawasan pantai barat yang tersebar di beberapa wilayah di masing-masing Kabupaten. Sedangkan untuk potensi tambang emas dan mineral pengikutnya (dmp), telah dikeluarkan beberapa SIPP (Surat Ijin

Penyelidikan Pendahuluan) di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.

Hingga waktu ini di Provinsi Bengkulu belum terbangun kawasan industri, oleh karena itu, PT. Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) bersama dengan pemerintah Provinsi Bengkulu sedang merancang pembangunan kawasan industri baru yang terintegrasi dengan Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu. Untuk itu, area lahan seluas 700 hektar di sisi timur dermaga samudra pelabuhan Pulau Baai disiapkan untuk pembangunan enam jenis hasil industri yang rencananya akan dimulai pada awal tahun 2019.

Enam kategori industri yang akan dibangun itu antara lain industri produk turunan minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) terdiri atas 14 jenis produk makanan, kosmetik, dan minyak goreng. Selain itu, juga akan dibangun industri produk turunan batu bara, kayu, kopi, karet dan lain- lain. Operasional industri yang dibangun itu seiring dengan selesainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di dekat pelabuhan Pulau Baai dengan kapasitas listrik yang akan dialirkan sebesar 2x100 mega watt. PLTU yang dibangun dengan sistem investasi murni perusahaan berbendera Tiongkok ini sedang dalam proses pengerjaan fisik dan diperkirakan akan menyuplai aliran listrik pada akhir 2018.

Dampak positif yang diharapkan dalam pembangunan kawasan industri baru ini adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi makro dan penyerapan tenaga kerja setiap 100 hektar industri baru sedikitnya 10.000 orang pekerja. Sehubungan dengan itu, jika tahap awal akan dibangun 215 hektar kawasan industri, maka akan dapat terserap tenaga kerja sebanyak 21.500 orang. Selain itu, sekitar pelabuhan-pelabuhan yang ada di pesisir Barat Provinsi Bengkulu sedang direncanakan dan sudah ditetapkan kawasan peruntukan industri termasuk di luar kawasan Pelindo Pulau Baai dalam Kota Bengkulu yaitu pada koridor kiri kanan jalan antara Terminal Betungan dan Simpang Kandis yang termasuk wilayah Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu.

D. Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan di Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang cukup besar, terutama perikanan laut. Hal ini disebabkan letak wilayah yang sebagian besar menghadap ke Samudera Hindia dengan panjang pantai mencapai 525 km yang terbentang sepanjang sebelah Barat dari 6 (enam) kabupaten dan sebelah Barat Kota Bengkulu. Maka potensi sektor kelautan yang terdapat di sebelah Barat Provinsi Bengkulu adalah seluas ±194.460 km2 dihitung berdasar lebar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut (22,224 Km) dikali panjang pantai ± 525 Km.

Wilayah Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia menunjukkan besarnya potensi perikanan yang besar. Disamping berasal dari laut, produksi ikan juga diperoleh dari pengembangan budidaya perikanan. Produksi perikanan tangkap di Provinsi Bengkulu dibagi menjadi tiga yaitu perikanan tangkap di laut, perikanan perairan umum daratan. Pada tahun 2018, produksi perikanan yang terbesar berasal dari perikanan tangkap dengan produksi sebesar 69.105 ton dengan nilai 2,471 miliar.

Tabel 2.10
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penangkapan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Perikanan Tangkap Laut		Perikanan Tangkap Daratan	
	Volume (ton)	Nilai (x ooo Rp)	Volume (ton)	Nilai (x ooo Rp)
Bengkulu selatan	1.968	60.511.164	78	2.593.915
Rejang Lebong	–	–	93	2.691.249
Bengkulu Utara	5.467	195.626.088	216	5.851.505
Kaur	4.124	100.677.685	306	8.419.640
Seluma	2.143	64.055.020	250	11.910.147
Mukomuko	20.277	825.918.780	266	7.396.540
Lebong	–	–	114	3.233.280
Kepahiang	–	–	213	5.259.100
Bengkulu Tengah	1.603	54.426.545	140	3.554.505
Kota Bengkulu	35.247	1.324.929.804	244	7.158.140
Bengkulu	**70.829**	**2.626.145.086**	**1.921**	**58.068.021**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021.

Tabel 2.11
Potensi, Produksi, Tingkat Pemanfaatan dan Peluang Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

Jenis Kegiatan	Luas Potensi	Luas	Produksi Lestari	Tingkat Pemanfaatan		Peluang	
		Potensi Lestari	(Ton/Ha)	Ton	(%)	Ton	(%)
Perikanan Laut	(0-200 Mil)	1.166.760	67.299	67.299	673,00	70.804	708,00
Perairan Umum	73.790 Ha	49.506	1.805	1.805,94	18,05	118.961	1.189

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Tabel 2.12
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Jenis Ikan	Produksi (ton)	Nilai (000 Rp)
1.	Cakalang	1.590	35.665.230
2.	Tongkol	4.394	87.826.396
3.	Tuna	1.448	34.481.590
4.	Udang	14.275	874.692.860
5.	Lainnya	49.121	1.593.479.010
	Total	**70.829**	**2.626.145.086**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021.

Perikanan tangkap di laut di Provinsi Bengkulu memiliki nilai mencapai 2,6 triliun rupiah dengan potensi sebesar 70.829 ton. Komoditas terbesar di perikanan tangkap laut adalah udang yang mencapai 14.275 ton. Sedangkan komoditas yang memiliki nilai terbesar adalah komidtas lainnya sebesar 1,5 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa perairan laut Provinsi Bengkulu didominasi oleh udang sepanjang tahunnya. Nilai dalam Rupiah tertinggi untuk potensi hasil tangkapan perairan laut lainnya di Provinsi Bengkulu adalah Tenggiri, Bawal, Kerapu, Kakap, Kepiting dan Cumi-cumi meskipun potensi hasil tangkapannya kecil. Hal tersebut dikarenakan jenis-jenis ikan tersebut adalah ikan yang bernilai ekonomis tinggi.

Tabel 2.13
Produksi dan Nilai produksi perikanan Budidaya di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Jenis Ikan	Potensi (ton)	Nilai (000 Rp)
1.	Gurame	-	-
2.	Patin	14.430	319.220.560

No	Jenis Ikan	Potensi (ton)	Nilai (000 Rp)
3.	Lele	35.150	744.639.075
4.	Nila	61.290	1.535.665.400
5.	Ikan Mas	30.588	946.939.920
6.	Rumput Laut	60	1.500.000
7.	Udang	10.713	763.532.000
8.	Bandeng	3	66.000

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021.

Berdasarkan data tersebut, volume produksi tertinggi pada sektor perikanan budidaya yaitu ikan Nila adalah 61.290 ton dengan nilai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Volume produksi terendah yaitu ikan bandeng yang hanya sebanyak 3 ton dengan nilai hanya 66 juta rupiah.

E. Pariwisata dan Budaya

Perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu harus didorong dengan pengembangan di bidang industri kepariwisataan, destinasi pariwisata, promosi serta kelembagaan pariwisata. Provinsi Bengkulu memiliki banyak potensi pesona wisata terutama wisata sejarah, wisata budaya, dan wisata alam yang beragam. Tipologi fisik dengan pegunungan dan pantai menawarkan keindahan alam yang khas dan unik.

Berikut ini merupakan beberapa objek wisata yang dimiliki Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: Kota Bengkulu; (1) Pantai Panjang (2) Danau Dendam Tak Sudah (3) Tapak Padri & Pantai Jakat, (4) Benteng Marlborough, (5) Rumah Peninggalan Bung Karno, (6) Monumen Parr & Hamilton (7) Makam Sentot Ali Basya (8) Masjid Jamik. Kabupaten Rejang Lebong; (1) Telaga 7 Warna (2) Air Terjun &Air Panas Suban, (3) Bukit Kaba. Kabupaten Lebong (1) Danau Tes. Kabupaten Bengkulu Utara; (1) Pantai Lais, (2)Air Terjun Kemumu, (3) Taman Nasional Kerinci Seblat, (4) Air Terjun 9 Tingkat, (5) Danau Gedang, (6) Peninggalan Kerajaan Balai Buntar. Kabupaten Bengkulu Selatan; (1) Pantai Pasar Bawah, (2) Danau Ulu Seginim, (3) Pantai Gunung Perak Mutiara Kedurang, (4) Air Sungai Manna. Kabupaten Mukomuko; (1) Pantai Indah, (2) Bendungan Air Manjunto. Kabupaten Kaur; (1) Pantai Muara Kedurang, (2) Pantai Linau. Kabupaten Seluma; (1) Air Terjun Batu Bekinyau, (2) Bendungan Seluma, (3) Pantai Seluma. Kabupaten Kepahiang; (1) Air Terjun Curug Embun Kabawetan, (2) Kebun Teh Kabawetan, (3) Cagar Alam Bunga Rafflesia. Kabupaten Bengkulu Tengah; (1) Pantai Sungai Suci

Saat ini jenis wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan mancanegara maupun domestik adalah wisata budaya berupa perayaan Tabot yang setiap tahunnya diagendakan pemerintah daerah dengan acara puncaknya setiap tanggal 10 Muharam Tahun Hijriah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kepariwisataan dilaksanakan secara lintas sektoral dan mendapat dukungan dari dinas/ instansi terkait melalui program *multi years* seperti penataan kawasan wisata pantai panjang, berupa pembuatan jalan dua jalur, *jogging track*, *sea wall*, *sunset deck*, *gazebo*, revitalisasi objek wisata sejarah, panggung terbuka, *sport center*, *view tower*, mess pemda, marina, dan lain-lain.

Daftar Objek Wisata di Provinsi Bengkulu

Objek wisata	Lokasi	Kabupaten/kota	Akses	Konektivitas /jaringan
Bahari				
Pantai Zakat	JL. Bencoolen	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Pantai Laguna	Merpas, Nasal	Kaur	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Pantai Linau	JL. Lintas Kaur-Lampung	Kaur	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Pantai Panjang	JL. Pariwisata	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Pantai Pasar Bawah	Pasar Bawah, Kota Manna	Bengkulu Selatan	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersdia
Pantai Sungai Suci	Pasar Pedati	Bengkulu Bengkulu Tengah	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Pantai Tapak Paderi	JL. Bencoolen	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Pantai Way Hawang	JL. Lintas Kaur-Lampung	Kaur	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Wisata Alam				
Danau Dendam Tak Sudah	JL. Danau	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Air Terjun Sembilan TIngkat	Argamakmur	Bengkulu Utara	Jalur Darat Untuk Kendaraan Mini Bus & Roda Dua	Tidak Tersedia
Tangga 1000	Desa Kemumu	Bengkulu Utara	Jalur Darat Untuk Kendaraan Mini Bus & Roda Dua	Tidak Tersedia
Danau Tes	Tes	Lebong	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Terbatas

Objek wisata	Lokasi	Kabupaten/kota	Akses	Konektivitas /jaringan
Arung Jeram	Sungai Ketahun	Lebong	Jalur Darat Untuk Kendaraan Mini Bus & Roda Dua	Terbatas
Danau Meenghijau (Mas Harun Bestari)	Curup	Rejang Lebong	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Bukit Kaba	Curup	Rejang Lebong	Jalur Darat Untuk Kendaraan Mini Bus & Roda Dua	Tersedia
Suban Air Panas & Air Terjun	Curup	Rejang Lebong	Jalur Darat Untuk Kendaraan Mini Bus & Roda Dua	Terbatas
Air Terjun Curug Embun	Kepahiang	Kepahiang	Jalur Darat Untuk Kendaraan Mini Bus & Roda Dua	Terbatas
Sejarah dan Budaya				
Fort Marlborough	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Rumah Bung Karno	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Rumah Ibu Fatmawati	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Event Festival Tabut (Bencoolen Tabut Festival)	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Event Festival Kain Besurek	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
Museum Bengkulu	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia
China Town /Kampung Tionghoa	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	Jalur Darat Untuk Semua Kendaraan	Tersedia

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Secara geomorfologi Provinsi Bengkulu mempunyai empat karakter utama yaitu dataran pantai yang membentang dari Kabupaten Mukomuko sampai Kabupaten Kaur, dataran *alluvial* dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Dengan kondisi ini, maka Provinsi Bengkulu termasuk wilayah yang rawan bencana, terutama untuk pulau-pulau kecil yang berada di Samudera Hindia seperti Pulau Enggano, Pulau Merbau, Pulau Tapak Balai dan lain-lain.

Posisi Provinsi Bengkulu yang berada di sebelah Barat Pulau Sumatera dalam tatanan geologi /tektonik merupakan daerah yang komplekstermasuk rawan dari bencana gempa bumi, tsunami karena berada pada daerah subduksi antara Lempeng India-Australia dan Lempeng Eurasia dan dilewati oleh Sesar Sumatera yang memanjang sepanjang Pulau Sumatera. Gunung Kaba merupakan salah satu gunung api yang masih aktif di Indonesia dan merupakan gunung api tipe A. Provinsi Bengkulu termasuk ke dalam wilayah rawan bencana gempa bumi dengan skala intensitasnya berkisar V-VII Skala MMI (MODIFIED MERCALLI INTENSITY). Adapun wilayah dengan kerawanan tinggi bencana gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Bengkulu, Kota Curup, serta Kota Kepahiang. Tatanan Geologi Pulau Sumatera terbagi dalam menjadi empat mendala tektonik yaitu : Zona Akrasi, Zona Busur Depan Sumatera, Zona Busur Magmatik Barisan dan Zona Busur Belakang Sumatera. Propinsi Bengkulu sebagian besar terletak di dalam lajur Busur Magmatik dan Zona Busur Depan Sumatera (lihat gambar berikut).

Ditinjau dari aspek kegempaan, Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 3 daerah zona yaitu zona rawan rendah, zona rawan menengah, dan zona rawan tinggi. Tercatat lebih dari 2207 titik pusat gempa dengan magnitude lebih dari 5 skala richter di sekitar Provinsi Bengkulu yang tersebar di Samudera Hindia dan sesar mendatar Sumatera yang berpotensi menjadi sumber gempa bumi. Pembagian zona daerah bahaya ini didasarkan kepada :

a) Zona Rawan Rendah berada di daerah dengan litologi dengan sifat fisik kompak / masif dan mempunyai nilai percepatan dan pemindahan relatif kecil.

b) Zona Rawan Menengah, resiko yang terjadi berhubungan dengan alur erosi dan longsoran selama gempa dan rayapan tanah setelah gempa, terjadi pada lereng yang kemiringannya lebih besar dari 15 %.

c) Zona Rawan Tinggi, didasari oleh endapan aluvium, endapan pasir pantai, rawa basah, dan daerah aliran sungai dengan potensi terjadi pelulukan (liquefaction) apabila terjadi gempa.

Tabel 2.14
Potensi Bencana Alam di Provinsi Bengkulu

No	Jenis Bencana	Lokasi	Keterangan
1	Banjir (Rawan Banjir)	Kota Bengkulu	Muara Bangkahulu
		Bengkulu Utara	Talang Empat
		Mukomuko	Mukomuko Utara
		Lebong	Lebong Selatan, Lebong Tengah

No	Jenis Bencana	Lokasi	Keterangan
		Kepahyang	Bermani Ilir
		Seluma	Ilir Talo, Sukaraja dan Air Periukan.
		Kaur	Kaur Selatan, Nasal, Tanjung Iman
2	Tanah longsor	Bengkulu Utara	Pagar Jati, Taba Penanjung, Karang Tinggi
		Mukomuko	Lubuk Pinang, Teras Terunjam, Pondok Suguh
		Rejang Lebong	Bermani Ulu Raya, Padang Ulak Tanding,
		Lebong	Lebong Selatan, dan Lebong Atas
		Kepahyang	Bermani Ilir
		Seluma	Ulu Talo, Talo, Seluma Utara dan Lubuk Sandi
		Bengkulu Selatan	Pino Raya, Ulu Manna, Kedurang Ilir
		Kaur	Nasal, Tanjung Iman, Tanjung Kemuning
3	Gunung Berapi	Rejang Lebong	Gunung Kaba
		Lebong	Gunung Belerang
4	Gempa bumi		Tercatat gempag dengan kekuatan terbesar mengguncang pada tanggal 20 Juni 2000 sekitar pukul 23.38 WIB kekuatan 7,3 SR dan hari Rabu tanggal 12 September 2007 sekitar pukul 18.10 WIB.

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu 2012-2032.

Provinsi Bengkulu ini juga rawan terhadap kebakaran hutan yaitu kebakaran yang tidak terkendali yang terjadi di daerah pedalaman atau hutan belantara. Kebakaran Hutan berbeda dengan kebakaran-kebakaran lainnya berdasarkan luasannya dan kecepatannya dikarenakan bisa menyebar luas jauh dari sumbernya, serta kemampuan menjalar api untuk berubah arah secara tak terduga dan melompat melewati jalan, sungai, dan fire breaks (sebidang tanah yang dibersihkan untuk mencegah meluasnya kebakaran). Kebakaran hutan yang menyebar dengan cepat bisa menyebabkan kerusakan besar, baik harta benda maupun kehidupan manusia, tetapi kebakaran tersebut juga mempunyai dampak yang menguntungkan bagi kawasan hutan belantara.Beberapa spesies tanaman menggantungkan pada dampak dari kebakaran untuk tumbuh dan reproduksi, namun sebagian besar kebakaran hutan mempunyai dampak negative terhadap ekologi.

2.1.1.4. Demografi

Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Cakupan demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan data proyeksi Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2018 adalah sebanyak 1.963.300 jiwa yang terdiri atas 1.000.644 jiwa penduduk laki-laki dan 962.656 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bengkulu, 2017-2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk			
		2017	2018	2019	2020*
1	Bengkulu Selatan	155.427	156.930	158.410	166.249
2	Rejang Lebong	258.763	259.945	260.900	276.645
3	Bengkulu Utara	298.757	304.386	310.000	296.523
4	Kaur	118.586	119.951	121.210	126.551
5	Seluma	189.874	191.907	193.800	207.877
6	Mukomuko	185.499	189.668	193.880	190.498
7	Lebong	113.042	114.789	116.610	106.293
8	Kepahiang	134.938	136.097	137.190	149.737
9	Bengkulu Tengah	111.318	113.147	114.700	116.706
10	Kota Bengkulu	368.065	376.480	385.140	373.591
Jumlah		**1.874.944**	**1.904.793**	**1.991.840**	**2.010.670**

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.
**Hasil Sensus Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2020*

Penduduk Provinsi Bengkulu berdasarkan senus penduduk tahun 2020 sebanyak 2.010.670 jiwa yang terdiri atas 1.029.137 jiwa penduduk laki-laki dan 981.533 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 1,55 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105. Distribusi penduduk terbesar di Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu sebesar 18,58% penduduk tinggal di Kota bengkulu. Wilayah kabupaten dengan penduduk terbanyak adalah di Kabupaten Bengkulu Utara, sebesar 14,85%, diikuti kabupaten Rejang Lebong sebesar 13,76%.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	63.600	58.706	122.306
2	5-9	94.177	87.721	181.898
3	10-14	96.098	89.486	185.584
4	15-19	92.370	87.385	179.755
5	20-24	90.397	85.705	176.102
6	25-29	82.400	81.290	163.690
7	30-34	86.026	83.911	169.937
8	35-39	84.896	82.670	167.566
9	40-44	81.320	76.292	157.612
10	45-49	64.907	63.628	128.535
11	50-54	56.483	54.100	110.583
12	55-59	45.962	43.256	89.218
13	60-64	36.102	32.780	68.882
14	65-69	21.709	19.068	40.777
15	70-75	11.577	12.710	24.287
16	75+	13.514	15.664	29.178
17	Tidak Tahu/TT	7.599	7.161	14.760
Jumlah		**1.029.137**	**981.533**	**2.010.670**

Sumber: Sensus Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Hasil analisa Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu terhadap Bonus Demografi menggunakan proyeksi Penduduk dari Sensus Penduduk tahun 2010, Provinsi Bengkulu telah memasuki apa yang disebut dengan Bonus Demografi pada tahun 2015 dan pada masa tahun tersebut di proyeksikan fertilitas pada 2,3 rata-rata anak per Wanita Usia Subur dan akan memasuki masa *Window Of Opportunity* pada tahun 2026 suatu kondisi dimana wilayah bersangkutan masyarakatnya maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera , rentang masa panjang dari 2015 sampai tahun 2026 harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pembangunan berwawasan kependudukan, hal ini disebabkan tingkat pendidikan, kemiskinan, fertilitas masih menjadi catatan garapan serius bagi pembangunan di Provinsi Bengkulu.Pada tahun 2029 akan terjadi peledakan penduduk usia lanjut (Lansia) atau *Population Aging Explosion*suatu kondisi

yang tidak menguntungkan bilamana Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak dapat memperbaiki kondisi terutama bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 dan 2020

No	Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)			Laju Pertumbuhan per tahun	
		(2010)[1]	(2010)[2]	(2018)[2]	(2009)-(2010)	(2010)-(2020)[2]
1	Bengkulu Selatan	142,9	143,4	166,25	1,19	1,47
2	Rejang Lebong	246,8	247,5	276,64	0,67	1,11
3	Bengkulu Utara	257,7	258,8	296,52	2,11	1,37
4	Kaur	107,9	108,3	126,55	1,35	1,56
5	Seluma	173,5	174,1	207,88	1,28	1,76
6	Mukomuko	155,8	156,5	190,50	2,50	1,97
7	Lebong	99,2	99,6	106,29	1,85	0,67
8	Kepahiang	124,9	125,3	149,74	1,10	1,77
9	Bengkulu Tengah	98,3	98,7	116,71	1,77	1,67
10	Kota Bengkulu	308,5	309,9	373,59	2,52	1,87
Jumlah		**1715,5**	**1722,1**	**2.010,67**	**1,67**	**1,55**

Sumber: Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021, SIPD diolah, 2021.

Catatan : [1] Hasil SP2010 (Mei)
[2] Hasil SP2020

Rasio jenis kelamin Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sebesar 105. Hal ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki. Dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu, hanya Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kota Bengkulu yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 105, masing-masing adalah: 104, 104, dan 102. Sementara Kabupaten Mukomuko, Seluma, Kepahiang memiliki rasio jenis kelamin paling tinggi yakni sebesar 107.

Tabel 2.18
Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2010 dan 2019

No	Kabupaten/Kota	Persentase penduduk		Kepadatan penduduk per km²	
		(2010)[1]	(2020)[2]	(2010)[1]	(2020)[2]
1	Bengkulu Selatan	8,33	8,27	121	140
2	Rejang Lebong	14,37	13,76	151	169

No	Kabupaten/Kota	Persentase penduduk		Kepadatan penduduk per km²	
		(2010)[1]	(2020)[2]	(2010)[1]	(2020)[2]
3	Bengkulu Utara	15,03	14,75	60	69
4	Kaur	6,29	6,29	46	53
5	Seluma	10,11	10,34	73	87
6	Mukomuko	9,09	9,47	39	47
7	Lebong	5,78	5,29	52	55
8	Kepahiang	7,28	7,45	188	225
9	Bengkulu Tengah	5,73	5,80	81	95
10	Kota Bengkulu	18,00	18,58	2.043	2.463
Provinsi Bengkulu		**100**	**100**	**86**	**101**

Sumber: Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021, SIPD diolah, 2021.

Catatan : [1] Hasil SP2010 (Mei)
[2] Hasil SP2020

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Jika dilihat dari perkembangan PDRB mulai tahun 2018-2020, kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun turun pada tahun 2020 akibat kotraksi yang disebabkan Pandemi Covid-19. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian disuatu daerah. Nilai PDRB Atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Provinsi Bengkulu dari tahun 2018-2020 untuk jelasnya dapat dilihat pada indikator dibawah ini.

Tabel 2.19
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020

Uraian	2018	2019	2020
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	66.412,90	72.143,37	73.336,58
PDRB ADHK 2010 (Miliar Rupiah)	44.171,16	46.362,33	46.338,44
PDRB perkapita ADHB (juta Rupiah)	33,82	36,20	36,31
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	4,94	-0,02

Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2020, SIPD diolah, 2020.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB pada tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2021 dimana pada tahun 2020 PDRB ADHB mencapai Rp.73.336,58 miliar, naik jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp.72.143,37 miliar. Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 terkontraksi jika dibandingkan dengan tahun tahun 2019 yang tumbuh sebesar 4,94% sedangkan pada tahun Tahun 2020 tumbuh minus 0,02%. Perlambatan ini diakibat oleh pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi.

Kondisi pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pandemi Covid-19 terjadi di lebih dari 200 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, di penghujung Maret 2020, Provinsi Bengkulu masuk dalam zona merah. Dampak Covid-19 terbesar adalah mengganggu proses produksi, distribusi, dan konsumsi akibat tingkat dan skema penularan virus yang menyerang aspek paling fundamental dari seluruh akivitas kita, yaitu interaksi fisik antarmanusia hingga memaksa kita menerapkan kebijakan *social/phsycal distancing*.

Sebagai instrumen utama penggerak aktivitas ekonomi, tentu ini akan sangat berdampak. Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,02 persen jika dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, penurunan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar minus 3,88 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, penurunan tertinggi dicapai komponen pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar minus 6,12 persen. Ekonomi Provinsi Bengkulu triwulan IV-2020 mengalami penurunan sebesar 2,39 persen bila dibandingkan triwulan IV-2019 (y-on-y). Dari sisi produksi, penurunan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar minus 9,34 persen. Dari sisi pengeluaran, penurunan tertinggi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar minus 8,02 persen.

Pada tahun 2019, tiga wilayah dengan tingkat PDRB tinggi di Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Lebong.

Tabel 2.20
PDRB ADHB per Kabupaten/KotaProvinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

No.	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020
1	Bengkulu Selatan	4.863,25	5.302,89	5.701	5.823,66
2	Rejang Lebong	7.935,67	8.685,05	9.370	9.537,39

No.	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020
3	Bengkulu Utara	6.960,99	7.609.32	8.253	8.416,08
4	Kaur	2.960,34	3.239,53	3.524	3.617,70
5	Seluma	3.840,99	4.509,14	4.603	4.743,64
6	Mukomuko	4.326,56	4.743,25	5.160	5.265,07
7	Lebong	2.854,02	3.092,44	3.346	3.400,86
8	Kepahiang	3.639,33	3.979,49	4.321	4.409,81
9	Bengkulu Tengah	3.871,70	4.253,68	4.607	4.672,10
10	Kota Bengkulu	19.244,91	21.228,16	23.201	23.501,82
	Provinsi Bengkulu	**60.658**	**66.413**	**72.143**	**73.336,58**

Sumber: Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021.

Perekonomian Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2020 tercatat mengalami kontraksi sebesar minus 0,02%, lebih rendah dari tahun 2019 yang sebesar 4,94%. Kota Bengkulu adalah wilayah dengan pertumbuhan PDRB terbesar di Provinsi Bengkulu mencapai 5,483 dan Kabupaten Seluma adalah yang terendah yaitu sebesar 4,95%.

Tabel 2.21
Pertumbuhan PDRB per Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bengkulu Selatan	5,32	5,01	4,95	4,99	0,26
2	Rejang Lebong	5,27	5,01	4,96	4,97	0,07
3	Bengkulu Utara	5,01	5,00	4,81	4,96	0,23
4	Kaur	5,34	5,11	4,97	5,00	0,12
5	Seluma	5,02	5,01	4,80	4,95	-0,01
6	Mukomuko	5,69	5,31	5,01	5,06	0,02
7	Lebong	5,21	5,14	5,01	4,98	0,10
8	Kepahiang	5,71	5,23	5,00	4,97	0,06
9	Bengkulu Tengah	5,04	5,02	4,97	4,98	-0,06
10	Kota Bengkulu	6,17	5,64	5,48	5,43	-0,25
	Provinsi Bengkulu	**5,28**	**4,98**	**4,99**	**4,94**	**-0,02**

Sumber: Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021, BPS, 2021.

B. PDRB Perkapita

PDRB Per kapita di Provinsi Bengkulu terus menunjukan peningkatan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara

PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Hal ini berarti nilai rata-rata pendapatan masyarakat Bengkulu terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2017, PDRB Per Kapita Provinsi Bengkulu adalah sebesar 31,3 juta rupiah pertahun, dan meningkat menjadi 36,2 juta rupiah pada tahun 2019.

Tabel 2.22
Nilai PDRB per Kapita Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

No.	Kab/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Per Kapita ADHB (Rp)	29.085. 842	31.359. 483,39	33.827. 176,20	36.219. 498,21	36,31 juta
2	PDRB Per Kapita ADHK (Rp)	21.043. 164	21.751. 636,19	22.498. 426,72	23.276. 153,56	23,05 juta

Sumber : Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021, BPS, 2021.

C. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Pada Februari 2021 Kota Bengkulu mengalami inflasi sebesar 0,14 persen, angka ini lebih tinggi dibanding kondisi Februari 2020 yang mengalami inflasi sebesar 0,09. Laju inflasi tahun kalender Februari 2021 sebesar 0,54 persen lebih tinggi dari bulan Februari 2020 dengan laju inflasi sebesar 0,23 persen. Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun pada Februari 2021 sebesar 2,59 persen lebih rendah dari bulan Februari 2020 sebesar 2,59 persen.

Tabel 2.23
Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2021

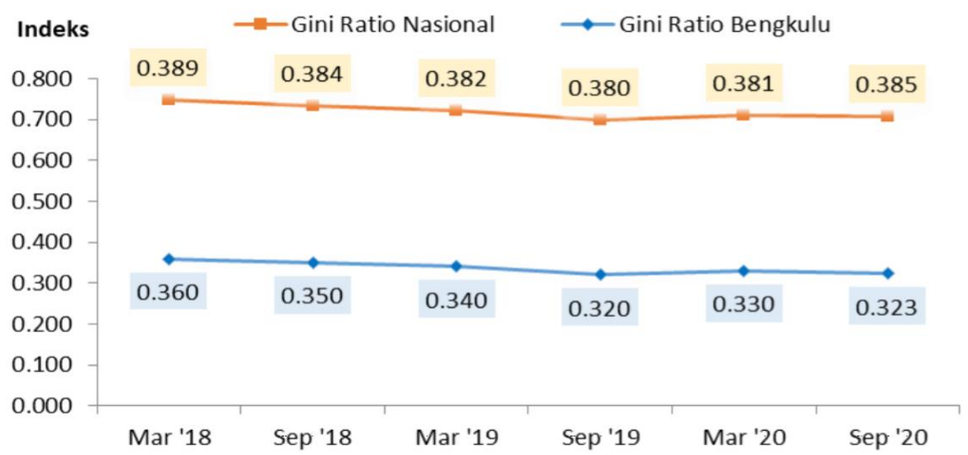
No.	Kab/Kota	2020	2021
1	Bulanan (Februari)	0,09	0,14
2	Tahun Kalender (Januari 2021-Februari 2021)	0,23	0,54
3	Tahunan (Februari 2020-Februari 2021)	2,59	1,20

S*umber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.*

D. Indeks Gini

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Indeks gini Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sebesar 0,323 menurun sebesar 0,003 dari tahun 2019 yang sebesar 0,320 .

Gambar 2.3
Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2020

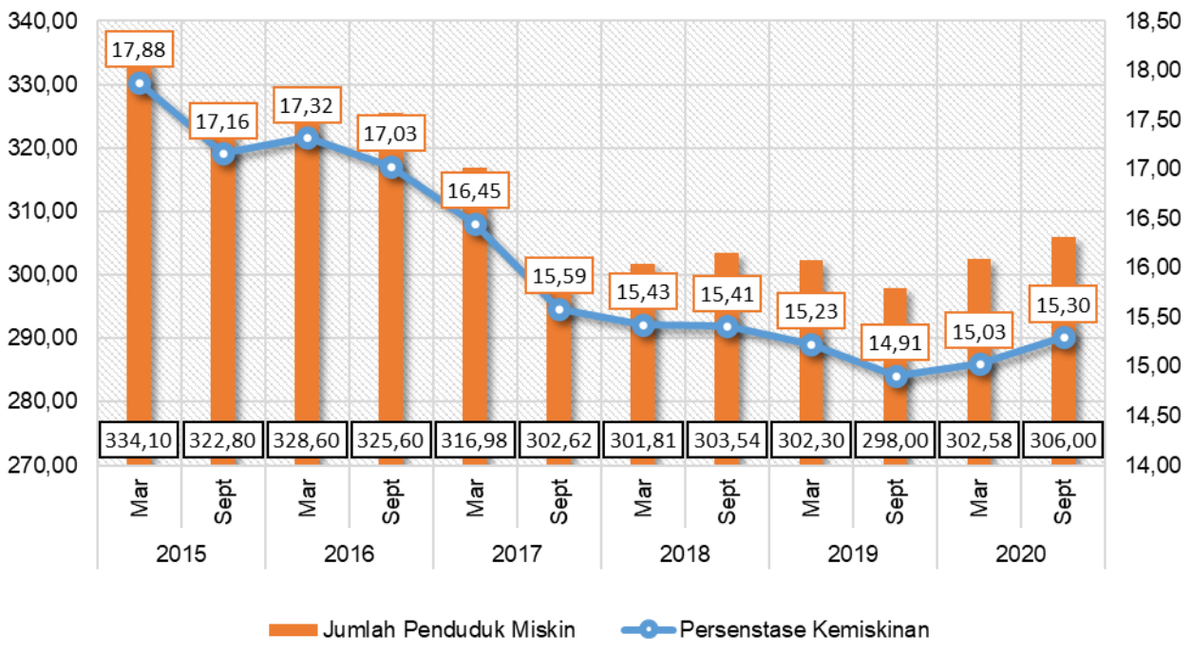


Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

E. Kemiskinan

Pada bulan September 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Bengkulu mencapai 305.997 orang (15,30 persen), naik sebesar 7.993 orang dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 298.004 orang (14,91 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 14,13 persen naik menjadi 15,06 persen pada September 2020. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2019 sebesar 15,30 persen naik menjadi 15,42 persen pada September 2020.

Gambar 2.4
Perkembangan Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2015 - 2020



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Pada periode September 2019-September 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2019 sebesar 2,01 dan pada September 2020 sebesar 2,51. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dari 0,45 menjadi 0,64 pada periode yang sama (Tabel 4). Begitu juga apabila dilihat pada periode Maret-September 2020 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami peningkatan yaitu dari 2,40 menjadi 2,51. IndeksKeparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan dari 0,56 menjadi 0,64.

Jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional secara agregat provinsi Bengkulu memang lebih rendah nilainya. Namun secara persentase penurunan selama kurun waktu 2015-2020 Provinsi Bengkulu lebih baik dari nasional. Pada tahun 2015 persentase kemiskinan nasional sebesar 11,22% dan tahun 2020 sebesar 9,78% atau turun sebesar 1,44% sedangkan Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu yang sama berhasil menurunkan kemiskinan hingga turun sebesar 2,14%.

Tabel 2.24
Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2013 – 2020

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Provinsi Bengkulu	18,34	17,48	17,88	17,32	16,45	15,43	15,23	15,30
Nasional	11,37	10,96	11,13	10,70	10,04	9,82	9,22	10,19

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

Tabel 2.25
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2013-2020

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bengkulu Selatan	22,59	21,91	22,76	22,10	21,06	18,65	18,54	17,82
Rejang Lebong	18,48	17,99	18,03	17,81	16,97	16,23	15,95	15,85
Bengkulu Utara	14,50	13,95	14,78	13,67	13,11	11,81	11,65	11,67
Kaur	23,25	21,96	22,87	22,36	21,54	19,40	18,89	18,47
Seluma	21,84	21,17	22,98	21,68	20,73	19,60	19,1	18,56
Mukomuko	12,98	12,48	13,45	13,01	12,20	11,40	11,7	11,72
Lebong	12,89	12,44	12,32	12,26	11,83	11,59	11,77	11,85
Kepahiang	16,13	15,65	16,83	16,31	15,95	14,42	14,74	14,69
Bengkulu Tengah	7,24	8,22	8,33	8,71	8,41	8,20	8,8	9,30
Kota Bengkulu	21,51	20,16	21,14	20,72	19,18	18,82	18,09	17,65

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

Dari data persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota tahun 2020 terlihat bahwa kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Seluma sebesar 18,56% dan terendah berada di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 9,30%.

Tabel 2.26
Kondisi Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	322,8	325,6	302,62	303,54	302,30	305,99
% Penduduk Miskin	17,16	17,73	15,59	15,41	15,23	15,30
Garis Kemiskinan	410,8	437,18	462,77	492,11	520.293	530,382

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
(000 Rp/kap/bln)						
Koefisien Gini	0,37	0,35	0,35	0,36	0,320	0,323

S*umber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.*

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Selama periode September 2019-September 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,94 % yaitu dari Rp 520,293,- per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp 530,382,- per kapita per bulan pada September 2020. Sementara pada periode Maret-September 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,64 persen, yaitu dari Rp 527.031,- per kapita per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp 530.382,- per kapita per bulan pada September 2020.

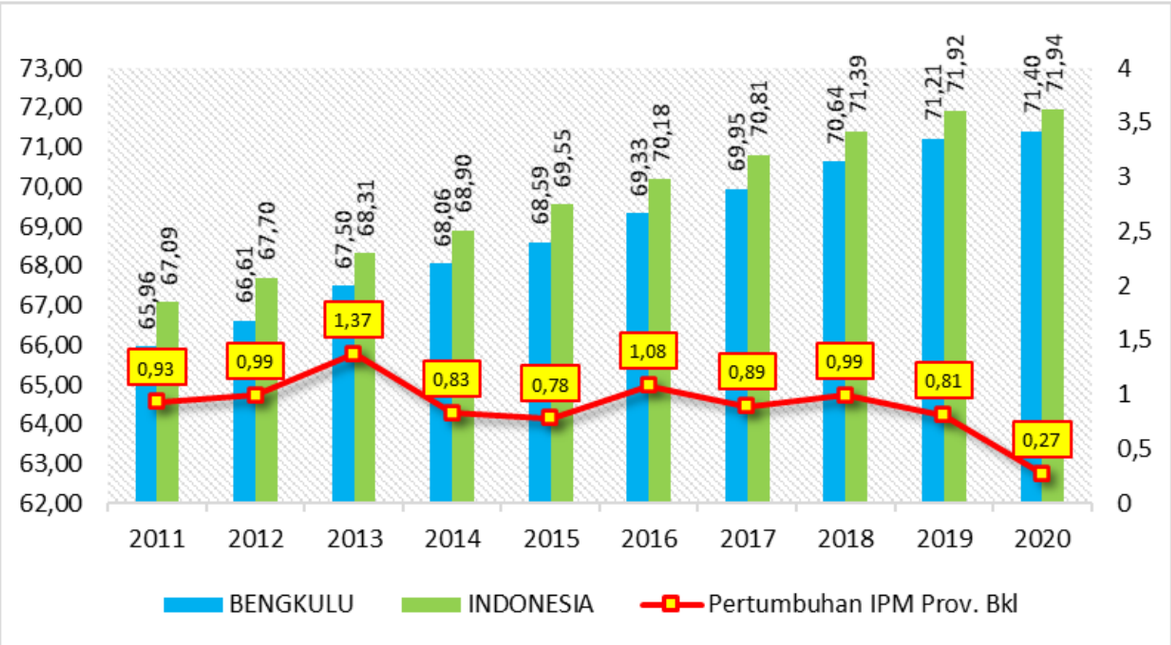
Angka Koefisien Gini merupakan ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien Gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol merupakan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmerataan sempurna. Indeks gini Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sebesar 0,323 meningkat sebesar 0,003 dari tahun 2019 yang sebesar 0,320.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Bengkulu terus mengalami kemajuan selama periode 2012 hingga 2020. IPM Provinsi Bengkulu meningkat dari 66,61 pada tahun 2012 menjadi 71,40 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Bengkulu rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Pada tahun 2018, IPM Provinsi Bengkulu berhasil masuk dalam kategori IPM TINGGI.

Gambar 2.5
Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2012-2020



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

Berdasarkan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu, IPM tertinggi dicapai oleh Kota Bengkulu sebesar 80,36. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kualitas hidup dengan kriteria pendidikan, kesehatan dan pendapatan di wilayah Kota Bengkulu lebih baik daripada wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Kabupaten dengan IPM terendah adalah Kabupaten Seluma, dengan indeks sebesar 66,89. Seluruh Kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu juga masuk dalam kategori wilayah dengan nilai IPM sedang, kecuali Kota Bengkulu yang sudah masuk kategori IPM TINGGI.

Tabel 2.27
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi Bengkulu
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 – 2020

Kab/Kota	IPM								Pertumbuhan 2019-2020
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Provinsi Bengkulu	**67,5**	**68,06**	**68,59**	**69,33**	**69,95**	**70,64**	**71,21**	**71,40**	**0,27**
Bengkulu Selatan	67,61	68,28	68,57	68,71	69,04	69,85	70,27	70,63	0,51
Rejang Lebong	66,11	66,55	67,51	68,34	68,61	69,40	70,10	70,44	0,49
Bengkulu Utara	66,67	67,27	67,46	67,63	67,80	68,36	68,80	68,82	0,03
Kaur	63,17	63,75	64,47	64,95	65,28	66,20	66,78	66,99	0,31
Seluma	62,1	62,94	63,41	64,04	65,00	65,99	66,69	66,89	0,30
Mukomuko	64,79	65,31	65,77	66,52	67,07	67,47	68,12	68,45	0,48
Lebong	63,15	63,9	64,72	65,58	65,87	66,28	66,84	67,01	0,25
Kepahiang	64,44	65,22	65,45	66,35	66,60	67,14	67,67	68,17	0,74
Bengkulu Tengah	63,71	64,1	64,68	65,44	65,80	66,65	67,30	67,61	0,46
Kota Bengkulu	76,16	76,49	77,16	77,94	78,82	79,67	80,35	80,36	0,01

S*umber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.*

G. Ketenagakerjaan

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu pada periode Agustus 2018–Agustus 2020 menunjukkan kondisi yang cukup mengkuatirkan. Hal itu tergambar dari meningkatnya tingkat pengangguran sedangkan disatu sisi jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan. Hal ini dirasakan akibat dampak Pandemi Covid-19 yang banyak mempemngaruhi iklim tenaga kerja Bengkulu akibat adanya PHK, *Work From Home* sampai ke pengurangan jam kerja pegawai

Pada Agustus 2020, Angkatan kerja di Provinsi Bengkulu pada Agustus 2020 sebanyak 1.075.682 orang, bertambah sebanyak 39.728 orang atau naik sebesar 3,83 persen dibandingkan Agustus 2019. Penduduk bekerja di Provinsi Bengkulu pada Agustus 2019 mencapai 1.031.881 orang bertambah sebanyak 29.720 orang atau naik sebesar 2,97 persen dibandingkan keadaan Agustus 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bengkulu pada Agustus 2020 mencapai 4,07 persen, mengalami kenaikan dibandingkan TPT Agustus 2019 sebesar 0,81 persen poin. Selama periode Agustus 2019-Agustus 2020, peningkatan penduduk bekerja tertinggi terjadi pada Lapangan

Pekerjaan Transportasi dan Pergudangan yang meningkat 19,37 persen atau bertambah sebanyak 4.623 orang. Sedangkan penurunan penduduk bekerja tertinggi terdapat di sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang turun sebesar 50,34 persen atau berkurang sebanyak 1.395 orang.

Tabel 2.28
Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020

Jenis Kegiatan Utama		Satuan	Agu 2018	Agu 2019	Agu 2020
1	Angkatan Kerja	Orang	1.022.150	1.035.954	1.075.682
	- Bekerja	Orang	987.914	1.002.161	1.031.881
	- Penganggur	Orang	34.236	33.793	43.801
2	TPAK	%	70,27	70,09	71,73
3	TPT	%	3,35	3,26	4,07

S*umber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.*

Struktur lapangan pekerjaan kondisi Agustus 2020 sedikit mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi Sektor Pertanian masih menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bengkulu. Sektor Pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 46,88 persen, sektor Perdagangan besar dan eceran menyerap tenaga kerja sebesar 16,33 persen, dan sektor Administrasi pemerintahan menyerap tenaga kerja sebesar 5,94 persen. Bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2019, beberapa sektor lapangan pekerjaan mengalami peningkatan dan penurunan penyerapan penduduk bekerja. Sektor-sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang turun sebesar 50,34 persen. Di sisi lain, sektor lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penyerapan penduduk bekerja tertinggi berada pada sektor Jasa transportasi dan Pergudangan yang meningkat sebesar 19,37 persen atau sebanyak 4.623 orang.

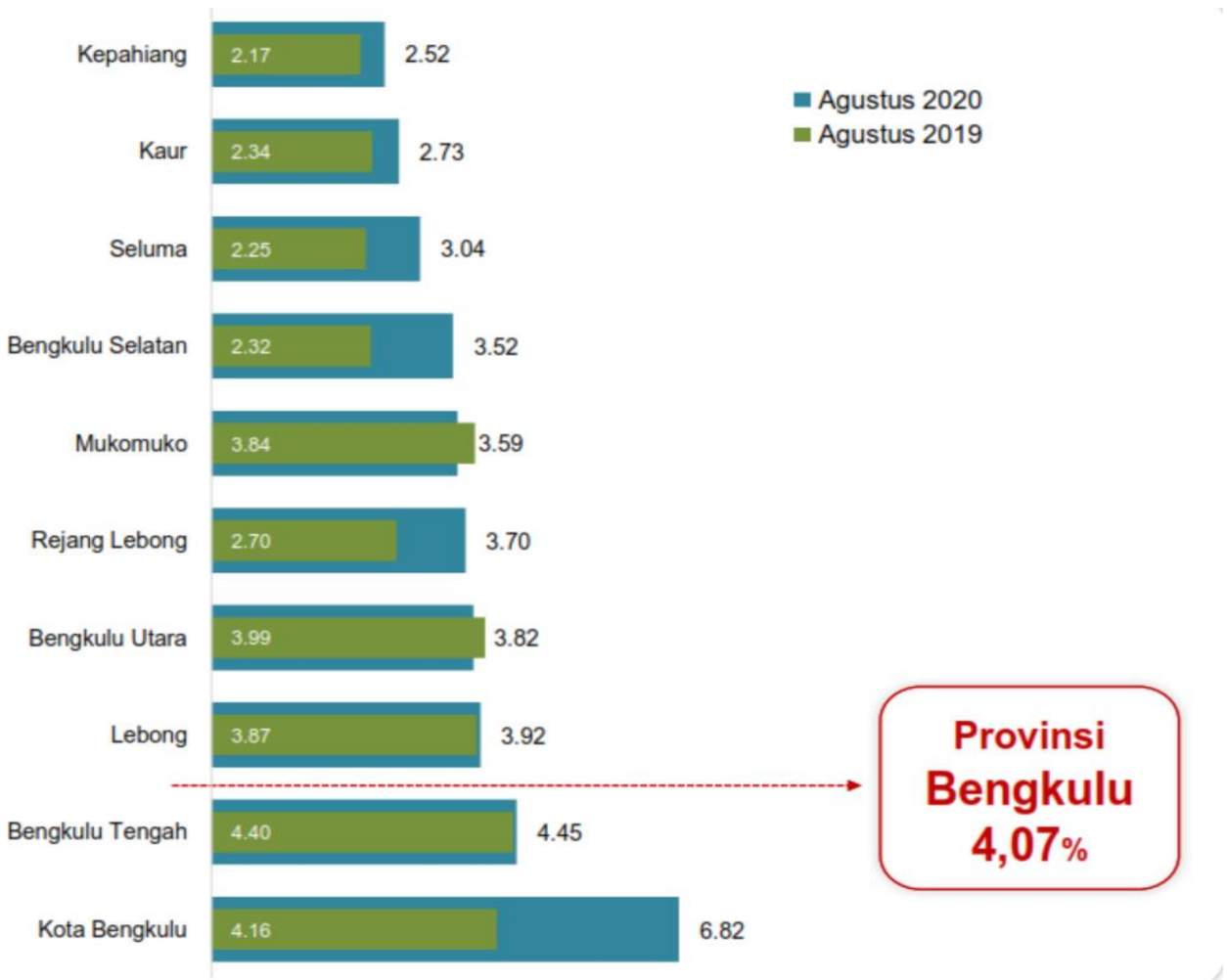
Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2020 masih didominasi penduduk bekerja berpendidikan rendah yakni tamat Sekolah Dasar (SD) kebawah sebanyak 387.143 orang atau 37,52 persen dan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 188.699 orang atau 18,29 persen dengan total sebanyak 575.842 orang atau sebesar 55,81 persen. Sedangkan berpendidikan tinggi hanya sebanyak 145.964 orang atau 14,15 persen yang terdiri dari 27.747 orang berpendidikan Diploma atau 2,69 persen dan 118.217 orang atau 11,46 persen berpendidikan Universitas. Dalam setahun terakhir Agustus 2018-Agustus 2019 yang terjadi di Provinsi Bengkulu

penduduk bekerja berpendidikan menengah bertambah sebanyak 10.962 orang atau naik sebesar 3,66 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi mengalami peningkatan sebanyak 6.132 orang atau bertambah 4,39 persen.

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja. TPT Provinsi Bengkulu hasil Sakernas Agustus 2020 adalah sebesar 4,07 persen. Hal ini berarti dari 100 orang Angkatan kerja terdapat sekitar 4 orang penganggur. Nilai TPT mengalami peningkatan dibandingkan setahun yang lalu yaitu sebesar 0,81 persen poin.

TPT menurut kabupaten/kota tertinggi keadaan Agustus 2020 di Provinsi Bengkulu adalah Kota Bengkulu sebesar 6,82 persen. TPT terendah adalah Kabupaten Kepahiang yaitu sebesar 2,52 persen. Penurunan TPT tertinggi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir (Agustus 2019- Agustus 2020) adalah Kabupaten Mukomuko yang turun sebesar 0,25 persen poin.

Gambar 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020



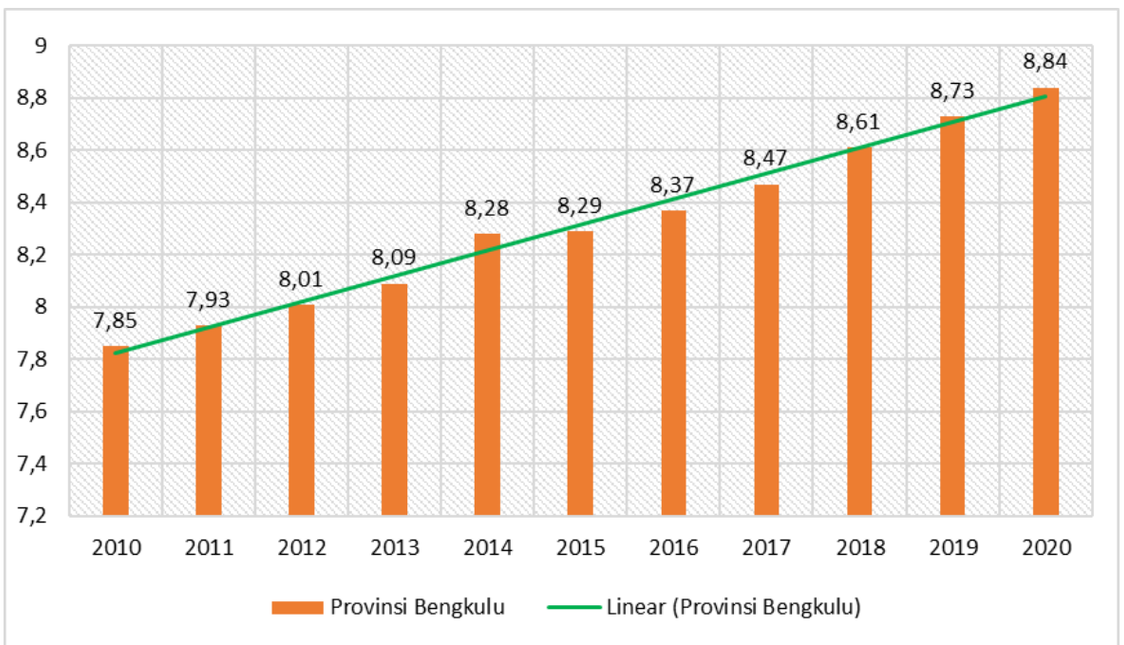
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Rata-rata lama sekolah (RLS/MYS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Selama periode 2012 hingga 2019, Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Bengkulu tumbuh 1,18 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Provinsi Bengkulu yang lebih baik. Pada tahun 2019, secara rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Bengkulu usia 25 tahun ke atas mencapai 8,73 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Gambar 2.7
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 – 2020



Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

2.1.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Mewujudkan pembangunan suatu daerah atau bangsa dan negara, tentu hal ini harus dibarengi dengan membangun dan melestarikan budaya-budaya yang mengandung nilai-nilai luhur kehidupan yang bepacu pada agama dan palsafah suatu negara. Seni budaya menduduki poin penting yang mendasar dalam pembangunan suatu daerah. Karena peran seni budaya adalah sebagai pembangunan karakter untuk terus mendidik dan mengajarkan tentang kearifan-kearifan lokal pada generasi dengan dasar kesenangan dan kebutuhan untuk memahami seni budaya sebagai identitas pada daerahnya.

Pembangunan seni dan Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Total grup kesenian di Provinsi bengkulu pada tahun 2020 adalah sebanyak sebanyak 166 sanggar/grup.

Tabel 2.29
Perkembangan Jumlah Sanggar/Grup Kesenian di Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Sanggar/Gurp Kesenian	Unit	166	166	167	169	170

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2021.

Pembangunan kebudayaan di Provinsi Bengkulu sudah menunjukan kinerja yang baik, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kemendikbud, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan. Instrumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Adapun metodologi dan sumber data dikembangkan untuk menghitung angka IPK secara nasional dan 34 provinsi

di Indonesia. Pada Tahun 2018, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencapai sebesar 59,95%, capaian tertinggi ke-empat nasional.

Tabel 2.30
Perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	n/a	n/a	59,95	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2021.

Selain karya seni budaya, peninggalan cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan. Pada tahun 2017, Persentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/ dilestarikan di Bengkulu adalah sebanyak 5 Cagar Budaya, yaitu Benteng Marlborough, Makan Inggris, Rumah Pengasingan Bung Karno, Tugu Thomas Parr, dan Makam Sentot Alibasyah.

Tabel 2.31
Perkembangan Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	5	5	5	6	6

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2021.

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Prestasi olahraga dapat dilihat dari perkembangan persentase nomor lomba olahraga prestasi yang dimenangkan. Pada tahun 2016 sebesar 46,67% nomor lomba dimenangkan dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 38,89%

Tabel 2.32
Perkembangan Persentase Nomor Lomba Olahraga Prestasi yang dimenangkan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019

Indikator	Satuan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Nomor Lomba Olahraga Prestasi yang dimenangkan	%	46,67	69,23	44,44	38,89

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, 2021.

Selain itu, dalam kurun waktu tahun 2016-2020, terdapat sebanyak 3 (tiga) organisasi olahraga yang dibina oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Tabel 2.33
Perkembangan Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	Organisasi	3	3	5	7	10

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu, 2021.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan Menengah

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1) Angka Partisipasi Sekolah

Seperti halnya pada pendidikan dasar, dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun dalam kegiatan belajar/ sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 16 – 18 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 16-18 tahun.

Angka partisipasi sekolah usia 16 – 18 tahun di Provinsi Bengkulu dalam lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) menunjukan nilai yang semakin meningkat. Meningkatnya APS usia 16 – 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang

lebih tinggi terutama jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2016 APS sebesar 78,37 persen dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 menjadi 79,72 persen. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu dengan adanya program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) maupun Program Indonesia Pintar.

Tabel 2.34
Perkembangan APS Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
APS Dikmen	%	78,37	79,07	79,33	79,39	79,72

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

2) Angka Partisipasi Murni

APM adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalaninya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Perkembangan APM Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
APM Dikmen	%	65,2	65,3	65,45	68,36	68,61

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

Pada tahun 2016-2020, APM SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Peningkatan APM

SMA/MA/SMK ini memberikan gambaran adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah. Sebaran APM jenjang pendidikan menengah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Perkembangan APM Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bengkulu Selatan	74,12	66,47	63,82	69,08	75,04
2	Kab. Kaur	70,67	69,71	69,73	67,88	70,23
3	Kab. Seluma	62,49	65,10	69,16	54,85	58,01
4	Kota Bengkulu	70,58	70,59	67,93	85,73	87,86
5	Kab. Rejang Lebong	62,93	64,81	61,65	70,31	72,76
6	Kab. Kepahiang	68,56	66,57	70,85	58,98	64,03
7	Kab. Bengkulu Tengah	66,19	74,11	75,19	44,31	48,47
8	Kab. Lebong	58,99	61,73	61,44	67,27	77,21
9	Kab. Bengkulu Utara	56,14	58,46	58,76	67,66	67,54
10	Kab. Mukomuko	60,41	58,39	62,60	70,33	65,23

S*umber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.*

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Perkembangan APM Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan APK Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
APK Dikmen	%	83,56	87,1	85,57	91,12	93,8

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

Pada tahun 2016-2020, APK SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolahnya di jenjang pendidikan tertentu. Sebaran APM jenjang pendidikan menengah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Perkembangan APK Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bengkulu Selatan	110,42	91,80	98,62	97,09	102,51
2	Kab. Kaur	97,25	91,66	94,70	99,42	105,51
3	Kab. Seluma	86,89	90,08	88,76	75,72	85,25
4	Kota Bengkulu	83,52	85,77	94,27	110,52	119,68
5	Kab. Rejang Lebong	84,67	87,76	84,65	89,2	95,65
6	Kab. Kepahiang	84,31	89,03	84,33	81,61	90,32
7	Kab. Bengkulu Tengah	82,32	102,44	84,62	61,38	71,10
8	Kab. Lebong	75,57	83,31	91,43	96,56	108,51
9	Kab. Bengkulu Utara	69,44	79,67	67,97	89,65	95,12
10	Kab. Mukomuko	70,89	84,06	69,61	87,31	93,81

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

4) Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar

Rasio kelas terhadap rombongan belajar menggambarkan kondisi kapasitas 1 unit kelas untuk menampung 1 rombongan belajar yang Pasal 24 Permendikbud No. 17 Tahun 2017 adalah 28 siswa untuk SD, 32 siswa untuk SMP, 36 siswa untuk SMA dan 36 siswa untuk SMK. Perkembangan Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Perkembangan Rasio Ruang Kelas terhadap Rombongan Belajar di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Kelas : Rombel SMA	Angka	1 : 1	1 : 0,97	1 : 1	1 : 1	1 : 1
Rasio Kelas : Rombel SMK	Angka	1 : 1,03	1 : 1	1 : 1	1 : 1,1	1 : 1,1

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Jika kita mencermati data pada tabel diatas, terlihat bahwa rasio kelas terhadap rombongan belajar pada jenjang pendidikan SMA pada tahun 2019 sudah seimbang yaitu sebesar 1 kelas untuk 1 rombongan belajar. Sedangkan untuk jenjang SMK, belum seimbang karena 1 klas untuk 1,1 rombongan belajar. Hal ini berarti kapasitas ruang kelas SMK yang ada belum terisi cukup dengan rombongan belajar yang ada.

5) Rasio Guru terhadap Murid

Pelayanan wajib pendidikan juga dapat dilihat pada data rasio guru terhadap siswa. Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid di Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Guru : Murid SMA	Angka	1 : 13	1 : 13	1 :13	1 : 12	1 : 12
Rasio Guru : Murid SMK	Angka	1 : 11	1 : 11	1 : 12	1 : 11	1 : 11
Rasio Guru : Murid SLB	Angka	1 : 4	1 : 4	1 : 5	1 : 4	1 : 4

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, 2020.

Rasio guru terhadap siswa pada tahun 2016 dan tahun 2020 untuk semua jenjang pendidikan di Provinsi Bengkulu sudah relatif memadai. Tertinggi, rasio guru terhadap murid terdapat pada jenjang pendidikan SMA yaitu 1 : 12 pada tahun 2020. Hal ini berarti, pada tahun 2020 satu orang guru bertangugngjawab kepada 12 murid SMA. Interpasi yang sama juga dapat kita lihat pada jenjang pendidikan SMK.

6) Murid Putus Sekolah

Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah. Perkembangan Murid Putus Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Perkembangan Murid Putus Sekolah di Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Murid Putus Sekolah SMA	Siswa	398	359	162	202	1.567
Murid Putus Sekolah SMK	Siswa	463	678	346	296	1.555

Sumber : Buku Statistik SMA dan SMK Provinsi Bengkulu, 2020.

7) Guru yang Sudah Sertifikasi dan Kualifikasi Pendidik

Guru merupakan salah satu unsur terpenting dalam pendidikan. Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada empat kompetensi yang harus dipenuhi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas guru ada melalui sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi guru di Provinsi Bengkulu pada setiap jenjang pendidikan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan Guru yang Sudah Sertifikasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Perkembangan Guru yang Sudah Sertifikasi di Provinsi Bengkulu
Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Guru SMA	%	44,1	49,5	49,5
Guru SMK	%	36,3	41,2	41,21

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, 2020.

Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan juga dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang sudah diatas Diploma IV atau Strata 1. Berdasarkan data tahun 2019, persentase kualifikasi pendidikan pendidik dna tenaga kependidikan di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.43
Sebaran Kualifikasi Pendidikan tenaga Pendidikan dan Kependidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2019

No.	Kab/Kota	Tingkat Pendidikan Tenaga Pendidik minimal D4/S1 (%) Tahun 2019		
		SLB	SMK	SMA
1	Kab. Bengkulu Selatan	87,5	95,4	99,4
2	Kab. Kaur	82,4	91,2	97
3	Kab. Seluma	91,7	96,7	99
4	Kota Bengkulu	91,7	96,7	99
5	Kab. Rejang Lebong	90,9	92,4	98,5
6	Kab. Kepahiang	76,9	95,6	98,7
7	Kab. Bengkulu Tengah	100	97,2	99,2
8	Kab. Lebong	42,9	92,7	98,8
9	Kab. Bengkulu Utara	100	96,6	98,6
10	Kab. Mukomuko	72,2	97,2	99,2
	Provinsi Bengkulu	53	95,4	98,8

Sumber : https://npd.kemdikbud.go.id/

8) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,38	13,57	13,58	13,59	13,61

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

Sebaran Harapan Lama Sekolah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019

No.	Kab/Kota	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Kab. Bengkulu Selatan	13,46	13,58	13,59	13,60
2	Kab. Kaur	12,94	12,95	12,96	12,98
3	Kab. Seluma	12,6	12,94	13,26	13,27
4	Kota Bengkulu	15,16	15,58	16,00	16,01
5	Kab. Rejang Lebong	13,23	13,31	13,55	13,68
6	Kab. Kepahiang	12,66	12,67	12,68	12,89
7	Kab. Bengkulu Tengah	12,95	12,96	12,97	13,02
8	Kab. Lebong	12,15	12,28	12,30	12,56
9	Kab. Bengkulu Utara	12,82	12,83	12,84	12,86
10	Kab. Mukomuko	12,49	12,7	12,71	12,72

S*umber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.*

9) Akreditasi Sekolah SMA dan SMK

Kualitas pelayanan umum pendidikan juga dinilai dari akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentuksn kelayakan dan kinerja sekolah. Akreditasi sekolah bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu serta menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Pada tahun 2019, akreditasi sekolah pada setiap jenjang sudah semakin baik, yang dilihat dari makin sedikitnya sekolah yang belum melakukan akreditasi. Perkembangan Akreditasi Sekolah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Perkembangan Sekolah yang Sudah Akreditasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
SMA yang telah Akreditasi	%	79,1	86,3	94,2	95	95
SMK yang telah Akreditasi	%	100	36,4	63,9	88,3	91

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, 2021.

Sebaran Sekolah yang Sudah Akreditasi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Perkembangan SMA yang Telah Akreditasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bengkulu Selatan	85,7	81,2	100	100	93,34
2	Kab. Kaur	83,3	92,3	92,3	100	90,91
3	Kab. Seluma	80	90,9	100	100	100
4	Kota Bengkulu	91,3	85,2	92,3	92,7	95,83
5	Kab. Rejang Lebong	58,8	88,9	88,9	88,9	88,89
6	Kab. Kepahiang	75	100	100	100	100
7	Kab. Bengkulu Tengah	83,3	63,6	100	100	77,77
8	Kab. Lebong	100	85,7	85,71	85,7	83,34
9	Kab. Bengkulu Utara	86,7	83,3	88,9	89,5	89,5
10	Kab. Mukomuko	58,8	94,1	100	100	100

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, 2020.

Saat ini terdapat sebanyak 105 SMK, terdiri dari 64 SMK yang dikelolah Pemerintah Provinsi Bengkulu dan 41 SMK yang dikelola swasta. Gambaran pendidikan vokasi atau kejuruan SMK sesuai dengan potensi wilayah berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menegah Kejuruan dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing Sumber daya Manusia Indonesia di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.48
SMK Negeri di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Bidang Keahlian

No	NPSN	Nama SMK	Alamat	Kabupaten/Kota	Kecamatan
SMKN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI REKAYASA					
1	69966418	SMK N 12 BENGKULU UTARA	JL. DESA LUBUK LESUNG RT RW Lubuk Lesung Kode Pos 38653	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Lais
2	10702995	SMKN 3 BENGKULU UTARA	JL. AHMAD YANI RT 2 RW 3 Sido Mukti Kode Pos 38657	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Padang Jaya
3	10703311	SMKN 7 BENGKULU UTARA	JL PROTOKOL DESA PEMATANG BALAM RT 0 RW 0 Desa Pematang Balam Kode Pos 38374	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Hulu Palik
4	10702997	SMKN 5 BENGKULU UTARA	POROS PASAR KETAHUN RT 2 RW 2 Pasar Ketahun Kode Pos 38361	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Ketahun

No	NPSN	Nama SMK	Alamat	Kabupaten/Kota	Kecamatan
5	69888780	SMKN 11 BENGKULU UTARA	JL BRAWIJAYA RT 10 RW 5 Giri Mulya Kode Pos 38655	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Giri Mulia
6	10703421	SMKN 8 BENGKULU UTARA	Jl. Raya Lintas Barat Desa Selubuk KM.32 Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara RT 0 RW 0 Selubuk Kode Pos 38373	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Air Napal
7	10702996	SMKN 4 BENGKULU UTARA	JALAN JAWA RT 10 RW 8 Karang Pulau Kode Pos 38362	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Putri Hijau
8	10703524	SMKN 10 BENGKULU UTARA	PASAR KAMIS RT 19 RW 3 Suka Makmur Kode Pos 38362	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Putri Hijau
9	10700287	SMKN 2 BENGKULU UTARA	JL. KOLONEL ALAMSYAH RT 0 RW 0 Gunung Agung Kode Pos 38614	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Arga Makmur
10	10700611	SMKN 6 REJANG LEBONG	Jl. Duku Ulu No 10 Curup Timur RT 0 RW 0 Duku Ulu Kode Pos 39125	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Timur
11	10702882	SMKN 7 REJANG LEBONG	Jl. Lintas Curup-Lubuklinggau Km. 16 RT 0 RW 0 Sumber Bening Kode Pos 39153	Kab. Rejang Lebong	Kec. Selupu Rejang
12	10700610	SMKN 1 REJANG LEBONG	JL. H. AHMAD MARZUKI - CURUP RT 4 RW 3 Air Rambai Kode Pos 39111	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup
13	10702880	SMKN 3 REJANG LEBONG	JL. HAJI AGUS SALIM, LUBUK UBAR RT 0 RW 0 Lubuk Ubar Kode Pos 39125	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Selatan
14	10702879	SMKN 4 REJANG LEBONG	JL. LINTAS CURUP-MUARA AMAN RT 0 RW 0 Bangun Jaya Kode Pos 39152	Kab. Rejang Lebong	Kec. Bermani Ulu Raya
15	10700989	SMKN 1 ANGGUT /SMKN 5 BENGKULU SELATAN	JL DESA ANGGUT RT 0 RW 0 Anggut Kode Pos 38571	Kab. Bengkulu Selatan	Kec. Pino
16	10703239	SMKN 4 BENGKULU SELATAN	JL. RAYA NANJUNGAN RT 0 RW 0 Nanjungan Kode Pos 38557	Kab. Bengkulu Selatan	Kec. Kedurang Ilir
17	10703238	SMKN 3 BENGKULU SELATAN	JL.RAYA SEGINIM RT 0 RW 0 Muara Payang Kode Pos 38552	Kab. Bengkulu Selatan	Kec. Seginim
18	69911478	SMKN 05 Mukomuko	Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh RT 0 RW 0 Lubuk Bento Kode Pos 38366	Kab. Muko-muko	Kec. Pondok Suguh
19	10701306	SMKN 01 MUKOMUKO	JL. Sultan Takdir Khalifatullah RT 3 RW 0 Bandar Ratu Kode Pos 38365	Kab. Muko-muko	Kec. Kota Mukomuko
20	10703016	SMKN 4 KEPAHIANG	JL. DS. WESKUST RT 0 RW 0 Weskust Kode Pos 39172	Kab. Kepahiang	Kec. Kepahiang
21	10702269	SMKN 3 KEPAHIANG	JL. PROTOKOL KEBAN AGUNG RT 0 RW 0 Keban Agung Kode Pos 39174	Kab. Kepahiang	Kec. Bermani Ilir
22	10702268	SMKN 1 KEPAHIANG	Jalan Cinta Damai Kelurahan Padang Lekat - Kepahiang RT 0 RW 0 PADANG LEKAT Kode Pos 39172	Kab. Kepahiang	Kec. Kepahiang
23	10703156	SMKN 5 KEPAHIANG	JL. RAYA KEPAHIANG-CURUP RT 0 RW 0 Pekalongan Kode Pos 39171	Kab. Kepahiang	Kec. Ujan Mas
24	10703078	SMKN 2 LEBONG	JL. RAYA DESA BENTANGUR RT 0 RW 0 Tangua Kode Pos 39264	Kab. Lebong	Kec. Uram Jaya
25	10703080	SMKN 3 LEBONG	Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong RT 0 RW 0 TIK JENIAK Kode Pos 39162	Kab. Lebong	Kec. Lebong Selatan

No	NPSN	Nama SMK	Alamat	Kabupaten/Kota	Kecamatan
26	69830643	SMK N 4 LEBONG	Jalan Raya Tubei RT 1 RW 1 Talang Ulu Kode Pos 39264	Kab. Lebong	Kec. Lebong Utara
27	10703417	SMKN 3 KAUR	JL. SIMPANG TIGA PADANG GUCI RT 0 RW 0 Simpang Tiga Kode Pos 38556	Kab. Kaur	Kec. Kaur Utara
28	10703648	SMKN 5 KAUR	Jl. Jembatan Dua RT 0 RW 0 Jembatan Dua Kode Pos 38563	Kab. Kaur	Kec. Kaur Selatan
29	10703649	SMKN 6 KAUR	PADANG GUCI TANJUNG KEMUNING RT 0 RW 0 TANJUNG IMAN I Kode Pos 38555	Kab. Kaur	Kec. Tanjung Kemuning
30	10702822	SMKN 1 KAUR	JL. TRANS CAHAYA BATHIN RT 0 RW 0 CAHAYA BATHIN Kode Pos 38561	Kab. Kaur	Kec. Semidang Gumay
31	10702821	SMKN 2 KAUR	JL. RAYA AIR KERING RT 0 RW 0 Gunung Kaya Kode Pos 38554	Kab. Kaur	Kec. Padang Guci Hilir
32	10701571	SMKN 1 SELUMA	JL. RAYA PUGUK DESA BUNGAMAS RT 0 RW 0 Bunga Mas Kode Pos 38576	Kab. Seluma	Kec. Seluma Timur
33	10703205	SMKN 3 SELUMA	Jl. Bengkulu Tais Km. 34 RT 1 RW 0 Dermayu Kode Pos 38577	Kab. Seluma	Kec. Air Periukan
34	69900400	SMKN 5 SELUMA	TELATAN RT 0 RW 0 TELATAN Kode Pos 38573	Kab. Seluma	Kec. Semidang Alas
35	10702681	SMKN 2 SELUMA	Jalan Nambangan Desa Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma RT 0 RW 0 Kampai Kode Pos 38574	Kab. Seluma	Kec. Talo
36	69727853	SMKN 2 BENGKULU TENGAH	JLN. SRI KATON BLOK V RT 0 RW 0 Srikaton Kode Pos 38371	Kab. Bengkulu Tengah	Kec. Pondok Kelapa
37	69896409	SMKN 3 BENGKULU TENGAH	Desa Talang Tengah RT 1 RW 1 Pondok Kubang Kode Pos 38371	Kab. Bengkulu Tengah	Kec. Pondok Kubang
38	10703975	SMK NEGERI 6 KOTA BENGKULU	JL. KAMPUNG BAHARI RT 18 RW 3 Sumber Jaya Kode Pos 38216	Kota Bengkulu	Kec. Kampung Melayu
39	10702432	SMK NEGERI 2 KOTA BENGKULU	JL. BATANG HARI PD HARAPAN RT 1 RW 1 Padang Harapan Kode Pos 38225	Kota Bengkulu	Kec. Gading Cempaka
40	10703107	SMK NEGERI 4 KOTA BENGKULU	JL. ENGGANO RT 9 RW 2 Pasar Bengkulu Kode Pos 28119	Kota Bengkulu	Kec. Sungai Serut
SMKN BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI					
1	69966418	SMK N 12 BENGKULU UTARA	JL. DESA LUBUK LESUNG RT RW Lubuk Lesung Kode Pos 38653	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Lais
2	10702995	SMKN 3 BENGKULU UTARA	JL. AHMAD YANI RT 2 RW 3 Sido Mukti Kode Pos 38657	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Padang Jaya
3	10703311	SMKN 7 BENGKULU UTARA	JL PROTOKOL DESA PEMATANG BALAM RT 0 RW 0 Desa Pematang Balam Kode Pos 38374	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Hulu Palik
4	10703513	SMKN 9 BENGKULU UTARA	JL PERSADA NO 1 RT 0 RW 0 Air Tenang Kode Pos 38363	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Napal Putih
5	10703132	SMKN 6 BENGKULU UTARA	JL. RAYA BINTUNAN KETAHUN RT 0 RW 0 Bintunan Kode Pos 38656	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Batik Nau
6	10702997	SMKN 5 BENGKULU UTARA	POROS PASAR KETAHUN RT 2 RW 2 Pasar Ketahun Kode Pos 38361	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Ketahun
7	69888780	SMKN 11 BENGKULU UTARA	JL BRAWIJAYA RT 10 RW 5 Giri Mulya Kode Pos 38655	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Giri Mulia

No	NPSN	Nama SMK	Alamat	Kabupaten/Kota	Kecamatan
8	10703421	SMKN 8 BENGKULU UTARA	Jl. Raya Lintas Barat Desa Selubuk KM.32 Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara RT 0 RW 0 Selubuk Kode Pos 38373	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Air Napal
9	10702996	SMKN 4 BENGKULU UTARA	JALAN JAWA RT 10 RW 8 Karang Pulau Kode Pos 38362	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Putri Hijau
10	10703524	SMKN 10 BENGKULU UTARA	PASAR KAMIS RT 19 RW 3 Suka Makmur Kode Pos 38362	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Putri Hijau
11	10700287	SMKN 2 BENGKULU UTARA	JL. KOLONEL ALAMSYAH RT 0 RW 0 Gunung Agung Kode Pos 38614	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Arga Makmur
12	10700258	SMKN 1 BENGKULU UTARA	JL. TABA TEMBILANG RT 3 RW 0 Taba Tembilang Kode Pos 38611	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Arga Makmur
13	10700598	SMKN 2 REJANG LEBONG	JLN. DUKU ULU CURUP TIMUR RT 0 RW 0 Duku Ulu Kode Pos 39112	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Timur
14	10702881	SMKN 5 REJANG LEBONG	JL. RAYA PU. TANDING RT 0 RW 0 Pasar Padang Ulak Tanding Kode Pos 39182	Kab. Rejang Lebong	Kec. Padang Ulang Tanding
15	10702882	SMKN 7 REJANG LEBONG	Jl. Lintas Curup-Lubuklinggau Km. 16 RT 0 RW 0 Sumber Bening Kode Pos 39153	Kab. Rejang Lebong	Kec. Selupu Rejang
16	10700610	SMKN 1 REJANG LEBONG	JL. H. AHMAD MARZUKI - CURUP RT 4 RW 3 Air Rambai Kode Pos 39111	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup
17	10702880	SMKN 3 REJANG LEBONG	JL. HAJI AGUS SALIM, LUBUK UBAR RT 0 RW 0 Lubuk Ubar Kode Pos 39125	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Selatan
18	10702879	SMKN 4 REJANG LEBONG	JL. LINTAS CURUP-MUARA AMAN RT 0 RW 0 Bangun Jaya Kode Pos 39152	Kab. Rejang Lebong	Kec. Bermani Ulu Raya
19	10703239	SMKN 4 BENGKULU SELATAN	JL. RAYA NANJUNGAN RT 0 RW 0 Nanjungan Kode Pos 38557	Kab. Bengkulu Selatan	Kec. Kedurang Ilir
20	10703237	SMKN 2 BENGKULU SELATAN	JL. BENGKULU MANNA KM. 121 RT 0 RW 0 Selali Kode Pos 38572	Kab. Bengkulu Selatan	Kec. Pinoraya
21	10703236	SMKN 1 BENGKULU SELATAN	JL. A. YANI IBUL MANNA RT 10 RW 0 KELURAHAN KOTA MEDAN Kode Pos 38513	Kab. Bengkulu Selatan	Kec. Kota Manna
22	69911478	SMKN 05 Mukomuko	Desa Lubuk Bento, Kecamatan Pondok Suguh RT 0 RW 0 Lubuk Bento Kode Pos 38366	Kab. Muko-muko	Kec. Pondok Suguh
23	10702850	SMKN 03 MUKOMUKO	LINTAS BARAT SUMATERA - PADANG BENGKULU RT 0 RW 0 Lubuk Sanai Kode Pos 38365	Kab. Muko-muko	Kec. XIV Koto
24	69912222	SMKN 06 Mukomuko	Desa Mekar Mulya Kecamatan Penarik RT 0 RW 0 Mekar Mulya Kode Pos 38368	Kab. Muko-muko	Kec. Penarik
25	10701307	SMKN 02 MUKOMUKO	JL. BENDUNGAN AIR MANJUTO RT 0 RW 0 Ranah Karya Kode Pos 38367	Kab. Muko-muko	Kec. Lubuk Pinang
26	10703506	SMKN 04 MUKOMUKO	JL. MANDI ANGIN RT 0 RW 0 Mandi Angin Jaya Kode Pos 38366	Kab. Muko-muko	Kec. Teramang Jaya
27	10703016	SMKN 4 KEPAHIANG	JL. DS. WESKUST RT 0 RW 0 Weskust Kode Pos 39172	Kab. Kepahiang	Kec. Kepahiang
28	10702269	SMKN 3 KEPAHIANG	JL. PROTOKOL KEBAN AGUNG RT 0 RW 0 Keban Agung Kode Pos 39174	Kab. Kepahiang	Kec. Bermani Ilir
29	10702268	SMKN 1 KEPAHIANG	Jalan Cinta Damai Kelurahan Padang Lekat - Kepahiang RT 0 RW 0	Kab. Kepahiang	Kec. Kepahiang

No	NPSN	Nama SMK	Alamat	Kabupaten/Kota	Kecamatan
			PADANG LEKAT Kode Pos 39172		
30	10703156	SMKN 5 KEPAHIANG	JL. RAYA KEPAHIANG-CURUP RT 0 RW 0 Pekalongan Kode Pos 39171	Kab. Kepahiang	Kec. Ujan Mas
31	10703080	SMKN 3 LEBONG	Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong RT 0 RW 0 TIK JENIAK Kode Pos 39162	Kab. Lebong	Kec. Lebong Selatan
32	10703079	SMKN 1 LEBONG	RAYA EMBONG PANJANG RT 0 RW 0 Embong Panjang Kode Pos 39264	Kab. Lebong	Kec. Lebong Tengah
33	10703417	SMKN 3 KAUR	JL. SIMPANG TIGA PADANG GUCI RT 0 RW 0 Simpang Tiga Kode Pos 38556	Kab. Kaur	Kec. Kaur Utara
34	69957326	SMKN 8 PUSAKA KAUR	Jalan Pondok Pusaka RT RW Padang Petron Kode Pos 38563	Kab. Kaur	Kec. Kaur Selatan
35	10703648	SMKN 5 KAUR	Jl. Jembatan Dua RT 0 RW 0 Jembatan Dua Kode Pos 38563	Kab. Kaur	Kec. Kaur Selatan
36	10703647	SMKN 4 KAUR	Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu RT 0 RW 0 PASAR BARU Kode Pos 38564	Kab. Kaur	Kec. Nasal
37	10703649	SMKN 6 KAUR	PADANG GUCI TANJUNG KEMUNING RT 0 RW 0 TANJUNG IMAN I Kode Pos 38555	Kab. Kaur	Kec. Tanjung Kemuning
38	10702822	SMKN 1 KAUR	JL. TRANS CAHAYA BATHIN RT 0 RW 0 CAHAYA BATHIN Kode Pos 38561	Kab. Kaur	Kec. Semidang Gumay
39	10702821	SMKN 2 KAUR	JL. RAYA AIR KERING RT 0 RW 0 Gunung Kaya Kode Pos 38554	Kab. Kaur	Kec. Padang Guci Hilir
40	10701571	SMKN 1 SELUMA	JL. RAYA PUGUK DESA BUNGAMAS RT 0 RW 0 Bunga Mas Kode Pos 38576	Kab. Seluma	Kec. Seluma Timur
41	10703205	SMKN 3 SELUMA	Jl. Bengkulu Tais Km. 34 RT 1 RW 0 Dermayu Kode Pos 38577	Kab. Seluma	Kec. Air Periukan
42	69900400	SMKN 5 SELUMA	TELATAN RT 0 RW 0 TELATAN Kode Pos 38573	Kab. Seluma	Kec. Semidang Alas
43	69947024	SMKN 06 SELUMA	Desa Pagar Agung RT RW Pagar Agung Kode Pos 38883	Kab. Seluma	Kec. Seluma Barat
44	69727853	SMKN 2 BENGKULU TENGAH	JLN. SRI KATON BLOK V RT 0 RW 0 Srikaton Kode Pos 38371	Kab. Bengkulu Tengah	Kec. Pondok Kelapa
45	10702994	SMKN 1 BENGKULU TENGAH	JL. LB. DURIAN-LB SINI KM. 18 RT 0 RW 0 Pematang Tiga Kode Pos 38374	Kab. Bengkulu Tengah	Kec. Pematang Tiga
46	10702431	SMK NEGERI 3 KOTA BENGKULU	Jalan Jati No 42 Padang Jati RT 9 RW 23 Padang Jati Kode Pos 38228	Kota Bengkulu	Kec. Ratu Samban
47	10703975	SMK NEGERI 6 KOTA BENGKULU	JL. KAMPUNG BAHARI RT 18 RW 3 Sumber Jaya Kode Pos 38216	Kota Bengkulu	Kec. Kampung Melayu
48	10702433	SMK NEGERI 1 KOTA BENGKULU	JL JATI NO 41 KEL. PADANG JATI RT 0 RW 0 Padang Jati Kode Pos 38228	Kota Bengkulu	Kec. Ratu Samban
49	10703107	SMK NEGERI 4 KOTA BENGKULU	JL. ENGGANO RT 9 RW 2 Pasar Bengkulu Kode Pos 28119	Kota Bengkulu	Kec. Sungai Serut
SMKN BIDANG KEAHLIAN KESEHATAN DAN PEKERJA SOSIAL					

No	NPSN	Nama SMK	Alamat	Kabupaten/Kota	Kecamatan
1	10703524	SMKN 10 BENGKULU UTARA	PASAR KAMIS RT 19 RW 3 Suka Makmur Kode Pos 38362	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Putri Hijau
2	10700611	SMKN 6 REJANG LEBONG	Jl. Duku Ulu No 10 Curup Timur RT 0 RW 0 Duku Ulu Kode Pos 39125	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Timur
3	10702882	SMKN 7 REJANG LEBONG	Jl. Lintas Curup-Lubuklinggau Km. 16 RT 0 RW 0 Sumber Bening Kode Pos 39153	Kab. Rejang Lebong	Kec. Selupu Rejang
4	10702880	SMKN 3 REJANG LEBONG	JL. HAJI AGUS SALIM, LUBUK UBAR RT 0 RW 0 Lubuk Ubar Kode Pos 39125	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Selatan
5	10702254	SMKN 2 KEPAHIANG	JL. DESA KANDANG RT 0 RW 0 Kandang Kode Pos 39172	Kab. Kepahiang	Kec. Seberang Musi
6	69830643	SMK N 4 LEBONG	Jalan Raya Tubei RT 1 RW 1 Talang Ulu Kode Pos 39264	Kab. Lebong	Kec. Lebong Utara
7	10702822	SMKN 1 KAUR	JL. TRANS CAHAYA BATHIN RT 0 RW 0 CAHAYA BATHIN Kode Pos 38561	Kab. Kaur	Kec. Semidang Gumay
8	69727454	SMKN 4 SELUMA	Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma RT 0 RW 0 Hargo Binangun Kode Pos 38574	Kab. Seluma	Kec. Ulu Talo
SMKN BIDANG KEAHLIAN AGRIBISNIS DAN AGRITEKNOLOGI					
1	10702995	SMKN 3 BENGKULU UTARA	JL. AHMAD YANI RT 2 RW 3 Sido Mukti Kode Pos 38657	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Padang Jaya
2	10703311	SMKN 7 BENGKULU UTARA	JL PROTOKOL DESA PEMATANG BALAM RT 0 RW 0 Desa Pematang Balam Kode Pos 38374	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Hulu Palik
3	10703513	SMKN 9 BENGKULU UTARA	JL PERSADA NO 1 RT 0 RW 0 Air Tenang Kode Pos 38363	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Napal Putih
4	10703132	SMKN 6 BENGKULU UTARA	JL. RAYA BINTUNAN KETAHUN RT 0 RW 0 Bintunan Kode Pos 38656	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Batik Nau
5	10702996	SMKN 4 BENGKULU UTARA	JALAN JAWA RT 10 RW 8 Karang Pulau Kode Pos 38362	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Putri Hijau
6	10702882	SMKN 7 REJANG LEBONG	Jl. Lintas Curup-Lubuklinggau Km. 16 RT 0 RW 0 Sumber Bening Kode Pos 39153	Kab. Rejang Lebong	Kec. Selupu Rejang
7	10702880	SMKN 3 REJANG LEBONG	JL. HAJI AGUS SALIM, LUBUK UBAR RT 0 RW 0 Lubuk Ubar Kode Pos 39125	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Selatan
8	10702879	SMKN 4 REJANG LEBONG	JL. LINTAS CURUP-MUARA AMAN RT 0 RW 0 Bangun Jaya Kode Pos 39152	Kab. Rejang Lebong	Kec. Bermani Ulu Raya
9	10703237	SMKN 2 BENGKULU SELATAN	JL. BENGKULU MANNA KM. 121 RT 0 RW 0 Selali Kode Pos 38572	Kab. Bengkulu Selatan	Kec. Pinoraya
10	10701307	SMKN 02 MUKOMUKO	JL. BENDUNGAN AIR MANJUTO RT 0 RW 0 Ranah Karya Kode Pos 38367	Kab. Muko-muko	Kec. Lubuk Pinang
11	10703529	SMK Pertanian Pembangunan Negeri Bengkulu	JALAN RAYA KELOBAK RT 0 RW 0 Pelangkian Kode Pos 39372	Kab. Kepahiang	Kec. Kepahiang
12	10702254	SMKN 2 KEPAHIANG	JL. DESA KANDANG RT 0 RW 0 Kandang Kode Pos 39172	Kab. Kepahiang	Kec. Seberang Musi
13	10703156	SMKN 5 KEPAHIANG	JL. RAYA KEPAHIANG-CURUP RT 0 RW 0 Pekalongan Kode Pos 39171	Kab. Kepahiang	Kec. Ujan Mas

No	NPSN	Nama SMK	Alamat	Kabupaten/Kota	Kecamatan
14	10703079	SMKN 1 LEBONG	RAYA EMBONG PANJANG RT 0 RW 0 Embong Panjang Kode Pos 39264	Kab. Lebong	Kec. Lebong Tengah
15	69900679	SMKN 7 TECHNOPRENEUR MERDEKA	Bakal Makmur RT 0 RW 0 BAKAL MAKMUR Kode Pos 38965	Kab. Kaur	Kec. Maje
16	69957326	SMKN 8 PUSAKA KAUR	Jalan Pondok Pusaka RT RW Padang Petron Kode Pos 38563	Kab. Kaur	Kec. Kaur Selatan
17	69947024	SMKN 06 SELUMA	Desa Pagar Agung RT RW Pagar Agung Kode Pos 38883	Kab. Seluma	Kec. Seluma Barat
18	69896409	SMKN 3 BENGKULU TENGAH	Desa Talang Tengah RT 1 RW 1 Pondok Kubang Kode Pos 38371	Kab. Bengkulu Tengah	Kec. Pondok Kubang
19	10702994	SMKN 1 BENGKULU TENGAH	JL. LB. DURIAN-LB SINI KM. 18 RT 0 RW 0 Pematang Tiga Kode Pos 38374	Kab. Bengkulu Tengah	Kec. Pematang Tiga
20	10703975	SMK NEGERI 6 KOTA BENGKULU	JL. KAMPUNG BAHARI RT 18 RW 3 Sumber Jaya Kode Pos 38216	Kota Bengkulu	Kec. Kampung Melayu
SMKN BIDANG KEAHLIAN KEMARITIMAN					
1	10703421	SMKN 8 BENGKULU UTARA	Jl. Raya Lintas Barat Desa Selubuk KM.32 Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara RT 0 RW 0 Selubuk Kode Pos 38373	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Air Napal
2	10702880	SMKN 3 REJANG LEBONG	JL. HAJI AGUS SALIM, LUBUK UBAR RT 0 RW 0 Lubuk Ubar Kode Pos 39125	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Selatan
3	10701307	SMKN 02 MUKOMUKO	JL. BENDUNGAN AIR MANJUTO RT 0 RW 0 Ranah Karya Kode Pos 38367	Kab. Muko-muko	Kec. Lubuk Pinang
4	10703506	SMKN 04 MUKOMUKO	JL. MANDI ANGIN RT 0 RW 0 Mandi Angin Jaya Kode Pos 38366	Kab. Muko-muko	Kec. Teramang Jaya
5	10703079	SMKN 1 LEBONG	RAYA EMBONG PANJANG RT 0 RW 0 Embong Panjang Kode Pos 39264	Kab. Lebong	Kec. Lebong Tengah
6	10703647	SMKN 4 KAUR	Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu RT 0 RW 0 PASAR BARU Kode Pos 38564	Kab. Kaur	Kec. Nasal
7	69727853	SMKN 2 BENGKULU TENGAH	JLN. SRI KATON BLOK V RT 0 RW 0 Srikaton Kode Pos 38371	Kab. Bengkulu Tengah	Kec. Pondok Kelapa
8	10703107	SMK NEGERI 4 KOTA BENGKULU	JL. ENGGANO RT 9 RW 2 Pasar Bengkulu Kode Pos 28119	Kota Bengkulu	Kec. Sungai Serut
SMKN BIDANG BISNIS DAN MANAJEMEN					
1	10703513	SMKN 9 BENGKULU UTARA	JL PERSADA NO 1 RT 0 RW 0 Air Tenang Kode Pos 38363	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Napal Putih
2	10702997	SMKN 5 BENGKULU UTARA	POROS PASAR KETAHUN RT 2 RW 2 Pasar Ketahun Kode Pos 38361	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Ketahun
3	10703421	SMKN 8 BENGKULU UTARA	Jl. Raya Lintas Barat Desa Selubuk KM.32 Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara RT 0 RW 0 Selubuk Kode Pos 38373	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Air Napal
4	10700258	SMKN 1 BENGKULU UTARA	JL. TABA TEMBILANG RT 3 RW 0 Taba Tembilang Kode Pos 38611	Kab. Bengkulu Utara	Kec. Arga Makmur
5	10700598	SMKN 2 REJANG LEBONG	JLN. DUKU ULU CURUP TIMUR RT 0 RW 0 Duku Ulu Kode Pos 39112	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Timur

No	NPSN	Nama SMK	Alamat	Kabupaten/Kota	Kecamatan
6	10702882	SMKN 7 REJANG LEBONG	Jl. Lintas Curup-Lubuklinggau Km. 16 RT 0 RW 0 Sumber Bening Kode Pos 39153	Kab. Rejang Lebong	Kec. Selupu Rejang
7	10702879	SMKN 4 REJANG LEBONG	JL. LINTAS CURUP-MUARA AMAN RT 0 RW 0 Bangun Jaya Kode Pos 39152	Kab. Rejang Lebong	Kec. Bermani Ulu Raya
8	10703239	SMKN 4 BENGKULU SELATAN	JL. RAYA NANJUNGAN RT 0 RW 0 Nanjungan Kode Pos 38557	Kab. Bengkulu Selatan	Kec. Kedurang Ilir
9	10703238	SMKN 3 BENGKULU SELATAN	JL.RAYA SEGINIM RT 0 RW 0 Muara Payang Kode Pos 38552	Kab. Bengkulu Selatan	Kec. Seginim
10	10703236	SMKN 1 BENGKULU SELATAN	JL. A. YANI IBUL MANNA RT 10 RW 0 KELURAHAN KOTA MEDAN Kode Pos 38513	Kab. Bengkulu Selatan	Kec. Kota Manna
11	10702850	SMKN 03 MUKOMUKO	LINTAS BARAT SUMATERA - PADANG BENGKULU RT 0 RW 0 Lubuk Sanai Kode Pos 38365	Kab. Muko-muko	Kec. XIV Koto
12	10701307	SMKN 02 MUKOMUKO	JL. BENDUNGAN AIR MANJUTO RT 0 RW 0 Ranah Karya Kode Pos 38367	Kab. Muko-muko	Kec. Lubuk Pinang
13	10702254	SMKN 2 KEPAHIANG	JL. DESA KANDANG RT 0 RW 0 Kandang Kode Pos 39172	Kab. Kepahiang	Kec. Seberang Musi
14	10703156	SMKN 5 KEPAHIANG	JL. RAYA KEPAHIANG-CURUP RT 0 RW 0 Pekalongan Kode Pos 39171	Kab. Kepahiang	Kec. Ujan Mas
15	10703080	SMKN 3 LEBONG	Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong RT 0 RW 0 TIK JENIAK Kode Pos 39162	Kab. Lebong	Kec. Lebong Selatan
16	10703079	SMKN 1 LEBONG	RAYA EMBONG PANJANG RT 0 RW 0 Embong Panjang Kode Pos 39264	Kab. Lebong	Kec. Lebong Tengah
17	10703417	SMKN 3 KAUR	JL. SIMPANG TIGA PADANG GUCI RT 0 RW 0 Simpang Tiga Kode Pos 38556	Kab. Kaur	Kec. Kaur Utara
18	10701571	SMKN 1 SELUMA	JL. RAYA PUGUK DESA BUNGAMAS RT 0 RW 0 Bunga Mas Kode Pos 38576	Kab. Seluma	Kec. Seluma Timur
19	10703205	SMKN 3 SELUMA	Jl. Bengkulu Tais Km. 34 RT 1 RW 0 Dermayu Kode Pos 38577	Kab. Seluma	Kec. Air Periukan
20	69900400	SMKN 5 SELUMA	TELATAN RT 0 RW 0 TELATAN Kode Pos 38573	Kab. Seluma	Kec. Semidang Alas
21	10702681	SMKN 2 SELUMA	Jalan Nambangan Desa Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma RT 0 RW 0 Kampai Kode Pos 38574	Kab. Seluma	Kec. Talo
22	69727454	SMKN 4 SELUMA	Desa Hargo Binangun Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma RT 0 RW 0 Hargo Binangun Kode Pos 38574	Kab. Seluma	Kec. Ulu Talo
23	69896409	SMKN 3 BENGKULU TENGAH	Desa Talang Tengah RT 1 RW 1 Pondok Kubang Kode Pos 38371	Kab. Bengkulu Tengah	Kec. Pondok Kubang
24	10702994	SMKN 1 BENGKULU TENGAH	JL. LB. DURIAN-LB SINI KM. 18 RT 0 RW 0 Pematang Tiga Kode Pos 38374	Kab. Bengkulu Tengah	Kec. Pematang Tiga
25	10702433	SMK NEGERI 1 KOTA BENGKULU	JL JATI NO 41 KEL. PADANG JATI RT 0 RW 0 Padang Jati Kode Pos 38228	Kota Bengkulu	Kec. Ratu Samban
26	10702429	SMK NEGERI 5 KOTA BENGKULU	KAPUAS NO.06 PADANG HARAPAN RT 0 RW 0 Jalan Gedang Kode Pos 38223	Kota Bengkulu	Kec. Gading Cempaka

No	NPSN	Nama SMK	Alamat	Kabupaten/Kota	Kecamatan
SMKN BIDANG PARIWISATA					
1	10700598	SMKN 2 REJANG LEBONG	JLN. DUKU ULU CURUP TIMUR RT 0 RW 0 Duku Ulu Kode Pos 39112	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Timur
2	10702881	SMKN 5 REJANG LEBONG	JL. RAYA PU. TANDING RT 0 RW 0 Pasar Padang Ulak Tanding Kode Pos 39182	Kab. Rejang Lebong	Kec. Padang Ulang Tanding
3	10700611	SMKN 6 REJANG LEBONG	Jl. Duku Ulu No 10 Curup Timur RT 0 RW 0 Duku Ulu Kode Pos 39125	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Timur
4	10703236	SMKN 1 BENGKULU SELATAN	JL. A. YANI IBUL MANNA RT 10 RW 0 KELURAHAN KOTA MEDAN Kode Pos 38513	Kab. Bengkulu Selatan	Kec. Kota Manna
5	10702850	SMKN 03 MUKOMUKO	LINTAS BARAT SUMATERA - PADANG BENGKULU RT 0 RW 0 Lubuk Sanai Kode Pos 38365	Kab. Muko-muko	Kec. XIV Koto
6	10703016	SMKN 4 KEPAHIANG	JL. DS. WESKUST RT 0 RW 0 Weskust Kode Pos 39172	Kab. Kepahiang	Kec. Kepahiang
7	10703156	SMKN 5 KEPAHIANG	JL. RAYA KEPAHIANG-CURUP RT 0 RW 0 Pekalongan Kode Pos 39171	Kab. Kepahiang	Kec. Ujan Mas
8	10703078	SMKN 2 LEBONG	JL. RAYA DESA BENTANGUR RT 0 RW 0 Tangua Kode Pos 39264	Kab. Lebong	Kec. Uram Jaya
9	10703080	SMKN 3 LEBONG	Desa Tik Jeniak Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong RT 0 RW 0 TIK JENIAK Kode Pos 39162	Kab. Lebong	Kec. Lebong Selatan
10	69957326	SMKN 8 PUSAKA KAUR	Jalan Pondok Pusaka RT RW Padang Petron Kode Pos 38563	Kab. Kaur	Kec. Kaur Selatan
11	10702431	SMK NEGERI 3 KOTA BENGKULU	Jalan Jati No 42 Padang Jati RT 9 RW 23 Padang Jati Kode Pos 38228	Kota Bengkulu	Kec. Ratu Samban
12	69888466	SMK NEGERI 7 KOTA BENGKULU	Jl. Lempuing 10 Rt.5 Rw.1 RT 0 RW 0 Lempuing Kode Pos 38225	Kota Bengkulu	Kec. Ratu Agung
13	10702433	SMK NEGERI 1 KOTA BENGKULU	JL JATI NO 41 KEL. PADANG JATI RT 0 RW 0 Padang Jati Kode Pos 38228	Kota Bengkulu	Kec. Ratu Samban
SMKN BIDANG SENI INDUSTRI KREATIF					
1	10700611	SMKN 6 REJANG LEBONG	Jl. Duku Ulu No 10 Curup Timur RT 0 RW 0 Duku Ulu Kode Pos 39125	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Timur
2	10702431	SMK NEGERI 3 KOTA BENGKULU	Jalan Jati No 42 Padang Jati RT 9 RW 23 Padang Jati Kode Pos 38228	Kota Bengkulu	Kec. Ratu Samban
3	10702429	SMK NEGERI 5 KOTA BENGKULU	KAPUAS NO.06 PADANG HARAPAN RT 0 RW 0 Jalan Gedang Kode Pos 38223	Kota Bengkulu	Kec. Gading Cempaka
SMKN BIDANG SENI, KERAJINAN DAN PARIWISATA					
1	10702850	SMKN 03 MUKOMUKO	LINTAS BARAT SUMATERA - PADANG BENGKULU RT 0 RW 0 Lubuk Sanai Kode Pos 38365	Kab. Muko-muko	Kec. XIV Koto
2	10703078	SMKN 2 LEBONG	JL. RAYA DESA BENTANGUR RT 0 RW 0 Tangua Kode Pos 39264	Kab. Lebong	Kec. Uram Jaya
3	10702431	SMK NEGERI 3 KOTA BENGKULU	Jalan Jati No 42 Padang Jati RT 9 RW 23 Padang Jati Kode Pos 38228	Kota Bengkulu	Kec. Ratu Samban
SMKN BIDANG ENERGI DAN PERTAMBANGAN					
1	10700611	SMKN 6 REJANG LEBONG	Jl. Duku Ulu No 10 Curup Timur RT 0 RW 0 Duku Ulu Kode Pos 39125	Kab. Rejang Lebong	Kec. Curup Timur

Sumber : http://datapokok.ditpsmk.net/

Tabel 2.49
Perkembangan SMK yang Telah Akreditasi Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bengkulu Selatan	100	33,3	81,2	75	85,71
2	Kab. Kaur	100	31,1	58,3	90,9	90,91
3	Kab. Seluma	100	36,4	52,6	66,7	66,67
4	Kota Bengkulu	100	43,5	80	91,7	88
5	Kab. Rejang Lebong	100	38,6	61,7	100	100
6	Kab. Kepahiang	100	32,6	63,6	100	100
7	Kab. Bengkulu Tengah	100	16	26,7	80	66,67
8	Kab. Lebong	100	46,2	78,9	83,3	71,43
9	Kab. Bengkulu Utara	100	39,1	69,8	92,3	92,31
10	Kab. Mukomuko	100	20	37,9	72,7	80

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, 2020.

10) Perkembangan Peserta Pendidikan Khusus

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10, hak pendidikan bagi penyandang disabilitas terdiri dari: mendapatkan pendidikan yang bermutu, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi tenaga pendidik, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk memberikan akses yang luas terhadpa pwnyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan. Saat ini, tahun 2020, terdapat SLB sebanyak 17 unit, terdiri dari 14 SLB negeri dan 3 SLB Swasta. Perkembangan peserta didik tingkat SLB di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 2.50
Perkembangan APM SLB di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
APM SLB	%	79,58	80,00	80,92	86,47	89,40

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, 2021.

11) Kondisi Bangunan Pendidikan

Salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana

pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga di dukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Kondisi ruang kelas SMA, SMA dan SLB di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.51
Kondisi Ruang Kelas SMA, SMK dan SLB di Provinsi Bengkulu

Kondisi Ruang Kelas (Unit)	2017	2018	2019	2020
SMA Rusak Berat + Rusak Total	10	51	93	n/a
SMA Rusak Sedang	110	93	175	n/a
SMA Baik+Rusak Ringan	87	1673	1521	n/a
SMK Rusak Berat + Rusak Total	6	15	23	n/a
SMK Rusak Sedang	81	43	92	n/a
SMK Baik+Rusak Ringan	61	1130	1028	n/a
SLB Rusak Berat + Rusak Total	n/a	n/a	6	n/a
SLB Rusak Sedang	n/a	n/a	20	n/a
SLB Baik+Rusak Ringan	n/a	n/a	180	n/a

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, 2020.

B. Kesehatan

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan kesehatan di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup

Kejadiaan kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan

lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.52
Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 KH di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
AKB/1000 kelahiran Hidup	Nilai	7	1	7	8	8

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019, 2020.

Sebaran AKB kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Perkembangan AKB Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bengkulu Selatan	10	11	10	17	8
2	Kab. Kaur	2	13	4	7	6
3	Kab. Seluma	12	13	7	16	13
4	Kota Bengkulu	5	4	5	10	5
5	Kab. Rejang Lebong	4	8	4	7	5
6	Kab. Kepahiang	9	21	14	14	13
7	Kab. Bengkulu Tengah	12	15	12	4	8
8	Kab. Lebong	8	7	10	4	9
9	Kab. Bengkulu Utara	6	7	6	5	11
10	Kab. Mukomuko	7	11	8	8	7

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019, 2020.

2) Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per

100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Perkembangan Angka Kematian Ibu di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.54
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
AKI	Nilai	117	79	111	100	93

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019, 2020.

3) Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk suatu Negara atau wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mencapai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Definisi Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.55
Perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,56	68,59	68,84	69,21	69,35

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*.

Sebaran AHH kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bengkulu Selatan	67,20	67,24	67,45	67,79	67,90
2	Kab. Kaur	65,84	65,92	66,15	66,5	66,63
3	Kab. Seluma	66,77	66,85	67,14	67,56	67,75
4	Kota Bengkulu	69,49	69,52	69,72	70,04	70,13
5	Kab. Rejang Lebong	67,58	67,65	67,65	68,37	68,57
6	Kab. Kepahiang	67,03	67,12	67,39	67,78	67,95
7	Kab. Bengkulu Tengah	67,63	67,64	67,82	68,12	68,19
8	Kab. Lebong	62,39	62,46	62,73	63,12	63,29
9	Kab. Bengkulu Utara	67,40	67,42	67,42	68,04	68,19
10	Kab. Mukomuko	65,88	65,93	66,16	66,51	66,64

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

4) *Stunting*

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Prevalensi balita stunting mengalami penurunan tiap tahun, yaitu dari 22,9 persen pada tahun 2016 menjadi 26,86 persen di tahun 2019. Sementara itu pada tahun 2017, persentasenya meningkat menjadi 29,4 persen. Perkembangan Angka Harapan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.57
Perkembangan *Stunting* di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Stunting (TB/U)	%	22,9	29,4	17,2	26,86	8,13

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Profil Kesehatan Ibu dan Anak Provinsi Bengkulu Tahun 2019, 2021.

5) Fasilitas Kesehatan

Fasilitas Kesehatan adalah salah satu indikator yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pada bagian ini diuraikan tentang sarana kesehatan diantaranya Puskesmas (rawat inap dan non rawat inap) beserta jejaringnya dan Rumah Sakit (baik RS umum maupun RS khusus) yang ada di Provinsi Bengkulu. Perkembangan Jumlah Sarana Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.58
Perkembangan Sarana Kesehatan di Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	Unit	180	180	179	179	188
Jumlah Rumah Sakit	Unit	21	21	23	24	23

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019, 2021.

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi wajib bagi semua rumah sakit baik rumah sakit publik/pemerintah maupun rumah sakit privat/swasta/BUMN.

Perkembangan Rumah Sakit yang Terakreditasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.59
Perkembangan Sarana Kesehatan di Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit yang telah Akreditasi	Unit	12	12	17	21	21

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019, 2020.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2021 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1) Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap

Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap adalah jalan provinsi yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No. 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Perkembangan Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap yang menjadi kewenangan provinsi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.60
Perkembangan Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jalan dalam Kondisi Baik/Mantap	%	44,76	54,5	58,5	66,29	68,14

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, 2021.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: L.444.DPU.TR Tahun 2019 tentang Penetapan Ruas, Kelas dan Fungsi Jalan Provinsi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bengkulu dimana total Panjang Jalan Provinsi sepanjang 1.379.405 km. Pada tahun 2016, Provinsi Bengkulu status kondisi jalan mantap sebesar 44,76% yang mana selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan sebesar 52,23% sehingga persentase capaian kondisi jalan mantap pada tahun 2020 sebesar 68,14%.

2) Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap

Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan oprasi dan mempertahankan kelestariannya. Perkembangan Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap yang menjadi kewenangan provinsi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.61
Perkembangan Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap	%	58	59,45	66,1	66,1	67

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, 2021.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa pada Tahun 2016 persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik/mantap Provinsi Bengkulu sebesar 58 % mengalami peningkatan

sebesar 15,52% selama 5 (lima) tahun sehingga persentase capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik/mantap pada Tahun 2020 sebesar 67%.

3) Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap

Jembatan merupakan prasarana penting yang menjaid penghubung atar kedua jalan yang terpisah oleh sungai/danau/rintangan lainnya. Jembatan memiliki peran penting dalam kelancaran arus jalan dan distribusi. Perkembangan jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap yang menjadi kewenangan provinsi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.62
Perkembangan Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jembatan dalam Kondisi Baik/Mantap	%	44,76	54,5	58,5	66,29	68,14

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, 2021.

4) Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032. Perkembangan Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.63
Perkembangan Luas Kawasan yang Peruntukannya sesuai dengan RTRW di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luas Kawasan yang	%	Kawasan	Kawasan	Kawasan	Kawasan	Kawasan

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Peruntukanny a sesuai dengan RTRW		budiday a 64%; Kawasa n Lindun g 36 %	budiday a 64%; Kawasa n Lindung 36 %	budiday a 64%; Kawasa n Lindung 36 %	budiday a 64%; Kawasa n Lindung 36 %	budiday a 64%; Kawasa n Lindung 36 %

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, 2021.

Berdasarkan Raperda Perubahan RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, Rencana struktur ruang Provinsi Bengkulu adalah rencana kerangka tata ruang wilayah yang tersusun dari keterkaitan pusat-pusat kegiatan pelayanan (atau disebut juga sistem perkotaanyang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) yang berhierarki satu sama lain dan terhubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi terutama jaringan transportasi untuk mengintegrasikan wilayah provinsi.

Pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Provinsi Bengkulu merupakan pusat pertumbuhan wilayah terdiri atas pusat kegiatan nasional (PKN) dan pusat kegiatan wilayah (PKW) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2017 beserta pusat kegiatan lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten.

PKN, PKW, dan PKL dapat berupa kawasan megapolitan, metropolitan, perkotaan besar, perkotaan sedang, dan/ atau perkotaan kecil yang pada waktu ini untuk Provinsi Bengkulu terdapat kawasan“perkotaan sedang” yaitu Kota Bengkulu yang pada akhir tahun rencana yaitu 2032 diprediksi akan menjadi perkotaan besar dan kawasan perkotaan kecil terdapat dalam wilayah 9 (Sembilan) kabupaten.

Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi: sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, serta sistem jaringan prasarana lainnya (SPAM, SPAL, SPL B3, dan sistem jaringan persampahan wilayah/ regional lintas kabupaten/kota) sesuai kebutuhan untuk mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan yang ada dalam wilayah Provinsi Bengkulu.Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota/ perkotaan dan memberikan layanan dengan cakupan wilayah pelayanan kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi.

Muatan rencana pola ruang berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat ditetapkan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, kabupaten, dan kota.

Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya Provinsi Bengkulu dilakukan dengan memperhatikan dan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera, dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Kawasan lindung adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan (termasuk nilai sejarah dan budaya bangsa) untuk kepentingan pembagunan yang berkelanjutan;
2. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia.

Terkait dengan progres revisi Perda dan Perkada RDTR Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu sampai dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 ditetapkan adalah sebagai berikut :

Progress Revisi perda RTRW dan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

No	Kab/Kota	Nomor Perda RTRW	Status Perkada RDTR	STATUS PERDA RTRW
1	Kota Bengkulu	14 Tahun 2021	belum ditetapkan tapi sedang disusun (2021)	revisi diperkirakan selesai tahun 2021
2	Kab. Seluma	2 Tahun 2013	belum ditetapkan tapi sedang disusun (2018)	revisi
3	Kab. Bengkulu Sekatan	8 Tahun 2011	belum ditetapkan tapi sedang disusun (2018)	revisi
4	Kab. Kaur	4 Tahun 2012	belum ditetapkan	revisi diperkirakan selesai tahun 2021
5	Kab. Bengkulu Tengah	15 Tahun 2012	belum ditetapkan tapi sedang disusun (2011)	revisi diperkirakan selesai tahun 2021
6	Kab. Kepahiang	8 Tahun 2012	belum ditetapkan	revisi diperkirakan selesai tahun 2021
7	Kab. Rejang Lebong	8 Tahun 2012	belum ditetapkan	revisi

No	Kab/Kota	Nomor Perda RTRW	Status Perkada RDTR	STATUS PERDA RTRW
8	Kab. Lebong	14 Tahun 2012	belum ditetapkan tapi sedang disusun (2016)	revisi
9	Kab. Bengkulu Utara	11 Tahun 2015	belum ditetapkan tapi sedang disusun	belum mengajukan pk (peninjauan kembali)
10	Kab. Mukomuko	6 Tahun 2012	belum ditetapkan tapi sedang disusun (2018)	revisi diperkirakan selesai tahun 2021

Gambar 2.8
Peta Strutkur Ruang Perubahan RTRW di Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032



Sumber : Raperda Perubahan RTRW Provinsi Bengkulu 2012-2032

5) Rumah Tangga yang terlayani Pengolahan Persampahan

Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendukung pengurangan dan pengelolaan sampah baik melalui upaya struktural dengan membangun infrastruktur persampahan maupun upaya non struktural yakni mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Permasalahan persampahan tidak hanya terkait permasalahan buang sampah pada tempatnya, namun bagian dari gaya hidup bersih dan sehat. Untuk itu disamping edukasi dan himbauan, tetapi juga perlu peraturan dan penegakannya yang tegas mengenai larangan membuang sampah sembarang. Pengaruh lingkungan terhadap derajat kesehatan manusia dipengaruhi empat komponen utama yaitu 40% dari kondisi lingkungan, 30 % dari perilaku hidup, 20% pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika atau keturunan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu didalam setiap pengelolaan persampahan memiliki acuan *sanitary land fill* dan *control land fill*. Dengan metode sanitary landfill, sampah dibuang dan ditumpuk di lokasi cekung, dipadatkan dan kemudian ditimbun dengan tanah sehingga tidak menimbulkan bau busuk, mencegah berkembangnya bibit penyakit serta ramah lingkungan. Perkembangan Rumah Tangga yang terlayani Pengolahan Persampahan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.64
Perkembangan Rumah Tangga yang terlayani Pengolahan Persampahan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga yang terlayani Pengolahan Persampahan	%	13,8	36,9	38,40	42,61	49,49

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, 2021.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2021 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1) Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.65
Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga dengan akses air minum layak	%	37,35	43,83	61,22 (perhitungan baru)	57,60 (perhitungan baru)	62,47 (perhitungan baru)

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, 2021.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2020 bahwa Akses Air Minum Layak Provinsi Bengkulu sebesar 62,47 persen artinya masih sebanyak 37,53% yang belum memiliki akses air minum layak di Provinsi Bengkulu. Perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada akses air minum layak antar kabupaten/kota. Kota Bengkulu merupakan daerah dengan akses air minum layak tertinggi di Provinsi Bengkulu yaitu mencapai 77, 97 %. Sementara itu, pada Kabupaten Seluma, akses air minum layak baru dinikmati oleh 26, 33 % rumah tangga. Sebaran Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bengkulu Selatan	39,24	67,27	49,54	65,85	45,78
2	Rejang Lebong	46,91	50,6	60,93	56,63	45,24
3	Bengkulu Utara	34,26	44,43	44,4	41,21	56,24
4	Kaur	52,21	62,34	62,15	66,42	79,4
5	Seluma	24,03	20,48	47,85	33,38	37,54
6	Mukomuko	46,38	66,43	62,66	53,32	79,41
7	Lebong	59,48	42,67	56,89	65,81	61,16
8	Kepahiang	49,74	61,55	67,18	46,19	63,82
9	Bengkulu Tengah	42,66	56,92	55,73	44,82	49,32
10	Kota Bengkulu	71,37	87,87	86,92	85,16	88,77

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, 2021.

2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/Sistem Terpusat. Akses aman merupakan bagian dari akses sanitasi layak, yaitu fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh satu rumah tangga sendiri yang terhubung pada SPAL atau menggunakan tangki septik dengan jenis kloset leher angsa, yang disedot minimal 1x dalam jangka waktu 3-5 tahun dan dibuang ke IPLT. Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.67
Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	%	49,75	42,71	71,75 (perhitungan baru)	75,91 (perhitungan baru)	78,10 (perhitungan baru)

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, 2021.

Sebaran Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Perkembangan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bengkulu Selatan	80,58	76,45	76,36	68,02	72,02
2	Rejang Lebong	69,44	72,56	60,88	73,36	70,02
3	Bengkulu Utara	70,51	65,62	66,25	77,41	79,23
4	Kaur	65,06	67,21	75,55	79,72	76,09
5	Seluma	68,56	74,06	72,3	73,51	78,26
6	Mukomuko	72,98	82,13	75,1	80,68	81,04
7	Lebong	35,52	41,52	41,92	44,04	46,8
8	Kepahiang	56,27	61,91	62,98	62,32	65,95
9	Bengkulu Tengah	71,67	72,69	79,89	72,85	85,44
10	Kota Bengkulu	91,45	90,82	89,52	93,19	95,71

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, 2021.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu Tahun 2020 bahwa akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 mencapai 71,75 persen artinya masih sebesar 28,25 persen rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Bengkulu. Perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada akses sanitasi layak antar kabupaten/kota. Kota Bengkulu merupakan daerah dengan akses sanitasi layak tertinggi di Provinsi Bengkulu yaitu mencapai 93,36 %. Sementara itu, pada Kabupaten Seluma, akses sanitasi layak baru dinikmati oleh 24, 22 % rumah tangga. Masih rendahnya akses sanitasi layak ini tentunya perlu mendapatkan penangananan yang serius dikarenakan sanitasi yang kurang baik dapat berakibat pada berbagai masalah Kesehatan, misalnya fenomena stunting yang memiliki keterkaitan dengan kurangnya sanitasi apda tempat tinggal.

3) Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni

Kebutuhan perumahan yang layak merupakan hal yang esensial bagi setiap manusia. Untuk memenuhi hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 menyebutkan jika setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sehingga dalam upaya mewujudkan kebutuhan

perumahan yang layak huni, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan juga berusaha untuk memberikan kemudahan terhadap perolehan rumah yang layak bagi masyarakat Indonesia. Secara global, TPB Tujuan 11 yaitu mewujudkan kota dan komunitas yang berkelanjutan juga mengupayakan agar perumahan yang layak, aman, terjangkau dapat diakses secara universal sebagaimana disebutkan pada Target 11.1 yaitu pada tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayan dasar serta menata kawasan kumuh.

Rumah tangga dikatakan menempati rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu, kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) minimal 7,2 per kapita, memiliki akses air minum dan sanitasi layak, serta memenuhi kriteria ketahanan bangunan (durable housing) yaitu atap terluas berupa beton, genteng, seng dan kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan dan semen/bata merah (BPS, 2019). Perkembangan Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.69
Perkembangan Rumah Tangga yang menempati RLH di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Rumah Tangga yang menempati RLH	%	42,57	45,7	53,3

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan, 2021.

4) Luasan Kumuh di Provinsi Bengkulu

Pada dasarnya permukiman kumuh terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu lahan, rumah, perumahan, komunitas, sarana dan prasarana dasar, yang terjalin dalam suatu sistem sosial, ekonomi dan budaya baik dalam suatu ekosistem lingkungan permukiman kumuh itu sendiri atau ekosistem kota. Permukiman kumuh harus dipandang secara utuh dan intégral dalam dimensi yang lebih luas. Beberapa dimensi permukiman kumuh yang senantiasa harus mendapat perhatian serius adalah permasalahan lahan di perkotaan, permasalahan prasarana dan sarana dasar, permasalahan sosial

ekonomi, permasalahan sosial budaya, permasalahan tata ruang kota, permasalahan aksesibilitas.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan permukiman layak dilaksanakan pemerintah pusat, pemerintah daerah atau setiap orang, untuk menjamin hak menempati lingkungan layak, sehat, aman, serasi dan teratur. Selain itu, pada UU tersebut juga menjelaskan jika terdapat dua bentuk penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas.

Luasan areal kumuh di provinsi Bengkulu berdasarkan SK kepala daerah masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

No.	SK Kepala Daerah	Luas	Jumlah
1	**Kota Bengkulu No. 81 Tahun 2021**		91,55 Ha
	a) Bentiring Permai	13,65 Ha	
	b) Kebun Tebeng	14,13 Ha	
	c) Panorama	13,99 Ha	
	d) Sumber Jaya	13,03 Ha	
	e) Lempuing	10,74 Ha	
	f) Tanah Patah	12,55 Ha	
	g) Teluk Sepang	13,46 Ha	
2	**Kab. Kaur No. 188.4.45-706 Tahun 2018**		66 Ha
	a) Nasal	10 Ha	
	b) Kaur Selatan	14 Ha	
	c) Kaur Tengah	11 Ha	
	d) Tanjung Kemuning	10 Ha	
	e) Kaur Utara	11 ha	
	f) Padang Guci	10 Ha	
3	**Kab. Bengkulu Tengah No. 760-369 Tahun 2017**		137,45 Ha
	a) Kembang Seri	11,24 Ha	
	b) Nakau	11,86 Ha	
	c) Taba Pasemah	13,45 ha	
	d) Harapan Makmur	11, 54 Ha	
	e) Dusun Anyar	10,55 Ha	
	f) Harapan	12,78 Ha	
	g) Rindu Hati	13,25 Ha	
	h) Pematang Tiga	13,68 Ha	
	i) Pematang Tiga Lama	10,78 Ha	
	j) Komering	14,65 Ha	
	k) Pungguk Beringin	13,67 Ha	
4	**Kab Bengkulu Selatan No. 600/458 Tahun 2020**		15, 20 Ha

No.	SK Kepala Daerah	Luas	Jumlah
	a) Kota Padang	15,20 Ha	
5	**Kab Seluma No. 470-341 Tahun 2020**		94,98 Ha
	1. Pasar Tais Blok 2	10,75 Ha	
	2. Puguk Blok 2	10,29 Ha	
	3. Tumbuan Blok 2	11,7 Ha	
	4. Talang Benuang Blok 1	10,94 Ha	
	5. Talang Benuang Blok 2	14,39 Ha	
	6. Air Periukan Blok 2	11,39 Ha	
	7. Cahaya Negeri Blok 1	13,03 Ha	
	8. Mas Mambang Blok 1	12,49 Ha	
6	**Kab Rejang Lebong No. 180-26.1 Tahun 2019**		67,5 Ha
	1. Pasar Baru	10, 54 Ha	
	2. Air Rumbai	12,94 Ha	
	3. Tanjung Dalam	10,22 Ha	
	4. Lubuk Kembang	13,80 Ha	
	5. Kepal Curup	10,00 Ha	
	6. Bedeng SS	10,00 Ha	
7	**Kab. Bengkulu Utara No. 660/730/BAPPEDA/ Th 2016**		15,02 Ha
	1. Lubuk Durian	15,02 Ha	

E. Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2021 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1) Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan satu kesatuan frase yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat atau kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik. Terhadap

perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah.

Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.70
Perkembangan Penanganan Kasus Pelanggaran Perda dan Ketertiban Umum di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penanganan kasus pelanggaran Perda/Pergub	%	10	10	30	30	50
Penanganan kasus pelanggaran Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2021.

2) Satuan Perlindungan Masyarakat

Satlinmas merupakan kekuatan utama dalam upaya perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, pengungsi, lamtibmas dan sosial kemasyarakatan. Tugas dari Satlinmas adalah melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan. Perkembangan Rasio Satlinmas di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.71
Perkembangan Rasio Satlinmas di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Satlinmas	%	61/10000	61/10000	61/10000	62/10000	63/10000

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
		penduduk	penduduk	penduduk	penduduk	penduduk

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, 2021.

F. Sosial

Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan Sosial di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2021 dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1) Penanganan PMKS dan Fakir Miskin

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.72
Perkembangan Penanganan PMKS dan Fakir Miskin
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
PMKS yang diberikan bantuan dan jamkesospelanggaran Perda/Pergub	%	n/a	46,9	49,85	46,7	60,5
PMKS yang ditangani	%	n/a	66,8	67,7	70,9	74

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2020.

2) Sumber Daya PSKS di Provinsi Bengkulu

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di Provinsi Bengkulu, sebaran sumber daya PSKS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.73
Sebaran PSKS di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No.	Kab/Kota	Pekerja Sosial Masyarakat	Lembaga Kesejaheraan Sosial	Karang Taruna	TKSK
1	Bengkulu Selatan	110	17	158	11
2	Rejang Lebong	55	27	156	14
3	Bengkulu Utara	40	15	220	19
4	Kaur	67	12	195	15
5	Seluma	56	14	202	14
6	Mukomuko	124	19	151	15
7	Lebong	83	10	104	12
8	Kepahiang	70	18	117	8
9	Bengkulu Tengah	46	15	143	9
10	Kota Bengkulu	60	125	67	9
	Jumlah Prov	711	265	1513	129

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, 2021.

2) Indeks Resiko Bencana

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempabumi, letusan gunungapi, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Perhitungan tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor *Hazard, Vulnerability*, dan *Capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten kota sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut.

Perkembangan Indeks Resiko Bencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.74
Perkembangan Indeks Resiko Bencana
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Resiko Bencana	Nilai	157,22	157,22	163,29	172	153,42

Sumber : BPBD Provinsi Bengkulu, 2020.

2.1.3.2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

Selain TPT, indikator lain dalam ketenagakerjaan adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Perkembangan TPAK di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.75
Perkembangan TPAK di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
TPAK	%	73,59	74,58	73,12	72,24	73,83

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2021.

Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 73,83 persen penduduk Bengkulu yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 26,17 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia). Kondisi kesehatan di Bengkulu yang relatif semakin baik membuat angka harapan hidup di Bengkulu semakin meningkat dan membuat jumlah lansia semakin bertambah. Di sisi lain, peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Apalagi fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perkembangan Tenaga Kerja berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.76
Perkembangan Tenaga Kerja yang Bekerja berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan	%	SD : 35,7	SD : 39,91	SD : 39,50	SD : 37,46	SD : 37,75

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
jenjang pendidikan		SMP : 19,9 SMA : 19,6 SMK : 9,2 DI/II/III : 2,5 Universitas : 13,1	SMP : 19,45 SMA : 20,32 SMK : 7,94 DI/II/III : 2,47 Universitas : 9,91	SMP : 20,47 SMA : 19,37 SMK : 8,56 DI/II/III : 2,63 Universitas : 9,48	SMP : 17,77 SMA : 21,26 SMK : 9,21 DI/II/III : 2,53 Universitas : 11,77	SMP : 18,46 SMA : 22,20 SMK : 8,75 DI/II/III : 2,38 Universitas : 10,45

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2021.

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2020 masih didominasi penduduk bekerja berpendidikan rendah yakni tamat Sekolah Dasar (SD) kebawah sebanyak 395.241 orang atau 37,75 persen dan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1932.84 orang atau 18,46 persen dengan total sebanyak 588.525 orang atau sebesar 56,21 persen. Sedangkan berpendidikan tinggi hanya sebanyak 134.399 orang atau 12,84 persen yang terdiri dari 24.962 orang berpendidikan Diploma atau 2,38 persen dan 109.437 orang atau 10,45 persen berpendidikan Universitas. Dalam setahun terakhir Februari 2019-Februari 2020 yang terjadi di Provinsi Bengkulu penduduk bekerja berpendidikan menengah bertambah sebanyak 2.644 orang atau naik sebesar 0,82 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi mengalami peningkatan sebanyak 9.800 orang atau bertambah 7,86 persen.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu:

1. pendayagunaan seluruh angkatan kerja nasional dalam proses pembangunan nasional atau perekonomian;
2. pemerataan kesempatan kerja di seluruh Indonesia;
3. perlindungan tenaga kerja di seluruh Indonesia; dan
4. kesejahteraan seluruh pekerja beserta keluarganya

Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan

ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat 9 (sembilan) indikator utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Hasil indeks pada setiap indikator utama memberikan informasi mengenai kinerja mesin-mesin pembangunan ketenagakerjaan, termasuk informasi mengenai berbagai permasalahan dan tantangan ketenagakerjaan yang harus segera diselesaikan sehingga dapat diformulasikan berbagai kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan yang tepat guna mendekatkan Indonesia pada 4 (empat) tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan. Perkembangan Tenaga Kerja berdasarkan Jenjang Pendidikan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.77
Perkembangan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
IPK	%	58,61	54,59	62,06	61,21	63,64

Sumber : Disnakertrans Provinsi Bengkulu, 2021.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.78
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
IPG	%	91,06	91,34	91,37	91,19	91,00

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

Sebaran IPG kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.79
Perkembangan IPG Kabupaten/Kota
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bengkulu Selatan	93,88	93,74	94,08	94,05	94,14
2	Kab. Kaur	86,85	86,91	87,20	87,13	87,12
3	Kab. Seluma	85,47	85,20	85,28	85,32	85,65
4	Kota Bengkulu	95,83	96,36	96,55	95,97	95,67
5	Kab. Rejang Lebong	93,55	94,15	94,59	94,15	93,78
6	Kab. Kepahiang	94,69	94,69	95,20	95,32	95,80
7	Kab. Bengkulu Tengah	85,00	85,77	86,36	86,55	86,83
8	Kab. Lebong	90,94	90,64	90,99	91,49	91,60
9	Kab. Bengkulu Utara	91,29	91,00	91,19	91,25	91,23
10	Kab. Mukomuko	84,10	83,98	84,18	83,95	83,88

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2021.

Selain IPG, indeks lain yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari Indeks Pemberdayaan Gender mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Perkembangan IDG di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.80
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
IDG	%	71,09	71,4	69,6	69,78	70,48

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Sebaran IDG kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.81
Perkembangan IDG Kabupaten/Kota
di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

No.	Kab/Kota	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bengkulu Selatan	54,75	54,89	55,2	55,03
2	Kab. Kaur	61,86	66,25	62,13	61,17
3	Kab. Seluma	65,15	61,95	65,68	65,6
4	Kota Bengkulu	76,46	76,61	77,58	77,68
5	Kab. Rejang Lebong	61,73	61,99	64,71	64,82
6	Kab. Kepahiang	73,29	73,63	65,09	66,27
7	Kab. Bengkulu Tengah	70,15	73,8	76,71	76,78
8	Kab. Lebong	79,39	79,68	67,14	70,74
9	Kab. Bengkulu Utara	65,76	65,92	65,77	62,32
10	Kab. Mukomuko	61,32	61,4	56,78	56,48

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Tindak kekerasan dan trafiking merupakan suatu permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian sehingga keberadaannya tidak begitu nampak dipermukaan padahal dalam prakteknya sudah merupakan permasalahan sosialyang berangsur angsur menjadi suatu kejahatan masyarakat dimana kedudukan manusia sebagai obyek sekaligus sebagai subyek. Selain masalah utama Kurangnya upaya hukum pencegahan yang kuat bagi para pelaku, masalah ini juga didasari oleh lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk mengerti dan paham akan adanya bahaya yang ditimbulkan. Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.82
Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	368	265	137	161	126

Sumber : LAKIP DP3APPKB Provinsi Bengkulu, 2021.

C. Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju,

mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Selain PPH, indikator yang menjadi rujukan kinerja ketahanan pangan adalah Angka Stabilitas Harga Pangan. Harga pangan baik ditingkat produsen maupun konsumen. Stabilitas harga pangan sangat dibutuhkan pemerintah untuk menjamin agar roda perekonomian terus berputar. Kenaikan harga pangan yang sulit diantisipasi dapat menimbulkan gejolak keresahan ditengah masyarakat.

Stabilitas harga pangan pada sisi produksi harus dijaga ketersediaannya, agar tidak terjadi kekurangan pasokan. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peningkatan produksi berada di Kementerian Pertanian. Namun produksi pertanian kita sangat rentan terhadap iklim dan gangguan cuaca. Jika cuaca mendukung terkadang harga pangan rendah akibat produksi melimpah, namun jika cuaca ekstrem seperti fenomena 'el nino dan lanina' produksi terganggu dan harga pangan tinggi.

Stabilitas harga pangan pada sisi konsumsi atau hilir terkait stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi tupoksi terbesar Kementerian Perdagangan. Jika ke dua sisi produksi dan konsumsi berjalan pada relnya, sebenarnya harga kebutuhan pokok di pasaran sudah pasti stabil. Namun jika harga terus mengalami kenaikan, maka harus dilakukan pengecekan pada dua sisi tersebut. Ada kemungkinan sisi produksi memang bermasalah karena gagal panen atau memang distribusi yang terhambat akibat infrastruktur yang rusak. Perkembangan Ketahanan Pangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.83
Perkembangan Ketahanan Pangan di Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Skor PPH Ketersediaan Pangan	Angka	92,64	83,32	80,29	84,24	82

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Skor PPH Konsumsi Pangan	Angka	80,6	80,5	82,7	85,6	82,6
Angka Stabilitas Harga Pangan tingkat produsen (Gabah)	Angka	-	3,52	7,94	6,21	4,94
Angka Stabilitas Harga Pangan tingkat konsumen (Beras)	Angka	-	1,87	2,65	3,21	2,72

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2021.

D. Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Kemajuan pembangunan di sektor Pertanahan salah satunya ditunjukan dengan dukungan *Access Reform. P*artisipasi pemerintah daerah dalam rangka mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari program Reforma Agraria dilakukan melalui verifikasi potensi pemberdayaan masyarakat di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 tersebar di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Rejang Lebong. Hasil menunjukkan pemberdayaan masyarakat mengikuti *Access Reform,* sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.84
Hasil Verifikasi Potensi Pemberdayaan masyarakat di Provinsi Bengkulu

Lokasi	Potensi	Instansi pendamping
Desa Bukit Kec. Semidang Logan Kabupaten Bengkulu Tengah	Objek Wisata Air Terjun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
	Peternakan Ayam Petelur	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
	Peternakan Sapi, Kambing dan Ayam Kampung	
	Sumber Mata Air	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
	Industri Pengolahan Kerupuk Ubi	

Lokasi	Potensi	Instansi pendamping
	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
	Koperasi yang sudah tidak aktif	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
	Akses Jalan Desa yang masih batu pengerasan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu
Desa Tebing Kandang Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara	Objek Wisata Pesisir	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
	Perkebunan Sawit	
	Peternakan Ayam	
	Perikanan Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
	Kerajinan Rumah Tangga berupa sapu lidi dan anyaman	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
Desa Pondok Panjang Kec. V Koto Kab. Mukomuko	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
	Perkebunan Sawit	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
Desa Air Bening Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong	Potensi Wisata Alam Telaga Tujuh Warna	Dinas Pariwisata
Desa Purwadadi Kec. Bermani Ulu Kab. Rejang Lebong	Pertanian, Perkebunan, Wisata Embang Suro Manggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu, 2020.

Selain itu, data subyek dan obyek redistribusi tanah yang ada di Provinsi Bengkulu dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.85
Data Asset Reform Yang Berasal Dari Kegiatan Redistribusi Tanah
Tahun Anggaran 2020

No	Kabupaten	Target Sertifikat (Bidang)	Jumlah Sertifikat Yang Sudah Diserahkan
1.	Rejang Lebong	500	500
2.	Bengkulu Utara	1.637	1.637
3.	Bengkulu Selatan	600	600
4.	Kaur	1.200	1.200
5.	Seluma	1.600	1.600
6.	Kepahiang	500	500
7.	Mukomuko	500	500
8.	Lebong	500	500
9.	Bengkulu Tengah	1.100	1.100
	Jumlah Total	8.137	8.137

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu, 2020.

Kesediaan/partisipasi pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang daerah dari tingkat provinsi hingga tingkat desa/kelurahan dalam rangka koordinasi dan penyediaan anggaran pendamping guna mendukung pelaksanaan sertipikasi dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu adalah melalui pendataan PTSL dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.85
Data Kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)
Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No.	Tahun	Target Peta Bidang Tanah	Target Sertifikat Hak Atas Tanah	Target K4	Realisasi Peta Bidang Tanah	Realisasi Sertifikat Hak Atas Tanah	% Realisasi K4
1.	2020	49.037	18.790	11.671	100	100	100
2.	2021	55.003	40.000	7.107	73,77	39,21	87,7

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu, 2020.

E. Lingkungan Hidup

Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk

mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2018 cenderung menurun. Pada tahun 2016, IKLH tercatat sebesar 60,33 dan menurun menjadi 47,64 pada tahun 2019. IKLH dibentuk oleh 3 (tiga) indikator yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Tutupan Lahan. Perkembangan kinerja Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.86
Perkembangan Lingkungan Hidup di Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
IKLH	Angka	72,43	70,18	74,32	64,41	69,92
Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	60,33	54,07	48,22	47,64	50,83
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	85,4	92,55	91,63	92,69	90,52

Sumber: DLHK Provinsi Bengkulu, 2020.

IKLH Tahun 2020 menurun hingga menjadi 69,92. IKA Tahun 2020 terjadi penurunan diakibatkan oleh terjadinya bencana banjir di beberapa lokasi di seluruh kabupaten dalam Provinsi Bengkulu. IKU dari tahun 2016-2020 berada pada kulitas udara di level sedang, tetapi nilai numerik cenderung naik apabila tidak ada aksi mitigasi dalam rangka penurunan emisi akan menyebabkan kualitas udara akan naik ke level berikutnya yaitu tidak sehat.

F. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagaibukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17

tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka sejak tahun 2013 di Provinsi Bengkulu penerapan e-KTP sudah meliputi 10 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data yang dihimpun dari dinas/instansi terkait, persentase penduduk yang memiliki KTP-el di Provinsi Bengkulu Tahun 2020 sudah mencapai 99,9%. Selain KTP-el, dokumen kependudukan yang harus dimiliki sesuai peraturan perundang-undangan adalah Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran. Pada tahun 2020, cakupan kepemilikan KIA di Provinsi Bengkulu baru mencapai 49,5% dan kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 97,83% pada tahun 2020.

Perkembangan kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.87
Perkembangan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	83,77	91,96	94,00	96,24	99,9
Persentase Kepemilikian KIA bagi Anak usia 0-16 tahun	%	-	-	7,00	27,61	49,5
Persentase Anak Usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	%	29,77	34,85	40,04	41,59	97,83

Sumber: Diskdukcapil Provinsi Bengkulu, 2021.

Sebaran penduduk yang memiliki KTP-el kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.88
Perkembangan Persentase Penduduk yang Sudah Rekam KTP-el Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bengkulu Selatan	86,28	98,9	98,21	99,04	103,3
2	Kab. Kaur	72,50	85,30	87.47	92,39	95,8
3	Kab. Seluma	72,40	88,40	92,11	86,23	100,6
4	Kota Bengkulu	87,67	92,80	94,01	94,95	98,3
5	Kab. Rejang Lebong	80,31	86,20	88,02	93,03	94,6
6	Kab. Kepahiang	77,61	91,50	93,79	91,41	93,8
7	Kab. Bengkulu Tengah	94,95	92,10	99,72	99,10	101,8
8	Kab. Lebong	79,12	77,90	84,31	97,85	103,3
9	Kab. Bengkulu Utara	89,80	98,50	99,37	107,42	103,7
10	Kab. Mukomuko	93,45	101,60	98,95	99,50	106,1

Sumber: Diskdukcapil Provinsi Bengkulu, 2021.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa, sebagai wilayah administrasi terendah secara mandiri telah dijadikan subyek pembangunan. Tujuannya mengurangi kesenjangan pembangunan perdesaan dan perkotaan yang cenderung bias perkotaan (urban bias). Selain itu, mendekatkan pelayanan pemerintahan di tingkat desa, supaya menjadi solusi bagi perubahan sosial ekonomi desa. Desa sebagai subyek pembangunan, diharapkan mampu mendekatkan pelayanan terhadap warga melalui pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan. Mulai dari menggerakkan perekonomian, membangun sarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana energi, transportasi, dan komunikasi, serta sarana lain yang dibutuhkan.

Perkembangan kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.89
Perkembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

Indikator	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Indeks Desa Membangun	Nilai	0,60	0,62	0,6246	0,6417
Jumlah Desa Tertinggal	Desa	614	614	403	290
Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	41	41	13	5

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, DPMPD Provinsi Bengkulu, 2021.

Indeks Pembangunan Desa di Provinsi Bengkulu secara rata-rata adalah sebesar 58,64. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata Indeks Pembangunan Desa secara nasional. Jumlah desa di Provinsi Bengkulu adalah 1.341 desa, sebanyak 171 desa (12,75 persen) berada dalam kategori desa tertinggal, 1.150 desa (85,76 persen berada dalam kategori desa berkembang, dan sebanyak 20 desa (1,49 persen) dalam kategori desa mandiri.

Rata-rata Indeks Pembangunan Desa paling tinggi adalah di Kabupaten Muko-muko dengan nilai indeks rata-rata 61,38 dengan jumlah desa sebanyak 148 desa, sedangkan rata-rata Indeks Pembangunan Desa yang paling rendah adalah di Kabupaten Kaur dengan nilai indeks rata-rata 55,15 dengan jumlah desa sebanyak 192 desa. Kabupaten Rejang Lebong adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang tidak memiliki Desa Mandiri.

Dalam regional Sumatera, capain IPD Provinsi Bengkulu tahun 2018 merupakan IPD teremdah kedua setelah Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Barat memiliki nilai IPD tertinggi di Pulau Sumatera dengan nilai indeks 67,70; diikuti oleh Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung (66,06) serta Provinsi Lampung (64,05). Sedangkan nilai Indeks Pembangunan Desa terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai indeks 56,62. Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Desa Pulau Sumatera (60,02) berada ada di atas rata- rata nasional atau terbesar ketiga setelah Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sulawesi.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, pemerintah terus berupaya menggalakan program KB.

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Tujuan Program keluarga berencana yang dicanangkan oleh pemerintah

adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Perkembangan kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.90
Perkembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
TFR	Angka	2,34	2,41	2,34	2,39	2,24
Unmeet Need KB	%	15,8	8,7	7,5	10	7,17
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	%	60,9	68,4	64,6	68,05	65,09

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, BKKBN Provinsi Bengkulu, 2021.

TFR Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 sebesar 2,39 meningkat dari tahun 2017 yang sebesar 2,34. TFR (*Total Fertility Rate*) adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. TFR digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Berdasarkan data tersebut, berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi.

Selain itu, pada tahun 2019 tercatat sebesar 10% keinginan Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia sehingga mereka mengambil keputusan tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Hal ini juga tercermin dari menurunnya *m-CPR* yang menjadi 64,6% pada tahun 2019 dari sebelumnya 60,9% pada tahun 2016.

I. Perhubungan

Peranan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan Indonesia. Konektivititas dalam pembangunan perlu dilakukan agar Indonesia tidak menjadi negara yang bubar. Untuk mencapai konektivitas diperlukan koordinasi yang dijalankan secara sebaik-baiknya agar pembangunan infrastruktur merata di seluruh Indonesia. Diantaranya dengan pembangunan infrastruktur di sektor perhubungan. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Pembangunan transportasi dalam negeri harus dibangun secara berkelanjutan Hal ini agar kelestarian lingkungan dapat terjaga walaupun bermunculan titik-titik perekonomian baru di daerah. Pembangunan transportasi secara berkelanjutan akan menjangkau kebutuhan dan akses dari masyarakat lebih luas. Dengan begitu, manfaat moda transportasi mampu mendukung pengembangan ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Keberhasilan ekonomi juga diyakini sangat tergantung pada bagaimana layanan transportasi mampu mendukung dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha domestik.

Perkembangan kinerja urusan Perhubungan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.91
Perkembangan Perhubungan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019

Indikator	Satuan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Persentase Pemenuhan Fasilitas Kelengkapan Jalan	%	83,56	94,46	96,39	92,35
Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Pelabuhan penyeberangan	%	82,18	94,61	90,49	82,52

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, 2020.

J. Komunikasi dan Informasi

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Good governance akan terlaksana dengan baik apabila ada pengawasan publik, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik

merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatanrakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika, Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan tranparansi. Selain itu pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi. Semakin tingginya implementasi keterbukaan informasi publik mengindikasikan keterbukaan atau transparansi yang diberikan badan public kepada masyarakat berjalan dengan baik. Hal tersebut nantinya akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai *good governance.*

Perkembangan kinerja urusan Komunikasi dan Informasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.92
Perkembangan Komunikasi dan Informasi
di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Indeks SPBE	Nilai	1,8	2,4	2,9
Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	40	70	88,2

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu, 2020.

Evaluasi SPBE Tahun 2019 dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan evaluator internal instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimana pada tahun 2019 Indeks SPBE sebesar 2,4 yang meningkat dari tahun sebelumnya dimana tahun 2018 sebesar 1,8. Hal ini menunjukkan semakin banyak implementasi aplikasi-aplikasi e-government yang digunakan oleh OPD dan kemudahan layanan pemerintah kepada pengguna sesuai dengan fungsi masing-masing dan adanya kebijakan-kebijakan/regulasi-regulasi yang mendukung penerapan Teknologi Informasi dan komunikasi.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan di era globalisasi sangat bergantung pada sektor ekonomi sebagai ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan ekonomi, adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. UMKM setelah krisis ekonomi terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini juga membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk kontribusi dan peran UMKM, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan sehingga peran mereka sebagai pilar dalam membangun ekonomi bangsa dapat berjalan optimal.

Pembangunan sektor Koperasi dam UMKM di Provinsi Bengkulu terus menunjukan peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah UKM di Provinsi Bengkulu meningkat menjadi 46.417 UMKM dari tahun 2016 yang baru mencapai 33.408 UMKM. Saat ini, UMKM telah berkembang pesat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga UMKM lebih banyak bergerak melalui *start up* maupun media sosial.Perkembangan kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.93
Perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

Indikator	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Jumlah UMKM	UMKM	37.113	42.481	46.417	46.523
Jumlah Koperasi Aktif dan bersertifikat NIK	Koperasi	179	355	481	532
Volume Usaha Koperasi	Rupiah	358.722.481.746	338.493.455.389	397,099,367,206	458.776.060.393

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, 2020.

L. Penanaman Modal

Izin Prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA. Beberapa hal yang termasuk di dalamnya adalah pembuatan izin investasi, pemesanan nama perusahaan, pembuatan akta, pembuatan NPWP perusahaan, tanda daftar perusahaan, izin mengerjakan tenaga asing, dan lain-lain.

Kemudahan ijin investasi akan mempengaruhi nilai investasi disuatu daerah. Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : Pertama faktor Sumber Daya Alam, Kedua faktor Sumber Daya Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat faktor kebijakan pemerintah, Kelima faktor kemudahan dalam peizinan.

Perkembangan kinerja urusan Penanaman Modal di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.94
Perkembangan Penanaman Modal Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat bidang perizinan	Nilai	81,45	82,78	89,21	89,39	89,58
Nilai Investasi	Trilyun Rupiah	1,6	2,15	6,7	7,6	8,1

Sumber: DPMPTSP Provinsi Bengkulu, 2020.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan di Provinsi Bengkulu terus meningkat. Pada Tahun 2019, IKM Bidang Perizinan adalah sebesar 89,39 meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 81,45. Selain itu, Nilai Investasi juga terus meningkat dari tahun 2016 yang hanya sebesar 1,6 triliun rupiah menjadi sebesar 7,6 triliun rupiah.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujukan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jumlah pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu terus meningkat. Pemuda binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu terus meningkat dari sebesar 56 orang pada tahun 2016 menjadi 120 orang pemuda pada tahun 2019.

Olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu olahraga seharusnya dilakukan oleh umat manusia, dan pemerintah harus berperan untuk menjadikan olahraga sebagai ajang kompetisi dan prestasi. Setiap orang yang berolahraga tidak mempunyai tujuan yang sama, ada yang hanya untuk mencari kebugaran dan bagi seorang atlet tujuan utama berolahraga ialah ingin mendapatkan prestasi yang tinggi, sering disebut

dengan prestasi olahraga. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 5 (lima) nomor lomba olahraga yang dimenangkan di tingkat nasional.

Perkembangan kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.95
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019

Indikator	Satuan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	Orang	56	160	113	120
Jumlah Nomor Lomba Olahraga yang dimenangkan tingkat nasional	Nomor	4	5	4	5

Sumber: Dispora Provinsi Bengkulu, 2020.

N. Statistik

Data ialah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Data statistik yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan, baik itu instansi pemerintah maupun swasta/ investor. Jumlah data statistik sektoral yang tersedia di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu terus meningkat menjadi 30 data pada tahun 2019 dari sebanyak 20 data pada tahun 2016.

Perkembangan kinerja urusan Statistik di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.96
Perkembangan Statistik di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

Indikator	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	Data	20	26	30	30

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu, 2020.

O. Persandian

Persandian memang identik dengan kerahasiaan, karena informasi yang disampaikan perlu diamankan dan harus sampai pada tujuan, sehingga jangan sampai gagal. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik, bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Salah satu misi dari Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu adalah meningkatkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Ini merupakan suatu harapan untuk dapat meningkatkan kesejahterakan masyarakat dengan pemanfaatan TIK, menyediakan hosting dan colocation, membangun data center dalam rangka meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK di era keterbukaan informasi. Selain itu Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu meningkatkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dalam pengamanan informasi.

Perkembangan kinerja urusan Persandian di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.97
Perkembangan Persandian di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Indeks Persandian (Audit Persandian)	Nilai	Kurang	62,96 (Cukup)	66,35 (Cukup)

Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu, 2021.

Berdasarkan data dari Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu bahwa penilaiaan audit persandian dilaksanakan mulai Tahun 2018 dengan capaian pada Tahun 2020 pada tingkat Cukup dengan nilai 66,35. Untuk dapat meningkatkan indeks persandian agar dapat menerapkan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik dengan menambahkan fungsi otentifikasi/ keaslian pada dokumen.

P. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan di Provinsi Bengkulu sudah menunjukan kinerja yang baik, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan suatu instrumen yang disusun bersama antara Kemendikbud, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pusat Statistik untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan. Instrumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Terdapat 31 indikator penyusun indeks tersebut yang dirangkum dalam tujuh dimensi pengukuran ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Adapun metodologi dan sumber data dikembangkan untuk menghitung angka IPK secara nasional dan 34 provinsi di Indonesia. Pada Tahun 2018, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencapai sebesar 59,95%, capaian tertinggi ke-empat nasional.

Q. Perpustakaan

Gemar membaca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Ditinjau dari segi pengamatan global tentang gemar membaca masyarakat, secara kasar sebenarnya masyarakat Provinsi Bengkulu minat bacanya cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari antusias masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan, taman bacaan, sudut baca, rumah baca dan sejenisnya selalu ramai dikunjungi masyarakat.

Perkembangan kinerja urusan Perpustakaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.98
Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	Orang Pengunjung	24.610	24.619	25.040	27.681	29.490 (onsite) 3.515 (online)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan Provinsi Bengkulu, 2020.

R. Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip sangatlah penting karena berfungsi untuk penunjang aktivitas informasi, dan wahana komunikasi.

Perkembangan kinerja urusan Kearsipan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.99
Perkembangan Kearsipan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase arsip statis dan dinamis yang terkumpul	Arsip	28.200	28.050	28.200	28.570	29.550

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan Provinsi Bengkulu, 2020.

2.1.3.3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Sub sektor perikanan di Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang cukup besar, terutama perikanan laut. Hal ini disebabkan letak wilayah Provinsi Bengkulu yang sebagian besar menghadap ke Samudera Hindia dengan panjang pantai yang diperkirakan sekitar 525 km, dengan luas Laut Teritorial sebesar 53.000 km2 dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu batas jarak 12-200 mil laut dari pantai dengan luas sebesar 685.000 km2. Sebagai daerah maritim, sektor kelautan dan perikanan menjadi komoditas utama Provinsi Bengkulu.

Perkembangan kinerja urusan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.100
Perkembangan Kelautan dan Perikanan
di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

Indikator	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	67.547,64	69.105.178,96	70.860,48	72.750
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	115.041.017	122.801.738	193.490.910	214.025.868
Jumlah Nelayan Tangkap	Orang	26.614	27.429	30.334	30.334
Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	27.245	27.453	27.761	28.089

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, 2021.

B. Pariwisata

Seiring dengan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang menjadi tumpuan industri ekstraktif, maka pemerintah dipandang perlu untuk segera mengembangkan sektor lain yang terbarukan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pariwisata dianggap menjadi sektor yang cukup potensial untuk dikembangkan selain karena mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, juga cukup strategis bagi suatu negara atau daerah karena pariwisata dipandang sebagai penunjang sektor lainnya. Sektor pariwisata memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan kepariwisataan Bengkulu beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Perkembangan pariwisata ditandai dengan kemajuan di bidang transportasi dan telekomunikasi yang semakin memberikan kemudahan bagi mobilitas manusia dan pergerakan lintas negara, provinsi, serta kabupaten/kota.

Dalam mengkukur perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu, wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu terus meningkat menjadi 643.928 orang wisman pada tahun 2019 dari sebesar 492.841 orang wisman pada tahun 2016. Kemudian rata-rata lama menginap pada tahun 2020 (Agustus) yaitu sebesar 1,31 hari dan tingkat hunian hotel mencapai 41,40%. Perkembangan kinerja urusan Pariwisata di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.101
Perkembangan Pariwisata di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah wisatawan	orang	492.841	2.270.418	2.155.241	2.586.362	643.928
Rata-rata Lama Menginap	hari	1,34	1,62	1,71	1,8	1,23
Persentase Tingkat Hunian Hotel	%	65,27	70,29	72,05	67,97	45,00

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, 2021.

C. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor utama yang berperan penting pada perekonomian nasional dalam menyerap tenaga kerja, sumber pertumbuhan ekonomi, dan penyumbang devisa. Di samping itu, sektor pertanian juga menggerakkan sektor lain dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Provinsi Bengkulu karena merupakan sektor utama yang memberikan peranan terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2020 peranan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Bengkulu adalah 28,36 persen. Dengan nilai nominal 20.795,06 milyar rupiah (Atas Dasar Harga Berlaku). Cakupan kegiatan pertanian terdiri dari beberapa jenis kegiatan yaitu pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian, kehutanan dan penebangan kayu serta perikanan.

Provinsi Bengkulu juga mempunyai keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Selain sayuran dan buah-buahan, juga terdapat tanaman hias dan tanaman biofarmaka. Jenis tanaman hias yang ada antara lain anggrek, krisan, mawar, dan sedap malam. Sedangkan jenis tanaman biofarmaka yang menghasilkan antara lain jahe, kencur, lengkuas, dan kunyit. Pada sektor perkebunan, dukungan luas wilayah dan kondisi lahan di Provinsi Bengkulu terhadap komoditas tanaman perkebunan menjadikan wilayah ini banyak yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Selain dikelola oleh perusahaan pemerintah (Perkebunan Nusantara), terdapat juga perkebunan yang dimiliki dan dikelola rakyat. Komoditi yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, kopi, dan lain-lain. Data perkebunan rakyat yang ditampilkan adalah data tahun 2020 yang

bersumber dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu.

Pada sektor peternakan, hewan ternak dibagi dalam dua kelompok yaitu ternak besar dan ternak kecil serta unggas. Hewan yang masuk kategori ternak besar adalah sapi perah, sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan hewan yang masuk kategori ternak kecil dan unggas adalah kambing, domba, babi, itik, ayam ras, dan ayam kampung. Secara umum, populasi ternak besar mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perkembangan kinerja urusan Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.102
Perkembangan Pertanian di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Produksi padi	Ton GKG	641.881	731.169	288.811	296.472	296.925
Produksi jagung	TON PK	133.901	148.090	117.998	175.132	141.680
Produksi bawang merah	Kwintal	5.210	4.900	9.105	5.234	5.197
Produksi cabai merah	Kwintal	472.070	321.454	397.936	378.118	114.926
Produksi kopi	Ton	56.815	58.811	61.591	62.490	62.759
Produksi karet	Ton	89.510	90.393	99.842	99.260	101.246
Produksi sawit	Ton	455.074	725.949	735.766	776.590	799.891
Jumlah produksi daging sapi	Ton	3.056,90	2.587,20	2.471,90	2.587,40	3.149,00
Jumlah Produksi daging kambing	Ton	257,90	94,80	99,90	94,91	114,47
Jumlah produksi daging unggas	Ton	5.229,70	8.552,60	8.057,90	14.083,80	13.881,80

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertanian Provinsi Bengkulu, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu, 2021.

D. Kehutanan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunya fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuna dan teknologi. Perhitungan indeks tutupan hutan merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administratif kota.

Luasan Lahan kritis berkurang karena adanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan pemberdayaan masyarakat, tetapi kegiatan dalam rangka penurunan lahan kritis belum begitu luas, dari data tabel pada tahun 2016, lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 159.146,13 Ha dan di luar kawasan hutan seluas 561.658,46 Ha dan pada tahun 2019 lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 157.376,13 Ha dan di luar kawasan hutan seluas 558.908,46 Ha. Terjadi penurunan dari tahun 2016-2019 untuk lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 1.770 Ha dan di luar kawasan hutan seluas 2.750 Ha. Bila diambil rata-rata penurunan per 3 tahun di dalam kawasan hutan 590 Ha dan di luar kawasan hutan 916,66 Ha. Berdasarkan data, lahan kritis terluas di dalam kawasan hutan berada di kabupaten Kaur seluas 23.730,58 Ha dan di luar kawasan hutan berada di kabupaten Bengkulu Utara seluas 163.031,99 Ha.

Laju deforestasi berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu cenderung meningkat diakibatkan oleh kurangnya kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat memalui program perhutanan sosial, serta pemeliharaan batas kawasan hutan, dan untuk tahun 2019 belum dapat dihitung dikarenakan data tutupan lahan tahun 2018 belum tersedia.Perkembangan kinerja urusan Kehutanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.103
Perkembangan Kehutanan di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

Indikator	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Indeks Tutupan Lahan	Nilai	55,84	55,52	53,25	53,15

Indikator	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
Luas Lahan Kritis	Ha	720,309.09	719,384.59	524.709,22	363.575,12
Laju Deforstasi	Nilai	0,13	0,96	0,23	0,22

Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, 2020.

Sebaran Lahan Kritis Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.104
Perkembangan Lahan Kritis Kabupaten/Kota
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019

Kab	Lahan Kritis 2016		Lahan Kritis 2017		Lahan Kritis 2018		Lahan Kritis 2019	
	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Dalam Kawasan	Luar Kawasan
Bengkulu Selatan	16,382.11	44,391.45	16,382.11	44,291.45	16,132.11	44,291.45	16,132.11	44,291.45
Bengkulu Tengah	20,860.78	72,562.74	20,860.78	72,562.74	20,860.78	72,562.74	20,860.78	71,462.74
Bengkulu Utara	14,061.16	163,031.99	14,061.16	162,931.99	13,811.16	162,931.99	13,811.16	162,781.99
Kaur	23,730.58	69,379.23	23,730.58	69,379.23	23,555.58	69,379.23	22,805.58	68,754.23
Kota Bengkulu	5.80	4,283.58	5.80	4,283.58	5.80	4,283.58	5.80	4,283.58
Lebong	20,181.21	44,735.43	20,181.21	44,735.43	20,181.21	44,585.43	20,181.21	44,360.43
Mukomuko	21,589.20	65,276.41	21,589.20	65,276.41	21,589.20	65,276.41	21,539.20	65,076.41
Rejang Lebong	16,138.04	9,986.17	15,843.04	9,986.17	15,843.04	9,986.17	15,843.04	9,986.17
Seluma	19,058.86	82,943.79	19,058.86	82,943.79	19,058.86	82,943.79	19,058.86	82,943.79
Kepahiang	7,138.38	5,067.67	7,138.38	5,067.67	7,138.38	4,967.67	7,138.38	4,967.67
TOTAL	159,146.13	561,658.46	158,851.13	561,458.46	158,176.13	561,208.46	157,376.13	558,908.46

Sumber: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, 2020.

E. Energi dan Sumber Daya Mineral

Peranan subsektor listrik dimana peranan subsektor ini dalam perekonomian Provinsi Bengkulu sangat kecil. Selama kurun waktu 2015-2019 kontribusi subsektor listrik dalam PDRB kurang dari 1 persen per tahun. Pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan listrik di rovinsi Bengkulu terus diupayakan,

baik melalui peningkatan kinerja pembangkit listrik tenaga diesel yang elah ada, penambahan mesin-mesin pembangkit listrik baru, serta melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kinerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Bengkulu pada kurun waktu 2016-2019 relatif meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah desa yang dialiri listrik pada tahun 2019 sebanyak 1513 desa, meningkat dari tahun sebelumnya.

Ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian (industri, perdagagangan, dan sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE). Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga.

Sementara itu subsektor pertambangan juga merupakan subsektor yang kecil peranannya dalam perekonomian Provinsi Bengkulu seperti terlihat dari relatif rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam PDRB Provinsi Bengkulu. Selama waktu 2015-2019 peranan subsektor pertambangan dalam PDRB rata-rata berkisar di 3 persen saja per tahun. Rendahnya peranan subsektor pertambangan dalam perekonomian disebabkan belum optimalnya eksploitasi bahan-bahan tambang yang terkandung di bumi Provinsi Bengkulu.

Perkembangan kinerja urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.105
Perkembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Rasio Elektrifikasi	%	94,88	99,99	99,99
Persentase Luas lahan Reklamasi	%	55,82	51,73	69,24
Nilai PNBP Sektor Pertambangan	Rupiah	168.995.41 9.966,68	116.441.3 99.570,54	37.965.442.999 *triwulan II 2020

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, 2020.

Sebaran Rasio Elektrifikasi kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.106
Perkembangan Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	Indikator Data				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bengkulu Selatan	99,00	99,30	100,00	99,99	99,87
2	Rejang Lebong	83,52	83,80	89,44	99,99	100,00
3	Bengkulu Utara	76,00	76,15	81,87	99,99	99,64
4	Kaur	89,00	88,89	93,63	99,99	100,00
5	Seluma	81,00	80,73	84,63	99,99	100,00
6	Mukomuko	78,00	89,72	92,07	99,99	100,00
7	Lebong	86,00	85,56	89,92	99,99	100,00
8	Kepahiang	98,00	97,91	100,00	99,99	99,11
9	Bengkulu Tengah	80,00	80,08	85,07	99,99	100,00
10	Kota Bengkulu	121,00	121,46	100,00	99,99	100,00

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, 2021.

F. Perdagangan

Provinsi Bengkulu mempunyai potensi yang cukup besar dalam perdagangan luar negeri melalui ekspor berbagai komoditas, khususnya komoditas yang berasal dari sumber daya alam. Komoditas ekspor Provinsi Bengkulu antara lain cangkang sawit, CPO (Crude Palm Oil), batubara dan karet. Pada tahun 2019, total nilai ekspor mencapai 208,55 juta US$. Jumlah ini turun signifikan sebesar 23,29% dibandingkan total nilai ekspor pada tahun 2018. Apabila ditinjau dari nilai ekspornya, batubara merupakan komoditas utama ekspor Provinsi Bengkulu, dengan nilai ekspor 105,36 juta US$ atau 50,52 persen dari total ekspor, kemudian diikuti komoditas Karet 27,32 persen dan CPO 16,37 persen.

Berdasarkan pelabuhan muatnya, proporsi total nilai ekspor Provinsi Bengkulu terbesar disalurkan melalui pelabuhan Pulau Baai, yaitu sebesar 115,10 juta US$ atau sebesar 55,19 persen terhadap keseluruhan ekspor dari Provinsi Bengkulu. Ekspor yang disalurkan melalui pelabuhan Teluk Bayur di Provinsi Sumatra Barat memiliki total nilai sebesar 34,49 juta US$ atau 16,53 persen, menempati urutan kedua di bawah Pelabuhan Pulau Baai. Hal ini secara umum menunjukkan capaian pemerintah daerah dalam melakukan langkahlangkah optimalisasi ataupun peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelabuhan di Provinsi Bengkulu, sehingga tetap menjadikan pelabuhan pulau baii sebagai sarana utama ekspor impor.

Perkembangan kinerja urusan Perdagangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.107
Perkembangan Perdagangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Nilai Ekspor	US (dolar)	275,25	271,89	208,55
Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rupiah (Milyar)	7.002,12	7.479,22	7.189,34

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, 2021.

G. Perindustrian

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan sektoral yang menjadi basis perekonomian dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Tak terkecuali Provinsi Bengkulu yang menjadikan industri kecil menengah dan industri besar dan sedang sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong pengembangan wilayah wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan kegiatan industri. Pengembangan wilayah wilayah tersebut diharapkan selain dapat sebagai kegiatan ekonomi utama (prime mover) juga dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain.

Perkembangan kinerja urusan Perindustrian di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.108
Perkembangan Perindustrian di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Industri Kecil Menengah	UMKM	5.605	6.048	6.048	6.491	6.491
Jumlah industri Sedang dan Besar	Industri	40	40	40	43	44

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, 2020.

Sebaran Industri Kecil dan Menengah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.109
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

No.	Kab/Kota	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Bengkulu Selatan	374	369	369	470	470
2	Kab. Kaur	210	238	238	349	349
3	Kab. Seluma	660	665	665	660	660
4	Kota Bengkulu	566	611	611	707	707
5	Kab. Rejang Lebong	682	1.010	1.010	1.010	1.010
6	Kab. Kepahiang	303	303	303	329	329
7	Kab. Bengkulu Tengah	342	348	348	362	362
8	Kab. Lebong	345	689	689	638	638
9	Kab. Bengkulu Utara	963	1.003	1.003	1.035	1.035
10	Kab. Mukomuko	1.160	812	812	931	931

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, 2020.

H. Transmigrasi

Pembangunan transmigrasi sekarang lebih kepada bagimana mengembangkan suatu kawasan. Maka dari itu perlu adanya perubahan upaya-upaya bagaimana membangun transmigrasi. Pemerintahan saat ini sangat mendukung Program Transmigrasi. Salah satu dukungan pemerintah tersebut telah dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Hal ini menandakan keseriusan Pemerintah dalam menangani program transmigrasi yang secara nyata memberikan kontribusi dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Seperti halnya teknologi yang terus berkembang sesuai jaman, transmigrasi juga mengalami transformasi dalam menjalankan kegiatannya, yang di kenal dengan Transpolitan 4.0. Transmigrasi bukan lagi untuk menjawab permasalahan distribusi penduduk, namun untuk menjawab pemerataan pertumbuhan berbasis pembangunan wilayah yang didukung dengan teknologi informasi.

Dengan arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan dalam kurun waktu 2020-2024, Fokus transmigrasi saat ini adalah untuk pemenuhan NSPK pada permukiman dan kawasan transmigrasi, Revitalisasi terhadap kawasan yang sudah dibangun, dan mengembangkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) melalui program kemitraan serta TORA di kawasan transmigrasi. Hal ini untuk memastikan keberhasilan transmigrasi melalui kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pengembangan produk unggulan untuk kesejahteraan transmigran dan masyarakat

sekitarnya. Pemerintah dalam penyelenggaraan transmigrasi juga menargetkan perubahan paradigma baru terkait pengembangan transmigrasi bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang mental spiritual, bidangkelembagaan dan bidang pengelolaan Sumber Daya Alam. Pembangunan fisik di permukiman atau kawasan transmigrasi harus seiring dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Target tersebut diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat 5 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu yaitu, di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu kawasan transmigrasi Lagita dan Enggano, di Kabupaten Kaur yaitu kawasan transmigrasi Muara Sahung/Maje, di Kabupaten Rejang Lebong yaitu kawasan transmigrasi Padang Ulak Tanding dan di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu kawasan transmigrasi Kedurang. Perkembangan kinerja urusan Transmigrasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.110
Perkembangan Transmigrasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, 2020.

2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Kesekretariatan Daerah

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (OUTCOME). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP Provinsi Bengkulu terus mengalami

peningkatan. Pada tahun 2016, Nilai SAKIP Provinsi Bengkulu adalah sebesar 64,12 dan meningkat menjadi 68,98 pada tahun 2020.

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri RI menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing.

Selain itu untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanana Grand Design Reformasi Birokrasi dilakukan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ini berisi uraian atau penjabaran dari kriteria dan ukuran keberhasilan sebagaimana termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peratuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi bengkulu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi di Provinsi Bengkulu mencapai 60,52, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 56,43.

Perkembangan kinerja urusan Kesekratariatan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.111
Perkembangan Kesekretariatan Daerah
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Nilai SAKIP	Angka	64,12	64,67	66,04	68,48	68,98
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	56,43	59,21	60,18	60,52	63,34

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, 2021.

B. Kesekretariatan DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD, salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi. Arti penting fungsi legislasi DPRD diantaranya bersama kepala daerah merupakan fungsi pembuat Perda. Yang mana Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. Perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah. Perda sebagai kontrak sosial di daerah. Perda sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Sedangkan penguatan Fungsi Legislasi, pada pasal 95 ayat (1) PP Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa: "DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda". Untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi tersebut, pada pasal 24 PP Nomor 37 tahun 2005 dikemukakan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD
2. Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan diantaranya rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, dan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

Perkembangan kinerja urusan Kesekratariatan DPRD di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.112
Perkembangan Kesekretariatan DPRD
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	Raperda	9	15	16	11	10

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, 2021.

2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Proses pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih baik bagi masyarakat. Sedangkan kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik tidak hanya mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah dan tahunan.

Proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional yang dilaksanakan setiap Tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah untuk Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi/Kab/Kota .

Perkembangan kinerja urusan Perencanaan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.113
Perkembangan Perencanaan Daerah
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Perencanaan Kinerja	Angka	23,17	23,41	23,51	23,9	24,19
Nilai Pengukuran Kinerja	Angka	14,63	14,7	14,88	15,09	15,17

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Bengkulu, 2020.

B. Keuangan

Provinsi Bengkulu memantapkan komitmennya untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Bengkulu mampu di pertahankan dengan predikat WTP selama 3 tahun terakhir.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. PAD dalam APBD Provinsi Bengkulu terus meningkat dari sebesar 745 miliar rupiah pada tahu 2016 menjadi 1,1 triliun rupiah pada tahun 2020. Namun dalam APBD Perubahan TA. 2020, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan menurun akibat dari dampak pandemi Covid-19.

Perkembangan kinerja urusan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.114
Perkembangan Keuangan Daerah di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Opini Laporan Keuangan	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai PAD	Rupiah	745.385.297.497,49	804.575.838.594,27	872.257.738.965,75	826.674.936.049,87	712.345.548.601,91

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu, 2020.

C. Kepegawaian

Profesionalitas dalam birokrasi adalah sesuatu hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Karena dengan profesional, birokrasi dapat ciptakan kinerja yg efektif dan efisiensi menuju layanan pemerintahan yg semakin berkualitas. Indeks Pengukuran Profesionalitas (IPP) ASN yang saat ini digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian adalah dengan metode composite index. Indikator yang digunakan, antara lain: kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja. Adapun premis indikator profesionalitas ASN adalah (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan pegawai yang semakin bersih. Data-data yang digunakan harus bersinggungan dengan individu karena profesionalitas dihitung berdasarkan individu. Penyusunan indeks profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan kepemimpinannya agar disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas.

Perkembangan kinerja urusan Kepegawaian di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.115
Perkembangan Kepegawaian di Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	n/a	68	n/a	50,03	71,92

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, 2020.

D. Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan penyelenggaraan diklat adalah membentuk aparatur sipil negeri (ASN) yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai pelayan masyarakat. Saat ini tercatat sebanyak 25% Diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Bengkulu dengan predikat Akreditas A. Kedepan, ditargetkan seluruh Diklat yang diselenggarakan akan memiliki predikat akreditasi A. Perkembangan kinerja urusan Pendidikan dan Pelatihan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.116
Perkembangan Pendidikan dan Pelatihan
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Diklat yang berkareditasi A	%	25%	25%	25%	50%	75%
Persentase jabatan struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	Eselon II : 27 Eselon III : 50 Eselon IV : 35	Eselon II : 30 Eselon III : 87 Eselon IV : 61	Eselon II : 42 Eselon III : 71 Eselon IV : 62	Eselon II : 42 Eselon III : 60 Eselon IV : 60	Eselon II : 70 Eselon III : 90 Eselon IV : 75

Sumber: BPSDM Provinsi Bengkulu, 2020.

E. Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Pada tahun 2019, nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebesar 280 sesuai dengan Kepmendagri No.002.6-115 Tahun 2019 tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019. Perkembangan kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.117
Perkembangan Penelitian dan Pengembangan
di Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020

Indikator	Satuan	Tahun		
		2018	2019	2020
Nilai Indeks Inovasi Daerah	Nilai	280	280	5.269

Sumber: Bappeda dan Litbang Provinsi Bengkulu, 2020.

E. Penghubung

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam melakukan promosi keunggulan daerah adalah melalui promosi potensi daerah di pusat ibukota. Badan Penghubung Provinsi Bengkulu memiliki anjungan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai wadah promosi dan edukasi budaya dan potensi Bengkulu. Jumlah pengunjung anjungan Bengkulu di TMII tercatat sebesar 128.957 orang pada tahun 2019, dan per September 2020 sudah tercatat sebanyak 13.750 orang pengunjung. Perkembangan kinerja urusan Penghubung di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.118
Perkembangan Penghubung di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Jumlah Pengunjungan Anjungan Bengkulu di TMII	Orang	132.126	154.056	101.683	128.957

Sumber: Badan Penghubung Provinsi Bengkulu, 2020.

2.1.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

A. Pengawasan

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governanc*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Maksud pengawasan dan pemeriksaan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah menjadi hal yang lumrah dan harus dilaksanakan oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan kinerja dan mendayagunakan para aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup. Masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar perbaikan kesalahan, melainkan harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan dan pemeriksaan" adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Perkembangan kinerja urusan Pengawasan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.119
Perkembangan Pengawasan Pemerintahan
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	%	70,3	66,81	60,61	64,99	59,50
Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Menuju Level 3 (dalam proses QA BPKP)
Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Menuju Level 3 (dalam proses QA BPKP)

Sumber: Inspektorat Provinsi Bengkulu, 2020.

2.1.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

A. Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Poleksosbud (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya) adalah sebuah kesatuan dari beberapa aspek yang bisa menjadi sebuah potensi besar bagi Bangsa Indonesia. Peran dan efektifitas pemantauan perkembangan situasi terkait Poleksosbud harus terus dijaga yaitu dengan melakukan langkah perbaikan yang konkrit serta efektif demi perbaikan kualitas bangsa secara menyeluruh. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kunci stabilitas daerah dan nasional. Strategisnya kedudukan Kesbangpol dalam stabilitas keamanan tersebut, Kesbangpol diharapkan turut mencermati dinamika dan

perkembangan yang ada, serta turut andil dalam menghadapi tantangan bangsa. Tak hanya persoalan radikalisme dan terorisme, menurut Tjahjo, Kesbangpol juga turut dapat mengambil peranan dalam memberantas Narkoba yang mengancam generasi bangsa. Dalam hal membumikan Pancasila, Kesbangpol harus bersinergi dengan pemangku kepentingan lain, Forkopimda termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya, termasuk dalam mencermati dinamika dan persoalan yang ada.

Perkembangan kinerja urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.120
Perkembangan Kesatuan Bangsa dan Politik
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Stabilitas Kesatuan Bangsa	Nilai	n/a	0,60	0,63	0,63	0,65
Indeks Demokrasi	%	74,23	72,73	70,71	78,79	n/a

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu, 2020.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dimilikinya. Daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah karena akan bertumpu pada aspek-aspek kemampuan ekonomi daerah, penciptaan iklim berinvestasi, ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur pendukung, dan ketersediaan sumberdaya manusia bagi pengembangan usaha.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Indikator yang mengukur Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah direspresentatifkan dengan indikator sebagai berikut :

1) Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibanding dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Perhitungan dan intepretasi data yang sama berlaku juga untuk Nilai Tukar Nelayan.

Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nelayan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.121
Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
NTP	%	93,06	94,49	94,01	93,89	122,12
NTN	%	96,56	96,14	97,56	97,88	99,25

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2021.

2) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumaht angga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi

pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi Bengkulu terus meningkat hingga mencapai Rp.10.409.000 yang artinya, secara rata-rata pengeluaran penduduk Provinsi Bengkulu selama setahun adalah Rp.10.409.000. Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.122
Perkembangan Pengeluaran per Kapita
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran per Kapita	x 000 rupiah	9.492	9.778	10.162	10.409	10.380

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2020.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Daya saing suatu daerah snagat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dibangun. Provinsi Bengkulu seagai provinsi yang secara geografis terletak di paling barat Sumatera memiliki potensi yang untuk menjadi beranda baru di pesisir barat. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan 4 provinsi besar di Sumatera, serta berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Secara geogrtafis, Provinsi Bengkulu sangatlah strategis karena memiliki potensi kerjasama di Afrika dan Asia Selatan, serta dapat menjadi jalur Tol Laut Indonesia. Saat ini Provinsi Bengkulu sedang gencar untuk mensejajarkan diri dengan provinsi lain di Indonesia, melalui pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.

Saat ini tercatat ada 18 pembangkit listrik di Provinsi Bengkulu. Pembangkit Listrik sangat berperan penting dalam peningkatan daya saing infrastruktur dikarenakan mejadi suplai energi untuk produksi. Provinsi Bengkulu memiliki PLTP Hulu Lais berkekuatan 2 x 55 MW dan PLTU Pulau Baai dengan kapasitas 2 x 100 MW. Dengan banyaknya pembangkit listrik, maka surplus listrik di Bengkulu akan dapat disalurkan sebagai interkoneksi Pulau Sumatera.

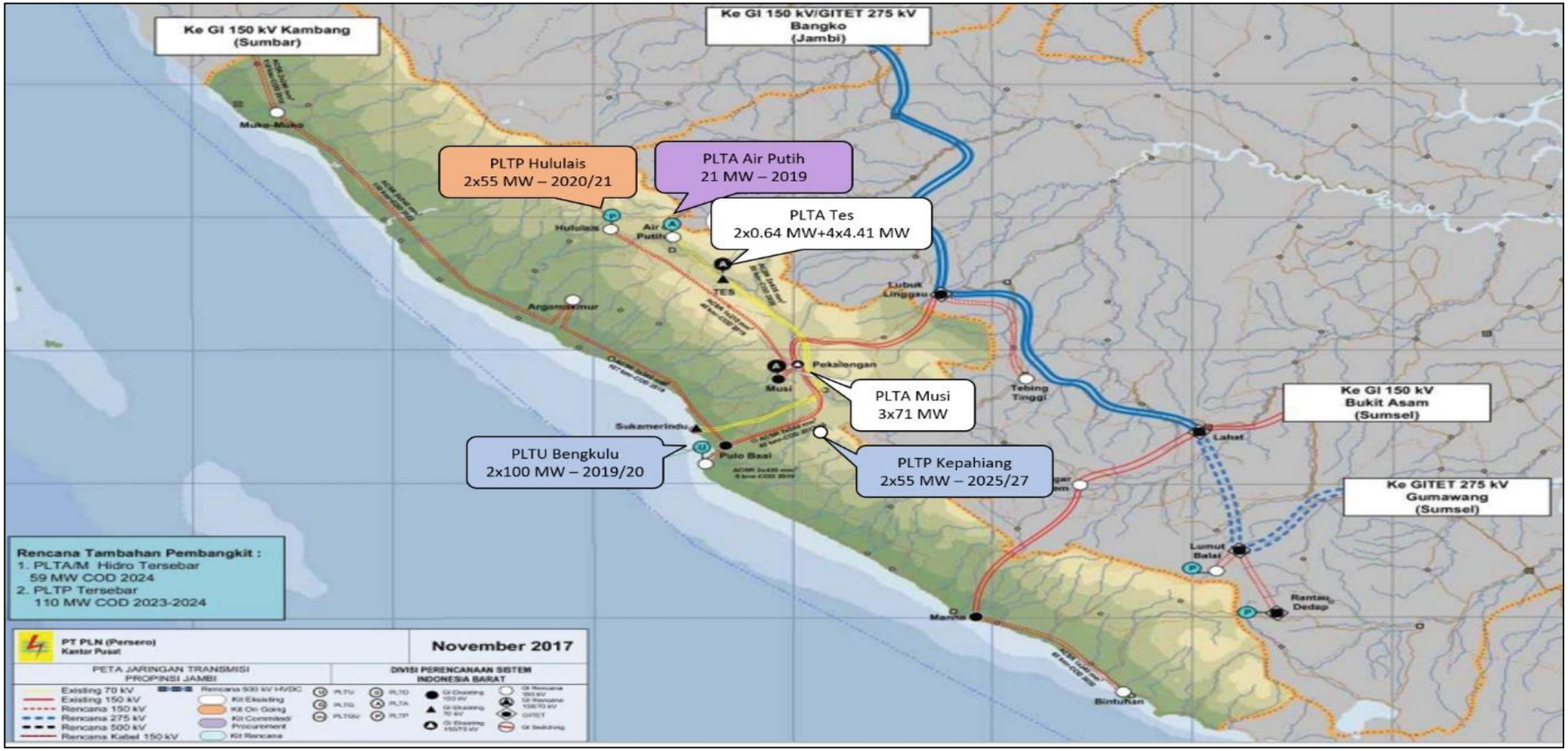
Energi yang potensial dikembangkan di Provinsi Bengkulu adalah energi kelistrikan, baik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air skala besar (PLTA), pembangkit listrik tenaga skala mikro hidro (PLTMH), pembangkit

listrik tenaga uap (PLTU), dan pembangkit listrik tenaga geothermal (PLTG). Sistem tenaga listrik Provinsi Bengkulu terdiri dari Sistem Interkoneksi 150 kv dan 70 kV serta sistem *isolated*. Pasokan utama sistem tenaga listrik Provinsi Bengkulu berasal dari sistem interkoneksi Sumbagselteng melalui transmisi 150 kV dan 70 kV. Provinsi Bengkulu memiliki potensi energi primer yang terditi dari batubara yang diperkirakan mencapai 192,10 juta ton, panas bumi yang diperkirakan potensimyam encapai 1.362 MWE yang tersebar pada 5 lokasi antara lain tembang Sawah, B. Gedung Hulu Lais, Lebong Simpang, Suban Ayam dan Kepahiang/G. Kaba, serta tenaga air dilokasi tersebar.

Total DMN pembangkit tenaga listrik yang ada di Provinsi Bengkulu tahun 2018 adalah sekitar 272 MW yang didominasi oleh pembangkit pengusahaan PT PLN (Persero) sekitar 269 MW (99%), dan Non PT PLN (Persero) sekitar 3 MW (1%) . Adapun berdasarkan jenisnya, DMN pembangkit tersebut didominasi oleh PLTA sekitar 247 MW (90,7%), PLTD sekitar 16 MW (5,9%), PLTMH sekitar 6 MW (2,2%), PLTBg sekitar 3 MW (1,1%), dan PLTS sekitar 0,3 MW (0,1%). Konsumsi energi listrik di Provinsi Bengkulu tahun 2018 mencapai sekitar 913 GWh dengan komposisi konsumsi per sektor pemakai didominasi oleh sektor rumah tangga sekitar 669 GWh (73%), bisnis sekitar 120 GWh (13%), publik sekitar 71 GWh (8%), dan industri sekitar 53 GWh (6%). Adapun rasio elektrifikasi tahun 2018 mencapai sekitar 99,96%.

Sebaran pembangkit listrik di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 2.9
Sebaran Pembangkit Listrik di Provinsi Bengkulu Tahun 2020



Sumber: RUPTL PLN 2019-2028

Selain pembangkit listrik, saat ini Provinsi Bengkulu tengah berfokus kepada pengembanan infrastruktur strategis dan mendukung Proyek Prioritas Nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Adapun infrastruktur strategis dan PSN tersebut adalah :

1. Jalan Tol Bengkulu – Lubuk Linggau;
2. Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai sebagai pelabuhan integrasi industri;
3. Pengembangan Bandara Fatmawati menjadi bandara internasional;
4. Pembangunan jalur KA Pulau Baai – Stasiun Kota Padang yang merupakan bagian dari *Trans Sumatera Railway;*
5. Pembanguna ruas jalan baru penghubung antar provinsi yaitu ruas jalan baru Kabupaten Mukomuko – Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Kabupaten Lebong – Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Seluma – Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;
6. Pembangunan SPAM Kobema;

Perkembangan Fokus Fasilitas Infrastruktur di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.123
Perkembangan Fokus Fasilitas Infrastruktur
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pembangkit Listrik yang dikembangkan	unit	13	16	18	18	18
Jumlah Infrastruktur Strategis yang dikembangkan	Proyek Strategis	2	3	4	5	5

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, diolah dari berbagai sumber, 2021.

2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi

Iklim investasi pada suatu daerah harus ramah dan aman. Investor harus mempercayai suatu daerah memiliki prospek investasi yang bagus serta daerah mampu menjamin keamanan dalam berinvestasi. Pada tahun 2017, nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Bengkulu mencapai angka Rp. 296 M dengan total proyek investasi sebanyak 45 proyek. Angka ini menempatkan Provinsi Bengkulu pada posisi ke 25 dari 34 provinsi se Indonesia berdasarkan nilai investasi yang masuk sepanjang tahun 2017. Investasi di Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan menjadi Rp. 4,9 Triliun pada tahun 2018 dengan 99 proyek dan sebesar Rp. 2,2 triliun dengan 123 proyek pada tahun 2019.

Tabel 2.124
Perkembangan Investasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 – 2020

Penanaman Modal Asing

Sektor	2018		2019		2020	
	Proyek	Investasi (US$. Ribu)	Proyek	Investasi (US$. Ribu)	Proyek	Investasi (US$. Ribu)
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan / *Food Crops, Plantation, and Livestock*	10	5.923,9	21	17.355,2	31	3.368,9
Pertambangan / *Mining*	8	34.086,8	6	1.673,4	9	51,7
Industri Makanan / *Food Industry*	8	5.172,5	11	8.299,3	23	7.701,6
Industri Kimia Dan Farmasi / *Chemical and Pharmaceutical Industry*	2	0,0	2	728,9	2	0,0
Industri Karet dan Plastik / *Rubber and Plastic Industry*	1	0,0				
Industri Mineral Non Logam / *Non Metallic Mineral Industry*	1	0,0	1	0,0		
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas & Water Supply*	4	86.275,2	7	106.819,9	9	180.644,2
Perdagangan dan Reparasi / *Trade & Repair*	2	1.567,2	13	700,0	19	496,9
Hotel dan Restoran / *Hotel & Restaurant*	1	36,9	4	117,6	1	0,2
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi / *Transport, Storage & Communication*	1	3.486,6	1	9.119,7	4	0,0
Jasa Lainnya / *Other Services*	1	59,7	2	30,8	4	26,3
Total Bengkulu / Bengkulu	**39**	**136.608,8**	**68**	**144.844,8**	**102**	**192.289,8**

Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

Penanaman Modal Dalam Negeri

Sektor	2018		2019		2020	
	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan / *Food Crops, Plantation, and Livestock*	11	548.642,6	16	1.505.129,4	61	1.148.843,7
Perikanan / *Fishery*	3	9.282,5	5	14.725,2	8	30.480,0
Pertambangan / *Mining*	4	3.567.895,7	4	1.384.981,4	7	289.946,4
Industri Makanan / *Food Industry*	2	145.758,2	13	479.461,8	48	246.275,8
Industri Kayu / *Wood Industry*			1	0,0		

Sektor	2018		2019		2020	
	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Industri Kertas dan Percetakan / *Paper and Printing Industry*			1	0,0		
Industri Kimia Dan Farmasi / *Chemical and Pharmaceutical Industry*					2	22,0
Industri Karet dan Plastik / *Rubber and Plastic Industry*	3	7.553,8	2	409.098,6	11	376.058,4
Industri Mineral Non Logam / *Non Metallic Mineral Industry*	1	1.400,0	1	1.210,0		
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya / *Metal Industry not Machinery & Electronic Industry*					4	5.685,7
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam / *Medical Preci. & Optical Instru, Watches & Clock, Machinary, and Electronic Industry*					2	429,3
Industri Lainnya / *Other Industry*			1	0,0	1	0,0
Listrik, Gas dan Air / *Electricity, Gas & Water Supply*	26	250.191,7	24	1.374.337,7	44	492.715,9
Konstruksi / *Construction*	2	2.540,0	10	4.438,6	8	1.556.992,4
Perdagangan dan Reparasi / *Trade & Repair*	15	260.105,2	38	58.654,0	173	166.159,2
Hotel dan Restoran / *Hotel & Restaurant*	15	98.445,0	12	68.046,5	21	93.152,8
Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi / *Transport, Storage & Communication*	3	1.214,2	5	20.032,0	14	60.032,3
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran / *Real Estate, Ind. Estate & Business Activities*	2	4.842,4	12	20.541,0	14	114.546,6
Jasa Lainnya / *Other Services*	12	4.932,8	26	117.421,0	58	817.838,1
Total Bengkulu / Bengkulu	**99**	**4.902.804,1**	**171**	**5.458.077,2**	**476**	**5.399.178,6**

Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

Selain itu, rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (crime total), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman. Statistik kriminalitas di Provinsi Bengkulu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.125
Statistik Kriminalitas di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2019

Aspek Kriminal	2016	2017	2018	2019
Kejahatan yang dilaporkan	203.687	4.867	3.389	3.453
Kejahatan yang diselesaikan (clearance rate)	43,47	49,72	83,59	67,54
Resiko Penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk (Crime rate)	250	252	175	179

Sumber: Statistik Kriminal 2020, BPS, 2020.

Penyelesaian kasus kejahatan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 – 2019 menunjukan tren meningkat dari seebsar 43,47% pada tahun 2016 meningkat menjadi 67,54% pada tahun 2019. Begitu juga dengan Crime rate atau Resiko Penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk, menunjukan tren menurun dari 250 pada tahun 2016 menjadi 179 pada tahun 2019. Dengan capaian keberhasilan menekan kriminal, maka akan meningkatkan daya saing Provinsi Bengkulu.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Perkembangan Fokus Iklim Investasi di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.126
Perkembangan Fokus Iklim Investasi
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pertumbuhan investasi	%	6,6	34,4	211,6	13,4	6,5
Crime Rate	Nilai	250	252	175	179	n/a

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, diolah dari berbagai sumber, 2021.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Keadaaan Agustus 2020, TPT penduduk berpendikan tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menempati posisi tertinggi sebesar 7,73 persen, diikuti TPT kelompok berpendidikan tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,64 persen, sedangkan TPT terendah terdapat pada kelompok berpendidikan tamat SD ke bawah sebesar 2,24 persen. Perkembangan Fokus Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.127
Perkembangan Fokus Sumber Daya Manusia
di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas	%	44,39	40,64	39,23	43,79	44,19

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, diolah dari berbagai sumber, 2020.

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD merupakan bagian penting dari siklus perencanaan yang befungsi untuk memberikan masukan balik (*feedback*) terhadap perencanaan program dan kegiatan pada tahun rencana dan sebagai kontrol terhadap pencapaian target RPJMD. Secara detil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.128
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020

Keterangan :

- n/a = data belum tersedia/data belum rilis/data belum diproduksi diawal tahun kinerja.
- Sumber data sekunder diambil dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan merupakan tolak ukur kinerja urusan pemerintahan daerah.
- Standar data yang digunakan adalah angka capaian nasional/angka yang memang sudah menjadi standar data dari indikator yang disajikan. Apabila indikator yang disajikan tidak tersedia standar data-nya, maka digunakan pengukuran secara kualitatif terhadap pencapaian indikator tersebut.
- Interpretasi data adalah kesimpulan atas pencapaian indikator mulai tahun 2016-2020 terhadap standar data.

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
1	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**								
1.1	**Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**								
1.1.1	Pertumbuhan PDRB	%	5,28	4,98	4,99	4,96	-0,02	Pertumbuhan ekonomi nasional -2,07	Baik
1.1.2	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp	29.085.842	31.359.483,39	33.827.176,20	36.219.498,21	36.310.000	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
1.1.3	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp	21.043.164	21.751.636,19	22.498.426,72	23.276.153,56	23.046.268,15	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
1.1.4	Laju Inflasi	%	n/a	2,87	3,4	0,45	1,2	Inflasi nasional 1,38 persen (2020)	Baik
1.1.5	Indeks Gini	Nilai	0,357	0,351	0,362	0,34	0,323	Indeks Gini Nasional 0,385 (2020)	Baik

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.1.6	Persentase Penduduk Miskin	%	17,32	16,45	15,43	15,32	15,03	10,19% (2020) Nasional	Cukup
1.1.7	Indeks Pembangunan Manusia	%	69,33	69,95	70,64	71,21	71,4	71,94 % (2020) Nasional	Baik
1.1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,3	3,74	3,35	3,26	4,07	7,07% (Agustus 2020) Nasional	Baik
1.2	**Kesejahteraan Sosial**								
1.2.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,37	8,47	8,61	8,73	8,84	8,48 (2020) Indonesia	Baik
1.3	**Fokus Seni, Budaya dan Olahraga**								
1.3.1	Jumlah Sanggar/Grup Kesenian	Unit	166	166	167	169	170	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
1.3.2	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	5	5	5	6	6	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
1.3.3	Persentase Nomor Lomba Olahraga Prestasi yang dimenangkan	%	46,67	69,23	44,44	38,89	n/a	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
1.3.4	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	Organisasi	3	3	5	7	10	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2	**Aspek Pelayanan Umum**								
2.1	**Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar**								
2.1.1	*Pendidikan Menengah*								
	- APS	%	78,37	79,07	79,33	79,39	79,72	72,72 (2020, SMA/SMK sederajat) Indonesia	Baik
	- APM	%	65,2	65,3	65,45	68,36	68,61	61,25 (2020, SMA/SMK sederajat) Indonesia	Baik

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- APK	%	83,56	87,1	85,57	91,12	93,80	84,53 (2020, SMA/SMK sederajat) Indonesia	Baik
	- Rasio Ruang Kelas terhadap Rombel SMA	Angka	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	Semakin seimbang, semakin baik	Baik
	- Rasio Ruang Kelas terhadap Rombel SMK	Angka	1:1	1:1	1:1	1:1,1	1:1,1	Semakin seimbang, semakin baik	Baik
	- Rasio Guru terhadap Murid SMA	Angka	1:13	1:13	1:13	1:12	1:12	1:20	Baik
	- Rasio Guru terhadap Murid SMK	Angka	1:11	1:11	1:12	1:11	1:11	1:15	Baik
	- Rasio Guru terhadap Murid SLB	Angka	1:4	1:4	1:5	1:4	1:4	Semakin kecil, semakin baik	Baik
	- Guru SMA yang sudah sertifikasi	%	n/a	n/a	44,1	49,5	49,5	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Guru SMK yang sudah sertifikasi	%	n/a	n/a	36,3	41,2	41,21	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,38	13,57	13,58	13,59	13,61	12,98 tahun (Harapan Lama Sekolah nasional, 2020)	Baik
	- Persentase SMA yang sudah terakreditasi	%	79,1	86,3	94,2	95	95	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Persentase SMK yang sudah terakreditasi	%	100	36,4	63,9	88,3	91	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- APM SLB	%	79,58	80,00	80,92	86,47	89,40	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.1.2	*Kesehatan*								

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- AKB	Nilai	7	1	7	8	8	Semakin menurun semakin baik	Baik
	- AKI	Nilai	117	79	111	100	93	Semakin menurun semakin baik	Baik
	- Angka Harapan Hidup	Tahun	68,56	68,59	68,84	69,21	69,35	71,47 (Angka Harapan Hidup Indonesia, 2020)	Baik
	- Persentase Stunting	%	22,9	29,4	17,2	26,86	8,13	27,67 (Stunting Indonesia, 2019)	Baik
	- Jumlah Puskesmas	Unit	180	180	179	179	188	1 puskesmas melayani 10.000,- sebaran puskesmas di Provinsi Bengkulu menurut kecamatan adalah 128 kecamatan	Baik
	- Jumlah Rumah Sakit	Unit	21	21	23	24	23	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah Rumah Sakit yang sudah akreditasi	Unit	12	12	17	21	21	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.1.3	*Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*								
	- Persentase jalan provinsi dalam Kondisi Baik/Mantap	%	44,76	54,5	58,5	66,29	68,14	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Persentase irigasi dalam Kondisi Baik/Mantap	%	58	59,45	66,1	66,1	67	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Persentase jembatan provinsi dalam Kondisi Baik/Mantap	%	44,76	54,5	58,5	66,29	68,14	Semakin meningkat, semakin baik	Baik

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Persentase Luas Kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW	%	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Kawasan budidaya 64%; Kawasan Lindung 36 %	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Persentaase Rumah Tangga yang terlayani Pengolahan Persampahan	%	13,8	36,9	38,40	42,61	49,49	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.1.4	*Perumahan dan Kawasan Permukiman*								
	- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	37,35	43,83	61,22 (perhitungan baru)	57,60 (perhitungan baru)	62,47 (perhitungan baru)	90,21 (Nasional, 2020)	Cukup
	- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	49,75	42,71	71,75 (perhitungan baru)	75,91 (perhitungan baru)	78,10 (perhitungan baru)	79,53 (Nasional, 2020)	Baik
	- Persentase Rumah Tangga yang menempati RLH	%	n/a	n/a	42,57	45,7	53,3	59,54 (Nasional, 2020)	Cukup
2.1.5	*Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat*								
	- Persentase Penanganan kasus pelanggaran Perda/Pergub	%	10	10	30	30	50	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Persentase Penanganan kasus pelanggaran Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Rasio Linmas per satuan penduduk	%	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk	61/10000 penduduk	62/10000 penduduk	63/10000 penduduk	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.1.6	*Sosial*								
	- Persentase PMKS yang diberikan bantuan dan jamkesos	%	n/a	46,9	49,85	46,7	60,5	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Persentase PMKS yang ditangani	%	n/a	66,8	67,7	70,9	74	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Indeks Resiko Bencana	Nilai	157,22	157,22	163,29	172	153,42	Semakin rendah, semakin baik	Baik

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.2	**Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**								
2.2.1	*Ketenagakerjaan*								
	- TPAK	%	73,59	74,58	73,12	72,24	73,83	67,26 (TPAK Indonesia 2018)	Baik
	- Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan jenjang pendidikan	%	SD : 35,7	SD : 39,91	SD : 39,50	SD : 37,46	SD : 37,75	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
			SMP : 19,9	SMP : 19,45	SMP : 20,47	SMP : 17,77	SMP : 18,46		
			SMA : 19,6	SMA : 20,32	SMA : 19,37	SMA : 21,26	SMA : 22,20		
			SMK : 9,2	SMK : 7,94	SMK : 8,56	SMK : 9,21	SMK : 8,75		
			DI/II/III : 2,5	DI/II/III : 2,47	DI/II/III : 2,63	DI/II/III : 2,53	DI/II/III : 2,38		
			Universitas : 13,1	Universitas : 9,91	Universitas : 9,48	Universitas : 11,77	Universitas : 10,45		
	- Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	%	58,61	54,59	62,06	61,21	63,64	61,06 (Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Nasional, 2019)	Baik
2.2.2	*Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*								
	- IPG	Angka	91,06	91,34	91,37	91,19	91	91,06 (IPG Indonesia 2020)	Baik
	- IDG	Angka	71,09	71,4	69,6	69,78	70,48	75,57 (IDG Indonesia 2020)	Cukup
	- Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	368	265	137	161	126	Semakin menurun, semakin baik	Baik
2.2.3	*Ketahanan Pangan*								

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Skor PPH Ketersediaan Pangan	Angka	92,64	83,32	80,29	84,24	82	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Skor PPH Konsumsi Pangan	Angka	80,6	80,5	82,7	85,6	82,6	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Angka Stabilitas Harga Pangan tingkat produsen	Angka	n/a	3,52	7,94	6,21	4,94	Semakin menurun, semakin baik	Baik
	- Angka Stabilitas Harga Pangan tingkat konsumen	Angka	n/a	1,87	2,65	3,21	2,72	Semakin menurun, semakin baik	Baik
2.2.4	*Lingkungan Hidup*								
	- IKLH	Angka	72,43	70,18	74,32	64,41	69,92	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Indeks Kualitas Pencemaran Air	Angka	60,33	54,07	48,22	47,64	50,83	Semakin meningkat, semakin baik	Kurang
	- Indeks Kualitas Pencemaran Udara	Angka	85,4	92,55	91,63	92,69	90,52	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.2.5	*Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*								
	- Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	83,77	91,96	94	96,24	99,9	100%	Baik
	- Persentase penduduk usia anak yang memiliki KIA	%	n/a	n/a	7	27,61	49,5	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	%	29,77	34,85	40,04	41,59	97,83	100%	Baik
2.2.6	*Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*								
	- Indeks Desa Membangun	Nilai	n/a	0,6	0,62	0,6246	0,6417	0,566 (rata-rata nasional)	Baik

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Jumlah Desa Tertinggal	Desa	n/a	614	614	403	290	Semakin menurun, semakin baik	Baik
	- Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	n/a	41	41	13	5	Semakin menurun, semakin baik	Baik
2.2.7	*Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*								
	- TFR	Angka	2,34	2,41	2,34	2,39	2,24	2,1 (standar TFR Nasional)	Baik
	- Unmeet Need KB	%	15,8	8,7	7,5	10	7,17	10,5 (Unmet Need KB Nasional)	Cukup
	- Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR	%	60,9	68,4	64,6	68,05	65,09	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.2.8	*Perhubungan*								
	- Persentase Pemenuhan Fasilitas Kelengkapan Jalan	%	83,56	94,46	96,39	92,35	n/a	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Persentase Pemenuhan Jasa Pelayanan Pelabuhan penyebrangan	%	82,18	94,61	90,49	82,52	n/a	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
2.2.9	*Komunikasi dan Informasi*								
	- Indeks SPBE	Nilai	n/a	n/a	1,8	2,4	2,9	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	n/a	n/a	40	70	88,2	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.2.10	*Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*								
	- Jumlah UMKM	UMKM	33.408	37.113	42.481	46.417	46.523	Semakin meningkat, semakin baik	Baik

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Jumlah Koperasi Aktif dan bersertifikat NIK	Koperasi	n/a	179	355	481	532	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Volume Usaha Koperasi	Rupiah	n/a	358.722.481.746	338.493.455.389	397.099.367.206	458.776.060.393	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.2.11	*Penanaman Modal*								
	- Indeks Kepuasan Masyarakat bidang perizinan	Nilai	81,45	82,78	89,21	89,39	89,58	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Nilai Investasi	Trilyun Rupiah	1,6	2,15	6,7	7,6	8,1	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.2.12	*Kepemudaan dan Olahraga*								
	- Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan	Orang	56	160	113	120	120	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah Nomor Lomba Olahraga yang dimenangkan tingkat nasional	Nomor	4	5	4	5	5	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
2.2.13	*Statistik*								
	- Jumlah data statistik sektoral yang tersedia	Data	n/a	20	26	30	30	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.2.14	*Persandian*								
	- Indeks Persandian	Nilai	n/a	n/a	Kurang	62,96 (Cukup)	66,35 (Cukup)	Sesuai kategori nilai	Cukup
2.2.15	*Perpustakaan*								
	- Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	Orang Pengunjung	24.610	24.619	25.040	27.681	29.490	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.2.16	*Kearsipan*								

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Jumlah arsip statis dan dinamis yang terkumpul	Arsip	28.200	28.050	28.200	28.570	29.550	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.3	**Pelayanan Umum Urusan Pilihan**								
2.3.1	*Kelautan dan Perikanan*								
	- Produksi Perikanan Tangkap	Ton	64.110,00	67.547,64	69.105.178,96	70.860,48	72.750	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Produksi Perikanan Budidaya	Ton	n/a	115.041.017	122.801.738	193.490.910	214.025.868	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah Nelayan Tangkap	Orang	n/a	26.614	27.429	30.334	30.334	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah Pembudidaya Ikan	Orang	n/a	27.245	27.453	27.761	28.089	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.3.2	*Pariwisata*								
	- Jumlah wisatawan	orang	492.841	2.270.418	2.155.241	2.586.362	643.928	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Rata-rata Lama Menginap	hari	1,34	1,62	1,71	1,8	1,31 *Agus 2020	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Persentase Tingkat Hunian Hotel	%	65,27	70,29	72,05	67,97	41,40 *Agus 2020	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.3.3	*Pertanian*								
	- Produksi padi	Ton GKG	641.881	731.169	288.811	296.472	296.925	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Produksi jagung	TON PK	133.901	148.090	117.998	175.132	141.680	Semakin meningkat, semakin baik	Baik

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Produksi bawang merah	Kwintal	5.210	4.900	9.105	5.234	5.197	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Produksi cabai merah	Kwintal	472.070	321.454	397.936	378.118	114.926	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Produksi kopi	Ton	56.815	58.811	61.591	62.490	62.759	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Produksi karet	Ton	89.510	90.393	99.842	99.260	101.246	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Produksi sawit	Ton	455.074	725.949	735.766	776.590	799.891	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah produksi daging sapi	Ton	3.056,90	2.587,20	2.471,90	2.587,40	3.149,00	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah Produksi daging kambing	Ton	257,90	94,80	99,90	94,91	114,47	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah produksi daging unggas	Ton	5.229,70	8.552,60	8.057,90	14.083,80	13.881,80	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.3.4	*Kehutanan*								
	- Indeks Tutupan Lahan	Nilai	53,84	55,84	55,52	53,25	53,15	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Luas Lahan Kritis	Ha	n/a	720,309.09	719,384.59	524.709,22	363.575,12	Semakin menurun, semakin baik	Baik
	- Laju Deforstasi	Nilai	0,28	0,13	0,96	0,23	0,22	Semakin menurun, semakin baik	Baik
2.3.5	*Energi dan Sumber Daya Mineral*								

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Rasio Elektrifikasi	%	88,5	96,82	94,88	99,99	99,99	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Persentase Luas lahan Reklamasi	%	n/a	n/a	55,82	51,73	69,24	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Nilai PNBP Sektor Pertambangan	Rupiah	86.001.527.361	159.575.876.544,77	168.995.419.966,68	116.441.399.570,54	37.965.442.999 *triwulan II 2020	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.3.6	*Perdagangan*								
	- Nilai Ekspor	Juta US (dolar)	n/a	n/a	275,25	271,89	208,55	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rupiah (Milyar)	7.668,84	8.691,21	7.002,12	7.479,22	7.189,34	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
2.3.7	*Perindustrian*								
	- Jumlah Industri Kecil Menengah	UMKM	5.605	6.048	6.048	6.491	6.491	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah industri Sedang dan Besar	Industri	40	40	40	43	44	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.3.8	*Transmigrasi*								
	- Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan	Kawasan	5	5	5	5	5	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**								
2.4.1	*Kesekretariatan Daerah*								
	- Nilai SAKIP	Angka	64,12	64,67	66,04	68,48	68,98	Semakin meningkat, semakin baik	Baik

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	56,43	59,21	60,18	60,52	63,34	74,06 (katagori BB)	Baik
2.4.2	*Kesekretariatan DPRD*								
	- Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	Raperda	9	15	16	11	10	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
2.5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**								
2.5.1	*Perencanaan*								
	- Nilai Perencanaan Kinerja	Angka	23,17	23,41	23,51	23,9	24,19	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Nilai Pengukuran Kinerja	Angka	14,63	14,7	14,88	15,09	15,17	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.5.2	*Keuangan*								
	- Opini Laporan Keuangan	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Baik
	- Nilai PAD	Rupiah	745.385.297.497,49	804.575.838.594,27	872.257.738.965,75	826.674.936.049,87	712.345.548.601,91	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
2.5.3	*Kepegawaian*								
	- Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	n/a	68	n/a	50,03	71,92	81-90 (tinggi)	Cukup
2.5.4	*Pendidikan dan Pelatihan*								
	- Persentase Diklat yang berkareditasi A	%	25%	25%	25%	50%	75%	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Persentase jabatan struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	%	Eselon II : 27 Eselon III : 50 Eselon IV : 35	Eselon II : 30 Eselon III : 87 Eselon IV : 61	Eselon II : 42 Eselon III : 71 Eselon IV : 62	Eselon II : 42 Eselon III : 60 Eselon IV : 60	Eselon II : 70 Eselon III : 90 Eselon IV : 75	Semakin meningkat, semakin baik	Baik

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.5.5	*Penelitian dan Pengembangan*								
	- Nilai Indeks Inovasi Daerah	Nilai	n/a	n/a	280	280	5.269	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**								
2.6.1	*Pengawasan*								
	- Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	%	70,3	66,81	60,61	64,99	59,5	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup
	- Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Menuju Level 3 (dalam proses QA BPKP)	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Menuju Level 3 (dalam proses QA BPKP)	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
2.7	**Unsur Pemerintahan Umum**								
2.7.1	*Kesatuan Bangsa dan Politik*								
	- Rasio Stabilitas Kesatuan Bangsa	Nilai	n/a	0,6	0,63	0,63	0,65	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Indeks Demokrasi	%	74,23	72,73	70,71	78,79	n/a	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
3	**Aspek Daya Saing Daerah**								
3.1	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**								
	- NTP	%	93,06	94,49	94,01	93,89	122,12	>100	Baik
	- NTN	%	96,56	96,14	97,56	97,88	99,25	>100	Baik

No.	Aspek/Fokus/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar data	Interpretasi Data
			2016	2017	2018	2019	2020		
	- Pengeluaran per Kapita	x 000 rupiah	9.492	9.778	10.162	10.409	10.380	11.013 (Nasional, 2020)	Baik
3.2	**Fokus Fasilitas Wilayah/infrastruktur**								
	- Jumlah Pembangkit Listrik yang dikembang	unit	13	16	18	18	18	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Jumlah infrastrutkur strategis yang dikembangkan	Proyek Strategis	2	3	4	5	5	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
3.3	**Fokus Iklim Investasi**								
	- Nilai Investasi	Trilyun Rupiah	1,6	2,15	6,7	7,6	8,1	Semakin meningkat, semakin baik	Baik
	- Crime Rate	Nilai	250	252	175	179	n/a	Semakin menurun, semakin baik	Baik
3.4	**Fokus Sumber Daya Manusia**								
	- Persentase Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas	%	44,39	40,64	39,23	43,79	44,19	Semakin meningkat, semakin baik	Cukup

Sumber : Olahan data capaian kinerja RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 per aspek kinerja daerah.

2.3. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

"No one left behind" merupakan *tagline* dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goal's (SDG's)* yang mengartikan bahwa pembangunan dalam agenda *SDG's* harus memberi manfaat bagi semua lapisan, kelompok masyarakat, khususnnya kelompok rentan. Dalam mewujudkan konsep ini semua aspek harus terlibat Pemerintah, Non Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Filantropi bersama-sama memetakan indikator-indikator untuk pencapaian 17 (tujuh belas) *goals* yang harus dicapai dalam *SDG's*. Provinsi Bengkulu dalam mendukung pencapaian *goals* SDG's dengan melibatkan banyak aspek pada tahun 2018 telah merampungkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 (RAD-TBP/SDGs).

SDG's dan RPJMD Provinsi Bengkulu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Provinsi Bengkulu yang dalam RPJMD Provinsi merupakan irisan dari 17 (tujuh belas) *Goal's* yang tertuang dalam *SDG's.*

Tabel 2.129
Kesesuaian Antara RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu

RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	TPB/*SDG's*	
1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih transparan, dan akuntable melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT	T16 T17	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh Kemitraan untuk mencapau Tujuan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal	Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan	T1 T2 T3 T4 T8	Tanpa Kemiskinan Tanpa Kelaparan Kehidupan sehat dan Sejahtera Pendidikan Berkualitas Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
3. Meningkatkan dan memantapkan Kapasitas Infrastruktur dasar dan Infrastrukturs Strategis	Pengembangan Infratruktur Strategis dan Industrialisas\i	T1 T6 T7 T8 T9 T10 T11	Tanpa Kemiskinan Air Bersih dan Sanitasi Layak Energi Bersih dan Terjangkau Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Industri, Inovasi dan Infrastruktur Berkurangnya kesenjangan Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

RPJMD	PROGRAM PRIORITAS	TPB/*SDG's*	
		T12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
4. Mewujudkan Pembangunan Kepariwisataan yang tangguh dan Pengelolaan sumber daya alam lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal	*Visit* 2020 *Wonderfull* Bengkulu	T8 T13 T14 T15	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi Penangangan Perubahan Iklim Ekosistem Lautan Ekosistem Daratan
5. Mewujudkan Pembangunan Kemaritiman yang Integratif dan Berdaya Saing	Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim dan Hilirisasi	T8 T9 T10	Pekerjaan Layak dan pertumbuhan Ekonomi Industri, Inovasi dan Infrastruktur Berkurangnya Kesenjangan
6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan	T5	Kesertaraan Gender
7. Meningkatkan Daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan	T1 T4	Tanpa Kemiskinan Pendidikan Berkualitas
8. Mewujudkan Masyrakat Bengkulu yang Agamis, Berbudaya, berkesadaran Wisata dan Demokratis	• Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan • *Visit* 2020 *Wonderful* Bengkulu	T 16 T 17	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Kemitraan untuk mencapai Tujuan

Pelaksanaan RAD SDGs Provinsi Bengkulu tahun 2020 menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator SDGs Bengkulu tahun 2020 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.130
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Provinsi Bengkulu Tahun 2020

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
Tujuan SDGs 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun						
Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
1.2.1	Persentase Kemiskinan	RPJMD	%	16,09-15,69	15,03	Tercapai
Target Global : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.						
1.3.1.(a)	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	%	78,50	78,74	Tercapai
1.3.1.(b)	Jumlah penyandang disabiltas yang memperoleh akses terhadap pemenuhan hak dasar dan alat bantu penyandang cacat	Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	Orang	120	140	Tercapai
1.3.1.(c)	Jumlah orang yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial (orang)	Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	Orang	2.204	2.120	On the track
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.						
1.4.1.(a)	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	%	85	87,70	Tercapai
1.4.1.(b)	Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	%	93	96	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
1.4.1.(c)	Persentase Rasio Akseptor KB	Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu	%	70-71	72,57	Tercapai
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga berakses air bersih	Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	%	65	62,47	On the track
1.4.1.(e)	Persentase Akses sanitasi layak	RPJMD	%	45	78,1	Tercapai
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi	RPJMD	%	86,9	76	Tidak Tercapai
1.4.1.(g)	Angka partisipasti murni (APM) SD	RPJMD	%	99,39	92,42	On the track
1.4.1.(h)	Angka partisipasti murni (APM) SLTP	RPJMD	%	91,24	75,85	Tidak Tercapai
1.4.1.(i)	Angka partisipasti murni (APM) SMA	RPJMD	%	84,61	68,61	Tidak Tercapai
1.4.1.(j)	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu	%	87,5	97,83	Tercapai
1.4.1.(k)	Rasio Elektrifikasi	RPJMD	%	94,5	99,9	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.						
1.5.1.(a)	Persentase desa tangguh bencana	RPJMD	%	60-75	52,03	Tidak Tercapai
1.5.1.(b)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab, dan dilayani	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	PMKS	1.785	1670	On the track

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
1.5.1.(c)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab, dan dilayani	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	PMKS	1.785	1670	On the track
1.5.1.(d)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab, dan dilayani	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	PMKS	1.785	1670	On the track
1.5.3	Persentase Dokumen Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu	%	60-75	95	Tercapai
Target Global : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khusnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi						
1.a.1	Jumlah Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu	Laporan	1	1	Tercapai
Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan						
Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.						
2.1.1.(a)	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang	RPJMD	%	7,9	6,4	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.						
2.2.1	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang	RPJMD	%	7,9	6,4	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
2.2.1.(a)	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang	RPJMD	%	7,9	6,4	Tercapai
2.2.2	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang	RPJMD	%	7,9	6,4	Tercapai
2.2.2.(c)	Nilai Skor PPH	Dinas Ketahanan Pangan	Point	85	82,6	On the track
Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia						
Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.						
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup	RPJMD	Jiwa	114	93	Tercapai
3.1.2	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	%	85	87,70	Tercapai
3.1.2.(a)	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	%	85	87,70	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.						
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	%	9	8	Tercapai
3.2.2.(b)	Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	%	93	95	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.						
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Kejadian	> 5	1,2	Tercapai
3.3.2.(a)	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Kejadian	180	174	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
3.3.3.(a)	Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota)	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Kab/Kota	1	3	Tercapai
3.3.4.(a)	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Diteksi Dini Hepatitis Pada populasi berisiko	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Kab/Kota	1	7	Tercapai
3.3.5	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan POPM Cacingan	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Kab/Kota	2	10	Tercapai
3.3.5.(a)	Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	%	80	80	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.						
3.4.1.(b)	Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%) yg mendapat pelayanan sesuai standart	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	%	100	24	Tidak Tercapai
3.4.2.(a)	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Kab/Kota	10	10	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.						
3.7.1	Persentase Rasio Akseptor KB	RPJMD	%	71	72,57	Tercapai
3.7.1.(a)	Persentase Rasio Akseptor KB	RPJMD	%	71	72,57	Tercapai
3.7.1.(b)	Persentase Rasio Akseptor KB	RPJMD	%	71	72,57	Tercapai
Target Global : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.						
3.8.2.(a)	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	%	78,5	78,74	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
Target Global : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua						
3.b.1.(a)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standart	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Puskesmas	175	32	Tidak Tercapai
Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua						
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.						
4.1.1.(a)	Persentase SD yang ter-akreditasi	RPJMD	%	96	97,3	Tercapai
4.1.1.(b)	Persentase SLTP yang ter-akreditasi	RPJMD	%	95	93,2	On the track
4.1.1.(c)	Persentase SLTA yang ter-akreditasi	RPJMD	%	100	91,65	On the track
Target Global : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.						
4.c.1	Persentase Guru SLTA bersertifikasi	RPJMD	%	87,74	89,8	Tercapai
Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan						
Target Global : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.						
5.2.1.(a)	Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak	RPJMD	Kasus	375-350	120	Tercapai
5.2.2.(a)	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	RPJMD	%	100	99	Tercapai
Target Global : Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
5.3.1.(b)	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan	RPJMD	%	35,31-32,55	51	Tidak Tercapai
Target Global : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.5.1	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Badan Pusat Statistik	%	30	16,28	Tidak Tercapai
5.5.2	Persentase perempuan yang duduk di jabatan publik	Badan Pusat Statistik	%	36,14-36,74	51,90	Tercapai
Target Global : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.tik, ekonomi, dan masyarakat.						
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BKKBN Perwakilan Bengkulu	%	4,68	7,17	Tercapai
Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua						
Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.						
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga berakses air bersih	RPJMD	%	65	62,47	On the track
6.1.1.(c)	Persentase Akses air minum aman dengan sistem perpipaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	%	28	60,18	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.						
6.2.1.(b)	Persentase Akses sanitasi layak	RPJMD	%	45	78,1	Tercapai
6.2.1.(c)	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Desa	50	1174	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
6.2.1.(d)	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Desa	50	1174	Tercapai
6.2.1.(e)	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi	RPJMD	%	86,9	76	Tidak Tercapai
6.2.1.(f)	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi	RPJMD	%	86,9	76	Tidak Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.						
6.3.1.(a)	Persentase Akses sanitasi layak	RPJMD	%	45	78,1	Tercapai
6.3.1.(b)	Persentase Akses sanitasi layak	RPJMD	%	45	78,1	Tercapai
6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air	RPJMD		67	50,83	Tidak Tercapai
6.3.2.(b)	Indeks Kualitas Air	RPJMD		67	50,83	Tidak Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.						
6.4.1.(a)	Indeks Kualitas Air	RPJMD		67	50,83	Tidak Tercapai
Target Global : Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.						
6.6.1.(a)	Indeks Kualitas Air	RPJMD		67	50,83	Tidak Tercapai
6.6.1.(d)	Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	%	3,26	3,21	Tercapai
Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua						
Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.						
7.1.1	Rasio Elektrifikasi	RPJMD	%	94,5	99,9	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua						
Target Global : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.						
8.1.1	Pertumbuhan PDRB	RPJMD	%	1,3	-0,02	Tidak Tercapai
8.1.1.(a)	Nilai PDRB atas dasar harga konstan	RPJMD	Juta Rp	46.650.545-48.650.545	36.310.000	Tidak Tercapai
Target Global : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.						
8.3.1	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Badan Pusat Statistik		-	Laki-laki= 44,16 Perempuan= 50,44 Total= 46,74	Tercapai
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Badan Pusat Statistik	%	-	34,88	Tercapai
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Badan Pusat Statistik	%	-	86,87	Tercapai
8.3.1.(c)	Persentase Pertumbuhan Kelompok Usaha Baru (KUB)/Wira Usaha Baru (WUB)	Dinas Koperasi dan UKM	%	25	8,47	Tidak Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.						
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan Mancanegara	RPJMD	Orang	4.995	1.358	Tidak Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
8.9.1(b)	Jumlah Wisatawan Nusantara	RPJMD	Orang	420.025	2.585.004	Tercapai
Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorng inovasi						
Target Global : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.						
9.1.1.(a)	Persentase jalan provinsi dalam kondisi baik/sedang	RPJMD	%	68,1	68	Tercapai
9.1.2.(a)	Jumlah Bandara Pengumpul Yang dikembangkan	RPJMD	Bandara	3	3	Tercapai
Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara						
Target Global : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.						
10.1 .1	Koefisien Gini	Badan Pusat Statistik		0,34	0,323	Tercapai
10.1.1.(a)	Persentase Kemiskinan	RPJMD	%	16,09-15,69	15,03	Tercapai
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu	Desa	399	171	Tercapai
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu	Desa	6	20	Tercapai
Target Global : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.						
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Badan Pusat Statistik		-	93,98	Tercapai
10.3.1.(b)	Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak	RPJMD	Kasus	375-350	120	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
10.3.1.(c)	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	RPJMD	%	100	99	Tercapai
Target Global : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.						
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu	Orang	-	54.000	Tercapai
Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan						
Target Global : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.						
11.5.1.(b)	Persentase desa tangguh bencana	RPJMD	%	60-75	52,03	Tidak Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.						
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan	RPJMD	%	87	49,49	Tidak tercapai
11.6.1.(b)	Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan	RPJMD	%	87	49,49	Tidak tercapai
Target Global : Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction2015-2030.						
11.b.1	Persentase Dokumen Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu	%	60-75	95	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
11.b.2	Persentase Dokumen Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu	%	60-75	95	Tercapai
Tujuan SDGs 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan						
Target Global : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.						
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Perusahaan	-	51	Tercapai
Target Global : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.						
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Perusahaan	-	6	Tercapai
Tujuan SDGs 13 : Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan Iklim dan Dampaknya						
Target Global : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.						
13.1 .1.*	Persentase Dokumen Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu	%	60-75	95	Tercapai
Target Global : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.						
13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu	Dokumen	1	1	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
Tujuan SDGs 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan						
Target Global : Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.						
14.2.1.(a)	Jumlah dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tersedia	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	Dokumen	1	1	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.						
14.5.1*	Jumlah dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tersedia	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	Dokumen	1	1	Tercapai
Target Global : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.						
14.b.1.(a)	Jumlah nelayan yang difasilitasi akses permodalan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	Orang	-	6371	Tercapai
Tujuan SDGs 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan,mengelola Bhutan Secara lestari, Menghentikan Penggurunan, memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keragaman Hayati						
Target Global : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.						
15.1.1.(a)	Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	%	3,26	3,21	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.						

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
15.2.1.(b)	Luas hutan yang dikelola masyakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	Ha	83.192	83.192	Tercapai
15.2.1.(d)	Luas hutan yang dikelola masyakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	Ha	83.192	83.912	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.						
15.3.1.(a)	Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	%	3,26	3,21	Tercapai
Tujuan SDGs 16 : Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di Semua Tingkatan						
Target Global : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.						
16.2.1.(b)	Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak	RPJMD	Kasus	375-350	120	Tercapai
Target Global : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.						
16.6.1.(a)	Opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi	RPJMD		WTP	WTP	Tercapai
16.6.1.(b)	Jumlah SKPD Provinsi yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	RPJMD	SKPD	35	31	On the track
16.6.1.(c)	Persentase penyelenggaraan lelang secara elektronik	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu	%	100	100	Tercapai
16.6.1.(d)	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi	Inspektorat Provinsi Bengkulu		B	B	Tercapai

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian 2020	Capaian SDGs 2020	Status
16.6.2.(a)	Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu	Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu		Hijau	Hijau	Tercapai
Target Global : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.						
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Badan Pusat Statistik		-	68,63	Tercapai
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	Badan Pusat Statistik		-	93,98	Tercapai
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Badan Pusat Statistik		-	73,17	Tercapai
Target Global : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.						
16.9.1.(b)	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu	%	87,5	97,83	Tercapai
Target Global : Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.						
16.10.1.(b)	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	RPJMD	Kasus	100	99	Tercapai

Sumber : Olahan data capaian Laporan Akhir Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goal's Provinsi Bengkulu Tahun 2020, Bappeda Provinsi Bengkulu.

2.4. Capaian SPM Provinsi Bengkulu

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPM harus mengintegrasikan SPM dalam perencanaan daerah lima tahunan dan tahunan seperti RPJMD, RKPD, dan APBD. Selain itu, pemerintah daerah juga harus melakukan koordinasi dan melaporkan capaian SPM dalam LPPD serta melaksanakan SPM sesuai petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum,Dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial. Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu telah menerapkan keenam SPM tersebut melalui Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan SPM Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah pada tabel dibawah.

A. SPM Bidang Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Daerah Provinsi Provinsi terdiri atas :

1. Pendidikan Menengah

   Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.

2. Pendidikan Khusus

   Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

2. Realisasi SPM Urusan Pendidikan

Beberapa indikator tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang telah terealisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang Pendidikan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.131
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan
Provinsi Bengkulu Tahun 2020

No	Indikator SPM	Target Capaian Nasional	Target Capaian Provinsi	Capaian 2020
1.	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah.	100%	84,61	68,81
2.	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus	100%	100%	89,40%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Tahun 2020.

Berdasarkan diatas dapat dideskripsikan bahwa dari rencana target capaian nasional untuk jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas dari 100% target nasional yang terlayani sebanyak 68,81% . Rencana target capaian jumlah penduduk usia 4 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus dari target nasional 100% tecapai sebanyak 89,40%.

3. Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Bengkulu berjalan dengan baik, namun demikian dalam penyelenggaraannya masih adanya permasalahan yang harus dihadapi. Berikut tabel permasalahan yang dialami dalam penerapan SPM bidang pendidikan.

Tabel 2.132
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2020

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah.	1. Masih ada ditemukan anak tidak sekolah dan putus sekolah 2. Kekurangan sarana dan prasarana sekolah 3. Pemerataan guru	1. Melakukan sosialisasi dan mengusulkan beasiswa untuk anak yang tidak mampu. 2. Mengusulkan kekurangan sarana dan prasarana ke pusat melalui dana DAK 3. Merencanakan usulan BOS
2.	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.	1. Kekurangan Sarana dan Prasarana sekolah 2. Pemerataan guru Pendidikan Luar Biasa	1. Mengusulkan kekurangan sarana dan prasarana ke pusat melalui DAK 2. Merencanakan usulan BOS

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Tahun 2020.

B. SPM Bidang Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang memiliki tugas didalam urusan kesehatan. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu pelayanan dasar, jenis Pelayanan dasar bidang Kesehatan Standar Pelayanan Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk.

2. Realisasi SPM Urusan Kesehatan

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang Kesehatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.133
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

NO	Indikator SPM	Target Capaian Nasional	Target Capaian Provinsi	Capaian 2020
1.	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100 %
2.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa	100%	100 %	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan layanan kesehatan dari target capaian Provinsi sebesar 100% mendapaikan capaian 100% di tahun 2020 dari total 100% target nasional.

3. Permasalahan dan Solusi

Tabel 2.134
Permasalahan dalam penerapan SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	1. Masih perlu peningkatan anggaran untuk pelayanan yang lebih baik 2. Masih perlu peningkatan sarana dan prasarana menuju mutu pelayanan yang lebih baik lagi	1. Penambahan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat terdampak krisis kesehatan bisa lebih baik lagi 2. Peningkatan sarana dan prasarana guna peningkatan mutu pelayanan
2.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan khusus.	1. Keterampilan SDM 2. Sarana dan Prasarana yg butuh peningkatan 3. Anggaran untuk peningkatan mutu pelayanan	1. Pelatihan keterampilan untuk para tenaga medis 2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana 3. Penambahan anggaran

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Tahun 2020.

C. SPM Bidang Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Daerah Provinsi dan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri atas :

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota
2. Penyediaan pelayanan pengolah air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota.

2. Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan penataaan ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.135
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Indikator SPM	Target Capaian Nasional	Target Capaian Provinsi	Capaian 2020
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	n/a	n/a
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota	100%	n/a	n/a

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, Tahun 2020.

3. Permasalahan dan Solusi

Tabel 2.136
Permasalahan dalam penerapan SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Review DED	Dalam proses review DED
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota layanan pengolahan air limbah domestik regional lintaskabupaten/kota	Belum ada perencanaan untuk pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota	Perlu dukungan pemerintah provinsi dari kabupaten / kota untuk rencana pengolahan air limbah domestic regional lintas kabupaten/kota

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, Tahun 2020.

D. SPM Bidang Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan urusan bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Daerah Provinsi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan, terdiri atas :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.137
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Indikator SPM	Target Capaian Nasional	Target Capaian Provinsi	Capaian 2020
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperolah rumah layak huni	100%	n/a	n/a
2.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	n/a	n/a

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu, Tahun 2020.

3. Permasalahan dan Solusi

Tabel 2.138
Permasalahan dalam penerapan SPM
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperolah rumah layak huni	Belum dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN	Dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN
2.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh	Belum dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN	Dimasukan ke dalam rencana penganggaran APBD dan APBN

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni layak dan pengolahan air limbah domestik regional lintaskabupaten/kota		

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu, Tahun 2020.

E. SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum/masyarakat dan penegakan perda/perkada sesuai SOP.
2. Penanganan terhadap warga yang terkena dampak penegakan perda dan perkada.
3. Peningkatan pembinaan dan kapasitas anggota Satpol PP, PPNS dan anggota Satlinmas.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Satpol PP dan Satlinmas.
5. Penyediaan dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana.
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan Standar pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota.
7. Penanganan Tanggap darurat Bencana.
8. Penangangan pasca bencana.
9. Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran.
10. Penyusunan rencana induk sistim proteksi kebakaran

2. Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat pada tahun 2020 tidak terlepas dari peran serta positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat di Provinsi Bengkulu terhadap

pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang direalisasikan alokasi/pagu anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.139
Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2020

No	Indikator SPM	Target Capaian Nasional	Target Capaian Provinsi	Capaian 2020
1.	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%
2.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum/masyarakat dan penegakan perda/perkada sesuai SOP	100%	60%	60%

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, Tahun 2020.

Salah satu gambaran pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu tahun 2020 antara lain adalah, Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu Pada tahun 2020 data dari bidang Penegak Perda Satpol PP Provinsi Bengkulu telah terjadi pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan sebanyak 5 kasus. Pelanggaran Perda/Perkada yang diselasaikan dibagi pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan/dipantau dikali 100%.

3. Permasalahan dan Solusi

Tabel 2.140
Permasalahan dalam penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2020

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	1. Kurangnya sarana mobilitas yang cukup memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Patroli di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu. 2. Kurangnya tenaga SDM yang profesional dalam bidangnya.	1. Merencanakan penambahan personil anggota satpol PP 2. Mengajukan alokasi anggaran berkaitan sarana mobilitas tersebut dengan berkoordinasi dan berkonsultasi pada pihak Pemerintah Daerah maupun pemerintah pusat melalui bantuan keuangan/hibah.
2.	Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum/masyarakat dan penegakan perda/perkada sesuai SOP		

Sumber : Satpol PP Provinsi Bengkulu, Tahun 2020.

F. SPM Bidang Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Daerah Provinsi dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usian terlantar di dalam panti.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

2. Realisasi SPM Bidang Sosial

Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan SPM bidang Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.141
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020

No	Indikator SPM	Target Capaian Nasional	Target Capaian Provinsi	Capaian 2020
1.	Jumlah Warga Negara penyanang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	100%	100%	100%
2.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	100%	100 %	95,58%
3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100%	100%	96,45%
4.	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100%	0%	0%
5.	Jumlah warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan	100%	100 %	APBD = 86,64%

No	Indikator SPM	Target Capaian Nasional	Target Capaian Provinsi	Capaian 2020
	setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi			APBN = 95,06%

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Tahun 2020.

3. Permasalahan dan Solusi

Tabel 2.142
Permasalahan dalam penerapan SPM
Bidang Sosial Daerah Provinsi Tahun 2020

No	Indikator SPM	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah Warga Negara penyanang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Belum ada panti yang menangani permasalahan disabilitas di bawah dinas sosial Provinsi Bengkul	Melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah memiliki Panti Disabilitas dan proses pengajuan usulan pembuatan panti
2.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Anggaran tidak mencukupi	Mengajukan untuk penambahan anggaran
3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	Anggaran tidak mencukupi	Mengajukan untuk penambahan anggaran
4.	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	Belum ada anggaran dan panti yang menangani gelandangan dan pengemis di bawah Dinas sosial	Melakukan pengajuan dana khusus untuk penanganan masalah gelandangan dan pengemis
5.	Jumlah warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	• Dukungan SDM pengelola bencana belum memadai • Masih kurangnya dukungan Sarana Prasarana pendukung Pelayanan terhadap korban bencana di provinsi	• Penambahan SDM pengelola bencana yang sudah terlatih. • Pembangunan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan terhadap korban bencana

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Tahun 2020.

2.5. Capaian Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Bengkulu

Pembangunan Rendah Karbon (PRK) adalah sebuah paradigma pembangunan baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan beremisi GRK rendah dan optimalisasi eksploitasi SDA. Prinsip dasar Perencanaan PRK mencangkup:

1. Penerapan *Evidence-based Policies;*

2. Keikutsertaan *Carrying capacity* (termasuk Emisi GRK) sebagai komponen penting dalam penyusunan perencanaan dan target nasional;
3. Analisa *trade-off* menyeimbangkan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial dengan tujuan pengelolaan lingkungan;
4. Implementasi prinsip *Holistic, Integrated, Thematic, Spatial;*
5. Inklusifitas dalam penyusunan perencanaan dengan stakeholders terkait;

Dalam konteks SDGs, PPRK adalah tema pilar lingkungan yang menempatkan pencapaian target Goal 13 (Perubahan Iklim) sebagai basis utama untuk mendukung Goal 7 dan Goal 8 (Pilar Ekonomi), Goal 1 dan Goal 4 (Pilar Sosial) dan Goal 11,12, 14 dan 15 (Pilar lingkungan). PPRK merupakan implementasi nyata KLHS untuk memastikan komponen daya dukung SDA dan daya tampung LH menjadi salah satu referensi utama dalam penyusunan kebijakan, rencana, atau program (KRP) pembangunan. Peraturan mengenai KLHS didalam perencanaan menjadi kendaraan dalam mengaplikasikan analisis Kebijakan, Rencana dan Program untuk menghasilkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dalam RPJMN 2020- 2024 dan SDGs Roadmap 2030.

Dalam lingkup global, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen pasca-2020 pada pertemuan COP 21 di Paris, Perancis, Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29% (skenario fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan reduksi emisi minimal sebesar 41% (skenario ambisius/jika dengan dukungan internasional) pada tahun 2030. Komitmen tersebut dikenal dengan istilah *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC). Penyusunan INDC didasarkan pada hasil kaji ulang RAN/RAD-GRK. Kaji Ulang RAN/RAD-GRK sesuai dengan mandat dalam Pasal 9 Perpres No. 61 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa RAN-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional. Untuk menindaklanjuti RAN GRK, maka pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyusun dokumen RAD-GRK tersebut dan disahkan melalui Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2012 pada tanggal 14 Desember 2012 dan saat ini sudah dilakukan Kaji Ulang Dokumen RAD-GRK Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2030.

Dalam dokumen RAD-GRK Bengkulu mengimplikasikan aksi mitigasi di empat bidang prioritas, yaitu: 1) Bidang Pertanian, 2) Bidang Kehutanan dan

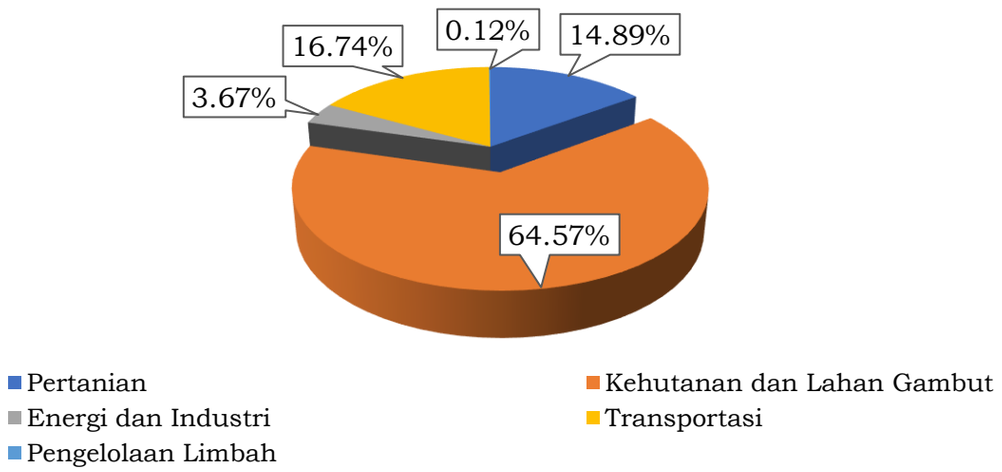
Lahan Gambut, 3) Bidang Energi dan Transportasi; serta 4) Bidang Industri dan Pengelolaan Limbah. Berdasarkan hasil perhitungan emisi Gas Rumah Kaca didapat nilai rekapitulasi tiap sektor sebagai berikut ini.

Tabel 2.143
Kontribusi Tiap Sektor terhadao Emisi GRK di Provinsi Bengkulu

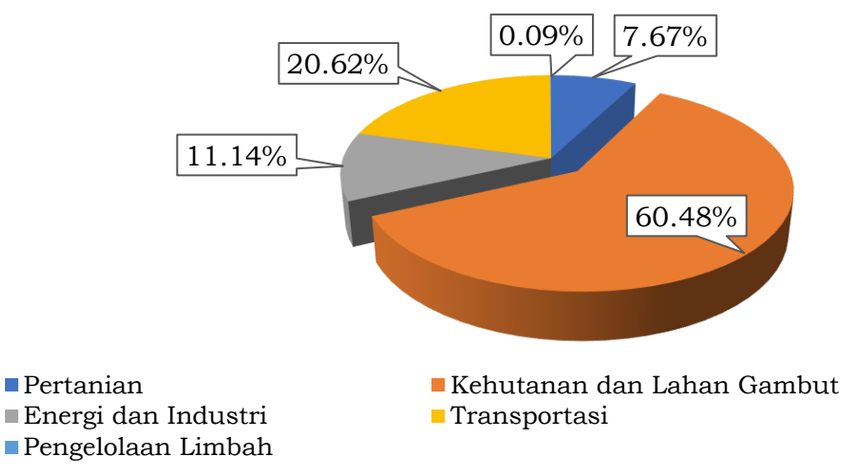
No	Sektor	Kontribusi Historis (ton CO_2-eq)	Kontribusi Thn 2020 (ton CO_2-eq)
1	Pertanian	709,704	919,678
2	Kehutanan dan Lahan Gambut	3,078,553.20	7,248,194.67
3	Energi dan Industri	175,173.5	1,335,704.40
4	Transportasi	798,798	2,471,065.00
5	Pengelolaan Limbah	572,166	764,841
T O T A L		**5,334,395.70**	**12,739,483.07**

Sektor penyumbang emisi terbesar adalah sektor berbasis lahan, mengingat sebagian besar kawasan Provinsi Bengkulu adalah kawasan hutan

Gambar 2.10.
Kontribusi Historis Sektoral terhadap Emisi GRK Bengkulu



Gambar 2.11
Kontribusi Baseline Tahun 2020 Sektoral terhadap Emisi GRK Provinsi Bengkulu



Berdasarkan Emisi BAU Baseline maka Proyeksi penurunan emisi yang dapat dilakukan Provinsi Bengkulu melalui aksi mitigasi sebesar 19.421.931,1 Ton CO2 Eq (20,72 %) yang meliputi beberapa sektor berikut ini :

a. Bidang Pertanian dari tahun 2011 hingga tahun 2030 adalah sebesar 25.711.635 tCO2eq. Jumlah ini mencakup emisi pada lahan sawah sebesar 17.341.180 tCO2eq; peternakan-CH4 sebesar 3.733.151 tCO2eq; peternakan-N2O sebesar 49.903 tCO2eq; pupuk urea-CO2 sebesar 41.413 tCO2eq; dan Direct N2O sebesar 4.545.988 tCO2eq. Proyeksi BAU *baseline* Emisi yang akan terjadi di sektor Pertanian sampai tahun 2030 sebesar 25,711,634.92. Ton CO2Eq. Target Nasional semua sektor untuk menurunkan Emisi sampai tahun 2030 sebesar 30%. Provinsi Bengkulu mempunyai target yang sama dengan pemerintah pusat sehingga penurunan emisi GRK sebesar 7.713,490, 47 Ton Co2Eq (30 %).

b. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut di Povinsi Bengkulu yang menunjukan besaran perkiraan emisi dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil perhitungan tim teknis diketahui bahwa jumlah emisi bersih Provinsi Bengkulu pada tahun 2011- 2030 diperkirakan sebesar 1,972,799.173 sampai 1,674,339.58 ton CO2 eq. Berdasarkan cara tersebut diperoleh nilai emisi kumulatif Provinsi Bengkulu periode tahun 2011-2030 ada sebesar 33,889,780.23 ton CO2 eq. Proyeksi penurunan emisi sektor kehutanan dan lahan gambut sebesar 11.629.037,33 ton c02 eq (34,31%).

c. Bidang Energi dan transportasi; berdasarkan hasil proyeksi BAU baseline diatas, dapat dilihat bahwa emisi GRK provinsi Bengkulu di tahun 2010 di bidang energy sebesar 787,94 ton CO2-eq yang akan meningkat hingga 2.638,52 ton CO2-eq di tahun 2030. Pada Tahun 2030, bidang energi (energi, transportasi) akan menjadi sumber emisi terbesar (kedua/ketiga) di Provinsi Bengkulu setelah bidang Lahan, hal berdasarkan data proyeksi di atas, bahwa bidang energi, sektor (transportasi/energi) merupakan penghasil emisi tertinggi di tahun dasar(2010), (dan/sedangkan) di tahun 2030, sektor (transportasi/energi merupakan sektor dengan sumber emisi GRK terbesar dengan proyeksi penurunan emisi sektor eneri sampai tahun 2030 sebesar 27.686,03 ton CO2-eq atau 10,49 % dan BAU Baseline Emisi transportasi sebesar 18.161,45 Ton CO2 Eq dengan proyeksi

penurunan emisi dengan aksi mitigasi sebesar 2.331,9 Ton CO2 Eq (12,84 %).

d. Bidang Limbah; untuk limbah padat atau persampahan dan air limbah (domestik maupun industri) menjadi penghasil emisi gas rumah kaca bidang pengelolaan limbah. Namun fokus perhitungan pada RAD-GRK adalah yang bersumber dari limbah domestik. Proyeksi penurunan emisi sampai tahun 2030 adalah sebesar 49.385,37 atau 15,946%.

e. Bidang *Blue Carbon*: *Blue Carbon* adalah *carbon* yang diserap dan disimpan didalam laut dan ekosistem pesisir, seperti hutan mangrove dan padang lamun. Sebaran hutan mangrove provinsi Bengkulu sebesar 2.434,2 ha dengan potensi carbon 124,15 ton Co2Eq. maka potensi keseluruhan emisi Blue carbon provinsi Bengkulu sebesar 302.181,1 ton Co2Eq.

PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2021

BAB III

Gambaran Keuangan Daerah

PROVINSI BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan salah satu bab yang harus termuat dalam penentuan kerangka kebijakan menengah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bengkulu tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2017-2020 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya penghematan dari sisi belanja.

Ada dua sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Provinsi Bengkulu; *Pertama,* sumber pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Bengkulu, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. *Kedua,* sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi. Dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, telah dilakukan melalui berbagai metode pengelolaan. Ini tidak lain sebagai bentuk restrukturisasi pemerintah sebagai tindak lanjut reformasi. Dampak

reformasi ini juga menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Dalam kaitan ini, tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mempertimbangkan beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1.1. Pendapatan

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah seperti Bagi Hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Berdasarkan data LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020, Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu rata-rata terkontraksi sebesar -0,82% dari Rp.2.804.577.827.356,27 pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 2.786.928.036.207,91 pada tahun 2020. Penurunan Pendapatan Daerah sangat dirasakan pada tahun 2020, yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Adapun rata-rata penurunan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

No	Uraian	(n-4) 2017	(n-3) 2018	(n-2) 2019	(n-1) 2020	Rata-rata
		Rp	Rp	Rp	Rp	(%)
1	**PENDAPATAN**	**2.804.577.827.356,27**	**2.851.808.282.196,75**	**2.934.057.941.393,87**	**2.786.928.036.207,91**	**(0,82)**
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**804.575.838.594,27**	**872.257.738.965,75**	**826.674.936.049,87**	**712.345.548.601,91**	**(13,80)**
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	597.694.185.212,00	679.443.635.955,00	622.484.621.718,90	561.787.749.522,00	(7,92)
1 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.374.651.415,00	4.095.104.357,00	4.661.820.320,00	3.007.003.756,00	(74,12)
1 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.657.206.696,88	17.379.569.025,93	13.981.579.485,35	14.669.299.693,56	(21,21)
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	183.849.795.270,39	171.339.429.627,82	185.546.914.525,62	132.881.495.630,35	(39,28)
1 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.997.884.640.743,00**	**1.978.482.543.231,00**	**2.106.267.005.344,00**	**2.053.310.368.606,00**	**2,51**
1 . 2 . 1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**1.997.884.640.743,00**	**1.478.045.278.636,00**	**1.529.114.583.650,00**	**1.427.539.423.208,00**	**(38,95)**
1 . 2 . 1 . 1	Dana Bagi Hasil Pajak	43.701.416.036,00	40.963.179.706,00	22.616.577.700,00	42.230.825.314,00	(3,37)
1 . 2 . 1 . 2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	17.610.291.475,00	25.405.555.138,00	23.641.627.754,00	28.909.972.336,00	41,45

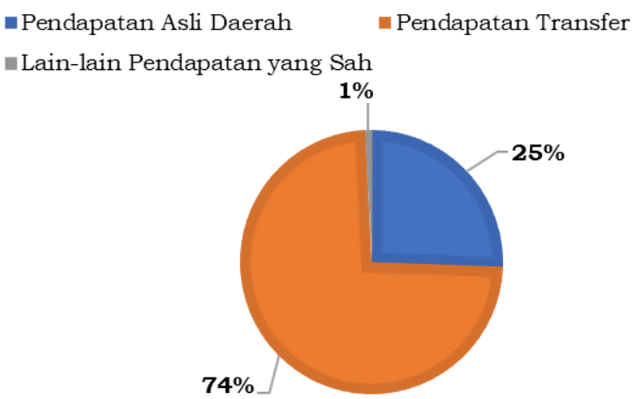
No	Uraian	(n-4) 2017	(n-3) 2018	(n-2) 2019	(n-1) 2020	Rata-rata
		Rp	Rp	Rp	Rp	(%)
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.301.538.847.000,00	1.300.978.160.419,00	1.334.178.390.000,00	1.219.949.535.000,00	(6,92)
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	635.034.086.232,00	110.698.383.373,00	148.677.988.196,00	136.449.090.558,00	(78,51)
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	0,00	**500.437.264.595,00**	**577.152.421.694,00**	**625.770.945.398,00**	**25,04**
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	0,00	500.437.264.595,00	577.152.421.694,00	625.770.945.398,00	25,04
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**2.117.348.019,00**	**1.068.000.000,00**	**1.116.000.000,00**	**21.272.119.000,00**	**0,80**
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.153.408.000,00	0,00	0,00	20.156.119.000,00	904
1.3.3	Pendapatan Lainnya	963.940.019,00	1.068.000.000,00	1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	14,04

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020, yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu (Audited), diolah tahun 2021.

*Penjelasan : untuk menyajikan data yang valid dan konsisten, data yang disajikan adalah data realisasi APBD yang telah diaudit oleh BPK berdasarkan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020 sampai dengan tahun anggaran 2020 yang telah *audited*.

Jika kita melihat pada realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan data ditabel tersebut, struktur Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2017-2020 didominasi oleh pendapatan dari sektor Transfer sebesar 74%, kemudian disusul oleh sektor Pendapatan Asli Daerah yang sebesar 25%, Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar 1%.

Gambar 3.1.
Rata-rata Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2017-2020



Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

A. Pendapatan Asli Daerah

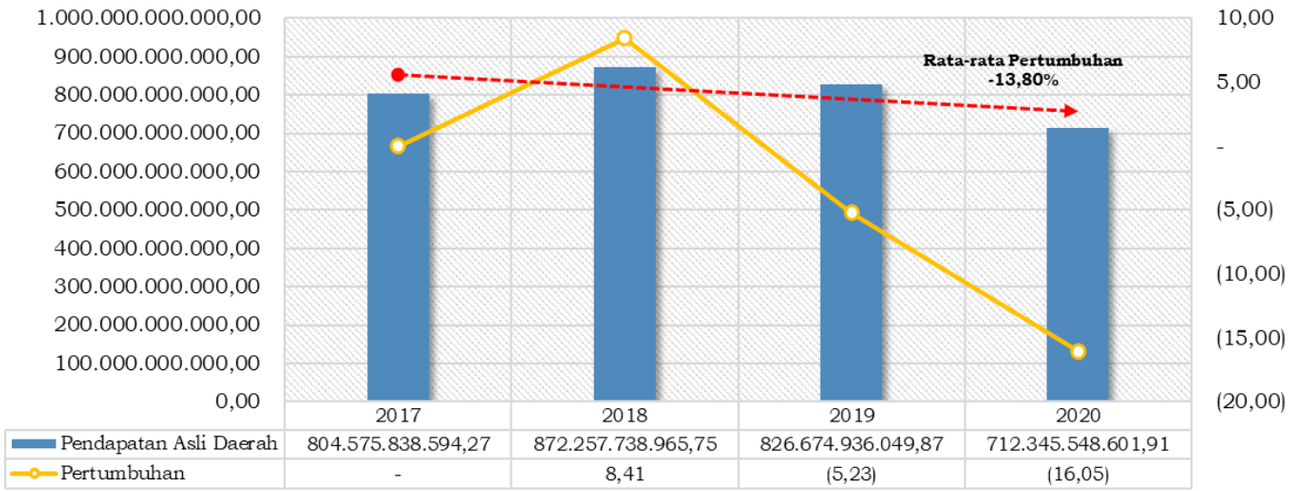
Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Peran Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya. Untuk

itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, memberikan cakupan sumber Pendapatan Asli Daerah yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah pelaksanaanya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya Pendapatan Asli Daerah sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal. Pemerintah Provinsi Bengkulu selalu berupaya menjadikan komponen Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar -13,80% dari sebesar Rp.804.575.838.594,27,- pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.712.345.548.601,91 pada tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah provinsi Bengkulu turun drastis pada tahun 2020 yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang telah menekan realisasi kompoenen PAD. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2017-2020

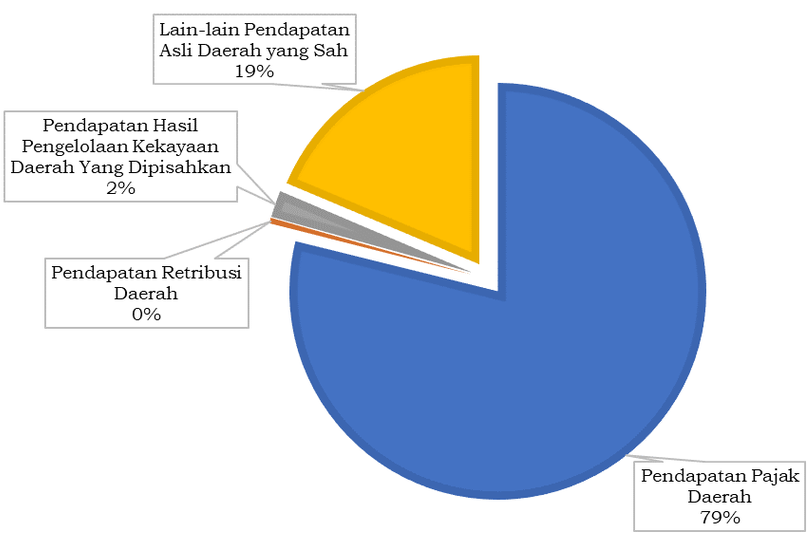


	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	804.575.838.594,27	872.257.738.965,75	826.674.936.049,87	712.345.548.601,91
Pertumbuhan	-	8,41	(5,23)	(16,05)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

Jika kita melihat pada realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan data, struktur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2017-2020 didominasi oleh pendapatan dari sektor Pajak Daerah sebesar 79%, kemudian disusul oleh sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebsar 19%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 2% dan Retribusi sebesar 0,48%.

Gambar 3.3.
Rata-rata Struktur Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2017-2020



Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

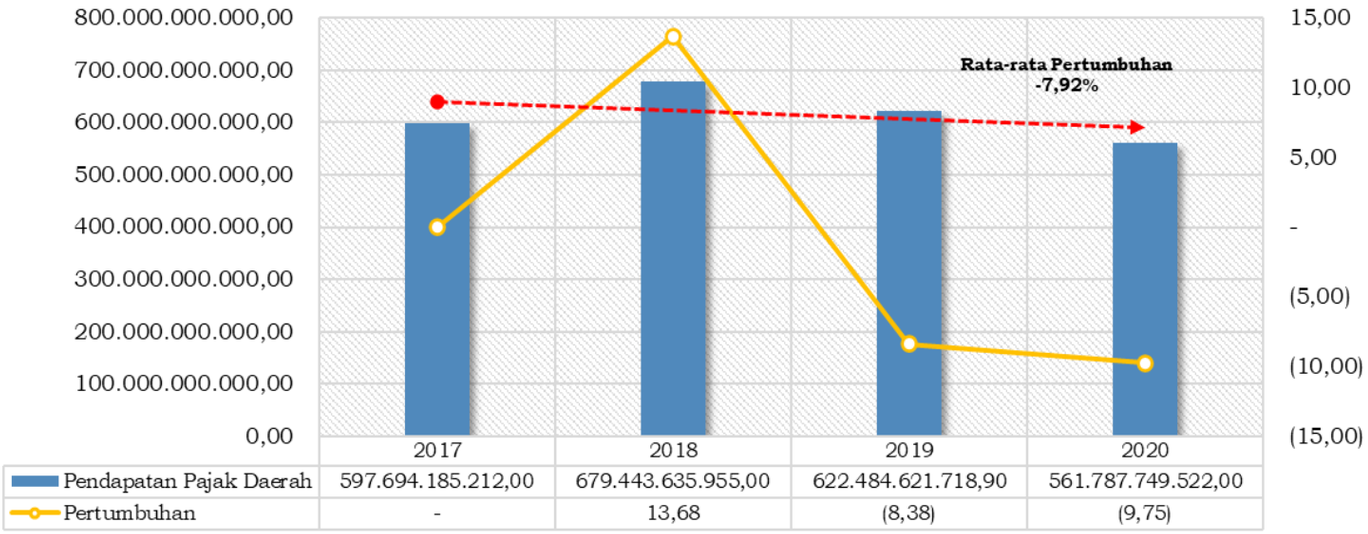
A.1.) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

Ketentuan pemungutan pajak dan retribusi daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, terdapat berbagai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Pajak daerah Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar -7,92% dari sebesar Rp.597.694.185.212,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.561.787.749.522,00 pada tahun 2020. Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Bengkulu bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Beas Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan. Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.4.
Perkembangan Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Pajak Daerah	597.694.185.212,00	679.443.635.955,00	622.484.621.718,90	561.787.749.522,00
Pertumbuhan	-	13,68	(8,38)	(9,75)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

A.2.) Pendapatan Retribusi Daerah

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar perumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar.

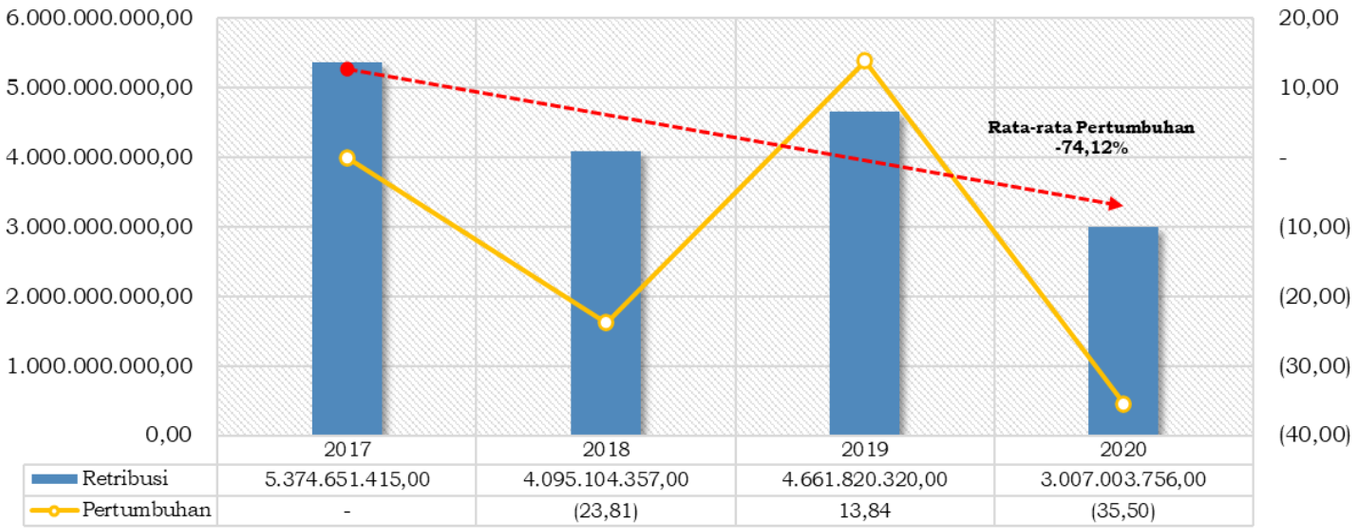
Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam UU Nomor 28 tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha merupakan pungutan

atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi yang menjadi objek pungutan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bengkulu bersumber dari: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggati Biaya Cetak Peta, Retribusi Pemakaian Kekayaan Dae`rah, Retribusi Tmpat Penginapan/Pesanggarahan/Villa, Retribusi pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Pelayanan dan Perizinan Usaha Perikanan dan retriobusi Perpanjangan IMTA kepada tenaga kerja asing. Pungutan Retribusi di Provinsi Bengkulu dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum serta Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, pendapatan Retribusi Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -74,12% dari sebesar Rp.5.374.651.415,00,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.3.007.003.756,00 pada tahun 2020. Penurunan drastis Retirbusi Daerah terjaid pada tahun 2020, yang diakibatkan minimnya pengutan yang dilakukan karena pembatasan sosial akibat Covid-19. Perkembangan Pendapatan Retribusi Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.5.
Perkembangan Pendapatan Retribusi Provinsi Bengkulu
Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Retribusi	5.374.651.415,00	4.095.104.357,00	4.661.820.320,00	3.007.003.756,00
Pertumbuhan	-	(23,81)	13,84	(35,50)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

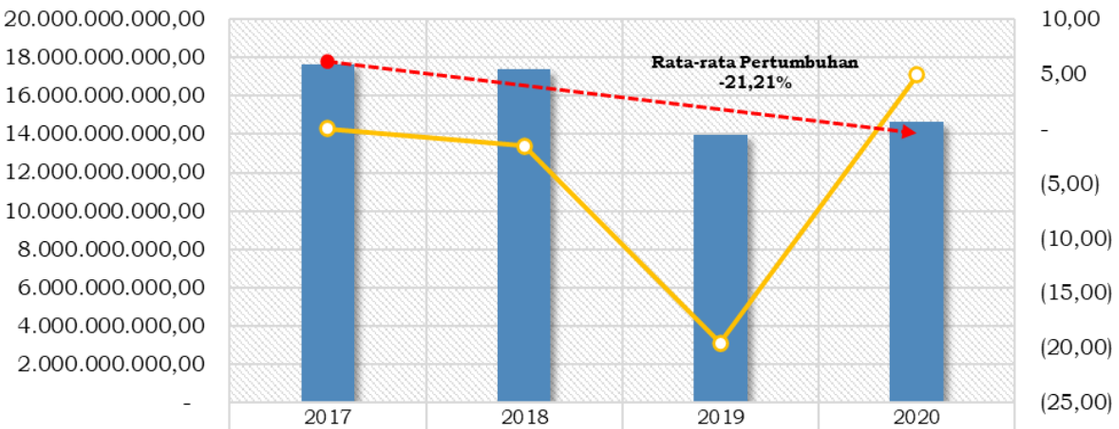
A.3.) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntud untuk menarik investasi asing maupun domestik agar perumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -21,21% dari sebesar Rp.17.657.206.696,88,- pada tahun 2017 menurun menjadi

Rp.14.669.299.693,56,- pada tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.6.
Perkembangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.657.206.696,88	17.379.569.025,93	13.981.579.485,35	14.669.299.693,56
Pertumbuhan	-	(1,57)	(19,55)	4,92

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

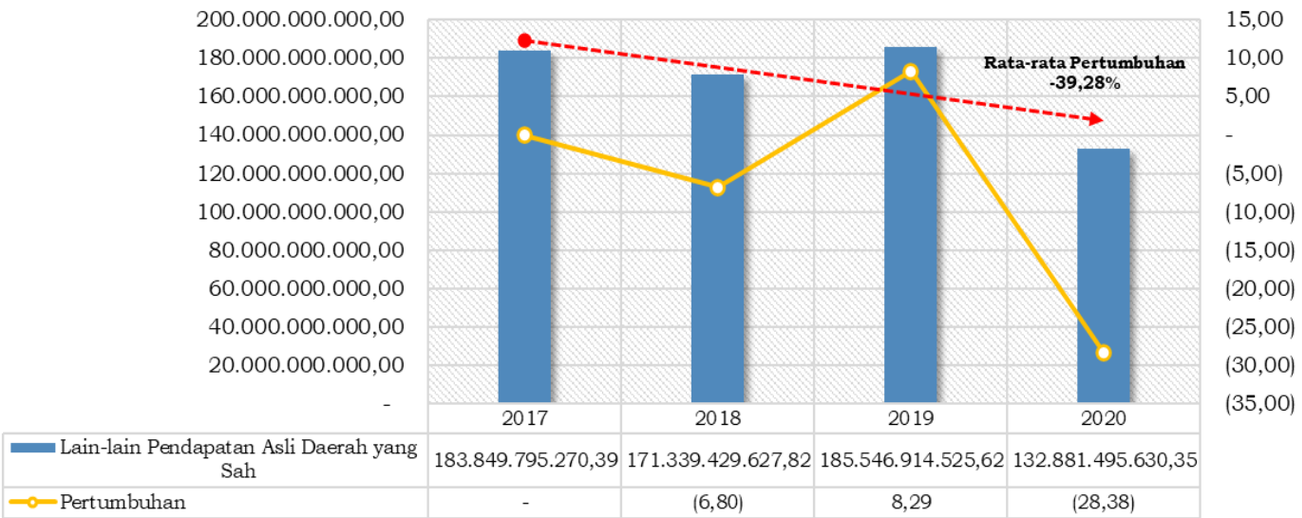
A.4.) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih NIlai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasiltas Umum, BLUD, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Bengkulu menunjukan tren

menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 39,28% dari sebesar Rp.183.849.795.270,39,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.132.881.495.630,35,- pada tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.7.
Perkembangan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	183.849.795.270,39	171.339.429.627,82	185.546.914.525,62	132.881.495.630,35
Pertumbuhan	-	(6,80)	8,29	(28,38)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

B. Pendapatan Transfer

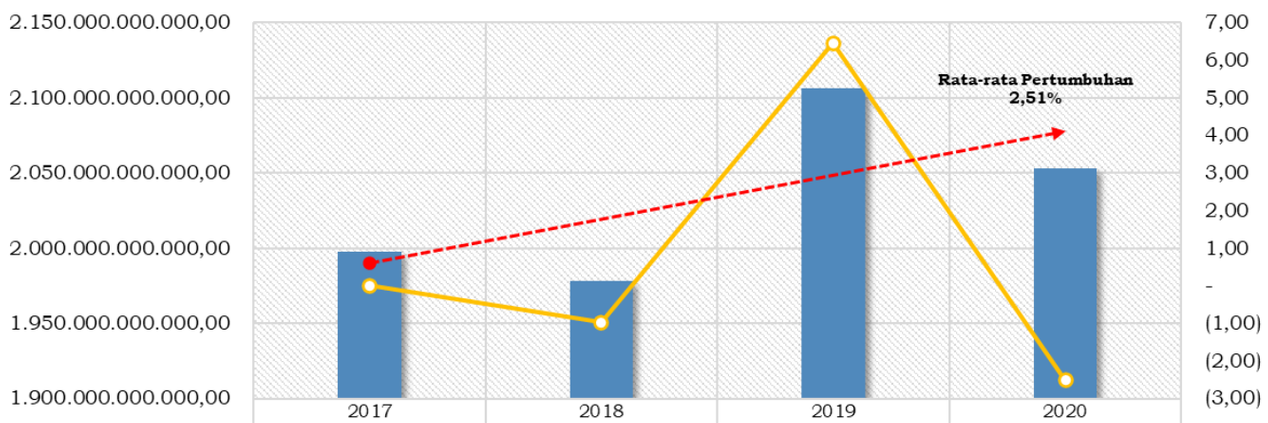
Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Dengan

demikian, Pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional yang mengamanatkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Pendapatan Transfer Provinsi Bengkulu menunjukan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,51% dari sebesar Rp.1.997.884.640.743,00,- pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.2.053.310.368.606,00,- pada tahun 2020. Pendapatan Transfer Provinsi Bengkulu bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Transfer Pusat Lainnya. Perkembangan Pendapatan Transfer Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.8.
Perkembangan Pendapatan Transfer Prov. Bengkulu Tahun 2017-2020

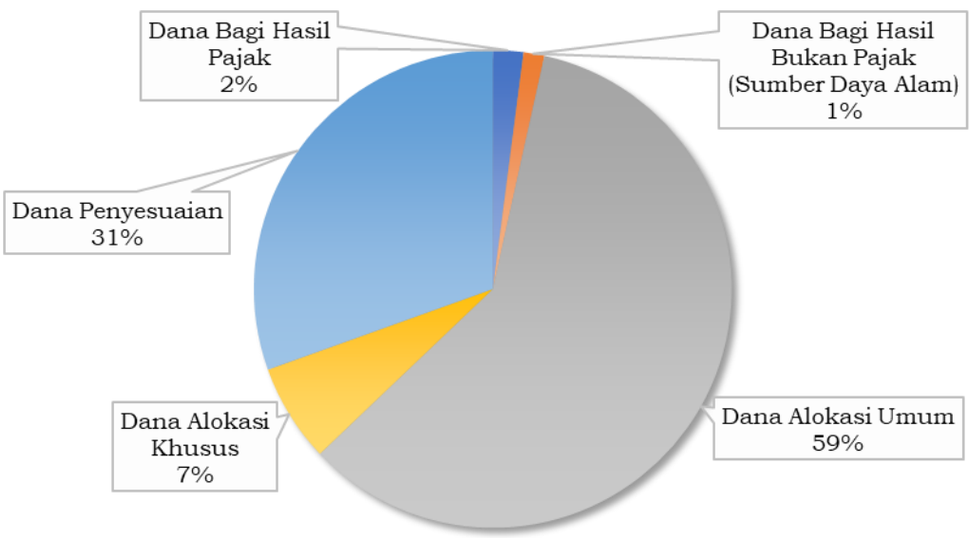


	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Transfer	1.997.884.640.743,00	1.978.482.543.231,00	2.106.267.005.344,00	2.053.310.368.606,00
Pertumbuhan	-	(0,97)	6,46	(2,51)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

Jika kita melihat pada realisasi Pendapatan Transfer berdasarkan data, struktur Pendapatan Transfer Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2017-2020 didominasi oleh pendapatan dari sektor DAU sebesar 59%, kemudian disusul oleh sektor Dana Penyesuaian sebesar 31%, DAK sebesar 7% dan DBH Pajak sebesar 2% dan DBH Bukan Pajak sebesar 1%.

Gambar 3.9.
Rata-rata Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2017-2020



Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

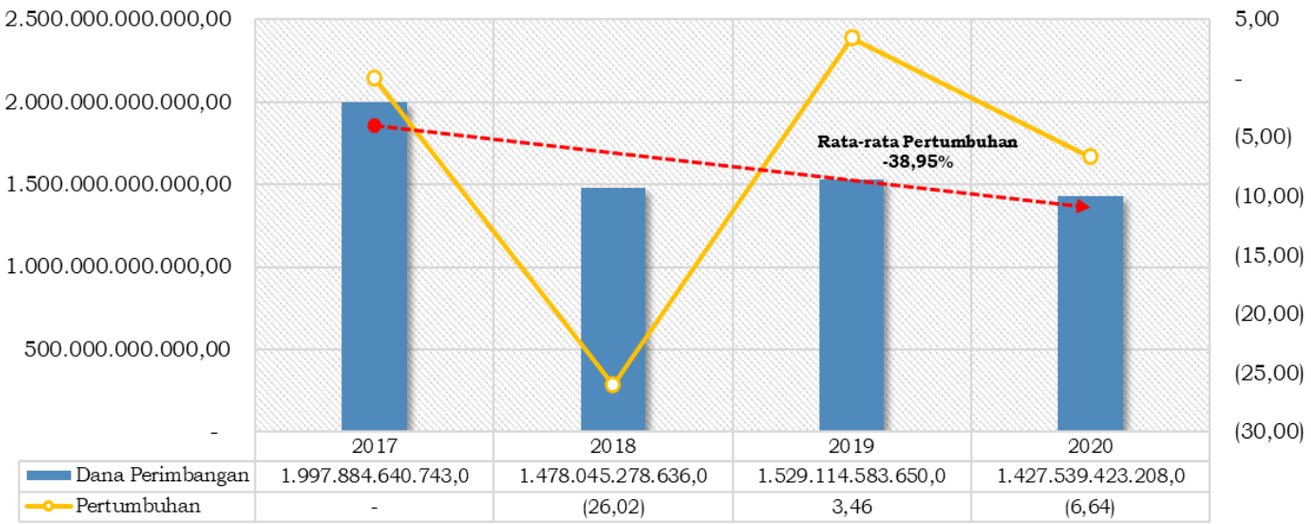
B.1.) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana Perimbangan

Provinsi Bengkulu diperoleh dari sumber yaitu: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Pendapatan Dana Perimbangan Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar -38,95% dari sebesar Rp.1.997.884.640.743,00,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.1.437.539.423.208,00,- pada tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Dana Perimbangan Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.10.
Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Dana Perimbangan	1.997.884.640.743,0	1.478.045.278.636,0	1.529.114.583.650,0	1.427.539.423.208,0
Pertumbuhan	-	(26,02)	3,46	(6,64)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

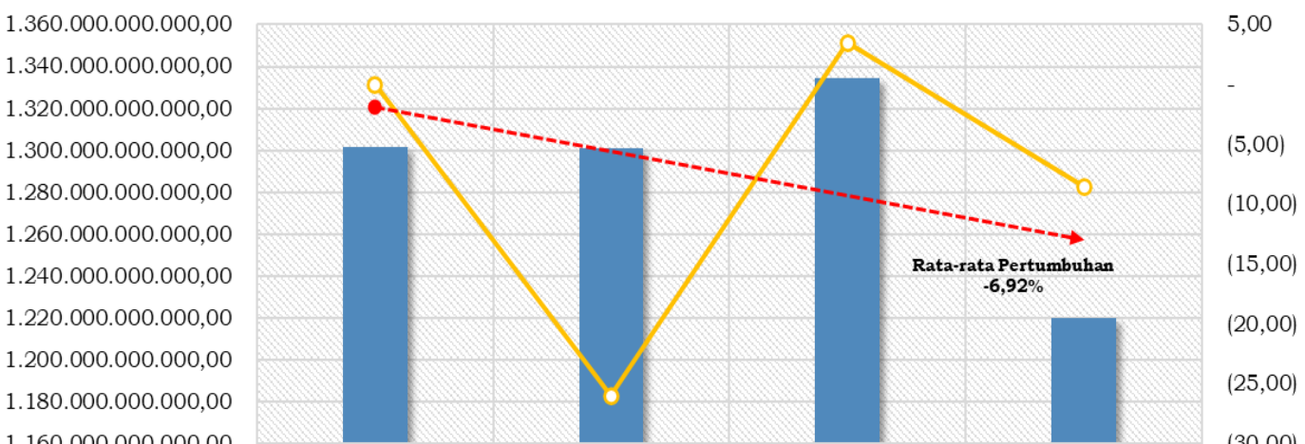
B.1.a.) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Daerah. DAU suatu Daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu Daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan Daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah dan alokasi dasar berupa gaji ASN Daerah.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Pendapatan DAU Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 6,92% dari sebesar Rp.1.301.538.847.000,00,- pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.1.219.949.535.000,00,- pada tahun 2020. Perkembangan Pendapatan DAU Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.11.
Perkembangan DAU Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Dana Alokasi Umum	1.301.538.847.000,0	1.300.978.160.419,0	1.334.178.390.000,0	1.219.949.535.000,0
Pertumbuhan	-	(26,02)	3,46	(8,56)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

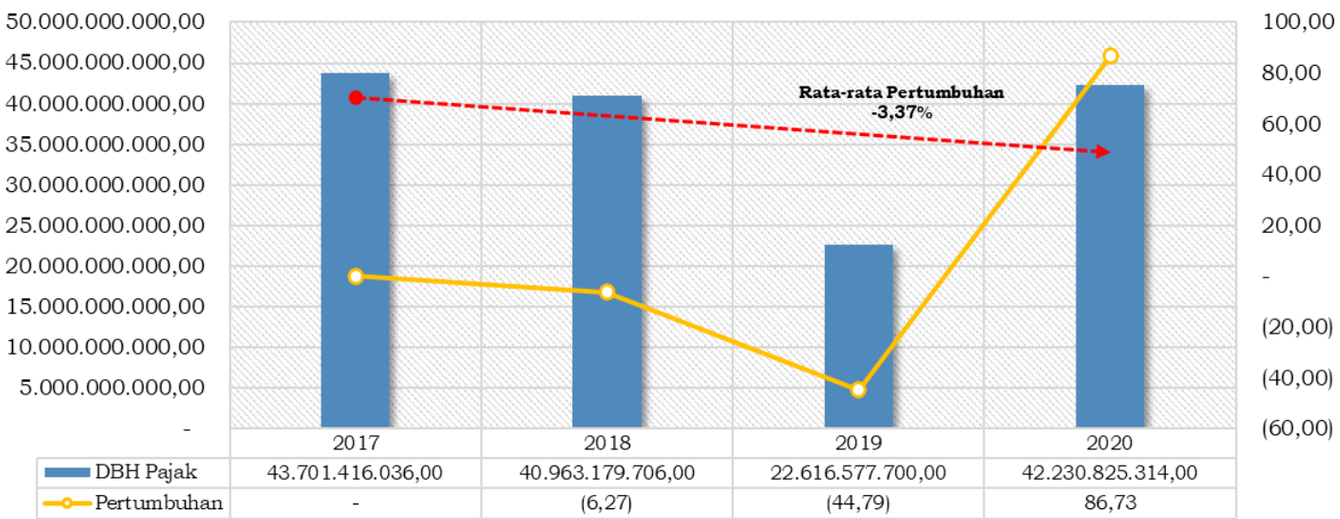
B.1.b.) Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil atau DBH bersumber dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Penghasilan Pasal 21. Penggunaan dana perimbangan jenis DBH

pajak ini bersifat *block grant*, artinya penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian untuk penetapan alokasi DBH PBB untuk daerah dan DBH BPHTB dilakukan berdasarkan rencana penerimaan PBB dan BPTHB tahun anggaran bersangkutan, serta paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Pendapatan DBH Pajak Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,37% dari sebesar Rp.43.701.416.036,00,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.42.230.825.314,00,- pada tahun 2020. Perkembangan Pendapatan DBH Pajak Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.12.
Perkembangan DBH Pajak Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
DBH Pajak	43.701.416.036,00	40.963.179.706,00	22.616.577.700,00	42.230.825.314,00
Pertumbuhan	-	(6,27)	(44,79)	86,73

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

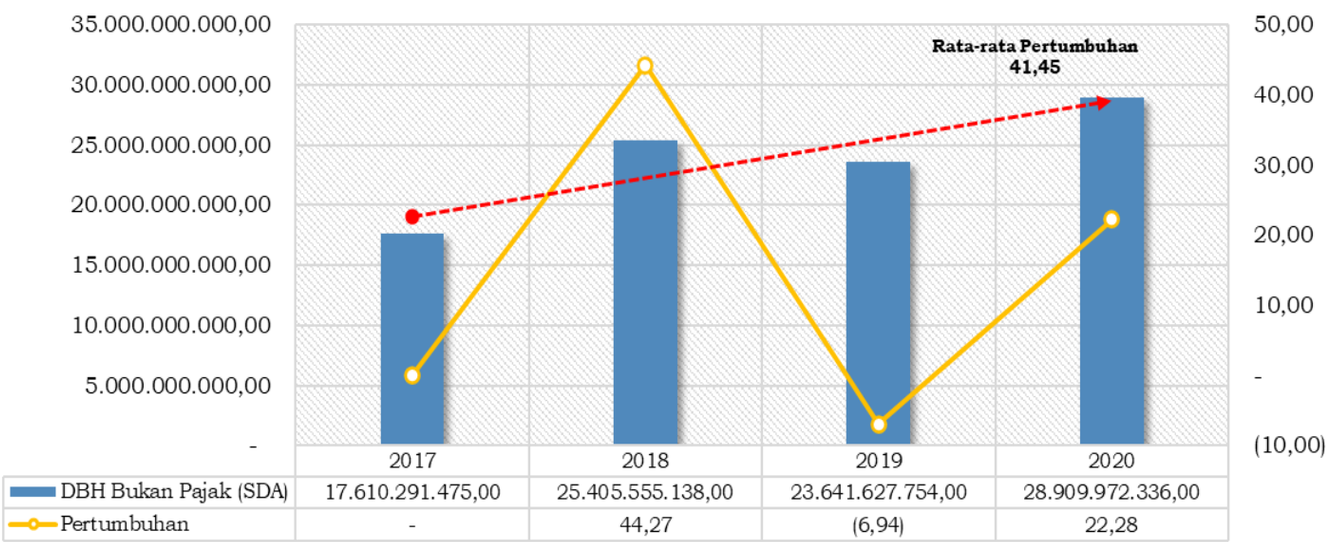
B.1.c.) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) terdiri atas 5 (lima) jenis yaitu: DBH SDA Kehutanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan, DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi, DBH SDA Mineral dan Batu Bara (Minerba) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah

yang berasal dari penerimaan SDA Minerba yang berasal dari Iuran Tetap (Land-Rent) dan iuran Eksploitasi/Eksplorasi (royalti), DBH SDA Panas Bumi merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Panas Bumi yang berasal dari Setoran Bagian Pemerintah atau Iuran Tetap dan Iuran Produksi dan DBH SDA Perikanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Perikanan. Masing-masing penerimaan dari kelima SDA tersebut dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Pendapatan DBH Bukan Pajak Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu menunjukan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 41,45% dari sebesar Rp.17.610.291.475,00,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp. 28.909.972.336,00,- pada tahun 2020. Perkembangan Pendapatan DBH Bukan Pajak Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.13.
Perkembangan DBH Bukan Pajak Sumber Daya Alam
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
DBH Bukan Pajak (SDA)	17.610.291.475,00	25.405.555.138,00	23.641.627.754,00	28.909.972.336,00
Pertumbuhan	-	44,27	(6,94)	22,28

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

B.1.d.) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.

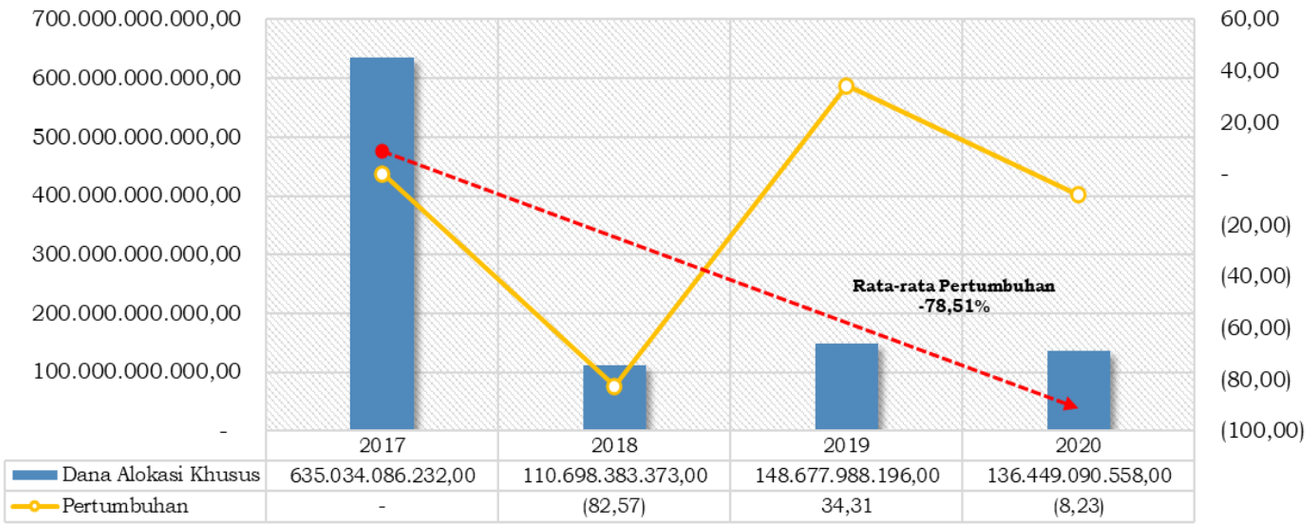
DAK terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Tahun 2019 terdapat 4 tambahan jenis DAK non fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Tambahan jenis DAK non fisik tersebut adalah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan serta Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS).

Kebijakan penambahan empat jenis DAK non fisik tersebut bukan tanpa alasan, pemerintah tentunya telah menetapkan tujuan, dasar alokasi dan sasaran yang dituju terkait dengan penambahan ke empat jenis DAK

non fisik tersebut agar kualitas pelayanan publik di daerah optimal. Masing-masing tambahan jenis DAK non fisik sudah pasti memiliki tujuan, dasar alokasi, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Pendapatan DAK Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 78,51% dari sebesar Rp.635.034.086.232,00,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.136.449.090.558,00,- pada tahun 2020. Penurunan DAK ini mulai terjadi pada tahun 2018 yang diakibatkan karena perpindahan penempatan DAK Non Fisik yang sebelumnya pada objek pendapatan DAK pindah ke objek Dana Penyesuaian. Perkembangan Pendapatan DAK Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.14.
Perkembangan Dana Alokasi Khusus
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Dana Alokasi Khusus	635.034.086.232,00	110.698.383.373,00	148.677.988.196,00	136.449.090.558,00
Pertumbuhan	-	(82,57)	34,31	(8,23)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

B.2.) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

B.2.1.) Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian yang dialokasikan kepada daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan penggunaannya khusus untuk pendanaan belanja pegawai dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di daerah.

Ruang lingkup dan penggunaan Dana Penyesuaian:

a) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD diberikan kepada guru-guru PNSD;

b) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan kepada guru-guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik;

c) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama digunakan untuk biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

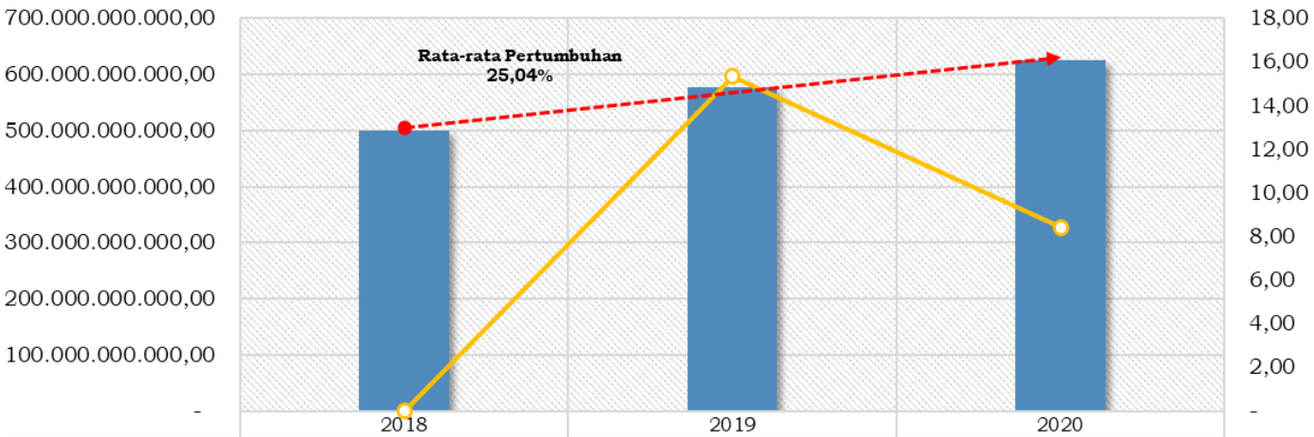
d) Dana insentif daerah (DID) untuk melaksanakan fungsi pendidikan dengan mempertimbangkan kriteria daerah berprestasi yang antara lain telah memenuhi kriteria utama, dan kriteria kinerja;

e) Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) merupakan dana yang bersumber dari pinjaman program yang digunakan dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan DAK khususnya bidang infrastruktur;

f) DAK Non Fisik sebagaiaman yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya pada subbab B.1.d.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Pendapatan Dana Penyesuaian Provinsi Bengkulu menunjukan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,04% dari sebesar Rp.500.437.264.595,00,- pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.625.770.945.398,00,- pada tahun 2020. Pada tahun 2017, Dana Penyesuaian masih bergabung pada perhitungan pendapatan dari Dana Alokasi Khusus. Perkembangan Dana Penyesuaian Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.15.
Perkembangan Dana Penyesuaian Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2020



	2018	2019	2020
Dana Penyesuaian	500.437.264.595,00	577.152.421.694,00	625.770.945.398,00
Pertumbuhan	-	15,33	8,42

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

C. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan lain yang sah yang diperoleh dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020 adalah pendapatan yang bersumber dari Hibah dan Pendapatan Lainnya. Pada Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Bengkulu memperoleh hibah sebesar Rp.1.153.408.000,00,-. Kemudian mulai tahun 2018-2019, dana hibah tersebut tidak lagi diperoleh, namun berganti menjadi Pendapatan Lainnya. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi memperoleh Hibah dari BNPD untuk penanggulangan bencana sebesar Rp.20.156.119.000,00. Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2019 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Provinsi Bengkulu meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 904% dari sebesar Rp.2.117.348.019,00,- pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.21.272.119.000,00 pada tahun 2020.

3.1.1.2. Belanja

Belanja daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima

kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perunndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan APBD Tahun 2017-2020, Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD. Yang termasuk dalam belanja langsunga diantaranya adalah : belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja tidak langsung, belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung hanya dapat dianggarkan oleh SKPKD.

Pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan pada tahun 2019. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

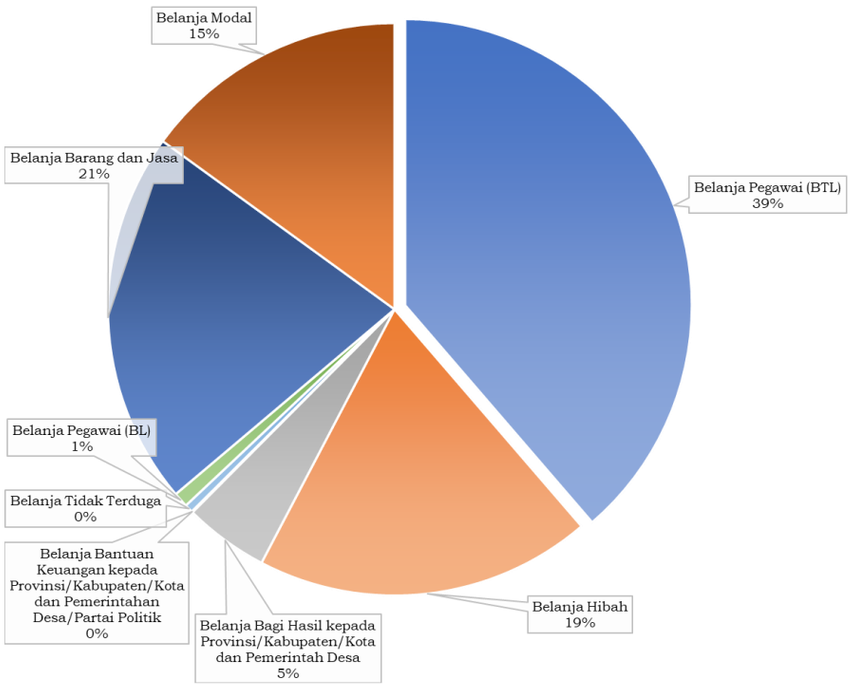
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dioperasionalkan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada kebijakan baru yaitu Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Untuk mengukur kinerja keuangan masa lalu, masih dilakukan pengukuran berdasarkan klasifikasi keuangan daerah sesuai Peremndagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan data LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020, Belanja Daerah Provinsi Bengkulu rata-rata menurun sebesar (4,89%) dari Rp.2.867.213.326.855,96,- pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.2.698.458.077.971,87,- pada tahun 2020.

Jika kita melihat pada realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan kelompok jenis Belanja Daerah, struktur Belanja Daerah Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2017-2020 didominasi oleh belanja dari jenis Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, kemudian Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dengan masing-masing sebesar 39%,21% dan 19%.

Gambar 3.16.
Rata-rata Struktur Belanja Daerah Provinsi Bengkulu
Tahun 2017-2020



Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	(n-4) 2017	(n-3) 2018	(n-2) 2019	(n-1) 2020	Rata-rata
		Rp	Rp	Rp	Rp	(%)
2	**BELANJA**	**2.867.213.326.855,96**	**2.979.578.236.902,23**	**3.118.303.518.797,46**	**2.698.458.077.971,87**	**(4,89)**
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.500.252.284.671,82**	**1.622.411.064.256,63**	**1.568.400.511.869,68**	**1.699.580.773.072,07**	**13,18**
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	958.716.986.706,00	1.018.412.868.261,00	1.027.615.426.759,00	1.044.040.926.217,00	8,73
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	278.389.957.000,00	324.924.782.000,00	341.978.235.000,00	512.620.480.000,00	71,86
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	261.415.985.349,82	277.516.027.247,63	196.203.764.258,68	128.609.788.107,07	(57,59)
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik	1.729.355.616,00	1.549.873.648,00	1.598.555.852,00	1.793.682.448,00	4,97
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	0,00	7.513.100,00	1.004.530.000,00	12.515.896.300,00	14.416,33
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**1.366.961.042.184,14**	**1.357.167.172.645,60**	**1.549.903.006.927,78**	**998.877.304.899,80**	**(22,07)**
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.917.767.483,88	54.137.899.879,00	32.741.001.291,00	22.780.352.559,00	(54,56)
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	608.969.687.739,46	684.551.367.017,20	775.338.942.052,44	571.251.583.555,10	(0,65)
2 . 2 . 3	Belanja Modal	711.073.586.960,80	618.477.905.749,40	741.823.063.584,34	404.845.368.785,70	(38,50)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu (Audited), diolah tahun 2021.

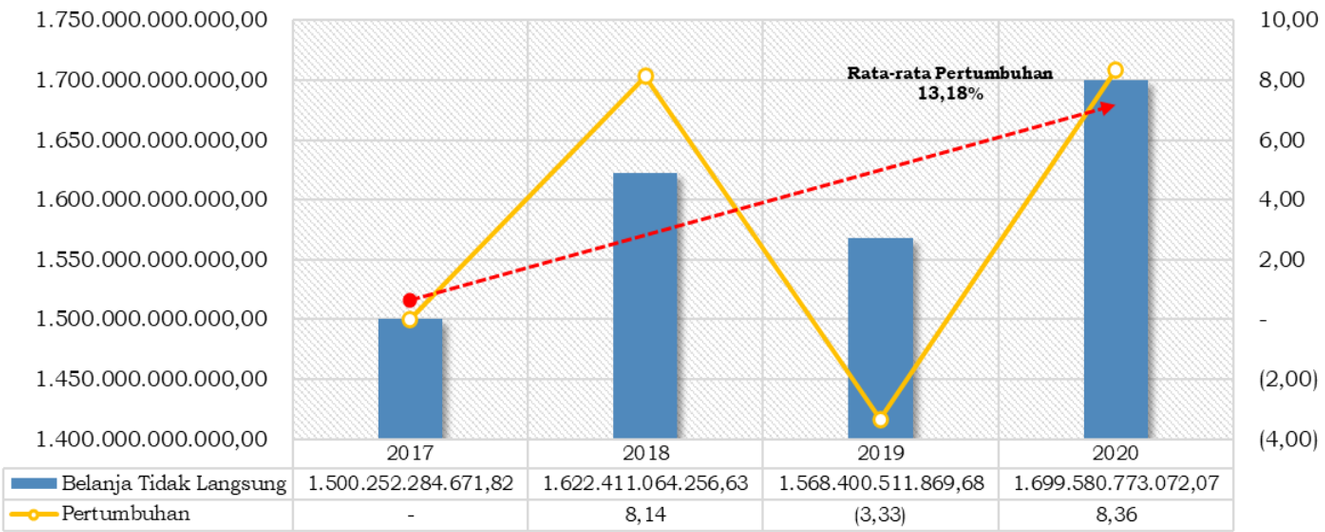
*Penjelasan : untuk menyajikan data yang valid dan konsisten, data yang disajikan adalah data realisasi APBD yang telah diaudit oleh BPK berdasarkan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020 sampai dengan tahun anggaran 2020 yang telah *audited*.

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2019 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Belanja Tidak Lamgsung Provinsi Bengkulu menunjukan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,18% dari sebesar Rp.1.500.252.284.671,82,- pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.1.699.580.773.072,07,- pada tahun 2020. Peningkatan terbesar dalam kelompok Belanja Tidak Langsung adalah pada jenis belanja Hibah. Belanja Hibah terus meningkat dikarenakan pada jenis belanja hibah tersebut, menampung anggaran yang dialokasikan untuk belanja Hibah BOS yang meningkat setiap tahun. Kemudia Belanja Pegawai meningkat dikarenakan adnaya kenaikan gaji dan uang makan ASN. Perkembangan Belanja Tidak Langsung Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.17.
Perkembangan Belanja Tidak Langsung
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

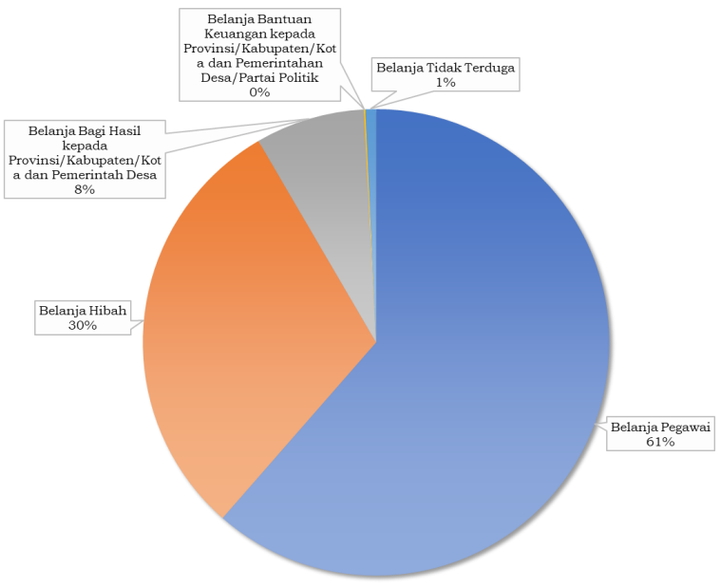


	2017	2018	2019	2020
Belanja Tidak Langsung	1.500.252.284.671,82	1.622.411.064.256,63	1.568.400.511.869,68	1.699.580.773.072,07
Pertumbuhan	-	8,14	(3,33)	8,36

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

Jika kita melihat pada realisasi Belanja Tidak Langsung berdasarkan data, jenis Belanja Tidak Langsung Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2017-2020 didominasi oleh Belanja Pegawai sebesar 61%, kemudian Belanja Hibah sebesar 30% dan Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sebesar 8%.

Gambar 3.18.
Rata-rata Struktur Belanja Tidak Langsung Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

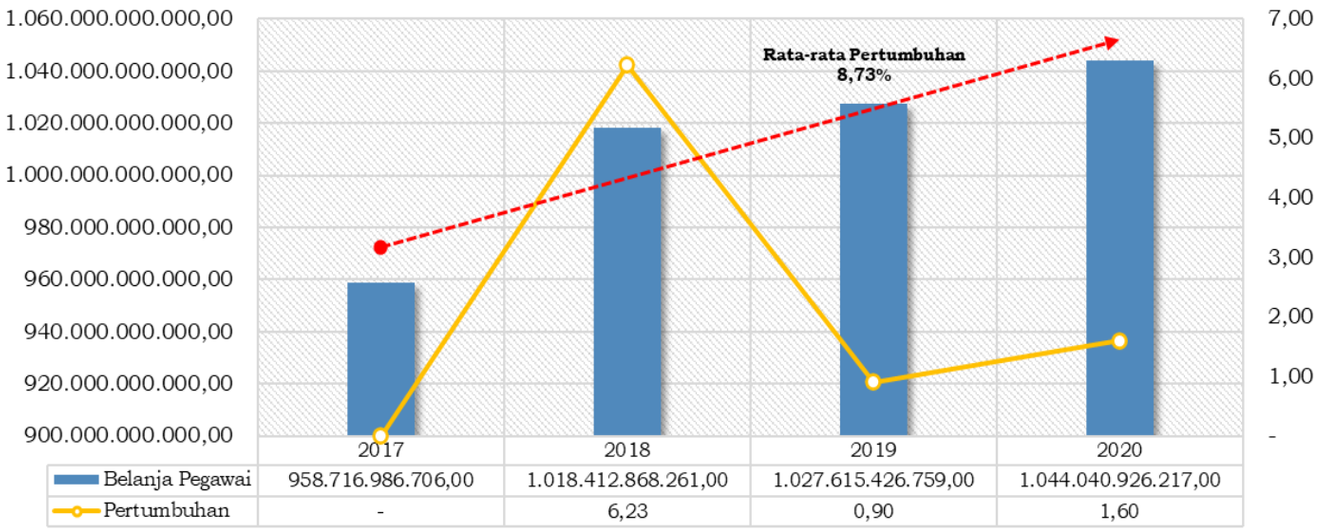
A.1.) Belanja Pegawai dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Pegawai dalam kelompok Belanja Tidak Langsung digunakan untuk menampung belanja gaji ASN, tunjangan ASN, uang makan ASN dan pendapatan lainnya yang diperuntukan sebagai penghasilan ASN.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Belanja Pegawai Provinsi Bengkulu menunjukan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,73% dari sebesar Rp.958.716.986.706,00,- pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.1.044.040.926.217,00,- pada tahun 2020. Perkembangan Belanja

Pegawai Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.19.
Perkembangan Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung)
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai	958.716.986.706,00	1.018.412.868.261,00	1.027.615.426.759,00	1.044.040.926.217,00
Pertumbuhan	-	6,23	0,90	1,60

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

A.2.) Belanja Hibah

Belanja hibah d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan. Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada

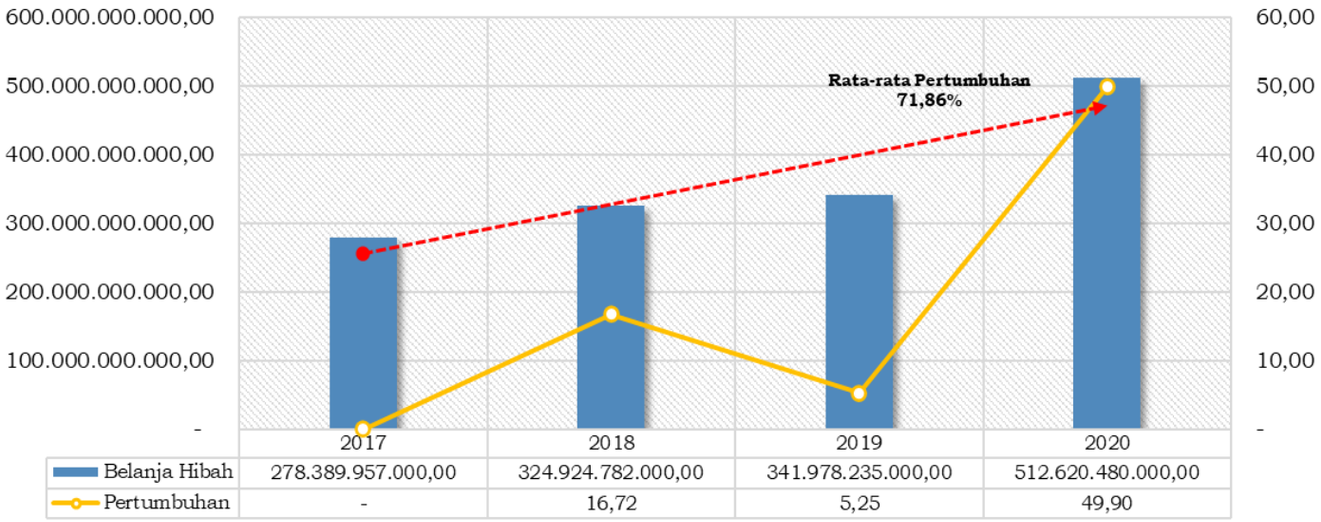
pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.Hibah kepada pemerintah daerah Iainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Belanja hibah kepada pemerintah dikelola sesuai dengan mekanisme APBN, serta hibah kepada pemerintah daerah Iainnya dan kepada perusahaan daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah dalam APBD Provinsi Bengkulu dialokasikan untuk memberikah hibah keopada instansi vertikal, yayasan, lembaga pendidikan, rumah ibadah, hibah BOS dan hibah wajib yang sebagaiamana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, berserta aturan perubahannya. Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Belanja Hibah Provinsi Bengkulu menunjukan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 71,86% dari sebesar Rp.278.389.957.000,00,- pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.512.620.480.000,00,- pada tahun 2020. Peningkatan Belanja Hibah tahun 2020 dikarenakan adanya belanja Hibah Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020. Perkembangan Belanja Hibah Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.20.
Perkembangan Belanja Hibah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Belanja Hibah	278.389.957.000,00	324.924.782.000,00	341.978.235.000,00	512.620.480.000,00
Pertumbuhan	-	16,72	5,25	49,90

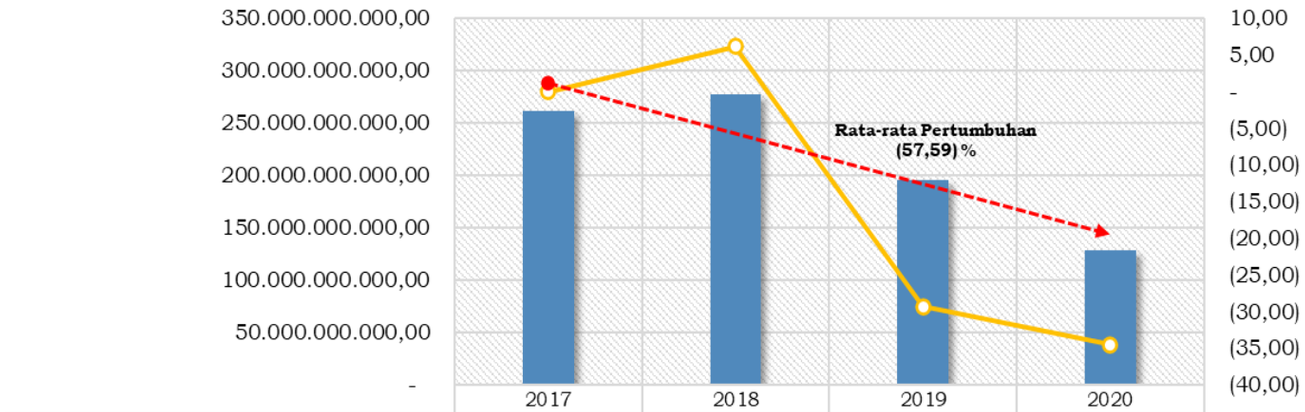
Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

A.3.) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam APBD Provinsi Bengkulu dialokasikan untuk belanja bagi hasil pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar (57,59)% dari sebesar Rp.261.415.985.349,82,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.128.609.788.107,07,- pada tahun 2020. Perkembangan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.21.
Perkembangan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	261.415.985.349,82	277.516.027.247,63	196.203.764.258,68	128.609.788.107,07
Pertumbuhan	-	6,16	(29,30)	(34,45)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

A.4.) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik

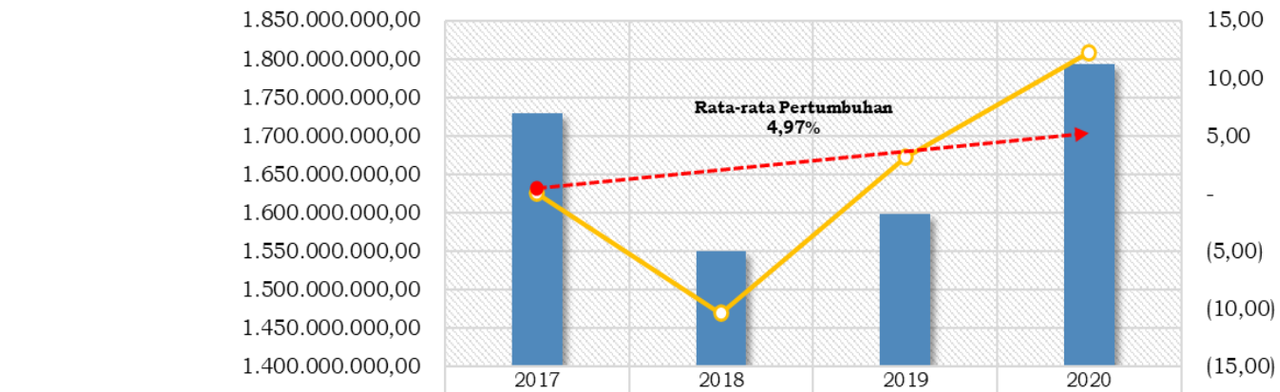
Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik dalam APBD Provinsi Bengkulu dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaiaman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Belanja Bantuan

Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 4,97% dari sebesar Rp.1.729.355.616,00,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.1.793.682.448,00,- pada tahun 2020. Perkembangan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.22.
Perkembangan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik Provinsi Bengkulu	1.729.355.616,00	1.549.873.648,00	1.598.555.852,00	1.793.682.448,00
Pertumbuhan	-	(10,38)	3,14	12,21

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

A.4.) Belanja Tidak Terduga

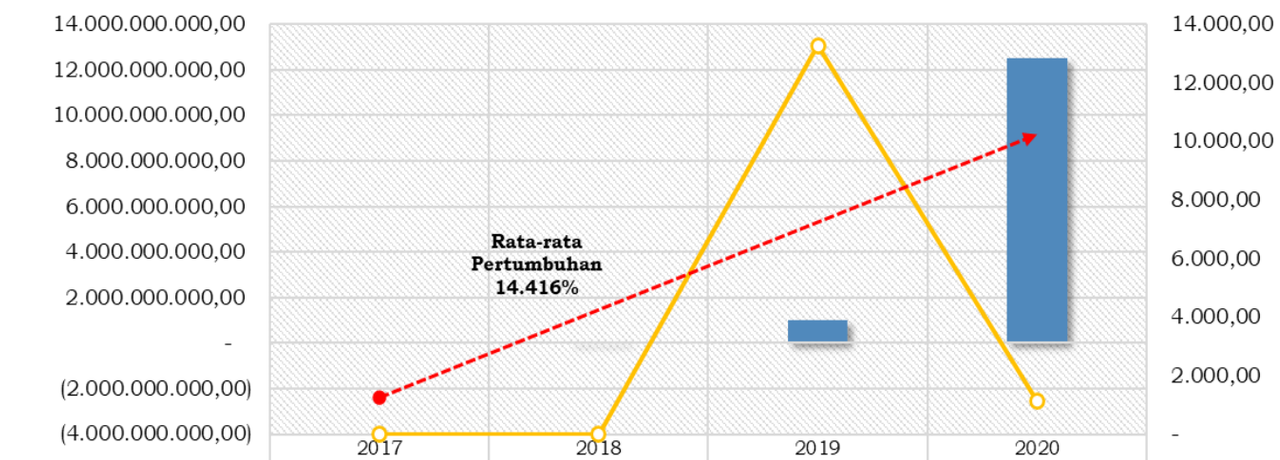
Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak meliputi: kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Bengkulu menunjukan tren meningkat cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14.416% dari sebesar Rp.7.513.100,00,- pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.12.515.896.300,00,- pada tahun 2020. Pada tahun 2020, Belanja Tidak Terduga meningkat sebesar 1.145% dari tahun 2019 dikarenakan kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19.Perkembangan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2019 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.23.
Perkembangan Belanja Tidak Terduga
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Belanja Tidak Terduga	-	7.513.100,00	1.004.530.000,00	12.515.896.300,00
Pertumbuhan	-	-	13.270,38	1.145,95

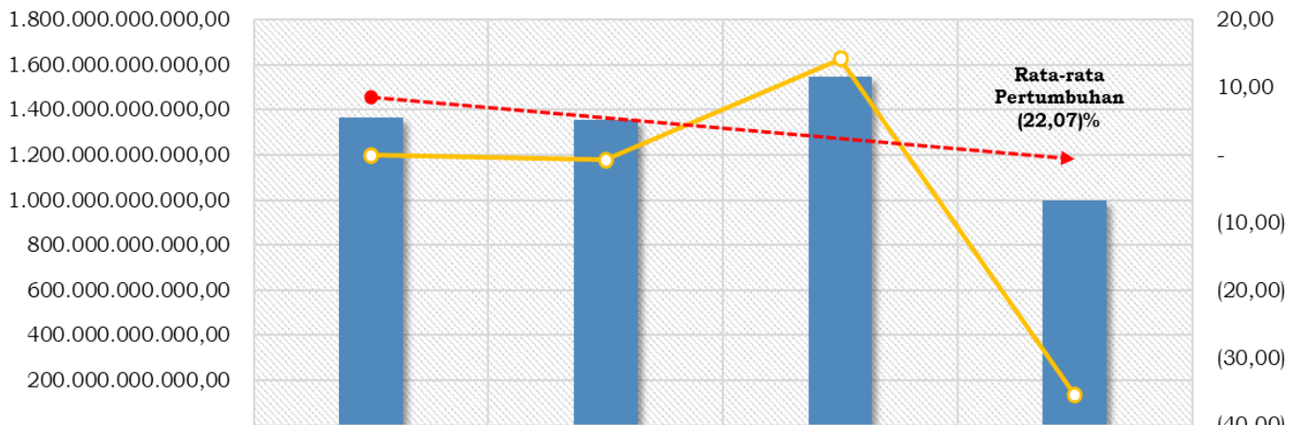
Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

B. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:. belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2019 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, Belanja Langsung Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 22,07% dari sebesar Rp.1.366.961.042.184,14,- pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.998.877.304.899,80,- pada tahun 2020. Penurunan terbesar dalam kelompok Belanja Langsung adalah pada jenis belanja Pegawai. Perkembangan Belanja Langsung Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.24.
Perkembangan Belanja Langsung Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

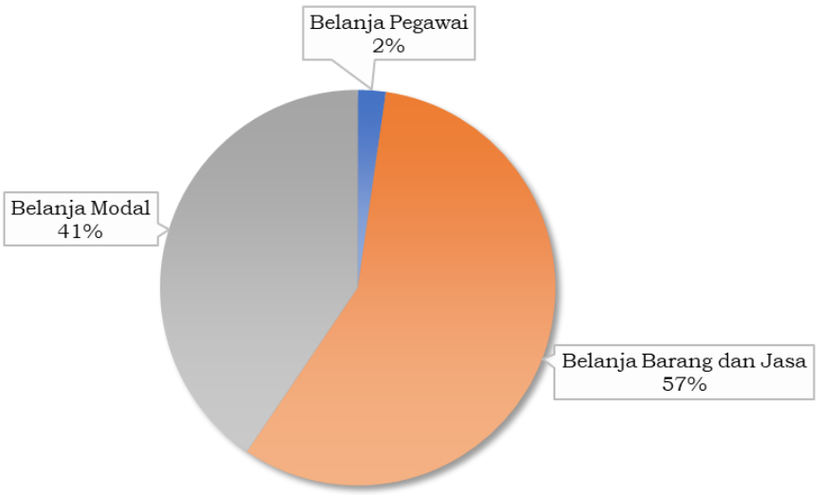


	2017	2018	2019	2020
Belanja Langsung	1.366.961.042.184,1	1.357.167.172.645,6	1.549.903.006.927,7	998.877.304.899,80
Pertumbuhan	-	(0,72)	14,20	(35,55)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2019 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

Jika kita melihat pada realisasi Belanja Langsung berdasarkan data, jenis Belanja Langsung Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2017-2020 didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa sebesar 57%, Belanja Modal sebesar 41% dan Belanja Pegawai sebesar 2%. Belanja Modal dalam APBD Provinsi Bengkulu telah memenuhi ketentuan alokasi belanja modal minimal 30% dari APBD.

Gambar 3.25.
Rata-rata Struktur Belanja Tidak Langsung Provinsi Bengkulu
Tahun 2017-2020

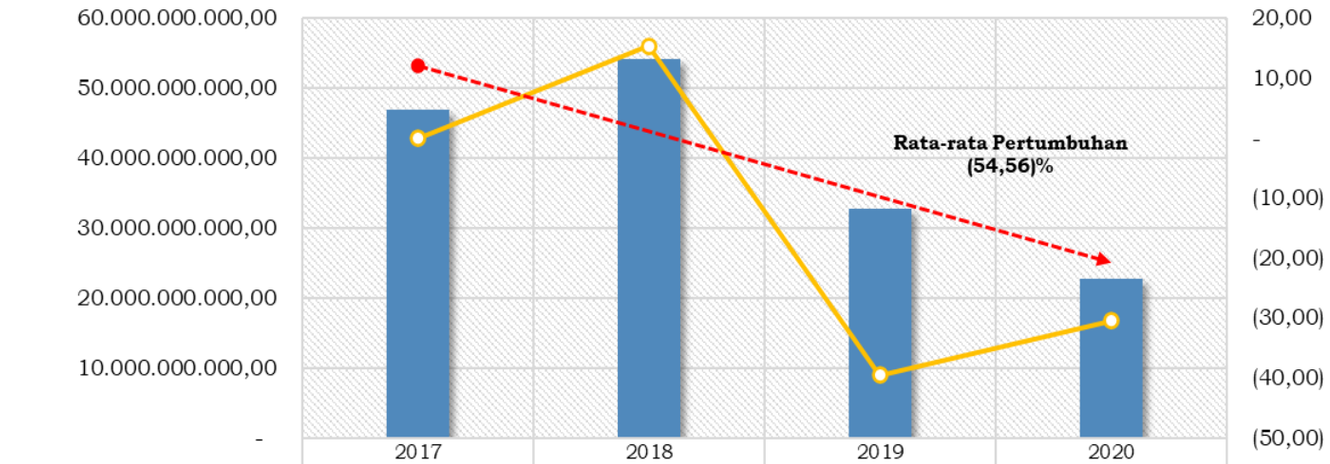


Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

B.1.) Belanja Pegawai dalam Kelompok Belanja Langsung

Belanja pegawai dialokasikan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2019 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, realisasi Belanja Pegawai Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar (54,56)% dari sebesar Rp.46.917.767.483,88,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.22.780.352.559,00,- pada tahun 2020. Perkembangan Belanja Pegawai dalam Kelompok Belanja Langsung Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.26.
Perkembangan Belanja Pegawai dalam Kelompok Belanja Langsung Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Belanja Barang dan Jasa	46.917.767.483,88	54.137.899.879,00	32.741.001.291,00	22.780.352.559,00
Pertumbuhan	-	15,39	(39,52)	(30,42)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

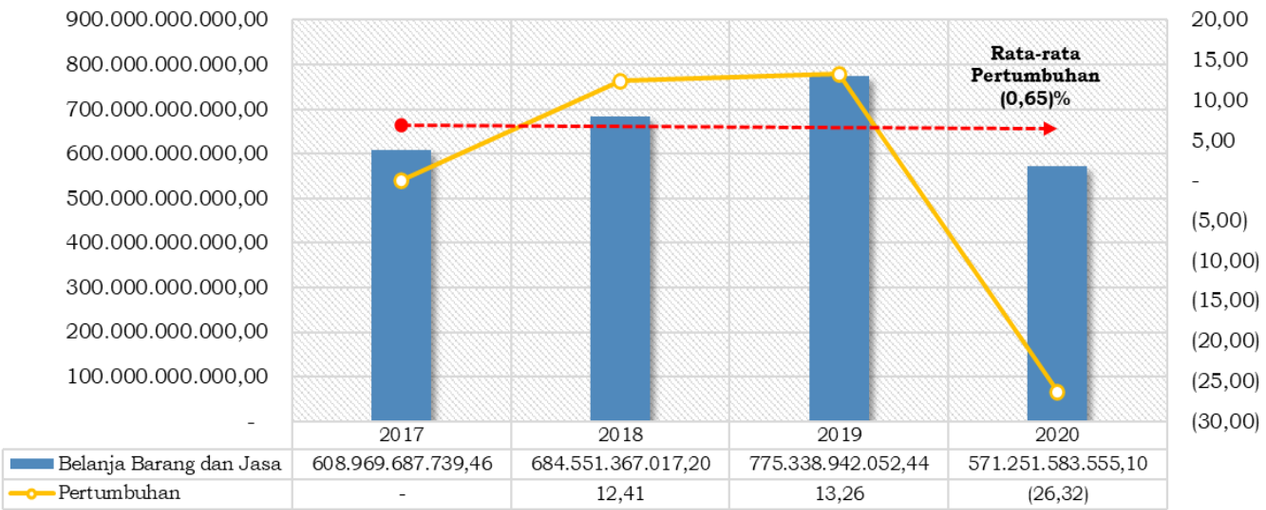
B.2.) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Yang dimaksud dengan Belanja Barang Dan Jasa antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, realisasi Belanja Barang

dan Jasa Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,65% dari sebesar Rp.608.969.687.739,46,- pada tahun 2017 menurun menjadi Rp.571.251.583.555,10,- pada tahun 2020. Perkembangan Belanja Barang dan Jasa Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.27.
Perkembangan Belanja Barang dan Jasa
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Belanja Barang dan Jasa	608.969.687.739,46	684.551.367.017,20	775.338.942.052,44	571.251.583.555,10
Pertumbuhan	-	12,41	13,26	(26,32)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

B.3.) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset.

Belanja modal meliputi:

a) belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

b) belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

c) belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

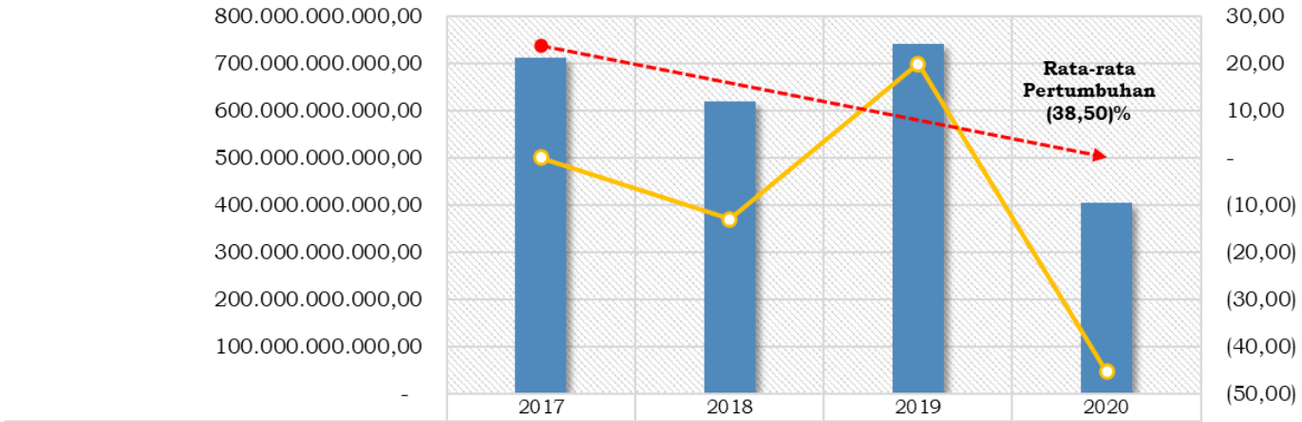
d) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

e) belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

f) belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, realisasi Belanja Modal Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar (38,50)% dari sebesar Rp.711.073.586.960,80,- pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.404.845.368.785,70,- pada tahun 2020. Perkembangan Belanja Modal Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.28.
Perkembangan Belanja Modal Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020



	2017	2018	2019	2020
Belanja Pegawai dalam Kelompok Belanja Langsung	711.073.586.960,80	618.477.905.749,40	741.823.063.584,34	404.845.368.785,70
Pertumbuhan	-	(13,02)	19,94	(45,43)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

3.1.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

a) Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Pencaiaran Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

b) Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Berdasarkan hasil LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, realisasi Pembiayaan Netto Provinsi Bengkulu menunjukan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar (96,60)% dari sebesar Rp.413.723.668.426,21,- pada tahun 2017 menurun menjadi

Rp.14.072.636.817,45,- pada tahun 2020. Penerimaan Pembiayaan Provinsi Bengkulu diperoleh dari SILPA, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD yaitu PT. Bank Bengkulu, PT. Sarana Mandiri Mukti, PT. Bengkulu Mandiri, PT. Askrida dan PT. Bimex.

Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, namun besarnya SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami penurunan rata-rata sebesar (93,37)%. Penurunan SiLPA ini menunjukan bahwa efektivitas belanja daerah semakin baik. Beberapa komponen pembiayaan lain masih cukup rendah meskipun cukup potensial yaitu penyertaan modal investasi. Dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu melebihi dari pengeluaran pembiayaan. Pada pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal, hal ini untuk memperkuat kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Bengkulu dan meningkatkan kemampuan operasional beberapa perusahaan daerah. Pada beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan cukup signifikan pada penyertaan modal tersebut sebagai pengeluaran pembiayaan. Perkembangan Pembiayaan Provinsi Bengkulu kurun waktu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	(n-4) 2017	(n-3) 2018	(n-2) 2019	(n-1) 2020	Rata-rata
		Rp	Rp	Rp	Rp	(%)
2 . 2 . 5	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**438.813.668.426,21**	**351.088.168.926,52**	**213.318.214.221,04**	**29.072.636.817,45**	**(93,37)**
2 . 3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	438.813.668.426,21	351.088.168.926,52	213.318.214.221,04	29.072.636.817,45	**(93,37)**
2 . 3 . 1	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2 . 4	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**25.090.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000.000,00**	**(40,22)**
2 . 4 . 1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.090.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	**(40,22)**
2 . 4 . 1 . 1	Pembayaran hutang pada pihak ke tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	413.723.668.426,21	341.088.168.926,52	213.318.214.221,04	14.072.636.817,45	**(96,60)**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

3.1.2. Neraca Daerah

Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

NO	Uraian	(n-4) 2017	(n-3) 2018	(n-2) 2019	(n-1) 2020	Rata-rata
		Rp	Rp	Rp	Rp	(%)
1	**ASET**					
1.1	**ASET LANCAR**					
1.1.1	Kas di Kas Daerah	345.355.875.691,370	208.648.909.338,860	7.479.752.415,480	97.751.750.922,450	(2.662,688)
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	466.218.608,000	1.667.938.461,000	1.259.525.621,000	138.829.753,000	(767,622)
1.1.4	Kas di BLUD	3.665.346.903,150	2.181.707.883,180	516.414.354,970	1.078.245.672,040	(338,370)
1.1.5	Kas di Bendahara FKTP	-		-	-	
1.1.6	Kas di Bendahara BOS	-		19.816.944.426,000	3.573.768.706,000	
1.1.7	Kas Lainnya	1.600.727.724,000	819.658.538,000	-	-	
1.1.8	Setara Kas	-	-	-	-	
1.1.9	Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	
1.1.10	Piutang Pendapatan	34.668.894.135,550	60.263.032.373,000	30.704.481.049,000	12.752.591.404,000	(194,568)
1.1.11	Piutang Lainnya	39.734.321.062,230	59.915.948.825,230	54.426.608.305,230	35.521.817.767,730	(29,623)
1.1.12	Penyisihan Piutang	(3.797.580.291,230)	(4.180.416.316,230)	(4.213.916.316,230)	(4.247.396.316,230)	10,741
1.1.13	Beban Dibayar Dimuka	81.197.916,670	81.541.666,670	87.458.333,330	77.375.000,000	(5,845)
1.1.14	Persediaan	57.951.413.294,270	25.911.395.951,870	64.136.316.053,010	29.262.413.759,870	(183,229)
	JUMLAH ASET LANCAR	**479.726.415.044,010**	**355.309.716.721,580**	**174.213.584.241,790**	**175.909.396.668,860**	**(138,003)**

NO	Uraian	(n-4) 2017	(n-3) 2018	(n-2) 2019	(n-1) 2020	Rata-rata
		Rp	Rp	Rp	Rp	(%)
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**					
1.2.1	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**					
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	
1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	
1.2.1.4	Dana Bergulir	642.509.386,000	642.509.386,000	642.509.386,000	642.509.386,000	-
1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	
1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	
1.2.1.7	Penyisihan Dana Bergulir	(642.509.386,000)	(642.509.386,000)	(642.509.386,000)	(642.509.386,000)	-
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.2.2	**Investasi Jangka Panjang Permanen**					
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	344.256.302.659,570	356.270.414.683,350	372.285.989.815,970	481.364.361.112,990	30,334
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	**344.256.302.659,570**	**356.270.414.683,350**	**372.285.989.815,970**	**481.364.361.112,990**	30,334
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**344.256.302.659,570**	**356.270.414.683,350**	**372.285.989.815,970**	**481.364.361.112,990**	**30,334**

NO	Uraian	(n-4) 2017	(n-3) 2018	(n-2) 2019	(n-1) 2020	Rata-rata
		Rp	Rp	Rp	Rp	(%)
1.3	**ASET TETAP**					
1.3.1	Tanah	593.453.967.854,300	844.525.272.492,300	852.433.221.858,390	853.343.921.858,390	30,764
1.3.2	Peralatan dan Mesin	845.534.811.390,560	1.008.180.805.833,050	1.131.105.429.248,900	1.267.725.009.946,900	37,777
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.208.958.407.563,230	1.401.131.230.972,450	1.545.748.147.008,760	1.612.233.580.135,750	27,195
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.029.063.482.075,060	2.456.828.198.063,000	2.885.509.865.539,840	2.911.978.654.695,540	33,177
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	137.739.805.987,070	187.631.605.495,790	210.393.711.046,790	237.406.942.559,790	48,788
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	161.649.137.100,610	30.990.369.686,443	46.297.466.561,713	44.661.258.068,713	(392,212)
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(922.317.261.321,960)	(1.078.014.879.148,350)	(1.281.858.185.302,560)	(1.523.554.562.767,150)	46,209
	JUMLAH ASET TETAP	**4.054.082.350.648,870**	**4.851.272.603.394,680**	**5.389.629.655.961,830**	**5.403.794.804.497,930**	**26,683**
1.4	**DANA CADANGAN**					
1.4.1	Dana Cadangan	-	-	-	-	
	JUMLAH DANA CADANGAN	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.5	**ASET LAINNYA**					
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	935.033.946,000	830.106.546,000	639.683.946,000	512.281.846,000	(67,278)
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.420.432.000,000	-	-	-	
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	3.638.582.520,000	2.404.159.550,000	1.530.819.500,000	696.215.250,000	(228,273)
1.5.4	Aset Lain-lain	122.247.445.404,000	122.246.870.404,000	225.346.869.629,000	257.064.106.129,000	58,089

NO	Uraian	(n-4) 2017	(n-3) 2018	(n-2) 2019	(n-1) 2020	Rata-rata
		Rp	Rp	Rp	Rp	(%)
1.5.5	Aset Non Lancar	41.602.480.715,450	46.423.542.415,820	55.400.752.694,420	63.872.275.142,070	39,852
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	(158.495.895.943,330)	(162.209.690.617,460)	
	JUMLAH ASET LAINNYA	**169.843.974.585,450**	**171.904.678.915,820**	**124.422.229.826,090**	**159.935.187.749,610**	**(14,759)**
	JUMLAH ASET	**5.047.909.042.937,900**	**5.734.757.413.715,430**	**6.060.551.459.845,680**	**6.221.003.750.029,390**	**19,932**
2	**KEWAJIBAN**					
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**					
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	
2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	510.416,670	11.343.750,000	6.760.416,670	1.343.750,000	(375,397)
2.1.5	Utang Beban	3.363.434.101,000	980.504.329,000	10.381.188.393,000	21.107.767.782,000	(101,658)
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	115.893.324.336,630	158.669.609.180,670	252.450.937.868,080	384.790.785.367,020	98,500
2.1.7	Utang Pada Pihak ke Tiga	27.544.782.516,980	132.462.557.800,554	170.177.249.974,790	2.655.576.279,890	(6.206,931)
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**146.802.051.371,280**	**292.124.015.060,224**	**433.016.136.652,540**	**408.555.473.178,910**	**76,297**
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**					
2.2.1	Utang Dalam Negeri	645.467.100,000	456.549.900,000	267.632.700,000	78.715.500,000	(351,968)

NO	Uraian	(n-4) 2017	(n-3) 2018	(n-2) 2019	(n-1) 2020	Rata-rata
		Rp	Rp	Rp	Rp	(%)
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**645.467.100,000**	**456.549.900,000**	**267.632.700,000**	**78.715.500,000**	**(351,968)**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**147.447.518.471,280**	**292.580.564.960,224**	**433.283.769.352,540**	**408.634.188.678,910**	76,046
3	**EKUITAS**					
3.1	EKUITAS	4.900.461.524.466,620	5.442.176.848.755,210	5.627.267.690.493,140	5.812.369.561.350,480	16,428
	JUMLAH EKUITAS	**4.900.461.524.466,620**	**5.442.176.848.755,210**	**5.627.267.690.493,140**	**5.812.369.561.350,480**	**16,428**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**5.047.909.042.937,900**	**5.734.757.413.715,430**	**6.060.551.459.845,680**	**6.221.003.750.029,390**	**19,932**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

*Penjelasan : untuk menyajikan data yang valid dan konsisten, data yang disajikan adalah data realisasi APBD yang telah diaudit oleh BPK berdasarkan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020 sampai dengan tahun anggaran 2020 yang telah *audited.*

Perkembangan jumlah aset Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017-2020, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,9% dari sebesar Rp.5.047.909.042.937,90 meningkat menjadi sebesar Rp.6.221.003.750.029,39 pada tahun 2020. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya) semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Selama kurun waktu tahun 2017-2020:

a) Aset Lancar mengalami penurunan dengan penurunan sebesar 138% dengan nilai aset tahun 2020 sebesar Rp.175.909.396.668,860;
b) Investasi Jangka Panjang mengalami peningkatan dengan peningkatan sebesar 30,33% dengan nilai tahun 2020 sebesar Rp.481.364.361.112,990;
c) Aset tetap meningkat dengan peningkatan sebesar 26,68% dengan nilai tahun 2020 sebesar Rp.5.403.794.804.497,930; dan
d) Aset Lainnya menurun dengan penurunan sebesar 14,76% dengan nilai tahun 2020 sebesar Rp.159.935.187.749,610.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Perkembangan jumlah Kewajiban Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017-2020, dengan pertumbuhan sebesar 76,05% dari sebesar Rp.147.447.518.471,28 meningkat menjadi sebesar Rp.408.634.188.678,910 pada tahun 2020. Selama kurun waktu tahun 2017-2020:

a) Kewajiban Jangka Pendek mengalami peningkatan sebesar 76,30% dengan nilai kewajiban tahun 2020 sebesar Rp. 408.555.473.178,910;

b) Kewajiban Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar (351,97)% dengan nilai kewajiban jangka panjang sebesar Rp.78.715.500,000;

3.1.2.1. Analisis Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Adapun rasio neraca daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut:

A. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Fungsi dan tujuan rasio likuiditas adalah memberikan ukuran likuiditas yang cepat dan mudah digunakan. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah adalah Rasio Lancar dan Rasio *Quick*. Rasio lancar menunjukkan sampai sejauh mana kewajiban lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. Sedangkan Rasio *Quick* merupakan suatu rasio yang mengukur "kecepatan" kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban hutang.

Tabel 3.5.
Rata-rata Pertumbuhan Rasio Likuiditas Neraca Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

No	Jenis Rasio Likuiditas	Tahun				Rata-rata pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	
1	Rasio Lancar	3,268	1,216	0,402	0,431	(40,89)
2	Rasio Quick	2,873	1,128	0,254	0,359	(32,337)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

Rasio likuiditas neraca daerah Provinsi Bengkulu menunjukan hasil yang kurang baik karena terus mengalami penurunan. Rasio Lancar menurun dengan rata-rata 40,89% dan Rasio *Quick* menurun dengan rata-rata 32,37%. Nilai rasio tersebut juga berada dibawah angka 1, sehingga dengan kondisi ini akan muncul potensi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain: *(1)* Rasio total hutang terhadap total aset yaitu perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Sehingga rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. rasio ini memperlihatkan proposi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. *(2)* dan Rasio hutang terhadap modal yang merupakan satu ukuran perbandingan antara total hutang pemerintah daerah dibanding dengan modal. *Debt to equity ratio* menunjukkan seberapa besar tingkat hutang pemerintah daerah terhadap modalnya. Semakin besar nilai *debt to equity ratio*, maka dapat diartikan bahwa sumber keuangan pemerintah daerah akan semakin besar dibiayai oleh pemberi hutang, bukan oleh sumber keuangannya sendiri.

Tabel 3.6.
Rata-rata Pertumbuhan Rasio Solvabilitas Neraca Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

No	Jenis Rasio Solvabilitas	Tahun				Rata-rata pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	
1	Rasio total hutang terhadap total aset	0,029	0,051	0,076	0,066	36,737
2	Rasio hutang terhadap modal	0,030	0,054	0,077	0,070	37,735

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

Rasio Solvabilitas neraca daerah Provinsi Bengkulu menunjukan hasil yang terus meningkat. Rasio total hutang terhadap total aset meningkat dengan rata-rata 36,73% dan Rasio Hutang Terhadap Modal juga terus meningkat dengan rata-rata 37,75%. Dengan terus meningkatnya rasio solvabilitas, maka dapat diketahui bahwa peranan hutang terhadap perkembangan aset dan modal memiliki peran yang cukup berpengaruh.

3.1.2.2. Analisa Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan.

A. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian enggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Jika kita melihat data rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Bengkulu, kurun waktu tahun 2017-2020 mengalami penurunan sebesar 3,51%. Berdasarkan data, peranan PAD dalam Pendapatan Daerah masih berkisar sebesar 25% (Rendah) yang berarti PAD belum signifikan dalam peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dan masih memiliki pola hubungan konsultatif (mana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi).

Tabel 3.7.
Rata-rata Pertumbuhan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2019

No	Rasio	Tahun				Rata-rata pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	
1	Kemandirian Keuangan Daerah (%)	28,688	30,586	28,175	25,560	(3,516)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

B. Rasio Efektivias dan Efesiensi

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sedangkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfesiensikan biaya yang dikerluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan data pada tabel berikut, diketahui :

1. Efektifitas keuangan daerah Provinsi Bengkulu secara rata-rata meningkat sebesar 2,30% pada tahun 2017-2020. Selain itu, nilai rasio berkisar dari 92%-98%, masih berada dibawah 100%. Hal ini berarti belum efektif karena anggaran pendapatan masih lebih besar dari realisasi pendapatan sehingga berpotensi mengakibatkan defisit anggaran pendapatan;
2. Efesiensi keuangan daerah Provinsi Bengkulu secara rata-rata masih berada diatas nilai 100%, dan menurun pada kurun waktu 2017-2020. Hal ini menggambarkan setiap tahun realiasi belanja daerah lebih kecil dari realisasi pendapatan sehingga mengakibatkan APBD tidak efesien.

Tabel 3.8.
Rata-rata Pertumbuhan Rasio Efektivitas dan Efesiensi Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

No	Rasio	Tahun				Rata-rata pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	
1	Efektivitas Keuangan Daerah	92,99	94,97	88,81	98,81	2,30
2	Efesiensi Keuangan Daerah	102,23	104,48	106,28	96,83	(1,66)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

C. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengatahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Tabel 3.9.
Rata-rata Pertumbuhan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

No	Rasio	Tahun				Rata-rata pertumbuhan
		2017	2018	2019	2020	
1	Pertumbuhan Keuangan Daerah	-	1,68	2,88	(5,01)	(67,51)

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan peneriman pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

A. Kebijakan Pendapatan Tahun 2016-2020

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pendapatan Daerah kurun waktu tahun 2016-2020, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, antara lain:

1. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap Pajak Daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dibidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil atau pemungut PAD, Kabupaten/Kota dan Aparat Penegakan Hukum dalam rangka melakukan Penindakan terhadap penunggak pajak;
3. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah, dilakukan dengan peningkatan SDM, penempatan SDM yang profesional serta melakukan audit kinerja BUMD dengan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik.
4. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Badan Layanan Umum dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan;
5. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
6. Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
7. Meningkatkan kapasitas SDM pemungut Pajak, serta menyediakan sarana dan prasarana pemungut pajak yang memadai.
8. Melakukan inovasi dalam pemungutan pajak daerah.
9. Melakukan kerjasama dengan pihak BPH Migas terkait volume BBM yang masuk ke Provinsi Bengkulu terhadap pendapatan PBB KB.
10. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
11. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
12. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
13. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
14. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai upaya peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Transfer;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, salah satunya untuk pengusulan dana DAK melalui aplikasi KRISNA DAK; dan
4. Meningkatkan kinerja bidang pengelolaan keuangan daerah di berbagai sektor dengan sasaran untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID);

B. Kebijakan Belanja Tahun 2016-2020

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja Daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah, di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Selain itu belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, kebijakan belanja daerah APBD Provinsi Bengkulu diutamakan untuk :

1. Memprioritaskan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan pilihan;
2. Memprioritaskan pemenuhan rencana pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021;
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024;
4. Pendukungan terhadap pencapian *Sustainable Development Goals* (SDG's);
5. Mendukung pencapaian SPM sesuai PP Nomor 2 Tahun 2018;
6. Pemenuhan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Belanja Daerah;
7. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD diluar gaji;
8. Belanja Pegawai diarahkan untuk pembayaran gaji, tunjangan, TPP, uang makan ASN dan pembayaran TPG Guru;
9. Belanja Hibah diarahkan untuk pemenuhan Hibah BOS, Hibah wajib kepada organisasi yang sudah diatur oleh peraturan perundang – undangan dan hibah kepada organisasi, yayasan dan rumah ibadah dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
10. Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota;
11. Belanja Tidak Terduga diarahkan keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, termasuk pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta sebagai mitigasi terhadap resiko dan sensitivitas makrofiskal;
12. Pengalokasian Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan desa, hibah, Bansos dan subsidi sebagai implementasi kebijakan perimbangan keuangan antara provinsi dan kabupaten/kota;
13. Pengalokasian Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Belanja Opersional Sekolah (BOS) Pusat, Pajak Rokok sesuai dengan peruntukan yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

14. Mengalokasikan anggaran untuk kepentingan nasional serta kebutuhan penting dan mendesak lainnya.

C. Kebijakan Pembiayaan Tahun 2016-2020

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Alternatif fiskal yang diambil untuk pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Provinsi Bengkulu pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

3.2.1.1. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisis proprosi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dilakukan untuk mengetahui seberapa besar beban APBD untuk membiayai kebutuhan aparaturnya. Sehingga, berdasarkan hasil analisis,

dalam periode kedepan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat mengambil kebijakan pembelanjaan APBD khusus untuk sektor kebutuhan aparatur. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Bengkulu ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) Rp	Prosentase
1	Tahun Anggaran 2017	1.005.634.754.189,88	2.892.303.326.855,96	34,77
2	Tahun Anggaran 2018	1.072.550.768.140,00	2.989.578.236.902,23	35,88
3	Tahun Anggaran 2019	1.060.356.428.050,00	3.118.303.518.797,46	34,00
4	Tahun Anggaran 2020	1.066.821.278.776,00	2.713.458.077.971,87	39,32

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah tahun 2021.

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah meningkat dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2017, kebutuhan belanja untuk aparatur mencapai 34,77% dari total pengeluaran daerah, kemudian meningkat menjadi 39,32% pada tahun 2020. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

3.2.1.2. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Provinsi Bengkulu.

Tabel 3.11.
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2018

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.722.974.154.221,39**	**1.500.252.284.671,82**	**87,07**	**1.712.313.794.692,76**	**1.622.411.064.256,63**	**94,75**
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	**1.055.380.120.301,00**	**958.716.986.706,00**	**90,84**	**1.078.499.807.371,76**	**1.018.412.868.261,00**	**94,43**
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	728.589.479.393,00	695.373.092.068,00	95,44	829.676.034.951,00	814.193.953.062,00	98,13
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	311.652.975.000,00	257.408.047.431,00	82,59	231.124.229.245,76	192.739.496.879,00	83,39
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.250.000.000,00	1.062.503.400,00	85,00	1.250.000.000,00	875.002.800,00	70,00
5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	579.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	13.308.478.908,00	4.873.343.807,00	36,62	16.449.543.175,00	10.604.415.520,00	64,47
5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	**290.620.319.000,00**	**278.389.957.000,00**	**95,79**	**347.552.571.000,00**	**324.924.782.000,00**	**93,49**
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	7.664.587.000,00	6.580.517.000,00	85,86	64.499.371.000,00	56.644.062.000,00	87,82
5 . 1 . 4 . 07	Belanja Hibah Dana BOS	282.955.732.000,00	271.809.440.000,00	96,06	283.053.200.000,00	268.280.720.000,00	94,78
5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	**332.667.642.483,46**	**261.415.985.349,82**	**78,58**	**277.627.965.321,00**	**277.516.027.247,63**	**99,96**
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	332.667.642.483,46	261.415.985.349,82	78,58	277.627.965.321,00	277.516.027.247,63	99,96

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 1 . 7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik**	**37.293.451.000,00**	**1.729.355.616,00**	**4,64**	**3.633.451.000,00**	**1.549.873.648,00**	**42,66**
5 . 1 . 7 . 02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	15.000.000.000,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00
5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	20.260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	2.033.451.000,00	1.729.355.616,00	85,05	2.033.451.000,00	1.549.873.648,00	76,22
5 . 1 . 8	**Belanja Tidak Terduga**	**7.012.621.436,93**	**0,00**	**0,00**	**5.000.000.000,00**	**7.513.100,00**	**0,15**
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	7.012.621.436,93	0,00	0,00	5.000.000.000,00	7.513.100,00	0,15
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**1.706.698.363.787,50**	**1.366.961.042.184,14**	**80,09**	**1.631.557.570.331,76**	**1.357.167.172.645,60**	**83,18**
5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	**58.735.934.075,00**	**46.917.767.483,88**	**79,88**	**61.967.123.292,00**	**54.137.899.879,00**	**87,37**
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.866.856.500,00	22.893.172.750,00	79,31	31.507.944.740,00	27.172.604.000,00	86,24
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.384.426.075,00	20.552.760.700,00	84,29	24.655.178.552,00	21.815.980.000,00	88,48
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	62.650.000,00	0,00	0,00	364.000.000,00	364.000.000,00	100,00
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	5.422.001.500,00	3.471.834.033,88	64,03	5.440.000.000,00	4.785.315.879,00	87,97
5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	**718.691.063.458,00**	**608.969.687.739,46**	**84,73**	**812.016.969.430,49**	**684.551.367.017,20**	**84,30**
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.796.152.641,00	24.470.115.984,00	91,32	14.426.281.145,00	13.134.373.749,00	91,04
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	65.886.226.964,00	56.086.025.612,00	85,13	65.029.790.769,00	60.503.318.319,00	93,04
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	124.497.547.100,00	98.614.573.427,00	79,21	118.387.530.780,00	100.125.572.055,00	84,57
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Iuran Asuransi	3.466.360.000,00	3.092.630.767,00	89,22	1.284.693.656,00	241.488.295,00	18,80
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.632.925.600,00	10.878.994.832,00	79,80	13.225.838.426,00	10.991.317.993,00	83,10
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.244.361.190,00	20.009.461.729,00	79,26	15.295.498.853,00	13.419.678.900,00	87,74
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.748.177.000,00	5.154.806.100,00	76,39	6.403.530.630,00	5.374.002.916,00	83,92
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.796.830.000,00	7.102.380.015,00	91,09	7.132.534.000,00	6.461.748.000,00	90,60
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	100,00
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.263.720.000,00	2.650.307.000,00	81,21	4.528.303.000,00	4.020.883.500,00	88,79
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.587.125.997,00	41.617.200.087,00	85,65	43.174.252.510,00	37.120.602.941,00	85,98
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	937.345.000,00	880.455.000,00	93,93	2.215.050.000,00	1.912.109.500,00	86,32

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	347.275.000,00	297.530.000,00	85,68	724.095.000,00	639.645.000,00	88,34
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.699.110.000,00	3.238.299.900,00	87,54	9.451.717.442,00	6.631.166.185,00	70,16
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.264.162.773,00	128.983.697.850,00	86,41	168.772.487.289,00	152.228.278.452,00	90,20
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	92.000.000,00	74.020.000,00	80,46	90.000.000,00	74.020.000,00	82,24
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	14.243.702.450,00	11.932.271.638,00	83,77	13.370.368.700,00	10.657.163.886,00	79,71
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Pemulangan Pegawai	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.764.846.850,00	33.587.116.852,89	88,94	28.656.251.000,00	23.226.048.145,92	81,05
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	37.311.362.006,00	29.124.083.050,00	78,06	26.882.255.183,00	11.017.982.520,62	40,99
5 . 2 . 2 . 22	Bekaja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	69.779.290.350,00	69.779.212.350,00	100,00
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.550.000.000,00	978.673.880,00	38,38	55.107.147.434,34	26.031.190.335,69	47,24
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	992.000.000,00	99,20
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa	138.103.083.387,00	122.541.139.515,57	88,73	137.886.030.063,15	121.382.146.776,97	88,03
5 . 2 . 2 . 27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	5.846.510.000,00	5.095.415.000,00	87,15	5.220.245.000,00	4.830.638.997,00	92,54
5 . 2 . 2 . 28	Biaya Penanganan Perkara	22.450.000,00	14.200.000,00	63,25	48.000.000,00	6.500.000,00	13,54

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Operasional Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Seleksi	519.000.000,00	517.500.000,00	99,71	294.000.000,00	160.500.000,00	54,59
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Honorarium Tim Teknis BOS	2.028.789.500,00	2.028.789.500,00	100,00	2.064.778.200,00	2.064.778.200,00	100,00
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	**929.271.366.254,50**	**711.073.586.960,80**	**76,52**	**757.573.477.609,27**	**618.477.905.749,40**	**81,64**
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	264.333.763,20	97,90
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	848.959.107,07	325.350.638,00	38,32
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	9.187.000.000,00	4.787.035.540,00	52,11	1.550.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	240.000.000,00	239.707.500,00	99,88	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1.520.715.000,00	1.329.026.570,00	87,39	18.800.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	15.038.085.000,00	13.729.735.916,00	91,30	20.127.530.000,00	19.268.866.500,00	95,73
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	327.900.000,00	323.372.500,00	98,62	101.500.000,00	100.530.000,00	99,04

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	167.534.000,00	0,00	0,00	3.010.769.500,00	2.753.300.000,00	91,45
5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	149.457.000,00	99,64
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	73.065.000,00	12.571.000,00	17,21	1.500.000,00	1.450.000,00	96,67
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	393.825.000,00	360.695.500,00	91,59	598.930.000,00	170.987.345,00	28,55
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	253.120.000,00	237.005.000,00	93,63	690.380.000,00	687.407.000,00	99,57
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	546.675.000,00	540.074.000,00	98,79	3.578.150.000,00	2.605.856.976,00	72,83
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.932.848.450,00	6.382.055.178,00	92,06	6.899.760.450,00	6.746.808.388,00	97,78
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.058.346.700,00	22.459.741.697,00	89,63	24.254.287.499,00	22.368.024.942,00	92,22
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.269.247.410,00	17.896.384.932,00	92,88	42.068.270.300,00	40.999.647.967,00	97,46
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.380.372.000,00	858.838.850,00	62,22	680.690.000,00	655.798.600,00	96,34
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	967.232.500,00	912.766.060,00	94,37	739.715.000,00	685.850.344,00	92,72

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	383.473.000,00	367.056.900,00	95,72	344.540.000,00	261.765.525,00	75,98
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	94.453.875.000,00	92.440.960.768,00	97,87	14.462.100.000,00	13.319.166.000,00	92,10
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	25.000.000,00	24.800.000,00	99,20	46.250.000,00	46.145.450,00	99,77
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	17.377.806.000,00	16.807.248.000,00	96,72	13.888.640.000,00	13.645.440.000,00	98,25
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	28.031.000.000,00	7.488.987.000,00	26,72	49.462.195.000,00	48.980.614.134,00	99,03
5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00	0,00	0,00	48.740.000,00	48.000.000,00	98,48
5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	80.500.000,00	78.326.000,00	97,30	20.000.000,00	0,00	-
5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	113.700.000,00	109.977.000,00	96,73	5.883.500,00	5.875.980,00	99,87
5 . 2 . 3 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	103.100.000,00	97.900.000,00	94,96	73.000.000,00	72.424.000,00	99,21
5 . 2 . 3 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	22.070.000,00	22.070.000,00	100,00
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.150.530.000,00	958.502.600,00	83,31	390.575.000,00	374.313.960,00	95,84

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.720.758.490,00	61.064.042.919,37	91,52	148.570.769.055,31	132.768.183.113,40	89,36
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	786.882.800,00	775.811.813,62	98,59	7.782.652.012,00	7.684.343.200,23	98,74
5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	1.042.755.000,00	1.024.316.934,00	98,23
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	716.000.000,00	709.376.903,00	99,07
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	4.919.901.800,00	4.272.269.816,95	86,84	3.992.512.200,00	3.286.567.677,00	82,32
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	536.962.975.234,50	384.351.219.593,98	71,58	284.985.584.412,22	209.671.269.824,94	73,57
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	4.430.935.000,00	4.133.494.393,50	93,29	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	28.220.783.000,00	19.186.977.703,36	67,99	15.681.211.055,28	13.215.656.185,33	84,28
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	21.695.483.000,00	14.510.051.266,02	66,88	15.423.615.738,39	9.762.012.277,99	63,29
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	39.792.000,00	39.540.000,00	99,37	844.531.240,00	675.732.000,00	80,01
5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	916.000.000,00	817.773.100,00	89,28

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	50.000.000,00	0,00	0,00	40.140.000,00	37.023.000,00	92,23
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	7.580.438.000,00	6.856.370.734,45	90,45
5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	414.730.000,00	38.011.000,00	9,17
5 . 2 . 3 . 72	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	116.400.000,00	116.295.000,00	99,91	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	2.764.384.870,00	1.475.514.870,00	53,38	945.380.000,00	819.255.802,88	86,66
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	286.770.000,00	285.792.595,00	99,66	330.000.000,00	108.851.000,00	32,99
5 . 2 . 3 . 80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	100,00
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	23.663.429.000,00	23.629.278.200,00	99,86	28.825.174.000,00	28.649.190.500,00	99,39
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	569.100.000,00	560.755.150,00	98,53
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2017			Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	Raga Lainnya						
5 . 2 . 3 . 87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	1.700.000.000,00	149.206.670,00	8,78	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	684.721.000,00	673.613.211,00	98,38	43.301.649.540,00	24.788.176.485,98	57,25
5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	13.153.200.000,00	7.967.710.397,00	60,58	11.200.000.000,00	2.387.556.348,00	21,32
Total Belanja		**3.429.672.518.008,89**	**2.867.213.326.855,96**	**83,60**	**3.343.871.365.024,52**	**2.979.578.236.902,23**	**89,11**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah Bappeda Provinsi Bengkulu tahun 2021.

Tabel 3.12.
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2020

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.720.066.757.718,57**	**1.568.400.511.869,68**	**91,18**	**1.773.794.857.524,06**	**1.699.580.773.072,07**	**95,82**
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	**1.125.233.497.405,31**	**1.027.615.426.759,00**	**91,32**	**1.088.141.436.103,63**	**1.044.040.926.217,00**	**95,95**
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	751.003.304.215,91	721.313.351.735,00	96,05	743.733.233.009,38	715.183.202.088,00	96,16
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	355.729.973.014,40	290.955.014.454,00	81,79	343.158.203.094,25	327.670.223.995,00	95,49
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.250.000.000,00	968.752.101,00	77,50	1.250.000.000,00	1.187.500.134,00	95,00
5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	17.250.220.175,00	14.378.308.469,00	83,35	13.814.792.615,88	12.584.963.629,00	0,00
5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	**358.433.786.000,00**	**341.978.235.000,00**	**95,41**	**539.220.185.400,00**	**512.620.480.000,00**	**95,07**
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	47.700.400.000,00	46.536.275.000,00	97,56	185.360.400.000,00	185.310.400.000,00	99,97
5 . 1 . 4 . 07	Belanja Hibah Dana BOS	310.733.386.000,00	295.441.960.000,00	95,08	353.859.785.400,00	327.310.080.000,00	92,50
5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	**229.399.474.313,26**	**196.203.764.258,68**	**85,53**	**129.103.198.020,43**	**128.609.788.107,07**	**99,62**
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	229.399.474.313,26	196.203.764.258,68	85,53	129.103.198.020,43	128.609.788.107,07	99,62

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 1 . 7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik**	**2.000.000.000,00**	**1.598.555.852,00**	**79,93**	**2.030.000.000,00**	**1.793.682.448,00**	**88,36**
5 . 1 . 7 . 02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	2.000.000.000,00	1.598.555.852,00	79,93	2.030.000.000,00	1.793.682.448,00	88,36
5 . 1 . 8	**Belanja Tidak Terduga**	**5.000.000.000,00**	**1.004.530.000,00**	**20,09**	**15.300.038.000,00**	**12.515.896.300,00**	**81,80**
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	1.004.530.000,00	20,09	15.300.038.000,00	12.515.896.300,00	81,80
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**1.796.475.942.949,00**	**1.549.903.006.927,78**	**86,27**	**1.060.882.978.051,99**	**998.877.304.899,80**	**94,16**
5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	**37.451.908.920,00**	**32.741.001.291,00**	**87,42**	**25.782.935.000,00**	**22.780.352.559,00**	**88,35**
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.002.336.920,00	26.641.231.800,00	88,80	18.290.250.000,00	16.786.509.900,00	91,78
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.820.500.000,00	1.188.425.000,00	65,28	902.000.000,00	898.800.000,00	99,65
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	175.279.000,00	125.122.000,00	71,38	71.637.000,00	24.588.000,00	34,32
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.400.000,00	600.000,00	42,86	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	5.452.393.000,00	4.785.622.491,00	87,77	6.519.048.000,00	5.070.454.659,00	77,78
5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	**865.972.083.766,65**	**775.338.942.052,44**	**89,53**	**606.538.730.459,66**	**571.251.583.555,10**	**94,18**
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.792.540.709,00	13.483.822.708,00	91,15	16.706.637.915,00	16.267.904.474,00	97,37
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	48.973.238.625,00	46.262.247.230,00	94,46	29.429.453.900,00	28.152.302.464,00	95,66
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	157.205.393.332,00	141.829.960.294,80	90,22	157.412.412.035,00	149.077.386.767,00	94,70
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Iuran Asuransi	1.287.744.364,00	311.788.594,00	24,21	12.715.585.950,00	7.112.764.188,00	55,94
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.749.294.700,00	11.945.090.317,00	80,99	10.455.304.549,00	9.394.154.703,00	89,85
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.885.627.125,00	13.865.651.458,00	87,28	8.382.997.901,00	7.614.052.238,00	90,83
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.849.205.000,00	6.622.361.786,00	84,37	1.418.345.000,00	1.030.514.100,00	72,66
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.059.340.000,00	7.804.791.080,00	96,84	384.920.000,00	350.970.000,00	91,18
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	1.178.260.000,00	1.178.260.000,00	100,00	2.703.000.000,00	2.703.000.000,00	100,00
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.574.079.000,00	6.245.404.900,00	95,00	1.136.975.600,00	941.093.100,00	82,77
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.981.195.785,00	41.703.729.471,00	88,77	27.493.832.950,00	25.157.228.818,00	91,50

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.347.550.000,00	1.551.743.100,00	66,10	1.558.840.000,00	1.452.324.000,00	93,17
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	123.800.000,00	123.600.000,00	99,84	77.500.000,00	76.500.000,00	98,71
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.842.902.000,00	6.143.648.350,00	89,78	1.133.008.000,00	1.077.844.150,00	95,13
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	166.858.718.369,00	151.995.187.118,08	91,09	104.643.957.892,00	96.986.146.506,00	92,68
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	79.000.000,00	66.880.000,00	84,66	51.500.000,00	51.500.000,00	100,00
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	12.074.001.000,00	10.642.353.649,00	88,14	4.815.045.000,00	3.849.868.357,00	79,95
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Pemulangan Pegawai	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.988.033.000,00	19.499.200.302,29	81,29	13.296.594.000,00	12.039.285.543,89	90,54
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	46.356.233.782,00	40.598.945.071,16	87,58	8.179.880.145,00	6.359.861.592,68	77,75
5 . 2 . 2 . 22	Bekaja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	59.495.578.075,65	49.498.081.403,71	83,20	12.495.379.372,65	12.275.243.947,60	98,24
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.860.000.000,00	1.860.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa	133.610.785.300,00	133.872.293.588,40	100,20	116.016.270.250,01	97.011.616.885,93	83,62
5 . 2 . 2 . 27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	8.580.860.000,00	8.306.539.840,00	96,80	681.290.000,00	678.646.000,00	99,61

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 2 . 28	Biaya Penanganan Perkara	13.310.000,00	13.000.000,00	97,67	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Operasional Sekolah	79.811.993.600,00	59.563.111.791,00	74,63	75.312.500.000,00	91.555.675.720,00	121,57
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Seleksi	351.400.000,00	351.250.000,00	99,96	37.500.000,00	35.700.000,00	95,20
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Honorarium Tim Teknis BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	**893.051.950.262,35**	**741.823.063.584,34**	**83,07**	**428.561.312.592,33**	**404.845.368.785,70**	**94,47**
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	985.465.500,00	910.700.000,00	92,41
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	17.833.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.619.300.000,00	1.400.000.000,39	86,46	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	442.440.000,00	426.820.000,00	96,47	9.000.000,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	39.096.791.500,00	27.786.800.400,00	71,07	15.966.895.000,00	15.896.585.000,00	99,56

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	970.000.000,00	133.086.800,00	13,72
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	70.490.000,00	69.246.650,00	98,24	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	180.000.000,00	179.300.000,00	99,61	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	348.410.000,00	346.009.400,00	99,31	30.000.000,00	29.975.000,00	99,92
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	932.595.200,00	838.644.800,00	89,93	85.500.000,00	84.447.000,00	98,77
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	248.357.500,00	247.068.500,00	99,48	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	571.400.000,00	483.314.125,00	84,58	600.000,00	600.000,00	100,00
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.523.985.700,00	8.202.473.573,00	96,23	13.026.837.540,00	13.016.329.240,00	99,92
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.497.608.103,00	27.458.660.540,00	75,23	15.732.410.202,00	15.590.549.325,00	99,10
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	54.453.349.060,00	46.933.742.998,00	86,19	21.931.419.628,00	23.165.383.463,00	105,63
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan	747.233.250,00	718.806.880,00	96,20	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
	Kursi Kerja/Rapat Pejabat						
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	610.111.900,00	550.747.700,00	90,27	138.549.400,00	136.838.300,00	98,76
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	138.666.000,00	96.952.100,00	69,92	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	40.465.230.069,00	35.414.851.046,00	87,52	28.573.843.168,40	27.029.245.586,70	94,59
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	7.326.250.000,00	182.223.940,00	2,49	9.448.041.065,00	9.420.325.875,00	99,71
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	15.543.154.600,00	15.265.456.475,00	98,21	977.610.000,00	933.525.272,00	95,49
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	35.984.266.000,00	35.241.183.006,00	97,93	54.446.862.500,00	54.201.118.888,00	99,55
5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	116.500.000,00	16.500.000,00	14,16	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	70.280.000,00	70.280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 3 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	40.000.000,00	29.000.000,00	72,50	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	423.974.000,00	418.151.600,00	98,63	20.000.000,00	19.919.800,00	99,60
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	105.493.063.836,00	100.633.083.609,66	95,39	60.769.332.587,49	60.098.693.467,09	98,90
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.316.130.000,00	3.238.791.921,62	97,67	1.161.129.000,00	192.678.749,32	16,59
5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	10.083.193.600,00	8.205.314.906,81	81,38	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	0,00	0,00	0,00	1.574.521.344,22	1.031.162.043,82	65,49
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	387.297.210.799,12	321.507.642.318,19	83,01	125.150.805.364,99	124.070.274.163,03	99,14
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	18.837.300.000,00	12.556.047.589,05	66,66	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	17.546.470.118,96	16.252.416.929,25	92,62	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	9.614.883.899,72	8.172.317.979,82	85,00	30.949.418.299,11	9.568.921.930,60	30,92

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	466.718.760,00	465.300.500,00	99,70	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	878.500.000,00	831.029.839,00	94,60	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	60.300.000,00	40.000.000,00	66,33	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	197.685.000,00	87.920.070,00	44,47
5 . 2 . 3 . 72	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	696.920.000,00	655.726.750,00	94,09	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	22.483.480.400,00	22.455.156.100,00	99,87	26.316.944.426,00	26.316.944.426,00	100,00
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	954.140.000,00	806.683.050,00	84,55	130.000.000,00	129.300.000,00	99,46
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	1.057.360.000,00	1.005.394.700,00	95,09	37.000.000,00	36.500.000,00	98,65
5 . 2 . 3 . 87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	77.049.500,00	61.639.600,00	80,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	47.264.896.466,55	38.470.530.129,74	81,39	14.547.336.462,16	14.547.332.134,14	100,00
5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	4.640.000.000,00	4.089.753.927,81	88,14	4.981.096.104,96	7.854.352.252,00	157,68
Total Belanja		**3.516.542.700.667,57**	**3.118.303.518.797,46**	**88,68**	**2.834.677.835.576,05**	**2.698.458.077.971,87**	**95,19**

Kode	Uraian	Rata-rata Penyerapan 2017-2020	Rata-rata Pertumbuhan Penyerapan 2017-2020
		(%)	(%)
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**92,21**	**2,91**
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	**93,14**	**1,70**
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	96,45	0,24
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	85,82	4,30

Kode	Uraian	Rata-rata Penyerapan 2017-2020	Rata-rata Pertumbuhan Penyerapan 2017-2020
		(%)	(%)
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	81,88	3,33
5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	-	-
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	46,11	(12,21)
5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	**94,94**	**(0,24)**
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	92,80	4,71
5 . 1 . 4 . 07	Belanja Hibah Dana BOS	94,60	(1,19)
5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	**90,92**	**7,01**
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	90,92	7,01
5 . 1 . 7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik**	**53,89**	**27,91**
5 . 1 . 7 . 02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	-	-
5 . 1 . 7 . 04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya	-	-
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	82,39	1,10
5 . 1 . 8	**Belanja Tidak Terduga**	**25,51**	**27,27**
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	25,51	27,27
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**85,93**	**4,69**
5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	**85,76**	**2,83**
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86,53	4,16
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	84,42	5,12
5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	26,43	11,44
5 . 2 . 1 . 05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	25,00	-
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	10,71	-
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	79,39	4,58
5 . 2 . 2	**Belanja Barang dan Jasa**	**88,19**	**3,15**
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92,72	2,02
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	92,07	3,51
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87,18	5,16

Kode	Uraian	Rata-rata Penyerapan 2017-2020	Rata-rata Pertumbuhan Penyerapan 2017-2020
		(%)	(%)
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Iuran Asuransi	47,04	(11,09)
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	83,44	3,35
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	86,28	3,85
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	79,33	(1,24)
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	92,43	0,03
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	75,00	33,33
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	86,94	0,52
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87,98	1,95
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	84,88	(0,25)
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	93,14	4,34
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	85,65	2,53
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90,10	2,09
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	86,84	6,51
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	82,89	(1,27)
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	85,45	0,54
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	71,09	(0,10)
5 . 2 . 2 . 22	Bekaja Barang dan Jasa BOS	25,00	-
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	66,76	19,95
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49,80	-
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Barang dan Jasa	90,14	(1,70)
5 . 2 . 2 . 27	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat	94,03	4,15
5 . 2 . 2 . 28	Biaya Penanganan Perkara	43,62	(21,08)
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Operasional Sekolah	49,05	40,52
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Seleksi	87,37	(1,50)
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Honorarium Tim Teknis BOS	50,00	(33,33)

Kode	Uraian	Rata-rata Penyerapan 2017-2020	Rata-rata Pertumbuhan Penyerapan 2017-2020
		(%)	(%)
5 . 2 . 3	**Belanja Modal**	**83,92**	**5,98**
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan	24,48	-
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	23,10	30,80
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	9,58	-
5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	34,64	(17,37)
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	24,97	(33,29)
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	45,97	(29,13)
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	89,42	2,75
5 . 2 . 3 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	52,85	(28,30)
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	47,42	-
5 . 2 . 3 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	24,91	-
5 . 2 . 3 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	53,37	(5,74)
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	49,81	33,31
5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	77,21	2,39
5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	73,17	(31,21)
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	89,05	0,40
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	96,50	2,62
5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	89,05	3,16
5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	95,54	4,25
5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	63,69	(20,74)
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	94,03	1,47
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	60,40	(31,91)
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	93,02	(1,09)
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	75,29	0,17
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	97,17	(0,41)
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	80,81	24,28

Kode	Uraian	Rata-rata Penyerapan 2017-2020	Rata-rata Pertumbuhan Penyerapan 2017-2020
		(%)	(%)
5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	24,62	-
5 . 2 . 3 . 40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	27,87	(32,43)
5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	49,15	(32,24)
5 . 2 . 3 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	73,54	(31,65)
5 . 2 . 3 . 45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	43,13	-
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	94,34	5,43
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93,79	2,46
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	77,90	(27,33)
5 . 2 . 3 . 52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	44,90	-
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	41,14	21,83
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	42,29	(28,95)
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	81,83	9,19
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	39,99	(31,10)
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	61,22	(22,66)
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	61,52	(11,99)
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	69,77	(33,12)
5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	45,97	-
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	39,64	-
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	22,61	-
5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	13,41	14,82
5 . 2 . 3 . 72	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-
5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	24,98	(33,30)
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	-
5 . 2 . 3 . 78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	35,01	(17,79)
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	56,68	(33,22)
5 . 2 . 3 . 80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon	25,00	-

Kode	Uraian	Rata-rata Penyerapan 2017-2020	Rata-rata Pertumbuhan Penyerapan 2017-2020
		(%)	(%)
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	99,78	0,05
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	70,64	33,15
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	48,43	32,88
5 . 2 . 3 . 87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	2,19	(2,93)
5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	20,00	-
5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	84,25	0,54
5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal BLUD	81,93	32,37
Total Belanja		**89,14**	**3,86**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah Bappeda Provinsi Bengkulu Tahun 2021.

Alokasi dana APBD Provinsi Bengkulu untuk mendanai program pembangunan selama ini dilaksanakan melalui Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berdasarkan kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan data realisasi rata–rata pertumbuhan Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2017-2020 sebesar 3,86%, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 2,91% dan Belanja Langsung sebesar 4,96%. Adapun realisasi penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2017-2020 rata-rata sebesar 89,14%, dengan rata-rata penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar 92,21% dan Belanja Langsung sebesar 85,93%.

3.2.1.3. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020 cenderung meningkat sebesar 12,49% dari sebesar Rp.1.528.814.118.705,70 pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.1.719.651.227.731,07 pada tahun 2020. Pertumbuhan belanja wajib terbesar berada pada pos belanja tidak terduga Sakit yang tumbuh 14.416,33%. Namun secara nominal, pengeluaran wajib terbesar ada pada pos Belanja Tidak Langsung yang mencapai 1,69 triliun rupiah dan tumbuh sebesar 13,18%. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal BUMD mengalami penurunan sebesar 40,22%.

Secara lengkap, Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13.
Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

Kode	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.500.252.284.671,82**	**1.622.411.064.256,63**	**1.568.400.511.869,68**	**1.699.580.773.072,07**	**13,18**
5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	**958.716.986.706,00**	**1.018.412.868.261,00**	**1.027.615.426.759,00**	**1.044.040.926.217,00**	**8,73**
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	695.373.092.068,00	814.193.953.062,00	721.313.351.735,00	715.183.202.088,00	4,83
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	257.408.047.431,00	192.739.496.879,00	290.955.014.454,00	327.670.223.995,00	38,45
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.062.503.400,00	875.002.800,00	968.752.101,00	1.187.500.134,00	15,65
5 . 1 . 1 . 04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.873.343.807,00	10.604.415.520,00	14.378.308.469,00	12.584.963.629,00	140,72
5 . 1 . 4	**Belanja Hibah**	**278.389.957.000,00**	**324.924.782.000,00**	**341.978.235.000,00**	**512.620.480.000,00**	**71,86**
5 . 1 . 4 . 07	Belanja Hibah Dana BOS	271.809.440.000,00	268.280.720.000,00	295.441.960.000,00	327.310.080.000,00	19,61
5 . 1 . 6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	**261.415.985.349,82**	**277.516.027.247,63**	**196.203.764.258,68**	**128.609.788.107,07**	**(57,59)**
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	261.415.985.349,82	277.516.027.247,63	196.203.764.258,68	128.609.788.107,07	(57,59)

Kode	Uraian	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5 . 1 . 7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Partai Politik**	**1.729.355.616,00**	**1.549.873.648,00**	**1.598.555.852,00**	**1.793.682.448,00**	**4,97**
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.729.355.616,00	1.549.873.648,00	1.598.555.852,00	1.793.682.448,00	4,97
5 . 1 . 8	**Belanja Tidak Terduga**	**0,00**	**7.513.100,00**	**1.004.530.000,00**	**12.515.896.300,00**	**14.416,33**
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	0,00	7.513.100,00	1.004.530.000,00	12.515.896.300,00	14.416,33
5 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**3.471.834.033,88**	**4.785.315.879,00**	**4.785.622.491,00**	**5.070.454.659,00**	**43,79**
5 . 2 . 1	**Belanja Pegawai**	**3.471.834.033,88**	**4.785.315.879,00**	**4.785.622.491,00**	**5.070.454.659,00**	**43,79**
5 . 2 . 1 . 07	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	3.471.834.033,88	4.785.315.879,00	4.785.622.491,00	5.070.454.659,00	43,79
6 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**25.090.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000.000,00**	**(40,22)**
6 . 2 . 2	**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**	**25.090.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000.000,00**	**(40,22)**
6 . 2 . 2 . 02	BUMD	25.090.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	(40,22)
Total Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama		**1.528.814.118.705,70**	**1.637.196.380.135,63**	**1.573.186.134.360,68**	**1.719.651.227.731,07**	**12,49**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah Bappeda Provinsi Bengkulu tahun 2021.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Tabel 3.14.
Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

NO		URAIAN	(n-4) 2017	(n-3) 2018	(n-2) 2019	(n-1) 2020
			Rp	Rp	Rp	Rp
	1	Realisasi Pendapatan	2.804.577.827.356,27	2.851.808.282.196,75	2.934.057.941.393,87	2.786.928.036.207,91
		Dikurangi realisasi :				
	2	Belanja Daerah	2.867.213.326.855,96	2.979.578.236.902,23	3.118.303.518.797,46	2.698.458.077.971,87
	3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.090.000.000,00	10.000.000.000,00	-	15.000.000.000,00
A		**Defisit Riil**	**(87.725.499.499,69)**	**(137.769.954.705,48)**	**(184.245.577.403,59)**	**73.469.958.236,04**
		Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan:				
	4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	438.813.668.426,21	351.088.168.926,52	213.318.214.221,04	29.072.636.817,45
B		**Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**438.813.668.426,21**	**351.088.168.926,52**	**213.318.214.221,04**	**29.072.636.817,45**
C		**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan**	**351.088.168.926,52**	**213.318.214.221,04**	**29.072.636.817,45**	**102.542.595.053,49**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah Bappeda Provinsi Bengkulu tahun 2021.

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Kurun waktu tahun anggaran 2017-2020, defisit riil APBD Provinsi Bengkulu bergerak fluktuatif. Pada tahun 2017, defisit riil APBD adalah sebesar 87,7 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 184 miliar rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020, tidak terjadi Defisit Riil anggaran, namun terjadi Surplus sebesar 73 miliar rupiah. Defisit tersebut kemudian ditutupi seluruhnya oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

Nilai realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya telah melampaui nilai SilPA yang diproyeksikan sebelumnya dan dapat dialokasikan untuk menutupi defisit riil APBD Tahun Anggaran 2017-2020. Selanjutnya, dari pelampauan tersebut dapat diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Berkenaan yang digunakan dalam perubahan APBD tahun berkenaan.

Tabel 3.15.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil							
		(n-4) 2017		(n-3) 2018		(n-2) 2019		(n-1) 2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A.	**Defisit Riil**	**(87.725.499.500)**		**(137.769.954.705)**		**(137.769.954.705)**		**73.469.958.236**	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	438.813.668.426,21	500,2	351.088.168.926,52	254,8	213.318.214.221	154,8	29.072.636.817	39,57
2	Pencairan Dana Cadangan	-		-			-		
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	-		-			-		
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-		-			-		
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-		-			-		
6	Penerimaan Piutang Daerah	-		-			-		
B	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan**	**351.088.168.926,52**	**400,2**	**213.318.214.221,04**	**154,8**	**29.072.636.817,45**	**21,1**	**102.542.595.053,49**	**139,6**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah Bappeda Provinsi Bengkulu tahun 2021.

Tabel 3.16.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020

No	Uraian	(n-4) 2017		(n-3) 2018		(n-2) 2019		(n-1) 2020		Rata-rata Pertumbuhan 2017-2020
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	
Jumlah SiLPA		**351.088.168.926,52**		**213.318.214.221,04**		**29.072.636.817,45**		**102.542.595.053,49**		**(70,79)**
1	Pelampauan Penerimaan PAD	(19.068.062.760,41)	(5,43)	(126.838.607.732,25)	(59,46)	(310.155.671.396,66)	(1.066,83)	(28.839.490.156,69)	(28,12)	51,24
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(191.394.217.485,00)	(54,51)	(22.189.661.669,00)	(10,40)	(59.678.873.656,00)	(205,28)	(4.885.672.394,00)	(4,76)	(97,45)
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(908.741.981,00)	(0,26)	(1.946.644.500,00)	(0,91)	48.000.000,00	0,17	48.000.000,00	0,05	(105,28)
4	Sisa Penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kewajiban Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, olahan LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2017-2020 yang sudah di audit oleh BPK Perwakilan Bengkulu, diolah Bappeda Provinsi Bengkulu tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber terjadinya SiLPA periode ini berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Item yang yang secara signifikan berkontribusi terhadap bertambahnya penerimaan SiLPA tahun 2017-2020, adalah Pelampauan Penerimaan PAD yang mencapai 28,12% pada tahun 2020, tumbuh sebesar 51,24% dari tahun 2017. Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 4 tahun terakhir (2017-2020), sebagai tahun rujukan yang dijadikan bahan laporan keuangan pemerintah daerah, terdapat kecenderungan penurunan SiLPA (Sisa Lebih Hasil Perhitungan Anggaran) dengan rata-rata penurunan sebesar 70,79%. Di masa mendatang diharapakan SiLPA semakin menurun, karena dengan semakin menurunnnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu yang disusun pada tahun 2020 ini, perlu melakukan penyesuaian dalam penyajian struktur APBD. Terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merubah struktur APBD yang selama ini disusun dengan mengacu kepada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan berlakunya PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, maka PP Nomor 58 Tahun

2005 dicabut. Penerapan struktur APBD sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 sudah harus dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Namun disatu sisi, aturan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada aturan yang masih berlaku yaitu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sehingga, untuk penyusunan kebijakan pengelolaan masa lalu, struktur APBD masih disajikan sesuai struktur APBD pada PP Nomor 58 Tahun 2005 yang diatur secara teknis dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya untuk kerangka pendanaan selama periode RPJMD, struktur proyeksi APBD mulai Tahun Anggaran 2021 sudah disesuaikan dengan struktur APBD yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk menjaga konsistensi data proyeksi, maka untuk struktur APBD realisasi Tahun Anggaran 2019 dan *baseline* APBD Tahun Anggaran 2020 dalam kerangka pendanaan dilakukan pemetaan dna koversi ke struktur yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan catatan, hasil konversi ini masih bersifat indikatif dan tentatif dan berdasarkan data struktur APBD yang tersedia.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan provinsi dan kabupaten/kota terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Data-data perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun didiskusikan bersama, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah

dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dana bagi hasil, dan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional; Kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM; Estimasi pemasaran industri otomotif nasional yang diperkirakan masuk ke wilayah Bengkulu; Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya; Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Tabel 3.17.
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

Kode/Uraian						Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2026 (%)	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020	Proyeksi Tahun Anggaran		
								2021	2022	2023
1						2	3	4	5	6
4	**Pendapatan**					**3,10%**	**2.786.928.036.208**	**3.000.610.979.347**	**3.059.326.672.271**	**3.135.817.160.717**
4	**1**	**Pendapatan Asli Daerah**				**3,79%**	**712.345.548.602**	**931.642.744.347**	**943.619.720.721**	**972.145.341.782**
4	1	01	Pajak Daerah			3,91%	561.787.749.522	755.671.478.159	763.034.669.126	782.800.474.580
4	1	01	01	PKB		4,92%	230.746.716.600	257.325.052.700	258.611.677.964	267.540.573.566
4	1	01	02	BBN-KB		2,00%	99.173.107.000	154.637.762.500	157.730.517.750	160.885.128.105
4	1	01	03	PBB-KB		5,42%	122.462.644.744	206.139.674.654	209.082.640.533	213.866.780.179
4	1	01	04	Air Permukaan		4,54%	8.296.688.888	9.840.256.345	9.881.100.919	10.480.143.595
4	1	01	05	Pajak Rokok		1,44%	101.108.592.290	127.728.731.960	127.728.731.960	130.027.849.135
4	1	02	Retribusi Daerah			10,89%	3.007.003.756	5.000.000.000	5.765.093.572	6.487.764.817
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			8,14%	14.669.299.694	15.122.476.371	18.191.924.257	19.118.467.584
4	1	04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			2,51%	132.881.495.630	155.848.789.817	156.628.033.766	163.738.634.801
4	**2**	**Pendapatan Transfer**				**2,79%**	**2.053.310.368.606**	**2.067.852.235.000**	**2.114.590.951.550**	**2.162.555.818.935**
4	2	01	Transfer Pemerintah Pusat			2,79%	2.053.310.368.606	2.067.852.235.000	2.114.590.951.550	2.162.555.818.935
4	2	01	01	Dana Perimbangan		2,79%	2.021.914.029.606	2.049.020.987.000	2.095.288.922.350	2.142.771.239.005
4	2	01	01	01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	1,00%	71.140.797.650	61.617.044.000	62.233.214.440	62.855.546.584
4	2	01	01	02	Dana Transfer Umum- Dana	2,60%	1.219.949.535.000	1.213.764.868.000	1.238.040.165.360	1.262.800.968.667

Kode/Uraian						Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2026 (%)	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020	Proyeksi Tahun Anggaran		
								2021	2022	2023
1						2	3	4	5	6
					Alokasi Umum (DAU)					
4	2	01	01	03	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK)- Fisik	5,00%	136.449.090.558	196.789.535.000	206.629.011.750	216.960.462.338
4	2	01	01	04	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2,60%	594.374.606.398	576.849.540.000	588.386.530.800	600.154.261.416
4	2	01	02		Dana Insentif Daerah (DID)	2,50%	31.396.339.000	18.831.248.000	19.302.029.200	19.784.579.930
4	**3**	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**				**0,00%**	**21.272.119.000**	**1.116.000.000**	**1.116.000.000**	**1.116.000.000**
4	3	01	Hibah			0,00%	21.272.119.000	1.116.000.000	1.116.000.000	1.116.000.000
4	3	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	20.156.119.000	-	-	-
4	3	01	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	20.156.119.000	-	-	-
4	3	01	05		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00%	1.116.000.000	1.116.000.000	1.116.000.000	1.116.000.000
4	3	01	05	01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00%	1.116.000.000	1.116.000.000	1.116.000.000	1.116.000.000
JUMLAH PENDAPATAN								**3.000.610.979.347**	**3.059.326.672.271**	**3.135.817.160.717**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, 2021.

Kode/Uraian						Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2026 (%)	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020	Proyeksi Tahun Anggaran		
								2024	2025	2026
1						2	3	7	8	9
4	**Pendapatan**					**3,10%**	**2.786.928.036.208**	**3.250.422.010.610**	**3.371.624.114.874**	**3.495.678.041.007**
4	**1**	**Pendapatan Asli Daerah**				**3,79%**	**712.345.548.602**	**1.018.890.341.693**	**1.069.994.884.192**	**1.121.635.744.944**
4	1	01	Pajak Daerah			3,91%	561.787.749.522	823.780.111.193	869.017.283.260	914.742.249.705
4	1	01	01	PKB		4,92%	230.746.716.600	286.379.756.961	307.305.846.718	326.643.613.699
4	1	01	02	BBN-KB		2,00%	99.173.107.000	164.102.830.667	167.384.887.280	170.732.585.026
4	1	01	03	PBB-KB		5,42%	122.462.644.744	229.810.852.751	247.777.055.284	267.919.098.819
4	1	01	04	Air Permukaan		4,54%	8.296.688.888	11.118.320.394	11.798.513.251	12.270.453.781
4	1	01	05	Pajak Rokok		1,44%	101.108.592.290	132.368.350.420	134.750.980.727	137.176.498.380
4	1	02	Retribusi Daerah			10,89%	3.007.003.756	7.185.395.981	7.832.476.890	8.370.334.234
4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			8,14%	14.669.299.694	20.092.733.847	21.117.220.854	22.194.560.237
4	1	04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			2,51%	132.881.495.630	167.832.100.672	172.027.903.188	176.328.600.768
4	**2**	**Pendapatan Transfer**				**2,79%**	**2.053.310.368.606**	**2.230.415.668.917**	**2.300.513.230.682**	**2.372.926.296.063**
4	2	01	Transfer Pemerintah Pusat			2,79%	2.053.310.368.606	2.230.415.668.917	2.300.513.230.682	2.372.926.296.063
4	2	01	01	Dana Perimbangan		2,79%	2.021.914.029.606	2.210.136.474.489	2.279.727.056.393	2.351.620.467.417
4	2	01	01	01	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	1,00%	71.140.797.650	63.484.102.050	64.118.943.071	64.760.132.501
4	2	01	01	02	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	2,60%	1.219.949.535.000	1.300.684.997.727	1.339.705.547.659	1.379.896.714.089
4	2	01	01	03	Dana Transfer Umum- Dana	5,00%	136.449.090.558	227.808.485.454	239.198.909.727	251.158.855.213

Kode/Uraian						Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2026 (%)	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020	Proyeksi Tahun Anggaran		
								2024	2025	2026
1						2	3	7	8	9
					Alokasi Khusus (DAK)- Fisik					
4	2	01	01	04	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	2,60%	594.374.606.398	618.158.889.258	636.703.655.936	655.804.765.614
4	2	01	02		Dana Insentif Daerah (DID)	2,50%	31.396.339.000	20.279.194.428	20.786.174.289	21.305.828.646
4	**3**	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**				**0,00%**	**21.272.119.000**	**1.116.000.000**	**1.116.000.000**	**1.116.000.000**
4	3	01	Hibah			0,00%	21.272.119.000	1.116.000.000	1.116.000.000	1.116.000.000
4	3	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	20.156.119.000	-	-	-
4	3	01	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	20.156.119.000	-	-	-
4	3	01	05		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00%	1.116.000.000	1.116.000.000	1.116.000.000	1.116.000.000
4	3	01	05	01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00%	1.116.000.000	1.116.000.000	1.116.000.000	1.116.000.000
							JUMLAH PENDAPATAN	**3.250.422.010.610**	**3.371.624.114.874**	**3.495.678.041.007**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, 2021.

Pendapatan Daerah diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 3,10% dari sebesar 3,000 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 3,495 triliun rupiah pada tahun 2026. Peningkatan pendapatan daerah ini, diproyeksikan bersumber dari peningkatan PAD sebesar 3,79% dari sebeesar 931 miiar rupiah padatahun 2021 menjadi 1,1 triliun rupiah pada tahuh 2026. Kemudin Pendapatan Transfer diroyeksikan meningkat sebesar 2,79% kuruj wuktu 2021-2026. Sedangkan pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga diprediksikan tidak mengalami peningkatan karena harus didahului dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Pihak Ketiga.

Arah kebijakan peningkatan Pendapatan Daerah dilakukan dengan :

1. Meningkatnya pendapatan asli daerah terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
2. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
3. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain yang dilakukan dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi BUMD.

Beberapa upaya strategis untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan di atas, kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2021-2025 difokuskan pada:

1. Peningkatan volume PAD melalui melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Provinsi melalui Peraturan Daerah, dengan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.
2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa / layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah.

4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah.
7. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di Kabupaten/Kota, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan
8. Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) kepada masyarakat melalui satuan administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling ke beberapa area yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa Kabupaten.
9. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah. Disamping ditujukan kepada masyarakat, sosialisasi ini juga ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
11. Membangun *Drive Through* yang lokasinya strategis, dengan cara wajib pajak tanpa harus turun dari kendaraannya dalam membayar pajaknya.
12. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Bengkulu.

13. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
14. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.
15. Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya- upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing PD/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
16. Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi.
17. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, berdasarkan peraturan perundangan tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
18. Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Operasional Pemungutan Pajak Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan kewajiban pemilik kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui ATM Samsat, penyediaan embossing machine untuk pengesahan bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
19. Mendukung kebijakan nasional tentang Gerakan Non Tunai dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan menyediakan pilihan pembayaran Pajak Daerah via EDC *Machine*, sms banking dan internet banking.
20. Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan

peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

3.3.1.2. Proyeksi Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.Belanja Daerah dilakukan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.18.
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

Kode/Uraian				Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2026 (%)	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020	Proyeksi Tahun Anggaran		
						2021	2022	2023
1				2	3	4	5	6
5	**Belanja**			**3,03%**	**2.698.458.077.972**	**3.002.037.650.376**	**3.126.029.100.386**	**3.122.987.160.717**
5	**1**	**Belanja Operasi**		**0,93%**	**2.150.693.342.331**	**2.203.987.940.675**	**2.174.853.702.482**	**2.235.446.966.415**
5	1	1	Belanja Pegawai	1,25%	1.066.821.278.776	1.213.897.395.728	1.229.071.113.175	1.244.434.502.089
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	0,63%	571.251.583.555	946.214.544.947	901.702.589.308	956.932.464.326
5	1	5	Belanja Hibah	56,96%	512.620.480.000	43.876.000.000	44.080.000.000	34.080.000.000
5	**2**	**Belanja Modal**		**16,59%**	**404.845.368.786**	**425.832.852.339**	**308.764.227.986**	**502.046.171.484**
5	2	1	Belanja Tanah	9,12%	910.700.000	22.647.135.800	22.966.460.415	23.290.287.507
5	2	2	Belanja peralatan dan Mesin	5,55%	159.657.929.550	154.479.246.940	100.084.094.287	158.866.273.723
5	2	3	Belanja Bangunan dan Gedung	14,38%	61.322.534.260	121.093.746.372	56.301.610.659	124.532.664.667
5	2	4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	60,04%	134.069.776.164	78.678.521.687	79.787.888.843	145.033.070.955
5	2	5	Belanja Aset tetap Lainnya	1,41%	48.884.428.812	48.934.201.540	49.624.173.782	50.323.874.632
5	**3**	**Belanja Tidak Terduga**		**0,00%**	**12.515.896.300**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	0,00%	12.515.896.300	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5	**4**	**Belanja Transfer**		**10,05%**	**130.403.470.555**	**362.216.857.362**	**632.411.169.918**	**375.494.022.818**
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	9,99%	128.609.788.107	362.216.857.362	631.411.169.918	374.494.022.818
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	-	1.793.682.448	-	1.000.000.000	1.000.000.000
					JUMLAH BELANJA	**3.002.037.650.376**	**3.126.029.100.386**	**3.122.987.160.717**

Kode/Uraian				Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2026 (%)	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020	Proyeksi Tahun Anggaran		
						2024	2025	2026
1				2	3	7	8	9
5	**Belanja**			**3,03%**	**2.698.458.077.972**	**3.237.592.010.610**	**3.358.794.114.874**	**3.482.848.041.007**
5	**1**	**Belanja Operasi**		**0,93%**	**2.150.693.342.331**	**2.388.261.876.720**	**2.277.884.879.652**	**2.299.446.404.665**
5	1	1	Belanja Pegawai	1,25%	1.066.821.278.776	1.259.989.933.365	1.275.739.807.532	1.291.686.555.127
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	0,63%	571.251.583.555	962.482.672.619	968.065.072.120	973.679.849.538
5	1	5	Belanja Hibah	56,96%	512.620.480.000	165.789.270.736	34.080.000.000	34.080.000.000
5	**2**	**Belanja Modal**		**16,59%**	**404.845.368.786**	**444.100.755.185**	**653.833.133.190**	**733.486.631.795**
5	2	1	Belanja Tanah	9,12%	910.700.000	23.618.680.560	43.951.703.956	24.289.422.982
5	2	2	Belanja peralatan dan Mesin	5,55%	159.657.929.550	161.106.288.182	163.377.886.846	165.681.515.050
5	2	3	Belanja Bangunan dan Gedung	14,38%	61.322.534.260	126.288.575.239	128.069.244.150	129.875.020.493
5	2	4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	60,04%	134.069.776.164	82.053.769.938	266.681.285.451	361.157.943.004
5	2	5	Belanja Aset tetap Lainnya	1,41%	48.884.428.812	51.033.441.264	51.753.012.786	52.482.730.266
5	**3**	**Belanja Tidak Terduga**		**0,00%**	**12.515.896.300**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	0,00%	12.515.896.300	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5	**4**	**Belanja Transfer**		**10,05%**	**130.403.470.555**	**395.229.378.705**	**417.076.102.032**	**439.915.004.547**
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	9,99%	128.609.788.107	394.229.378.705	416.076.102.032	438.915.004.547
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	-	1.793.682.448	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
					JUMLAH BELANJA	**3.237.592.010.610**	**3.358.794.114.874**	**3.482.848.041.007**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, 2021.

Belanja Daerah diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 3,03% dari sebesar 3,002 triliun rupiah meningkat menjadi 3,482 triliun rupiah pada tahun 2026. Kenaikan belanja daerah ini, diproyeksikan bersumber dari kenaikan Belanja Modal sebesar 16,59% serta kenaikan Belanja Operasi yang sebesar 0,93%. Belanja Transfer berupa Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diproyeksikan rata-rata tumbuh sebesar 10,05%, dikarenakan Pemerintah Provinsi Bengkulu diproyeksikan tidak lagi memiliki hutang DBH seperti pada tahun anggaran 2021 dan tahun 2022. Namun secara tahunan belanja DBH meningkat seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Belanja daerah disusun dan diimplementasikan dengan berdasar pada pendekatan anggaran kinerja (*Performance Based Budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan anggaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi perencanan anggaran serta menjamin akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan belanja daerah difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik- baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhir periode besarnya alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas yang diinginkan dapat terukur.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan pemerataan dan kewilayahan dan pembangunan reformasi birokrasi.
3. Tolak ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
4. Optimalisasi belanja langsung Belanja langsung yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif masih memiliki proporsi yang kecil. Sesuai dengan strategi pembangunan untuk

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi pembangunan infrastruktur dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui BUMD.

5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan. Bahkan prosesnya pun dilaksanakan secara transparan lewat multilateral meeting dan bilateral meeting.

Di samping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, kebijakan belanja Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tahun anggaran 2021-2026 yakni antara lain :

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 nanti, dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Belanja Modal, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
5. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Bengkulu yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
6. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja

bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi;

8. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
9. Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
10. Mengedepankan program-program yang menunjang pengentasan kemiskinan, peningkatan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi;

3.3.1.3. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam dua (2) tahun, proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

Kode/Uraian				Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2026 (%)	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020	Proyeksi Tahun Anggaran		
						2021	2022	2023
1				2	3	4	5	6
6	**Pembiayaan Daerah**							
6	**1**	**Penerimaan Pembiayaan**		**-**	**29.072.636.817**	**16.506.671.029**	**84.532.428.115**	**5.000.000.000**
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	29.072.636.817	16.506.671.029	84.532.428.115	5.000.000.000
6	**2**	**Pengeluaran Pembiayaan**		**3,65**	**15.000.000.000**	**15.080.000.000**	**17.830.000.000**	**17.830.000.000**
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	3,65	15.000.000.000	15.080.000.000	17.830.000.000	17.830.000.000
					PEMBIAYAAN NETTO	**1.426.671.029**	**66.702.428.115**	**(12.830.000.000)**

Kode/Uraian				Rata-Rata Pertumbuhan 2021-2026 (%)	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020	Proyeksi Tahun Anggaran		
						2024	2025	2026
1				2	3	7	8	9
6	**Pembiayaan Daerah**							
6	**1**	**Penerimaan Pembiayaan**		**-**	**29.072.636.817**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	29.072.636.817	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
6	**2**	**Pengeluaran Pembiayaan**		**3,65**	**15.000.000.000**	**17.830.000.000**	**17.830.000.000**	**17.830.000.000**
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	3,65	15.000.000.000	17.830.000.000	17.830.000.000	17.830.000.000
					PEMBIAYAAN NETTO	**(12.830.000.000)**	**(12.830.000.000)**	**(12.830.000.000)**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu, 2021.

Pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 5% dari total APBD. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi diarahkan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program). Kebijakan yang dilakukan pengeluaran anggaran harus mempertimbangan aspek efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

3.3.2.1. Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata sebesar 2,31%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

Uraian			Rata-rata Tingkat Pertumbuhan (%)	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020	Proyeksi Tahun Anggaran (Rp)		
					2021	2022	2023
A	**Belanja Operasi**		**2,30**	**1.722.361.125.631,07**	**1.629.990.253.090**	**1.915.562.283.093**	**1.664.008.524.907**
	1	Belanja Pegawai	1,25	1.066.821.278.776,00	1.213.897.395.728	1.229.071.113.175	1.244.434.502.089
	2	Belanja Hibah	56,96	512.620.480.000,00	43.876.000.000	44.080.000.000	34.080.000.000
	3	Belanja Transfer	10,05	130.403.470.555	362.216.857.362	632.411.169.918	375.494.022.818
	4	Belanja Tidak Terduga	-	12.515.896.300	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
B	**Pengeluaran Pembiayaan**		**-**	**15.000.000.000,00**	**15.080.000.000**	**17.830.000.000**	**17.830.000.000**
	1	Penyertaan Modal	-	15.000.000.000,00	15.080.000.000	17.830.000.000	17.830.000.000
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama			**2,31**	**1.737.361.125.631,07**	**1.645.070.253.090**	**1.933.392.283.093**	**1.681.838.524.907**

Uraian			Rata-rata Tingkat Pertumbuhan (%)	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020	Proyeksi Tahun Anggaran (Rp)		
					2024	2025	2026
A	**Belanja Operasi**		**2,30**	**1.722.361.125.631,07**	**1.831.008.582.807**	**1.736.895.909.564**	**1.775.681.559.674**
	1	Belanja Pegawai	1,25	1.066.821.278.776,00	1.259.989.933.365	1.275.739.807.532	1.291.686.555.127
	2	Belanja Hibah	56,96	512.620.480.000,00	165.789.270.736	34.080.000.000	34.080.000.000
	3	Belanja Transfer	10,05	130.403.470.555	395.229.378.705	417.076.102.032	439.915.004.547
	4	Belanja Tidak Terduga	-	12.515.896.300	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
B	**Pengeluaran Pembiayaan**		**-**	**15.000.000.000,00**	**17.830.000.000**	**17.830.000.000**	**17.830.000.000**
	1	Penyertaan Modal	-	15.000.000.000,00	17.830.000.000	17.830.000.000	17.830.000.000
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama			**2,31**	**1.737.361.125.631,07**	**1.848.838.582.807**	**1.754.725.909.564**	**1.793.511.559.674**

umber: BPKD Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi Bengkulu, 2021.

3.3.2.2. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta belanja tidak langsung dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2021-2026 untuk mendanai pembangunan Provinsi Bengkulu. Berdasarkan hasil analisis, total penerimaan meningkat dari 3,017 triliun rupiah pada tahun 2021 diproyeksikan terus meningkat sampai dengan 3,5 triliun rupiah pada Tahun 2026. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi dengan proyeksi Total belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Bengkulu terus meningkat dari tahun 2021-2026. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.21.
Proyeksi Kapsitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

NO	Uraian	Proyeksi Tahun Anggaran (Rp)		
		2021	2022	2023
1	Pendapatan	3.000.610.979.347	3.059.326.672.271	3.135.817.160.717
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	16.506.671.029	84.532.428.115	5.000.000.000
	Total Penerimaan	**3.017.117.650.376**	**3.143.859.100.386**	**3.140.817.160.717**
	Dikurangi			
4	Total belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	1.645.070.253.090	1.933.392.283.093	1.681.838.524.907
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**1.372.047.397.286**	**1.210.466.817.294**	**1.458.978.635.810**

NO	Uraian	Proyeksi Tahun Anggaran (Rp)		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan	3.250.422.010.610	3.371.624.114.874	3.495.678.041.007
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Total Penerimaan	**3.255.422.010.610**	**3.376.624.114.874**	**3.500.678.041.007**
	Dikurangi			
4	Total belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	1.848.838.582.807	1.754.725.909.564	1.793.511.559.674
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**1.406.583.427.803**	**1.621.898.205.310**	**1.707.166.481.333**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi Bengkulu, 2021.

3.3.2.3. Kebijakan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Adapun kebijakan ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan kesehatan 10% serta SPM. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Belanja Gaji, Belanja Dana Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Belanja Hibah.

Prioritas II, adalah program prioritas ditingkat perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program unggulan perangkat daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan perangkat daerah untuk mendukung visi misi pembangungan daerah secara holistik. Kebijakan alokasi anggaran untuk prioritas II diarahkan pada:

1) Sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi masyarakat miskin;
2) Pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan;

3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;

4) Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepadaprovinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III dengan memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar :

1) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi/distribusi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;

2) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

4) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

3.3.2.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Pencapaian target kinerja pembangunan daerah dari tahun ketahun diharapkan terus mengalami peningkatan dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah. Sementara Pemerintah Provinsi Bengkulu mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah maka untuk mengatasi hal tersebut maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan pendekatan sumber pendanaan lainnya.

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

Pembangunan Provinsi Bengkulu selain bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun perangkat daerah provinsi. Selain itu juga Pemerintah Provinsi Bengkulu terus membangun upaya kolaboratif agar kebutuhan pembangunan di provinsi Bengkulu terutama yang berupa pembangunan infrastruktur dapat di bangun melalui DIPA Kementerian/Lembaga maupun penugasan dari BUMN.

2) Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD Bengkulu yang lainnya adalah Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Bengkulu, yang dimaksud dengan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah mensinergikan penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur desa dan kota, dalam rangka optimalisasi program pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota. Prinsip pendanaan PKBL dan TJSL adalah rupiah sama dengan 0 (nol) dan pola kerja bersinergi program derajat tinggi dan koordinasi derajat rendah. Pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol) adalah setiap perusahaan

melaksanakan PKBL dan TJSL secara mandiri, artinya bahwa pengelolaan pendanaanya pun oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan bagian dari pendapatan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Penyelenggaraan Program PKBL dan TJSL dilakukan melalui pendekatan :

a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama;
c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL

Adapun program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSL dan PKBL meliputi 8 (delapan) aspek yaitu :

a. sosial, yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
b. lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
c. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Bengkulu dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
d. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
e. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;

f. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;

g. sarana dan prasarana keagamaan; dan

h. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3) Sinergi dan Kolaborasi APBD Kabupaten dan Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

4) Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi daerah merupakan alternatif kanal pembiayaan yang layak dipertimbangkan sebagai sumber pendanaan daerah, instrumen ini adalah efek berupa surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat, hanya untuk membiayai kegiatan investasi sarana prasarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. Namun pada dasarnya penerbitan obligasi daerah sangat bergantung pada kapasitas daerah tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang diajukan harus mempunyai nilai keuntungan secara ekonomis, keuntungan dari sarana prasarna tersebut digunkan untuk membayar pokok hutang beserta bunganya.

Kelebihan obligasi daerah sebagai alternatif pendanaan pembangunan antara lain mampu menarik minat pemilik dana atau masyarakat untuk berinvestasi dan mampu menyediakan dana dalam jumlah besar.

Mekanisme penerbitan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, di antaranya:

a. Kegiatan sebagai investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan (revenue bond). Ke depan, diharapkan instrumen Obligasi Daerah ini juga bisa dimanfaatkan untuk investasi prasarana dan/atau sarana yang tidak menghasilkan penerimaan (general bond) sepanjang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
b. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
c. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
d. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan
e. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Pemerintah Provinsi Bengkulu belum pernah menerbitkan obligasi daerah, namun jika dibutuhkan dna memungkinkan, penerbitan obligasi daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan di luar APBD.

5) Pinjaman Daerah

Pembangunan Infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (planning), proses pembangunan (construction), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (operational and maintenance).

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk : 1) menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. 2) Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah. 3) Adanya kegiatan Prioritas Daerah. 4) Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
b. Pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah;
c. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
d. Pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
e. Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
f. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
g. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;

h. Proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah; dan

i. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya adalah bersumber dari:

a. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan Pinjaman Dalam Negeri, dan/atau penerusan Pinjaman Luar Negeri;

b. Pemerintah daerah lain;

c. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

e. Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil dari pinjaman daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

a. Pinjaman jangka pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas;

b. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan;

c. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan social; dan

d. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan

penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

Pemerintah Provinsi Bengkulu belum pernah melakukan pinjaman daerah, namun jika dibutuhkan dan memungkinkan, pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif pembiayaan di luar APBD.

6) Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi.

Dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres No.38/2015 dimana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (*user fee*), pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (*availability payment*), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain :

a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;

b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah
c. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
d. Memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badanusaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (*on schedule-on budget*);
b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak; dan
c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi *Availability Payment*/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor, baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marjinal. 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas

perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melaui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri:

a. kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (tranportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika);
b. kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumaha rakyat, dan kelompok
c. Kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).

3.3.2.5. Pengembangan BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengatur bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, suatu perusahaan dapat dikelompokkan sebagai BUMD apabila perusahaan tersebut seluruh atau paling sedikit 51% modalnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

BUMD sebagai institusi memiliki keunikan yang berbeda dibandingkan badan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, karakteristik BUMD meliputi:

a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
b. Badan usaha dimiliki oleh:

1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.

c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

BUMD juga memiliki aktivitas yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
b. Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan
c. Pengelolaan BUMD memedomani dua regulasi, yaitu regulasi yang terkait dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha sebagai sektor privat.

Berdasarkan karakteristik diatas, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga tugas dan fungsi BUMD sebagai agen pembangunan. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD tersebut, maka diperlukan suatu pedoman yang komprehensif. Hal tersebut dimaksudkan agar BUMD dapat melaksanakan tugas *sesuai dengan* fungsinya serta dapat memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dasar hukum pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan BUMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

BUMD di Provinsi Bengkulu kurun waktu tahun 2016-2020, belum secara maksimal memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam APBD Provinsi Bengkulu. Isu strategis BUMD di Provinsi Bengkulu adalah :

1. Penguatan struktur BUMD;
2. Keterbatasan sumber permodalan;

   Dalam rangka memenuhi tuntutan masyakat yang semakin meningkat dan semakin kompleks baik dalam hal pelayanan dasar maupun pelayanan umum lainnya, maka diperlukan penguatan dari sisi permodalan. BUMD diharapkan tidak selalu bergantung pada penyertaan modal Daerah, melainkan juga mencari sumber pendanaan lain. Terkait dengan hal tersebut, belum semua BUMD mampu secara mandiri mencari sumber pendanaan lain.
3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);

   Kebutuhan SDM yang berkualitas dalam rangka pengurusan BUMD masih belum dapat terpenuhi. Hal ini akan mempengaruhi kinerja BUMD, termasuk diantaranya adalah kemampuan BUMD dalam menghasilkan laba, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi jumlah setoran dividen mereka kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Optimalisasi aset BUMD;

   Selain penyertaan modal berupa uang, beberapa BUMD juga menerima penyertaan modal berupa aset tanah dan/atau bangunan (inbreng). Terkait dengan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian dari penyertaan inbreng tersebut masih bermasalah secara hukum, sehingga mengakibatkan BUMD kesulitan melakukan optimalisasi aset. Pada akhirnya, aset tersebut bukan menjadi sumber pendapatan, namun justru menjadi beban bagi BUMD.
5. Regulasi pengurusan BUMD;

Regulasi yang ada saat ini dipandang masih belum memadai sebagai pedoman bagi BUMD untuk melaksanakan pengelolaan dan pengurusan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

6. Inovasi bisnis

   Kemampuan beradaptasi dengan teknologi terkini, regulasi-regulasi terbaru, kecenderungan peralihan pola produksi dan konsumsi serta perubahan-perubahan lain sangat diperlukan dalam menghadapi lingkungan bisnis dan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi bisnis sangat dibutuhkan oleh BUMD agar dapat bertahan dan berkembang diantara para pesaing lain.

Untuk itu, upaya pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu, agar mampu produktif dalam peningkatan PAD, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis;

   Perwujudan pengembangan BUMD dimulai dari proses konsolidasi yang efektif untuk memperkuat struktur permodalan, SDM, dan bisnis. Restrukturisasi BUMD tersebut perlu dilakukan melalui proses internal dan eksternal. Di lingkup internal, proses restrukturisasi dilakukan melalui pembinaan aksi korporasi dengan melihat potensi BUMD yang bersangkutan, meliputi kondisi keuangan, SDM, dan manajemen. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan proses seleksi terhadap calon Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD. Kedepan, proses seleksi ini diharapkan dapat terlaksana lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga berupaya melakukan optimalisasi kinerja BUMD dengan melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan secara rutin melakukan evaluasi laporan realisasi RKAP dimaksud, baik laporan keuangan triwulanan, semesteran, maupun tahunan.

   Di tingkat eksternal, proses restrukturisasi perlu didukung dengan kebijakan serta regulasi yang jelas, sehingga dapat meminimalkan terjadinya benturan maupun komplikasi dalam pelaksanaan restrukturisasi dimaksud. Pemerintah Provinsi

Bengkulu telah memiliki regulasi terkait pengelolaan dan pengawasan BUMD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

2. Meningkatkan sinergitas dan kemitraan BUMD;

   Mempertimbangkan keterbatasan permodalan serta kualitas SDM yang ada, maka penting bagi BUMD untuk melakukan sinergitas dan kemitraan antar BUMD atau dengan institusi lain dalam rangka memperluas pasar dan memperkuat bisnisnya. Melalui kemitraan, nantinya akan dapat dikembangkan berbagai bentuk kerjasama yang saling mengisi dan saling memperkuat semua pihak. Namun demikian, kemitraan tersebut hanya dapat berjalan apabila dilandasi dengan kepercayaan diantara semua pihak. Terkait dengan hal ini, maka perlu dikembangkan proses komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan dan merawat kepercayaan tersebut.

3. Melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha;

   Ekspansi merupakan strategi memperbesar dan memperluas bisnis, yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, dan rekruitmen SDM. Dalam pengembangan BUMD 5 (lima) tahun mendatang, ekspansi merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan bisnis. Selain itu, ekspansi juga dapat membantu mencapai sasaran Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Diversifikasi merupakan usaha penganekaragaman produk atau lokasi usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan ruang-ruang baru dalam pasar, dan juga untuk kerjasama dengan lembaga atau institusi bisnis lain, baik sesama BUMD maupun non BUMD.

4. Memperluas sumber permodalan BUMD;

   Perluasan sumber permodalan dilakukan melalui pemupukan cadangan modal serta mencari investor strategis. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukanterkait dengan hal ini antara lain dengan melakukan konsolidasi BUMD agar dapat memanfaatkan permodalan secara efektif, fokus dan terarah, melakukan evaluasi pengelolaan seluruh aset BUMD sehingga

bisa dilihat kekuatan permodalan yang ada, memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan efisiensi dan pemasaran produk, serta meningkatkan kualitas kelembagaan BUMD sehingga bisa diminati investor.

Sebagai upaya perluasan sumber permodalan juga dimungkinkan adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam struktur kepemilikan saham BUMD Provinsi Bengkulu, dengan syarat kepemilikan saham Pemerintah Provinsi harus minimal 51 % dari total kepemilikan saham BUMD, mengacu kepada hasil RUPS serta tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

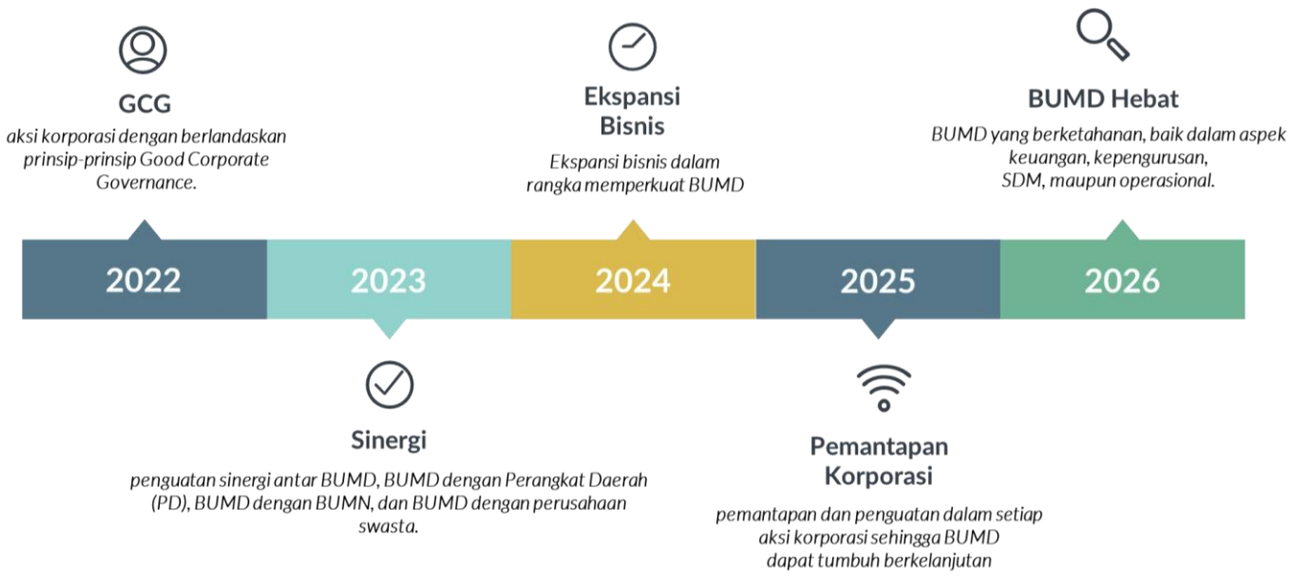
5. Meningkatkan pemberdayaan BUMD;

   Pemberdayaan BUMD dimaksudkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD. Kualitas tersebut akan meningkat apabila didukung oleh SDM dan sistem yang berkualitas. Strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan meningkatkan literasi manajemen resiko BUMD, memperkuat sistem dan manajemen mutu internal BUMD, melakukan *benchmarking* BUMD, membangun kompetisi yang sehat antar BUMD dengan *Key Performance Indicator* (KPI) yang rasional, terukur dan handal, serta menyusun regulasi yang pro BUMD.

6. *Reinventing* BUMD;

   Dilakukan melalui upaya-upaya terstruktur didukung study kelayakan bahkan jika harus melakukan penjualan aset perusahaan jika itu dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD

Gambar 3.29
Arah Kebijakan Pengembangan BUMD
di Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026



Arah kebijakan pengembangan BUMD di Provinsi Bengkulu dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan Pengembangan BUMD Tahun 2022;

   Pengembangan BUMD pada tahun 2022 diarahkan untuk pelaksanaan aksi korporasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Aksi korporasi tersebut meliputi pengembangan bisnis, pembinaan SDM, pengembangan struktur kelembagaan, pengembangan teknologi informasi, pengembangan struktur bisnis, serta pengembangan lain yang berkaitan dengan pengembangan BUMD. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Konsolidasi dalam rangka pemetaan awal atas kualitas dan kapasitas SDM BUMD;
   b. Evaluasi kinerja BUMD periode sebelumnya, dan identifikasi kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi berlandaskan prinsip GCG;
   c. Merancang sistem teknologi informasi antar BUMD yang akan dibutuhkan untuk mendukung GCG BUMD;
   d. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset BUMD serta penataan menggunakan manajemen aset yang handal;
   e. Evaluasi dan identifikasi pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD;

f. Evaluasi dan identifikasi manajemen resiko yang berpedoman pada prinsip-prinsip GCG;

g. Evaluasi perjanjian kerjasama BUMD agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG; dan

h. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi bisnis BUMD dan penyusunan skema bisnis antar BUMD melalui kerjasama yang saling menguntungkan.

2. Arah Kebijakan Pengembangan BUMD Tahun 2023;

Pengembangan BUMD pada tahun 2023 diarahkan untuk melakukan penguatan sinergi antar BUMD, BUMD dengan Perangkat Daerah (PD), BUMD dengan BUMN, dan BUMD dengan perusahaan swasta. Strategi yang akan dilakukan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan dan pendidikan;

b. Peningkatan sinergitas dalam rangka kesiapan menuju format restrukturisasi kelembagaan BUMD;

c. Implementasi awal sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung sinergitas dan kerjasama antar BUMD; Penyusunan pola pengelolaan aset BUMD dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG melalui sinergi antar BUMD dan non BUMD;

d. Penyusunan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD;

e. Pencapaian kinerja keuangan yang lebih *prudent* melalui evaluasi dan identifikasi sistem manajemen resiko melalui sinergi dan kerjasama;

f. Revitalisasi perjanjian kerjasama BUMD dengan berlandaskan prinsip GCG; dan

g. Peningkatan bisnis antar BUMD melalui penguatan sinergitas dan kerjasama yang saling menguntungkan.

3. Arah Kebijakan Pengembangan BUMD Tahun 2024;

Pengembangan BUMD pada tahun 2024 diarahkan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka memperkuat BUMD. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan terstruktur, *assessment*, dan pemagangan dalam rangka ekspansi bisnis;

b. Penguatan kesiapan menuju format restrukturisasi kelembagaan BUMD;

c. Pengembangan sistem teknologi informasi antar BUMD dalam rangka mendukung ekspansi bisnis BUMD;

d. Perbaikan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG serta dalam rangka ekspansi bisnis BUMD;

e. Pengembangan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD;

f. Pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent melalui evaluasi dan identifikasi dalam rangka ekspansi bisnis BUMD;

g. Konsolidasi berkesinambungan dan ekspansi bisnis dengan fokus perjanjian kerjasama BUMD untuk menjadikan kerjasama yangmemenuhi prinsip-prinsip GCG; dan

h. Ekpansi bisnis BUMD melalui kerjasama/ *business linkage* yang saling menguntungkan.

4. Arah Kebijakan Pengembangan BUMD Tahun 2025;

Pengembangan BUMD pada tahun 2025 diarahkan untuk melakukan pemantapan dan penguatan dalam setiap aksi korporasi sehingga BUMDdapat tumbuh berkelanjutan. Pada tahun tersebut, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD melalui pelatihan terstruktur, assessment dan pemagangan;

b. Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui penyiapan kelembagaan BUMD untuk dilakukan restrukturisasi;

c. Pemantapan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kerjasama antar BUMD;

d. Pemantapan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG;

e. Pemantapan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu determinan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan;

f. Pemantapan sistem manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian kinerja keuangan yang lebih *prudent*;

g. Pemantapan dan peningkatan perjanjian kerjasama BUMD untuk menjadikan kerjasama yang memenuhi prinsip-prinsip GCG;

h. Pemantapan bisnis antar BUMD melalui kerjasama/ *business linkage* yang saling menguntungkan.

5. Arah Kebijakan Pengembangan BUMD Tahun 2026;

Pengembangan BUMD pada tahun 2026 diarahkan untuk menjadi BUMD yang berketahanan, baik dalam aspek keuangan, kepengurusan, SDM, maupun operasional. Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Terciptanya SDM BUMD sesuai dengan formasi yang dibutuhkan untuk mendukung BUMD yang berketahanan;

b. Restrukturisasi kelembagaan BUMD sesuai dengan struktur yang dibutuhkan dalam konsolidasi BUMD untuk mendukung BUMD berketahanan;

c. Integrasi sistem teknologi informasi yang handal untuk membantu kerjasama BUMD dalam mendukung BUMD berketahanan;

d. Implementasi pola pengelolaan aset yang berkelanjutan dan berketahanan terhadap perkembangan teknologi kekinian untuk mewujudkan aset BUMD yang lebih bermanfaat;

e. Implementasi pola investasi dan divestasi dalam rangka menciptakan keuangan BUMD yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berketahanan;

f. Implementasi sistem manajemen resiko yang lebih selektif dalam rangka mendukung ketahanan kinerja keuangan yang lebih *prudent*;

g. Implementasi perjanjian kerjasama BUMD secara profesional dan proporsional sehingga meningkatkan ketahanan BUMD; dan

h. Pengelolaan bisnis antar BUMD yang berkelanjutan dan saling menguntungkan guna mewujudkan BUMD yang berketahanan.

Secara lebih lebih spesifik apabila dalam perencanaan sebagai akibat dari tuntutan dinamika pembangungan memerlukan pembentukan BUMD Baru maka :

1. Sangat dimungkinkan, mengingat tujuan pembentukan BUMD adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan daerah (seperti : isu pangan, penanganan limbah, farmasi, keuangan Syariah dan lain sebagainya);
2. Mengacu karakteristik dan potensi daerah;
3. Mengacu ke mekanisme pembentukan BUMD sebagaimana diatur di peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Pembentukan BUMD baru merupakan salah satu bentuk ekspansi dan diversifikasi usaha khususnya dalam rangka perkuatan posisi BUMD atau produk BUMD di pasar.

PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2021

BAB IV

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

PROVINSI BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Permasalahan– permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi di Provinsi Bengkulu sebagaimana telah disajikan pada BAB II, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

4.1.1. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi Cenderung Stagnan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu tumbuh fluktuaktif selama kurun waktu tahun 2017-2020. Pada tahun 2017, ekonomi Bengkulu tumbuh sebesar 4,99 persen dan relatif stagnan sebesar 4,96 persen pada tahun 2019. Dalam kurun waktu tersebut, ekonomi Bengkulu masih berada dibawah capaian nasional. Hal ini

menggambarkan bahwa kontribusi Bengkulu masih cukup kecil dalam pertumbuhan ekonomi Nasional.

Pada tahun 2019 perekonomian Provinsi Bengkulu tumbuh sebesar 4,96 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, angka ini masih lebih rendah karena pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,02 persen. Pada kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 dan 2018 pertumbuhan ekonomi mengalami percepatan, sedangkan pada 2017 dan 2019 mengalami perlambatan. Kondisi eksternal seperti krisis dan ketidakpastian ekonomi global dimana salah satu indikatornya adalah melemahnya harga komoditas utama global seperti batubara juga turut mempengaruhi perekonomian daerah. Faktor cuaca juga mempengaruhi kategori Pertanian, padahal kategori tersebut merupakan kategori dengan kontribusi terbesar. Pengaruh masyarakat dalam perekonomian juga mempengaruhi perekonomian daerah, langsung maupun tidak langsung.

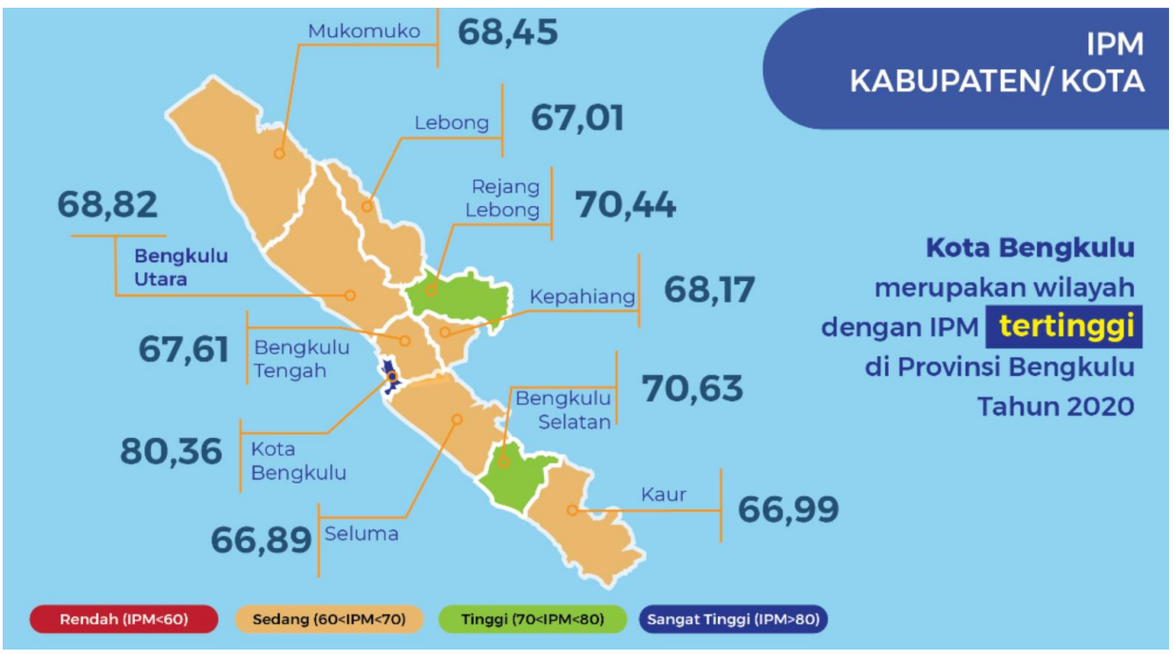
Sejak tahun 2017, Ekonomi Bengkulu selalu berada dibawah rata-rata nasional. Terlebih, pada tahun 2020-2021, akibat pandemic Covid-19 dan dampaknya, ekonomi Bengkulu tertekan sangat dalam hingga mencapai minus 0,02% pada tahun 2020. Dampak pandemic Covid-19 mungkin akan terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang. *Baseline* capaian pembangunan Bengkulu dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dimulai pada titik yang sangat rendah. Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu dalam FGD RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 menyampaikan bahwa data *Economic Recovery Index* Provinsi Bengkulu masih cukup rendah yaitu sebesar 49, masih berada dibawah rata-rata nasional yang sebesar 56. Bahkan ERI Bengkulu tersebut berada pada posisi terendah di Sumatera. Aspek yang masih berkontribusi terhadap rendahnya ERI Bengkulu adalah *Economic Resilience* yang sebesar 41,55 dan *Absortive Capacity* yang sebesar 40,11.

b. Pembangunan Manusia yang Belum Optimal

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2016-2020 terus tumbuh, namun melambat. IPM Provinsi Bengkulu selama kurun waktu tersebut selalu dibawah capaian rata-rata IPM nasional. Pada tahun 2018, IPM Provinsi Bengkulu baru berhasil masuk dalam kategori IPM TINGGI yang sebesar 70,64. Mengingat SDM merupakan

salah satu modal pembangunan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Dengan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, perlu mendorong Provinsi Bengkulu untuk dapat memanfaatkan kondisi ini menjadi potensi dan bukan menjadi hanya masalah. Bila ditelaah sampai ke kabupaten/kota, sebaran IPM pada tahun 2020 menunjukkan terdapat 7 (tujuh) kabupaten yang IPM-nya masuk dalam KATEGORI SEDANG dan hanya 1 kota yang IPM-nya berada di atas capaian provinsi.

Gambar 4.1
IPM Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

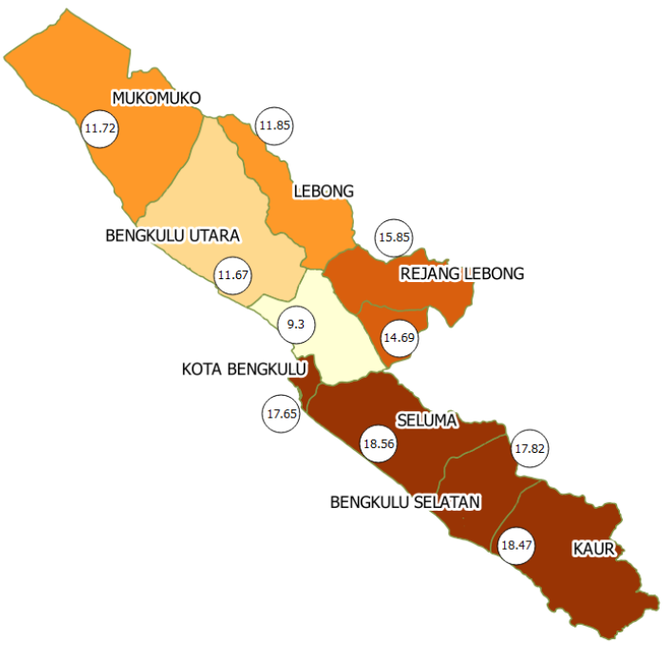


c. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Belum Optimal

Pemenuhan infrastruktur dasar di Provinsi Bengkulu masih belum memenuhi kebutuhan dan akses masyarakat. Infrastruktur dasar tersebut adalah air minum layak, sanitasi layak dan perumahan layak. Akses masyarakat terhadap rumah layak huni, sanitasi layak dan air minum layak masih di bawah nasional. Persentase rumah layak huni, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan persentase rumah tangga dengan air minum layak tahun 2020 berturut-turut sebesar 53,3%, 78,1% dan 62,47% dan masih berada di bawah rata-rata nasional.

d. Kemiskinan yang Masih Cukup Tinggi

Pada bulan Maret 2021, persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu mencapai 15,22 persen, turun 0,19 persen poin dari Maret 2020. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu pada Maret 2021 mencapai 306.000 orang. Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 3.420 orang dibandingkan Maret 2020. Sementara dengan September 2020 jumlah penduduk miskin relatif tetap. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 1.913 orang, begitu juga di daerah perdesaan naik sebesar 1.507 orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 14,77 persen menjadi 15,10 persen. Begitu juga dengan perdesaan mengalami peningkatan dari 15,16 persen menjadi 15,28 persen.



Gambar 4.2
Kemiskinan Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2020

Kemiskinan di Provinsi Bengkulu terus menunjukan tren penurunan jika dilihat dari tahun 2014-2021. Namun, kontribusi kemiskinan Bengkulu terhadap kemiskinan nasional masih cukup tinggi. Selama periode tersebut, kemiskinan di Provinsi Bengkulu terus berada di atas capaian kemiskinan nasional.

Tabel 4.1
Angka Kemiskinan Provinsi Bengkulu Tahun 2014 – 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Provinsi Bengkulu	17,48	17,88	17,32	16,45	15,43	15,23	15,03	15,22
Nasional	10,96	11,13	10,70	10,04	9,82	9,22	9,78	10,14

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, SIPD diolah, 2020.

Kinerja penurunan kemiskinan di Provinsi Bengkulu sudah mengarah keperbaikan tingkat kesejahteraan. Namun, penurunan kemiskinan di

Provinsi Bengkulu, masih menempatkan Provinsi Bengkulu sebaga provinsi termiskin kedua di Sumatera pada tahun 2021. Lebih lanjut, data Tahun 2020 menunjukkan ada 4 kabupaten/kota di Bengkulu memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Bengkulu dan nasional yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Hanya ada 1 kabupaten yang tingkat kemiskinannya berada di bawah provinsi dan nasional, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu berfokus kepada program-program yang langsung dapat mengintervensi indikator kemiskinan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Berdasarkan data terserbut, tergambar bahwa program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih belum optimal dan belum terintegrasi.

e. Konektivitas dan Pengembangan Infrastruktur Strategis Masih Terbatas

Konektivitas masih menjadi tantangan bagi Provinsi Bengkulu. Belum optimalnya integrasi konektivitas intrawilayah dan antar-wilayah baik darat, laut dan udara dan belum optimalnya hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa. Secara geografis, Bengkulu terletak di sisi barat Pulau Sumatera, yang berbatasa langsung dengan Samudera Hindia di sisi barat, dan dipagari oleh jajaran Bukit Barisan di sebelah timur. Bengkulu juga dikelilingi oleh kawasan-kawasan hutan baik itu Hutan Lindung maupun Taman Nasional, seperti Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Taman Nasiona Bukit Barisan Selatan. Aksesibilitas dari dan menuju Bengkulu melalui darat hanya dilalui melalui 5 (titik) pintu keluar yaitu Kabupaten Mukomuko-Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rejang Lebong-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kepahiang-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan-Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kaur-Provinsi Lampung. Posisi Provinsi Bengkulu yang terisolir memerlukan upaya ekstra untuk membuka konektivitas baik dari sisi darat, laut maupun udara. Pembukaan ruas jalan baru, keterhubungan dengan jaringan tol dan jalur kereta api Trans Sumatera, pengembangan pelabuhan laut dan Bandara merupakan prioritas untuk pengembangan ekonomi Provinsi Bengkulu.

f. Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata Masih Belum Optimal

Bengkulu memiliki banyak sumber daya alam yang menjadi komoditas unggulan daerah. Sawit, karet, kopi, perikanan merupakan komoditas unggulan yang berpengaruh cukup besar dalam perekonomian Bengkulu. Namun kontribusi komoditas tersebut masih minim dan belum optimal. Hal ini dikarenakan komoditas unggulan daerah belum memiliki nilai tambah yang baik, sehingga belum memberikan kontribusi yang optimal dalam pertumbuhan ekonomi Bengkulu.

Selain itu, sektor pariwisata juga potensial untuk dikembangkan namun belum dapat dikelola dengan baik. Bengkulu memiliki potensi dan sumberdaya wisata yang belum memberikan manfaat yang optimal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto relatif kecil. Permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait dengan belum tersedianya konsep dan arahan implementatif pembangunan pariwisata Provinsi Bengkulu, sehingga upaya-upaya pembangunan cenderung tidak terintegrasi, diperlukan satu rencana yang komprehensif dan implementatif untuk setiap aksi pembangunan pariwisata dalam jangka waktu tertentu. Disamping itu, permasalahan lain disektor wisata adalah terkait dengan aksesibilitas yang terbatas, terbatasnya pengelolaan dan manajemen atraksi, terbatasnya kualitas SDM pariwisata serta promosi dan pemasaran objek wisata potensial yang belum optimal.

4.1.2. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Permasalahan pendidikan di Provinsi Bengkulu antara lain:

1. Tingkat Pendidikan yang masih rendah, pada tahun 2020 baru mencapai 8,94 tahun;
2. Masih banyak penduduk usia sekolah yang belum dapat mengakses pendidikan. Pada tahun 2019 Masih terdapat sebanyak 0,17% penduduk usia 7-24 yang sama sekali belum sekolah, dan 24,61% penduduk pada usia tersebut yang tidak lagi bersekolah;
3. Masih banyak ruang kelas dalam kondisi yang tidak baik;

4. Masih banyak sekolah yang akreditasinya masih rendah dan belum terakreditasi. Pada tahun 2020, untuk jenjang SMA masih terdapat 5% sekolah yang belum terakreditasi dan jenjang SMK sebanyak 9%;
5. Masih banyak guru yang belum sertifikasi. Pada tahun 2020 sebanyak 50,5% guru SMA belum sertifikasi dan 58,79% guru SMK belum sertifikasi;
6. Belum link and match lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha;

b. Kesehatan

Sektor kesehatan berkontribusi penuh dalam penyiapan sumber daya manusia yang sehat, produktif dan mampu berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berusaha optimal. Namun, pembangunan kesehatan masih menyisakan permasalahan pokok, yaitu:

1. Angka kesakitan yang masih tinggi mencapai 29,77% pada tahun 2019;
2. Masih banyak balita yang mengalami stunting yaitu sebesar 8,13% pada tahun 2020;
3. Masih banyak balita yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Pada tahun 2019, baru sebesar 48,22% balita yang mendapat imunisasi lengkap;
4. Masih banyak Puskesmas dengan status Akreditasi Dasar yaitu sebanyak 70 puskesmas dari 179 puskesmas pada tahun 2019;

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar. Hal tersebut mengacu pada persoalan perlu ditingkatkannya akses dan kualitas jaringan jalan, rendahnya kualitas bangunan, belum optimalnya pemanfaatan ruang dengan aturan tata ruang, serta belum optimalnya kelayakhunian. Permasalahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:

1. Konektivitas daerah yang masih rendah;

2. Masih banyak jalan provinsi dalam kondisi kurang baik yaitu sebesar 31,86% pada tahun 2020;
3. Masih banyak jaringan irigasi dalam kondisi kurang baik, yaitu sebesar 33% pada tahun 2020;
4. Masih banyak rumah tangga yang tidak terlayani pengolahan persampahan yaitu sebesar 51,51% pada tahun 2020;
5. RTRW belum menjadi acuan/pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan atau pelaksanaan pembangunan oleh seluruh pemangku kepentingan. Berdasarkan peninjauan kembali RTRW Provinsi Bengkulu sebagian besar indikasi program belum dilaksanakan, dan disamping itu terdapat pelaksanaan pemanfaatan ruang (pembangunan) yang tidak tercantum dalam RTRW Provinsi Bengkulu

d. Permukiman dan Perumahan Rakyat

Belum optimalnya akses pemukiman layak huni menjadi masalah pokok yang dihadapi oleh urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni baru mencapai 53,33% tahun 2020;
2. Persentase rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak baru mencakup 78,10% tahun 2020;
3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak baru mencapai 62,47% tahun 2020;

e. Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Keamanan dan ketertiban masih menjadi salah satu kendala utama Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kerawanan gangguan keamanan yang masih relatif tinggi dan masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah. Menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan pra-syarat bagi terlaksananya kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Permasalahan pembangunan daerah dalam bidang ini adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya pelanggaran terhadap Perda
2. Lemahnya pencegahan terhadap gangguan keamanan

f. Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan sosial dijalankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu warga negara, dan menjamin akses masyarakat untuk mendapat pelayanan sosial. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berusaha maksimal dalam memberikan layanan sosial. Namun, pembangunan sosial di Provinsi Bengkulu masih memiliki beberapa permasalahan pokok, yaitu tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Masalah pokok tersebut dapat disebabkan oleh beberapa masalah berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan pelayanan sosial dalam menjangkau penerima layanan;
2. Rendahnya pendapatan PMKS;
3. Belum optimalnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam;
4. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana yang sebesar 153,42 pada tahun 2019;

4.1.2.2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Ketenagakerjaan

Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar tenaga kerja adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja.

Pada Februari 2021, TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,04 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 1,62 persen.

Dibandingkan Februari 2020, TPT hampir semua kategori pendidikan mengalami peningkatan kecuali untuk tamatan Diploma I/II/III dan tamatan SMK yaitu turun sebesar 6,04 persen poin dan 1,54 persen poin. Namun jika dibandingkan Agustus 2020 masing-masing kategori pendidikan mengalami penurunan, diantaranya SD ke bawah, tamatan SMK, dan tamatan Diploma I/II/III masing-masing sebesar 0,62 persen poin, 3,09 persen poin dan 1,20 persen poin. Selain mengalami penurunan, juga ada beberapa jenjang

pendidikan yang mengalami peningkatan.Peningkatan paling besar adalah pada tamatan Universitas yaitu sebesar 0,98 persen poin.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan peran perempuan pada sektor formal di Provinsi Bengkulu masih relatif rendah. Selain itu, perempuan juga relatif tidak mempunyai akses yang setara dalam pendidikan dan mengakses pekerjaan-pekerjaan di sektor formal. Oleh karena itu, kesetaraan dan kesejahteraan perempuan merupakan isu krusial di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan analisis singkat tersebut, permasalahan pembangunan perempuan adalah pada sektor pemberdayaan perempuan yang masih cukup moderat yaitu diukur dari IDG Tahun 2020 yang mencapai 70,48, disebabkan oleh:

1. Rendahnya kapasitas SDM perempuan
2. Belum optimalnya kecakapan hidup perempuan
3. Belum optimalnya kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak
4. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media

c. Ketahanan Pangan

Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar ketahanan pangan adalah perlu ditingkatkannya ketahanan pangan yang di ukur dari Skor PPH pada tahun 2020 adalah sebesar 82 untuk PPH Ketersediaan Pangan dan 82,6 untuk PPH Konsumsi Pangan. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut:

1. Terbatasnya stok cadangan pangan daerah
2. Panjangnya rantai distribusi pangan
3. Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal non-beras

d. Lingkungan Hidup

Masalah pokok yang dihadapi urusan wajib non-pelayanan dasar lingkungan hidup adalah semakin menurunnya tingginya pencemaran air dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Air mencapai sebesar 50,83%, sedangkan lahan kritis masih sebesar 363 ribu hektar. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan;
2. Menurunnya kualitas udara ambien akibat emisi kendaraan bermotor dan cerobong industri, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik;
3. Menurunnya fungsi layanan jasa ekosistem DAS Bengkulu yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi, dan meningkatnya alih fungsi lahan produktif;
4. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem, dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan;
5. Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana.

e. Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan wajib pemerintahan yang penting dalam pembangunan daerah. Salah satu kebutuhan mendasar yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah akurasi data kependudukan. Pelaksanaan urusan ini masih terdapat permasalahan, yaitu masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan. Pada tahun 2020, penduduk yang memiliki Akta Kelahiran baru mencapai 97,83% dan penduduk usia anak yang memiliki KIA baru mencapai 49,5%. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM jemput bola di kabupaten/kota, menyebabkan proses pelayanan dokumen administrasi kependudukan terhambat, dalam menjangkau daerah terpencil/pelosok;
2. Keterbatasan SDM ASN yang berkompeten menjadi administrator database;
3. Kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan masih belum merata. Sehingga perlu dilakukan pembinaan yang lebih intensif, untuk meminimalkan terjadinya kasus pungli di area pelayanan;
4. Aksesibilitas jaringan komunikasi data dari kabupaten/kota yang akan melakukan perekaman kurang merata;

5. Sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di kabupaten/kota banyak yang rusak dan tidak layak operasi;
6. Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah;

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun Provinsi Bengkulu tahun 2020 baru mencapai sebesar 0,6417. Selain itu pada tahun 2020 masih terdapat 290 desa tertinggal dan 5 desa sangat tertinggal di Provinsi Bengkulu. Permasalahan tersebut diakibatkan :

1. Belum sinergisnya program/kegiatan pembangunan daerah berlokasi desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu maupun dengan kabupaten/kota, masih bersifat parsial/sektoral;
2. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan antara lain: 1) belum seluruh desa memiliki BUMDes; 2) masih adanya desa blankspot; dan 3) belum optimalnya pemanfaatan potensi desa untuk mendorong OVOP (One Village One Product);
3. BUMDes belum dioptimalisasi sebagai katalis perekonomian desa;
4. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes belum memahami pengelolaan BUMDes (pelaksana teknis hingga kepala desa);
5. Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan IT untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa;
6. Belum optimalnya pembangunan desa mencakup: 1) peningkatan pelayanan dasar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan; 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 4) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna; dan 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa;
7. Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam bentuk interaksi secara langsung pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh mulai berubahnya bentuk partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;

8. Belum optimalnya penganggaran CSR dan crowdfunding untuk memberikan alternatif metode penganggaran pada program-program perdesaan melalui dana CSR dan penggalangan dana melalui jaringan internet; dan
9. Lemahnya pengelolaan profil desa dan kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan usaha pemerintah untuk mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk ke arah pertumbuhan yang diinginkan melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Masalah pokok yang terjadi pada sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu Belum optimalnya akses pelayanan KB. Pada tahun 2020, TFR mencapai 2,24 yang berarti setiap pasangan memiliki anak lebih dari 2 orang, *unmeet need* KB yang mencapai 7,17% dan angka pemakaian kontrasepsi yang baru mencapai 65,09%. Permasalahan pokok tersebut dapat disebabkan oleh beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi (alkon);
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga);
3. Belum optimalnya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi;

h. Perhubungan

Penyelenggaraan bidang urusan perhubungan dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu masih rendahnya konektivitas perhubungan antar daerah di Provinsi Bengkulu. Permasalahan tersebut terjadi karena kapasitas dan kualitas pelabuhan dan banda udara belum memadai serta terbatasnya akses layanan transportasi umum yang sesuai standar kelayakan.

i. Komunikasi dan Informasi

Capaian pembangunan bidang urusan komunikasi dan informasi sudah baik. Indeks SPBE terus meningkat menjadi sebesar 2,9 pada tahun 2020 dan Indeks keterbukaan Informasi Publik meningkat menjadi 88,2 pada tahun 2020. Namun masih ada beberapa permasalahan dibidang ini, meliputi:

1. Penerapan *e-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum ditindaklanjuti dengan kebijakan/aturan hukum daerah;
2. Belum ada rencana induk/strategic plan/masterplan/blueprint teknologi informasi;
3. Belum adanya standar pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem Informasi/website, data, serta infrastruktur TI;
4. Belum adanya standar keamanan informasi;
5. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan TI;
6. Kurangnya kuantitas, kualitas dan peningkatan kompetensi SDM pengelola TI;
7. Keterbukaan informasi publik mh harus terus ditingkatkan;
8. Website opd banyak yang tidak aktif;
9. Distribusi jaringan internet terutama untuk opd perlu dioptimalkan;
10. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan terhadap akses informasi yang lebih beragam dan cepat, namun kelemahannya berdampak pada akurasi dari informasi tidak menjadi prioritas. Tantangan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk kembali menata pengelolaan komunikasi dan informasi; dan
11. Belum ada regulasi terbaru seiring dengan perkembangan teknologi informasi tentang pengembangan kelompok informasi masyarakat, pembinaan komunitas komunikasi dan informatika serta pembinaan media tradisional.

j. Koperasi dan UMKM

Capaian pembangunan bidang urusan koperasi dan UMKM sudah baik, namun masih terdapat beeberapa permasalahan yang dihadapi koperasi dan usaha kecil dan menengah (KUKM), yaitu:

1. Akses pembiayaan bagi KUKM khususnya terhadap dunia perbankan masih minim;
2. Masih rendahnya kucuran kredit yang diterima pelaku UMKM;

3. Masih banyak koperasi yang berstatus tidak aktif dan belum bersertifikat NIK. Pada tahun 2020, koperasi yang belum memiliki NIK ada sebanyak 532 koperasi.
4. Persentase koperasi aktif yang masih terbilang kecil baru sebesar 1.947 koperasi dari 2.771 koperasi;
5. Menurunnya Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha

k. Penanaman Modal

Dalam urusan penanaman modal, bedasarkan hasil evaluasi capaian sudah cukup baik yang ditandai dengan meningkatnya nilai investasi dari 1,6 triliun pada tahun 2016 menjadi 8,16 triliun pada tahun 2020. Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

1. Realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata masih terkonsentrasi di daerah Kota Bengkulu;
2. Belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN; dan

Adapun akar permasalahan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu:

1. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata;
2. Belum sesuainya kualifikasi angkatan kerja lokal dengan pasar tenaga kerja; dan
3. Dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha.

l. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dna olahraga di Provinsi Bengkulu sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Rendahnya partisipasi pemuda Bengkulu dalam lapangan dan kesempatan kerja;
2. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan
3. Belum optimalnya penanganan kesetaraan dan diskriminasi gender.
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga yang ditandai dengan rendahnya persentase penduduk Bengkulu yang melakukan kegiatan olahraga;

5. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (Sekolah Khusus Olahraga, PPLP, dan Puslatda) guna pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
6. Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan;
7. Belum adanya sinergi antara industri olahraga, pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga dan perekonomian di Bengkulu;
8. Masih rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan;
9. Terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga di Bengkulu yang memenuhi standar nasional dan internasional; dan
10. Kurangnya sarana terbuka publik yang dapat digunakan untuk berolahraga di kota/kabupaten di Bengkulu.

m. Statistik

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan statistik yaitu:

1. Masih rendahnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral
2. Belum maksimalnya pengelolaan data di perangkat daerah dan kabupaten/kota sehingga supply data ke provinsi masih rendah;
3. Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurangnya SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi; dan
4. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasial.

n. Persandian

Pada saat membahas tentang persandian, maka tidak lepas dengan aspek keamanan informasi sebab dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) maka ruang lingkup persandian saat ini tidak hanya sekedar pengiriman dan penerimaan surat melalui radiogram atau sejenisnya saja tapi lebih luas lagi ke arah pengamanan informasi. Indeks Persandian Provinsi Bengkulu pada

tahun 2020 baru mencapai sebesar 66,35%. Saat ini berkenaan dengan persandian terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran aparatur maupun masyarakat akan pentingnya keamanan informasi (security awarness) antara lain ditandai dengan makin maraknya informasi yang disebarkan kepada masyarakat melalui dokumen-dokumen pemerintah yang diragukan keasliannya, dan penyebaran informasi di masyarakat yang belum diketahui kebenarannya;
2. Sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi yang relatif masih terbatas, yaitu:
    a. Belum mempunyai perangkat pendukung kontra penginderaan;
    b. Jamming yang tersedia terbatas jumlahnya (1 jamming); dan
    c. Jaring komunikasi sandi belum dilaksanakan.
    d. Belum ada ruangan Security Operating Centre (SOC) yang dapat memonitor lalu lintas data/informasi di Bengkulu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak lazim atau mengantisipasi adanya serangan dari pihak luar.
3. Permasalahan VA (vurnerability assesment) pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi;
4. Pengamanan aset-aset dan ruangan pimpinan yang perlu disterilkan dari upaya-upaya penyadapan informasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab masih relatif terbatas jumlahnya;
5. Pengamanan dokumen-dokumen penting dari pemalsuan dan peningkatan upaya pelayanan lebih efektif dan efisien belum optimal;
6. Sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu masih sedikit;

o. Kebudayaan

Secara umum, capaian urusan kebudayaan Provinsi Bengkulu sudah baik yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan yang mencapai sebesar 59,95 tahun 2018 yang lebih tinggi dari capaian nasional. Namun masih terdapat beberapa kendala yaitu:

1. Masih rendahnya perlindungan terhadap budaya lokal;
2. Masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal;

3. Kurang optimalnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri;
4. Kuatnya pengaruh budaya asing terhadap budaya lokal;
5. Kurangnya penguatan pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal;
6. Belum optimalnya apresiasi terhadap kebudayaan lokal;
7. Terbatasnya infrastruktur perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs sejarah di Provinsi Bengkulu;

p. Perpustakaan

Permasalahan di bidang perpustakaan dapat dilihat dari aspek kelembagaan teknis dan aspek pembudayaan kegemaran budaya masyarakat. Secara umum permasalahan di bidang perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan kelembagaan teknis perpustakaan di Bengkulu, yaitu:
    a. Penyelenggaraan perpustakaan belum mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan yang meliputi pengembangan koleksi;
    b. SOTK, sarana dan prasarana, anggaran, layanan, bahan perpustakaan, tenaga perpustakaan, kerja sama, penyelenggaraan perpustakaan, dan pengelolaan perpustakaan;
    c. Perpustakaan Umum kabupaten/kota masih ada yang belum memiliki prasarana gedung permanen;
    d. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Perpustakaan baik tenaga Fungsional Pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan; dan
    e. Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau daerah tertinggal, terjauh dan terluar.
2. Permasalahan pembudayaan kegemaran membaca di Bengkulu, yaitu:
    a. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan;
    b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatanperpustakaan sebagai tempat berkegiatan;
    c. Kurangnya promosi dan publikasi pemanfaatan perpustakaandalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat;

d. Gerakan membaca dalam kegiatan literasi belum masif dan masihbersifat parsial belum terintegrasi; dan

e. Pemaknaan membaca masih berorientasi kepada baca dan tulis belum kepada pemaknaan holistik dan komprehensif.

q. Kearsipan

Urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar masih dilaksanakan belum optimal. Hal ini ditandai dengan akses penggunaan arsip belum efektif; penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif; pengelolaan arsip perangkat daerah atau pencipta arsip belum tertib; dan pemahaman sumber arsip bersejarah masih rendah. Adapun akar masalah dari permasalahan tersebut yaitu ketersediaan fasilitas dan sumber daya kearsipan yang belum layak sesuai standar kearsipan, serta keterbatasan sumber informasi arsip kesejarahan.

4.1.2.3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan di bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang belum mencapai 100 yaitu sebesar 99,25% pada tahun 2020. Selain itu belum maksimalnya produksi perikanan tangkap dari yang semula 67,5 ribu ton pada tahun 2017 menjadi 72,75 ribu ton pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Secara umum akar permasalahan, antara lain:

1. Eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (fish landing) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir;
2. Pelabuhan perikanan belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll);
3. Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir;
4. Masih rendahnya tingkat pengguasaan teknologi oleh nelayan;
5. Pencemaran perairan umum dan laut;
6. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan zonasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil 0-12 mil;

7. Masih belum optimalnya produksi perikanan tangkap (perbandingan data potensi dan produksi perikanan tangkap);
8. Belum maksimalnya produksi perikanan budidaya;
9. Kurangnya armada / kapal penangkap ikan (di bawah 3 GT);
10. Kurangnya sarana dan prasarana alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan;
11. Terbatasnya kapasitas SDM dan sumber daya nelayan;
12. Rendahnya akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan;
13. Kurangnya standarisasi produk pengolahan hasil perikanan;
14. Lemahnya strategi pemasaran terhadap produk olahan hasil perikanan;
15. Terbatasnya kapasitas SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan;

b. Pariwisata

Kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB yang dilihat dari sektor Konsumsi Akomodasi dan Jasa Lainnya masih cukup kecil. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pengembangan sektor pariwisata sudah sangat baik, namun masih menyisakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya pengembangan sarana prasarana destinasi wisata;
2. Kurangnya pengembangan infrastruktur pendukung wisata;
3. Kurangnya pemberdayaan kelompok sadar wisata;
4. Terbatasnya pengembangan atraksi budaya pendukung wisata;
5. Rendahnya kapasitas SDM pelaku wisata;
6. Belum optimalnya sistem pemasaran wisata berbasis teknologi;
7. Belum optimalnya sinergi kerjasama antara pelaku bisnis wisata, masyarakat dan pemerintah daerah;
8. Belum semua kabupaten/kota memiliki dokumen Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) Kabupaten/Kota;
9. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenitas pariwisata (rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan,taman, dan lain-lain);

10. Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota; dan
11. Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata.

c. Pertanian

Permasalahan pokok terkait pertanian di Bengkulu, yaitu kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun; menurunnya pertumbuhan Subsektor Tanaman Pangan; dan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian. Secara umum, akar permasalahan di bidang pertanian, yaitu:

1. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir;
2. Menurunnya luas lahan pertanian dan terganggunya ekosistem pertanian sebagai konsekuensi dari intensitas pembangunan sektor non-pertanian yang sangat tinggi;
3. Rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian;
4. Tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, serta peternakan;
5. Rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian;
6. Rendahnya regenerasi petani;
7. Rendahnya akses permodalan;
8. Kurang optimalnya pemakaian bibit unggul ternak;
9. Kurangnya sumber daya penyuluh peternakan;

d. Kehutanan

Urusan kehutanan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu. Luas lahan kritis pad atahun 2020 tercatat sebesar 363 ribu hektar dan laju Deforstasi menjadi 0,22. Permasalahan di urusan kehutanan adalah:

1. Tingkat degradasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) masih tinggi, yang disebabkan oleh perubahan tutupan lahan, akibat

alih fungsi lahan. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya lahan kritis di luas kawasan hutan;

2. Pengelolaan hutan belum optimal;
3. Rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu;

Secara umum akar permasalahan bidang kehutanan, antara lain:

1. Tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS;
2. Meningkatnya gangguan ekosistem;
3. Jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi; dan
4. Rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kinerja urusan ESDM di Provinsi Bengkulu sudah baik, dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi mencapai 99,99% pada tahun 2020. Selain itu luas lahan yang direklamasi meningkat menjadi 69,24%. Namun masih ada beberapa catatan permasalahan, yaitu :

1. Masih ditemukan aktivitas pertambangan yang tidak mengikuti kaidah usaha pertambangan yang baik (good mining practise);
2. Meningkatnya penggunaan air tanah;
3. Instalasi tenaga listrik belum terstandardisasi;
4. Belum meratanya akses terhadap layanan listrik; dan
5. Pemanfaatan energi final belum efisien dan minimnya pemanfaatan baru dan terbarukan.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) Ketidakseimbangan antara jumlah personil inspektur tambang beserta perlengkapan kerjanya dengan luas wilayah usaha pertambangan; (2) Meningkatnya penggunaan air tanah akibat air permukaan yang belum mampu memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat baik kebutuhan domestik maupun industri; (3) Belum ada perangkat untuk mensertifikasi instalasi tenaga listrik; (4) Basis data terpadu yang menjadi dasar pemberian bantuan sambungan instalasi listrik rumah tangga miskin belum sinkron antara TNP2K, PT PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah; dan (5) Keterbatasan peran pemda dalam mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan inefisiensi penggunaan energi.

f. Perdagangan

Urusan Perdagangan sudah menunjukan hasil yang baik. Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu terus mengalami surplus. Total ekspor Provinsi Bengkulu pada bulan Juni 2021 mencapai US$ 24,83 juta. Nilai ekspor ini mengalami peningkatan sebesar 81,46 persen jika dibandingkan dengan bulan Mei 2021 yang tercatat sebesar US$ 13,68 juta dan meningkat sebesar 85,66 persen apabila dibandingkan dengan bulan Juni 2020 yang tercatat US$ 13,37 juta. Pada bulan April hingga Juni 2021, tidak ada impor barang ke Provinsi Bengkulu. Nilai impor pada Juni 2021 mengalami penurunan sebesar 100 persen jika dibandingkan dengan impor pada bulan Juni 2020 yang tercatat sebesar US$ 0,21 juta. Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu bulan Juni 2021 surplus sebesar US$ 24,83 juta, sedangkan neraca perdagangan bulan Januari - Juni 2021 mengalami surplus sebesar US$ 98,88 juta.

Selain itu permasalahan lain sektor perdagangan adalah:

1. Dominasi barang impor;
2. Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;
3. Promosi produk industri lokal masih dirasa kurang;
4. Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern;
5. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar tradisional belum memadai;
6. Belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan;
7. Rendahnya kualitas sarana infrastruktur transportasi distribusi barang perdagangan;
8. Kurangnya jaringan pemasaran produk perdagangan;
9. Terbatasnya sarana prasarana perdagangan dan tertib niaga;
10. Rendahnya kualitas manajemen usaha perdagangan pasar tradisional dan pasar wisata;
11. Kurangnya akses permodalan bagi pedagang pasar tradisional dan pasar wisata;
12. Kurangnya penataan pedagang kaki lima dan asongan;

g. Perindustrian

Kontribusi sektor industri dalam PDRB Provinsi Bengkulu masih cukup rendah yaitu berkisar antara 5-6 persen. Beberapa permasalahan sektor Perindustrian adalah sebagai berikut:

1. Industri hilirisasi komoditas unggulan belum berkembang dan belum mampu menampung hasil produksi barang mentah;
2. Infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasimengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri;
3. Bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi;
4. Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri; dan
5. Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi;
6. Kurangnya akses permodalan bagi IKM;

h. Transmigrasi

Secara umum permasalahan pada bidang transmigrasi, sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi transmigran;
2. Persepsi penerimaan masyarakat lokal terhadap transmigran;
3. Pengawasan dan pendataan transmigrasi lokal; dan
4. Penguatan sistem dan pengelolaan transmigrasi.

4.1.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Kesekretariatan Daerah

Urusan kesekretariatan Daerah sudah baik yang dilihat dari meningkatnya Nilai SAKIP menjadi 68,98 pada tahun 2020 dan meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi menjadi 63,34 pada tahun 2020. Namun, urusan Kesekretariatan masih memiliki beberapa masalah yaitu:

1. Masih adanya tumpang tindih antara tugas dan fungsi sekretariat daerah dengan perangkat daerah teknis/sektoral;

2. Belum optimalnya kemampuan pelaksanaan kebijakan daerah;

b. Kesekretariatan DPRD

Permasalahan pada urusan Kesekretariatan DPRD adalah :

1. Belum optimalnya fasilitasi dalam perumusan peraturan daerah
2. Belum optimalnya fasilitasi dalam tindak lanjut aspirasi dan pengaduan masyarakat

4.1.2.5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Kinerja urusan perencanaan daerah di Provinsi Bengkulu sudah baik, dibuktikan dengan prestasi perencanaan daerah Provinsi Bengkulu sebagai Terbaik II Nasional PPD Tahun 2020. Namun, Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan perencanaan, memiliki masalah pokok berupa belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Masalah pokok tersebut dibentuk oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

1. Perencanaan sektoral pada masing-masing perangkat daerah yang belum berbasis pada perencanaan jangka menengah dan panjang daerah;
2. Ketersediaan data perencanaan pembangunan yang belum optimal;
3. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana;
4. Belum terwujudnya sinkronisasi dokumen perencanaan dengan KUA-PPAS dan APBD;
5. Belum optimalnya Tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam musrenbang ;
6. Belum optimalnya pengendalian realisasi pembangunan;

b. Keuangan

Kapasitas fiskal Provinsi Bengkulu masih cukup rendah. Berdasarkan data, peranan PAD dalam Pendapatan Daerah masih berkisar sebesar 28% (Rendah) yang berarti PAD belum signifikan dalam peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dan masih memiliki pola hubungan konsultatif (mana campur tangan pemerintah pusat

sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi). Permasalahan urusan Keuangan adalah:

1. Belum optimalnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Belum optimalnya kemampuan aparatur pelayanan pajak dan retribusi daerah;
3. Belum optimalnya fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Belum optimalnya identifikasi aset daerah yang belum memiliki kejelasan status;

c. Kepegawaian

Permasalahan urusan kepegawaian adalah:

1. Peraturan perundang-undangan masih menjadi kendala dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang aparatur. Pengadaan CPNS yang terkonsentrasi oleh pemerintah pusat menyebabkan kekurangan pegawai terutama berkaitan hal yang sifatnya teknis. E-formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkadang tidak mampu mengisi kekurangan pegawai yang dialami provinsi. Seiring dengan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memang terjadi pelimpahan pegawai yang sangat signifikan, namun penambahan tersebut tidak dapat menutupi kekurangan pegawai dalam hal teknis, mengingat hampir 80 persen pegawai yang dialih kelola ke provinsi adalah guru;
2. Reformasi birokrasi terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan. Perlu dilakukan secara khusus program-program yang menunjang reformasi birokrasi sehingga amanat undang-undang tentang harus terlaksananya reforasi birokrasi bisa tercapai;
3. Belum adanya perencanaan manajemen kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, ditemui juga kondisi belum sesuainya antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai jaminan profesionalisme Aparatur Sipil Negara;
4. Belum optimalnya sistem seleksi terbuka bagi jabatan struktural;

5. Belum optimalnya sistem informasi manajemen kepegawaian;

d. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan pelatihan seharusnya menjadi 'mesin cetak' ASN yang berkualitas dan profesional. Permasalahan urusan pendidikan dan pelatihan adalah:

1. Belum semua PNS memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebagai Jaminan Profesionalisme PNS;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang belum efektif;
3. Belum optimalnya beasiswa pendidikan dan tugas belajar berdasar kebutuhan daerah;

e. Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan sudah sangat baik. Nilai Indeks Inovasi Daerah meningkat dari sebesar 280 menjadi 5.269 pada tahun 2020 dengan kategori Sangat Inovatif. Namun, beberapa permasalahan di sektor ini adalah:

1. Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal;
2. Masih rendahnya tindak lanjut hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan;
3. Jumlah karya IPTEK yang didaftarkan HAKI Provinsi Bengkulu belum optimal; dan
4. Persentase hasil riset dan IPTEK yang diterapkan belum optimal;

f. Penghubung

Permasalahan urusan penghubung adalah: (1) masih rendahnya giat promosi daerah; (2) masih minimnya kontribusi pendapatan dari sewa kamar perwakilan; (3) masih belum maksimal pemeliharaan dan perawatan aset daerah.

4.1.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Pengawasan

Pembangunan daerah urusan pengawasan terkait upaya meningkatkan integritas ASN dan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern di Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menunjukkan perbaikan, salah satunya ditandai dengan kapabilitas APIP

yang mencapai level 3, meskipun masih disertai catatan. Kondisi tersebut belum disertai dengan capaian maturitas SPIP yang masih pada level 2 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan yang menurun dari tahun 2016 sebesar 70,3 persen menjadi 64,99 persen pada tahun 2019. Permasalahan urusan pengawasan di Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah:

1. Inisiatif perangkat daerah dan keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem pengaduan yang belum optimal;
2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menjalankan SPIP;
3. Masih kurangnya peningkatan kapasitas bagi APIP;
4. Masih terdapat OPD yang belum menjalankan manajemen resiko;
5. Perangkat daerah yang belum menjalankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
6. Belum optimalnya fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan MPTGR;

4.1.2.7. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah menunjukan capaian yang baik. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, IDI Provinsi Bengkulu sebesar 74,23 dan meningkat menjadi 78,79 pada tahun 2019. Namun beberapa permasalahan yang masih ditemui adalah:

1. Masih terjadi konflik horizontal antar kelompok masyarakat;
2. Masih terjaid konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah;
3. Rentannya Provinsi Bengkulu disusupi ideologi radikal;
4. Masih adan ditemukan pelanggaran dalam kebebasan berkeyakinan;
5. Masih tingginya konflik politik terutama menjelang Pilkada;

4.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Pada Aspek Daya Saing Daerah terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Masih rendahnya kemampuan ekonomi daerah yang dilihat dari capaian Pengeluaran per Kapitan dan Nilai Tukar Nelayan;
2. Masih rendahnya kapasitas SDM yang dilihat dari masih rendahnya kualifikasi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SLTA keatas.

4.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan di atas serta memperhatikan, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis untuk dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, antara lain:

4.2.1. Isu Strategis Internasional

4.2.1.1. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 Tujuan, 21 Sasaran, dan 60 Indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran. MDGs memberikan tanggung jawab yang besar pada target capaian pembangunan bagi negara berkembang dan kurang berkembang, tanpa memberikan peran yang seimbang terhadap negara maju. Secara proses MDGs juga memiliki kelemahan karena penyusunan hingga implementasinya eksklusif dan sangat birokratis tanpa melibatkan peran stakeholder non-pemerintah, seperti Civil Society Organization, Universitas/Akademisi, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya.

Berbeda dengan pendahulunya, SDGs mengakomodasi masalah-masalah pembangunan secara lebih komprehensif baik kualitatif (dengan mengakomodir isu pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) maupun kuantitatif menargetkan penyelesaian tuntas terhadap setiap tujuan dan sasaranya. SDGs juga bersifat universal memberikan peran yang seimbang kepada seluruh negara—baik negara maju, negara berkembang, dan Negara kurang berkembang—untuk berkontribusi penuh terhadap pembangunan, sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama antara satu dengan yang lain dalam mencapai SDGs.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang

terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;

15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Provinsi Bengkulu. Tujuan SDGs memiliki tujuan yang baik, yaitu mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

Berkaitan dengan SDGs, Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi strategi melalui empat jalur pembangunan, yaitu *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment* yang berfokus pada:

1. Pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjaan layak;
2. Akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial;
3. Keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana; dan
4. Pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses merata dankeadilan bagi semua orang.

4.2.1.2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA bertujuan menciptakan Asean sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi. Dengan demikian, akan terjadi *free flow* atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal, serta penghapusan tarif bagi perdagangan antarnegara Asean. Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan bahkan Bengkulu kedepan.

Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipanya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ketiga dunia, merupakan potensi pasar komoditas utama MEA, dan menjadikan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Namun disisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

Tantangan yang dihadapi negara berkembang adalah persaingan global ASEAN karena MEA yang dibentuk menjadi kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi *competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation*, dan *e-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.

Selain sebagi tantangan, MEA juga menjadi peluang yang bagus bagi Indonesia untuk mengembangkan perekonomian, MEA akan menjadi penyerap tenaga kerja, sebab tentunya perusahaan asing akan banyak ber-investasi di Indonesia, sehingga beragam tenaga kerja akan banyak dibutuhkan. Dari segi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pun, hal ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas baik SDM, operasional, juga dari segi peraturan pemerintah harus terus diperbaiki, supaya momentum MEA dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Namun hal Ini akan menjadi "*memakan atau dimakan*" ketika SDM nya kurang, atau perusahaan Indonesia tidak bisa survive karena kalah bersaing dengan negara lain yang malah mengekspansi Indonesia sebagai lading bisnisnya.

Isu demografi menjadi peluang tersendiri bagi Provinsi Bengkulu dalam menghadapi MEA. Berdasarkan hasul Sensus Penduduk Tahun 2020, penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2020 didominasi oleh generasi Millenial yang lahir tahun 1981-1996 sebesar 26,86% dan Generasi Z yang lahir tahun 1997-2012 sebesar 29,16%. Kondisi ini menjadikan Bengkulu memiliki peluang dalam peningkatan kualitas SDM, jika potensi SDM ini sedari sekarang sudah dipersiapkan dengan baik untuk bersaing dalam MEA

Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Bengkulu memiliki potensi yang baik sebagai tujuan investasi, karena memiliki *share* PMTB dalam PDRB lebih dari 40%, yaitu sebesar 40,8%. Untuk mempersiapkan FDI dalam konteks MEA, Bengkulu telah menyiapkan kemudahan-kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.

Meskipun begitu, kondisi tersebut dapat memunculkan *exploitation risk.* Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing dapat merusak ekosistem di Indonesia, sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam termasuk ketersediaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

4.2.1.3. *Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle* (IMT-GT)

Kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) berdiri pada Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-1 di Langkawi, Malaysia, pada 20 Juli 1993. IMT-GT ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara IMT-GT. Melalui kerja sama IMT-GT, sektor swasta terus didorong menjadi "engine of growth". Untuk tujuan tersebut telah dibentuk suatu wadah bagi para pengusaha di kawasan IMT-GT yang disebut Joint Business Council (JBC). JBC secara aktif ikut dilibatkan dalam rangkaian SOM/MM IMT-GT setiap tahunnya. Wilayah Indonesia yang menjadi bagian dari kerja sama IMT-GT adalah provinsi-provinsi: Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ada tiga hal yang menjadi pandangan nasional Indonesia dalam kerja sama tiga negara itu. *Pertama*, pengembangan dan penyelesaian proyek-proyek konektivitas fisik, sejalan dengan salah satu fokus implementasi IMT-

GT Vision 2036. Pengembangan konektivitas fisik juga diperlukan dalam mendorong pengembangan bidang pariwisata di kawasan IMT-GT. Salah satu potensi besar yang ada adalah untuk *marine tourism* yang meliputi pariwisata *cruise* dan *yacht* serta pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha sektor pariwisata. *Kedua*, pentingnya pertumbuhan ekonomi di kawasan IMT-GT bersifat berkelanjutan dan inklusif. Dalam hal ini, Presiden menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan inklusif di sub-kawasan ini. Komoditas seperti karet dan kelapa sawit memiliki multiplier efek besar terhadap perekonomian masyarakat IMT-GT. Untuk itu, kita perlu untuk terus tingkatkan kerja sama konkret dalam memajukan industri karet dan kelapa sawit. *Ketiga*, kerja sama IMT-GT perlu mendorong penguatan kerja sama sektor-sektor usaha UKM halal yang berorientasi ekspor maupun halal start-up.

Provinsi Bengkulu saat ini belum termasuk dalam Koridor Ekonomi IMT-GT secara langsung, namun terkait dengan Koridor Ekonomi 6. Upaya Provinsi Bengkulu berpartisipasi dalam IMT-GT, difokuskan untuk membuka konektivitas. Bandara Fatmawati Soekarno saat ini sudah di kelola oleh PT. Angkasa Pura II, sehingga nanti akan mampu membuka rute internasional untuk mensukseskan agenda konektivtas dalam IMT-GT. Selain itu, Provinsi Bengkulu menawarkan potensi pariwisata halal, yang berbasis *marine tourism* dan pariwisata sejarah. Bengkulu memiliki keterkaitan erat dengan semenanjung Malaysia, karena sama-sama pernah dijajah oleh Inggris bahkan Bengkulu memiliki Benteng Inggris terbesar di Asia Tenggara yaitu Fort Marlborough. Oleh karenanya, potensi wisata sejarah yang dimiliki Bengkulu akan menjadi daya tarik dalam koridor ekonomi IMT-GT.

4.2.2. Isu Strategis Nasional dan Daerah

4.2.2.1. RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang awalnya diperkirakan akan menempatkan Indonesia ke dalam

kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*), menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 di awal tahun 2020.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Diperlukan kerja keras untuk mempertahankan pencapaian pembangunan pada periode RPJMN sebelumnya agar sasaran di atas dapat dicapai.

Visi Misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas

sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. *Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.* Penjabaran setiap fokus kerja tersebut adalah:

1. *Pembangunan Sumber Daya Manusia,* dengan prioritas utama :

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
   pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. *Pembangunan Infrastruktur,* dengan prioritas utama:

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak
   lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. *Penyederhanaan Regulasi,* dengan prioritas utama:

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. *Penyederhanaan Birokrasi,* dengan prioritas utama:

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. *Transformasi Ekonomi*

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Pengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik;

Dalam RPJMN 2020-2024, Provinsi Bengkulu memiliki 'beban target' pembangunan yang cukup berat. Target tersebut tentunya akan menjadi beban sekaligus tantangan bagi Provinsi Bengkulu dalam mencapainya. Provinsi Bengkulu masih memiliki banyak keterbatasan, terutama pada sektor keuangan daerah. Berdasarkan data pada BAB III Gambaran Keuangan Daerah, rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu masih rendah yaitu sebesar 25,56. Sehingga untuk mencapai target tersebut tentu membutuhkan *effort* yang besar dan tentunya dukungan dari Pemerintah Pusat, kolaborasi kabupaten kota, serta *stakeholder* lainnya. Target Pembangunan Provinsi Bengkulu dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Target Pembangunan Provinsi Bengkulu dalam RPJMN 2020-2024

No.	Indikator	Realisasi 2018	Baseline 2019	Target Pembangunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	5,10	5,10	5,70	6,00	6,20	6,30
2.	Kemiskinan (%)	15,43	15,23	13,30	13,00	12,25	10,95	10,75
3.	TPT (%)	3,51	3,39	3,50	3,30	3,10	2,70	2,30

Sumber : Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Hal yang perlu menjadi catatan adalah, indikator-indikator makro tersebut mengalami kontraksi yang cukup dalam akibat Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020, sehingga perlu dilakukan reviu kembali.

Terkait dengan Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Wilayah Sumatera, sebagai koridor pertumbuhan di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu. Koridor ini ditargetkan akan mampu menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi, sehingga pada koridor ini dilaksanakan pembangunan PSN yaitu Jalan Tol Bengkulu – Lubuk Linggau. Selain itu, dalam RPJMN 2020-2024, pada koridor ini juga ditetapkan pembangunan rel KA Bengkulu – Kota Padang (Kabupaten Rejang Lebong) dan pembangunan SPAM Kota Bengkulu-Bengkulu Tengah-Seluma, pengembangan pelabuhan Pulau Baai dan peningkatan kapasitas Bandara Fatmawati. Pertumbuhan yang dipicu oleh koridor pertumbuhan, diharapkan akan dapat memberikan dampak pemerataan terhadap Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur yang masuk dalam koridor pemerataan.

Dalam RPJMN 2020-2024, komoditas unggulan yang akan dikembangkan di Bengkulu adalah kopi, karet, kelapa sawit, perikanan budidaya, dan emas. Hal ini telah sesuai dengan upaya yang Pemerintah Provinsi Bengkulu lakukan selama ini untuk pengembangan dan hilirisasi komoditas-komoditas unggulan tersebut. Komoditas unggulan tersebut memiliki potensi hilirisasi yang sangat baik dan potensi ekspor yang baik.

Dalam hal kaitannya dengan Pengembangan Kawasan Strategis di wilayah Sumatera, Provinsi Bengkulu memiliki tujuan untuk menjadi beranda ekonomi baru dikawasan barat Sumatera. Hal tersebut dimulai dengan membukan konektivitas Bengkulu dengan provinsi lain di Sumatera bagian selatan. Pembangunan jalan *feeder* Tol Trans Sumatera ruas Kota Bengkulu – Kota Lubuk Linggau sepanjang 95 km yang masuk sebagai PSN, merupakan titik awal dalam pembukaan konektivitas Bengkulu. Melalui jalan tol ini, maka Provinsi Bengkulu akan terhubung dengan simpul transportasi Sumatera di bagian tengah. Hal ini akan memperlancar distribusi barang dan orang baik dari dan menuju Bengkulu. Kemudian jalan tol tersebut akan didukung oleh pelabuhan Pulau Baai sebagai kawasan industri, jalur KA Kota Bengkulu – Kota Padang (Kabupaten Rejang Lebong) dan pengembangan Bandara Fatmawati, sebagai ‘suplemen’ dalam memperlancar konektivitas. Sebagai ‘magnet’ nya, maka sektor parisiwata, ekonomi kreatif, komoditas unggulan seperti kopi, sawit, kareta dan batu bara akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Kemudian, nilai

investasi Provinsi Bengkulu akan mamu mencapai target RPJMN yaitu meningkat hingga menjadi sebesar 48,31 triliun pada tahun 2024. Sebagai multifier efeknya, maka kesejahteraan dan ekonomi masyarakat akan meningkat.

4.2.2.2. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia bahkan di Indonesia dengan kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi Bengkulu mencatat kasus pertama Covid-19 pada akhir Maret 2020, dan menjadi provinsi ketiga terakhir yang mejadi zona merah.

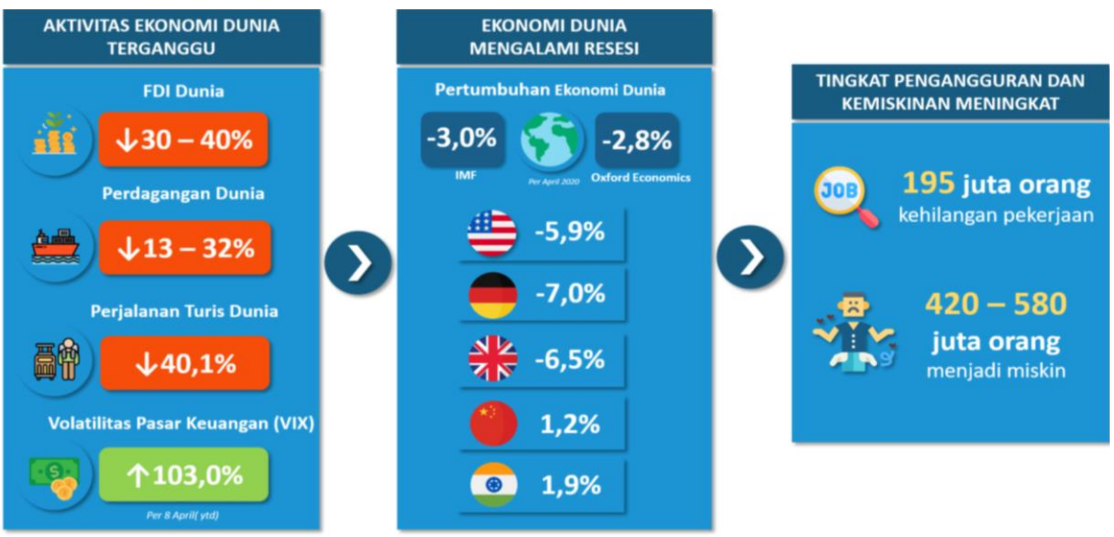
Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sejalan dengan itu, Gubernur Bengkulu telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut yaitu:

1. SE Gubernur Nomor 440/271/B.1/2020, tanggal 20 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Covid-19;
2. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.197/Dinkes/2020, tentang penetapan Ruang Keperawatan dan Karantina Kasus Covid-19 di Provinsi Bengkulu;
3. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.171/BPBD/2020, tanggal 4 April 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
4. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor H.172/BPBD/2020 tanggal 4 April 2020 tentang Peningkatan Status Siaga Bencana menjadi Status Tanggap Darurat Bencana

Pencegahan Covid-19 berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan

pola penyebaran Covid-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal nonpertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Dunia



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Tidak berbeda dengan ekonomi dunia dan Indonesia, ekonomi Provinsi Bengkulu juga terkena dampak negatif Covid-19. Dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (physical distancing). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan serta ekspor impor terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas. Tidak hanya itu, kesehatan sektor keuangan juga diperkirakan menurun, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL) dan volatilitas di pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada sasaran makro dan

pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 tumbuh minus -0,02%. Turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan rendahnya produksi.

Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di industri maupun perkantoran, serta penurunan indikator makro ekonomi nasional, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, ekspor dan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pariwisata juga terdampak dengan penurunan kunjungan wisatawan, tutupnya aktivitas perhotelan, akomodasi dan makan minum. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan.

Pandemi Covid-19 memaksa dunia usaha dan pemerintah menerapkan teknologi informasi dengan lebih intensif. Proses transisi ke ekonomi digital berlangsung lebih cepat. Beberapa sektor produksi yang sukses bertransisi ke sistem online memiliki peluang untuk bertahan karena permintaan rumah tangga khususnya untuk konsumsi pangan dan kebutuhan pokok lainnya masih dapat berjalan. Dengan kata lain, terdapat risiko penurunan elastisitas penciptaan lapangan kerja baru terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pengangguran relatif lebih tinggi dari baseline, khususnya di wilayah-wilayah dengan konektivitas digital relatif baik. Jumlah orang miskin dan rentan meningkat terutama dari kelompok pekerja informal, jika tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai. Sistem produksi yang tidak berjalan optimal dan membebani biaya menyebabkan sebagian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Tambahan pengangguran diperkirakan meningkat dan. Interupsi kegiatan belajar mengajar dalam waktu lama juga berpotensi mengurangi efektivitas pembelajaran. Risiko yang lebih besar dialami siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan literasi digital atau kesulitan mendapatkan akses informasi, sehingga memberikan ancaman terhadap kualitas SDM Provinsi Bengkulu dimasa depan.

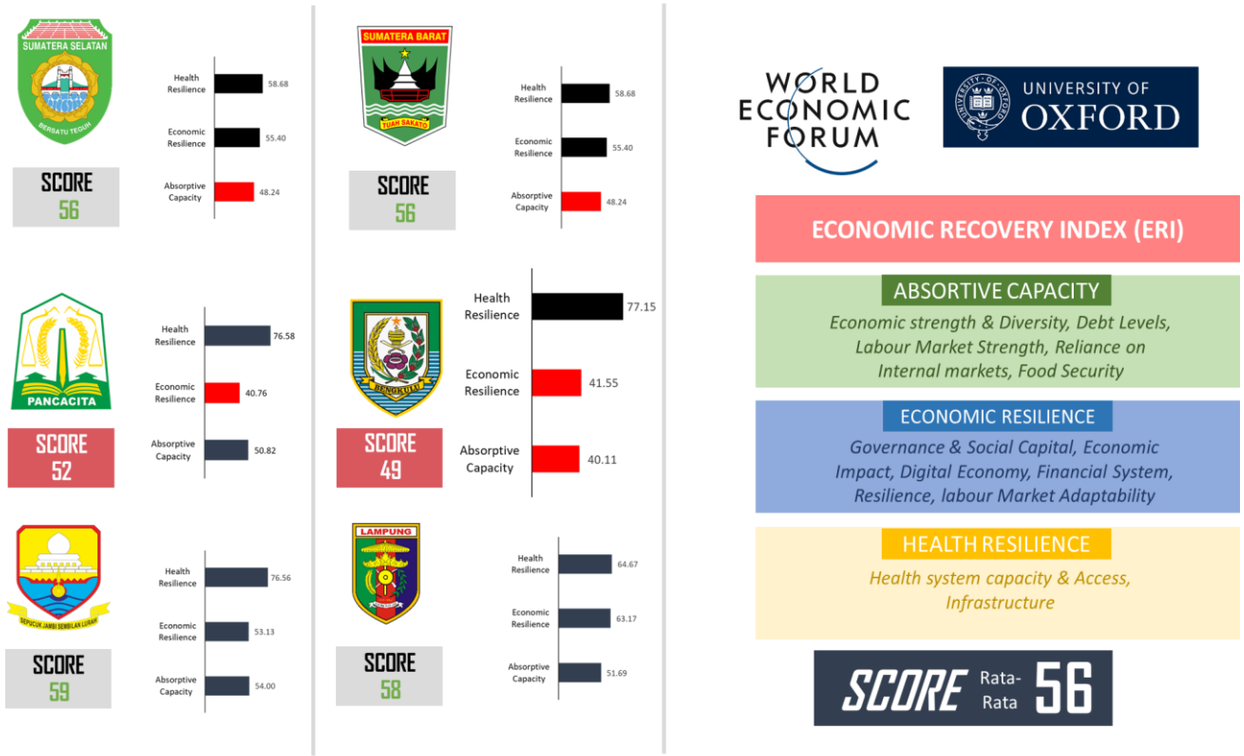
4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

4.2.3.1. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Bengkulu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami perlambatan. Sempat mencapai sebesar 5,28% pada tahun 2016, ekonomi Bengkulu kemudian turun dan bergerak fluktuatif dikisaran 4,9%. Sejak tahun 2017, Ekonomi Bengkulu selalu berada dibawah rata-rata nasional. Perlambatan ekonomi tersebut mengakibatkan rendahnya daya saing Bengkulu. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Asia Competitiveness Institute* (ACI) Lee Kuan Yew *School of Public Policy, National University of Singapore* (NUS) menunjukkan daya saing Provinsi Bengkulu menempati peringkat 29 dari 34 Provinsi di Indonesia. Peringkat tersebut sekaligus menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai daerah di Indonesia dengan nilai daya saing terendah di Sumatera. Kinerja daya saing tersebut diukur dengan 103 Indikator yang dikelompokkan dalam 4 aspek yaitu (1) stabilitas ekonomi makro, (2) perencanaan pemerintah dan institusi, (3) kondisi finansial, bisnis dan tenaga kerja, dan (4) kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur.

Terlebih, pada tahun 2020-2021, akibat pandemic Covid-19 dan dampaknya, ekonomi Bengkulu tertekan sangat dalam hingga mencapai minus 0,02% pada tahun 2020. Dampak pandemic Covid-19 mungkin akan terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang. *Baseline* capaian pembangunan Bengkulu dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dimulai pada titik yang sangat rendah. Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu dalam FGD RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 menyampaikan bahwa data *Economic Recovery Index* Provinsi Bengkulu masih cukup rendah yaitu sebesar 49, masih berada dibawah rata-rata nasional yang sebesar 56. Bahkan ERI Bengkulu tersebut berada pada posisi terendah di Sumatera. Aspek yang masih berkontribusi terhadap rendahnya ERI Bengkulu adalah *Economic Resilience* yang sebesar 41,55 dan *Absortive Capacity* yang sebesar 40,11.

Economic Recovery Index Provinsi Bengkulu

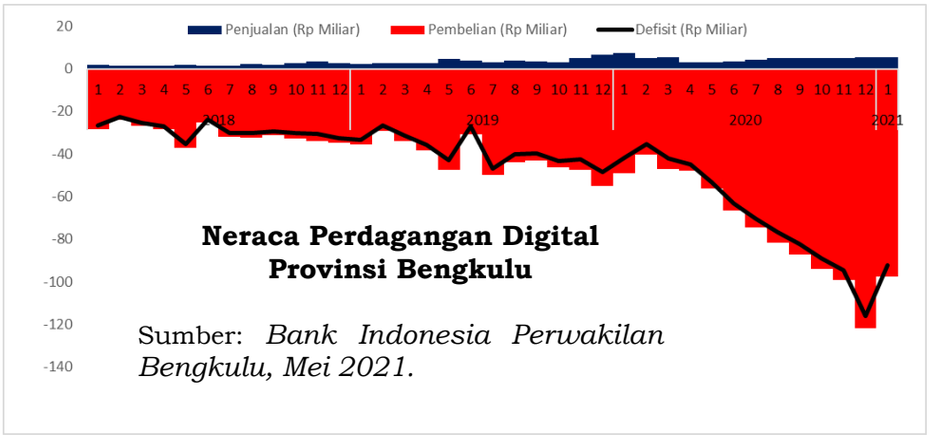


Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu, Mei 2021.

Banyak sektor yang menjadi penyebab stagnannya ekonomi Bengkulu. Kondisi infrastruktur dan konektivitas Bengkulu, masih belum mampu medongkrak perekonomian sehingga perlu dilakukan upaya percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur yang merata serta peningkatan aksesibilitas dan konektivitas Bengkulu baik antar kabupaten dalam daerah maupun antar provinsi. Diharapkan dengan akses dan konektivitas yang terbuka, maka akan mampu meningkatan distribusi dan penyerapan barang dan jasa dari dan menuju Bengkulu, sehingga multiplier efek yang dihasilkan akan mampu mendongkrak percepatan ekonomi Bengkulu.

Nilai investasi Bengkulu masih cukup rendah jika dibandingkan dengan skala nasional. Walaupun persentase pertumbuhan investasi sudah sangat pesat, namun secara nominal Penanaman Modal Asing di Bengkulu hanya sebesar USD 192 juta atau 0,67% dari nasional peringkat 25 nasional, dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 1,31% dari nasional yaitu 5,3 triliun rupiah dan menempati peringkat 18 nasional.

Berdasarkan hasil kajian Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu, pada sektor UMKM, perlambatan ekonomi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya digitalisasi UMKM yang masih rendah. Neraca Perdagangan Digital Bengkulu pada tahun 2020 (Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu) mengalami defisit sebesar 200 miliar rupiah. Ini berarti bahwa masyarakat



Neraca Perdagangan Digital Provinsi Bengkulu

Sumber: *Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu, Mei 2021.*

Bengkulu lebih cenderung membeli produk UMKM dari luar Bengkulu, ketimbang menjual produk UMKM ke luar Bengkulu. Hal ini dikarenakan masih minimnya digitalisasi UMKM Bengkulu. Permasalahan UMKM selanjutnya adalah terkait dengan belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil.

Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi wisata yang menekan lama kunjung wisatawan, belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat, belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal. Stuktur ekonomi sektor penyediaan jasa akomodasi dna makan minum, sebagai pengukur sektor pariwisata dalam PDRB baru sebesar 1,78% ada triwulan III tahun 2020.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, ketersediaan data pertanian belum memadai, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, peternakan, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian,

rendahnya regerasi petani dan rendahnya akses permodalan. Dari tahun ke tahun, struktur ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yterus menurun hingga menjadi 28% pada triwulan III tahun 2020.

Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh Nilai Tukar Nelayan yang baru mencapai 99,25% pada tahun 2020. Hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (*fish landing*) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Bengkulu belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir, masih rendahnya tingkat pengguasaan teknologi oleh nelayan, dan pencemaran perairan umum dan laut.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Bengkulu) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur pendukung kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri di Bengkulu, bahan baku industri mayoritas impor, peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.

Industri pengolahan di Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh industri padat karya, yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Disisi lain perkembangan industri sudah mulai mengarah pada industri padat modal yang menuntut tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja tinggi. Ditambah dengan perkembangan industri global menuju pada industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan,

serba internet dan cetak tiga dimensi). Kondisi lain yang harus diantisipasi adalah ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal impor. Secara nasional, hampir 75 persen impor nasional berupa bahan baku/penolong industri. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk dapat menjamin ketersediaan bahan baku lokal, dan mendukung industri dengan tingkat kandungan dalam negeri tinggi. Ketersediaan energi juga menjadi tantangan penting kedepan untuk disiapkan dalam rangka pengembangan industri di Bengkulu. Persoalan lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana industri yang belum memadai, kurang tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri, serta tingkat kesiapterapan teknologi yang masih rendah.

Provinsi Bengkulu memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Bengkulu memiliki Pelabuhan Pulau Baai, berada disisi barat Sumatera dan berbatasan langsung dengan 4 (emapt) provinsi besar di Sumatera. Dengan proyek jalan Tol Tarns Sumatera ruas Bengkulu – Lubuk Linggau yang saat ini sedang dibangun, maka jika mampu dimanfaatkan dengan baik, ekonomi Bengkulu akan berkembang dan meningkat dengan pesat. Selain itu, investasi juga dapat diandalkan oleh Bengkulu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. *Share* PMTB dalam PDRB Provinsi Bengkulu mencapai 40% lebih, yang menggambarkan bawah pembentukan modal di Provinsi Bengkulu cukup besar. Hal ini menandakan bahwa Bengkulu memiliki potensi yang layak dikembangkan sebagai tujuan invesasi.

4.2.3.2. Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM

Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, dan menjadi salah satu perhatian pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bahwa tujuan pertaman pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu dapat dikatakan masih cukup rendah. Walaupun sudah menunjukan perbaikan yang signifikan, namun tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu masih dibawah rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan Bengkulu pada maret tahun 2021 mencapai 15,22%, jauh berada diatas rata-rata nasional yang sebesa 10,14%.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan daerah lain pembanguna manusia Provinsi Bengkulu masih berjalan lambat. Pada tahun 2020, IPM Bengkulu adalah sebesar 71,40 masih berada dibawah capaian nasional. Selain itu, pemerataan kualitas SDM antar wilayah masih timpang. Dari 10 kabupaten dna kota, hanya Kota Bengkulu yang masuk kategori IPM Sangat Tinggi, Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan masuk dalam kategori IPM Tinggi, dan 7 kabupaten lain masuk dalam kategori IPM sedang. Kondisi ini menunjukan bhawa disparitas pembangunan manusia masih terjadi di Bengkulu.

Selain itu, tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu didominasi oleh penduduk dengan latar pendidikan menengah atas sampai perguruan tinggi. Penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan SMA, SMK, Diploma dan Universitas, berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2020 adalah sebesar 44,19%. Ini bearti sebesar 50% lebih pekerja di Bengkulu bekerja dengan latar pendidikan yang rendah. Selain itu sebesar 69,23% angkatan kerja bekerja pada sektor informal, yang sangat rentan terhadap kelayakan upah. Per bulan rata-rata pendapatan pekerja informal adalah sekita 1,5 juta, masih jauh dibawah UMP. Hal ini menggambarkan bahwa daya saing tenaga kerja di Bengkulu masih minim, dan tingkat kesejahteraan pekerja masih rendah.

Pada sektor pendidikan, angka rata-rata lama sekolah Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 adalah sebesar 8,84 tahun, masih dibawah target wajib belajar 9 tahun. Rasio jumlah penduduk per Universitas masih cukup rendah, yang mengakibatkan banyak penduduk yang bermigrasi keluar untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi. Permasalahan pendidikan sangat kompleks, karena menyangkut kemampuan siswa, akses siswa, sarpras pendidikan, kualitas guru hingga metode pembelajaran. Akumulai dari permasalahan tersebut, tergambar pada rata-rata lama sekolah yang belum mencapai 9 tahun. Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota menjadi fokus Pemerintah Provinsi Bengkulu dimana banyak sekali masyarakat yang tidak memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Bengkulu dimulai dari peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat,

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan kuantitas/kualitas guru (kualitas pendidikan), peningkatan kualitas pembelajaran (daya saing di pasar kerja); pemerataan kualifikasi dan penempatan guru dan pemantapan kesejahteraan guru. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik, bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Selanjutnya pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Pada sektor kesehatan, Usia Harapan Hidup Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 masih berada dibawah capaian nasional yaitu sebesar 69,35 tahun sedangkan nasional mencapai 71,47 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa Bengkulu perlu melakukan akselerasi dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat, terutamak peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan seperti peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil, peningkatan kuantitas dan kualitas dokter dan paramedis, kepastian layanan jaminan kesehatan, pengembangan program kader dokter desa bekerja sama dengan perguruan tinggi; dan pemantapan kesejahteraan dokter dan paramedis.

4.2.3.3. Pengembangan konektivitas serta Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan

a. Infrastruktur

Terkait dengan infrastruktur dasar, berdasarkan data, kondisi jarimgan jalan provinsi dalam keadaan mantap baru mencapai sebesar 68,14%. Panjang jalan arteri di Provinsi Bengkulu hanya

sepanjang 166 km, terpendek di Sumatera. Hal ini mengakibatkan terbatasnya tonase kendaraan untuk distribusi barang dan jasa, meningkatkan biaya kargo. Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu (Mei 2021), biaya kargo Bengkulu sangat tinggi, yaitu Rp.179 per km sehingga penggunaan jalan di Bengkulu tidak efisien. Selanjutnyam irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi baik/mantap baru sebesar 67% dan jembatan kewenangan provinsi dalam kondisi mantap baru mencapai 68,14%. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri, karena tingkat kualitas infrastruktur dasar belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Terlebih, masih terdapat kesenjangan pemerataan pembangunan yang ada di Provinsi Bengkulu. Selain itu, akses rumah tangga terhadap air minum layak juga masih rendah yaitu sebesar 62,47% pada tahun 2020, jauh dibawah nasional yang mencapai 90,21%. Termasuk juga untuk rumah tangga yang menempati rumah layak huni yang masih rendah mencapai 53,33% pada tahun 2020.

Pada sektor infrastruktur strategis, beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan adalah:

1. Perlu peningkatan kapasitas Pelabuhan Pulai Baai seperti pembangunan/pengembangan terminal curah cair, terminal curah kering, terminal peti kemas, conveyor belt dan pengerukan alur.
2. Perlu Pengembangan Pelabuhan Pulai Baai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus;
3. Perlu Pembangunan dan peningkatan kapasitas pelabuhan pengumpan/ASDP seperti Pelabuhan Linau, Pelabuhan Enggano (Malakoni dan Kahyapu), pelabuhan pengumpan di Mukomuko dan pelabuhan di Pino Raya, Bengkulu Selatan;
4. Perlu pengembangan fasilitas Bandara Fatmawati, Bandara Mukomuko dan Bandara Enggano;
5. Perlu pengembangan dan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan meliputi pengembangan PLTP Hulu Lais, PLTU Pulai Baai, pembangunan PLTP di Kabupaten Kepahiang dan jaringan transmisi sutt dan gardu induk;

Bengkulu pada dasarnya memiliki potensi infrastruktur strategis yang menjanjikan, yaitu Pelabuhan Pulau Baai. Pelabuhan Pulau Baai memiliki kolam alami yang terluas di Indonesia, namun memiliki kendala dalam

pengembangannya. Pelabuhan Pulau Baai terus mengalami pendangkalan, dengan kedalaman alur hanya 11 meter. Panjang dermaga hanya 999, meter, serta hanya memiliki 1 gudang. Hal ini berakibat pada meningkatnya biaya bongkar muat karena harus melakukan *transhipment* di luar kolam pelabuhan. Kemudian *dwelling time* di Pelabuhan Pulau Baai juga mencapai 3,23 hari, sehingga pelaku usaha lebih banyak melakukan ekspor keluar Pelabuhan Pulau Baai. Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu (Mei, 2021), ekspor di Pelabuhan Pulau Baai pada tahun 2020 baru mencapai 55,5%. Sebanyak 17,1% ekspor Bengkulu dilakukan melalui Pelanbuhan Boom Baru Palembang, 13,5% melalui Tanjung Priuk dan 13,2% melalui Pelabuhan Teluk Bayur Padang.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan perlu menjadi pertimbangan dalam melaksanakan program pembangunan, terkait dengan daya dukung, daya tampung dan kualitas lingkungan hidup. Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Bengkulu. Pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya.

Namun disisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi sosial dan lingkungan. Pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak tercapai, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan.

Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Bengkulu. Pemerataan pembangunan

berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, pengolahan persampahan dan limbah. Pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu.

b. Ketahanan, Mitigasi dan Penanganan Bencana

Keadaan geografis wilayah Provinsi Bengkulu yang berhadapan dengan zona subduksi pertemuan Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia menyebabkan wilayah Provinsi Bengkulu memiliki potensi gempa bumi dan tsunami yang cukup tinggi. Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan 2 (dua) Samudera dan dengan pertemuan 2 (dua) Lempeng Benua yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan gempa bumi berpotensi tsunami. Selain itu, wilayah Provinsi Bengkulu juga dilewati oleh Patahan Semangko yang memanjang dari Aceh sampai Lampung yang sewaktu menimbulkan gempa bumi.

Kejadian gempa bumi besar pernah terjadi pada zona subduksi wilayah Bengkulu pada tanggal 4 Juni 2000 dengan skala kekuatan 7,3 SR yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di Provinsi Bengkulu. Tanggal 12 September 2007 Bengkulu kembali diguncang oleh gempa bumi dengan kekuatan lebih besar yaitu 7,9 SR. Gempa bumi ini telah mengakibatkan 17.695 rumah hancur, 21.035 rumah rusak parah, dan 49.496 rumah mengalami kerusakan ringan, serta mengakibatkan setidaknya 25 orang meninggal dunia dan 100 orang terluka (Laporan Situasi OCHA No.8). Berdasarkan data kejadian Bencana Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2017, urutan bencana alam dengan kejadian tertinggi sampai terendah adalah Banjir (302 kejadian), Cuaca Ekstrim (94 kejadian), Gempa Bumi (67 kejadian), Banjir Bandang (34 Kejadian) dan Tsunami (belum ada kejadian) (BPBD Provinsi Bengkulu, 2018). Kejadian bencana tanah longsor paling sering terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Penyebab utamanya adalah kondisi topografi daerah yang berbukit dan banyak lereng

yang curam. Sedangkan kejadian banjir paling sering terjadi di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Posisi Provinsi Bengkulu yang berada di sisi Barat Pulau Sumatera dalam tatanan geologi/tektonik merupakan daerah yang komplek termasuk rawan dari bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api karena berada pada daerah subduksi antara Lempeng Hindia-Australia dan Lempeng Eurasia dan dilewati oleh sesar Sumatera yang memanjang sepanjang Pulau Sumatera. Gunung Kaba merupakan salah satu gunung api yang masih aktif di Indonesia dan merupakan gunung api tipe A. Provinsi Bengkulu termasuk ke dalam wilayah rawan bencana gempa bumi dengan skala intensitasnya berkisar V-VII Skala MMI (*MODIFIED MERCALLIINTENSITY*). Adapun wilayah dengan kerawanan tinggi bencana gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Bengkulu, Kota Curup, serta Kota Kepahiang. Menurut data, Kota Bengkulu sendiri juga seringkali mengalami gempa, serta pernah mengalami kejadian tsunami pada tahun 1833. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2020 Provinsi Bengkulu, jenis bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Bengkulu adalah tanah longsor (386 kejadian) dan banjir (269 kejadian). Kejadian Bencana dengan urutan tertinggi terjadi di Kota Bengkulu (164 kejadian), Kabupaten Rejang Lebong (163 kejadian) dan Kabupaten Bengkulu Utara (112 kejadian).

Selain itu, dari segi kesiapan daerah dalam penanganan bencana, alokasi Belanja Tidak terduga yang disiapkan untuk penanganan bencana dalam APBD Provinsi Bengkulu sangat kecil. Setiap tahun hanya dialokasikan sebesar 5 miliar rupiah. Kondisi ini tidak sebanding dengan resiko bencana yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu. Minimnya ketersediaan Belanja Tidak terduga, akan menjadi hambatan dalam proses penanganan dan evakuasi pasca bencana. Bengkulu harus memperkuat aspek mitigasi bencana, agar tetap dapat bersaing dengan daerah lain. Mencontoh Jepang, yang walaupun merupakan negara yang sangat rawan bencana, namun mampu dapat tumbuh sebagai negara yang maju.

Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan yang mampu meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral. Daya dukung dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak

perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi, serta mampu mempertahankan kesehatan masyarakat. Salah satu hal penting dalam isu ini adalah penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Bengkulu masih belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan hutan dan hasil ikutannya yang cukup melimpah. Sekitar 56 persen wilayah Bengkulu terdiri dari kawasan hutan, baik hutan lindung, taman nasional, cagar alam, maupun hutan produksi. Namun demikian, keberadaan kawasan hutan itu sudah mulai terancam oleh kegiatan-kegiatan perkebunan dan perladangan penduduk maupun perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi perkebunan. Keberadaan hutan juga belum memberikan kontribusi kepada kesejahteraan penduduk. Laju kerusakan hutan Bengkulu terus terjadi. Saat ini dari luasan 924 ribu hektare, seluas 410.843 hektare atau 45 persen hutan Bengkulu di bentang Bukit Barisan mengalami kerusakan. Kerusakan hutan ini akibat industri ekstraktif disebabkan aktivitas perusahaan tambang, perkebunan kelapa sawit, geothermal, maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Alam (IUPHHK-HA). Selain itu masih ada 53.000 hutan Bukit Barisan yang juga akan dilepaskan. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan. Keberadaan bentang alam Bukit Barisan sebagai “tulang punggung” Pulau Sumatera sepanjang 1.650 km dari ujung Aceh hingga Lampung, sangat penting. Jika rusak, bencana alam yang memakan korban jiwa manusia dan satwa bisa terjadi.

Selain itu, Provinsi Bengkulu sangat kaya dengan aliran sungai yang mengandung konsekuensi banyaknya daerah aliran sungai (DAS) yang sekarang mulai mengalami kerusakan akibat perkebunan dan perladangan rakyat serta pertambangan. DAS yang mengalami kerusakan pada gilirannya akan mempengaruhi pasokan air yang dibutuhkan untuk pembangkit tenaga listrik dan atau kebutuhan baku air minum. Kasus yang terjadi, perusahaan batu bara dan atau pabrik pengolahan karet yang membuang limbah ke sungai sehingga mempengaruhi kualitas air. Semua ini sebagai akibat lemahnya penegakan hukum dan pengendalian yang terlalu longgar.

c. Pengembangan Konektivitas Daerah

Konektivitas masih menjadi tantangan bagi Provinsi Bengkulu. Belum optimalnya integrasi konektivitas intrawilayah dan antar-wilayah baik darat, laut dan udara dan belum optimalnya hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa. Secara geografis, Bengkulu terletak di sisi barat Pulau Sumatera, yang berbatasa langsung dengan Samudera Hindia di sisi barat, dan dipagari oleh jajaran Bukit Barisan di sebelah timur. Bengkulu juga dikelilingi oleh kawasan-kawasan hutan baik itu Hutan Lindung maupun Taman Nasional, seperti Taman Nasional Kerinci Sebelat dan Taman Nasiona Bukit Barisan Selatan. Aksesibilitas dari dan menuju Bengkulu melalui darat hanya dilalui melalui 5 (titik) pintu keluar yaitu Kabupaten Mukomuko-Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Rejang Lebong-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kepahiang-Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan-Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kaur-Provinsi Lampung.

Melalui udara, saat ini ada 1 (satu) bandara udara utama yaitu Fatmawati, dan 2 (dua) bandara perintis yaitu Bandara Kabupaten Mukomuko dan Pulau Enggano. Melalui jalur laut, terdapat Pelabuhan Pulau Baai, Pelabuhan Bantal Kabupaten Mukomuko, Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur. Bengkulu masih memiliki akses konektivitas yang masih minim, sehingga diperlukan keterbukaan akses yang luas, baik darat, laut dan udara. Hal ini berdampak terhadap alur distribusi barang, jasa dan penumpang masih terbatas. Letak geografis Bengkulu, yang tertutup oleh kawasan-kawasan hutan berakibat sulitnya bagi Bengkulu untuk membuka aksesibiltas.

Provinsi Bengkulu perlu membuka keterisolasian dan atau kelancaran arus barang dan orang dari dan ke Provinsi Bengkulu; membangun dan atau meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan lintas provinsi dari aspek jarak tempuh dan pengurangan biaya angkut; membangun kerjasama dengan provinsi sekitar untuk membangun pola-pola pembangunan koridor. Peningkatan akses lintas provinsi ini ditujukan agar Bengkulu memiliki keunggulan kompetitif dan berdaya saing untuk menarik minat investor.

d. Pembangunan Rendah Karbon dan Emisi GRK

1. Bidang Pertanian

   Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Pertanian utamanya bersumber dari aktivitas perubahan penggunaan lahan (*land use change*) dan

pengelolaan atau management lahan pertanian utamanya management penggenangan lahan sawah, penggunaan pupuk khususnya urea, dan peternakan (utamanya dari enteric atau sendawa ternak dan penanganan kotoran ternak). Permasalahan emisi GRK sektor pertanian adalah perlunya komitmen kebijakan dan konsistensi untuk mendukung program PPRK dari pemerintah daerah khususnya pada perubahan penggunaan lahan dan manjemen lahan pertanian yang baik.

2. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

   Permasalahan emisi GRK di Provinsi Bengkulu merupakan dampak dari perubahan penggunaan lahan baik di kawasan hutan maupun non hutan untuk Perkebunan, Pertanian, dan Pertambangan (Hutan).

3. Bidang Energi dan Transportasi

   Mengacu pada dokumen IPCC 2006, aktivitas di sector energy terdiri dari 4 (empat): 1) Eksplorasi dan eksploitasi sumber energi primer 2) Konversi sumber energi primer menjadi energy sekunder melalui proses pengolahan pada kilang minyak dan pembangkit listrik, 3) Transmisi dan distribusi bahan bakar, dan 4) Penggunaan bahan bakar yang digunakan pada peralatan stasioner (Tidak bergerak) dan *mobile* (bergerak).

4. Bidang Limbah

   Limbah padat atau persampahan dan air limbah (domestik maupun industri) menjadi penghasil emisi gas rumah kaca bidang pengelolaan limbah. Namun fokus perhitungan pada RAD-GRK adalah yang bersumber dari limbah domestik.

4.2.3.4. Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif

a. Hilirisasi Komoditas Unggulan

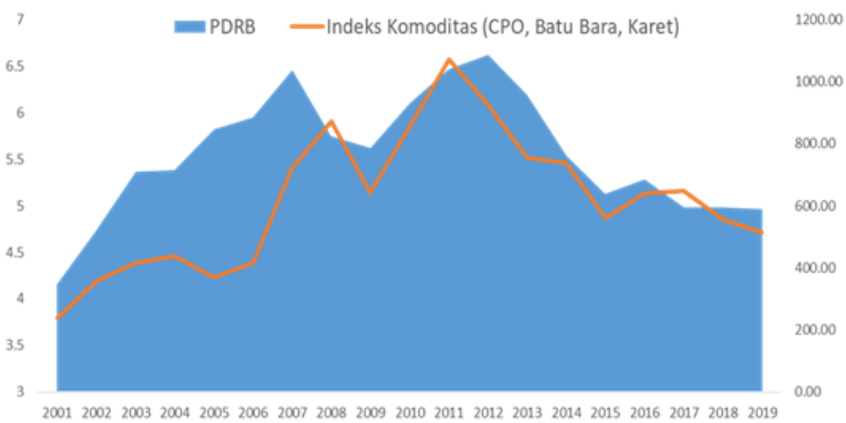
Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan tidak saja ditujukan dalam rangka peningkatan jumlah produksi, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian daerah. Melimpahnya bahan baku di Provinsi Bengkulu, belum diikuti dengan perkembangan industri hilirisasi, sehingga bahan baku tidak dapat diolah menjadi turunan atau bahan jadi. Hilirasi komoditas unggulan memiliki banyak multiplier efek, seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan penyerapan hasil komoditas,

peningkatan nilai ekspor, peningkatan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya revitalisasi kegiatan hilirisasi sistem komoditas unggulan untuk menumbuhkan industri yang mampu mendorong dan menggerakkan perekonomian sangat diperlukan.

Bengkulu memiliki banyak potensi komoditas unggulan yang dapat diolah melalui industri hiliriasi, yaitu:

1. Batubara yang memiliki ptensi sumber mencapai 292 juta ton;
2. Geothermal yang berpotensi sebesar 1.352 Watt;
3. Kelapa Sawit dengan produksi sebesar 799.891 ton untuk perkebunan rakyat, 357.109 ton untuk perkebunan besar swasta dan 11.942 ton untuk perkebunan negara;
4. Kopi dengan produksi yang mencapai 62.759 ton (perkebunan rakyat);
5. Karet yang mencapai 101.246 ton (perkebunan rakyat);
6. Perikanan laut dengan potensi produksi 126.217 ton;

Pada tahun 2019, dalam kondisi normal tanpa tekanan pandemic Covid-19, kontribusi sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Bengkulu baru mencapai sebesar 6,07%. Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu (Mei, 2021) nilai komoditas unggulan Bengkulu selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Bengkulu kurang stabil karena tergantung dengan fluktuasi harga komoditas unggulan. Sehingga, hilirasi produk unggulan menjadi produk-produk turunannya menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Industri pengolahan yang mampu menjadi sektor hilirasi di Bengkulu, terletak pada industri pengolah minyak kelapa sawit, perikanan, hilirisasi karet, batubara dan panas bumi. Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi.



Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendongkrak daya saing ekonomi, yang seharusnya lebih meningkat. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama. Yang *Pertama* yaitu hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. *Kedua*, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. *Ketiga*, mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. *Keempat*, percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi, serta *Kelima* adalah meningkatkan integrasi pasar domestik. Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan akan dapat menempatkan Bemgkulu untuk mampu bersaing dalam hal produksi, industry pengolahan berbasis pertanian dan keungulan pemasaran hasil baik dalam negeri maupun ekspor.

b. Pembangunan Kemaritiman yang Integratif

Bengkulu sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut dan memiliki potensi maritim yang besar. Luas keseluruhan wilayah perairan laut yang dapat dikelola oleh Provinsi Bengkulu, mencapai 206.127,6 km2 atau setara dengan 19.446.000 hektar, yang terdiri dari perairan laut territorial (sampai batas 12 mil) yaitu 12 x 1,852 km x 525 km = 11.667,6 km2 atau setara dengan 1.166.760 hektar, dan luas perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI-sampai batas 200 mil) yaitu 525 km x 200 mil x 1,852 km = 194.460 km2 yang setara dengan 19.446.000 hektar. Jika dibandingkan antara luas wilayah daratan dan luas wilayah perairan laut yang dapat dikelola, maka perbandingannya adalah 19.446.000 : 1.979.515 atau 1 : 9,8. Dengan kata lain, bahwa luas wilayah perairan laut yang dapat dikelola Provinsi Bengkulu jauh lebih luas dibandingkan luas wilayah daratan, yaitu 9,8 kali luas daratannya.

Dalam wilayah perairan laut Provinsi Bengkulu juga terdapat beberapa pulau kecil yaitu Kawasan Pulau Enggano dengan beberapa pulau-pulau

kecil disekitarnya (Pulau Dua, Pulau Merbau, Pulau Bangkai, Pulau Satu dan Pulau Karang Baru), Pulau Tikus dan Pulau Mega. Dua diantara pulau-pulau kecil tersebut, merupakan pulau kecil terluar dari 92 pulau kecil terluar yang ada di seluruh wilayah perairan laut Indonesia, yaitu Pulau Enggano dan Pulau Mega.

Bengkulu memiliki potensi sumberdaya wilayah pesisir dan lautan yang cukup besar dari perspektif kemaritiman, baik potensi kelautan dan perikanan, pariwisata, perhubungan dan maupun potensi energi serta sumberdaya mineral. Bidang kemaritiman yang mencakup 4 (empat) sektor utama, yaitu sektor kelautan dan perikanan (termasuk sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), sektor pariwisata-bahari, sektor perhubungan laut dan sektor energi sumberdaya mineral) sebagian besar belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal di Provinsi Bengkulu. Seyogyanya lah, jika semua potensi kemaritiman tersebut dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, maka akan sangat diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu, khususnya masyarakat yang mendiami wilayah pesisir.

Berdasarkan data, saat ini Nilai Tukar Nelayan Provinsi Bengkulu Desember 2020 tercatat sebesar 99,25%. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang dihasilkan nelayan masih lebih rendah dari barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Seharusnya, dengan potensi maritim yang dimiliki Bengkulu, kesejahteraan nelayan dapat meningkat. Pembangunan kemaritiman yang terpadu memerlukan kebijakan khusus sehingga benar-benar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu. Pembangunan kemaritiman harus diselaraskan dengan kebijakan nasional terkait dengan poros maritim, infrastruktur pelabuhan utama dan pengumpan, infrastruktur jalan, pembangunan kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat nelayan dan berbagai kebijakan pendukung lainnya. Pembangunan kemaritiman harus benar-benar berbasis potensi lokal dan oleh karenanya memerlukan kebijakan pembangunan khusus yang berorientasi pada penurunan tingkat kemiskinan nelayan, perbaikan permukiman dan diversifikasi lapangan kerja bagi masyarakat nelayan.

Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritim nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor-sektor kelautan antara lain *(1)* Sektor perikanan tangkap melalui modernisasi alat tangkap dan pengolahan; *(2)* Sektor wisata bahari, pemanfaatan maritim sebagai obyek dan daya tarik seperti wisata pantai, keragaman hayati, seperti taman laut wisata alam, wisata bisnis, wisata budaya, maupun wisata olah raga; *(3)* Sektor Transportasi Laut yakni memanfaatkan transportasi laut sebagai penunjang aktivitas ekspor dan impor Bengkulu; *(4)* Industri maritim seperti Pembangunan Industri Kelautan dengan berbagai jenis industri sebagai penciptaan nilai tambah; pengembangan industri pariwisata bahari; pengembangan indiustri kreatif kebaharian; pembangunan infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan Industri Perkapalan baik yang kecil, menengah, dan besar, industri pemeliharaan dan perbaikan kapal dan atau galangan kapal; *(5)* Sektor pertambangan (Energi dan Sumberdaya Mineral) yaitu mengoptimalkan sumberdaya mineral di kawasan laut Bengkulu, baik yang bersifat potensial maupun aktual; *(6)* Sektor bangunan laut, yakni peningkatan kualtas, kuantitas serta kapasitas pelabuhan laut yang ada di Bengkulu sebagai pusat aktivitas perekonomian barang dan jasa (antar pulau, ekspor maupun impor), sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan kelautan; *(7)* Sektor jasa kelautan dapat berupa aktivitas ekonomi yang meliputi jasa perdagangan, penelitian dibidang kelautan, dan jasa-jasa lainnya.

c. Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif

Bengkulu tidak hanya anugerah potensi kekayaan alam, tapi juga memiliki potensi budaya yang tinggi dan potensi sejarah yang luar biasa yang dapat membawa Provinsi Bengkulu, tanah kelahiran ibu negara pertama Indonesia Ibu Fatmawati Soekarno, menjadi kota tujuan wisata yang berdaya saing. Dengan potensi pariwisata yang sangat berlimpah, kondisi pariwisata di Provinsi Bengkulu perlu mendapatkan perhatian lebih. Saat ini, upaya Bengkulu dalam mendongkrak pariwisata sudah cukup baik, namun belum sampai pada titik puncaknya, terlebih pada tahun 2020 sektor pariwata diguncang oleh pandemic Covid-19. Sebagai gambaran pada tahun 2019 pada kondisi normal tanpa pandemi Covid-19, Provinsi Bengkulu hanya mampu mencatatkan Tingkat Hunian Kamar hanya sebesar 67,97% dan Rata-rata lama Menginap hanya 1,8 hari. Saat terdampak pandemic Covid-19, Tingkat Hunian Kamar tercatat turun

sebesar 45,45% dan Rata-rata lama Menginap hanya 1,31 hari. Selain itu, investasi di sektor pariwisata masih cukup rendah, yang berdampak padaperanan sektor pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi juga rendah hanya sebesar 1,78% pada Triwulan III tahun 2020. Selanjutnya, penyerapan tenaga kerja di sektor penyediaan jasa akomodasi dan konsumsi juga rendah yaitu sebesar 3,87% dari total penduduk yang bekerja pada Agustus 2020.

Pariwisata yang dikembangkan sebagai sebuah industri usaha diharapkan kedepannya, tidak hanya dapat meningkatkan kesejehteraan masyarakat, meningkatkan pemerataan kemakmuran rakyat, namun industri pariwisata dengan segala potensi yang ada didalamnya, diharapkan juga menjadi mesin yang efektif untuk pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Untuk itu, sangat diperlukan komitmen dalam berbagai aspek, termasuk dari aspek kebijakan dan perencanaan yang kuat. Oleh karenanya Bengkulu perlu berfokus kepada pengembangan sektor pariwisata yang tematik, holistik, integratif dan spasial dalam aspek: Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pembangunan Daya Tarik Wisata, Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum Dan Fasilitas Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan, Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata, Pengembangan Pasar Wisatawan, Pengembangan Citra Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Promosi Pariwisata, Penguatan Struktur Industri dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata, Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan, Penguatan Organisasi Kepariwisataan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

4.2.3.5. Peningkatan Kinerja Birokrasi

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur

sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi untuk mewujudkan *e-Government* menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten. Nilai SAKIP Provinsi Bengkulu, berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN RB, adalah sebesar 68,48% tahun 2020.

Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Dari tingkat kontribusi PAD dan DBH Provinsi Bengkulu terhadap pendapatan daerah, Bengkulu termasuk daerah yang belum mandiri. Kondisi tersebut menggambarkan dua hal, yaitu pertama adalah belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Bengkulu. Sumber-sumber PAD yang ada selama ini (kondisi eksisting) sepertinya sudah tidak lagi mampu membiayai kenaikan beban belanja APBD Provinsi Bengkulu yang terus meningkat setiap tahunnya. Kedua adalah adanya kenaikan secara signifikan beban belanja APBD Provinsi Bengkulu yang relatif memberikan tekanan pembiayaan APBD. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Indeks profesionalitas ASN di Provinsi Bengkulu masih rendah. Pada tahun 2020, Indeks Profesionalitas ASN baru mencapai 71,92. Abdi negara atau yang sekarang dikenal dengan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang

memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat mutlak diperlukan. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Sedangkan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah selama 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Bengkulu terus melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat Bengkulu. Aspek kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan di Bengkulu. Penciptaan kondusivitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Bengkulu yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

4.2.3.6. Pemulihan Kondisi Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dikategorikan sebagai bencana non alam karena wabah penyakit sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kejadian pandemi COVID-19 di Bengkulu memiliki dampak sangat luas di berbagai sektor (multi sektor) mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kondisi kerentanan sosial (social vulnerability) akibat pandemi ini menyebabkan ketahanan keluarga dan masyarakat mengalami penurunan sehingga produktivitas menurun, mata pemcaharian terganggu, serta munculnya kepanikan sosial di tengah masyarakat.

Selain dampak sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19, perlambatan pertumbuhan ekonomi sangat dirasakan di Provinsi Bengkulu. Penurunan penerimaan pajak terutama dari sektor perdagangan, terganggunya pasokan bahan baku, gelombang PHK yang begitu besar yang berdampak pada kesulitan mencari penghasilan bagi setiap orang, sangat

mempengaruhi kehidupan masyarakat dan berbagai permasalahan lainnya yang memerlukan strategi pemulihan yang tepat. Covid-19 telah membuat ekonomi Bengkulu terkontraksi hingga minus 0,02 persen pada tahun 2020. Hal ini juga berdampak pada pendapatan daerah yang menurun, sehingga diproyeksikan kemampuan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan juga akan menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Mengembalikan ekonomi Bengkulu keposisi semua seperti sebelum terjadinya pandemic Covid-19 memerlukan langkah strategis yang terpadu untuk menerapkan Adaptasi Kebiasan Baru untuk masa depan. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu terkait Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), yaitu:

1. Penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan di fasilitas umum;
2. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat;
3. Perpaduan pembelajaran melalui daring dan luring;
4. Digitalisasi keuangan daerah dan UMKM;
5. Pembatasan jumlah pengunjung pada pelayanan kesehatan dan fasilitas umum;
6. Peningkatan digitalisasi pelayanan publik; dan
7. Efisiensi belanja barang dan jasa pemerintah.

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Bengkulu dan memastikan masyarakat kembali memiliki ketahanan sosial pada diri, keluarga, dan masyarakat.

PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2021

BAB V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

PROVINSI BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Bengkulu 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu. Pernyataan visi Provinsi Bengkulu periode 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Bengkulu sampai dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi.

Sebelum menjabarkan mengenai Visi RPJMD, terlebih dahulu akan ditelaah Visi Jangka Panjang Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah periode 2005-2025. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan pembangunan selama lima tahun ke depan. Adapun Visi RPJPD Provinsi Bengkulu adalah "*Provinsi Bengkulu yang sejahtera, adil dan demokrasi bertumpu Pada sumber daya manusia unggul dan bertaqwa Serta perekonomian kokoh*". Substansi Visi RPJPD Provinsi Bengkulu di atas menjadi pijakan dalam penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih agar Sasaran Pokok RPJPD di tahun berkenaan dapat dijabarkan menjadi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah. Adapun Visi pembangunan Provinsi Bengkulu dalam RPJMD tahun 2021-2026 sebagai berikut :

"BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT"

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari cita-cita pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021. Visi di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 untuk mencapai:

1. ***BENGKULU SEMAKIN MAJU*** dengan mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia.
2. ***BENGKULU SEMAKIN SEJAHTERA*** dengan mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan

kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan.

3. Dan pada tujuan akhir, ***BENGKULU MENJADI HEBAT*** dengan mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur).

5.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Provinsi Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat, maka Misi yang diemban lima tahun ke depan yang menjadi pedoman dalam pembangunan Provinsi Bengkulu adalah:

Misi I : ***Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;***

Pembangunan infrastruktur di Bengkulu kedepan akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan masif dengan pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol, Jalur Kereta Api, Pelabuhan, Bandara, jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, membuka akses lebih luas terhadap kawasan pariwisata, memantapkan pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat, memacu pertumbuhan lapangan kerja baru serta mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian berbasis potensi daerah.

Misi II : ***Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;***

Pembangunan Provinsi Bengkulu perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pengelolaan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam harus memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Bengkulu akan tetap dapat dirasakan oleh generasi penerus. Selain itu, pembangunan yang dilakukan harus tetap mengedepankan aspek kesiapsiagaan terhadap bencana (*disaster*

preparedness). Semua pemanfaatan SDA Bengkulu dilakukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi III : *Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;*

Kapasitas kelembagaan pemerintahan yang ada di Bengkulu diperkuat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan tetap mengedepankan kerjasama antar instansi agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi Provinsi Bengkulu kedepan difokuskan adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia aparatur, peningkatan akuntabilitas pemerintahan serta zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif dilakukan dengan penerapan pelayanan yang cepat, ramah, murah, mudah, berkualitas, serta didukung dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi.

Misi IV : *Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religius;*

Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu dibentuk dan dibangun agar dapat menjadi manusia yang kuat, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, beradab-budaya, menguasai teknologi, berkarakter, sejahtera sehingga mampu memiliki daya saing yang tinggi. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup mulai dari kandungan hingga tumbuh, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Selanjutnya pembangunan manusia dilakukan dalam kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan mengimplementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat yang religius dan toleran dengan menciptakan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Misi V : *Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara Terpadu;*

Perempuan di Provinsi Bengkulu diberikan akses dan kontrol yang sama dalam setiap bidang pembangunan serta berhak memperoleh manfaat tanpa terkecuali sehingga tujuan dari kesetaraan gender dapat dicapai. Selain itu pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Pemerintah bersama dengan masyarakat secara terpadu akan hadir untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Tidak hanya perempuan dan anak, Misi kelima ini juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Bengkulu. Pemenuhan hak-hak disabilitas tersebut merupakan suatu pengarusutamaan yang harus ada dalam setiap aspek pembangunan di Provinsi Bengkulu selama 5 (lima) tahun mendatang.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan misi Pemerintah Provinsi Bengkulu, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sedangkan sasaran (objective) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tabel 5.1.
Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

MISI I Membangun Ekonomi dan Infrastruktur Secara Merata Dan Berkeadilan untuk Mewujudkan Pertumbuhan yang Berkualitas dan Inklusif

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	Nilai realisasi Investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Penanaman Modal	DPMPTSP
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase pertumbuhan sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB	Meningkatnya Nilai Produksi Industri	Nilai Produksi Industri Besar	Perindustrian	Disperindag
							Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Perindustrian	Disperindag

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
				Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Sektor Koperasi terhadap PDRB	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskopukm
					Pertumbuhan Sektor UMKM terhadap PDRB		Pertumbuhan Koperasi Modern		
					Kontribusi Sektor Koperasi terhadap PDRB				
					Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB				
						Meningkatnya Kualitas UMKM	Pertumbuhan Omzet UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskopukm
							Pertumbuhan Usaha Mikro yang Bertransformasi		

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
							dari Informal ke Formal		
				Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Nilai Ekspor	Perdagangan	Disperindag
							Persentase Peningkatan Nilai Ekspor		
						Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Perdagangan	Disperindag
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur Strategis	Meningkatnya pemenuhan pengembangan dan Pelayanan Transportasi	Persentase pemenuhan pengembangan dan Pelayanan Transportasi	Meningkatnya pemenuhan Fasilitas Pelayanan dan Dokumen Transportasi	Persentase Pemenuhan Fasilitas Perhubungan Darat	Perhubungan	Dinas Perhubungan
							Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan laut dan penyeberangan		

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
							Persentase Pemenuhan Pelayanan Publik Sektor Perhubungan		
							Persentase Pemenuhan Dokumen Transportasi		
				Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Meningkatnya kualitas jaringan jalan	Persentase penanganan Jalan Provinsi	Pekerjaan umum	Dinas PUPR
			Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur Dasar	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Pekerjaan umum	Dinas PUPR
							Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan non perpipaan	Pekerjaan umum	Dinas PUPR

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
				Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi layak	Terpenuhinya akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi layak	Pekerjaan umum	Dinas PUPR
				Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Permukiman Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap Permukiman Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
					Luas Kawasan Kumuh (Ha)	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Persentase Penanganan Luas Kawasan Kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
					Persentase Kecamatan yang dibangun PSU	Meningkatnya prasarana, sarana dan utilias umum di kawasan permukiman	Persentase Peningkatan Jumlah Kecamatan yang dibangun PSU	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman
				Meningkatnya akses energi yang handal dan berkeadilan bagi masyarakat	Rasio elektrifikasi	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Listrik	Rasio elektrifikasi PLN	Energi dan sumber daya mineral	Dinas ESDM

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata	Indeks Gini	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Sektor Koperasi terhadap PDRB	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM	Indikator Sasaran: Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskopukm
					Pertumbuhan Sektor UMKM terhadap PDRB		Pertumbuhan Koperasi Modern	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Diskopukm
					Kontribusi Sektor Koperasi terhadap PDRB				
					Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB				
				Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap	Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB	Meningkatnya Nilai Produksi Industri	Nilai Produksi Industri Besar	Perindustrian	Disperindag
							Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Perindustrian	Disperindag
				Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)	Meningkatnya produksi komoditas tanaman	Produksi padi	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
						pangan unggulan			dan Perkebunan
						unggulan	Produksi Jagung	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
					Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	Meningkatnya produksi komoditas hortikultura unggulan	Produksi Cabai Merah	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Bawang Merah	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Jeruk		
					Nilai Tukar Petani Pekebun	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan unggulan	Produksi Karet Rakyat	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Kopi	Pertanian	Dinas Tanaman

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
									Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Meningkatnya Kesejahteraan Petani Peternak	Nilai Tukar Petani Peternak	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging Ternak Ruminansia Besar (ton)	Pertanian	Dinas Peternakan dan keswan
							Produksi Daging Ternak Ruminansia Kecil (ton)	Pertanian	Dinas Peternakan dan keswan
							Produksi Daging Ternak Ruminansia Unggas (ton)	Pertanian	Dinas Peternakan dan keswan
				Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan budidaya	Kelautan dan perikanan	Dinas kelautan dan perikanan
							Produksi perikanan tangkap		

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
		Menurunnya Pengangguran	Angka Pengangguran	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	Indeks pembangunan ketenagakerjaan	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tenaga Kerja	Disnaker

MISI II Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Bermanfaat yang Sebesar-Besarnya bagi Kesejahteraan

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pariwisata; sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan sub sektor pertanian dan perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan unggulan	Produksi padi	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Jagung	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
					Persentase pertumbuhan sub sektor Tanaman Hortikultura terhadap PDRB	Meningkatnya produksi komoditas hortikultura unggulan	Produksi Cabai Merah	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Bawang Merah	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Jeruk		
					Persentase pertumbuhan sub sektor Perkebunan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan unggulan	Produksi Karet Rakyat	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Kopi	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Meningkatnya pertumbuhan sub sektor	Persentase pertumbuhan sub sektor	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging Ternak	Pertanian	Dinas Peternakan dan keswan

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
				Peternakan terhadap Pertumbuhan ekonomi Daerah	peternakan terhadap PDRB		Ruminansia Besar (ton)		
							Produksi Daging Ternak Ruminansia Kecil (ton)	Pertanian	Dinas Peternakan dan keswan
							Produksi Daging Ternak Ruminansia Unggas (ton)	Pertanian	Dinas Peternakan dan keswan
				Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan budidaya	Kelautan dan perikanan	Dinas kelautan dan perikanan
							Produksi perikanan tangkap	Kelautan dan perikanan	Dinas kelautan dan perikanan
				Meningkatnya pertumbuhan pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan pariwisata terhadap PDRB	Berkembangnya Sektor Pariwisata	Jumlah wisatawan	Pariwisata	Dinas Pariwisata
							Rata-rata lama tinggal	Pariwisata	Dinas Pariwisata

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
							Tingkat hunian hotel	Pariwisata	Dinas Pariwisata
				Meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Meningkatnya Produksi di sektor pertambangan unggulan	Persentase Volume Produksi Mineral dan Barubara	Energi dan sumber daya mineral	Dinas ESDM
				Meningkatnya pertumbuhan sub sektor kehutanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah	Persentase pertumbuhan sub sektor kehutanan terhadap PDRB	Meningkatnya nilai produksi hasil hutan	Volume Produksi Hasil Hutan	Kehutanan	DLHK
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	meningkatnya Pengelolaan kualitas air dan Udara	Persentase Limbah Domestik dan Industri yang Tertangani	Lingkungan hidup	DLHK
					Indeks Kualita Udara				
				Meningkatnya Cakupan Tutupan Lahan	Indeks tutupan lahan	Meningkatnya Area Tutupan Lahan	Persentase Kawasan Deforestrasi	Kehutanan	DLHK

MISI III Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan, Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Profesional serta Transformasi Pelayanan Publik

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan	Nilai Komponen perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pada SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai perencanaan kinerja	Perencanaan	Bappeda
						Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai pengukuran kinerja	Perencanaan	Bappeda
						Meningkatnya capaian target pembangunan	Nilai pencapaian kinerja	Perencanaan	Bappeda
				Meningkatnya pelaporan akuntabilitas kinerja	Nilai komponen pelaporan Kinerja pada SAKIP Daerah	Meningkatnya pelaporan akuntabilitas kinerja	Nilai komponen pelaporan Kinerja pada SAKIP Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	Biro Pemkesra Biro Organisasi
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola keuangan	Nilai komponen evaluasi internal Provinsi Bengkulu	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola keuangan	Nilai komponen evaluasi internal Provinsi Bengkulu	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Perangkat Daerah	Inspektorat

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
			Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola dengan akuntabel	Meningkatnya kualitas tata kelola aset daerah	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik	Keuangan	BPKD
				Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	BPKD
				Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan internal	Dokumen Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKPPT) yang disusun	Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan internal berdasarkan PKPPT	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan PKPPT	Otonomi Daerah, Pemerintahaan Umum dan Perangkat Daerah	Inspektorat
			Indeks profesionalitas ASN	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintahan	Indeks profesionalitas ASN	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi ASN	Persentase ASN yang sesuai dengan Standar Kompetensi	kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	BKD
						meningkatnya kinerja dan tingkat kedisiplinan ASN	Persentase ASN yang sesuai dengan Standar Kualifikasi	kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	BKD
							Persentase Peningkatan Kinerja ASN	kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	BKD

Tujuan KADA	Indikator Tujuan KADA	Sasaran KADA	Indikator Sasaran KADA	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung jawab
							Persentase peningkatan Disiplin ASN	kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	BKD
			Nilai Indeks *e-Government* (SPBE)	Meningkatnya pelaksanaan *e-Government (*SPBE)	Nilai Indeks *e-Government* (SPBE)	Meningkatnya Pengelolaan Layanan Pemerintahan Berbasis Elektonik	Persentase Regulasi yang disusun dalam rangka pelaksanaan SPBE	Komunikasi dan informatika	Diskominfo
							Persentase Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Komunikasi dan informatika	Diskominfo
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu	Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang pelayanan perizinan terpadu	Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP	Penanaman modal	DPMPTSP
				Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang pelayanan samsat	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat dari Kemenpan RB	Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang pelayanan samsat	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat dari Kemenpan RB	Keuangan	BPKD
				Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase peningkatan layanan kependudukan dan catatan sipil	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase peningkatan layanan kependudukan dan catatan sipil	Kependudukan dan catatan sipil	Dinas Dukcapil

MISI IV Membangun Sumber Daya Manusia menjadi Berkualitas, Berdaya Saing dan Berbudaya serta Toleran dan Religius

Tujuan Kada	Indikator Tujuan Kada	Sasaran Kada	Indikator Sasaran kada	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Nilai Hasil Ujian Sekolah	Pendidikan	Dinas Dikbud
			Angka rata-rata lama sekolah		Angka rata-rata lama sekolah		Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK	Pendidikan	Dinas Dikbud
							Angka Melek Huruf		
							Angka Putus Sekolah		
						Meningkatnya akses pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA	Pendidikan	Dinas Dikbud
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA	Pendidikan	Dinas Dikbud
							Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA	Pendidikan	Dinas Dikbud
							Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)	Pendidikan	Dinas Dikbud

Tujuan Kada	Indikator Tujuan Kada	Sasaran Kada	Indikator Sasaran kada	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung Jawab
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (dalam 1 tahun)	Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran (dalam satu tahun)	Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Prevalensi Stunting	Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Prevalensi Wasting	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit dan Kedaruratan kesehatan masyarakat	Persentase Layanan Krisis Kesehatanan dan Kejadian Luar Biasa	Kesehatan	Dinas Kesehatan
							Persentase layanan pencegahan dan pengendalian penyakit	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat		

Tujuan Kada	Indikator Tujuan Kada	Sasaran Kada	Indikator Sasaran kada	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung Jawab
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP)	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan unggulan	Produksi padi	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Jagung	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
					Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	Meningkatnya produksi komoditas hortikultura unggulan	Produksi Cabai Merah	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Bawang Merah	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Jeruk		
					Nilai Tukar Petani Perkebun Rakyat (NTPR)	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan unggulan	Produksi Karet Rakyat	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Kopi	Pertanian	Dinas Tanaman

Tujuan Kada	Indikator Tujuan Kada	Sasaran Kada	Indikator Sasaran kada	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung Jawab
									Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
							Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
				Meningkatnya Kesejahteraan Petani Peternakan (NTPT)	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging Ternak Ruminansia Besar (ton)	Pertanian	Dinas Peternakan dan keswan
							Produksi Daging Ternak Ruminansia Kecil (ton)	Pertanian	Dinas Peternakan dan keswan
							Produksi Daging Ternak Ruminansia Unggas (ton)	Pertanian	Dinas Peternakan dan keswan
				Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP)	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan budidaya	Kelautan dan perikanan	Dinas kelautan dan perikanan
							Produksi perikanan tangkap	Kelautan dan perikanan	Dinas kelautan dan perikanan

Tujuan Kada	Indikator Tujuan Kada	Sasaran Kada	Indikator Sasaran kada	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung Jawab
			Angka Kemiskinan	Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Sosial	Dinas sosial
						Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Sosial	Dinas sosial
Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya Toleransi Umat Beragama	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Meningkatnya lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam pelayanan perlindungan umat beragama	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	Sosial	Pemkesra Kesbangpol

MISI V Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara Terpadu

Tujuan Kada	Indikator Tujuan Kada	Sasaran Kada	Indikator Sasaran kada	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung Jawab
Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan Indeks pemberdayaan gender	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Persentase Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Persentase Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Pemberdayaan perempuan	DP3APPKB
	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		Persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan setra TPPO	Pesentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan layanan pendampingan	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	Pesentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan layanan pendampingan	Pemberdayaan perempuan	DP3APPKB
				Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta TPPO	Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan layanan pendampingan	Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan	Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan layanan pendampingan	Pemberdayaan perempuan	DP3APPKB

Tujuan Kada	Indikator Tujuan Kada	Sasaran Kada	Indikator Sasaran kada	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Urusan	Penanggung Jawab
						Hak serta Perlindungan Khusus Anak			
Meningkatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas	Persentase pemenuhan hak penyandang disabilitas yang fasilitasi	Meningkatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas	Persentase pemenuhan hak penyandang disabilitas yang fasilitasi	Meningkatnya pelayanan dasar dan publik yang ramah bagi Penyandang Disabilitas	Persentase pelayanan dasar dan sarana publik yang ramah Penyandang Disabilitas	Harmonisasi Produk Hukum Daerah yang meng-arusutamakan isu disabilitas	Persentase Produk Hukum Daerah yang meng-arusutamakan isu disabilitas	Sosial	Dinas Sosial
						Meningkatnya sarana public ramah disabilitas	Persentase sarana public ramah disabilitas		

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Bengkulu Tahun 2021-2026 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 13 (tiga belas) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu. Pencapaian indikator kinerja Kepala Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, target pencapaian pembangunan lima tahun ke depan jelas dan terukur.

Tabel 5.2
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

VISI : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif	Tujuan 1.1 : Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0,02	4,9 - 5,2	5,05 - 5,35	5,2 - 5,5	5,35 - 5,65	5,5 - 5,8	5,5 - 5,8
		Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Triliun Rupiah	8,16	8,66	8,92	9,18	9,46	9,74	9,74
		Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase pertumbuhan sektor Industri dan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	-3,16	5	5,2	5,4	5,6	5,8	5,8
		Tujuan 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur wilayah	Persen	69,38	71	73	75	77	79	79
		Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur strategis	Persen	65,31	67	69	71	73	75	75

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur dasar	Persen	73,44	75	77	79	81	83	83
		Tujuan 1.3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata	Indeks Gini	Poin	0,334	0,332	0,33	0,328	0,326	0,324	0,324
		Sasaran 1.3.1: Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persen	15,3	14,5 - 14,9	14 - 14,5	13,5 - 14	13 - 13,5	12,5 - 12	12,5 - 12
		Sasaran 1.3.2 : Menurunnya Pengangguran	Angka Pengangguran	Persen	4,07	3,6 - 3,8	3,5 - 3,6	3,4 - 3,5	3,3 - 3,4	3,2 - 3,3	3,2 - 3,3
2	Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan	Tujuan 2.1: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-0,02	4,9 - 5,2	5,05 - 5,35	5,2 - 5,5	5,35 - 5,65	5,5 - 5,8	5,5 - 5,8
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,74	70,29	70,57	70,82	71,09	71,32	71,32
		Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pariwisata; sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	Persen	-0,77	4,8	5	5,2	5,4	5,6	5,6

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Sasaran 2.2.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	69,74	70,29	70,57	70,82	71,09	71,32	71,32
3	Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik	Tujuan 3.1 : Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Huruf	B	B	BB	BB	A	A	A
		Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	Huruf	B	B	BB	BB	A	A	A
			Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks profesionalitas ASN	Poin	71,96	74	75	76	77	78	78
			Nilai Indeks e-Government (SPBE)	Poin	2,9	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4
		Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Pelayanan Publik	Huruf	B	B	B	A-	A-	A-	A-
4	Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religius	Tujuan 4.1: Meningkatnya kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,4	71,6	71,7	71,8	71,9	72	72

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	13,63	13,64	13,65	13,66	13,67	13,67
			Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,84	9	9,1	9,2	9,3	9,4	9,4
		Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	69,35	69,5	69,65	69,8	69,95	70,1	70,1
		Sasaran 4.1.3 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	Juta	10,38	10,6	10,8	11	11,2	11,4	11,4
			Angka Kemiskinan	Persen	15,3	14,5 - 14,9	14 - 14,5	13,5 - 14	13 - 13,5	12,5 - 12	12,5 - 12
		Tujuan 4.2 : Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	71,8	72,5	73	73,5	74	74,5	74,5
		Tujuan 4.2 : Meningkatnya Toleransi Umat Beragama	Persentase penyelesaian konflik antar umat beragama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara Terpadu	Tujuan 5.1 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender	Poin	71,21	71,35	71,4	71,45	71,5	71,55	71,55
			Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	15

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan Indeks pemberdayaan gender	Poin	1,31	0,14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,34
			Persentase penanganan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	85	90	92,5	95	97,5	100	100
		Tujuan 5.1 : Meningkatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas	Persentase pemenuhan hak penyandang disabilitas yang fasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas	Persentase pemenuhan hak penyandang disabilitas yang fasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100

5.4. Prioritas Pembangunan, Program Prioritas, Kegiatan Unggulan Janji Kampanye dan Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah

RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, juga memuat program strategis yang menjadi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Provinsi Bengkulu yang mendukung pelaksanan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

5.4.1. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan

Dalam mencapai Visi dan Misi Pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026, maka dituangkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, maka untuk jangka menengah selama 5 (lima) tahun dalam RPJMD Provinsi Bengkulu menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah, ditambah dengan Prioritas Pembangunan untuk Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19. Prioritas daerah ini merupakan kelanjutan prioritas pembangunan pada RPJMD Tahun 2016-2021 yang masih perlu diintervensi pada periode RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan isu strategis yang masih dihadapi.

1. ***Prioritas Pembangunan 1*** **: Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing**

   Kemiskinan saat ini masih menjadi isu strategis Provinsi Bengkulu. Kemiskinan mengakibatkan lambatnya pembangunan manusia di Bengkulu. Akses masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin terhadap pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sosial masih terbatas. Selain itu, kualitas tenaga kerja yang masih cukup rendah, mengakibatkan produktivitas tenaga kerja menjadi terbatas yang berdampak pada rendahnya pendapatan dan meningkatkan resiko kemiskinan.

   Oleh karena itu, prioritas pembangunan pertama ini akan mengakselerasi pengentasan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan miskin. Serta meningkatkan kualitas SDM melalui pelayanan dasar sektor kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan sosial. Tujuan utama dari prioritas pembangunan ini adalah menurunnya kemiskinan dan mewujudkan SDM Bengkulu yang berdaya saing.

Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1
Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Pertama



2. *Prioritas Pembangunan 2* : Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan

Infrastruktur di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya berdaya saing. Bengkulu memiliki Pelabuhan Pulau Baai, yaitu pelabuhan besar yang berada di sisi barat Bengkulu yang berpotensi menjadi gerbang keluar masuk komoditas baik Bengkulu maupun wilayah sekitar. Selain itu, letak geografis Bengkulu yang berada pada sisi paling barat Sumatera, membuat Bengkulu memerlukan infrastruktur strategis sebagai penunjang konektivitas daerah. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar juga perlu dilakukan untuk mendukung percepatan pengurangan kemiskinan dari aspek pelayanan dasar kepada masyarakat. Bengkulu juga memiliki potensi maritim yang sangat baik, yang belum sepenuhnya memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah.

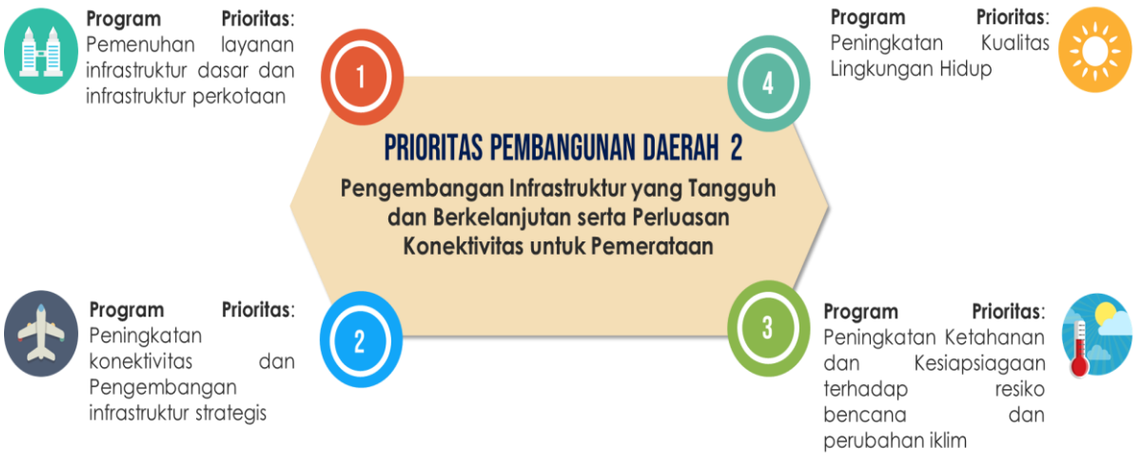
Pembangunan infrastruktur yang merata pada seluruh kabupaten/kota diperlukan sebagai wujud dari pemerataan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan dan pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketahanan terhadap resiko bencana

terutama gempa dan tsunami yang menjadi ancaman Bengkulu serta perubahan iklim.

Oleh karena itu, prioritas pembangunan kedua ini ditujukan untuk pengembangan infrastruktur di Provinsi Bengkulu, baik infrastruktur strategis maupun infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas dan produktif dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur berbasis potensi daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selanjutnya, konektivitas baik antar maupun intra wilayah Bengkulu perlu diperluas untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Provinsi Bengkulu yang sejalan dengan penataan ruang wilayah.

Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 5.2
Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Kedua



3. *Prioritas Pembangunan 3* : Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi

Bengkulu memiliki banyak sumber daya ekonomi yang memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi agar inklusif dan berkualitas. Sumber daya ekonomi tersebut terdiri dari sumber daya pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan energi. Pembangunan ekonomi Bengkulu perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, terutama pada kondisi stabilitas ekonomi global yang tidak menentu. Pemanfaatan SDA Bengkulu lebih banyak pada tingkatan barang mentah dan barang setengah jadi. Proses hilirisasi SDA, terutama yang menjadi komoditas unggulan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Sehingga, ekonomi Bengkulu relatif rentan terhadap fluktuasi harga

komoditas. Selain itu, terkait ketahanan pangan, stagnasi produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan masih menjadi permasalahan pembangunan daerah. Alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi perkebunan atau permukiman telah mengancam kemandirian pangan Provinsi Bengkulu. Oleh karenanya pembangunan ekonomi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang berjalan lambat. Pemerintah Bengkulu perlu mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern, yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kesejahteraan. Pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk menciptakan nilai tambah, penyerapan investasi serta meningkatkan ekspor dan daya saing perekonomian.

Prioritas Pembangunan ketiga ini, bertujuan agar pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian menjadi produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, investasi serta meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan.

Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 5.3
Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Ketiga



4. *Prioritas Pembangunan 4* : Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintah yang baik dihadapkan pada isu strategis yang yang terkait dengan: profesionalitas, integritas, kreativitas ASN; inovasi dalam layanan publik; kelembagaan dan proses pelayanan yang sederhana, adaptif, responsif yang membuka ruang untuk peran publik dalam pemerintahan; serta akuntabilitas kinerja dan pengawasan pemerintahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah.

Tata kelola pemerintahan perlu diarahkan agar partisipatif dan inklusif dengan mengikutkan masyarakat sebagai sumber kebijakan. Birokrasi yang inovatif yang selalu memperbaiki kinerja dan penciptaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah akan dielaborasi dengan pendekatan pembangunan yang partisipatif dan inklusif. Peningkatan partisipasi diwujudkan melalui perluasan ruang bagi publik dan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan, sedangkan di sisi lain karakter birokrasi yang inklusif akan menghapus sekat diskriminasi pembangunan.

Prioritas pembangunan 4 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif yang membuka ruang publik untuk berpartisipasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumberdaya aparatur yang baik. Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 5.4
Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Keempat



5. *Prioritas Pembangunan 5* : Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Bengkulu sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu meningkatkan industri kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Terlebih selama lima tahun sebelumnya, Bengkulu berhasil mengangkat derajat pariwisata Bengkulu menjadi lebih baik dan lebih dikenal. Namun, kedepan Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga masih perlu didorong untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan pendapatan daerah, perlu didorong terutama bagaimana menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, penyiapan sumberdaya manusia serta kolaborasi antar pemerintahan.

Pengembangan pariwisata Bengkulu perlu mempertimbangkan potensi geografis dan sosio-grafis yang dimiliki dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik yang kuat. Pengembangan sektor pariwisata Bengkulu perlu ditekankan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup, dengan memperhatikan kekhasan geografis dengan konteks zonasi serta melalui berbagai koridor sektoral dan budaya, dengan kreativitas termasuk eduwisata. Terlebih Bengkulu memiliki potensi wisata sejarah yang kuat serta memiliki Pulau Enggano yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan dengan menempatkan

masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata. Disamping itu, juga dikembangkan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Bengkulu, melalui pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata. Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan industri dan ekonomi kreatif dengan mengembangkan pariwisata sebagai ruang temu budaya masyarakat dan berdaya dukung hasil-hasil produksi masyarakat setempat.

Untuk mengakselerasi kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam perekonomian daerah yang turut mendukung pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan ke-5, yaitu Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif dan Ekonomi Kreatif. Tujuan dari prioritas pembangunan ini adalah pengembangan kawasan potensial pariwisata, peningkatan partisipasi event/promosi pariwisata, pencitraan pariwisata yang menarik, pemberdayaan masyarakat dan SDM pariwisata, peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang pariwisata, pengembangan pelaku ekonomi kreatif dan peningkatan kualitas produk UMKM kreatif.

Program prioritas daerah yang merupakan penjabaran pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Gambar 5.5
Kerangka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Kelima



6. Prioritas Pembangunan untuk Penanganan dan Pemulihan Dampak Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 memberikan dampak cukup signifikan pada kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat Bengkulu. Secara makro, kondisi perekonomian daerah akibat pandemi Covid-19 ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan

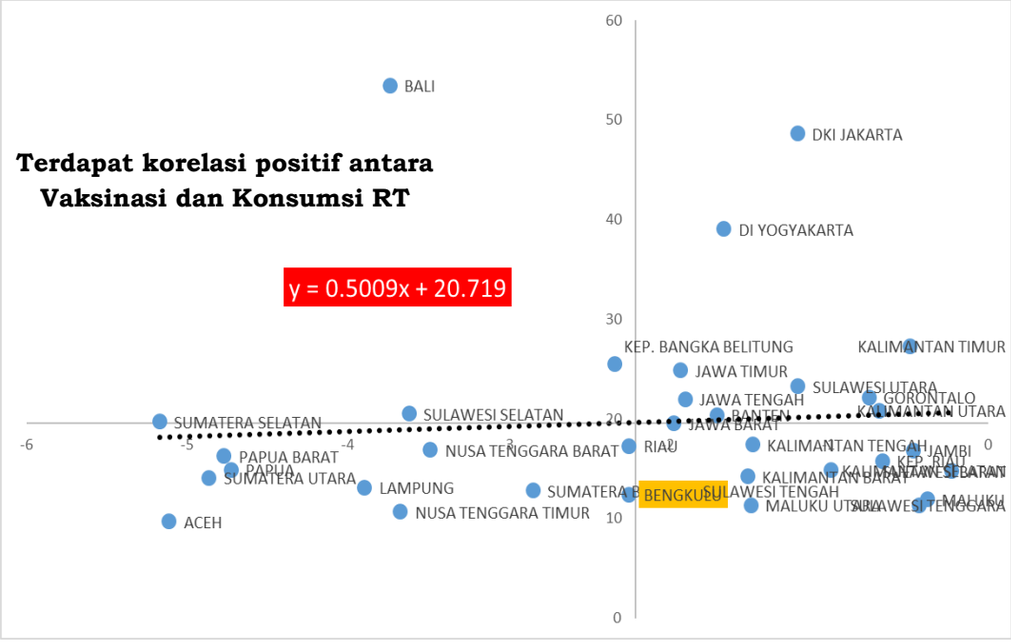
ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi cukup besar pada ekonomi Bengkulu seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata. Secara mikro, dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi terpuruk. Secara umum, pandemi ini mengakibatkan penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi antara lain menurunkan daya beli masyarakat, bahkan muncul penduduk miskin baru, dan pengangguran baru akibat PHK. Kondisi ini juga dapat memberikan dampak pada tingkat kondusivitas wilayah, dimana mulai diindikasikan adanya peningkatan kasus-kasus kriminalitas di masyarakat.

Hal tersebut mendorong pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus kepada penanganan dan dampak akibat Covid-19. Covid-19 diprediksi akan tetap menjadi hambatan dalam pembangunan dan akan tetap memberikan kontraksi terhadap perekonomian. Progres vaksinasi yang terus berlangsung diprediksikan akan mampu meningkatkan mobilitas, perekonomian daerah dan diharapkan ekonomi Bengkulu akan pulih.

Pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan penanganan dampak kesehatan dan sosial akibat Pandemi Covid-19. Dalam rangka mengatasi dampak yang lebih besar akibat COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, Pemerintah Provinsi Bengkulu kedepannya perlu memfokuskan kebijakan pembangunan untuk pemulihan sektor-sektor ekonomi terdampak. Oleh karena itu, dibutuhkan program pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali jasa, investasi, dan pariwisata serta mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya. Untuk kepentingan tersebut maka prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu khusus untuk memulihkan kondisi yang terdampak pandemi, diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui pemulihan sektor yang berkontribusi besar dalam PDRB serta melakukan reformasi pada sistem kesehatan daerah dan sistem perlindungan sosial.

a) Pemulihan ekonomi

1) Mempercepat proses Vaksinasi sebagai *game changer*



Vaknsinasi kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mencapai *herd immunity*, sehingga ekonomi dapat segera pulih. Berdasarkan kajian Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, terdapat korelasi positif antara realisasi vaksinasi dengan konsu msi Rumah Tangga dan. Vaksinasi ternyata mampu mendorong peningkatan konsumsi. Sehingga jika seluruh masyarakat Bengkulu sudah divaksinasi makan konsumsi pun akan meningkat. Setiap penambahan 1% konsumsi akan berdampak pada tenaga kerja dan output. Vaksinasi juga mampu mendongkrak mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk yang tinggi akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi. Terdapat korelasi positif antara mobilitas penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Vaksinasi memiliki peran yang sangat penting sebagai *game changer* untuk pemulihan ekonomi. Saat ini, (per Mei 2021, Data Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu) sebanyak 79,32% tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi dan baru sekitar 3,98% penduduk lansia yang divaksinasi. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu merekomendasikan upaya yang akan dilakukan untuk mempercepat vaksinasi di Provinsi Bengkulu adalah:

a. Memastikan distribusi vaksin lancar tanpa kendala;
b. Mendorong peningkatan jumlah dosis vaksin di Provinsi Bengkulu;

c. Penguatan tenaga pendataan penerima vaksinasi serta promosi

2) Pemulihan Sektor Riil Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang terdampak cukup berat, terutama dengan adanya kebijakan social distancing/physical distancing saat pandemi COVID-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk memperlambat penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Sebagai akibatnya kelompok usaha pendukung penggerak pariwisata juga ikut terpengaruh. Kelompok usaha tersebut antara lain perjalanan (penerbangan, pelayaran, agen travel lokal), hotel, restoran dan lokasi destinasi wisata/desa wisata.

Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 antara lain dengan mengaktifkan pembangunan pariwisata, dimana pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi. Arah kebijakan yang diambil adalah dengan melaksanakan program yang dapat menyerap tenaga kerja terutama yang kehilangan pekerjaan, membangkitkan kembali usaha terdampak COVID-19 dan membangun usaha baru untuk meningkatkan investasi dan serapan tenaga kerja.

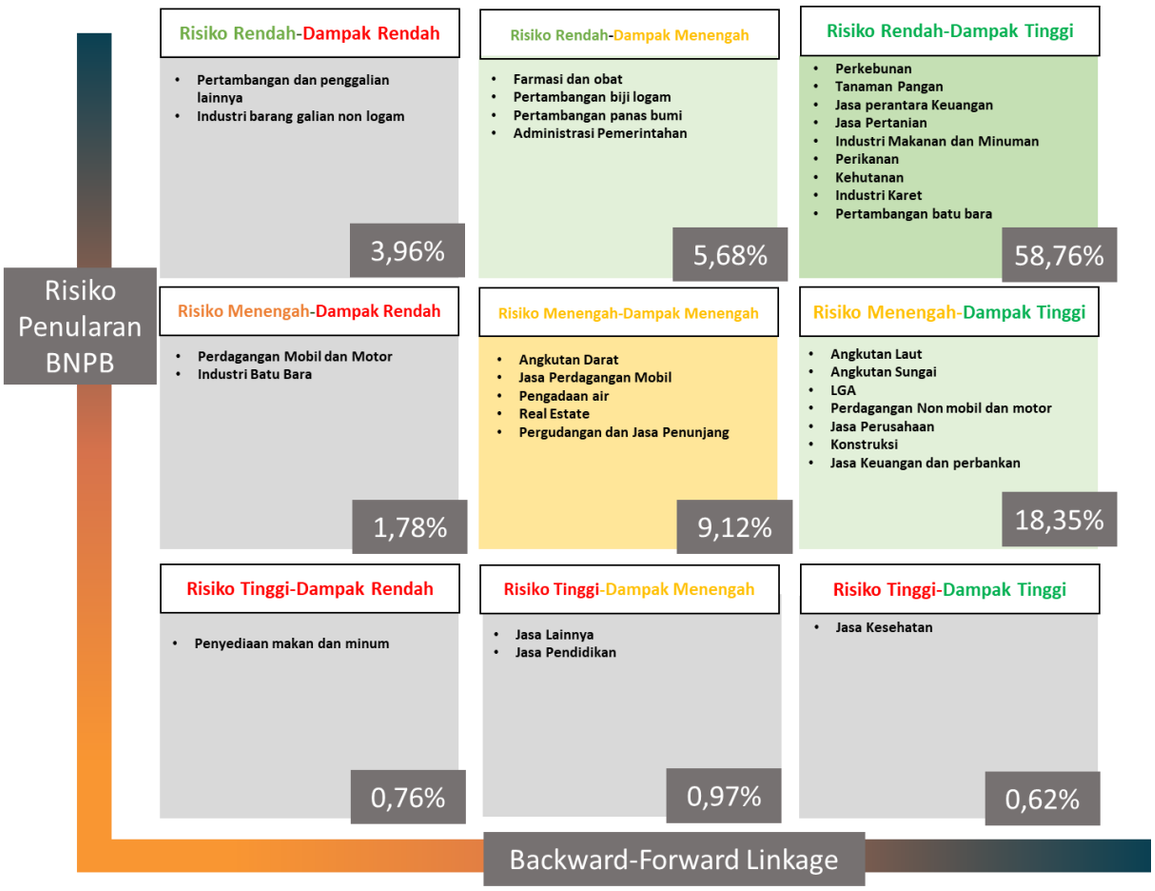
Untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan beberapa kegiatan antara lain pemulihan sektor transportasi terutama udara; peningkatan promosi wisata pada originasi yang sudah pulih, seperti Pulau Enggano sebagai KSPN; peningkatan event-event seni, budaya dan olah raga; penyediaan insentif untuk paket wisata di destinasi, peningkatan sarana prasarana pendukung dan standar layanan; serta penerapan standar *Cleanliness, Hygiene, Sanitation*, and *Environment* pada sektor perhotelan.

3) Pemetaan Sektor Prioritas sebagai sasaran pemulihan ekonomi

Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, sektor lapangan usaha di Provinsi Bengkulu yang perlu terlebih dahulu dibenahi adalah pada sektor-sektor yang memiliki resiko rendah penularan namun memiliki *multifier effect* yang besar terhadap peningkatan ekonomi. Sektor tersebut adalah : Perkebunan, Tanaman Pangan, Jasa perantara Keuangan, Jasa

Pertanian, Industri Makanan dan Minuman, Perikanan, Kehutanan, Industri Karet, Pertambangan batu bara.

Pemetaan Sektor Prioritas Pemulihan Ekonomi



Sektor prioritas tersebut juga yang harus dijadikan sasaran dalam vaknsinasi Covid-19. Diharapkan, dengan melakukan intervensi penanganan pada sektor prioritas, ekonomi Bengkulu dapat segera pulih dengan meminimalkan resiko penyebaran Covid-19.

4) Digitalisasi Transaksi Pemerintahan Daerah dan Pemberian Bantuan Sosial

Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang menjanjikan pada sektor digitalisas pemerintahan daerah, termasuk dalam penyaluran bansos Covid-19. Bank Bengkuku, sebagai BUMD yang bergerak disektor jasa perbankan telah mampu masuk kedalam BUKU II, sehingga sudah dapat melakukan ekspansi layanan bank secara digital. Berdasarkan kajian Bank Indonesia, digitalisasi dna eletronifikasi keuangan daerah akan mampu menambal kebocoran PAD dan mampu meningkatkan 11-14% penambahan PAD. Hal ini sangat diperlukan, mengingat saat ini PAD Bengkulu terkontraksi cukup dalam akibat dari dampak Covid-19. Selain itu, dalam penyaluran Bantuan Sosial, dapat dilakukan secara digital dengan

memanfaatkan e-warung sehingga bantuan yang diberikat dapat tepat sasaran dan tepat manfaat. Alokasi bantuan sosial tidak akan dapat disalahgunakan oleh penerima, karena penyaluran yang sudah terdigitalisasi dalam e-warung. Berdasarkan kajian IMF yang diperoleh dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, digitalisasi bantuan sosial akan mampu menahan kemiskinan hingga 1,74%.

5) Pemulihan dam Digitalisasi UMKM

Upaya pemulihan ekonomi juga dilakukan dengan membangkitkan perekonomian pedesaan dan UMKM melalui pemetaan berbagai potensi desa berdasarkan pada klaster UMKM (bidang usaha, tenaga kerja, dan bahan baku), pemulihan pasar lokal, mendorong masyarakat untuk membeli produk UMKM, kemudahan akses permodalan (tanpa bunga), bantuan sarana produksi, subsidi energi, memperkuat kemitraan dengan perusahaan besar, serta pendampingan melibatkan akademisi dan penyuluh. Dalam penciptaan lapangan kerja untuk mengantisipasi tenaga kerja migran (termasuk yang di PHK) dan telah memiliki keterampilan tertentu maka perlu dilakukan pemanfaatan informasi kartu prakerja, updating tenaga kerja, pelatihan melalui BLK dan kerjasama kampus, pendampingan pencari kerja, padat karya terutama di desa, serta pemulihan dan perkuatan UMKM.

Selain itu, perlu dilakukan percepatan digitalisasi UMKM. Berdasarkan hasil Survey Pelaku Usaha yang dilakukan oleh BPS RI, pelaku UMKM yang menggunakan media digital lebih tahan sebesar 27% terhadap tekanan ekonomi. Selain itu, pelaku UMKM yang sudah berbasis digital, cenderung memiliki nilai *Non Performing Loan* (NPL) yang rendah. Ini berarti, pelaku UMKM Digital mampu memiliki pendapatan yang layak sehingga mampu memenuhi kewajiban kredit kepada jasa keuangan.

6) Mendorong percepatan investasi;

7) Pembehanan Infrastruktur;

8) Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;

9) Pelaksanaan program padat karya tunai dengan mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal dan teknologi lokal dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi;

10) Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak Covid-19 melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, *Focus Group Discussion* (FGD), seminar dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan status daerah terkait penyebaran Covid-19;

b) Reformasi Sistem Kesehatan

Terjadinya pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan Provinsi Bengkulu terutama bagi upaya pencegahan penularan dan meminimalisasi jumlah kematian akibat COVID-19. Tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan.

1) penyediaan dan/atau pemberian sarana prasarana kesehatan kepada masyarakat;

2) penyebarluasan informasi terkait pedoman adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Covid-19;

3) melakukan peningkatan kapasitas dan pelaksanaan uji sampel melalui Laboratorium PCR pada RSUD DR. M. Yunus Bengkulu serta Penguatan jejaring rujukan laboratorium

4) peningkatan kapasitas dan kualitas fasilitas layanan kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, baik dari sisi SDM maupun sarana dan prasarana, terutama dalam kemampuan penanganan pandemi Covid-19;

c) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Pandemi COVID-19 di Bengkulu memberikan tekanan yang cukup berat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut perlu direspon cepat oleh

Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, selain pemulihan ekonomi diperlukan pula perlindungan sosial yang komprehensif di antaranya:

1) melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, berkoordinasi dengan instansi pemerintah pusat yang menangani pendataan dimaksud;
2) melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan pemberian berbagai jenis bantuan sosial dan/atau hibah yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
3) percepatan penyaluran pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai;
4) Program Kartu Bengkulu Sejahtera untuk pengurangan dampak sosial kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat miskin dan rentan miskin, pemasangan listrik gratis, pelayanan gratis di rumah sakit melalui PBI JKN KIS dari APBD;

Kebijakan pemulihan dampak Covid-19 dilakukan dengan berbagai program/kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh perangkat daerah, yang didukung oleh pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Adapun Keterkaitan antara isu strategis, prioritas daerah dan program prioritas daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Keterkaitan antara Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Program Prioritas
1.	Peningkatan Daya Saing Ekonomi;	Percepatan pengentasan Kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja
		Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	1.1 Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan Perikanan, kehutanan dan pertambangan

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Program Prioritas
			1.2 Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM serta Digitalisasi ekonomi 1.3 Peningkatan investasi 1.4 Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan
2.	Kemiskinan, Kesejahteraan dan Daya Saing SDM;	Percepatan pengentasan Kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	1.1 Rehabilitasi, Perlindungan, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1.2 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja 1.3 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan 1.4 Peningkatan akses dan kualitas kesehatan 1.5 Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, anak dan distabilitas serta partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan
3.	Pengembangan konektivitas serta Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan;	Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan	1.1 Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur perkotaan 1.2 Peningkatan konektivitas dan Pengembangan infrastruktur strategis 1.3 Peningkatan Ketahanan dan Kesiapsiagaan terhadap resiko bencana dan perubahan iklim 1.4 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
4.	Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata yang Komprehensif dan Kompetitif;	Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	1.1 Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan Perikanan, kehutanan dan pertambangan 1.2 Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM serta Digitalisasi ekonomi 1.3 Peningkatan investasi 1.4 Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan

No	Isu Strategis	Prioritas Daerah	Program Prioritas
		Natural Bengkulu (Pengembangan pariwisata yang integratif dan kompetitif) dan ekonomi kreatif	1.1 Pelestarian, Pemajuan serta inklusifitas budaya dan pemahaman sejarah daerah 1.2 Pengembangan ekonomi kreatif 1.3 Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi Pariwisata daerah 1.4 Pengembangan Desa Wisata dan Desa Digital
5.	Peningkatan Kinerja Birokrasi;	Inovasi dan tata kelola Pemerintahan	1.1 Peningkatan Akuntabilitas serta Penataan hukum dan peraturan perundang-undangan 1.2 Peningkatan kompetensi SDM aparatur dan penataan birokrasi 1.3 Peningkatan Kualitas dan inovasi pelayanan publik 1.4 Pengembangan wawasan kebangsaan serta penegakan demokrasi, keamanan dan ketertiban
6.	Pemulihan Kondisi Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19	Percepatan pengentasan Kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	1.1 Rehabilitasi, Perlindungan, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1.2 Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja 1.3 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan 1.4 Peningkatan akses dan kualitas kesehatan
		Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	1.1 Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM serta Digitalisasi ekonomi 1.2 Peningkatan investasi

Prioritas daerah disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah, dengan memperhatikan potensi yang dimiliki Provinsi Bengkulu untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Selain itu, dalam mewujudkan sinkronisasi dengan pemerintah pusat, prioritas daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan

dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel 5.4
Keterkaitan 5 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu dengan Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	Keterkaitan Dengan Misi RPJMD 2021-2026	Keterkaitan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional
1.	Percepatan pengentasan Kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius (MISI 4); 2. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara terpadu (MISI 5)	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3) 2. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)
2.	Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan	1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif (MISI 1); 2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan (MISI 2)	1. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2) 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5) 3. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)
3.	Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)

No.	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	Keterkaitan Dengan Misi RPJMD 2021-2026	Keterkaitan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional
		pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif (MISI 1); 2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan (MISI 2)	
4.	Inovasi dan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik (MISI 3)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
5.	Bengkulu Natural (Pengembangan pariwisata yang integratif dan kompetitif) dan ekonomi kreatif	Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan (MISI 2)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)

5.4.2. Kegiatan Unggulan Janji Kampanye

Terdapat 18 (delapan belas) kegiatan unggulan yang menjadi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harus dioperasionalkan didalam RPJMD. Implementasi 18 kegiatan unggulan Janji Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang merupakan program strategis dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah:



Rumusan implementasi 18 Kegiatan Unggulan tersebut selengkapnya dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.5
Rumusan 18 Kegiatan Unggulan Janji Kampanye Dr. H. Rohidin Mersyah dan Dr. H Rosjonsyah pada RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

No.	Kegiatan Unggulan Janji Kampanye	Rumusan Kegiatan		Kelompok sasaran	Sumber Dana	OPD
1.	Kartu Bengkulu Sejahtera	a.	Substansi kegiatan Kartu Bengkulu Sejahtera ini adalah perlindungan sosial berbasis keluarga yang difokuskan pada jaminan dan perlindungan kesehatan. Jaminan dan perlindungan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov) dengan kelompok sasaran adalah masyarakat yang tidak tercover program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jamkesda Kabupaten/Kota. Hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka meningkatkan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) terutama di masa pandemi covid-19.	Masyarakat yang tidak tercover program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jamkesda Kabupaten/Kota.	APBD	Dinkes dan Dinas Sosial
2.	Pembebasan Pajak Kendaraan Roda 2	a.	Kegiatan ini merupakan pembebasan pajak kendaraan roda dua pribadi untuk kendaraan roda dua yang terdaftar di Samsat Bengkulu, serta pembebasan denda tunggakan pajak kendaraan bermotor.	Kendaraan roda 2 yang memenuhi kriteria tertentu	APBD	BPKD, Biro Hukum
		b.	Penerima akan diklaster menjadi penerima-penerima dengan kriteria tertentu yang akan disusun dalam peraturan kelapa daerah. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak Daerah berserta perubahan-perubahannya, Gubernur dapat memberikan keringanan, pembebasan dan insentif pajak.			

No.	Kegiatan Unggulan Janji Kampanye	Rumusan Kegiatan		Kelompok sasaran	Sumber Dana	OPD
			Selain itu, Pergub Nomor 19 Tahun 2020 juga telah mengatur secara teknis yang mengatur pembebasan pajak daerah tersebut.			
3.	Pemberian Tunjangan Daerah, Peningkatan Uang Makan dan TPP bagi ASN dan Honorer	a.	Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memberikan tunjangan daerah bagi ASN dan Honorer, peningkatan uang makan dan TPP.	ASN dan Honorer	APBD	BPKD, BKD, biro Organisasi
4.	SPP Gratis bagi Siswa SMA, SMK dan SLB serta Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi	a.	Siswa SMAN, SMKN dan SLB dibebaskan dari beban biaya pendidikan.	Siswa SMAN, SMKN dan SLB Mahasiswa Perguruan Tinggi berprestasi asal Bengkulu	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		b.	Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi asal bengkulu di Perguruan Tinggi dengan kriteria tertentu setiap tahun.			
5.	Listrik Gratis bagi Rumah Tanggan Daya 450 kwh	a.	Kegiatan pemberian bantuan pasang baru sambungan listrik gratis rumah tangga miskin dengan daya 450 kwh.	Rumah tangga miskin yang belum teraliri listrik	APBD dan sumber pendanaan lainnya	Dinas ESDM dan Biro Ekonomi
		b.	Data penerima dapat diperoleh dari DTKS.			
6.	Pemberian Gas Ukuran 3 Kg untuk masyarakat berpenghasilan rendah	a.	Kegiatan pemberian Gas ukuran 3 Kg untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang terdata dalam DTKS, yang belum memiliki Gas ukuran 3 Kg.	Keluarga berpengasilan rendah yang terdata dalam DTKS yang belum memiliki Gas ukuran 3 Kg.	Sumber pendanaan lainnya	Dinas ESDM
7.	Peningkatan kesejahteraan Guru PAUD dan TK	a.	Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian bantuan operasional kepada PAUD dan TK se-Provinsi Bengkulu.	PAUD dan TK se-Provinsi Bengkulu	APBD Provinsi dan APBD Kab/ Kota	Dinas Pendidikan dan

No.	Kegiatan Unggulan Janji Kampanye	Rumusan Kegiatan		Kelompok sasaran	Sumber Dana	OPD
						Kebudayaan, BPKD
		b.	Pemerintah Provinsi Bengkulu mengintervensi melalui kebijakan kepada bupati dan walikota, dengan mengedepankan sinergi kolaborasi sumber-sumber pendanaan dan atau melalui bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota.			
8.	Pembangunan Stadion Mini disetiap Kecamatan	a.	Kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan daya saing olahraga dan kepemudaan melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga berupa stadion mini disetiap kecamatan di Provinsi Bengkulu.	Kecamatan se-Provinsi Bengkulu yang memenuhi kriteria	APBN, APBD dan sumber pendanaan lainnya	Dinas Pemuda dan Olahraga
		b.	Lokasi penerima kegiatan ini harus memenuhi *readiness criteria* yang diatur secara teknis.			
9.	Peningkatan dan penyeragaman honor Imam, Khotib dan Bilal serta Pimpinan Rumah Ibadah Lainnya	a.	Pemerintah Provinsi Bengkulu mengintervensi melalui kebijakan kepada bupati dan walikota dengan mengeluarkan Regulasi terkait Peningkatan dan penyeragaman honor Imam, Khotib dan Bilal serta Pimpinan Rumah Ibadah Lainnya yang mengatur kriteria rumah ibadah dan perangkat rumah ibadah yang wajib diberikan honor setiap bulannya serta batasan honor yang akan diatur secara teknis. Selain itu pemerintah provinsi akan mengawal pelaksanaan penganggaran hal tersebut di atas melalui evaluasi dokumen perencanaan dan anggaran kab/kota setiap tahun.	Imam, Khotib dan Bilal serta Pimpinan Rumah Ibadah Lainnya	APBD Kab/ Kota	Biro Pemkesra, Biro Hukum

No.	Kegiatan Unggulan Janji Kampanye	Rumusan Kegiatan		Kelompok sasaran	Sumber Dana	OPD
10.	Peningkatan dan penyeragaman penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan BPD	a.	Pemerintah Provinsi Bengkulu mengintervensi melalui kebijakan kepada bupati dengan mengeluarkan regulasi kepada Bupati terkait peningkatan dan penyeragaman penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat Desa serta Perangkat BPD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta menetapkan agar pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat Desa serta perangkat BPD dibayarkan melalui perbankan. Selain itu pemerintah provinsi akan mengawal pelaksanaan penganggaran hal tersebut di atas melalui evaluasi dokumen perencanaan dan anggaran kabupaten setiap tahun.	Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	APBD Kab/ Kota	DPMD, Biro Pemkesra dan Biro Hukum
11.	Pengadaan Alsintan Gratis untuk Petani	a.	Untuk meningkatkan produktivitas petani Bengkulu, maka akan dilaksanakan program pembagian alsintan yang disesuaikan dengan kebutuhan petani/kelompok tani.	Petani/Kelompok Tani	APBD dan APBN	DTPHP
12.	Menjaga stabilitas dan meningkatkan harga komoditas perkebunan terutama karet, kopi dan sawit	a.	Kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga komoditas perkebunan diantaranya : 1. Pemerintah bersama-sama dengan asosiasi pengusaha komoditas perkebunan	Petani Pekebun	APBD dan sumber pendanaan lainnya	DPMTSP, DTPHP, Disperindag

No.	Kegiatan Unggulan Janji Kampanye	Rumusan Kegiatan		Kelompok sasaran	Sumber Dana	OPD
			menentukan standar harga komoditas perkebunan 2. Meningkatkan kualitas komoditas perkebunan rakyat 3. Membangun hilirisasi komoditas perkebunan			
13.	Membeli dan menampung produk pertanian dengan harga yang layak pada saat panen berlimpah dan harga di pasar murah, serta membuat gudang di seluruh kabupaten/ kota se-Provinsi Bengkulu	a.	1. Toko tani indonesia center membantu membeli kelebihan produksi pertanian saat panen melimpah 2. Kelebihan produksi gabah kering giling disimpan dilumbung pangan sehingga dapat dijual kembali pada saat supply gabah kering giling normal/berkurang untuk menjaga stabilitas harga. 3. Pembangunan infrastruktur lumbung pangan yang berskala besar yang di fungsikan selain sebagai lumbung pangan juga sebagai gudang pangan. 4. BUMD membeli produk pertanian dan mendistribusikannya ke daerah lain yang sudah menjalin kerja sama perdagangan dan memiliki harga jual lebih tinggi. 5. Upaya menjaga harga komoditas pertanian dilakukan melalui implementasi Sistem Logistik Daerah (Sislogda). Pemerintah melalui Bulog menyerap produk hasil pertanian untuk kemudian dilakukan distribusi kepada masyarakat. Bulog selaku operator Sislogda menjual produk pertanian kepada masyarakat dengan kebijakan dual	Petani/ Pekebun	APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya	Dinas Perindag, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial

No.	Kegiatan Unggulan Janji Kampanye	Rumusan Kegiatan		Kelompok sasaran	Sumber Dana	OPD
			price, yaitu langsung kepada masyarakat umum sesuai harga pasar dan menjual dibawah harga pasar. 6. Pembangunan gudang yang digunakan untuk menampung melimpahnya hasil produksi pertanian skala regional dengan bersumber dana APBN dengan sistem pengelolaan resi gudang.			
14.	Menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani	a.	Pupuk bersubsidi sudah dialokasikan oleh Kementerian Pertanian.	Petani	APBD dan APBN	DTPHP
		b.	Pemerintah provinsi menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi melalui pengawasan agar tepat sasaran dan efisien. Distribusi penyaluran pupuk bersubsidi harus didukung data akurat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).			
15.	Fasilitasi Pemberian Akses Pengelolaan Kawasan Hutan Menjadi Hutan Sosial Kemasyarakatan dan Hutan Adat untuk para petani dan perkebun	a.	Perhutanan sosial untuk para petani dan perkebunan di Provinsi Bengkulu.	Hutan Sosial Kemasyarakatan	APBD	DLHK
		b.	Kegiatan perhutanan sosial ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan tanpa merusak hutan lindung, TNKS dan jenis hutan lainnya.			
16.	Membangun pelabuhan perikanan, pabrik es dan pemberian izin usaha perikanan serta pemberian alat tangkap gratis	a.	Untuk meningkatkan produktivitas nelayan, maka perlu dibangun pelabuhan perikanan, pabrik es untuk menjaga kualitas tangkapan, pemberian izin usaha perikanan yang mudah dan adil serta pemberian alat tangkap ikan gratis untuk nelayan dan kelompok nelayan.	Kelompok Nelayan	APBD dan APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan
17.	Membangun kebebasan Pers, perlindungan	a.	Kegiatan ini merupakan program yang ditujukan kepada dunia pers, yaitu media pers dan insan	Wartawan dan Media Pers	APBD	Diskominfotik

No.	Kegiatan Unggulan Janji Kampanye	Rumusan Kegiatan		Kelompok sasaran	Sumber Dana	OPD
	hukum dan peningkatan kompetensi wartawan		pers untuk membuka akses keterbukaan informasi publik kepada pers, perlindungan hukum insan pers dan SDM wartawan terutama dalam pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.			
18.	Menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah Bengkulu serta mengembangkan industri kreatif	a.	Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat, pembinaan lembaga adat, Pembinaan Sejarah Lokal, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, museum. Kegiatan ini terkait erat dengan sektor pariwisata, sehingga dengan potensi budaya yang ada program ini juga diharapkan akan mendongkrak nilai pariwisata Bengkulu.	Sektor Pariwisata, Budaya dan UMKM Kreatif	APBD dan APBN	Dinas Pariwisata, Diskop UKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial
		b.	Pengembangan industri kreatif merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata. Kegiatan pengembangan industri kreatif ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pariwisata dan UMKM, termasuk dalam upaya literasi digitalisasi sektor UMKM.			
		c.	Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan dengan merumuskan *Unique Selling Proposition* dengan menonjolkan keunikan destinasi wisata kepada pasar serta melakukan *positioning* citra wisata Provinsi Bengkulu sebagai integrasi wisata sejarah, alam dan budaya (seperti: *Land of Rafflesia*, Tanah Kelahiran *First Lady* Fatmawati Soekarno Sang Perajut Merah Putih, Kebudayaan Tabut).			

5.4.3. Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah

Selain kegiatan unggulan yang merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yaitu Dr. H. Rohidin Mersyah dan Dr. E. H. Rosjonsyah, RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 juga memuat kegiatan unggulan perangkat daerah. Kegiatan unggulan tersebut dirumuskan sesuai urusan pemerintahan masing-masing perangkat daerah, Kegiatan unggulan ini menjadi kegiatan utama dan fokus kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mengakselerasi pencapaian visi dan misi Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat. Rumusan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.6
Rumusan Kegiatan Unggulan per OPD pada RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Bappeda	Integrated Bengkulu Development Information System (IBDIS)	Merupakan sistem informasi pembangunan provinsi bengkulu yang terintegrasi, yang dimana kondisi saat ini semua sistem masih belum terintegrasi, maka melalui IBDIS akan mengintegrasikan semua sistem dimaksud.	Seluruh sistem terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah	Persiapan SDM, Sistem dan Sarana Prasarana dalam kurun waktu Renstra 2021 -2026	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	APBD
	Kajian program unggulan bengkulu	Kegiatan strategis inovatif dalam rangka penguatan tusi kelitbangan, pembuatan kajian penelitian dan pengembangan harus dijadikan sebagai landasan dalam menyusun sebuah kegiatan strategis yang akan dilaksanakan. Dengan adanya kajian penelitian dan pengembangan maka perencanaan yang disusun akan menjadi kegiatan yang lebih terarah untuk dapatdilaksanakan.	Jumlah penelitian/Kajian yang dihasilkan	T1 - T5 : Pelaksanaan Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	APBD
	Bengkulu Inovatif	Klinik Inovasi, Bank Data Inovasi dan Dokter Inovasi (Dokumen Terkini Inovasi)	Peningkatan Nilai Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah	T1 - T5 : Pelaksanaan Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	APBD

2. Dinas Sosial

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Sosial	Kartu Bengkulu Sejahtera	Program ini merupakan program dukungan terhadap program nasioanal dengan memberikan bantuan pangan non tunai kepada masyarakat miskin di kab/kota yang tidak menerima bantuan program guna penurunan angka kemiskinan	Masyarakat miskin yang tidak menerima program bantuan	Pemberian bantuan pangan non tunai kepada masyarakat miskin yang tidak menerima program bantuan selama 1 tahun	Kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi, pada sub kegiatan : Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga Pengelolaan fakir miskin lintas daerah kabupaten/kota	APBD Prov. Bengkulu, APBN
	SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)	Memberikan Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS di dalam panti, serta perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	Kelompok rentan (anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis) di dalam panti	Penyediaan ebutuhan dasar mulai dari permakanan, sandang, asrama, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, bimbingan sehari-hari, pembuatan nomor induk kependudukan, alat bantu, akses pendidikan dan kesehatan, pemulangan kedaerah asal, pemulasaran	Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	APBD Prov.Bengkulu
					Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	
					Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti	
			Korban bencana alam dan sosial provinsi	Pemberian bantuan bahan bangunan bagi korban bencana sosial, paket bahan makanan bagi korban bencana dan kelompok rentan serta penyediaan tempat penampungan pengungsi	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi	APBD Prov. Bengkulu, APBN

3. Dinas Kesehatan

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB)	Pelayanan kesehatan untuk daerah terpencil dan terluar kerjakan secara terpadu LP/LS dan berkala untuk membantu masyarakat terutama yg selama ini sgt sulit utk mendapatkan yankes	Masyarakat daerah terpencil dan terluar yang sulit utk mendapatkan yankes	Melakukan pelayanan kesehatan di DTPK	Kegiatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	APBD Provinsi dan kolaborasi dengan APBD Kab/Kota serta dana Dekon dan DAK
	PDKT (Pos Deteksi Dini Kesehatan Terpadu) di setiap desa/kelurahan.	Memberikan pelayanan cek kesehatan dasar pada pos pelayanan PTM terpadu	Pekerja/karyawan, usia sekolah dan Lansia	Melaksanakan pemeriksaan kesehatan PTM sampai tingkat desa		

4. Biro Organisasi

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Biro Organisasi	E-Anjab, ABK	Pengumpulan data, penginputan, verifikasi dan validasi, output/hasil (dokumen)	ASN Provinsi Bengkulu	Setiap OPD dapat mengakses informasi jabatan dan beban kerja untuk kepentingan manajemen kepegawaian/ASN	Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	APBD
	e - SAKIP	Merupakan aplikasi SAKIP yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.	Seluruh OPD Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota	Penyiapan SDM, Sistem dan Sarana Prasarana yang diperlukan dalam penerapan e- SAKIP	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	APBD

5. Biro Pemkesra

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Biro Pemerintahan dan Kesra	e- LLPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara elektronik merupakan sistem aplikasi yang dibuat untuk mempermudah perangkat daerah dalam pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Perangkat Daerah lingkup Provinsi Bengkulu	Persiapan SDM, System serta sarana prasarana dalam menunjang terbentuknya aplikasi e-LPPD	Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	APBD Provinsi Bengkulu
	Layanan Online Verifikasi Proposal Hibah Rumah Ibadah	Untuk mewujudkan akuntabilitas pelayanan hibah rumah ibadah, pengajuan dan verifikasi proposal hibah dilaksanakan secara online, agar terciptanya keadilan dan pemerataan pembangunan rumah ibadah di seluruh kabupaten/kota di provinsi bengkulu	Rumah Ibadah di Provinsi Bengkulu	Pelaksanaan Kegiatan jika tersedia dukungan dalam bentuk anggaran/uang untuk pembiayaan Programmer dan sarana prasarana lainnya	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	APBD Provinsi Bengkulu

6. Biro Hukum dan HAM

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Biro Hukum dan HAM	e- Prokumda	Terciptanya harmonisasi produk hukum antara Produk Hukum yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu dengan produk hukum di Kabupaten/ Kota yang berbasis elektronik.	Dinas/Badan/ Instansi/ OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Dilakukan persiapan terkait sistem juga sarana dan prasarana dalam penyiapan e-prokumda yang akan	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang - undangan	APBD Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
			Bengkulu serta Kabupaten / Kota	dilaksanakan dalam kurun waktu renstra 2021 -2026		

7. Biro Ekonomi dan SDA

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	Pengendalian Stabilisasi Inflasi Daerah	Memaksimalkan Kinerja TPID, TPAKD, PEN/PED beserta komponen Pendukungnya	Keterjangkauan harga yang mengakibatkan inflasi dan volatilitas komoditas meningkat	Stabilisasi harga komoditas antara lain beras, daging kerbau, dan telur ayam ras dengan melakukan Kegiatan operasi pasar dan pasar murah serentak akan di laksanakan pada periode ramadhan dan setiap tahun	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Daerah	APBD dan sumber pendanaan lainnya
			Ketersediaan pasokan dengan memperkuat produksi, cadangan pangan pemerintah dan pengelolaan import dan ekspor pangan	Meningkatkan serapan gabah lokal melalui kerjasama gapoktan/ASN.		
			Kelancaran distribusi yaitu dengan mendorong kerjasama perdagangan antar daerah untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan	Mengatasi Defisit neraca pangan melalui kerjasama antar daerah dengan provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu		

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
			Kelancaran distribusi yaitu dengan mendorong kerjasama perdagangan antar daerah untuk meningkatkan infrastruktur perdagangan	Perluasan jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) dan Toko Tani Indonesia (TTI)		
				Peningkatan produkstivitas pertanian dan kelembagaan salah satunya dengan budidaya pertanian (Digital Farming) untuk komoditas beras, bawang merah dan cabe.		
				Mengatasi Defisit neraca pangan melalui kerjasama antar daerah dengan provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu		
				Sinergi kebijakan inflasi antara kebijakan TPID dengan kebijakan TP2DD		
			Penyelesaian Sistem Informasi TPAKD (SITPAKD)	Inklusi Keuangan Petugas Masjid seperti Imam, Garim, Bilal dan Khotib dengan target 100 % Petuhas Masjid dan terbitnya SK /SE Kepala Daerah Perihal Besaran Sumber, dan mekanisme dan besaran Pemberian Honor Fasilitasi Asuransi bagi Nelayan Asuransi ternak sapi dan Petani Padi dengan target realisasi Polis Asuransi Sesuai Dengan Turunan dari Pemerintah Pusat sebanyak 150 Debitur, Melakukan Pendataan Nelayan Peternak Sapi Petani Padi		

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
				Oleh lembaga Jasa Keuangan dan Dinas Terkait		
			Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan: Pembentukan Jamkkrida, Pengembangan Bumdes untuk Membentuk Unit Usaha Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pengembangan Desa Binaan	Akselerasi pembukaan rekening Tabunagn dan atau pembiayaan yang mudah, cepat dan berbiaya rendah antara lain melalui digitalidsasi produk/ Layanan keuangan		
			Peningkatan Literasi Keuangan: Sosialisasi AUTP, AUTS, Asnel, Laku Pandai dan Simpel, Gerakan Investasi Pasar Modal dan Sosialisasi P2Pelending	Perluasan Akses Keuangan pada Bumbes dengan pendirian Badan Hukum Koperasi sebanyak 3 Bumdes di Provinsi Bengkulu		
			Asistensi dan pendampingan: Pelatihan Ketrampilan dan Pendampinagn UMKM serta Asistensi Obligasi Daerah	fasilitasi Pembiayaan kredit program kepada UMKM Binaan Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten		
				Peningkatan Jumlah Delivery Chanel Layanan Keuangan Syariah		
				Penerbitan Kebijakan atau Regulasi terkait penentuan percepatan akses keuangan sebagai salah satu indikator		

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
				penilaian kinerja Pemerintah Daerah		
				Penerbitan Kebijakan atau Regulasi terkait penentuan percepatan akses keuangan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja Pemerintah Daerah		
			Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Bengkulu	Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan tra nsaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai		
			Memperluas percepatan Digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam kebijakan pengelolaan pajak daerah	Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan elektronifikasi transaksi PEMDA (ETP)		
				Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan ETP yang terkait dengan; informasi dan data, inovasi dan teknologi, insprastruktur, ketentuan dan koordinasi.		
				Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait ETP dengan memperhatikan arah kebijakan ETP yang ditetaokan oleh POKJANAS ETP atau Pemerintah Pusat		

8. Badan Pengelola Keuangan Daerah

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
BPKD	Samsat Hebat	Membuka Gerai SAMSAT di tempat yang berpotensi/ stategis	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Peningkatan Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor	Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	APBD / CSR dengan Bank Bengkulu
		Kerjasama dengan Go Pay, Indomaretet, alfamart dll.	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Peningkatan Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor	Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	APBD
		Aplikasi Informasi Pajak Kendaraan Bermotor untuk Wajib Pajak	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Penyebaran Informasi Jumlah Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD

9. Badan Kepegawaian Daerah

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Badan Kepegawaian Daerah	Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian	Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian merupakan pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara digital. Untuk pelaksanaan Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian meliputi: kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), sistem yang dibangun serta kesiapan infrastruktur.	ASN Provinsi Bengkulu	Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian adalah bagaimana mewujudkan profesionalisme ASN yang berbasis IT yang meliputi seluruh aspek layanan pegawaian seperti: kepangkatan, kinerja pegawai, pemberian cuti, dan sebagainya.	Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kegiatan Evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	APBD

10. Biro Pembangunan Daerah

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Biro Administrasi Pembangunan	Pembangunan Bengkulu CakepDah	Website Capaian kinerja pembangunan daerah (CakepDah)	Stakeholder, OPD Teknis di Lingkungan Provinsi Bengkulu dan Public	1. Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun Capaian Kinerja Pembangunan Daerah oleh Sekretaris Daerah; 2. Tim Penyusunan melakukan pengumpulan data Pembangunan seluruh sektor pembangunan daerah untuk menjadi data base CakepDah 3. Tim Penyusunan membuat menu, lay out dan tampilan utama web CakepDah 4. Melakukan penginputan pada web CakepDah data Pembangunan seluruh sektor pembangunan daerah; 5. Paparan dan Launching web CakepDah 6. CakepDah, sebagai bahan informasi lengkap Capaian KinErja Pembangunan DAeraH untuk bahan kebijakan Pembangunan Daerah Melakukan updating pada web CakepDah	Kegiatan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	APBD

11. RSKJ Soeprapto

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
RSKJ Soeprapto Bengkulu	Rumah Damping Bahagia (RUDABA)	Menyediakan Sandang, Papan dan Pangan bagi ODGJ Pasca Rawat Inap, berdasarkan Pergub Nomor 29 Tahun 20219	ODGJ Pasca Rawat Inap	implementasi dengan pembiayaan APBD sejak Tahun 2020 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	APBD

12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekolah Menengah Hadir di Setiap Kecamatan (SMH-SK) dikemas menjadi Bengkulu Cerdas (mencakup membangun SMK, Aksesbilitas, Beasiswa, Bangun Vokasi, OSOS (One Subdistrict One School))	Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu pemerintah Provinsi Bengkulu akan membangun sekolah2 di kecamatan yang belum ada sekolahnya dalam 5 tahun kedepan. Program ini juga untuk dapat menekan Angka Putus Sekolah (ATS) dan mendukung pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu.	Untuk saat ini tercatat ada 8 kecamatan yang belum memiliki SMA/SMK. Maka akan dilakukan kajian pendahuluan, apakah secara teknis kecamatan ini layak untuk dibangun sekolah. Sehingga tujuan mulia sesuai amanat UUD 1945 tercapai.	Mengingat kondisi keuangan darah, kesiapan lahan dan teknis laiinya maka program ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2022 s.d 2026	Program: Pengelolaan Pendidikan. Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuran Sub Kegiatan: Pembangunan Unit Sekolah Baru	APBD dan APBN

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
	Pembangunan aplikasi E-DUPAK	Untuk meningkatkan pelayanan di sektor pendidikan dalam pelayanan kenaikan pangkat para guru di bawah naungan Pemrov maka akan dibangun aplikasi E-Dupak, penilaian akan dilakukan secara online Sehingga para guru-guru tidak lagi diwajibkan datang ke dinas untuk pengurusan berkas Dupak.	Para Guru SMA/SMK dan SLB se-Provinso Bengkulu	Akan dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2022 s.d 2023	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
	Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Unggulan	Akan dikembangankan di setiap kabupaten/kota memiliki minimal 1 sekolah kejuaran yang memiliki keunggulan sesuai dengan potensi daerah masing-masing	Sekolah SMK yang telah ada hanya diperkuat jurusan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.	Akan dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2022 s.d 2026	Program: Pengelolaan Pendidikan. Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuran Sub Kegiatan: Menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah unggulan	APBD dan APBN

13. RSUD DR. M. Yunus

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
RSUD dr M Yunus Bengkulu	Rumah sakit Rujukan klardiovaskuler dan Bedah Thorax di Provinsi Bengkulu	Pembuatan DED gedung Ok Central	Seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu selaku pengguna jasa pelayanan kesehatan	Mensinkronkan rencana/ program pemerintah Pusat dan Daerah	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	APBD
		Membangun gedung OK central yang terintegrasi dan sesuai standar	Manajemen RSUD dr. M. Yunus	Mengusulkan untuk menjadi Program Priorotas		DAK APBN

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
		Menjadi Rumah sakit jejarinng Rujukan Kardiovaskuler sesuai dengan KEPMENKES NOMOR HK.01.07/MENKES/7182/2020 Membangun sarana prasarana pendukung	Bengkulu sebagai Dasar Akreditasi dan Fasilitas Rumah Sakit Pendidikan	dalam mendukung Visi dan Misi pemerintah Provinsi Bengkulu Maju dan Hebat	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
	Sistem Pelayanan Aplikasi Online	Permasalahan pada antrian seringkali menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam pelayanan publik. Penumpukan antrian merupakan hal yang harus segera diatasi, dengan menumpuknya antrian maka proses pelayanan publik akan menjadi terhambat oleh sebab itu munculnya inovasi pendaftaran online pada pasien tidak perlu repot-repot mengantri lagi cukup denganpasien dapat mendaftarkan dirinya melalui WEB rumah sakit	Seluruh Pasien Rumah sakit M. Yunus Bengkulu	Pada Tahun 2022 Di rencanakan untuk segera di laksanakan	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	APBD

14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu	Sistem Informasi Jaringan Jalan Terintegrasi	1) Melakukan monitoring terhadap kondisi jalan yang ada dan yang akan dibangun, sehingga menghasilkan data spasial dan tabular yang terintegrasi. 2) Melakukan pengumpulan data yang bersifat spasial berupa peta jaringan jalan, data atribut yang berkaitan dengan obyek-obyek geografis beserta data teknis	Target utama adalah pengembangan sistem informasi spasial untuk jaringan jalan di Provinsi Bengkulu	DPUPR Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi kepada badan/dinas terkait pengumpulan data spasial dalam Sistem Informasi Geografis (SIG)	Program Penyelenggaraan Jalan Provinsi: 1. Penyelenggaraan jalan provinsi (Penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan	APBD

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
		jalan (riwayat jalan, lokasi jalan, foto lokasi jalan, kondisi jalan, dan data pendukung lainnya) 3) Data yang telah terkumpul kemudian diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) sehingga dapat disajikan dalam bentuk sistem informasi berbasis komputer.			jalan, serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan) 2. Pembangunan jalan provinsi (Penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan, serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan)	
	Konektivitas Jalan Baru	Melakukan pembangunan terhadap rencana pembukaan akses jalan baru Penarik - Sungai Ipuh (Bengkulu) - Lempur - Bangko (Jambi), Pembukaan akses jalan baru Sungai Lisai (Kab.Lebong) - Kab. Merangin (Jambi), pembukaan ruas jalan baru Sukaraja - Padang Capo - Air Kelinsar, serta Pembangunan dan peningkatan akses jalan Tanjung Iman - Muara Sahung - Air Tembok - Muara Dua Oku Selatan	Target utama adalah pembukaan ruas jalan baru dari dan menuju Provinsi Bengkulu	DPUPR Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi kepada badan/dinas terkait		APBD dan APBN

15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Rumaswa (Rumah Untuk Masyarakat Bawah)	KPR BP2BT: 1. KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) adalah kredit kepemilikan rumah bersubsidi yang merupakan program kerja sama antara	Target utama adalah penyediaan perumahan baru/permukiman baru Bagi Masyarakat	1) Melakukan Sosialiasi dan Koordinasi Program BP2BT dan FLPP oleh Dinas Perkim (ASN) bersama Disnaker dan Perusahaan (Non ASN);	1) Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP;	APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Provinsi Bengkulu		Perbankan dengan Kementerian PUPR yang diberikan bersama dengan subsidi uang muka kepada masyarakat yang telah mempunyai tabungan untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya. 2. Untuk sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR baik pegawai tetap atau pegawai kontrak dengan penghasilan minimal 2 juta dan maksimal 8 Juta); 3. Suku Bunga 11 % Fix sampai lunas; KPR BP2BT memberikan bantuan uang muka sebesar maksimal Rp 40 juta; Jangka waktu hingga 20 Tahun) KPR FLPP: 1. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bekerjasama dengan perbankan. 2. Untuk sasaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baik pegawai tetap atau pegawai kontrak dengan penghasilan minimal 2 juta dan maksimal 8 Juta); 3. Pengembang sudah terdaftar di Kementerian PUPR (Apilikasi Si Kubang);	Berpenghasilan Rendah	Pengumpulan Usulan Pengajuan Pembiayaan Perumahan dari (ASN/ Non ASN); Dilakukan screening (BI Checking/ lolos OJK dan Kelengkapan administrasi) di Perbankan yang telah ditunjuk pemerintah; Mengidentifikasi Developer yang telah masuk dalam aplikasi SIKUBANG, Penentuan Lokasi Pembangunan Rumah ASN/NON ASN; Melakukan Koordinasi dengan pihak Perbankan (Bank BTN); Syarat pemohon belum pernah mendapatkan Bantuan/Subsidi Perumahan dari Pemerintah (suami isteri)	2) Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
		4. Suku bunga 5% fixed sepanjang tenor 5. Mendapat bantuan uang muka 4 Juta; 6. Jangka waktu kredit 20 tahun;				
		Penyediaan Perumahan melalui Program: 1. Rumah khusus MBR yang terkena dampak Program Pemerintah; 2. Rumah susun untuk MBR berbasis komunitas;	Target utama adalah penyediaan perumahan baru/permukiman baru Bagi Mayarakat Yang Berpenghasilan Rendah.	1. Pemprov (Dinas Perkim) melakukan pengisian Aplikasi Sibaru untuk melakukan input usulan; 2. Ketersediaan Lahan Kewenangan Provinsi (Usulan dari OPD Perkim) Clean n clear; 3. Untuk Rusus Lahan 1 Ha (sistem sewa 42 unit 1 tower); 4. Untuk Rukhus (50-100) unit tipe 36; 5. Hak Guna Lahan atau sewa tergantung KebijakanPemerintahan 6. Pemprov harus telah menyediakan PDAM, listrik, Akses Jalan.; 7. Informasi dari Aset Provinsi: Tanah eks pekan sabtu (1 Ha)	1. Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 2. Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 3. Kegiatan Pengadaan Lahan (Pertanahan)	APBD, APBN
	Penanganan Kawasan Kumuh Berbasis Tematik/ Penguatan Sumber Daya Lokal Dalam Penataan Kawasan Kumuh	Kolaborasi Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh di Lokasi Kewenangan Provinsi untuk merubah tatanan kawasan kumuh disesuaikan dengan sumber daya lokal/ciri khas/berbasis tematik. Stakeholder yang berperan yaitu Dinas Perkim pemprov, SNVT	Target utama adalah penurunan luasan kumuh Provinsi Bengkulu	PROGRAM KOLABORASI: 1. Penataan Kawasan Kumuh berbasis tematik melalui program pembangunan	1. Kegiatan Perbaikan Rumah Ridak Layak Huni dalam kawasan permukiman	APBD, APBN

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
		Penyediaan Perumahan, Badan Pertanahan Nasional dan BPPW Bengkulu.		infrastruktur, tata ruang dan pertanahan; 2. Dinas Perkim melalui Kegiatan Perbaikan RLTH, Pemugaran Permukiman Kumuh dan PSU; 3. SNVT melalui Kegiatan BSPS dan PSU. Untuk Kegiatan PSU disyaratkan untuk penerimaan Hamparan 15 unit yang berdekatan. 4. Verifikasi usulan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan oleh Dinas Perkim dan SNVT Penyediaan Perumahan; 5. Kanwil BPN dapat melakukan program PTSL di lokasi kawasan kumuh 10-15 Ha; 6. BPPW melalui kegiatan yang Pamsimas dan TPS3R.	dengan luasan 10-15 Ha 2. Kegiatan Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan Permukiman dengan luas 10- 15 Ha. 3. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10-15 Ha. 4. Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program 5. Kegiatan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
		Keterpaduan kegiatan Penanganan Kumuh oleh BPPW (Kewenangan Pusat melalui		PROGRAM KETERPADUAN:1).BPPW melakukan penanganan		APBN, APBD

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
		Program KOTAKU), SNVT (BSPS) dan Dinas Perkim (Provinsi/Kabupaten/Kota)		kawasan Kumuh yang luasan kumuh diatas 15 Ha (Kabupaten Bengkulu Selatan , Kab Rejang Lebong, Kab, Seluma,Kab. Kepahiang dan Kota Bengkulu) 2). BPPW dapat juga menangani di Kab/Kota kewenangan Program KOTAKU untuk skala lingkungan. Untuk memadukan penanganan kumuh, Pemprov dan Kab/Kota dapat ikut berperan di kawasan yang berdekatan Program KOTAKU yang luasannya kumuh kewenangan Provinsi/Kab/Kota		

16. Satpol PP Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Satpol PP Provinsi Bengkulu	Satu Sisi Salah (Satuan Polisi Pamong Praja mengatasi siswa bermasalah)	Program ini untuk mengatasi siswa yang bermasalah baik dilingkungan sekolahnya maupun dilingkungan keluarga	Siswa SMA, SMK di Kota Bengkulu	dilaksanakan dengan cara sidak disekolah-sekolah	Kegiatan Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan	APBD

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
					dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	
	GARDA Bengkulu	program ini untuk menegakkan Perda dan Perkada	Masyarakat umum, Aparatur dan Badan Hukum	pengarahan, pembinaan dan sosialisasi, preventif non yudistisi dan penindakan yustisi kepada masyarakat aparatur dan badan hukum terhadap Perda dan Perkada	Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	APBD

17. Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SISTEM INFORMASI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI (SI Deni Ceni)	Upaya Kewaspadaan dini, deteksi dini dan cegah dini oleh masyarakat dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, damai, kondusif dari ancaman atau gangguan, dalam rangka mewujudkan kondisi dimaksud, salah satunya adalah membentuk Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Dari Kader Kewaspadaan Dini di Setiap Desa/Kelurahan sehingga setiap Desa/Kelurahan se Provinsi Bengkulu akan memiliki 1 (satu) orang Kader Kewaspadaan Dini	Masyarakat Desa	Pembentukan Kader Kewaspadaan Dini akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu pelaksanaan renstra 2021-2026.	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.	APBD

18. BPBD Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
BPBD	Bengkulu Tangguh Bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana.	100 ORG (10 KAB/KOTA)	Bengkulu tangguh bencana meliputi : Desa Tangguh Bencana, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Disabilitas Tangguh Bencana, Wisata Tangguh Bencana, Keluarga Tangguh Bencana Keluarga Tangguh Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	APBD

19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	Pemagangan Dalam Negeri (One Company One Person)	Dengan Menjalankan Program Pemagangan Dalam Negeri Yang Ada Diprovinsi Bengkulu Dengan Melakukan Mou Bersama Perusahaan Dengan Konsep 1 Perusahaan 1 Orang. Dengan Asumsi Jumlah Perusahaan Yang Ada Di Provinsi Bengkulu 2.562 (Besar, Sedang, Kecil) Melakukan Mou Dengan Sistem 1 Anak 1 Perusahaan Maka Akan Terserap Tenaga Kerja Sebanyak 2.500 Orang.	Penduduk Usia Kerja 15 Tahun Ke Atas (Jumlah Penganggur)	Ditahun 2022 Akan Dilaksanakan Mou Antar Perusahaan Terkait Proses Pemagangan Dalam Negeri Dengan Target Ditahun 2022 Sebanyak 1.500 Tenaga Kerja Yang Siap Dimagangkan	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	APBN DAN APBD

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
	Peciptaan 100 Lapangan Kerja Melalui Wirausaha Baru	Melakukan Pelatihan Yang Di Selenggarakan Oleh Intansi Pemerintah Atau Swasta Dalam Peningkatan Skil Dan Dilakukan Dengan Penadatangan Mou Bersama Pihak Bantuan Modal Untuk Pengembangan Dalam Sektor Penciptaan Wirausaha Baru	Tenaga Kerja Yang Terdampak Covid Dan Penduduk Usia Kerja 15 Tahun Keatas.	Ditahun 2022 Akan Dilakukan Pelatihan Sebanyak 1.400 Orang Dengan Sistem Berbasis Kompetensi	Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Kegiatan Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu)	APBN DAN APBD
	Pemagangan Luar Negeri Dengan Konsep One Village One Person (Satu Desa Satu Anak)	Melaksanakan Proses Pemagangan Luar Negeri Dengan Target 1.500 Orang Yang Lewat Program One Village One Person. Diharapkan Dengan Tersalurkannya Pemagangan Luar Negeri Berharap Akan Mengurangi Angka Pengangguran Yang Ada Diprovinsi Bengkulu.	Penduduk Usia Kerja 15thn Ke Atas	Ditahun 2022 Akan Dilakukan Proses Rekrutmen Untuk Pemagangan Luar Negeri Dengan Target Capaian Sebanyak 500 Orang Tenaga Kerja Akan Dimagangkan Ke Jepang	Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu)	APBN DAN APBD
	Rafflesia Incubation For Entrepeneurship	Merupakan Proses Pembinaan, Pendampingan, Yang Diberikan Oleh Pemerintah Daerah Yang Bekerjasama Dengan Lembaga Inkubator Bisnis Kepada Kelompok Sasaran Yang Memiliki Minat Dan Inovasi Dalam Berwirausaha, Korikulum Pelatihan Berfokus Pada Skill Untuk Membuka Usaha Yang Diminati Generasi Milenial, Diharapkan Melalui Program Ini Akan Tercipta Wirausaha Baru Dan Menyerap Banyak Tenaga Kerja	Kaum Melenial Penduuduk Usia Kerja 15 S/D 35 Tahun	Ditahun 2022 Akan Dilaksanakan MOU Antar Perusahaan Terkait Dan Pelatihan Untuk Kaum Melenial 1500		APBD

20. Dinas PPA, PP dan KB Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
DP3APPKB Provinsi Bengkulu	SEKOLAH PEREMPUAN	Sekolah Perempuan adalah wadah pembelajaran dan mengelola pengetahuan perempuan yang utamanya dikembangkan di komunitas-komunitas miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan kepulauan terpencil. Mereka belajar secara intensif setiap 1 atau 2 minggu sekali di rumah-rumah penduduk, lahan kosong, pinggir sungai, pinggir pantai, di kantor RW atau balai desa.	Perempuan berasal dari beragam etnis, suku, agama, gender, usia dan kemampuan fisik	Adanya dukungan dari Pemerintah dan Praktisi Tersedianya Tenaga Pengajar/Guru yang kompeten dan handal Terbentuknya kader motekar yang di nyatakan dengan Perda	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	APBD PROVINSI
DP3APPKB Provinsi Bengkulu	Satgas Perlindungan Anak	SATGAS PPA merupakan relawan yang menjadi mitra pemerintah untuk membantu dalam perlindungan perempuan dan anak. Mereka berasal dari unsur masyarakat, yakni keluarga, LSM, TOGA, TOMA, Ormas, tokoh adat, pengacara, psikolog, tenaga kesehatan, dan psikiater. Dalam menyelamatkan korban, SATGAS PPA tidak sekadar menempatkan korban ke tempat yang aman, namun juga memantau perkembangan perempuan dan anak korban kekerasan dengan cara melakukan kunjungan ke tempat aman atau melalui sarana komunikasi.	menangani perempuan dan anak korban kekerasan, SATGAS Perlindungan Anak diharapkan akan di bentuk 1 (satu) Desa Satu Orang SATGAS	Pada Tahun 2022 akan dilaksankan Pembentukan SATGAS PPA	1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3. Kegiatan Pencegahan	APBD PROVINSI

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
					Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

21. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Ketahanan Pangan	Desa Pangan Lestari	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dalam pemenuhan gizi keluarga yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui Pemberdayaan Masyarakat	Kelompok Wanita Tani/Kelompok Tani			
		Desa Pangan Lestari merupakan Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Pemanfaatan Pekarangan dan lahan tidur desa/lahan yang belum digarap masyarakat desa oleh Kelompok Wanita Tani/Kelompok Tani, Kegiatan ini mengelolah dan memanfaatkan lahan pekarangan /lahan tidur/lahan yang belum di garap yang dimiliki masyarakat desa secara optimal untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan pangan dan gizi rumah tangga menuju kemandirian pangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi pangan dan gizi dalam upaya membentuk sumber daya		1 Masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah, lahan tidur/lahan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanami dengan tanaman pangan, hortikultura, beternak, dan memelihara ikan. 2 Dilaksanakan secara berkelompok melalui kelompok yang telah	Program: Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Kegiatan: Penyediaan dan Penyauran pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan. Sub Kegiatan: Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	APBD Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
		manusia yang aktif dan produktif, meningkatkan pendapatan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.		terigister (SIMLUHTAN), baik kelompok tani maupun kelompok wanita tani. 3 Desa Pangan Lestari adalah menggabungkan konsep kegiatan Pemanfaatan Pekarangan (Pekarangan Pangan Lestari) dan Pertanian Keluarga (PK) dalam satu desa. Dengan pemilihan desa berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, 4 Kegiatan bertujuan membentuk desa yang tahan pangan, memiliki pangan yang cukup, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. 5 Selain menjadi desa yang tahan pangan, diharapkan Desa Pangan Lestari menjadi Desa Agro Wisata, yang dapat		

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
				dikunjungi oleh masyarakat lainnya,		

22. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
DLHK	Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3	Penyediaan Lahan Dan Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3	Pusat Pengelolaan Limbah B3	Penyediaan Lahan Dan Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3	1. Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	APBD, APBN

23. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Desa Digital	Desa digital merupakan salah satu program untuk mengurangi kesenjangan arus informasi yang terjadi di desa. Konsep desa digital merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian. Dinas PMD bekerjasama dengan Kementrian Desa dan PDT untuk membangun Desa digital di Provinsi Bengkulu. Pengembangan infrastruktur telematika dan penguatan SDM di desa digital perlu berkolaborasi dengan Dinas Kominfo sedangkan Dinas Koperasi dan UKM mendukung pengembangan desa digital melalui pengembangan warkop digital	Desa	Pelaksanaan Administrasi Desa berbasis teknologi Informasi serta Pengembangan Digitalisasi Ekonomi Desa	Kegiatan Fasilitasi Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	APBD
	Penciptaan BUMDES dalam mengelola Pariwisata Desa untuk meningkatkan Ekonomi Desa	Pelatihan BUMDES dalam upaya Peningkatan Ekonomi Desa sehingga terjadinya wirausaha baru dan kerjasama dengan pihak swasta/ Instansi lain	BUMDES	di tahun 2022 seluruh BUMDES sudah mempunyai produk unggulan untuk meningkatkan PAD Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	APBD

24. Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	Pengembangan Dermaga Perintis Multiguna	Lokasi dermaga perintis yaitu : Pelabuhan Kahyapu, Pelabuhan Malakoni, dan Pelabuhan Pulau Baai Melakukan pengumpulan dan analisis data, dan membuat perencanaan layout dermaga Pembuatan gambar desain dengan perhitungan Rencana Anggara Biaya (RAB)	Target Utama adalah Pengembangan Dermaga Perintis Multiguna	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi kepada badan/dinas terkait	Program Pengelolaan Pelayaran	APBD
	Pengembangan Kapal Wisata	Kapal wisata digunakan untuk trip Pulau Tikus dan Hutan Bakau	Target Utama adalah Pengembangan kapal wisata untuk meningkatkan pariwisata Provinsi Bengkulu	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi kepada badan/dinas terkait		

25. Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bengkulu	Pembangunan Command Center terpadu	Melakukan pembangunan Command Center yang terintegrasi, termasuk di seluruh kabupaten/kota	10 kabupaten/kota	Diskominfo melakukan pembangunan Commnad Center untuk Pemprov Bengkulu. Kemudian mengeluarkan instruksi kepada Bupati dan Walikota untuk membangun Command	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	APBD

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
				Center di seluruh kabupaten/kota		

26. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu	Rumah Kreatif Pusat Layanan Usaha Terpadu (RKPLUT)	Digitalisasi Pemasaran dengan Komponen Pendukungnya dan Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pemasaran melalui Retail Modern	Meningkatkan digitalisasi marketing UMKM menggunakan media E-Commerce, Email Marketing, Content Marketing, Social Media Marketing dan Instant Messaging Marketing dengan orientasi Pasar Regional, Nasional dan Ekspor	Tim Konsultan Rumah Kreatif Pusat Layanan Usaha Terpadu menetapkan platform yang dianggap ideal dalam digital marketing produk UMKM di Provinsi Bengkulu, kemudian menyusun rencana aksi dan implementasi. Produk yang telah memenuhi standarisasi dan kriteria terutama yang telah menembus pasar retail modern, akan dinventarisasi untuk masuk ke dalam platform digital marketing yang telah ditentukan.	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	APBD dan sumber pendanaan lainnya
		Rumah Kreatif Pusat Layanan Usaha Terpadu (RKPLUT) merupakan wadah bagi pelaku UMKM dalam membentuk Digital Economy	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM	Tahun 2021 Diskop UKM melakukan inisiasi untuk mendorong seluruh pelaku	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan	APBD dan sumber

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
		Ecosystem melalui pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM itu sendiri. Rumah Kreatif PLUT akan diperankan sebagai pusat data dan informasi serta sebagai pusat edukasi, pengembangan dan digitalisasi UKM.	agar produk daerah dapat menembus pasar retail modern	UMKM yang produknya telah terstandarisasi agar dapat menggunakan beberapa bagian bangunan RKPLUT sebagai gudang Stokfile Produk UMKM sebelum memasuki toko retail modern	Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	pendanaan lainnya
				Tahun 2022 Rumah Kreatif Pusat Layanan Usaha Terpadu yang telah dibangun dapat berfungsi penuh sebagai wadah bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kualitas produk, standarisasi bahan baku, standarisasi produksi, bimbingan pengembangan produk baru, packaging, branding, quality control dan bimbingan pendanaan, digitalisasi produk dan proses usaha melalui pendampingan para ahli		
				Tahun 2022 Rumah Kreatif Pusat Layanan Usaha Terpadu difungsikan sebagai showroom/ galeri utama dan promotor produk UMKM se- Provinsi		

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
				Bengkulu, serta menjadi Destinasi Utama bagi Instansi Pemerintah, Turis Lokal/ Asing dan Institusi lainnya dalam memenuhi kebutuhan cinderamata produk UMKM khas Provinsi Bengkulu		

27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemasaran Produk IKM berbasis Digital, Ritel Modern dan Display Permanen dalam menunjang perekonomian berbasis masyarakat	- Produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat berupa industri sandang, pangan, logam maupun aneka kerajinan.	Pelaku IKM	Memberi dukungan sarana dan prasarana yang layak	- Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	APBD/APBN/ Sumber lain
		- Mutu produk merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian agar laku di pasaran.	Pelaku IKM	Moderenisasi alat untuk menjaga kualitas produk		
		- Pemasaran berbasis digital dengan memanfaatkan program E-Smart IKM yang merupakan Platform Digital melalui kerjasama dengan perusahaan Star Up di Indonesia.	Pelaku IKM	Pembinaan teknis dari proses produk sampai dalam bentuk kemasan	- Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
					Industri dan Peran Serta Masyarakat	
		- E-Smart merupakan sistem database IKM yang menyajikan profil industri, sentra dan produknya yang teringegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dan market place yang ada. Pelaksanaan program E-Smart IKM ini diharapkan dapat mengembangkan ekonomi berbasis digital, meningkatkan eksport IKM, serta perluasan akses pasar agar kita dapat menjadi "showcase produk sendiri bukan hanya menjadi resler produk negara lain"	Pelaku IKM dan Petugas Klinik Go Online IKM	Melakukan bimbingan serta fasilitasi untuk masuk dalam dunia digital dengan konsep modern	- Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui SIINas	
		- Ritel Modern merupakan pengembangan dari ritel tradisional ke yang modern, pemanfatan teknologi dan mengakomodasi perkembangan gaya hidup konsumen. Diantaranya ritel modern adalah seperti Hypermart, Indomaret, Alfamart, Giant, dll	Pemilik/Manajemen Ritel Modern	Membangun kerjasama dengan Pasar Modern	- Sub Kegiatan: Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	APBD/APBN/ Sumber lain
			Dunia Pasar/ Konsumen	Promosi melalui media online maupun media cetak	- Sub Kegiatan: Peningkatan Citra Produk Ekspor	
	Penyusunan dan Penetapan Master Plan Kawasan Industri Provinsi Bengkulu	- Kawasan industri dapat berperan dalam mendorong tumbuhnya industri besar dan industri lainnya yang memiliki keterkaitan yang kuat	Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota/PMDN/PMA/Masyarakat/sektor terkait	Penyusunan dan penetapan master plan kawasan indutri Provinsi Bengkulu	Sub Kegiatan: Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	APBD/APBN/ Sumber lain
		- Meningkatkan produktivitas perusahaan yang berlokasi di kawasan industri sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi	PMDN/PMA/Masyarakat/sektor terkait	Mewujudkan keterpaduan program pembangunan		

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
		- Meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur, dan menciptakan lapangan kerja yang luas serta menarik investasi	PMDN/PMA/Tenaga Kerja Produktif/sektor terkait	Mendorong terkendalinya pembangunan kawasan industri		
		- Mendorong terjadinya alih teknologi melalui para investor yang menanamkan modalnya di dalam kawasan industri. Proses alih teknologi ini akan meningkatkan nilai tambah produk unggulan suatu wilayah	Masyarakat/sektor terkait	Mendorong terjadinya alih teknologi melalui para investor yang menanamkan modalnya di dalam kawasan industri. Proses alih teknologi ini akan meningkatkan nilai tambah produk unggulan suatu wilayah		
		Memberi kemudahan berusaha bagi dunia usaha dan kepastian hukum lokasi tempat usaha, sehinga terhindar dari segala bentuk gangguan dan diperolehnya rasa amenitis bagi dunia usaha	PMDN/PMA/sektor terkair	Mendorong terkoordinasinya pembangunan kawasan industri antara pemerintah dan masyarakat/swasta		
		- Mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan industri	Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab /Kota/PMDN/PMA/ Masyarakat/sektor terkait	Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan terhadap kawasan industri dengan peruntukan ruang lainnya		
		- Adanya Promosi Kawasan Industri Provinsi Bengkulu	Pemerintah Pusat/Provinsi/Kab /Kota/PMDN/PMA/ Masyarakat/Akademisi/Sektor terkait	Promosi Kawasan Industri melalui media cetak, media online, temu gathering investor, seminar nasional, pameran, Kajian Ilmiah, dan FGD		

28. DPM-PTSP Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
DPMPTSP	Aksi Padu Investasi	Program Aksi Padu Investasi Provinsi Bengkulu, merupakan kegiatan unggulan dalam upaya percepatan realisasi investasi, yang memadukan "keterpaduan tiga aksi dalam akselerasi investasi". Tiga aksi tersebut adalah Pelayanan Investasi, Ramah Investasi dan Kolaborasi Investasi. Tiga aksi inilah yang menjadi komponen utama dalam upaya Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan realisasi investasi.	1. Terlaksananya pelayanan perijinan; 2. Terciptanya kepastian pelayanan investasi; 3. Terlaksananya promosi dengan cara-cara yang kekinian; 4. Tersedianya infrastruktur penunjang investasi; 5. Tersedianya kebijakan hukum yang ramah investasi; 6. Tersedianya tenaga kerja yang kompetitif dan terjangkau; 7. Terwujudnya Kerjasama dan peran stakeholder; 8. Terkendalinya tingkat kriminalitas;	1. Memberikan Kemudahan dalam pelayanan perijinan investasi; 2. Memberikan kepastian pelayanan investasi 3. Melakukan promosi dengan cara-cara yang kekininian 4. Menyiapkan infrastruktur penunjang investasi 5. Kebijakan hukum yang ramah investasi 6. Kepastian ketersediaan tenaga kerja 7. Kerjasama dan peran stakeholder	1. Kegiatan Penetapan Pemberian 2. Kegiatan Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 3. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 4. Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 5. Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 6. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan	APBD

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
					Peraturan Perundangan-undangan Menjadi 7. Kegiatan Kewenangan Daerah Provinsi 8. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	

29. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Pemuda dan Olah Raga	Bengkulu International Sport Center (BISC)	Menyiapkan dukungan secara teknis/oprasional dan menwujudkan stadion BISC	BISC	Akan dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2022 s.d 2026	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan OlahragaPendidikan pada Jenjang Pendidikan yangMenjadi Kewenangan Daerah Provinsi	APBD/APBN/SWASTA

30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Perpustakaan dan Arsip Pembangunan aplikasi E-DUPAK	Digitalisasi Perpustakaan Sekolah	Amant UU Nomor 43 Tahun 2007 pasal 23 tentang Perpustakaan Sekolah, bahwa pada ayat 5 dijelaskan, perpustakaan sekolah/ madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dengan sistem digital ini suatu perpustakaan mempunyai kelebihan dalam menghemat ruangan, akses ganda dalam menggunakan koleksi, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, koleksi dapat berbentuk multimedia dan biaya akan lebih murah	Seluruh Sekolah SMA/SMK dibawah kewenagan Provinsi Bengkulu.	Akan dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2022 s.d 2026	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi.	APBD/ DAK
	Digitalisasi Perpustakaan Daerah	Digital library semua koleksi ataupun dokumen-dokumen yang ada pada perpustakaan tersebut berbentuk elektronik (digital). Data yang berbentuk digital ini memudahkan pengunjung untuk mengakses dan digunakan oleh orang banyak. Akses perpustakaan digital melalui internet dengan alamat tertentu, disediakan secara gratis agar masyarakat dapat mengakses pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan dari mana pun dan kapan pun dengan nyaman.	Perpustakaan Daerah	Akan dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2022 s.d 2026	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi.	APBD/ DAK

31. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu	Satu Data Kependudukan	Program satu data kependudukan sebagai upaya Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan Provinsi Bengkulu menuju satu data nasional. Dimana Perangkat Daerah digiatkan untuk memanfaatkan data kependudukan sebagai basis data sesuai dengan kepentingan nya masing masing dengan cara melakukan perjanjian (MoU) pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Keepndudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bengkulu	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK)	Kemudahan bagi perangkat daerah untuk mendapatkan data kependudukan dan pencatatan siipil Provinsi Bengkulu sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	APBD/ DAK

32. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Kelautan dan Perikanan	Community Based Marine Management (CBMM)	1. Community Based Marine Management (CBMM) merupakan sebuah gagasan yang mengacu pada sistem manajemen/pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dimana masyarakat mengambil peran utama dalam memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi 'bagian' dari kehidupannya. 2. Prinsip CBMM ini adalah pengelolaan bersama atau kolaboratif dan partisipatif	1. Peningkatan Hasil budidaya air Laut dan Payau secara optimal dan berkelanjutan 2. Peningkatan Hasil Tangkap yang optimal	1. Jumlah Peningkatan Hasil Produksi Budidaya Air Laut dan Payau secara optimal dan berkelanjutan 2. jumlah peningkatan hasil Perikanan Tangkap yang optimal dan berkelanjutan 3. PENGORAGANISASIAN, Membangun kesadaran	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	APBD dan APBN

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
		yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dll) dan pemerintah yang dikenal dengan Co-management yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminasi. 3. Pengelolaan Sumber Daya Hasil Laut maupun Sumber daya Pesisir Bengkulu terkelola dengan optimal	dan berkelanjutan. 3. Terjaminya sumber-sumber penghiduan rakyat di pesisir dalam kerangka desentralisasi pembangunan kelautan yang berkelanjutan	masyarakat untuk memiliki kehendak untuk melakukan perubahan 4. CAPACITY BUILDING Peningkatan Kapasitas Nelayan dan Masyarakat Pesisir terkait pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang berkelanjutan 5. PARTICIPATORY MONITORING Mengamati dan memeriksa kemajuan, perkembangan atau kualitas sesuatu (perikanan, hasil tangkapan, dll.) dari waktu ke waktu yang melibatkan semua stakeholder/pemangku kepentingan dalam proses monitoring		
	Hilirisasi Hasil Perikanan	Mendorong Penjualan Hasil Perikanan Tangkap/Budidaya dalam olahan	Meningkatnya penjualan Hasil Tangkap / Budidaya dalam bentuk Olahan	Tersedianya Alat Pengolah untuk Hasil Perikanan Tangkap / Budidaya	1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	APBD

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
					2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	

33. Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	Peningkatan Citra Pariwisata Provinsi Bengkulu menuju Daerah Tujuan Wisata yang Kompetitif	Pembangunan pariwisata perlu mengkolaborasikan antara pengembangan destinasi wisata unggulan dengan penekanan terhadap pengembangan desa wisata di setiap Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan event wisata, pertunjukkan seni budaya lokal dan pengembangan ekonomi kreatif dan dikemas dalam bentuk paket wisata yang dipromosikan secara nasional dan internasional melalui semua channel promosi dengan branding "Natural Bengkulu" Perlu kolaborasi dengan PD lainnya misalnya Dinas PMD untuk pengembangan BUMDES pariwisata, Diskopukm /Disperindag untuk	Destinasi Wisata Kabupaten/ Kota dan Daya Tarik Wisata	1. Pengembangan Rencana Infrastruktur pada Objek Wisata; 2. Pengklasifikasian Desa Mandiri dan Desa Rintisan yang kemudian tersertifikasi sebagai desa wisata; 3. Pencapaian target jumlah desa wisata yang tersertifikasi melalui mekanisme Lomba.	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	APBD
				Penguatan Pelestarian Objek Wisata	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	APBN

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
		pengembangan ekonomi kreatif, Dinas PUPR dan Dinas Perkim untuk pengembangan infrastruktur				
		Melakukan publikasi dan promosi dalam rangka program desa wisata dan pelaksanaan kegiatan Pariwisata	publikasi dan promosi lomba desa wisata dan kegiatan Pariwisata	Pelaksanaan Publikasi dan Promosi	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	APBD
		Penyelenggaraan Event yang sudah dilaunching dalam Karisma Event Nusantara (KEN) dan Melaksanakan Event di desa pemenang lomba desa wisata	Wisman dan Wisnus	Pelaksanaan Event	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	APBD
		Membangun portal pendataan kepariwisataan yang dapat diakses seluruh kalangan (OPD) mitra kepariwisataan dan entitas.	Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kominfotik, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindag, Hotel, Restoran, Tour Agent	Mengakomodir kegiatan baru/ penguatan anggaran Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
		Melaksanakan Pembinaan bagi Duta Wisata dan Pelatihan bagi Pemandu Wisata dan Bidang Homestay yang nantinya dapat mempromosikan desa wisata	Duta Wisata, Pemandu Wisata dan Bidang Homestay	Peniingkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pelatihan bagi Pemandu Wisata dan Bidang Homestay yang akan meningkatkan sumber daya di desa wisata	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	APBD
		Melaksanakan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yakni pelatihan bagi Pengrajin Batik Besurek/inovasi batik	Pelaku Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kratif	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	APBD

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
		Memfasilitasi pemohon HAKI	Pelaku Ekonomi Kreatif	Mendorong pelaku produk Ekonomi Kreatif untuk mendaftarkan ke HAKI	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	APBD

34. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Food Estate Bahan Pangan	Kawasan usaha pertanian skala besar berbasis cluster, multi komoditas, terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, mekanisasi, modernisasi, digitalisasi, korporasi petani dan manajemen pengelolaan profesional.	Peningkatan produksi padi untuk mencapai Swasembada Beras di Provinsi Bengkulu	Konsolidasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemanfaatan lahan di kawasan hutan kemasyarakatan, Penyaluran bantuan benih unggul, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, rehab/peningkatan jaringan irigasi usahatani dan jalan usahatani, pengendalian opt terpadu, asuransi usahatani padi dan Kredit usaha rakyat (KUR), pengaktifan/kerjasama dengan usaha penggilingan padi skala besar, manajemen pengelolaan profesional.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	APBD dan APBN
					Program Penyediaan dan Pengembagnan Prasarana Pertanian, Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian.	APBD dan APBN
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	APBD dan APBN

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
					Program Penyuluhan Pertanian, Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	APBD dan APBN
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kopi Bengkulu Rasa Dunia	Kawasan Kopi berbasis korporasi petani, terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, Lumbung/Gudang Kopi, modernisasi, digitalisasi, Industri pengolahan kopi serta dukungan investasi dalam dan luar negeri	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing Kopi Bengkulu	Pemetaan lahan utama, Registrasi lahan usaha, pembangunan kebun sumber benih, Intensifikasi dengan sambung pucuk dan rehab dengan benih unggul, Pembiayaan kepemilikan alsintan dengan KUR, Peningkatan kertersediaan pupuk, pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil, Pengembangan digital marketing dan digital branding, investasi Swasta/BUMN/ Eksportir	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	APBD dan APBN
					Program Penyediaan dan Pengembagnan Prasarana Pertanian, Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian.	APBD dan APBN
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	APBD dan APBN
					Program Penyuluhan Pertanian, Kegiatan Pengembangan	APBD dan APBN

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
					Penerapan Penyuluhan Pertanian, Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	

35. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas Peternakan dan Kesehatan HEwan	Bengkulu Terminal Ternak	1. Program unggulan ini mewujudkan bengkulu sebagai terminal ternak sumatera 2024 dengan berkolaborasi antara stakeholder seperti Disnakeswan, pelindo, pengusaha sapi potong, dan karantina pertanian. 2. Hal ini juga didukung dengan lancarnya akses tol sumatera yang akan terkoneksi nantinya. di Pelabuhan pulau Bai yang dikelola oleh Pelindo II akan dibangun Instalansi karantika hewan dan penyediaan sewa/tempat untuk livestock. disini roda ekonomi akan berputar dalam mendukung terminal ternak tersebut seperti penyediaan pakan hijauan, kosentratt, armada angkut, dan munculnya livestock-livestock baru di Provinsi Bengkulu.	Pengusaha sapi potong, petani peternak sapi, pengusaha jasa angkutan, penyedia sapras peternakan	1. Program ini dijalankan dengan menjadikan Bengkulu sebagai pintu masuk pemasukan ternak sapi potong untuk kemudian disebarkan atau dipelihara di Provinsi Bengkulu dan Provinsi di Pulau Sumatera lainnya seperti, Sumsel, Sumbar, Riau dan Jambi 2. Tahapan pelaksanaan dimulai 2021 yaitu perencanaan, dengan target masuknya program ini sebagai	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya	APBD, APBN dan Sumber pendanaan lainnya

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
		3. Pemasukan ternak sendiri dapat berasal dari dalam negeri seperti NTT dan pulau jawa serta luar negeri seperti Australia. target dari Bengkulu terminal ternak ini adalah masuknya minimal 5.000-10.000 ekor sapi perbulan ke Bengkulu melalui Pulau Bai. 4. Dengan adanya terminal ternak ini juga diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak di Provinsi Bengkulu sehingga bisa mendukung peningkatan produksi daging dan ketersediaan daging khususnya di Provinsi Bengkulu dan meningkatkan kesejahteraan petani peternak.		program pripritas nasional melaui BUMN pelindo II. tahun 2022 pembangunan sarana saprasarana pendukung seperti IKH, tahun 2023 dimulainya pemasukan sapi potong melalui pulau bai. dan tahun 2024 sudah berjalan normal.		

36. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Dinas ESDM	Sistem Pelaporan Informasi Pertambangan Secara Online	Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah secara online	Iup OP Dan Stakeholder	Penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah secara online	Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	APBD

37. BPSDM Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
BPSDM Provinsi Bengkulu	BPSDM Rujukan	Meningkatkan akreditasi BPSDM sehingga menjadi rujukan pelaksanaan diklat regional	BPSDM	Pembangunan sarpras, peningkatan kompetensi WI	Kegiatan Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	APBD Provinsi Bengkulu

38. Inspektorat Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Inspektorat Provinsi Bengkulu	Tata Kelola Pengawasan Intern Pemerintah berbasis Elektronik	Terbagi menjadi tiga program yaitu: 1. Sistem Manajemen Pengawasan berbasis elektronik (e-audit) 2. Sistem Manajemen Hasil Pengawasan (Sim-Hp 3. Sistem Pengaduan Masyarakat secara elektronik (e-dumas)				
	Sistem Manajemen Pengawasan Berbasis Elektronik (e-audit)	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya (*assurance* dan *concultancy*)	Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bebas dari praktek	1. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Pemerintah	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	APBD

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
			korupsi, kolusi dan nepotisme	Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan pengawasan tahunan. 3. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	
	Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP)	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawas eksternal (BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu) dan pengawas internal/APIP yaitu: BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Bengkulu	Terciptanya perbaikan atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*dan *clean government*	1. Diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)2. Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan3. Menurunnya persentase kerugian keuangan negara/daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	APBD

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
					Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
	Sistem Pengaduan Masyarakat	Salah satu bentuk perlindungan hukum dan pencegahan korupsi adalah pengaduan masyarakat berbasis elektronik (e-DUMAS) melalui e-ngadu yang tersedia dalam laman e-ngadu.bengkuluprov.go.id, yang *redirect* ke Whistle Blowing System (WBS) KPK RI	Tertanganinya pengaduan masyarakat dan penyelenggara negara dalam lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu	Pengaduan masyarakat atas indikasi korupsi yang dapat ditangani secara simultan oleh Inspektorat, Ditreskrimsus Polda Bengkulu dan Aspidsus Kejati Bengkulu dan disupervisi langsung oleh KPK RI. e-ngadu merupakan layanan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Penanganan pengaduan diupayakan pencegahan korupsi, pengembalian kerugian negara, dan punishment administratif ataupun tindak pidana sebagai jalan terakhir.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	

39. Badan Penghubung Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Badan Penghubung	Badan Penghubung Sebagai "*One Stop Service*" Provinsi Bengkulu di Jakarta	Sebagai instansi daerah yang berlokasi di DKI Jakarta, Provinsi Bengkulu mempunyai peran sebagai penghubung antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan intitusi, baik swasta, pemerintah maupun komponen masyarakat yang berada di Jakarta. Ketika masyarakat memerlukan pelayanan apa saja yang berkaitan dengan Provinsi Bengkulu, baik itu perizinan maupun non perizinan dapat dilakukan dengan menghubungi Badan Penghubung sebagai wakil pemerintah daerah di Jakarta.	Semua komponen masyarakat, baik individual maupun kooperasi, swasta maupun pemerintah yang memerlukan informasi awal tentang Provinsi Bengkulu.	Badan Penghubung berkolaborasi dengan seluruh OPD yang berada di Provinsi Bengkulu untuk penyampaian seluruh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di Jakarta, baik perizinan maupun non perzinan. Seluruh data dan informasi ini akan dapat di akses secara mudah dan cepat oleh masyarakat di Jakarta dalam "ONE STOP SERVICE" di Badan Penghubung.	Program: Program Pelayanan Penghubung Kegiatan: Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	ABPD Provinsi Bengkulu dan CSR

40. Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu

OPD	Kegiatan Unggulan OPD	Rumusan Kegiatan	Kelompok Sasaran	Indikasi Rencana Implementasi	Nomenklatur Operasional dalam Renstra OPD (sesuai PMDN 90/2019)	Sumber Dana
Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	e-Aspirasi	memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mahasiswa/i dalam berinteraksi dengan wakil Rakyat	Masyrakat Umum dan Mahasiswa/i	memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mahasiswa/i dalam berinteraksi dengan wakil Rakyat	Kegiatan Peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	APBD

5.5. Penyelarasan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Dalam rangka pencapaian target sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 secara efektif dan efisien, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, maka perlu dilakukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyusunan serta penyelarasan dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Kententuan penyelasaran ini diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor: 050/3499/SJ, Nomor: 3 Tahun 2021, tertanggal 16 Juni 2021. Berdasarkan edaran tersebut, ruang lingkup penyelarasan tersebut dilaksanakan melalui :

1. Penyelarasan target indikator makro yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Penyelarasan Program Prioritas antara RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024.

Penyelarasan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dnegan RPJMN Tahun 2024 dilakukan bertujuan untuk :

1. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah;
2. Mewdujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN Tahun 2020-2024;
3. Menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024;
4. Menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program dan target pembangunan nasional.

5.5.1. Penyelarasan Target Indikator Makro Provinsi Bengkulu dan Nasional

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjamin sinergi dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian target indikator makro nasional. Hal ini bertujuan untuk mendorong daerah merumuskan dan menyelaraskan pencapaian target yang mendukung pencapaian target nasional dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi setiap daerah. Adapun Tabel 5.5.1. Penyelarasan Target Indikator Makro Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan Nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.7.
Penyelarasan Target Indikator Makro Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Indikator Pembangunan	RPJMN 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD 2021-2026				
		Target						Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,70	6,00	6,20	6,30	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,02	2,59	4,9 - 5,2	5,05 - 5,35	5,2 - 5,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	13,40	13,00	12,25	10,95	10,75	Tingkat Kemiskinan (%)	15,30	15,40	14,5 - 14,9	14 - 14,5	13,5 - 14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,50	3,30	3,10	2,70	2,30	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,07	4	3,6 - 3,8	3,5 - 3,6	3,4 - 3,5
4	Indeks Pembangunan Manusia	71,94	n/a	n/a	n/a	75,54	Indeks Pembangunan Manusia	71,40	71,40	71,6	71,7	71,8
5	Rasio Gini	0,385	n/a	n/a	n/a	0,360 - 0,374	Rasio Gini	0,323	0,340	0,332	0,33	0,328
6	Penurunan Emisi GRK (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	27,3	Penurunan Emisi GRK Sektor Energi (%)	20	20	20	20	20

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

5.5.2.Penyelarasan Program Prioritas antara RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024

Penyelarasan ini dimaksudkan untuk menjami sinergi program prioritas pemerintah daerah yang selaras dengan program prioritas nasional. Hal ini bertujua untuk mendorong pemerintah daerah merumuskan dan menyelaraskan program perangkat daerah dengan indikator kinerja program yang selaras dan/atau mendukung program prioritas nasional, serta dapat menuangkan menjadi indikator pembangunan di daerah. Tabel penyelerasan disajikan untuk setiap Prioritas Nasional yang disandingkan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

Tabel 5.8.
Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Provinsi terhadap Program Prioritas Nasional

PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2021

BAB VI

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

PROVINSI BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan komponen yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Rumusan strategi merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana misi, tujuan dan sasaran akan diwujudkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Provinsi Bengkulu

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
Misi 1 : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif		
TUJUAN 1.1: Meningkatnya Perekonomian Daerah	***Sasaran 1.1.1:*** Meningkatnya Laju Investasi	***Strategi 1.1.1.1:*** Meningkatkan kemudahan investasi dan Optimalisasi Pengelolaan Investasi
		Strategi 1.1.1.2: Meningkatkan Pengembangan dan Promosi penanaman modal
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Dan Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	***Strategi 1.1.2.1:*** Meningkatkan kemudahan izin usaha industri
		Strategi 1.1.2.2 : Meningkatkan pengembangan ekspor
		Strategi 1.1.2.3 : Meningkatkan daya saing Koperasi, KUKM dan IKM serta mengembangkan sarana perdagangan rakyat

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
Tujuan 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur wilayah	***Sasaran 1.2.1 :*** Meningkatnya pemenuhan Infrastruktur wilayah	***Strategi 1.2.1.1 :*** Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah
		Strategi 1.2.1.2 : Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur strategis
Tujuan 1.3 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata	***Sasaran 1.3.1 :*** Menurunnya Angka Kemiskinan	***Strategi 1.3.1.1 :*** Meningkatkan permodalan masyarakat pada koperasi, usaha simpan pinjam
		Strategi 1.3.1.2 : Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi produksi dan hilirisasi komoditas unggulan masyarakat
		Strategi 1.3.1.2 : Pencegahan,Pengurangan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Sasaran 1.3.2 : Menurunnya Pengangguran	***Strategi 1.3.2.1 :*** Meningkatkan Kualitas dan kuantitas usia kerja dan pekerja
		Strategi 1.3.2.2 : Meningkatkan lapangan pekerjaan
Misi 2 : Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan		
Tujuan 2.1 : Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	***Sasaran 2.1.1 :*** Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	***Strategi 2.1.1.1 :*** Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan
		Strategi 2.1.1.2 : Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
	Sasaran 2.1.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	***Strategi 2.1.2.1 :*** Menurunkan beban pencemaran lingkungan
		Strategi 2.1.2.2 : Meningkatkan kebersihan dan penataan lingkungan
Misi 3 : Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik		

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
Tujuan 3.1 : Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan	***Sasaran 3.1.1 :*** Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	***Strategi 3.1.1.1 :*** Meningkatkan kinerja perencanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemerintahan Daerah
		Strategi 3.1.1.2 : Penguatan dan penataan struktur organisasi Pemerintahan Daerah
	Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	***Strategi 3.1.2.1 :*** Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik berbasis elektronik
		Strategi 3.1.2.2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana, prasarana pelayanan publik
Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Menjadi Berkualitas, Berdaya Saing Dan Berbudaya Serta Toleran Dan Religius		
Tujuan 4.1 : Meningkatnya Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat	***Sasaran 4.1 :*** Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	***Stategi 4.1.1 :*** Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat
		Strategi 4.2.2 : Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan
		Strategi 4.2.3 : Peningkatan kualitas layanan dan pembudayaan gemar membaca
	Sasaran 4.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	***Strategi 4.2.1 :*** Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar
		Strategi 4.2.2 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
		Strategi 4.2.3 : Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja
	Sasaran 4.3 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	***Strategi 4.3.1 :*** Mengurangi beban pengeluaran bagi penduduk miskin dan rentan untuk memperbaiki serta mengembangkan sistem perlindungan sosial.

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
		Strategi 4.3.2 : Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan pemberdayaan penduduk miskin
Misi 5 : Memperkuat Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak serta Kelompok Disabilitas Secara Terpadu		
Tujuan 5.1 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak	***Sasaran 5.1 :*** Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak	***Strategi 5.1.1 :*** Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pembangunan
		Strategi 5.1.2 : Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan

6.1.1.Strategi Pencapaian Misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026, dirumuskan strategi pencapaian Misi. Strategi pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

1. **Strategi Pencapaian Misi Pertama: Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif**

Makna pencapaian Misi pertama RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah pembangunan infrastruktur di Bengkulu kedepan akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan masif dengan pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Tol, Jalur Kereta Api, Pelabuhan, Bandara, jalan dan jembatan yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, membuka akses lebih luas terhadap kawasan pariwisata, memantapkan pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat, memacu pertumbuhan lapangan kerja baru serta mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian berbasis potensi daerah. Untuk melaksanakan penjabaran tersebut, maka Misi Pertama RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 memiliki tiga tujuan yaitu, Meningkatnya Perekonomian Daerah, Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur, dan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata.

Pada tujuan meningkatkan perekonomian daerah, dengan indikator yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, memiliki dua sasaran. Sasaran pertama adalah Meningkatnya Laju Investasi yang dilaksanakan dengan Strategi yaitu Meningkatkan kemudahan investasi dan Optimalisasi Pengelolaan Investasi serta Meningkatkan Pengembangan dan Promosi penanaman modal. Sasaran berikutnya adalah Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri Dan Sektor Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang akan dilakukan dengan Strategi yaitu Meningkatkan kemudahan izin usaha industri, Meningkatkan pengembangan ekspor dan Meningkatkan daya saing Koperasi, KUKM dan IKM serta mengembangkan sarana perdagangan rakyat.

Pada tujuan Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur, dengan indikator yaitu Persentase Ketercapaian Pemenuhan Infrastruktur Wilayah, sasaran yang akan diraih adalah Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur. Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah, serta Membangun, mengembangkan dan memelihar infrastruktur strategis.

Pada tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang merata, dengan indikator Indeks Gini, terdapat dua sasaran yang akan diraih. Pertama adalah Menurunnya Angka Kemiskinan dengan strategi Meningkatkan permodalan masyarakat pada koperasi, usaha simpan pinjam; Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi produksi dan hilirisasi komoditas unggulan masyarakat; dan Pencegahan, Pengurangan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pencapaian Misi Pertama ini dilakukan melalui pelaksanaan Prioritas Pembangunan, yaitu :

a. Prioritas Pembangunan kedua, Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan, dengan Program Prioritas :
    1) Pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur perkotaan;
    2) Peningkatan konektivitas dan Pengembangan infrastruktur strategis;
b. Prioritas Pembangunan ketiga, Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi, dengan Program Prioritas :

1) Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan Perikanan, kehutanan dan pertambangan;
2) Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM serta Digitalisasi ekonomi;
3) Peningkatan investasi;
4) Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan

Pelaksanaan operasional dari strategi pencapaian Misi Pertama RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, yang dimulai dari tujuan, sasaran, indikator, strategi, prioritas pembangunan dan program prioritas, terdapat kegiatan-kegiatan unggulan baik yang merupakan Janji Kampanye maupun kegiatan-kegiatan unggulan OPD. Kegiatan-kegiatan unggulan tersebut menjadi *tools* dalam pencapaian Misi pertama, yaitu;

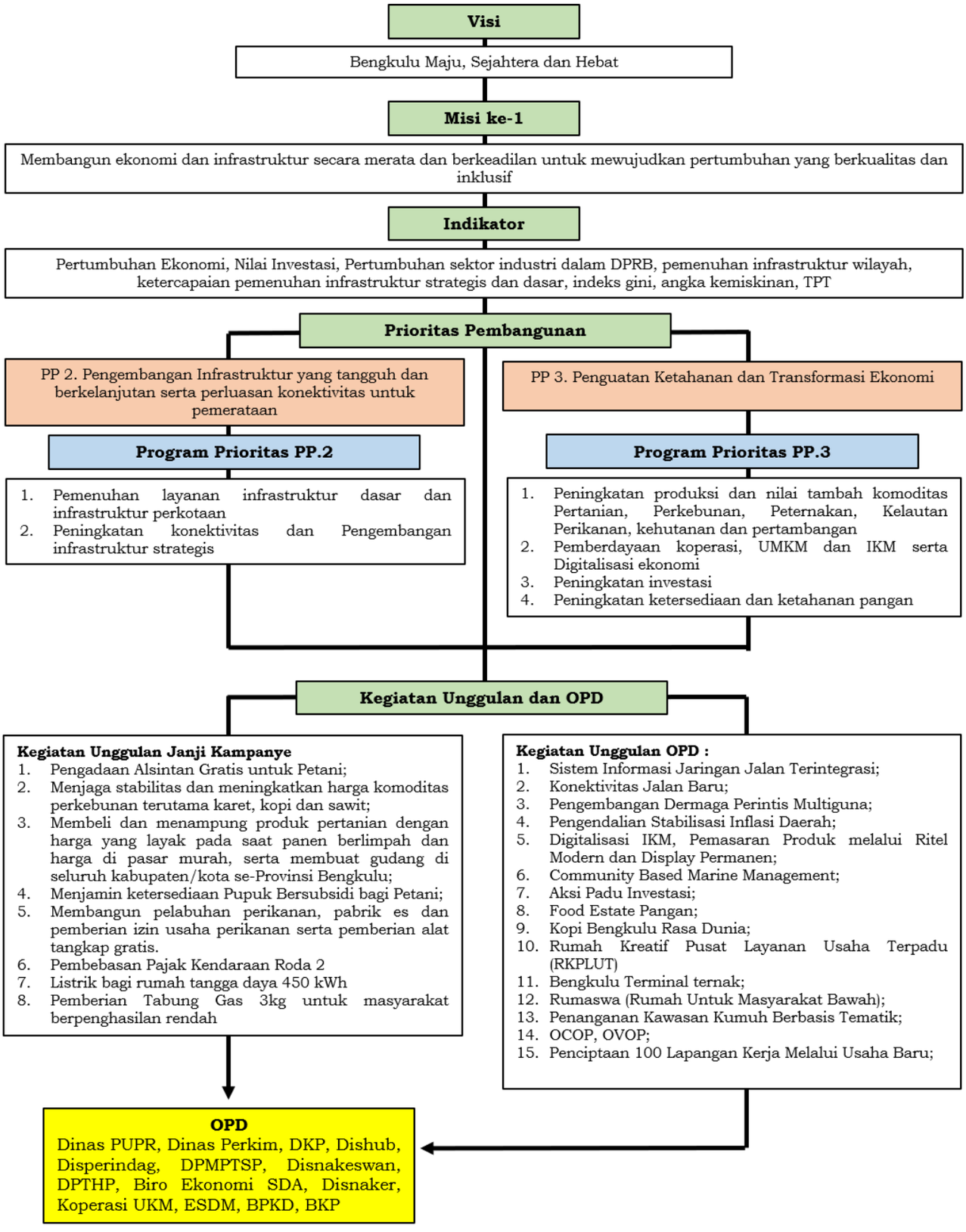
a. Kegiatan Unggulan Janji Kampanye, yaitu :
   1) Pengadaan Alsintan Gratis untuk Petani;
   2) Menjaga stabilitas dan meningkatkan harga komoditas perkebunan terutama karet, kopi dan sawit;
   3) Membeli dan menampung produk pertanian dengan harga yang layak pada saat panen berlimpah dan harga di pasar murah, serta membuat gudang di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu;
   4) Menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani;
   5) Membangun pelabuhan perikanan, pabrik es dan pemberian izin usaha perikanan serta pemberian alat tangkap gratis.
   6) Pembebasan Pajak Kendaraan Roda 2
   7) Listrik bagi rumah tangga daya 450 kWh
   8) Pemberian Tabung Gas 3kg untuk masyarakat berpenghasilan rendah

b. Kegiatan Unggulan per OPD, yaitu :
   1) Sistem Informasi Jaringan Jalan Terintegrasi;
   2) Konektivitas Jalan Baru;
   3) Pengembangan Dermaga Perintis Multiguna;

4) Pengendalian Stabilisasi Inflasi Daerah;
5) Digitalisasi IKM, Pemasaran Produk melalui Ritel Modern dan Display Permanen;
6) Community Based Marine Management;
7) Aksi Padu Investasi;
8) Food Estate Pangan;
9) Kopi Bengkulu Rasa Dunia;
10) Rumah Kreatif Pusat Layanan Usaha Terpadu (RKPLUT);
11) Bengkulu Terminal ternak;
12) Rumaswa (Rumah Untuk Masyarakat Bawah);
13) Penanganan Kawasan Kumuh Berbasis Tematik;
14) One Company One Person, One Village One Person;
15) Penciptaan 100 Lapangan Kerja Melalui Usaha Baru;

Perangkat Daerah yang terlibat dalam pencapaian misi ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal-PTSP, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Tenaga Kerja serta Biro Ekonomi SDA. Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Pertama RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6.1
Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Pertama RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026



2. Strategi Pencapaian Misi Kedua: Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi fokus dalam misi kedua RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Pembangunan Provinsi Bengkulu perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pengelolaan dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam harus memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Bengkulu akan tetap dapat dirasakan oleh generasi penerus. Selain itu, pembangunan yang dilakukan harus tetap mengedepankan aspek kesiapsiagaan terhadap bencana (disaster preparedness). Semua pemanfaatan SDA Bengkulu dilakukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Misi kedua ini memiliki tujuan yaitu Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Tujuan tersebut memiliki dua sasaran yang akan dicapai Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah; dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Pada sasaran Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan dengan dua strategi yaitu Meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan; dan Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, pada sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, strategi yang dilakukan adalah Menurunkan beban pencemaran lingkungan; dan Meningkatkan kebersihan dan penataan lingkungan.

Pencapaian Misi Kedua ini dilakukan melalui pelaksanaan Prioritas Pembangunan, yaitu:

a. Prioritas Pembangunan kedua, Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan, dengan Program Prioritas;
    1) Peningkatan Ketahanan dan Kesiapsiagaan terhadap resiko bencana dan perubahan iklim;
    2) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

b. Prioritas Pembangunan Ketiga, yaitu Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi, dengan Program Prioritas;

1) Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan Perikanan, kehutanan dan pertambangan;

2) Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan;

c. Prioritas Pembangunan Kelima, yaitu Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif, dengan Program Prioritas;

1) Pelestarian, Pemajuan serta inklusifitas Budaya dari Pemahaman Sejarah Daerah;

2) Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi Pariwisata Daerah;

3) Pengembangan Ekonomi Kreatif;

4) Pengembangan Desa Wisata dan Desa Digital;

Pelaksanaan operasional dari strategi pencapaian Misi Kedua RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, yang dimulai dari tujuan, sasaran, indikator, strategi, prioritas pembangunan dan program prioritas, terdapat kegiatan-kegiatan unggulan baik yang merupakan Janji Kampanye maupun kegiatan-kegiatan unggulan OPD. Kegiatan-kegiatan unggulan tersebut menjadi tools dalam pencapaian Misi Kedua, yaitu:

a. Kegiatan Unggulan Janji Kampanye, yaitu :

1) Pengadaan Alsintan Gratis untuk Petani;

2) Menjaga stabilitas dan meningkatkan harga komoditas perkebunan terutama karet, kopi dan sawit;

3) Membeli dan menampung produk pertanian dengan harga yang layak pada saat panen berlimpah dan harga di pasar murah, serta membuat gudang di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu;

4) Penurunan Status Kawasan Hutan Menjadi Hutan Sosial Kemasyarakatan dan Hutan Adat untuk para Petani dan Pekebun;

5) Menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani;

6) Membangun pelabuhan perikanan, pabrik es dan pemberian izin usaha perikanan serta pemberian alat tangkap gratis;

7) Menjaga nilai-nilai budaya dan sejarah Bengkulu serta mengembangakan industri kreatif;

b. Kegiatan Unggulan per OPD, yaitu :

1) Bengkulu Tangguh Bencana;

2) Pembangunan Pusat Pengelolaan Limbah B3;

3) Community Based Marine Management;

4) Hilirisasi Hasil Perikanan;

5) Food Estate Pangan;

6) Kopi Bengkulu Rasa Dunia;

7) Desa Pangan Lestari;

8) Bengkulu Terminal ternak;

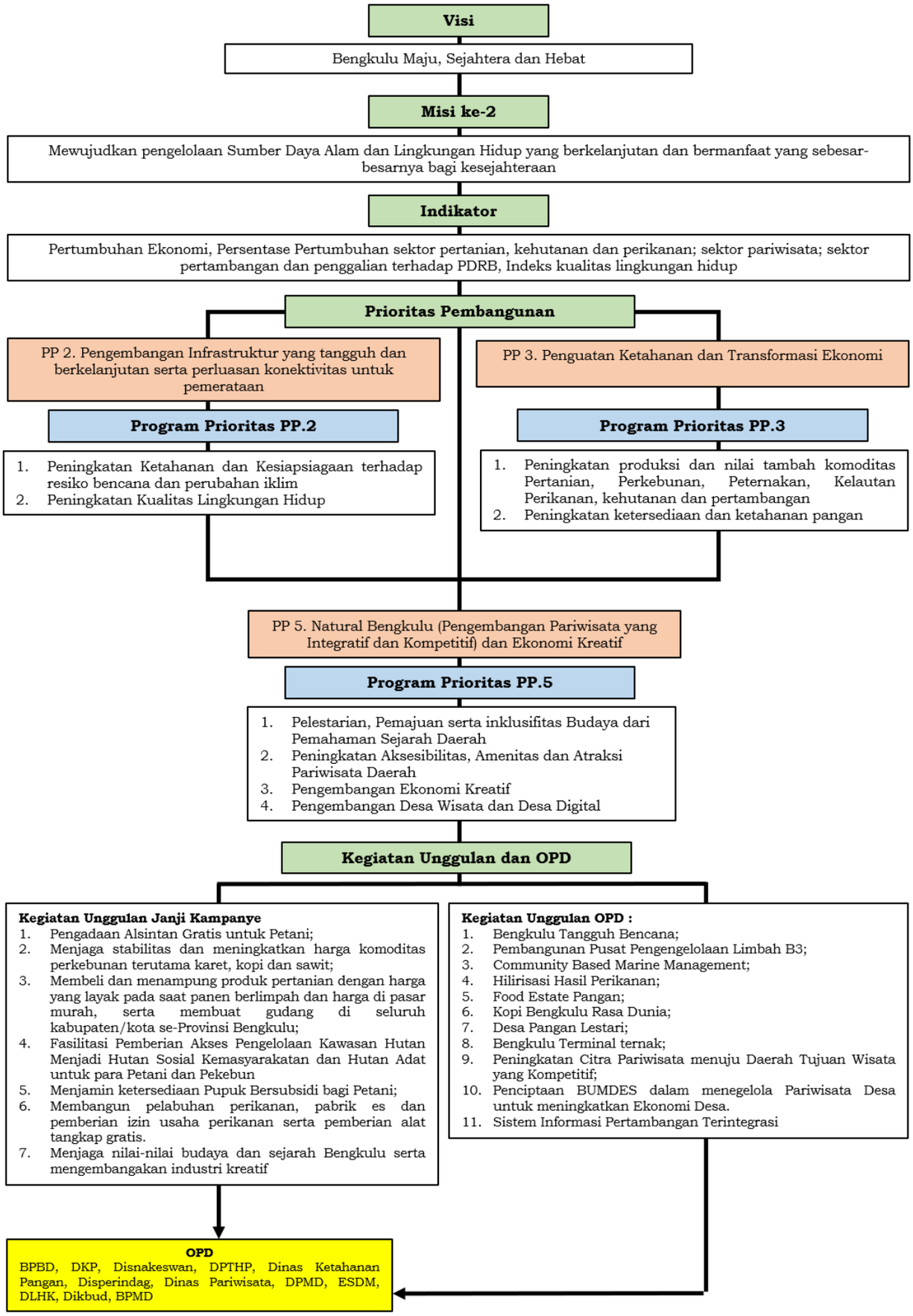
9) Desa Wisata;

10) Penciptaan BUMDES dalam menegelola Pariwisata Desa untuk meningkatkan Ekonomi Desa;

11) Sisten Informasi Pertambangan Terintegrasi;

Perangkat Daerah yang terlibat dalam pencapaian misi kedua adalah BPBD; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; Dinas Pariwisata; DPMD; Dinas ESDM; DLHK; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Kedua RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6.2
Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Kedua RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026



3. Strategi Pencapaian Misi Ketiga: Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik

Kapasitas kelembagaan pemerintahan yang ada di Bengkulu diperkuat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan tetap mengedepankan kerjasama antar instansi agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi Provinsi Bengkulu kedepan difokuskan adalah pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia aparatur, peningkatan akuntabilitas pemerintahan serta zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif dilakukan dengan penerapan pelayanan yang cepat, ramah, murah, mudah, berkualitas, serta didukung dengan pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi

Misi ketiga RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 ini memiliki tujuan yaitu Meningkatnya kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan dengan indikator Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Tujuan ini memiliki dua sasaran yang akan dicapai yaitu, Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Pada Sasaran Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, strategi yang dilakukan adalah dengan Meningkatkan kinerja perencanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemerintahan Daerah; dan Penguatan dan penataan struktur organisasi Pemerintahan Daerah. Sedangkan pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, strategi yang dilakukan adalah dengan Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik berbasis elektronik; dan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana, prasarana pelayanan publik.

Pencapaian Misi Ketiga ini dilakukan melalui pelaksanaan Prioritas Pembangunan, yaitu:

a. Prioritas Pembangunan keempat Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah, dengan Program Prioritas;

   1) Peningkatan Akuntabilitas serta Penataan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;

2) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Penataan Birokrasi;
3) Peningkatan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik;
4) Pengembangan Wawasan Kebangsaan serta Penegakkan Demokrasi, Keamanan dan Ketertiban;

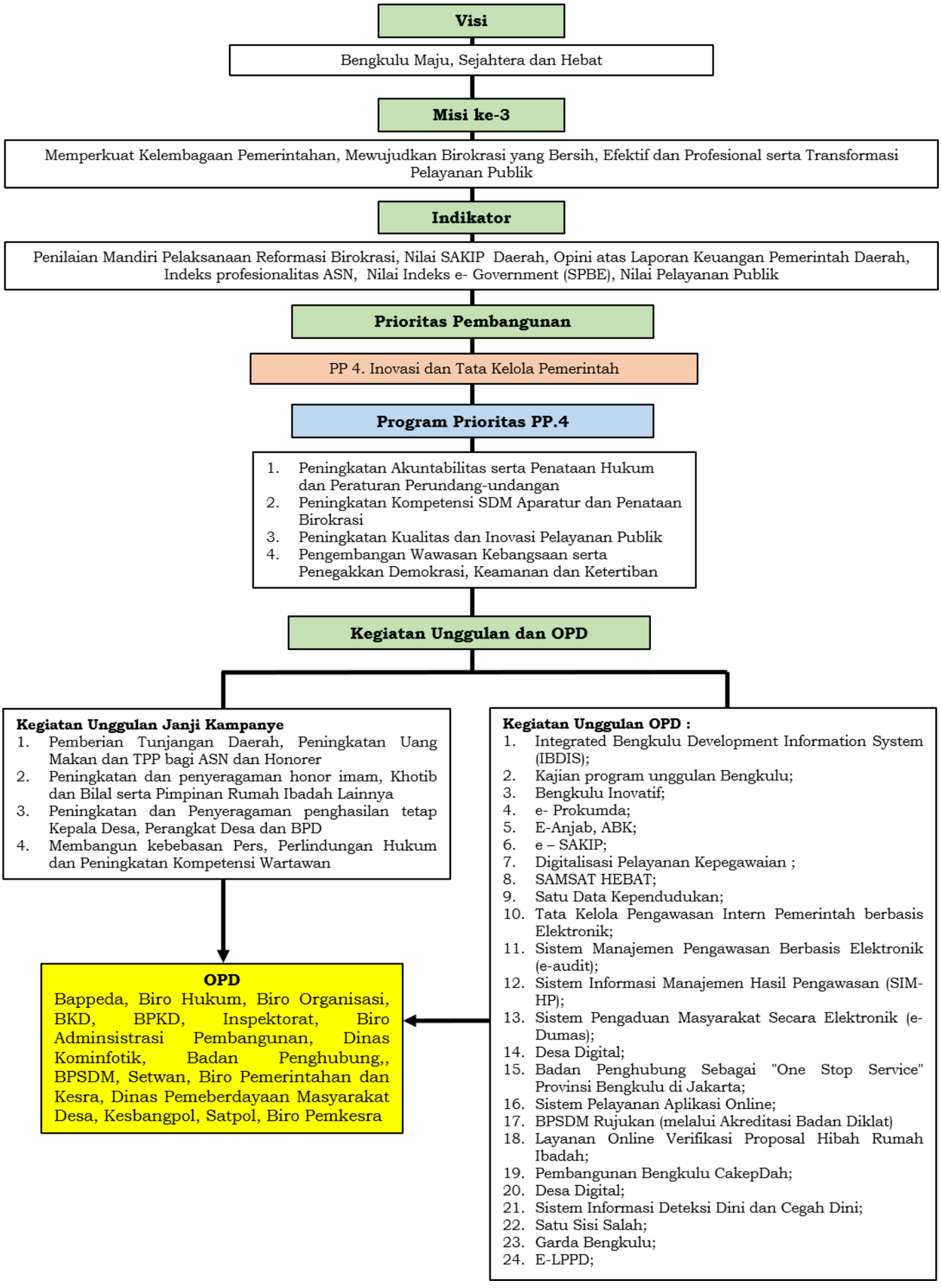
Pelaksanaan operasional dari strategi pencapaian Misi Ketiga RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, yang dimulai dari tujuan, sasaran, indikator, strategi, prioritas pembangunan dan program prioritas, terdapat kegiatan-kegiatan unggulan baik yang merupakan Janji Kampanye maupun kegiatan-kegiatan unggulan OPD. Kegiatan-kegiatan unggulan tersebut menjadi tools dalam pencapaian Misi Ketiga, yaitu:

a. Kegiatan Unggulan Janji Kampanye, yaitu :
   1) Pemberian Tunjangan Daerah, Peningkatan Uang Makan dan TPP bagi ASN dan Honorer;
   2) Peningkatan dan penyeragaman honor imam, Khotib dan Bilal serta Pimpinan Rumah Ibadah Lainnya;
   3) Peningkatan dan Penyeragaman penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
   4) Membangun kebebasan Pers, Perlindungan Hukum dan Peningkatan Kompetensi Wartawan;
b. Kegiatan Unggulan per Perangkat Daerah, yaitu:
   1) Integrated Bengkulu Development Information System (IBDIS);
   2) Kajian program unggulan Bengkulu;
   3) Bengkulu Inovatif;
   4) e- Prokumda;
   5) E-Anjab, ABK;
   6) e – SAKIP;
   7) Digitalisasi Pelayanan Kepegawaian ;
   8) SAMSAT HEBAT;
   9) Satu Data Kependudukan;
   10) Tata Kelola Pengawasan Intern Pemerintah berbasis Elektronik;
   11) Sistem Manajemen Pengawasan Berbasis Elektronik (e-audit);

12) Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP);
13) Sistem Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik (e-Dumas);
14) Desa Digital;
15) Badan Penghubung Sebagai "One Stop Service" Provinsi Bengkulu di Jakarta;
16) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
17) Rumah sakit Rujukan klardiovaskuler dan Bedah Thorax di Provinsi Bengkulu;
18) Sistem Pelayanan Aplikasi Online;
19) BPSDM Rujukan
20) Layanan Online Verifikasi Proposal Hibah Rumah Ibadah;
21) Pembangunan Bengkulu CakepDah;
22) Desa Digital;
23) Sistem Informasi Deteksi Dini dan Cegah Dini;
24) Satu Sisi Salah;
25) Garda Bengkulu;
26) E-LPPD;

Perangkat Daerah yang terlibat dalam pencapaian misi ketiga adalah Bappeda, Biro Hukum, Biro Pemkesra, Biro Organisasi, Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; Inspektorat; Biro Adminsistrasi Pembangunan; Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik; Badan Penghubung; BPSDM; Sekretariat DPRD; Biro Pemerintahan dan Kesra; Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa; Badan Kesbangpol; Satpol. Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Ketiga RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6.3
Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Ketiga RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026



4. Strategi Pencapaian Misi Keempat: Membangun Sumber Daya Manusia Menjadi Berkualitas, Berdaya Saing Dan Berbudaya Serta Toleran Dan Religius

Makna dari misi adalah pemajuan SDM. Sumber Daya Manusia di Provinsi Bengkulu dibentuk dan dibangun agar dapat menjadi manusia yang kuat, sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, beradab-budaya, menguasai teknologi, berkarakter, sejahtera sehingga mampu memiliki daya saing yang tinggi. Kebijakan pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup mulai dari kandungan hingga tumbuh, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas. Selanjutnya pembangunan manusia dilakukan dalam kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan mengimplementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat yang religius dan toleran dengan menciptakan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Misi keempat RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 ini memiliki tujuan yaitu Meningkatnya Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan ini memiliki tiga sasaran yang akan dicapai yaitu, Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan; Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Pada Sasaran Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, strategi yang dilakukan adalah dengan Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan serta meningkatnya minat baca di semua lapisan masyarakat; Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidikan; dan Peningkatan kualitas layanan dan pembudayaan gemar membaca.

Pada sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, strategi yang dilakukan adalah dengan Meningkatkan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar; Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan Menurunkan angka kelahiran penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja.

Pada sasaran dan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, strategi yang dilakukan adalah Mengurangi beban pengeluaran bagi penduduk miskin dan rentan untuk memperbaiki serta mengembangkan sistem perlindungan

sosial; dan Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan pemberdayaan penduduk miskin.

Pencapaian Misi Keempat ini dilakukan melalui pelaksanaan Prioritas Pembangunan, yaitu:

a. Prioritas Pembangunan kesatu, Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, dengan Program Prioritas;
    1) Rehabilitasi Perlindungan, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;
    2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
    3) Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan;
b. Prioritas Pembangunan ketiga, Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi, dengan Program Prioritas;
    1) Peningkatan produksi dan nilai tambah komoditas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan Perikanan, kehutanan dan pertambangan;
    2) Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM serta Digitalisasi ekonomi;

Pelaksanaan operasional dari strategi pencapaian Misi Keempat RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, yang dimulai dari tujuan, sasaran, indikator, strategi, prioritas pembangunan dan program prioritas, terdapat kegiatan-kegiatan unggulan baik yang merupakan Janji Kampanye maupun kegiatan-kegiatan unggulan OPD. Kegiatan-kegiatan unggulan tersebut menjadi tools dalam pencapaian Misi Keempat, yaitu:

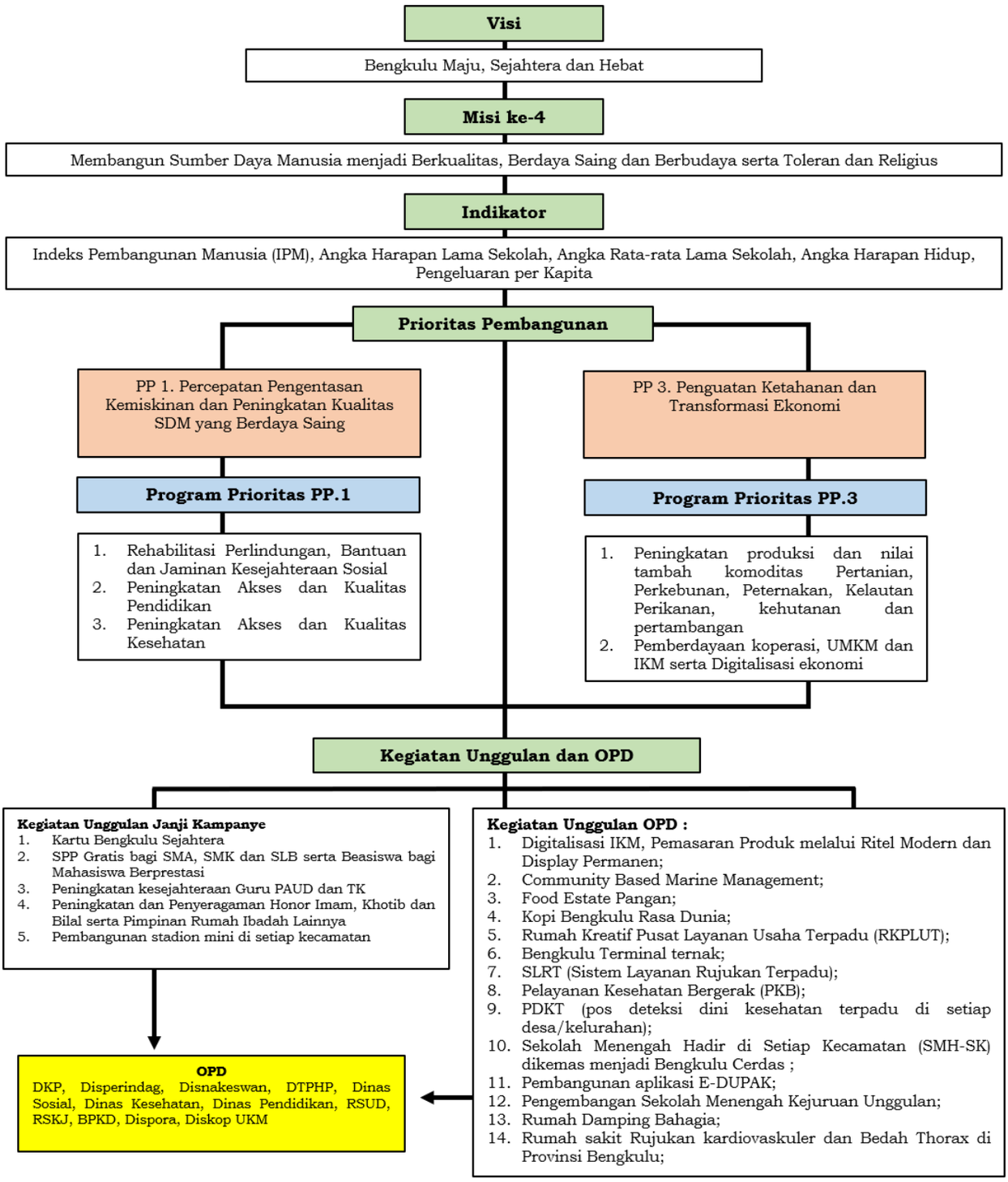
a. Kegiatan Unggulan Janji Kampanye, yaitu :
    1) Kartu Bengkulu Sejahtera;
    2) SPP Gratis bagi SMA, SMK dan SLB serta Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi;
    3) Peningkatan kesejahteraan Guru PAUD dan TK;
    4) Peningkatan dan ePenyeragaman Honor Imam, Khotib dan Bilal serta Pimpinan Rumah Ibadah Lainnya;
    5) Pembangunan Stadion Mini di setiap Kecamatan.

b. Kegiatan Unggulan per Perangkat Daerah, yaitu:

1) Digitalisasi IKM, Pemasaran Produk melalui Ritel Modern dan Display Permanen;
2) Community Based Marine Management;
3) Food Estate Pangan;
4) Kopi Bengkulu Rasa Dunia;
5) Rumah Kreatif Pusat Layanan Usaha Terpadu (RKPLUT);
6) Bengkulu Terminal ternak;
7) SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu);
8) Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB);
9) PDKT (pos deteksi dini kesehatan terpadu di setiap desa/kelurahan);
10) Sekolah Menengah Hadir di Setiap Kecamatan (SMH-SK) dikemas menjadi Bengkulu Cerdas ;
11) Pembangunan aplikasi E-DUPAK;
12) Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Unggulan;
13) Rumah Damping Bahagia;
14) Rumah sakit Rujukan kardiovaskuler dan Bedah Thorax di Provinsi Bengkulu;

Perangkat Daerah yang terlibat dalam pencapaian misi keempat adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Holtikultura; Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; RSUD DR. M. Yunus; RSKJ Soeprapto; BPKD, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi UKM. Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Keempat RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6.4
Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Keempat RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026



5. Strategi Pencapaian Misi Kelima: Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara Terpadu

Makna dari misi kelima RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 ini adalah inklusi pembangunan untuk perempuan, anak dan disabilitas. Perempuan di Provinsi Bengkulu diberikan akses dan kontrol yang sama dalam setiap bidang pembangunan serta berhak memperoleh manfaat tanpa terkecuali sehingga tujuan dari kesetaraan gender dapat dicapai. Selain itu pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Pemerintah bersama dengan masyarakat secara terpadu akan hadir untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Tidak hanya perempuan dan anak, Misi kelima ini juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Bengkulu. Pemenuhan hak-hak disabilitas tersebut merupakan suatu pengarusutamaan yang harus ada dalam setiap aspek pembangunan di Provinsi Bengkulu selama 5 (lima) tahun mendatang.

Misi kelima ini memiliki tujuan yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender dan Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan tersebut memiliki sasaran yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak. Sasaran tersebut akan diraih dengan strategi Meningkatkan peran dan akses perempuan dalam pembangunan; dan Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pencapaian Misi Kelima ini dilakukan melalui pelaksanaan Prioritas Pembangunan, yaitu:

a. Prioritas Pembangunan kesatu, Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing, dengan Program Prioritas;

    1) Rehabilitasi Perlindungan, Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial;

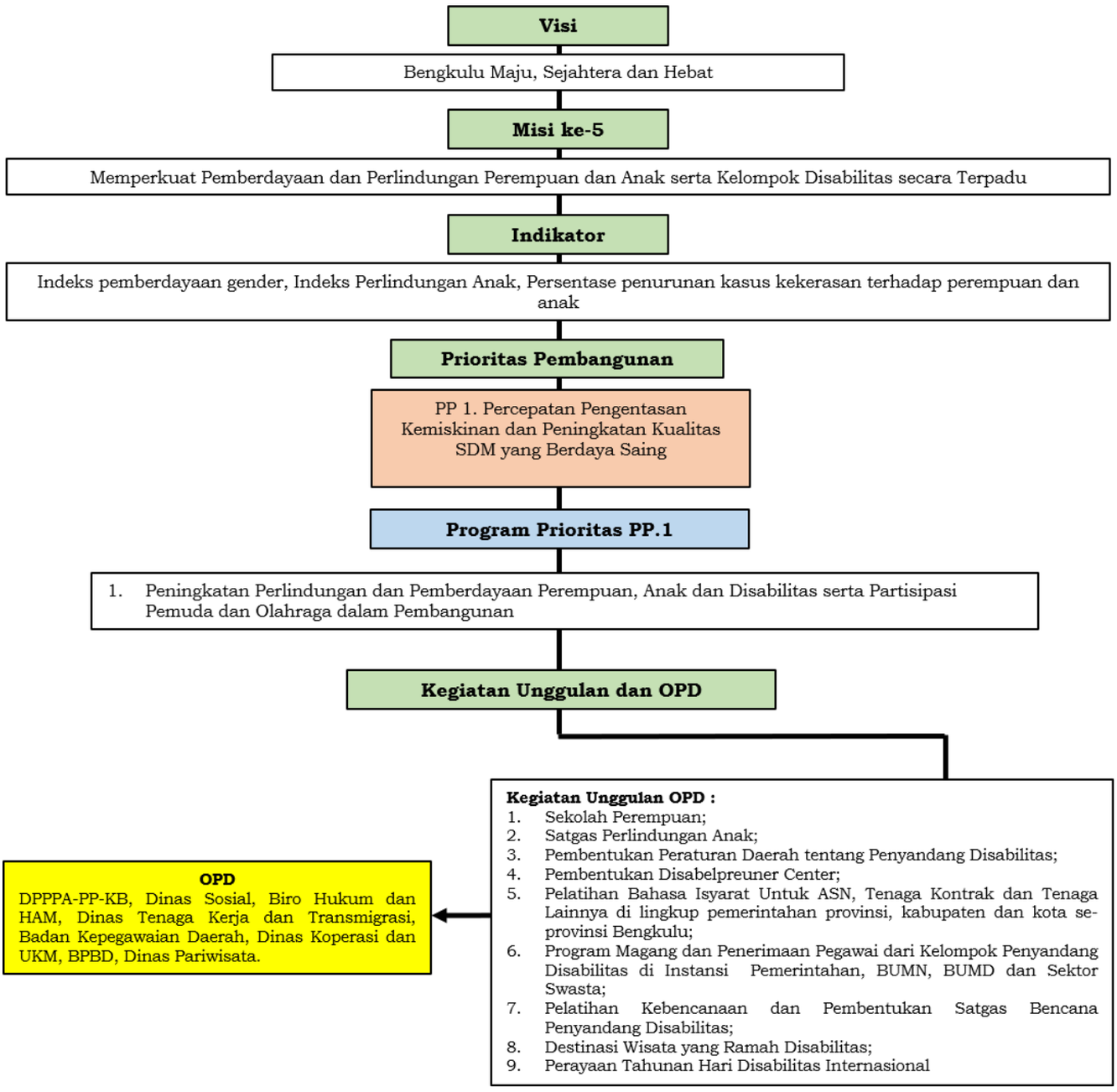
2) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Penciptaan Lapangan Kerja;
3) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
4) Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan;
5) Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Disabilitas serta Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan;

Pelaksanaan operasional dari strategi pencapaian Misi Keemlima RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, yang dimulai dari tujuan, sasaran, indikator, strategi, prioritas pembangunan dan program prioritas, terdapat kegiatan-kegiatan unggulan OPD yang menjadi tools dalam pencapaian Misi Kelima, yaitu:

a. Kegiatan Unggulan per Perangkat Daerah, yaitu:
   1) Sekolah Perempuan;
   2) Satgas Perlindungan Anak;
   3) Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas;
   4) Pembentukan Disabelpreuner Center;
   5) Pelatihan Bahasa Isyarat Untuk ASN, Tenaga Kontrak dan Tenaga Lainnya di lingkup pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota se-provinsi Bengkulu;
   6) Program Magang dan Penerimaan Pegawai dari Kelompok Penyandang Disabilitas di Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD dan Sektor Swasta;
   7) Pelatihan Kebencanaan dan Pembentukan Satgas Bencana Penyandang Disabilitas;
   8) Destinasi Wisata yang Ramah Disabilitas;
   9) Perayaan Tahunan Hari Disabilitas Internasional;

Perangkat Daerah yang terlibat dalam pencapaian misi kelima adalah DPPPA-PP-KB; Dinas Sosial; Biro Hukum dan HAM; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Badan Kepegawaian Daerah; Dinas Koperasi dan UKM; BPBD; Dinas Pariwisata. Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Kelima RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6.5
Kerangka logis Strategi Pencapaian Misi Kelima RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026



6.1.2.Strategi Pembangunan Lintas Bidang (*Mainstreaming*/Pengarusutamaan)

Dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026 telah ditetapkan 5 (lima) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Kelima mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

6.1.2.1. Penerapan SPM

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Penerapan SPM di pemerintah daerah mengacu kepada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan. Dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, penerapan SPM merupakan startegi pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan pemenuhan kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yaitu terkait dengan perencanaan dan penganggaran progam/kegiatan dalam konteks belanja daerah. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan dengan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, artinya sejak dari proses awal perencanaan program di

daerah, harus memberikan prioritas kepada program-program pelayanan dasar dalam konteks SPM untuk memastikan SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat untuk menerima pelayanan dasar dalam tingkatan minimal. Hal ini mempertegas bahwa kinerja pemerintah daerah diukur dari sejauh mana program dan kegiatan dapat terlaksana dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara, dengan kata lain yang menjadi prioritas utama adalah bukan kinerja Pemerintah daerah maupun kinerja kementerian tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Adapun Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan akses masyarakat pada pendidikan menengah;
2. Menyiapkan pendidikan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan;
3. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
4. Memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
5. Memenuhi kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
6. Menyediakan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
7. Menyediakan dan merehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
8. Memberikan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
9. Memberikan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
10. Merehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
11. Merehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
12. Merehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;

13. Merehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
14. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

6.1.2.2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Sidang Umum Perserikatan Bangsa–Bangsa secara resmi telah mengesahkan agenda pembangunan berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sehingga, mulai tahun dua ribu enam belas, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium atau MDGs yang telah dilaksanakan selama lima belas tahun sejak Tahun 2000-2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali yang mencakup 17 tujuan dan 169 target.

Pada dasarnya SDGs hadir sebagai penyempurnaan dari MDGs yang telah selesai kita laksanakan. Terdapat beberapa perubahan penyempurnaan antara SDGs dan MDGs. Jika kita melihat dari proses perumusan, SDGs disusun secara *bottom up* dan lebih komprehensif melalui proses yang berorientasi kepada partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, SDGs juga memuat solusi yang menyeluruh dalam penyelesaian permasalahan ketimpangan pembangunan, kemiskinan, gender, tata kelola pemerintahan hingga penyelesaian permasalahan lingkungan hidup secara holistik tanpa adanya diskriminasi.

SDGs merupakan agenda yang sangat penting sebagai interkoneksi pembangunan yang memerlukan tindakan bersama untuk menanggulangi masalah daerah yang juga menjadi masalah Indonesia dan dunia. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dilaksanakan untuk pencapaian target-target SDGs. Secara umum, agenda pembangunan Provinsi Bengkulu dengan visi “Mewujudkan Provinsi Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat” telah sejalan, linier dan menjadi bagian integral dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah selesai menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, strategi pencapaian target SDGs adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2
Strategi Pencapaian SDGs dalam
RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

Tujuan SDGs		Strategi Pencapaian Target SDGs dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
1.	Menghapus Segala Bentuk Kemiskinan	1. Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; 2. Meningkatkan ketersediaan penyediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin dan rentan berupa pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar; 3. Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan melalui penguatan asset sosial penduduk miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan peningkatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap modal.
2.	Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi, dan Mencanangkan Pertanian Berkelanjutan	1. Peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein dari dalam negeri; 2. Peningkatan kelancaran distribusi dan penguatan stok pangan dalam negeri; 3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; dan 4. Mitigasi gangguan iklim terhadap produksi pangan.
3.	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia	1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; 3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; 4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas; 5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; 6. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; 7. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; 8. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 9. Menguatkan manajemen, penelitian pengembangan dan sistem informasi; 10. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; 11. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.
4.	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua	1. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun; 2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal;

Tujuan SDGs		Strategi Pencapaian Target SDGs dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
		3. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; 4. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; 5. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru;
5.	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan	1. Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; 2. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum.
6.	Menjamin Ketersediaan Air Bersih Dan Sanitasi Layak Secara Berkelanjutan	1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; 2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi; 3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; 4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.
7.	Menjamin Akses Terhadap Energi Yang Bersih, Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan, Dan Modern	1. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; 2. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik 3. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.
8.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan, Tenaga Kerja yang Optimal dan Produktif, Serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	1. Mengoptimalkan kerjasama dengan memperhatikan dimensi sosial dan budaya; 2. Memperluas lapangan kerja; 3. Meningkatkan iklim investasi dan promosi ekspor; 4. Meningkatkan sinergi arah kebijakan industri; 5. Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja serta pengembangan sistem kerja yang layak; 6. Pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja; 7. Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja.
9.	Membangun Infrastruktur Tangguh, Mempromosikan Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan dan Mendorong Inovasi	1. Memperluas konektivitas daerah; 2. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi; 3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi; 4. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan

Tujuan SDGs		Strategi Pencapaian Target SDGs dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
		mempertimbangkan daya dukung lingkungan; 5. Mempercepat implementasi e-*government* dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan *cost effective*; 6. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.
10.	Mengurangi Kesenjangan	1. Peningkatan penyerapan tenaga kerja miskin dan rentan produkif ke dalam sektor industri pengolahan unggulan; 2. Pengembangan aktivitas rantai pengolahan yang bersifat penambahan nilai *(value added*) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan komoditas unggulan berbasiskan agro industri; 3. Perbaikan rantai distribusi komoditas unggulan yang berpihak kepada petani kecil.
11.	Membuat Kota dan Pemukiman Penduduk yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	1. Percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; 2. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; 3. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; 4. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan.
12.	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1. Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 2. Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah; 3. Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/ masyarakat mengenai manfaat produk tersebut; 4. Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur; 5. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.
13.	Penanganan Perubahan Iklim	1. Peningkatan pelibatan sektor baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi dan pengalokasian pendanaannya; 2. Standarisasi kegiatan penurunan emisi di setiap sektor; 3. Meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD-GRK dan adaptasi;
14.	Melestarikan Laut, dan Sumber Daya Kelautan Secara Berkelanjutan untuk Pembangunan Berkelanjutan	1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung konektivitas laut; 2. Peningkatan SDM, Iptek, Wawasan dan Budaya Bahari; 3. Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pengendalian kegiatan illegal; 4. Pengelolaan pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau terluar. pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar; 5. Peningkatan pengamanan pesisir dan konservasi perairan.

Tujuan SDGs		Strategi Pencapaian Target SDGs dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
15.	Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Pemanfaatan Secara Berkelanjutan Terhadap Ekosistem Darat, Mengelola Hutan Secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi, dan Menghentikan dan Memulihkan Degradasi Lahan dan Menghentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayati	1. Peningkatan instrumen penegakan hukum; 2. peningkatan efektivitas penegakan hukum; 3. peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan.
16.	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	1. Mempromosikan proses pembangunan yang inklusif; 2. Menghormati hak-hak semua kelompok sosial-budaya, minoritas, masyarakat adat, agama; 3. Melestarikan seluruh budaya warisan dan sumber daya alam; 4. Menghormati hak-hak kaum marginal untuk menentukan dan mewujudkan aspirasi pembangunannya.
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	1. Meningkatkan peran Bengkulu di tingkat nasional; 2. Meningkatkan kerjasama dalam IMT-GT; 3. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM;.

6.1.2.3. Pengarusutamaan Gender

Salah satu strategi pembangunan daerah Provinsi Bengkulu yang terintegrasi dengan nasional yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah Pengarusutamaan Gender. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada seluruh pemerintahan untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pada seluruh bidang pembangunan termasuk pembangunan di bidang ekonomi.

Pada hakekatnya, peran laki-laki dan perempuan, baik secara kuantitas maupun kualitas, perlu diperhatikan dalam pembangunan. Namun dalam perjalanannya, kedudukan dan peran perempuan di Bengkulu, walau sudah membaik, namun masih belum memadai. Kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah, yang antara lain disebabkan oleh:

1. Adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di tatanan antarprovinsi dan antar kabupaten/kota.

2. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi.
3. Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit.

Capaian pembangunan Gender di Provinsi Bengkulu, dilihat dari indikator IPG dan IDG. IPG Provinsi Bengkulu cenderung mengalami penurunan 3 tahun terakhir dan mencapai 91 pada tahun 2020. Sedangkan IDG terus meningkat hingga menjadi 70,48 pada tahun 2020. Pengarustamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender. Oleh karenanya, tsrategi percepatan PUG dilakukan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan lakilaki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah tujuan

akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Selain itu, strategi dalam PUG yang akan dilaksanakan oleh Povinsi Bengkulu dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan komitmen pengambil kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif untuk melaksanakan PUG;
2. Mewujudkan kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan;
3. Membentuk kelembagaan PUG dengan tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan PUG, dalam bentuk unit kerja struktural dan atau fungsional seperti focal point, kelompok kerja, forum, dan tim;
4. Menyiapkan SDM dan sumber daya lainnya untuk pencapaian tujuan PUG;
5. Menyiapkan sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin, yaitu data statistik yang terpilah menurut jenis kelamin, dan data yang terkait gender tertentu;
6. Menyiapkan alat analisis gender untuk mengidentifikasi isu gender dan menyusun rencana, seperti: perencanaan, penganggaran dan pemantauan dan evaluasi;
7. Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah berupa partisipasi masyarakat dalam mekanisme dialog dan diskusi dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Ketujuh strategi ini merupakan prasyarat yang saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Adanya komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman kosep gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelembagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender.

Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data pilah dan data spesifik gender yang memadai. Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran.

6.1.2.4. Pemenenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas belum mendapat tempat di masyarakat. Kehadirannya masih dipandang sebelah mata. Keterbatasan yang dimiliki, membuat mereka dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan. Hak-hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan hingga hak kemudahan mengakses fasilitas umum.

Padahal Undang-Undang Dasar UUD 1945, sudah dengan tegas menjamin para penyandang disabilitas. Setidaknya dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabillities* pada tahun 2011 lalu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas). Indonesia merupakan negara ke-107 yang meratifikasi konvensi tersebut. Dalam undang-undang tersebut diatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas. Mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, hingga hak untuk bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Selain itu, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adanya undang-undang penyadang disabilitas tersebut, tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tapi jaminan agar kaum disablitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan

diskriminasi. Secara garis besar, Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai ragam penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas, pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Dengan begitu, adanya undang-undang tersebut, akan memperkuat hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Mulai dari hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang lebih baik dan kemudahan mengakses fasilitas umum.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu pada RPJMD Tahun 2021-2026, terlebih hal tersebut tertuang didalam Misi ke-5 RPJMD. Berdasarkan masukan dalam proses penyusunan RPJMD, maka strategi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam RPJMD Tahun 2021-2026 untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas

   Perda Disabilitas sangat diperlukan untuk mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di tingkat daerah. Selain untuk pemenuhan hak-hak difabel berdasarkan potensi yang ada dan ini menjadi salah satu indikator bahwasannya pemerintah daerah mempunyai komitmen terhadap persoalan disabilitas. Perda disabilitas sangat diperlukan sebagai ruang pemerintah daerah untuk mengatur sendiri hal yang menjadi kewenangannya berdasarkan situasi daerah yang ada dan sumber daya yang dimiliki secara tepat dan proposional. Perangkat daerah yang terkait dengan strategi ini adalah Dinas Sosial dan Biro Hukum dan HAM.

2. Pembentukan *Disabelpreuner Center*

   Perkembangan globalisasi dan digitalisasi menuntut penyandang disabilitas untuk dapat bersaingan dalam memasuki dunia kerja. Lebih jauh lagi kelompok penyandang disabilitas diharapkan dapat mampu berdiri sendiri dengan membuka usaha yang dapat memberikan penghidupan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dalam rangka mempersiapkan hal tersebut maka perlu membangun *Disabelpreuner Centre* dengan tujuan mengenalkan kepada penyandang disabilitas mengenai dunia usaha keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Materi pelajaran kewirausahaanpun tidak hanya *soft skill* namun juga

ditambah dengan keterampilan dalam mengelola usaha. Agar aplikasi dari materi tersebut bisa diaplikasikan penyandang disabilitas yang terjun sebagai pelaku UMKM atau bekerja di sektor swasta kelak, maka diperlukan tempat agar penyandang disablitas dapat berpraktik sehingga jika penyandang disibilitas mengalami kendala yaitu *Disabelpreuner Centre* sebagai wadah bimbingan, praktek bisnis dan pengembangan bisnis yang di kerjakan oleh penyandang disabilitas. Disabelpreuner Centre ini juga bisa menjadi salah satu inovasi daerah yang menjadi wujud komitmen daerah di dalam memberdayakan kelompok disabilitas.

Perangkat daerah yang terkait dengan strategi ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Koperasi dan UKM.

3. Pelatihan Bahasa Isyarat Untuk ASN, Tenaga Kontrak dan Tenaga Lainnya di lingkup pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota se-provinsi Bengkulu.

   Permasalahan pembangunan Provinsi Bengkulu adalah akses pelayanan dasar untuk masyarakat, terutama masyarakat miskin, kelompok minoritas dalam hal ini penyandang disabilitas terhadap pelayanan dasar. Salah satu pelayanan dasar itu adalah akses informasi. Tidak adanya kesediaan tenaga Juru Bahasa Isyarat di tempat tempat layanan publik membuat jurang kesenjangan atas hak informasi kepada kelompok disabilitas. Untuk itu perlu dilaksanakan program pelatihan bahasa isyarat utuk pemberdayaan ASN dan tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu serta kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan informasi yang selaras dengan prinsip SDG's yaitu "*No One Left Behind*" untuk berpartisipasi dan menikmati pembangunan.

   Perangkat daerah yang terkait dengan strategi ini adalah Dinas Sosial.

4. Program Magang dan Penerimaan Pegawai dari Kelompok Penyandang Disabilitas di Instansi Pemerintahan, BUMN, BUMD dan Sektor Swasta.

   Setiap tahun anak dengan disabilitas lahir dan setiap tahun SLB atau Sekolah Inklusi meluluskan anak didiknya. Dan itu berarti setiap tahun akan ada pengangguran pengangguran baru yang

berkontribusi dalam tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Bengkulu. Sebagian besar penyandang disabilitas berada pada garis kemiskinan. Guna memutus rantai kemiskinan penyandang disabilitas harus diberikan kemudahan akses Pendidikan dan pekerjaan untuk tingkatan keidupan selanjutnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa perusahaan swasta wajib pekerjakan penyandang disabilitas minimal 1 % dari total pegawai, dan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD wajib memperjakan 2 % dari total pekerjanya.

Perangkat daerah yang terkait dengan strategi ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Kepegawaian Daerah.

5. Pelatihan Kebencanaan dan Pembentukan Satgas Bencana Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan data korban yang terdampak bencana banjir besar tahun 2019 yang lalu di Provinsi Bengkulu, orang dengan disabilitas atau difabel terdampak bencana secara langsung tidak mendapatkan penanganan yang proporsional karena proses evakuasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyandang disabilitas menjadi kelompok yang tidak diikutsertakan dalam perencanaan penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana dikarenakan pandangan negatif yang melekat pada mereka. Perumus kebijakan dan pembuat program sejauh masih kurang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai keberadaan dan kebutuhan perlindungan penyandang disabilitas, padahal Bengkulu sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi dikarenakan posisi geografisnya dan tingkat risiko bencana yang tinggi sudah seharusnya memperhatikan tingkat keselamatan tiap keterlibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Untuk itu perlu dilaksanakan pelatihan mitigasi bencana khusus untuk penyandang disabilitas, agar selain untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan saat terjadi bencana, para penyandang disabilitas juga dapat mejadi relawan kemanusiaan saat terjadi bencana alam.

Perangkat daerah yang terkait dengan strategi ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6. Destinasi Wisata yang Ramah Disabilitas

Perkembangan industri wisata telah mengalami pertumbuhan yang signifikan di Provinsi Bengkulu. Pada RPJMD Tahun 2021-2026, Provinsi Bengkulu telah mencanangkan Natural Bengkulu, yaitu prioritas pembangunan dalam sektor pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata di Provinsi Bengkulu harus diiringi dengan inklusifitas bagi difabel. Perlu dipastikan hak aksesbilitas penyandang disabilitas di destinasi wisata daat dipenuhi. Minimnya infrastukrtur dan sumber daya manusia kerap kali menjadi hambatan. Padahal potensi pengunjung destinasi wisata berasal dari kelompok masyarakat penyandang disabilitas dan pengelolaan destinasi wisata pun dapat melibatkan penyandang disabilitas. Perangkat daerah yang terkait dengan strategi ini adalah Dinas Pariwisata.

7. Perayaan Tahunan Hari Disabilitas Internasional

Peringatan Hari Disabilitas Internasional menjadi momentum untuk menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas. Momentum peringatan hari Disabilitas Internasional juga menjadi dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas yang lebih mengedepankan paradigma *human rights based*. Sejak tahun 2019, Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif menginisiasi perayaan HDI secara bersama sama berkolaborasi dengan seluruh organisasi penyandang disabilitas ayang ada di Bengkulu. ketiadaan anggaran yang selama ini tidak teralokasikan di dians sosial atau dinas lainnya menjadi salah satu hambatan dan tantangan didalam mengelar event tahunan ini. Hari Disabilitas Internasional diperingati rutin pada tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Peringatan ini sejatinya merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa, peran dan kemampuan para penyandang disabilitas, sekaligus momentum untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas. Perangkat daerah yang terkait dengan strategi ini adalah Dinas Sosial.

6.1.2.5. Pengarusutamaan Hak Anak

PUHA adalah suatu strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. PUHA mensyaratkan adanya integrasi keseluruhan konvensi hak anak dan isu-isu anak ke dalam setiap peraturan perundang-undangan, kebijakan, kegiatan, dan program pembangunan nasional. Capaian dari pelaksanaan PUHA adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak anak melalui penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif anak. PUHA dijadikan batasan dan pijakan dalam menyusun suatu kebijakan serta program pembangunan. Paradigma PUHA adalah menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan HAM, digunakan oleh Pemerintah dalam melakukan peningkatan kualitas layanan perlindungan dengan membuat kerangka kerja hukum serta pembuatan Undang-Undang baru yang terkait dan keikutsertaan terhadap berbagai konvensi internasional yang berkenaan dengan hak anak. Komitmen tersebut terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Dalam kaitan ini paling tidak terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Negara yang telah meratifi kasi KHA berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan dalam KHA. Langkah-langkah implementasi umum yang harus dilakukan adalah menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA, serta upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka KHA.

Hak anak menurut Konvensi Hak Anak PBB adalah:

1. Hak untuk bermain;

2. Hak untuk mendapatkan pendidikan;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas);
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
6. Hak untuk mendapatkan makanan;
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan;
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi;
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan;
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan;

Untuk memastikan pembangunan daerah telah memenuhi hak-hak anak, diperlukan upaya penyerasian, penyesuaian dan juga penilaian terus-menerus melalui berbagai indikator hak anak. Untuk itu dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 strategi yang dilakukan untuk menjamin terintegrasikannya hak anak sehingga menjiwai setiap kebijakan, program dan kegiatan yang responsif anak adalah :

1. Memberikan kepastian jaminan hak sipil dan kebebasan;
2. Menciptakan lingkungan keluarga dan pengasuhan yang ramah anak;
3. Memberikan jaminan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Memberikan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
5. Memberikan perlindungan khusus anak;

6.1.2.6. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan Rendah Karbon (PRK) adalah sebuah paradigma pembangunan baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan beremisi GRK rendah dan optimalisasi eksploitasi SDA. Prinsip dasar Perencanaan PRK mencangkup:

1. Penerapan *Evidence-based Policies;*
2. Keikutsertaan *Carrying capacity* (termasuk Emisi GRK) sebagai komponen penting dalam penyusunan perencanaan dan target nasional;

3. Analisa *trade-off* menyeimbangkan tujuan pembangunan ekonomi dan sosial dengan tujuan pengelolaan lingkungan;
4. Implementasi prinsip *Holistic, Integrated, Thematic, Spatial;*
5. Inklusifitas dalam penyusunan perencanaan dengan stakeholders terkait;

Dalam konteks SDGs, PPRK adalah tema pilar lingkungan yang menempatkan pencapaian target Goal 13 (Perubahan Iklim) sebagai basis utama untuk mendukung Goal 7 dan Goal 8 (Pilar Ekonomi), Goal 1 dan Goal 4 (Pilar Sosial) dan Goal 11,12, 14 dan 15 (Pilar lingkungan). PPRK merupakan implementasi nyata KLHS untuk memastikan komponen daya dukung SDA dan daya tampung LH menjadi salah satu referensi utama dalam penyusunan kebijakan, rencana, atau program (KRP) pembangunan. Peraturan mengenai KLHS didalam perencanaan menjadi kendaraan dalam mengaplikasikan analisis Kebijakan, Rencana dan Program untuk menghasilkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dalam RPJMN 2020-2024 dan SDGs Roadmap 2030.

Dalam lingkup global, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan komitmen pasca-2020 pada pertemuan COP 21 di Paris, Perancis, Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29% (skenario fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan reduksi emisi minimal sebesar 41% (skenario ambisius/jika dengan dukungan internasional) pada tahun 2030. Komitmen tersebut dikenal dengan istilah *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC). Penyusunan INDC didasarkan pada hasil kaji ulang RAN/RAD-GRK. Kaji Ulang RAN/RAD-GRK sesuai dengan mandat dalam Pasal 9 Perpres No. 61 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa RAN-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional. Untuk menindaklanjuti RAN GRK, maka pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyusun dokumen RAD-GRK tersebut dan disahkan melalui Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 30 Tahun 2012 pada tanggal 14 Desember 2012 dan saat ini sudah dilakukan Kaji Ulang Dokumen RAD-GRK Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2030.

1. Profil Emisi GRK di Provinsi Bengkulu

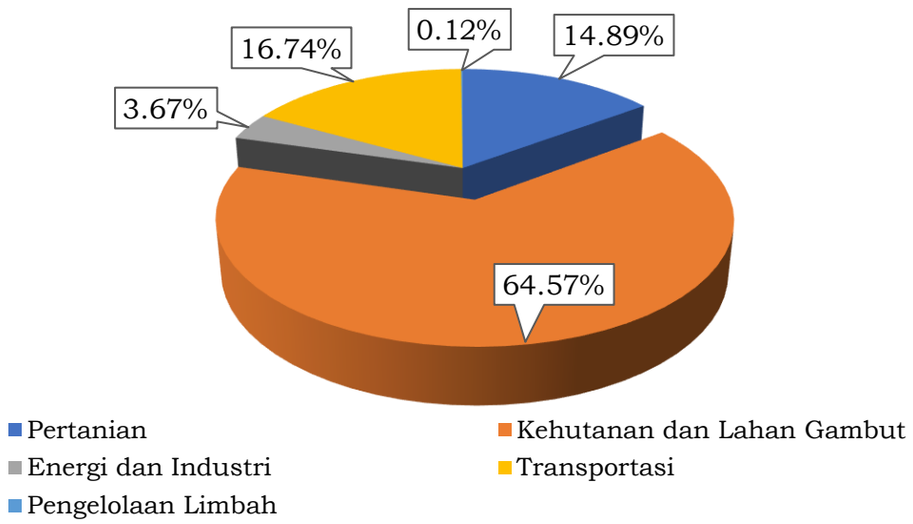
Dalam dokumen RAD-GRK Bengkulu mengimplikasikan aksi mitigasi di empat bidang prioritas, yaitu: 1) Bidang Pertanian, 2) Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut, 3) Bidang Energi dan Transportasi; serta 4) Bidang Industri

dan Pengelolaan Limbah. Berdasarkan hasil perhitungan emisi gas rumah kaca didapat nilai rekapitulasi tiap sektor sebagai berikut ini.

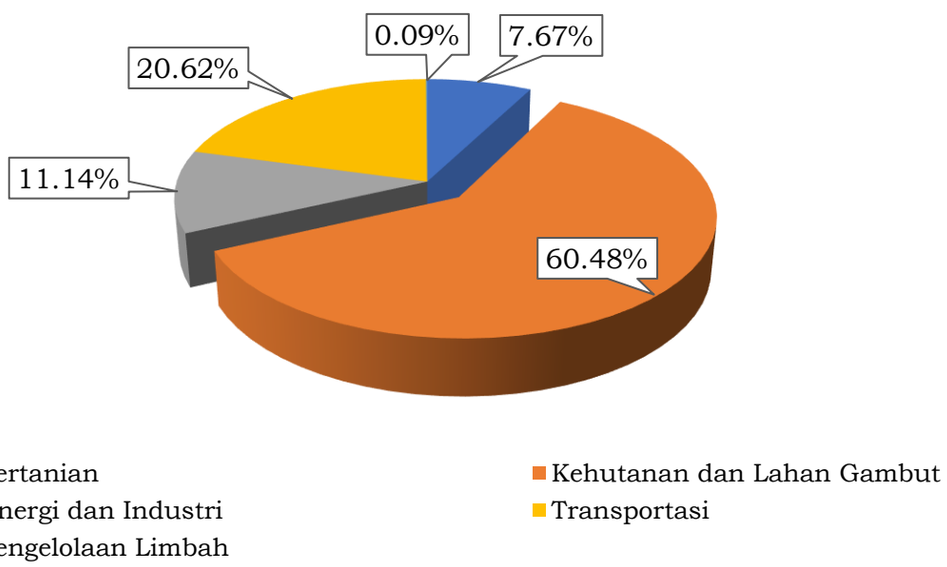
No	Sektor	Kontribusi Historis (ton CO_2-eq)	Kontribusi Thn 2020 (ton CO_2-eq)
1	Pertanian	709,704	919,678
2	Kehutanan dan Lahan Gambut	3,078,553.20	7,248,194.67
3	Energi dan Industri	175,173.5	1,335,704.40
4	Transportasi	798,798	2,471,065.00
5	Pengelolaan Limbah	572,166	764,841
T O T A L		**5,334,395.70**	**12,739,483.07**

Sektor penyumbang emisi terbesar adalah sektor berbasis lahan, mengingat sebagian besar kawasan Provinsi Bengkulu adalah kawasan hutan

Gambar 6.6.
Kontribusi Historis Sektoral terhadap Emisi GRK Bengkulu



Gambar 6.7.
Kontribusi Baseline Tahun 2020 Sektoral terhadap Emisi GRK Provinsi Bengkulu



2. Permasalahan Emisi GRK di Provinsi Bengkulu

a. Bidang Pertanian

Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor Pertanian utamanya bersumber dari aktivitas perubahan penggunaan lahan (*land use change*) dan pengelolaan atau management lahan pertanian utamanya management penggenangan lahan sawah, penggunaan pupuk khususnya urea, dan peternakan (utamanya dari enteric atau sendawa ternak dan penanganan kotoran ternak). Permasalahan emisi GRK sektor pertanian adalah perlunya komitmen kebijakan dan konsistensi untuk mendukung program PPRK dari pemerintah daerah khususnya pada perubahan penggunaan lahan dan manjemen lahan pertanian yang baik.

b. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Permasalahan emisi GRK di Provinsi Bengkulu merupakan dampak dari perubahan penggunaan lahan baik di kawasan hutan maupun non hutan untuk Perkebunan, Pertanian, dan Pertambangan (Hutan).

c. Bidang Energi dan Transportasi

Mengacu pada dokumen IPCC 2006, aktivitas di sector energy terdiri dari 4 (empat): 1) Eksplorasi dan eksploitasi sumber energi primer 2) Konversi sumber energi primer menjadi energy sekunder melalui proses pengolahan pada kilang minyak dan pembangkit listrik, 3) Transmisi dan distribusi bahan bakar, dan 4) Penggunaan bahan bakar yang digunakan pada peralatan stasioner (Tidak bergerak) dan *mobile* (bergerak).

d. Bidang Limbah

Limbah padat atau persampahan dan air limbah (domestik maupun industri) menjadi penghasil emisi gas rumah kaca bidang pengelolaan limbah. Namun fokus perhitungan pada RAD-GRK adalah yang bersumber dari limbah domestik.

3. Proyeksi Emisi BAU *Baseline*

Berdasarkan Emisi BAU Baseline maka Proyeksi penurunan emisi yang dapat dilakukan Provinsi Bengkulu melalui aksi mitigasi sebesar 19.421.931,1 Ton CO2 Eq (20,72 %) yang meliputi beberapa sektor berikut ini :

a. Bidang Pertanian dari tahun 2011 hingga tahun 2030 adalah sebesar 25.711.635 tCO2eq. Jumlah ini mencakup emisi pada lahan sawah sebesar 17.341.180 tCO2eq; peternakan-CH4 sebesar 3.733.151 tCO2eq; peternakan-N2O sebesar 49.903 tCO2eq; pupuk urea-CO2 sebesar 41.413 tCO2eq; dan Direct N2O sebesar 4.545.988 tCO2eq. Proyeksi BAU *baseline* Emisi yang akan terjadi di sektor Pertanian sampai tahun 2030 sebesar 25,711,634.92. Ton CO2Eq. Target Nasional semua sektor untuk menurunkan Emisi sampai tahun 2030 sebesar 30%. Provinsi Bengkulu mempunyai target yang sama dengan pemerintah pusat sehingga penurunan emisi GRK sebesar 7.713,490, 47 Ton Co2Eq (30 %).

b. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut di Povinsi Bengkulu yang menunjukan besaran perkiraan emisi dimasa yang akan datang. Berdasarkan hasil perhitungan tim teknis diketahui bahwa jumlah emisi bersih Provinsi Bengkulu pada tahun 2011- 2030 diperkirakan sebesar 1,972,799.173 sampai 1,674,339.58 ton CO2 eq. Berdasarkan cara tersebut diperoleh nilai emisi kumulatif Provinsi Bengkulu periode tahun 2011-2030 ada sebesar 33,889,780.23 ton CO2 eq. Proyeksi penurunan emisi sektor kehutanan dan lahan gambut sebesar 11.629.037,33 ton c02 eq (34,31%).

c. Bidang Energi dan transportasi; berdasarkan hasil proyeksi BAU baseline diatas, dapat dilihat bahwa emisi GRK provinsi Bengkulu di tahun 2010 di bidang energy sebesar 787,94 ton CO2-eq yang akan meningkat hingga 2.638,52 ton CO2-eq di tahun 2030. Pada Tahun 2030, bidang energi (energi, transportasi) akan menjadi sumber emisi terbesar (kedua/ketiga) di Provinsi Bengkulu setelah bidang Lahan, hal berdasarkan data proyeksi di atas, bahwa bidang energi, sektor (transportasi/energi) merupakan penghasil emisi tertinggi di tahun dasar(2010), (dan/sedangkan) di tahun 2030, sektor (transportasi/energi merupakan sektor dengan sumber emisi GRK terbesar dengan proyeksi penurunan emisi sektor eneri sampai tahun 2030 sebesar 27.686,03 ton CO2-eq atau 10,49 % dan BAU Baseline Emisi transportasi sebesar 18.161,45 Ton CO2 Eq dengan proyeksi penurunan emisi dengan aksi mitigasi sebesar 2.331,9 Ton CO2 Eq (12,84 %).

d. Bidang Limbah; untuk limbah padat atau persampahan dan air limbah (domestik maupun industri) menjadi penghasil emisi gas

rumah kaca bidang pengelolaan limbah. Namun fokus perhitungan pada RAD-GRK adalah yang bersumber dari limbah domestik. Proyeksi penurunan emisi sampai tahun 2030 adalah sebesar 49.385,37 atau 15,946%.

e. Bidang *Blue Carbon*: *Blue Carbon* adalah *carbon* yang diserap dan disimpan didalam laut dan ekosistem pesisir, seperti hutan mangrove dan padang lamun. Sebaran hutan mangrove provinsi Bengkulu sebesar 2.434,2 ha dengan potensi carbon 124,15 ton Co2Eq. maka potensi keseluruhan emisi Blue carbon provinsi Bengkulu sebesar 302.181,1 ton Co2Eq.

4. Strategi PPRK Provinsi Bengkulu

Untuk mencapai target penurunan emisi GRK di Provinsi Bengkulu telah merumuskan strategi implementasi penyelenggaraan PRK ini. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2018, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan mitigasi perubahan iklim. Evaluasi kegiatan ini dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Dari proses evaluasi ini, dirumuskan 3 (tiga) komponen penting untuk memastikan implementasi mitigasi perubahan iklim dapat berjalan efektif dan efisien yaitu :

1) Penetapan Kelembagaan dan pembagian peran antar Pemangku Kepentingan;
2) Perumusan kebutuhan anggaran kegiatan mitigasi dan sumbernya, dan
3) Perumusan indikator-indikator yang dipantau dan dievaluasi, perlu dilakukan aksi mitigasi yang menurunkan emisi.

Kebijakan yang dilakukan dalam PRK dalam penurunan emisi GRK disetiap sektor melalui:

1) Sektor Lahan melalui :
   a. Restorasi Gambut;
   b. Reforestasi;
   c. Menahan laju konversi hutan primer dan sekunder;
   d. Menahan Deforetasi dari hutan menjadi non hutan;
   e. Mencegah kebakaran;
   f. Ilegal logging;

g. Moratorium ;

2) Sektor Pertanian

a. Meningkatkan produktifitas lahan;

b. Penerapan manajemen pertanian berkelanjutan;

3) Energi dan Transportasi

a. Efisiensi Energi;

b. Pengembangan pembangkit EBT;

c. Peningkatan penggunaan biofuel;

4) Limbah

a. Penanganan Sampah rumah tangga;

b. Manajemen limbah industri;

c. Efisiensi dan pengelolaan industri;

5) Kelautan dan Pesisir (Blue Carbon)

a. Rehabilitasi Mangrove;

b. Pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai;

c. Pemulihan fungsi ekosistem pesisir;

d. Penguatan kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove;

6.1.2.7. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Penanggulangan kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di Provinsi Bengkulu. Berbagai kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan pemerintah. Guna mendukung efektivitas koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dibentuk kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan pada dasarnya adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang layak, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju keadaan atau kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Pendayagunaan berbagai potensi dan sumberdaya yang tersedia untuk pembangunan telah digerakkan melalui perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan secara

berkesinambungan, namun sampai saat ini masih belum dapat sepenuhnya memecahkan permasalahan yang ada termasuk kemiskinan.

Upaya mengatasi kemiskinan telah dilakukan antara lain dengan menyediakan beberapa kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan pertanian. Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan di Indonesia termasuk di Bengkulu, salah satu faktornya dikarenakan belum optimalnya komitmen dan keterpaduan dalam menangani masalah kemiskinan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah daalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijkan. Untuk itu perlu perumusan masalah kemiskinan yang lebih komprehensif.

Masalah kemiskinan merupakan masalah khas local (local specific), sehingga memerlukan kebijakan yang berbeda. Kebijakan tersebut tertuang didalam SPKD. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Bengkulu merupakan pengejawantahan kebijakan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu serta pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan. Selain itu juga menuntut keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun masyarakat miskin itu sendiri agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin pada khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi Bengkulu dalam SPKD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan penurunan jumlah penduduk miskin dengan mengoptimalkan kinerja program perlindungan sosial, pengurangan kesenjangan antar kelompok ekonomi, meningkatkan daya saing dan penguatan komitmen antar pemerintah di semua tingkatan.
2. Mengupayakan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha guna menurunkan jumlah pengangguran dengan mengembangkan kebijakan pro investasi dan meningkatkan kewirausahaan baru, disertai pengembangan kualitas SDM dan pemetaan potensi sumberdaya alam di setiap kawasan/wilayah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat disertai dengan peningkatan kuantitas distribusi serta kompetensi tenaga kesehatan dan non kesehatan, ketersediaan farmasi dan alat kesehatan maupun

peningkatan efektifitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB).

4. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dengan mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan serta meningkatkan angka melek huruf khususnya melalui pendidikan non formal.
5. Meningkatkan derajad kesehatan masyarakat dengan mewujudkan ketersediaan air minum perkotaan yang layak dan berkelanjutan serta meningkatkan penanganan, penyediaan dan kesadaran warga masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.
6. Meningkatkan ketahanan pangan disertai dengan penyediaan benih, pupuk dan pakan serta upaya untuk mewujudkan stabilitas harga pangan, pendidikan bagi petani dan masyarakat desa, penguatan kelembagaan, peningkatan akses teknologi, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berikut penguatan aspek kebijakan dan legalitas, peningkatan peran BUMDES, UKMK.

Strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Bengkulu sebagaiaman yang dituangkan dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Satu Data untuk Semua melalui unifikasi dan validasi data sasaran penanggulangan kemiskinan

   Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penanggulangan kemiskinan adalah adanya data sasaran yang masih berlainan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan atau dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data sasaran yang berbeda antar institusi akan berpotensi terjadinya tumpah tindih di dalam intervensi program. Di sisi lain, juga membuka peluang adanya sasaran yang tidak tersentuh dengan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan lain terhadap ketersediaan data sasaran penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai institusi relatif belum semuanya berbasis by name by address. Oleh karena itu perlu dibangun suatu komitmen dan satu sistem informasi data sasaran penanggulangan kemiskinan yang akanmenjadi rujukan semua stakeholder dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Salah satu strategi yang perlu dirumuskan dalam upaya mengoptimalkan validitas data sasaran penanggulangan kemiskinan adalah melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi subyek maupun obyek kemiskinan di lingkungannya. Pada dasarnya masyarakat merupakan suatu komunitas sosial yang saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari sehingga berbagi permasalahan yang dihadapi lingkungan rumah tangga termasuk masalah kemiskinan. Mereka lebih memahami, meski dengan indikator lokal dan belum terstandar. Upaya lanjut yang perlu dibangun dalam unifikasi data adalah penguatan sistem informasi (termasuk data kemiskinan) di tingkat desa mengingat secara administrasi pemerintah desa menjadi ujung tombak dalam memahami permasalahan kemiskinan masyarakat termasuk rumusan strategi penanggulangannya.

2. Membangun serta meningkatan kemitraan dengan pihak swasta, dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga sekolah

Masalah kemiskinan tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab sosial dariberbagai komponen bangsa untuk salingberkontribusi sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Di dalam merespon tanggung jawab sosial terhadap lingkungannnya sudah sekian waktu lembaga swasta (termasuk dunia usaha) telah berkontribusi melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kegiatan tersebut dinilai sangat potensial untuk disinergikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun demikian mengingat belum optimalnya komunikasi dan koordinasi kadang dijumpai program CSR yang berjalan tanpa melalui pemerintah daerahserta kurang memperhatian aspekkebutuhan dan permasalahan masyarakat. Kondisi yang demikian tentunya harus dibangun komunikasi yang lebih intensif guna mensinergikanprogram CSR dalam penanggulangan kemiskinan. Salah satu dari sekian problem kemiskinan yang dihadapi masyarakat Provinsi Bengkulu adalah rendahnya kepemilikan dan pengelolaan sanitasi perumahan, termasuk di dalamnya rendahnya kualitas jamban yang belum memenuhi syarat kesehatan. Kondisi sanitasi yang kurang sehat berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit infeksi, sehingga akan mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk miskin. Program CSR akan menjadi sangat strategis apabila mampu diarahkan untuk peningkatan kualitas sanitasi pada perumahan pada pendudukmiskin, mengingat akses terhadap permasalahan tersebut merupakan beban berat

yang dihadapi penduduk miskin. Program CSR juga bisa diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang bersifat pro-job, guna membuka lapangan kerja guna meningkatkan perekonomiankeluarga, sehingga permasalahan kemiskinan secara bertahap bisa teratasi.

Potensi lembaga lain yang bisa disinergikan dalam penanggulangan kemiskinan adalah keberadaan perguruan tinggiyang ada di Provinsi Bengkulu, baik negeri maupun swasta. Salah satu bentuk Tridharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian pada masyarakat. Kebanyakan perguruan tinggi mengimplementasikan bentuk pengadian kepada masyarakat melalui kegiatan kuliah kerja nyata (KKN). Namun demikian bentuk kegiatan KKN dari waktu ke waktu tidak banyak berubah, lebih banyak pada kegiatan administrasi desa maupun kegiatan seremonial lain (lomba-lomba) dan bersifat sesaat. Potensi yang demikian perlu dikelola lebih baik, dengan membangun kembali komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan perguruan tinggi guna mensinergikan program pengabdian masyarakat (KKN) disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat (terutama dalam mengatasi kemiskinan) danbersifat berkelanjutan.

Pengembangan riset perguruan tinggi yang mengambil lokasi di Provinsi Bengkulu perlu dijalin dan ditata lebih intensif lagi agar lebih bersinergi sehingga kedua belah pihak akan memperoleh manfaat. Pemerintah daerah harus membuka akses kemudahan untuk mendorongperguruan tinggi mengagendakan kegiatan riset berkelanjutan di wilayah kabupaten/koyta di Provinsi Bengkulu. Agenda riset yang perlu diagendakan bersama adalah yang menyangkut permasalahan kemiskinan, serta strategi penggalian dan pengembangan potensi masyarakat agarlebih berdaya untuk keluar dari permasalahan kemiskinan.

Dalam rangka memperkuat sistem informasi desa yang berbasis teknologi informasi (termasuk didalamnya data kemiskinan) perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah kejuruan yang menyelenggarakan program studi teknologi informasi. Sistem informasi yang berbasis teknologi informasi pada saat ini menjadi kebutuhan yang sangat mendasar, namun demikian pengembangan sistem informasi di tingkat desa terkendala dengan terbatas sumber daya manusia. Guna mengatasi permasalahan tersebut para siswa pada sekolah kejuruan

berbasis teknologi informasi bisa diberdayakan untuk membantu operasional sisteminformasi di tingkat desa.

3. Pengembangan Industrialisasi Perdesaan

Tumbuhnya industrialiasi di perdesaan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat berfokus pada ekonomi yang meliputi pekerjaan yang semakin beragam (spesialisasi), gaji, dan penghasilan yang semakin tinggi. Industrialisasi adalah bagian dari proses modernisasi di mana perubahan sosial dan perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan inovasi teknologi, seperti tumbuhnya pariwisata, sentra industri kerajinan, sentra industri olahan pangan, dan lain-lain. Pengembangan desa wisata yang memanfaatkan potensi lokal diperkirakan memberikan stimulan terhadap perkembangan ekonomi di desa pengelolaan desa wisata yang baik telah memberikan kontribusi yang sangat siginfikan terhadap perkembangan ekonomi di wilayah desa yang bersangkutan, mulai dari bertambahnya lapangan kerja lokal, terbukanya peluang usaha perdagangan cinderamata maupun makanan. Kondisi yang demikian membuka jalan yang lebih lebar bagi masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga dapat keluar dari masalah kemiskinan. Namun demikian potensi destinasi wisata saat ini baru direspon beberapa desa utamanya desa-desa yang mempunyai aset yang berhubungan dengan potensi alam (pantai, gua, dan sungai). Oleh sebab itu perlu dirumuskan kebijakan penggalian dan pengembangan potensi ekonomi di desa-desa lain, sehingga mampu berkembang sepertihalnya desa-desa yang sudah tumbuh berdasarkan aset dan potensiyang dimilikinya.

Mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki tingkat desa untuk berperan menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki, maka pemerintah daerah provinsi dan kabupaten perlu menggandeng pihak ketiga (terutama lembaga perguruan tinggi maupun lembaga riset lainnya) melalui agenda risetnya menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki desa. Pengembangan industrialisasi perdesaan juga bisa dilakukan melalui penguatan dan pelatihan kewirausahaan pada masyarakat desa, agar mampu mengakses pasar. Masyarakat perlu diberikan pelatihan ketrampilan sesuai dengan potensi yang dimiliki, secara intensif dan berkesinambungan dengan melibatkan peran dari berbagai unsur baik pemerintah daerah maupun pihak swasta. Kaum perempuan sebagai penopang perekonomian keluarga perlu mendapatkan peran yang lebih besar dalam mengambil kesempatan pelatihan

ketrampilan serta pengembangan kemampuan kewirausahaan, sehingga mampu memperbaiki taraf kehidupan di tingkat keluarganya.

4. Memperkuat Institusi Lokal dalam Penanggulangan Kemiskinan

Institusi lokal pada umumnya dipandang dalam dua bentuk yaitu organisasi lokal dan pranata sosial. Sebagai organisasi, institusi lokal bisa berupa pemerintah desa-dusun, RT-RW, PKK, kelompok karang taruna, kelompok berbasis agama, kelompok berbasis adat, kelompok berbasis pekerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam bentuk pranata sosial, institusi lokal biasa dikenaldalam bentuk, gotong royong, pengajian, hajatan dan lain-lainnya. Institusi sosial yang berupa kelembagaan (RT, kelompok organisasi) maupun yang berupa pranata sosial (gotong royong, kesenian, hajatan, dan sebagainya) merupakan modal sosial yang unik yang dimiliki masyarakat. Keberadaan institusi lokal tersebut menjadi bagian dari dinamika lokal dalam mendorong pembangunan, penanggulangan kemiskinan hingga prakarsa membangun kesejahteraan. Meskipun keberadaan institusi sosial di masyarakat cukup beragambaik dari segi jumlah, jenis dan distribusinya yang merata di pelosok dusun, akan tetapai sampai saat ini fungsi institusi sosial tersebut masih terkonsentrasi pada kepentingan ikatan sosial saja. Oleh karena itu perlu dirumuskan kebijakan baru, guna menata institusi sosial untuk bisa menjadi suatu energi positif dalam penanggulangan kemiskinan. Institusi lokal dalam bentuk organisasi telah menunjukkan kontribusinya menjadi agen membuka peluang kesempatan kerja bagi warganya, yang pada muaranya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga.

5. Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan

Meskipun masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan merupakan masalah nasional hingga daerah, namun lembaga yang menangani kemiskinan belum ada yang definitif. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan lembaga *adhoc* belum mampu memperankan fungsi utama sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan di daerah. Agar penanggungan kemiskinan lebih terarah dan bersinergi antar stakeholder, maka revitalisasi TKPD perlu dirumuskan agar lebih mampu memfungsikan perannya sesuai dengan amanat Perpres Nomor 15 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 42 tahun 2010. Penanggulangan kemiskinan juga perlu mensinergikan dan membuka peran yang lebih besar kontribusi camat dan jajarannya di wilayah

kecamatan serta pemerintahan desa. Penguatan kelembagaan sebagai kepanjangan TKPK di tingkat kecamatan dan desa menjadi alternatif yang perlu dirumuskan dan diimplementasikan. Pemerintahan desa adalah lembaga yang paling dekat dengan masyarakat sehingga mereka lebih banyak memahami permasalahan kemiskinan secara riil. Oleh karena itu harus dirumuskan kebijakan pemberian peran yang lebih besar kepada pemerintahan desa dengan melibatkan berbagai komponen yang ada di tingkat desa gunamerumuskan kebijakan yang lebih operasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Program Dana Desa pada hakekatnya dapat dijadikan sebagai saluran untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) salah satunya ditujukan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Namun demikian, kerapkali perangkat desa dihadapkan pada aturan yang mengikat sehingga kurang mampu untuk berinovasi dan berimprovisasi dalam merumuskan program pembangunan desa. Diperlukan adanya penyesuaian dan adaptasi aturan yang diselaraskan dengan potensi lokal sehingga program-program yang sumber dananya dari Dana Desa bisa lebih terarah dan tepat sasaran.

6. Klastering Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan, maka program-program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan dalam beberapa kluster. Kebijakan ini bertujuan agar program penanggulangan kemiskinan dapat diarahkan pada sasaran yang tepat yang secara langsung mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Klastering penerima program kemiskinan dibagi menjadi:

a. *Kluster I*: Bantuan dan Perlindungan Sosial yang ditujukan untuk sasaran individu atau rumah tangga sangat miskin. Golongan tersebut sangat membutuhkan bantuan untuk dapat mengakses kebutuhan dasar minimum secara layak. Sasaran dari kelompok program ini adalah rumah-tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin, serta anggota keluarganya. Tujuan program pada kluster ini untuk memenuhi hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

b. *Kluster II*: Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin agar mereka

mampu berperan serta secara aktif dalam proses pembangunan. Dengan partisipasi masyarakat yang lebih besar, upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat berjalan lebih berkelanjutan. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkanpadaprinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

c. *Kluster III*: Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok atau individu yang mempunyai usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan akses terhadap permodalan, teknologi dan pasar. Dengan demikian, upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilakukan lebih baik lagi. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil ini bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

d. *Klaster IV*: Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan perekonomian keluarga miskin.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021-2026

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Bengkulu lima tahun kedepan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanana pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.

Skenario arah kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu dalam RPJMD tahun 2021-2026, diawali pada tahun 2022 dengan pemulihan ekonomi setelah terdampak Covid-19. Kemudian pada tahun 2023, diharapkan sudah terciptanya *herd immunity* dari pandemi Covid-19 dan ekonomi Bengkulu yang sudah tumbuh positif sehingga Bengkulu akan memantapkan perekonomian yang berkelanjutan dengan fokus pemerataan infrastruktur dasar dan strategis menuju perwujudan Bengkulu Maju. Pada tahun 2024, pemantapan Bengkulu Maju, menuju Bengkulu Sejahtera dengan pemerataan ekonomi dan peningkatan *human capital* dan *human*

resources sehingga mampu menciptakan SDM yang unggul berdaya saing. Pada tahun 2025, diharapkan Bengkulu sudah Maju dan sudah Sejahtera, menuju Bengkulu Hebat. Bengkulu Hebat dimana Bengkulu memu memiliki keunggulan komparatif dan kompetetif dan mampu bersaing dengan provinsi lain di Indonesia dan Sumatera. Pada tahun 20206, diakhir periode RPJMD, Bengkulu diharapkan telah Maju, Sejahtera dan Hebat dengan ekonomi yang tumbuh stabil dan SDM yang berdaya saing, serta unggul.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 6.8
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026



1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022

Tahun 2022 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Bengkulu lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk "Pemulihan ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi, pemenuhan dan pemerataan infrastruktur dasar dan srategis", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

a. Pemulihan ekonomi daerah;

b. Penanganan kemiskinan;

c. Penyediaan akses dan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat;

d. Pengurangan Pengganggguran melalui penyediaan akses lapangan pekerjaan dan peningkatan kapasitas SDM;

e. Pembangunan Infrastruktur Strategis Daerah;

f. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berorientasi perwujudan ketahanan pangan;

g. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, baik, dan bersih;

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan pada "Perwujudan Bengkulu Maju melalui Pemantapan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dengan peningkatan pemerataan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastruktur srategis", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

a. Percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;

b. Percepatan Penanggulangan kemiskinan;

c. Penyediaan akses dan Pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat

d. Percepatan Pengurangan Pengganggguran melalui penyediaan akses lapangan pekerjaan dan kapasitas SDM

e. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Startegis Daerah dalam rangka peningkatan Konektivitas Daerah

f. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berorientasi pada penguatan ketahanan pangan dan industri hilirisasi

g. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, baik, dan bersih.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan pada "Pemantapan Bengkulu Maju menuju Bengkulu Sejahtera melalui Pemerataan dan Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dengan didorong oleh pembangunan SDM yang berdaya saing", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

a. Percepatan Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan daerah dan Pemerataan Pembangun Ekonomi;

b. Penguatan Percepatan Penanggulangan kemiskinan;

c. Peningkatan Penyediaan akses dan Pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat;

d. Peningkatan Percepatan Pengurangan Pengganggguran melalui penyediaan akses lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing SDM;

e. Peningkatan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Startegis Daerah dalam rangka peningkatan Konektivitas Daerah;

f. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berorientasi pada penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kapasitas industri hilirisasi;

g. Peningkatan dan Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, baik, dan bersih.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan pada "Pemantapan Bengkulu Maju dan Sejahtera, menuju Bengkulu Hebat melalui Percepatan Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan dengan didorong oleh pembangunan SDM yang berdaya saing, dan penciptaan iklim bermasyarakat dan iklim usaha yang kondusif", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

a. Penguatan Pertumbuhan ekonomi daerah;

b. Percepatan Penanggulangan kemiskinan;

c. Percepatan Peningkatan Penyediaan dan pemerataan akses infrastruktur dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat

d. Peningkatan Percepatan Pengurangan Pengganggguran melalui penyediaan akses lapangan pekerjaan dan peningkatan daya saing SDM

e. Peningkatan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Startegis Daerah dalam rangka peningkatan Konektivitas Daerah

f. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berorientasi pada industri hilirisasi dan penyediaan energi terbarukan

g. Peningkatan dan Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, baik, dan bersih.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan pada "Perwujudan Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat melalui Stabilitas Ekonomi dan

Penguatan Kapasitas SDM yang Berdaya Saing", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

a. Pemantapan Stabilitas ekonomi daerah;
b. Pemantapan Penanggulangan kemiskinan;
c. Ketercukupan akses dan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
d. Pemantapan Daya Saing SDM
e. Ketercukupan Prasaranan Infrastruktur dalam Pemenuhan Konektivitas Daerah;
f. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan berorientasi pada penguatan industri hilirisasi dan penyediaan energi terbarukan
g. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, baik, dan bersih.

6.3. Program Pembangunan Tahun 2021-2026

Program pembangunan daerah berdasarkan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disertai pagu indikatif, dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 6.3
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	MISI 1 : MEMBANGUN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA DAN BERKEADILAN UNTUK MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF																	
	Tujuan 1.1 MENINGKATNYA PEREKONOMIAN DAERAH	**PERTUMBUHAN EKONOMI**	**Persen**	**-0,02**		**4,9 - 5,2**		**5,05 - 5,35**		**5,2 - 5,5**		**5,35 - 5,65**		**5,5 - 5,8**		**5,5 - 5,8**		
	Sasaran 1.1.1 MENINGKATNYA NILAI REALISASI INVESTASI	**Nilai realisasi Investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)**	**Trilyun**	**8,1**	**7,4 T**	**8,66 T**		**8,92 T**		**9,18 T**		**9,46 T**		**9,74 T**		**9,74 T**		**DPMPTSP**
	Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Cakupan deregulasi investasi	Persen	100	100	100	100.000.000	100	198.300.000	100	240.603.500	100	100.000.000	100	100.000.000	100	1.098.300.000	DPMPTSP
	Program : Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Investor	Investor	20	20	25	100.000.000	25	300.000.000	25	350.000.000	25	500.000.000	25	450.000.000	125	1.700.000.000	DPMPTSP
	Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang dilakukan pengendalian	Persen	100%	100%	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000,00	1	550.000.000,00	DPMPTSP
	Program : Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan informasi penanaman modal	Persentase	100	100	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	450.000.000	DPMPTSP
	Sasaran 1.1.2 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI DAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	**PERSENTASE PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI DAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB**	**Persen**	**-6,32**	**10**	**10**		**10,4**		**10,8**		**11,2**		**11,6**		**54**		Perindag
	MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP	**Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian Terhadap PDRB**	**Persen**	**-3,88**	**2**	**3**		**3,2**		**3,4**		**3,6**		**3,8**		**17**		Perindag
	MENINGKATNYA NILAI PRODUKSI INDUSTRI BESAR	**- Nilai Produksi Industri Besar**	**Rupiah (Milyar)**	**10.900**	**11.000,00**	**11000**		**11500**		**11700**		**12200**		**12500**		**58900**		**Perindag**
		- Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	**Rupiah (Milyar)**	**120,00**	**100,00**	**150**		**200**		**250**		**300**		**350**		**1250**		**Perindag**
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	- Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar	Persen	4,76	4,56	6,8	1.000.000.000	10,2	1.050.000.000	11.1	1.050.000.000	16,6	1.050.000.000	22,8	1.000.000.000,00	22,8	5.150.000.000	**Perindag**
		- Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Persen	3,5	4	4		4,5		5		5,5		6		6		**Perindag**
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Nilai Realisasi Investasi Industri	Rupiah (Milyar)	25,90	42	63	50.000.000	105	100.000.000	126	100.000.000	210	100.000.000	336	100.000.000	336	450.000.000	Perindag
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Perusahaan industri Dalam Sinas	Persen	6,8	13	18	50.000.000	26	100.000.000	39	100.000.000	55	100.000.000	100	100.000.000	100	450.000.000	Perindag
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Pelayanan Perizinan USP Binaan Provinsi	Persen	40%	50%	0,8	150.000.000	0,8	150.000.000	0,8	150.000.000	0,85	150.000.000	0,85	150.000.000	0,85	750.000.000	UMKM
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Binaan Provinsi	Persen	1	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	1.000.000.000	UMKM
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi binaan Provinsi dan UMKM yang dididik dan dilatih	Persen	100%	100%	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	1.000.000.000	UMKM
	Program Pemberdayaan dan Perlidungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Persen	100%	100%	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	750.000.000	UMKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pendampingan dan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	0,10%	0,10%	0,10%	300.000.000	0,20%	400.000.000	0,50%	450.000.000	0,60%	500.000.000	0,60%	500.000.000	0,02	2.150.000.000	UMKM
	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu	Persen	10%	10%	0,1	700.000.000	0,15	800.000.000	0,15	950.000.000	0,2	1.100.000.000	0,25	1.300.000.000	0,85	4.850.000.000	UMKM
	Sasaran 1.1.3 MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	**Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**	**Persen**	**-2,44**	**8**	**7**		**7,2**		**7,4**		**7,6**		**7,8**		**37**		**Perindag**
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	10	10	20	100.000.000	20	100.000.000	25	125.000.000	30	100.000.000	35	120.000.000	35	545.000.000	Perindag
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Kestabilan Harga	Persen	5,9	5	4,5	175.000.000	4	205.000.000	4	225.000.000	3,5	285.000.000	3,6	275.000.000,00	4	1.165.000.000	Perindag
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penyelesaian Pereselisihan Antara Konsumen dan Produsen	Persen	35	40	42	50.000.000	44	100.000.000	46	100.000.000	48	100.000.000	50	100.000.000,00	50	450.000.000	Perindag
		Indeks Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang	Persen	N/A	N/A	80		85		87		90		95		95		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Tujuan 1.2 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur	**Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur wilayah**	**Persen**	**69,95**		**72**		**74**		**76**		**78**		**80**		**80**		
	Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Stategis	**Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur Stretegis**	**Persen**	**65,31**		**67**		**69**		**71**		**73**		**75**		**75**		
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan	%	72,75	72,75	73	442.500.000	75	700.000.000	77	840.000.000	80	1.030.000.000	82	1.260.000.000	82	4.272.500.000	Dishub
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana terminal	%	0	0			5		6		8		10		10		
		Persentase pemenuhan dokumen transportasi darat	%	66,67	66,67	66,67	-	83,33	225.000.000	83,33	-	83,33	30.000.000	83,33	-	83,33	255.000.000	Dishub
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelabuhan regional	%	55	70	70	-	70	45.000.000	70	60.000.000	70	60.000.000	70	45.000.000	70	210.000.000	Dishub
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan	%	50	70	80	-	80	25.000.000	80		80		80	25.000.000	80	50.000.000	Dishub
		Persentase pemenuhan dokumen transportasi pelayaran	%	60	60	60	60.500.000	60	85.500.000	60	100.000.000	60	130.000.000	60	100.000.000	60	476.000.000	Dishub
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase pemenuhan dokumen transportasi Perkeretaapian	%	100	100	100	27.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	227.000.000	Dishub
	Program Penyelenggaran Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik	Persen	66,31	67,28	68,5	48.350.000.000	70,1	88.000.000.000	72,0	88.000.000.000	74,6	75.000.000.000	76,9	75.000.000.000	76,9	374.350.000.000	PUPR
		Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Sedang	Persen	9,64	9,64	9,6		9,6		9,6		9,6		9,6		9,6		PUPR
		Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Ringan	Persen	6,82	6,82	6,8		6,4		6,0		4,8		3,4		3,4		
		Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Berat	Persen	17,22	16,23	15,0		13,8		12,2		10,7		9,7		9,7		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan	Persen	43,93	43,28	42,82	3.965.000.000	42,32	5.000.000.000	40,82	6.000.000.000	39,32	7.000.000.000	38,32	8.000.000.000	38,32	30.000.000.000	PUPR
	Sasaran 1.2.2 : Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Persentase ketercapaian pemenuhan infrastruktur dasar	Persen	73,44		75		77		79		81		83		83		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan lintas Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	0	910.000.000	0	25.000.000.000	0	25.000.000.000	100%	25.100.000.000	100%	25.100.000.000	100%	101.110.000.000	PUPR
	Program Pengembangan Permukiman	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan Kabupaten/Kota	Persen	21,18	21,18	23,5	-	25,81	150.000.000	28	150.000.000	30	150.000.000	33	150.000.000	33	1.000.000.000	PUPR
	Program Pengembangan Permukiman	Presentase rumah tangga yang terakses MCK	Persen	78,1	78,1	78,69	-	80,85	150.000.000	85	150.000.000	89,15	150.000.000	93,3	150000000	93,3	600.000.000	PUPR
		Presentase rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan air limbah (IPAL) komunal	Persen	9	11	14		16,5		19		21		24		24	-	DPKPP
		Presentase rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persen	24,21	24,21	26,41		27,16		27,35		27,35		27,54		27,3	-	DPKKP
	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penanganan Kecamatan yang dibangun PSU	%	18,75	3,91	1,6	50.000.000	3,3	600.000.000	5,1	880.000.000	5,4	1.440.000.000	6,7	800.000.000	22,2	3.770.000.000	DPKKP
	Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah Badan Usaha yang patuh terhadap aspek Perizinaan dan Keselamatan Ketenagalistrikan	badan usaha	235	-	245	50.000.000	255	50.000.000	265	50.000.000	275	90.000.000	285	100.000.000	285	340.000.000	ESDM
	Tujuan 1.3 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN	**INDEKS GINI**	**Poin**	**0,334**		**0,332**		**0,33**		**0,328**		**0,326**		**0,324**		**0,324**		
	Sasaran 1.3.1 : MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN	**ANGKA KEMISKINAN**	**Persen**	**15,3**		**14,5 - 14,9**		**14 - 14,5**		**13,5 - 14**		**13 - 13,5**		**12,5 - 12**		**12,5 - 12**		
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Pelayanan Perizinan USP Binaan Provinsi	Persen	40%	50%	0,8	150.000.000	0,8	150.000.000	0,8	150.000.000	0,85	150.000.000	0,85	150.000.000	0,85	750.000.000	UMKM
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Binaan Provinsi	Persen	1	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	1.000.000.000	UMKM
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi binaan Provinsi dan UMKM yang dididik dan dilatih	Persen	100%	100%	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	1.000.000.000	UMKM
	Program Pemberdayaan dan Perlidungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Persen	100%	100%	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	750.000.000	UMKM

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pendampingan dan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persen	0,10%	0,10%	0,10%	300.000.000	0,20%	400.000.000	0,50%	450.000.000	0,60%	500.000.000	0,60%	500.000.000	0,02	2.150.000.000	UMKM
	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu	Persen	10%	10%	0,1	700.000.000	0,15	800.000.000	0,15	950.000.000	0,2	1.100.000.000	0,25	1.300.000.000	0,85	4.850.000.000	UMKM
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	- Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar	Persen	4,76	4,56	6,8	1.000.000.000	10,2	1.050.000.000	11.1	1.050.000.000	16,6	1.050.000.000	22,8	1.000.000.000,00	22,8	5.150.000.000	Perindag
		- Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Persen	3,5	4	4		4,5		5		5,5		6		6		
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Nilai Realisasi Investasi Industri	Rupiah (Milyar)	25,90	42	63	50.000.000	105	100.000.000	126	100.000.000	210	100.000.000	336	100.000.000	336	450.000.000	Perindag
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Perusahaan industri Dalam Sinas	Persen	6,8	13	18	50.000.000	26	100.000.000	39	100.000.000	55	100.000.000	100	100.000.000	100	450.000.000	Perindag
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Petani yang mendapatkan alokasi Pupuk bersubsidi	Persen	47,20	49,56	52,0	6.092.000.000	52,6	3.250.000.000	53,1	3.400.000.000	53,6	2.750.000.000	54,1	3.550.000.000	54,1	19.042.000.000	DTPHP
		Persentase pemenuhan kebutuhan Alsintan	Persen	9,24	10,90	11,9		16,1		18,1		34,7		51,3		51,3		TPHP
		Persentase kelompok tani yang menggunakan bibit unggul (Padi, Jagung, Bawang, Cabai, Jeruk, Kopi, Kelapa Sawit dan Karet)	Persen	30,40	30,40	47,1		51,3		51,3		51,3		51,3		51,3		TPHP
		Persentase Luas Tanaman Bawang, Cabai dan Jeruk yang direhabilitasi/intensifikasi/ekstensifikasi	Persen	6,77	6,77	10		12		15		20		25		25		TPHP
		Persentase Luas Tanaman Kopi, Kelapa Sawit, dan Karet yang direhabilitasi/intensifikasi/ekstensifikasi	Persen	3,74	4,00	4		5		7		10		11		11		TPHP
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman Padi	Nilai	1,27	1,27	1,3	8.038.509.200	1,31	2.100.000.000	1,33	2.100.000.000	1,35	2.100.000.000	1,37	2.100.000.000	1,37	16.438.509.200	TPHP
		Total luas Areal rehabilitasi/intensifikasi/ekstensifikasi Tanaman Kopi, Kelapa Sawit, dan Karet	Persen	3,74	4	9		10		10		10		11		50		TPHP
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan sawah yang memiliki asuransi	Persen	-	-	0		5	150.000.000	7	165.000.000	8	175.000.000	10	180.000.000		670.000.000	TPHP
		Persentase kerusakan Puso Tanaman Padi dan Jagung Karena OPT	Persen	-	-	0		2		2		2		2				TPHP
		Persentase kerusakan Puso Tanaman Bawang, Cabai dan Jeruk Karena OPT	Persen	-	-	0		2		2		2		2				TPHP
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Skor Kelompok Tani Tanaman Pangan	Persen	n/a	n/a	2,5	1.027.000.000	2,5	400.000.000	2,5	400.000.000	2,5	400.000.000	2,5	400.000.000		2.627.000.000	TPHP
		Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani Tanaman Pangan	Persen	n/a	n/a	10		10		10		10		10				TPHP
		Persentase Peningkatan Skor Kelompok Tani Hortikultura	Persen	n/a	n/a	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5				TPHP
		Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani Hortikultura	Persen	n/a	n/a	10		10		10		10		10				TPHP
		Persentase Peningkatan Skor Kelompok Tani Perkebunan	Persen	n/a	n/a	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5				TPHP
		Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani Perkebunan	Persen	n/a	n/a	10		10		10		10		10				
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	NA	NA	25	113.000.000	25	200.000.000	25	220.000.000	25	220.000.000	25	220.000.000	25	860.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PEROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat Tangkap	%	10	20	25	3.700.000.000	30	2.995.000.000	35	1.950.000.000	40	2.020.000.000	45	2.060.000.000	45	12.725.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Pemilik Kapal yang belum Mempunyai Izin Usaha Perikanan Tangkap	%	20	23	25		28		30		32		35		35		
		Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan Ikan Sesuai Standar	%	80,37	81,97	83,6		85,27		86,97		88,7		89,37		86,37		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan yang di Tingkatkan Keterampilannya	%	5	5	10		15		20		25		30		30		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin	%	20	25	30	1.363.000.000	35	460.000.000	40	565.000.000	45	525.000.000	45	525.000.000	220	3.438.000.000	
		Persentase Pembudidaya Ikan yang Menggunakan Pakan dan Bibit Ikan Unggul	%	9,4	10,7	10,9		11,3		13,5		25		30		101,4		
		Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya	%	17,14	18,29	18,29		19,2		19,5		20		20		115,28		
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Biota Laut yang Telah dilakukan Upaya Pelestarian	%	50	52,45	52,69	150.000.000	53,69	100.000.000	54,69	180.000.000	55,69	180.000.000	56,69	210.000.000	56,69	1.601.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Luas Vegetasi Pantai yang di Konservasi	%	9,35	14,02	20,5		22,7		24,5		26,2		26,5		31,5		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM yang memperoleh bantuan sosial	%	69,5	69,5	70,2	1.159.000.000	70,9	1.484.000.000	71,2	1.484.000.000	71,7	1.784.000.000	72,2	1.784.000.000,00	72,2	7.695.000.000	Dinas sosial
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pesentase kejadian Bencanan alam dan Sosial yang tertanggulangi	%	N/a	100	100	95.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000,00	100	455.000.000	
	Sasaran 1.3.2 MENURUNNYA	**ANGKA PENGANGGURAN**	**Persen**	**4,07**		**3,6 - 3,8**		**3,5 - 3,6**		**3,4 - 3,5**		**3,3 - 3,4**		**3,2 - 3,3**		**3,2 - 3,3**		
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga kerja yang disusun	Persentase	40,00%	50,00%	50,00%	20.000.000	60,00%	125.000.000	70,00%	150.000.000	80,00%	175.000.000	90,00%	200.000.000	90,00%	670.000.000	Disnaker
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	Persentase	84,00%	89,40%	90,65%	3.161.998.000	90,75%	750.000.000	90,85%	800.000.000	91,00%	750.000.000	91,20%	750.000.000	91,20%	6.211.998.000	
		Persentase Pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase	50,00%	50,20%	55,20		59,97		62,20		68,00		70,00		72,00%		Disnaker
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja yang di tempatkan	Persentase	50,00%	60,00%	61,20%	253.000.000	65,09%	440.000.000	66,10%	385.000.000	68,10%	415.000.000	70,50%	385.000.000	70,50%	1.878.000.000	Disnaker
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase	100%	100%	100%	290.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	255.000.000	100	277.000.000	100	1.342.000.000	Disnaker
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan Taat NSPK	Persentase	58,80%	58,84%	65,25%	187.500.000	70,00%	125.000.000	80,00%	150.000.000	90,00%	175.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	837.500.000	Disnaker

TABEL 6.3
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religius																	
	Tujuan 1.1 Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**		**-0,02**		**4,9 - 5,2**		**5,05 - 5,35**		**5,2 - 5,5**		**5,35 - 5,65**		**5,5 - 5,8**		**5,5 - 5,8**		
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	**Persentase Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pariwisata; sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB**		**-0,77**		**4,8**		**5**		**5,2**		**5**		**5,6**		**6**		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Petani yang mendapatkan alokasi Pupuk bersubsidi	Persen	47,20	49,56	52,0	6.092.000.000	52,6	3.250.000.000	53,1	3.400.000.000	53,6	2.750.000.000	54,1	3.550.000.000	54,1	19.042.000.000	DTPHP
		Persentase pemenuhan kebutuhan Alsintan	Persen	9,24	10,90	11,9		16,1		18,1		34,7		51,3		51,3		
		Persentase kelompok tani yang menggunakan bibit unggul (Padi, Jagung, Bawang, Cabai, Jeruk, Kopi, Kelapa Sawit dan Karet)	Persen	30,40	30,40	47,1		51,3		51,3		51,3		51,3		51,3		
		Persentase Luas Tanaman Bawang, Cabai dan Jeruk yang direhabilitasi/intensifikasi /ekstensifikasi	Persen	6,77	6,77	10		12		15		20		25		25		
		Persentase Luas Tanaman Kopi, Kelapa Sawit, dan Karet yang direhabilitasi/intensifikasi /ekstensifikasi	Persen	3,74	4,00	4		5		7		10		11		11		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman Padi	Nilai	1,27	1,27	1,3	8.038.509.200	1,31	2.100.000.000	1,33	2.100.000.000	1,35	2.100.000.000	1,37	2.100.000.000	1,37	16.438.509.200	DTPHP
		Total luas Areal rehabilitasi/intensifikasi/ekstensifikasi Tanaman Kopi, Kelapa Sawit, dan Karet	Persen	3,74	4	9		10		10		10		11		50		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas lahan sawah yang memiliki asuransi	Persen	-	-	0		5	150.000.000	7	165.000.000	8	175.000.000	10	180.000.000		670.000.000	
		Persentase kerusakan Puso Tanaman Padi dan Jagung Karena OPT	Persen	-	-	0		2		2		2		2				DTPHP
		Persentase kerusakan Puso Tanaman Bawang, Cabai dan Jeruk Karena OPT	Persen	-	-	0		2		2		2		2				
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Skor Kelompok Tani Tanaman Pangan	Persen	n/a	n/a	2,5	1.027.000.000	2,5	400.000.000	2,5	400.000.000	2,5	400.000.000	2,5	400.000.000,00		2627000000	
		Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani Tanaman Pangan	Persen	n/a	n/a	10		10		10		10		10				
		Persentase Peningkatan Skor Kelompok Tani Hortikultura	Persen	n/a	n/a	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5				DTPHP
		Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani Hortikultura	Persen	n/a	n/a	10		10		10		10		10				
		Persentase Peningkatan Skor Kelompok Tani Perkebunan	Persen	n/a	n/a	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5				
		Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani Perkebunan	Persen	n/a	n/a	10		10		10		10		10				
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	NA	NA	25	113.000.000	25	200.000.000	25	220.000.000	25	220.000.000	25	220.000.000	25	860.000.000	
	PEROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat Tangkap	%	10	20	25	3.700.000.000	30	2.995.000.000	35	1.950.000.000	40	2.020.000.000	45	2.060.000.000	45	12.725.000.000	
		Persentase Pemilik Kapal yang belum Mempunyai Izin Usaha Perikanan Tangkap	%	20	23	25		28		30		32		35		35		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan Ikan Sesuai Standar	%	80,37	81,97	83,6		85,27		86,97		88,7		89,37		86,37		DKP
		Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan yang di Tingkatkan Keterampilannya	%	5	5	10		15		20		25		30		30		DKP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin	%	20	25	30	1.363.000.000	35	460.000.000	40	565.000.000	45	525.000.000	45	525.000.000	220	3.438.000.000	DKP
		Persentase Pembudidaya Ikan yang Menggunakan Pakan dan Bibit Ikan Unggul	%	9,4	10,7	10,9		11,3		13,5		25		30		101,4		
		Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya	%	17,14	18,29	18,29		19,2		19,5		20		20		115,28		
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Biota Laut yang Telah dilakukan Upaya Pelestarian	%	50	52,45	52,69	150.000.000	53,69	100.000.000	54,69	180.000.000	55,69	180.000.000	56,69	210.000.000	56,69	1.601.000.000	
		Luas Vegetasi Pantai yang di Konservasi	%	9,35	14,02	20,5		22,7		24,5		26,2		26,5		31,5		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	0,16	0,18	18%	#######	20	#######	20	#######	22	#########	25	#######	1	6860000000	8.000.000.000	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Media Promosi Wisata,	0,25	0,27	30%	#######	35	#######	40	#######	43	#########	45	#######	0	16116091400	13.000.000.000	
		Persentase Peningkatan Frekuensi Promosi Wisata	0,23	0,25	25%		30		33		36		40		0			
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan HAKI yang dikembangkan	0,15	0,18	20%	#######	20	#######	30	#######	35	0	40	#######	0	695000000	750.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	27,5%	0,23	25%	#######	30	#######	35	#######	50	810.000.000	60	#######	1	3290000000	3.500.000.000	
	Program : Pengelolaan Mineral dan Barubara	Jumlah produksi mineral logam dan batubara	Ton	2500000	2700000	######	75.000.000	######	100.000.000	######	100.000.000	3.300.000	100.000.000	######	100.000.000	15.900.000	475.000.000	ESDM
		Jumlah produksi mineral bukan logam dan batuan	M3	469136	475000	500000	50.000.000	525000	50.000.000	550000	80.000.000	575000	50.000.000	600000	50.000.000	2.750.000	280.000.000	ESDM
		Jumlah perusahaan Pertambangan yang menerapkan Good Mining Practice	IUP	13	13	13		13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	400.000.000	ESDM
		Persentase Peningkatan Nilai Dana Bagi Hasil	%	1,5	1,8	2		2,5	50.000.000	3	50.000.000	3,5	50.000.000	4	50.000.000	4	200.000.000	ESDM
	Program : Penunjang Urusan PD Provinsi (UPTD PPL)	Persentase proses Akreditasi laboratorium analisa batubara	%	-	-	25%	150.000.000	75%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	1	950.000.000	ESDM
	Program : Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase kepatuhan terhadap regulasi perizinan air tanah	%	10	10	10	100.000.000	20	175.000.000	40	165.000.000	60,00	175.000.000	80,00	290.000.000	80	905.000.000	ESDM
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentasi peningkatan volume Produksi hasil hutan	%	10	10	10	1.564.000.000	10	1.330.000.000	10	1.480.000.000	10	1.540.000.000	10	1.515.000.000	10	7.429.000.000	DLHK
	Tujuan 1.2 Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	**Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		**-0,02**		**4,9 - 5,2**		**5,05 - 5,35**		**5,2 - 5,5**		**5,35 - 5,65**		**5,5 - 5,8**		**5,5 - 5,8**		**DLHK**
	Sasaran 1.2.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**Indeks kualitas lingkungan hidup**		**70**		**71**		**72**		**73**		**74**		**75**		**75**		**DLHK**
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Kawasan Deforestasi	ha	278046,8	278046,8	276089	1.116.482.000	274.130	97.500.000	272.172	155.000.000	270.214	190.000.000	268.256	190.000.000	268.256	1.748.982.000	DLHK
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Lingkungan hidup	dok	1	1	1	166.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	7	466.000.000	DLHK
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah industri dan domestik yang tertangani	%	74	74	75	27.500.000	77	100.000.000	79	100.000.000	81	100.000.000	83	100.000.000	395	427.500.000	DLHK
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi	dok	15	15	15	62.000.000	27	175.000.000	28	175.000.000	28	175.000.000	28	225.000.000	126	812.000.000	DLHK

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah MHA yang dibina	kelompok	2	2	2	13.000.000	2	35.000.000	2	45.000.000	2	55.000.000	2	65.000.000	10	225.000.000	DLHK
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	dok	0	0	1	22.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	5	472.000.000	DLHK
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani	laporan	6	6	6	27.500.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	30	227.500.000	DLHK
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah rumah tangga	%	N/A	24	26	90.000.000	27	90.000.000	28	90.000.000	30	110.000.000	31	110.000.000	142	490.000.000	DLHK
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah usaha d	%	0,95	0,95	0,95	1.405.000.000	1	340.000.000	1	415.000.000	1	415.000.000	1	415.000.000	1	2.990.000.000	DLHK

TABEL 6.3
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	MISI 3 : MEMPERKUAT KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFEKTIF DAN PROFESIONAL SERTA TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK																	
	Tujuan 3.1 MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	**PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**	**Huruf**	**B**		**B**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
	Sasaran 3.1.1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	**NILAI SAKIP DAERAH**	**Huruf**	**B**		**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase OPD yang menyusun dokumen Renstra, PK, IKU, Rencana Aksi	%	100	100	100	175.000.000	100	225.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	100	375.000.000	100	1.450.000.000	BAPPEDA
		Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Renstra, PK dan IKU yang berorientasi hasil	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase indikator kinerja program dalam Renstra dan PK yang berorientasi hasil	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang berorientasi hasil	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase indikator kinerja program dalam RPJMD yang berorientasi hasil	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	1.961.300.000	100	2.111.300.000	100	3.050.000.000	100	3.525.000.000	100	3.712.500.000	100	14.360.100.000	BAPPEDA
		Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Renja yang berorientasi hasil	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase indikator kinerja program dalam Renja yang berorientasi hasil	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase indikator kinerja program yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran dan tujuan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis TI	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase OPD yang menyusun dokumen Renja dan Laporan Evaluasi kinerja Triwulanan	%	100	100	100	120.000.000	100	130.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	187.500.000	100	762.500.000	BAPPEDA
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	%	100	100	100	2.625.000.000	100	2.825.000.000	100	4.050.000.000	100	4.700.000.000	100	4.935.000.000	100	19.135.000.000	BAPPEDA
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	%	100	100	100	1.275.000.000,00	100	1.353.135.400,00	100	1.800.000.000,00	100	2.000.000.000	100	2.100.000.000,00	100	8.528.135.400,00	Biro Organisasi
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase dokumen perencanaan, penganggara, pelaporan dan evaluasi yang disusun	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang dilakukan pemeriksaan, reviu, monitoring, dan evaluasi	%	0,6	1	1	1.875.000.000	1	2.150.000.000	1	2.445.000.000	1	2.732.450.000	1	2.946.700.000	74%	12.149.150.000	INSPEKTORAT
		Persentase pengaduan masyarakat/laporan/ limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan pemeriksaan	%	0,7	1	1		1		1		1		1		84%		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	**Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**	-	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Daerah yang diamankan	Unit	1954	1954	1954	4.495.349.300	1954	4.675.000.000	1954	4.075.000.000	1954	2.924.999.700	1954	2.974.999.800	1954	19.145.348.800	BPKD
		Jumlah BMD yang ditertibkan	Unit	204	204	204		204		204		204		204		204		
		Jumlah Aset Daerah yang dimanfaatkan	Unit	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu, Peresentase Perangkat Daerah Yang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai SAP, Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang ditetapkan Tepat Waktu	%	100	100	100	516.664.872.916	100	390.569.022.819	100	410.904.221.705	100	432.750.783.833	100	455.569.684.347	100	2.206.458.585.620	BPKD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang dilakukan pemeriksaan, reviu, monitoring, dan evaluasi	%	0,6	1	1	1.875.000.000	1	2.150.000.000	1	2.445.000.000	1	2.732.450.000	1	2.946.700.000	74%	12.149.150.000	INSPEKTORAT
		Persentase pengaduan masyarakat/laporan/ limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan pemeriksaan	%	0,7	1	1		1		1		1		1		84%		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	**Indeks profesionalitas ASN**	**Nilai**	**71,92**	**73**	**67**		**68**		**69**		**70**		**71**		**71**		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	%	75,00	87,1	87,16	183.000.000	87,18	128.000.000	87,22	211.000.000	87,27	225.000.000	87,31	228.000.000	87,3	975.000.000	BKD
		Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Standar Kompetensi	%	75,00	87,1	87,2	145.000.000	87,3	135.000.000	88,3	151.000.000	88,4	215.000.000	88,5	217.000.000	88,5	863.000.000	BKD
		Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	%	75,00	87,10	87,16	156.000.000	87,18	142.000.000	87,22	160.000.000	87,27	202.000.000	87,31	207.000.000	87,31	867.000.000	BKD
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Lembaga Yang Memenuhi Akreditasi A	%	75,00	75,00	75,00	9.282.248.000	100	9.952.248.000	100	11.367.248.000	100	10.817.248.000	100	11.717.248.000	100	53.136.240.000	BPSDM
		Persentase Program Kediklatan yang Memenuhi Akreditasi A	%	75,00	75,00	75,00		100		100		100		100		100		BPSDM
	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	**NILAI INDEKS E- GOVERNMENT (SPBE)**	**Poin**	**2,9**		**3**		**3,1**		**3,2**		**3,3**		**3,4**		**3,4**		
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase ketersediaan infrastruktur TIK.	Persen	60 Persen	50 Persen	50 Persen	9.503.500.000	55 Persen	2.801.500.000	58 Persen	3.397.750.600	60 Persen	3.572.750.600	65 Persen	3.577.750.600	65 Persen	22.853.251.800	Diskominfo
		Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi	Persen	60 Persen	50 Persen	50 Persen		55 Persen		58 Persen		60 Persen		65 Persen		65 Persen		
	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	**NILAI PELAYANAN PUBLIK/PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH DENGAN TINGKAT KEPATUHAN PELAYAN PUBLIK KATEGORI BAIK**	**Huruf**	**B**		**B**		**B**		**A-**		**A-**		**A-**		**A-**		
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indek Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan penanaman modal	Indek	89,58	90	91	200.000.000,00	92	250.000.000,00	93	250.000.000,00	94	250.000.000,00	95	424.500.000,00	95	1.374.500.000,000	DPMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai PAD	Rupiah	712.345.548.602	764.361.351.685	796.543.162.100	6.210.000.000,00	847.826.156.751	7.810.000.000,00	894.258.289.287	7.700.000.000,00	945.031.010.438	7.550.000.000,00	978.013.330.079	7.550.000.000,00	4.461.671.948.656	36.820.000.000,000	BPKD

TABEL 6.3
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	MISI 4: MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA MENJADI BERKUALITAS, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA SERTA TOLERAN DAN RELIGIUS																	
	Tujuan 4.1 MENINGKATNYA KUALITAS SDM	**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)**	**Poin**	**71,40**		**71,6**		**71,7**		**71,8**		**71,9**		**72**		**72**		
	Sasaran 4.1.1 MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN	**ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH**	**Tahun**	**13,61**		**13,63**		**13,64**		**13,65**		**13,66**		**13,67**		**13,67**		
		ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH	**Tahun**	**8,84**		**9**		**9,1**		**9,2**		**9,3**		**9,4**		**9,4**		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase SMA Terakreditasi	Persen	93%	95%	96%	153.241.129.278	97%	159.541.129.278	98%	164.341.129.278	99%	164.341.129.278	100%	164.341.129.278	100%	659.555.646.390	DIKBUD
		Persentase SMK Terakreditasi	Persen	88,00%	88,33%	89,00%		90,00%		91,00%		92,00%		93,00%		93,00%		
		Persentase SLB Terakreditasi	Persen	93%	94%	95%		96%		97%		98%		99%				
		Rasio Guru Terhadap siswa Pendidikan Menengah	Persen	na	1 : 12	1 : 13		1 : 14		1 : 15		1 : 16		1 : 17		1 : 17		
		Persentase Guru SMA Bersertifikasi	Persen	49,00%	49,50%	50%		51%		52%		53%		54%		54%		
		Rasio Guru Terhadap siswa Pendidikan Menengah	Rasio	na	1 : 12	1 : 13		1 : 14		1 : 15		1 : 16		1 : 17		1 : 17		
		Persentase Guru SMK Bersertifikasi	Persen	41%	41%	42%		43%		44%		45%		46%		46%		
		Persentase Siswa SLTA yang Putus Sekolah	Persen	0,52%	0,49%	0,47		0,44%		0,42		0,39%		0,37%		0,37%		
		Rasio Ketersedian Ruang Kelas SLTA terhadap rombongan Belajar	Rasio	1 : 1	1 : 1	1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		
		Persentase SLTA dalam Kondisi Bangunan Baik	Persen	87%	87,28%	87,62%		87,96%		88,30%		88,64%		88,98%		88,98%		
		Rasio Ketersedian Sekolah Terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	1 : 696	1 : 696	1 : 694		1 : 692		1 : 691		1 : 688		1 : 685		1 : 685		
	Tujuan 4.1 MENINGKATNYA KUALITAS SDM	**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)**	**Poin**	**71,40**		**71,6**		**71,7**		**71,8**		**71,9**		**72**		**72**		
	Sasaran 4.1.2 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	**ANGKA HARAPAN HIDUP**	**Tahun**	**69,35**		**69,5**		**69,65**		**69,8**		**69,95**		**70,1**		**70,1**		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan pada 10 kabupaten/kota	%	100	100	100	70.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	325.000.000	100	995.000.000	DINKES
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat layanan kesehatan	%	100	100	100	2.891.750.000	100	980.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	5.371.750.000	DINKES

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Persentase warga negara pada kondisi KLB yang mendapat layanan kesehatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
		Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	Angka	57,2	<49	<49		<49		<49		<49		<49		<49		
		Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk	Angka	0,05	<1	<1		<1		<1		<1		<1		<1		
		Angka Kesakitan TB per 100.000 penduduk	Angka	11	11,0	11,0		10,0		10,0		9,0		9,0		9,0		
		Persentase Penderita DM usia >15 tahun yang dideteksi	%	70	70	72		72,5		73		73,5		74		74,0		
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	92,9	94	94,1		94,5		95		95,5		95,5		95,5		
		Persentase Penderita Hypertensi usia >18 tahun yang dideteksi	%	12	15	20		25		30		35		40		40		
		Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Kesehatan	%	93,75	96,25	96,75	33.971.492.800	97,5	34.589.600.000	98,25	34.689.600.000	99,25	34.824.600.000	100	34.749.600.000	100	172.824.892.800	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif per 2254 UKBM	%	80	82	84	750.000.000	86	750.000.000	88	750.000.000	90	750.000.000	92	750.000.000	92	3.750.000.000	DINKES
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan tenaga kesehatan berkualitas	%	73,12	73,74	73,92	52.500.000	74,14	100.000.000	75	100.000.000	79	100.000.000	85	200.000.000	85	552.500.000	DINKES
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Ketersediaan obat esensial	%	100	100	100	-	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	400.000.000	DINKES
	Sasaran 4.1.3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	**Pengeluaran per Kapita**	**Juta**	**10,38**		**10,6**		**10,8**		**11**		**11,2**		**11,4**		**11,4**		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	Persentase Petani yang mendapatkan alokasi Pupuk bersubsidi	Persen	47,20	49,56	52,0	6.092.000.000	52,6	3.250.000.000	53,1	3.400.000.000	53,6	2.750.000.000	54,1	3.550.000.000	54,1	19.042.000.000	DTPHP
		Persentase pemenuhan kebutuhan Alsintan	Persen	9,24	10,90	11,9		16,1		18,1		34,7		51,3		51,3		TPHP
		Persentase kelompok tani yang menggunakan bibit unggul (Padi, Jagung, Bawang, Cabai, Jeruk, Kopi, Kelapa Sawit dan Karet)	Persen	30,40	30,40	47,1		51,3		51,3		51,3		51,3		51,3		TPHP
		Persentase Luas Tanaman Bawang, Cabai dan Jeruk yang direhabilitasi/intensifikasi/ekstensifikasi	Persen	6,77	6,77	10		12		15		20		25		25		TPHP
		Persentase Luas Tanaman Kopi, Kelapa Sawit, dan Karet yang direhabilitasi/intensifikasi/ekstensifikasi	Persen	3,74	4,00	4		5		7		10		11		11		TPHP
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Indeks Pertanaman Padi	Nilai	1,27	1,27	1,3	8.038.509.200	1,31	2.100.000.000	1,33	2.100.000.000	1,35	2.100.000.000	1,37	2.100.000.000	1,37	16.438.509.200	TPHP
		Total luas Areal rehabilitasi/intensifikasi/ekstensifikasi Tanaman Kopi, Kelapa Sawit, dan Karet	Persen	3,74	4	9		10		10		10		11		50		TPHP
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase luas lahan sawah yang memiliki asuransi	Persen	-	-	0		5	150.000.000	7	165.000.000	8	175.000.000	10	180.000.000		670.000.000	TPHP
		Persentase kerusakan Puso Tanaman Padi dan Jagung Karena OPT	Persen	-	-	0		2		2		2		2				TPHP
		Persentase kerusakan Puso Tanaman Bawang, Cabai dan Jeruk Karena OPT	Persen	-	-	0		2		2		2		2				TPHP
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Skor Kelompok Tani Tanaman Pangan	Persen	n/a	n/a	2,5	1.027.000.000	2,5	400.000.000	2,5	400.000.000	2,5	400.000.000	2,5	400.000.000		2.627.000.000	TPHP
		Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani Tanaman Pangan	Persen	n/a	n/a	10		10		10		10		10				TPHP
		Persentase Peningkatan Skor Kelompok Tani Hortikultura	Persen	n/a	n/a	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5				TPHP

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
		Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani Hortikultura	Persen	n/a	n/a	10		10		10		10		10				TPHP
		Persentase Peningkatan Skor Kelompok Tani Perkebunan	Persen	n/a	n/a	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5				TPHP
		Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani Perkebunan	Persen	n/a	n/a	10		10		10		10		10				
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	NA	NA	25	113.000.000	25	200.000.000	25	220.000.000	25	220.000.000	25	220.000.000	25	860.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	PEROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat Tangkap	%	10	20	25	3.700.000.000	30	2.995.000.000	35	1.950.000.000	40	2.020.000.000	45	2.060.000.000	45	12.725.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Pemilik Kapal yang belum Mempunyai Izin Usaha Perikanan Tangkap	%	20	23	25		28		30		32		35		35		
		Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan Ikan Sesuai Standar	%	80,37	81,97	83,6		85,27		86,97		88,7		89,37		86,37		
		Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan yang di Tingkatkan Keterampilannya	%	5	5	10		15		20		25		30		30		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin	%	20	25	30	1.363.000.000	35	460.000.000	40	565.000.000	45	525.000.000	45	525.000.000	220	3.438.000.000	
		Persentase Pembudidaya Ikan yang Menggunakan Pakan dan Bibit Ikan Unggul	%	9,4	10,7	10,9		11,3		13,5		25		30		101,4		
		Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya	%	17,14	18,29	18,29		19,2		19,5		20		20		115,28		
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Biota Laut yang Telah dilakukan Upaya Pelestarian	%	50	52,45	52,69	150.000.000	53,69	100.000.000	54,69	180.000.000	55,69	180.000.000	56,69	210.000.000	56,69	1.601.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Luas Vegetasi Pantai yang di Konservasi	%	9,35	14,02	20,5		22,7		24,5		26,2		26,5		31,5		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM yang memperoleh bantuan sosial	%	69,5	69,5	70,2	1.159.000.000	70,9	1.484.000.000	71,2	1.484.000.000	71,7	1.784.000.000	72,2	1.784.000.000,00	72,2	7.695.000.000	Dinas sosial
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Sosial dalam panti	%	N/a	12,36	12,5	157.142.000	12,8	367.500.000	13	408.000.000	13,2	427.000.000	13,4	435.000.000	13,4	1.794.642.000	Dinas sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan layanan pendampingan	%	85	87	90	147.000.000	92,5	302.450.950	95	349.950.950	97,5	377.000.000	100	444.950.950	100	1.688.352.850	DP3APPKB
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan layanan pendampingan	kali	-	-	80	20.000.000	85	50.000.000	90	72.000.000	95	86.000.000	100	122.000.000	100	350.000.000	DP3APPKB

TABEL 6.3
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2000)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2021)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
	MISI 5 : MEMPERKUAT PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SECARA TERPADU																	
	Tujuan 5.1 MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	**INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER**	**Poin**	**71,21**		**71,35**		**71,4**		**71,45**		**71,5**		**71,55**		**71,55**		
		PERSENTASE PENURUNAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	**Persen**	**85**		**90**		**92,5**		**95**		**97,5**		**100**		**100**		
	Sasaran 5.1.1 MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	**INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER**	**Poin**	**71,21**		**71,35**		**71,4**		**71,45**		**71,5**		**71,55**		**71,55**		
		PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	**Persen**	**85**		**90**		**92,5**		**95**		**97,5**		**100**		**100**		
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik	%	14,02	30	71,35	22.000.000	71,40	113.000.000	71,45	127.000.000	71,5	152.000.000	71,55	180.000.000	71,55	594.000.000	DP3APPKB
		Persentase keterwakilan perempuan di bidang profesional	%	51,9	52	52,1		52,2		52,3		52,4		52,5		52,5		
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan	%	35,24	35,34	35,44		35,54		35,64		35,74		35,84		35,84		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan layanan pendampingan	%	85	87	90	147.000.000	92,5	302.450.950	95	349.950.950	97,5	377.000.000	100	444.950.950	100	1.688.352.850	DP3APPKB
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan layanan pendampingan	kali	-	-	80	20.000.000	85	50.000.000	90	72.000.000	95	86.000.000	100	122.000.000	100	350.000.000	DP3APPKB

PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2021

BAB VII
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

PROVINSI
BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan rumusan program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka review terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Proyeksi Kapsitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dan Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

NO	Uraian	Proyeksi Tahun Anggaran (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	3.000.610.979.347	3.059.326.672.271	3.135.817.160.717	3.250.422.010.610	3.371.624.114.874	3.495.678.041.007
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	16.506.671.029	84.532.428.115	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	Total Penerimaan	**3.017.117.650.376**	**3.143.859.100.386**	**3.140.817.160.717**	**3.255.422.010.610**	**3.376.624.114.874**	**3.500.678.041.007**
	Dikurangi						
4	Total belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	1.645.070.253.090	1.933.392.283.093	1.681.838.524.907	1.848.838.582.807	1.754.725.909.564	1.793.511.559.674
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		**1.372.047.397.286**	**1.210.466.817.294**	**1.458.978.635.810**	**1.406.583.427.803**	**1.621.898.205.310**	**1.707.166.481.333**

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi Bengkulu, 2021

Pada tabel 7.1. Proyeksi Kapsitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, pada tahun 2021, kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai pembangunan adalah sebesar Rp.1.372.047.397.286. Kapasitas riil kemampuan keuangan diproyesikan terus meningkat hingga menjadi Rp.1.707.166.481.333 pada tahun 2026. Nilai kapasitas riil keuangan daerah ditentukan oleh besarnya total pendapatan daerah dikurangi oleh pengeluaran daerah yang meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaaan daerah di tahun yang sama. Dengan demikian kebijakan alokasi belanja terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan riil keuangan daerah menjadi isu penting untuk diperhatikan terkait dengan penguatan Kapasitas riil keuangan daerah. `

Selain itu, kapastas riil kemampuan keuangan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan yang ada pada RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.2.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

Kode	Kapasitas Riil Belanja			Proyeksi					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah				**1.372.047.397.286**	**1.210.466.817.294**	**1.458.978.635.810**	**1.406.583.427.803**	**1.621.898.205.310**	**1.707.166.481.333**
5	**Belanja**			1.372.047.397.286	1.210.466.817.294	1.458.978.635.810	1.406.583.427.803	1.621.898.205.310	1.707.166.481.333
5	**1**	**Belanja Operasi**		**946.214.544.947**	**901.702.589.308**	**956.932.464.326**	**962.482.672.619**	**968.065.072.120**	**973.679.849.538**
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	946.214.544.947	901.702.589.308	956.932.464.326	962.482.672.619	968.065.072.120	973.679.849.538
5	**2**	**Belanja Modal**		**425.832.852.339**	**308.764.227.986**	**502.046.171.484**	**444.100.755.185**	**653.833.133.190**	**733.486.631.795**
5	2	1	Belanja Tanah	22.647.135.800	22.966.460.415	23.290.287.507	23.618.680.560	43.951.703.956	24.289.422.982
5	2	2	Belanja peralatan dan Mesin	154.479.246.940	100.084.094.287	158.866.273.723	161.106.288.182	163.377.886.846	165.681.515.050
5	2	3	Belanja Bangunan dan Gedung	121.093.746.372	56.301.610.659	124.532.664.667	126.288.575.239	128.069.244.150	129.875.020.493
5	2	4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	78.678.521.687	79.787.888.843	145.033.070.955	82.053.769.938	266.681.285.451	361.157.943.004
5	2	5	Belanja Aset tetap Lainnya	48.934.201.540	49.624.173.782	50.323.874.632	51.033.441.264	51.753.012.786	52.482.730.266

Sumber: BPKD Provinsi Bengkulu dan Bappeda Provinsi Bengkulu, 2021

Kerangka pendanaan pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, telah sesuai dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Namun, Tabel 7.2. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, tidak memperhitungkan Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama, karena sudah di perhitungkan pada tabel 7.1. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Arah Kebijakan pembangunan maka disusun program-program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan aspek dan urusan pembangunan Provinsi Bengkulu periode 2021-2026. Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Provinsi Bengkulu selama 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tabel 7.1. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran indikatif selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap perencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencara Strategis Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Bab III, Pendapatan daerah Bengkulu dalam lima tahun kedepan diproyeksikan akan terus meningkat. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan beberapa asumsi:

1. Meningkatnya pendapatan asli daerah terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
2. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
3. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima.

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang

berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), pemenuhan SPM juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD ini dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu.

Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan arah pembangunan dan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMD guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan tiap urusan yang diampu. Penyajian secara detil program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 7.3 di bawah ini.

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																			
		I	**Tujuan: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan**	**Angka Harapan Lama Sekolah**	**13,60 tahun**	**13, 61 Tahun**	**13, 63 Tahun**		**13, 65 Tahun**		**13, 67 Tahun**		**13, 69 Tahun**		**13, 71 Tahun**		**13, 71 Tahun**		
				Angka Rata-rata Lama Sekolah	**8,80 Tahun**	**8,84 Tahun**	**8,95 Tahun**		**9,06 Tahun**		**9,17 Tahun**		**9,28 Tahun**		**9,39 Tahun**		**9,39 Tahun**		
			Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan	**Rata-Rata Nilai Hasil Ujian Sekolah**	**40,00**	**41,27**	**42,3**		**43,2**		**44,3**		**45,2**		**46,3**		**46,3**		
				Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK	**100%**	**100%**	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		
				Angka Melek Huruf	**98,01%**	**98,08%**	**98,11%**		**98,21%**		**98,3%**		**98,4%**		**98,5%**		**98,5%**		
				Angka Putus Sekolah	**0,52%**	**0,49%**	**0,47**		**0,44%**		**0,42**		**0,39%**		**0,37%**		**0,37%**		
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SMA Terakreditasi	93%	95%	96%	**152.059.651.371**	97%	**156.971.807.750**	98%	**159.471.807.750**	99%	**161.471.807.750**	100%	**160.471.807.750**	100%	**644.196.882.371**	
				Persentase SMK Terakreditasi	88,00%	88,33%	89,00%		90,00%		91,00%		92,00%		93,00%		93,00%		
				Persentase SLB Terakreditasi	93%	94%	95%		96%		97%		98%		99%				
				Rasio Guru Terhadap siswa Pendidikan Menengah	na	1 : 12	1 : 13		1 : 14		1 : 15		1 : 16		1 : 17		1 : 17		
				Persentase Guru SMA Bersertifikasi	49,00%	49,50%	50%		51%		52%		53%		54%		54%		
				Rasio Guru Terhadap siswa Pendidikan Menengah	na	1 : 12	1 : 13		1 : 14		1 : 15		1 : 16		1 : 17		1 : 17		
				Persentase Guru SMK Bersertifikasi	41,00%	41,20%	42%		43%		44%		45%		46%		46%		
			Sasaran: Meningkatnya Akses pendidikan	**Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA**	**68,36%**	**68,64%**	**70,00%**		**72,00%**		**74%**		**76%**		**78%**		**78%**		
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA	**91,12%**	**94,14%**	**95,00%**		**96,00%**		**97,00%**		**98,00%**		**99,00%**		**99,00%**		
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA	**79,00%**	**79,33%**	**80,00%**		**81,00%**		**82,00%**		**83,00%**		**84,00%**		**84,00%**		
				Angka Anak Tidak Sekolah (ATS)	**558 Orang**	**508 Orang**	**450 Orang**		**400 Orang**		**350 Orang**		**300 Orang**		**250 Orang**		**250 Orang**		
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Siswa SLTA yang Putus Sekolah	0,52%	0,49%	0,47	1.181.477.907	0,44%	2.569.321.528	0,42	4.869.321.528	0,39%	2.869.321.528	0,37%	3.869.321.528	0,37%	15.358.764.019	
				Rasio Ketersedian Ruang Kelas SLTA terhadap rombongan Belajar	1 : 1	1 : 1	1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		1 : 1		
				Persentase SLTA dalam Kondisi Bangunan Baik	86,93%	87,28%	87,62%		87,96%		88,30%		88,64%		88,98%		88,98%		
				Rasio Ketersedian Sekolah Terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	1 : 696	1 : 696	1 : 694		1 : 692		1 : 691		1 : 688		1 : 685		1 : 685		
			Tujuan: Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan	**Nilai IPK**	**59**	**59**	**59,2**		**59,4**		**59,4**		**59,8**		**60**		**60**		
		II	**Sasaran: Meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan**	**Nilai IPK**	**59**	**59**	**59,2**		**59,4**		**59,4**		**59,8**		**60**		**60**		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	66,30%	67,39%%	69,56%	1.350.000.000	71,73%	1.550.000.000	73,91%	1.550.000.000	76,08	1.550.000.000	78,26	1.550.000.000	78,26	7.550.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	na	na	2 kegiatan	300.000.000	2 kegiatan	450.000.000	2 kegiatan	450.000.000	2 kegiatan	450.000.000	2 kegiatan	450.000.000	2 kegiatan	2.100.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Sejarah Lokal Provinsi Bengkulu yang dilestarikan	na	na		-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	400.000.000	
			PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	na	13,14%	13,20%	155.000.000	13,26%	155.000.000	13,32%	155.000.000	13,38%	155.000.000	13,44%	155.000.000	13,44%	775.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Koleksi Museum yang dilestarikan	3160 Koleksi	3160 Koleksi	3160 Koleksi	1.625.000.000	3160 Koleksi	1.625.000.000	3160 Koleksi	1.625.000.000	3160 Koleksi	1.625.000.000	3160 Koleksi	1.625.000.000	3160 Koleksi	8.125.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1	**Tujuan: Meningkatnya tata kelola kinerja OPD**	**Nilai Evaluasi Sakip**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**				
		III	**Sasaran: Meningkatnya tata kelola kinerja OPD**	**Nilai Evaluasi Sakip**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	566.023.178.472	100%	566.023.178.472	100%	566.023.178.472	100%	566.773.178.472	100%	575.523.178.472	100%	15.358.764.019	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kantor Cabang Dinas Wilayah I Bengkulu Utara																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%		100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	15.358.764.019	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kantor Cabang Dinas Wilayah II Rejang Lebong																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	15.358.764.019	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kantor Cabang Dinas Wilayah III Bengkulu Selatan																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000		15.358.764.019	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
			Kantor Cabang Dinas Wilayah IV Mukomuko																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	15.358.764.019	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Kantor Cabang Dinas Wilayah V Lebong																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	15.358.764.019	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kantor Cabang Dinas Wilayah VI Seluma																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	15.358.764.019	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kantor Cabang Dinas Wilayah VII Kepahiang																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	15.358.764.019	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII Bengkulu Tengah																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	15.358.764.019	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Kantor Cabang Dinas Wilayah IX Kaur																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	15.358.764.019	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	15.358.764.019	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			UPTD Pengembangan Pendidikan Kejuruan																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			UPTD Taman Budaya																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Adminstrasi Perkantoran	100%	100%	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	1.300.000.000	
				Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Jumlah					**724.374.307.750**		**731.124.307.750**		**735.924.307.750**		**736.674.307.750**		**745.424.307.750**		**849.252.050.599**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DINAS KESEHATAN																		
	Tujuan : Meningkatnya capaian kinerja OPD	**Nilai SAKIP Dinas Kesehatan**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
	Sasaran : Meningkatnya capaian kinerja OPD	**Nilai SAKIP Dinas Kesehatan**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	%	100	100	100	35.963.561.600	100	37.162.578.400	100	37.557.732.000	100	38.787.078.400	100	39.059.578.400	100	188.530.528.800	
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase ASN Yang ditingkatkan kompetensinya	%	10	10	10		10		10		10		10		10		
		Persentase Layanan Umum perangkat umum yang dilaksanakan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan evaluasi yang disusun	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Tujuan : Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	**Angka Harapan Hidup**	**Angka**	**69,35**	**70,1**	**70,5**		**70,8**		**71**		**71,3**		**71,7**		**71,7**	**-**	
	Sasaran 1. Meningkatnya Kesehatan Ibu dan Anak	**Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (dalam 1 tahun)**	**Angka**	**93**	**100**	**99**		**98**		**95**		**92**		**89**		**89**	**-**	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran (dalam satu tahun)	**Angka**	**8**	**8**	**8**		**8**		**8**		**8**		**8**		**8**	**-**	
		Prevalensi Stunting	**%**	**6,79**	**6,36**	**6,35**		**6,25**		**6,15**		**6,05**		**6**		**6**		
		Prevalensi Wasting	**%**	**1,65**	**1,31**	**1,30**		**1,25**		**1,20**		**1,15**		**1,10**		**1,10**	**-**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase layanan kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan pada 10 kabupaten/kota	%	100	100	100	70.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	325.000.000	100	995.000.000	
	Sasaran 2. Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit dan Kedaruratan kesehatan masyarakat	**Persentase Layanan Krisis Kesehatanan dan Kejadian Luar Biasa**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	**-**	
		Persentase layanan pencegahan dan pengendalian penyakit	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	**-**	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat layanan kesehatan	%	100	100	100	2.891.750.000	100	980.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	5.371.750.000	
		Persentase warga negara pada kondisi KLB yang mendapat layanan kesehatan	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
		Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	Angka	57,2	<49	<49		<49		<49		<49		<49		<49		
		Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk	Angka	0,05	<1	<1		<1		<1		<1		<1		<1	-	
		Angka Kesakitan TB per 100.000 penduduk	Angka	11	11	11		10		10		9		9		9	-	
		Persentase Penderita DM usia >15 tahun yang dideteksi	%	70	70	72		72,5		73		73,5		74		74,0	-	
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	92,9	94	94,1		94,5		95		95,5		95,5		95,5		
		Persentase Penderita Hypertensi usia >18 tahun yang dideteksi	%	12	15	20		25		30		35		40		40	-	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
			Sasaran 3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	**Indeks Keluarga Sehat**	**Angka**	**0,173**	**0,183**	**0,193**		**0,203**		**0,213**		**0,223**		**0,233**		**0,233**		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Kesehatan	%	93,75	96,25	96,75	33.971.492.800	97,5	34.589.600.000	98,25	34.689.600.000	99,25	34.824.600.000	100	34.749.600.000	100	172.824.892.800	
			Sasaran : Meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan	**Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar**	**%**	**23**	**25**	**30**		**40**		**50**		**60**		**70**		**70**		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan tenaga kesehatan berkualitas	%	73,12	73,74	73,92	52.500.000	74,14	100.000.000	75	100.000.000	79	100.000.000	85	200.000.000	85	552.500.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif per 2254 UKBM	%	80	82	84	750.000.000	86	750.000.000	88	750.000.000	90	750.000.000	92	750.000.000	92	3.750.000.000	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	ketersediaan obat esensial	%	100	100	100	0	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	400.000.000	
			JUMLAH						73.699.304.400		73.807.178.400		73.872.332.000		75.286.678.400		75.659.178.400		372.324.671.600	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS RSUD M. YUNUS PROVINSI BENGKULU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR RSUD M. YUNUS																				
			Tujuan : Meningkatkan tata kelola Kinerja RSUD dr. M. Yunus	**Nilai evaluasi sakip**	**kategori**	**BB**	**-**	**BB**	**-**	**BB**	**-**	**BB**	**-**	**A**	**-**	**A**	**-**	**A**	**-**	
			sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja RSUD dr. M. Yunus	**Nilai evaluasi sakip**	**kategori**	**BB**	**-**	**BB**	**-**	**BB**	**-**	**BB**	**-**	**A**	**-**	**A**	**-**	**A**	**-**	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah	persen	100	100	100	206.175.984.580	100	185.985.984.580	100	187.785.984.580	100	188.485.984.580	100	189.185.984.580	100	957.619.922.900	
			Tujuan : Meningkatkan Mutu pelayanan Kesehatan	**Kepatuhan dalam pelaksanaan standar pelayanan**	**Persen**	**75**	**75**	**76%**	**-**	**80%**	**-**	**85%**	**-**	**90%**	**-**	**95%**	**-**	**95%**		
			Sasaran : terwujudnya pelayanan yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan	**1. Kepuasan Pasien dan Keluarga**	**Persen**	**85,16**	**90**	**91%**	**-**	**92%**	**-**	**93%**	**-**	**94%**	**-**	**95%**	**-**	**95%**		
				2. Kecepatan Respon komplain	**Persen**	**100**	**100**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	persentase capaian Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	persen	N/A	100	100%	8.546.500.000	100%	6.950.000.000	100%	7.900.000.000	100%	8.900.000.000	100%	9.900.000.000	100%	42.196.500.000	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE CAPAIAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persen	N/A	100	100%	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	700.000.000	
			JUMLAH						**214.722.484.580**		**193.085.984.580**		**195.835.984.580**		**197.585.984.580**		**199.285.984.580**		**1.000.516.422.900**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

RSJK SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR RSJK SOEPRAPTO																			
			Tujuan: Meningkatkan Mutu Pelayanan RS secara Komprhensif, Terukur dan Inovatif dalam Menghadapi Pasar Bebas	1. Persentase Pemanfaatan tempat tidur (BOR)	36	38%	50%		52%		52%		55%		60%		60%		
				2. Rata-rata hari rawat pasien (ALOS)	26 hari	28 hari	27 Hr		26 Hr		25 Hr		24 Hr		23 Hr		23 Hr		
				3. Kepuasan Pelanggan	76%	78%	80%		82%		84%		85%		86%		86%		
			Sasaran : 1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Orang dengan gangguan jiwa (OGDJ)	1. Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	70%	75%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		
			2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Orang dengan ketergantungan obat (Narkoba)	2. Persentase Orang dengan ketergantungan Obat yang direhabilitasi	65%	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		
			3. Meningkatkan Mutu Pelayanan anak dengan kebutuhan khusus (Autis)	3. Jumlah Anak dengan kebutuhan Khusus (autis) yang mendapatkan pelayanan Therafis	605	610	615		620		625		630		635		635		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase urusan pemerintah daerah provinsi	100%	100%	100%	38.777.373.750	100%	39.500.000.000	100%	40.000.000.000	100%	40.500.000.000	100%	41.000.000.000	100%	199.777.373.750	RSKJ
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kebutuhan upaya kesehatan Peroranag dan upaya kesehatan masyarakat	N/A	80%	85%	14.056.500.000	86,75%	14.890.000.000	87,50%	14.940.000.000	88,50%	14.369.600.000	89,25%	14.369.600.000	100%	72.625.700.000	RSKJ
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kebutuhan tenaga yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan di RSKJ Soeprapto Bengkulu	47 orang	47 orang	47 orang	3.092.000.000	50 orang	3.242.000.000	50 orang	3.242.000.000	50 orang	3.242.000.000	94,5%	3.242.000.000	94,5%	16.060.000.000	RSKJ
			JUMLAH					**55.925.873.750**		**57.632.000.000**		**58.182.000.000**		**58.111.600.000**		**58.611.600.000**		**288.463.073.750**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
	Tujuan : Meningkatnya kualitas jaringan jalan	**Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap**	**Persen**	**75,97**	**76,94**	**79,27**	**48.350.000.000**	**80,83**	**88.000.000.000**	**82,74**	**88.000.000.000**	**85,34**	**75.000.000.000**	**87,66**	**75.000.000.000**	**87,66**	**374.350.000.000**	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas jaringan jalan	**Persentase penanganan Jalan Provinsi**	**Persen**		**0,97**	**2,33**		**1,56**		**1,91**		**2,60**		**2,32**		**10,72**		
	Program Penyelenggaran Jalan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik	Persen	66,31	67,28	68,51	48.350.000.000	70,07	88.000.000.000	71,98	88.000.000.000	74,58	75.000.000.000	76,90	75.000.000.000	76,90	374.350.000.000	
		Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Sedang	Persen	9,64	9,64	9,64		9,64		9,64		9,64		9,64		9,64		
		Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Ringan	Persen	6,82	6,82	6,82		6,40		5,97		4,83		3,45		3,45		
		Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Rusak Berat	Persen	17,22	16,23	14,97		13,77		12,23		10,70		9,71		9,71		
	Tujuan : Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap air minum layak	**Presentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak**	**%**	**79,71**	**79,71**	**86,48**	**960.000.000**	**93,24**	**25.150.000.000**	**100**	**25.150.000.000**	**100**	**25.250.000.000**	**100**	**25.250.000.000**	**100**	**102.160.000.000**	
	Sasaran : Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap air minum jaringan perpipaan dan non perpipaan	**Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan,**	**%**	**21,18**	**21,18**	**23,5**		**25,81**		**28,13**		**30,45**		**32,77**		**32,77**		
		Presentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan	**%**	**58,53**	**58,53**	**62,98**		**67,43**		**71,87**		**76,31**		**80,75**		**80,75**		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan lintas Kabupaten/Kota	Persen	n/a	n/a	0	910.000.000	0	25.000.000.000	0	25.000.000.000	100%	25.100.000.000	100%	25.100.000.000	100%	101.110.000.000	
	Program Pengembangan Permukiman	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan Kabupaten/Kota	Persen	21,18	21,18	23,50	-	25,81	150.000.000	28,13	150.000.000	30,45	150.000.000	32,77	150.000.000	32,77	1.000.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	1	1	1	50.000.000		-		-		-		-		50.000.000	
	Tujuan : Terpenuhinya akses Rumah Tangga terhadap sanitasi layak	**Presentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak**	**Persen**	**78,10**	**78,10**	**78,69**	**-**	**80,85**	**150.000.000**	**85,00**	**150.000.000**	**89,15**	**150.000.000**	**93,30**	**150.000.000**	**93,30**	**600.000.000**	
	Sasaran : Terpenuhinya akses rumah tangga terhadap sanitasi layak	**Presentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak**	**Persen**	**78,10**	**78,10**	**78,69**	**-**	**80,85**	**150.000.000**	**85,00**	**150.000.000**	**89,15**	**150.000.000**	**93,30**	**150.000.000**	**93,3**	**600.000.000**	
	Program Pengembangan Permukiman	Presentase rumah tangga yang terakses MCK	Persen	78,1	78,1	78,69	-	80,85	150.000.000	85	150.000.000	89,15	150.000.000	93,3	150.000.000	93,3	600.000.000	
		Presentase rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan air limbah (IPAL) komunal	Persen	9	11	14		16,5		19		21		24		24	-	
		Presentase rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Persen	24,21	24,21	26,41		27,16		27,35		27,35		27,54		27,3	-	
	Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	**Persentase bangunan gedung strategis dalam kondisi baik**	**Persen**	**13,04**	**13,04**	**13,04**	**40.925.000.000**	**17,39**	**16.000.000.000**	**21,74**	**16.000.000.000**	**26,09**	**16.000.000.000**	**30,43**	**16.000.000.000**	**30,43**	**104.925.000.000**	
		Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan di rehab	**Unit**	**4**	**4**	**4**		**4**		**5**		**6**		**7**		**7**		
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung	**Jumlah Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik**	**Unit**	**4**	**4**	**4**	**40.925.000.000**	**4**	**16.000.000.000**	**5**	**16.000.000.000**	**6**	**16.000.000.000**	**7**	**16.000.000.000**	**7**	**104.925.000.000**	
		Jumlah Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan	**Unit**	**9**	**9**	**9**		**9**		**9**		**9**		**9**		**9**		
		Jumlah Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang	**Unit**	**9**	**9**	**9**		**7**		**6**		**5**		**4**		**4**		
		Jumlah Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat	**Unit**	**1**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya	%	0,22	0,22	0,39	39.975.000.000	0,57	15.000.000.000	0,61	15.000.000.000	0,78	15.000.000.000	0,87	15.000.000.000		99.975.000.000	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung strategis dan lingkungaanya yang ditingkatkan kualitasnya	Persen	0,03	0,03	0,04	950.000.000	0,045	1.000.000.000	0,05	1.000.000.000	0,055	1.000.000.000	0,06	1.000.000.000	0,06	4.950.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
			Tujuan : Meningkatnya indeks kinerja sistem irigasi	**Indeks Kinerja Sistem Irigasi**	**Persen**	**51,7**	**52,04**	**52,5**	**2.960.000.000**	**53**	**3.800.000.000**	**54,5**	**4.400.000.000**	**56**	**5.250.000.000**	**57**	**5.950.000.000**	**57,00**	**22.650.000.000**	
			Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi	**Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang**	**Persen**	**56,07**	**56,72**	**57,18**	**2.960.000.000**	**57,68**	**3.800.000.000**	**59,18**	**4.400.000.000**	**60,68**	**5.250.000.000**	**61,68**	**5.950.000.000**	**61,68**	**22.650.000.000**	
				Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi Rusak	**Persen**	**43,93**	**43,28**	**42,82**		**42,32**		**40,82**		**39,32**		**38,32**		**38,32**		
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan	Persen	43,93	43,28	42,82	3.965.000.000	42,32	5.000.000.000	40,82	6.000.000.000	39,32	7.000.000.000	38,32	8.000.000.000	38,32	30.000.000.000	
			Tujuan : Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	**Persentase panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi**	**Persen**	**0,423**	**0,42**	**1,13**	**1.005.000.000**	**1,72**	**1.200.000.000**	**2,42**	**1.600.000.000**	**2,94**	**1.750.000.000**	**3,51**	**2.050.000.000**	**3,51**	**7.350.000.000**	
				Persentase Penanganan normalisasi sungai	**Persen**	**0,42**	**0,42**	**0,44**		**0,46**		**0,48**		**0,49**		**0,51**		**0,51**		
			Sasaran : Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	**Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi**	**Persen**	**0,42**	**0,42**	**1,13**	**750.000.000**	**1,72**	**750.000.000**	**2,42**	**750.000.000**	**2,94**	**750.000.000**	**3,51**	**750.000.000**	**3,51**	**750.000.000**	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas jaringan irigasi yang dipelihara secara rutin/berkala	Persen	56,07	56,72	57,18		57,68		59,18		60,68		61,68		61,68	-	
			Tujuan : Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi	**Cakupan pengembangan jasa konstruksi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**145.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**950.000.000**	
			Sasaran : Meningkatnya perkembangan jasa konstruksi	**Persentase Pelatihan yang dilaksanakan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**145.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**200.000.000**	**100**	**950.000.000**	
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase peserta yang bersertifikat/terlatih	Persen	100	100	100	145.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	950.000.000	
			Tujuan : Terselenggaranya Penataan Ruang	**Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persen**	**71**	**92**	**100**	**287.500.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**1.457.500.000**	
			Sasaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	**Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**Persen**	**17**	**92**	**100**	**287.500.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**300.000.000**	**100**	**1.457.500.000**	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Laporan, Penyelenggaraan Penataan Ruang	Laporan	2	2	4	287.500.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	20	1.457.500.000	
			Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat dan Alat Bantu	**Persentase Alat Berat dan Alat Bantu Dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**70,5**	**73**	**73,5**	**1.150.000.000**	**77,5**	**500.000.000**	**79**	**500.000.000**	**81**	**1.500.000.000**	**83**	**500.000.000**	**83**	**3.150.000.000**	
			Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Alat Berat	**Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**72**	**77**	**78**		**80**		**82**		**85**		**86**		**86**		
				Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik	**Persen**	**69**	**69**	**69**		**75**		**76**		**77**		**80**		**80**		
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pegawai yang memiliki Surat Izin Operator	Persen	n/a	n/a	0,8	1.150.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	15	1.500.000.000	15	500.000.000	15	3.150.000.000	
				Persentase Alat Berat dan Alat Bantu yang memiliki surat izin laik operasi	**Persen**	**n/a**	**0,6**	**10**		**15**		**18**		**20**		**22**		**22**		
				Persentase Alat Berat dan Alat Bantu yang dipelihara	**Persen**	**70**	**71**	**72**		**76**		**78**		**80**		**81**		**81**		
			Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Laboratorium	**Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**97,76%**	**92,00%**	**94,00%**	**740.000.000**	**95%**	**750.000.000**	**95%**	**750.000.000**	**97%**	**700.000.000**	**98%**	**750.000.000**	**98%**	**3.515.000.000**	
			Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Alat Laboratorium	**Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik**	**Persen**	**97,76%**	**92,00%**	**94,00%**	**740.000.000**	**0,95**	**750.000.000**	**0,95**	**750.000.000**	**0,97**	**700.000.000**	**0,98**	**750.000.000**	**98**	**3.515.000.000**	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pegawai yang memiliki Surat Keterangan Keahlian	Persen	N/A	N/A	8	740.000.000	12	750.000.000	20	750.000.000	22	700.000.000	34	750.000.000	34	3.515.000.000	
				Persentase Alat Laboratorium yang terkalibrasi	Persen	78	80	82		84		86		88		90		90		
				Persentase Alat Laboratorium yang dipelihara	Persen	78	80	82		84		86		88		90		90		
			Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP**		**BB**	**BB**	**BB**	**36.108.310.500**	**BB**	**37.171.002.500**	**BB**	**37.671.002.500**	**A**	**38.671.002.500**	**A**	**40.671.002.500**		**190.292.320.500**	
			Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP**		**BB**	**BB**	**BB**	**36.108.310.500**	**BB**	**37.171.002.500**	**BB**	**37.671.002.500**	**A**	**38.671.002.500**	**A**	**40.671.002.500**	**A**	**190.292.320.500**	
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	36.108.310.500	100	37.171.002.500	100	37.671.002.500	100	38.671.002.500	100	40.671.002.500	100	190.292.320.500	
				Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	Persen	70	72	75		78		80		82		85		85		
				Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	15	15	20		22		24		26		26		26		
				Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	Persen	100	100	100		100		100		100		100		100		
			TOTAL						**132.630.810.500**		**173.221.002.500**		**174.721.002.500**		**164.771.002.500**		**166.821.002.500**		**811.399.820.500**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI BENGKULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN																		
	Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP DPKPP**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**Provinsi Bengkulu**
	Sasaran : Mewujudkan Dokumen Perencanaan, laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang akuntabel, akurat dan tepat waktu	**Nilai Evaluasi SAKIP DPKPP**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**Provinsi Bengkulu**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100%	100%	6.887.000.000	100%	7.301.000.000	100%	7.420.000.000	100%	7.635.000.000	100%	7.455.000.000	100%	36.698.000.000	
		Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	%	n/a	53,84 %	62,72 %		68,64 %		78,10 %		81,16 %		86,10 %		86,10 %		
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	n/a	60%	60%		60%		60%		62%		65%		65%		
		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang Disusun	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Provinsi Bengkulu
	Tujuan : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Permukiman Layak Huni	**Persentase Rumah Layak Huni**	**%**	**53,33%**	**53,57%**	**57,16%**		**59,07%**		**61,16%**		**63,07%**		**65,16%**		**65,16%**		**Provinsi Bengkulu**
	Sasaran : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Permukiman Layak Huni	**Jumlah Rumah Layak Huni**	**Unit**	**278.637**	**279.902**	**284.902**		**289.902**		**294.402**		**299.102**		**305.102**		**305.102**		**Provinsi Bengkulu**
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	**Unit**	**243.808**	**242.543**	**237.543**		**237.543**		**233.043**		**228.343**		**222.343**		**222.343**		**Provinsi Bengkulu**
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah terkena dampak bencana/relokasi rogram pemerintah yang dibangun/direhabilitasi	%	n/a	n/a	n/a	300.000.000	1,35	435.000.000	2,05	625.000.000	2,79	950.000.000	7,19	1.050.000.000	7,19	3.360.000.000	Provinsi Bengkulu
	Tujuan : Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak Huni	**Luas Kawasan Kumuh (Ha)**	**Ha**	488	460	**440**		430		410		390		370		370		**Provinsi Bengkulu**
	Sasaran : Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak Huni	**Persentase Penanganan Luas Kawasan Kumuh**	**Ha**	**6**	**4**	**5**		**5**		**5**		**5**		**5**		**35**		**Provinsi Bengkulu**
	Program Kawasan Permukiman	Luas Kawasan kumuh yang ditangani (Ha)	Ha	27	20	20	63.000.000	20	160.000.000	20	125.000.000	20	85.000.000	20	85.000.000	147	518.000.000	Provinsi Bengkulu
	Tujuan : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Permukiman Layak Huni	**Persentase Rumah Layak Huni**	**%**	**53,33%**	**53,57%**	**57,16%**		**59,07%**		**61,16%**		**63,07%**		**65,16%**		**65,16%**		**Provinsi Bengkulu**
	Sasaran : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Permukiman Layak Huni	**Jumlah Rumah Layak Huni**	**Unit**	**278.637**	**279.902**	**284.902**		**289.902**		**294.402**		**299.102**		**305.102**		**305.102**		**Provinsi Bengkulu**
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	**Unit**	**243.808**	**242.543**	**237.543**		**237.543**		**233.043**		**228.343**		**222.343**		**222.343**		**Provinsi Bengkulu**
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Rumah	%	n/a	n/a	n/a	550.000.000	1,35	1.854.000.000	2,05	1.520.000.000	2,79	770.000.000	7,19	1.575.000.000	7,19	6.269.000.000	Provinsi Bengkulu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp
			Tujuan : Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak Huni	**Persentase Kecamatan yang dibangun PSU**	**%**	**19**	**23**	24		27		32		37		42		42		**Provinsi Bengkulu**
			Sasaran : Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Layak Huni	**Persentase Peningkatan Jumlah Kecamatan yang dibangun PSU**	**%**	**n/a**	4	**2**		**3**		**5**		**5**		**5**		20		**Provinsi Bengkulu**
			Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penanganan Kecamatan yang dibangun PSU	%	19	4	2	50.000.000	3	600.000.000	5	880.000.000	5	1.440.000.000	7	800.000.000	22	3.770.000.000	Provinsi Bengkulu
			Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Mkasimum dan Tanah Absentee	Prosentase penggunaan Lahan Permukiman (Ha)	%	11,85 %	12,02 %	12,20 %	50.000.000	12,38 %	50.000.000	12,55 %	50.000.000	12,73 %	50.000.000	12,90 %	50.000.000	12,90 %	250.000.000	
			JUMLAH						**7.900.000.000**		**10.400.000.000**		**10.620.000.000**		**10.930.000.000**		**11.015.000.000**		**50.865.000.000**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BENGKULU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
			Tujuan : Meningkatanya tata kelola kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP Kesbangpol**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**Kesbangpol**
			Sasaran : Meningkatanya tata kelola kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP Kesbangpol**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**Kesbangpol**
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Administrasi perkantoran	70%	70%	72%	8.683.734.188	74%	9.387.000.000	76%	9.595.000.000	78%	9.990.000.000	80%	10.188.000.000	80%	47.843.734.188	
				Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Keadaan baik	70%	70%	70%		70%		70%		70%		70%		70%		
				Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya	70%	70%	70%		70%		70%		70%		70%		70%		
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Yang Disusun	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Tujuan : Meningkatnya Harmoni Sosial dan Wawasan Kebangsaan	**Persentase konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM Yang ditangani**	**65%**	**67%**	**67%**		**68%**		**69%**		**70%**		**71%**		**71%**		**Kesbangpol**
			Sasaran : Meningkatnya Jumlah masyarakat yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa	**Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa**	**65%**	**67%**	**67%**		**68%**		**69%**		**70%**		**71%**		**71%**		**Kesbangpol**
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat Yang memahami ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	64%	65%	67%	165.000.000	69%	558.000.000	71%	640.000.000	73%	610.000.000	75%	600.000.000	75%	2.573.000.000	Kesbangpol
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Jumlah Ormas Yang Mampu dibina	25%(19/75)	25%(19/75)	27%	220.000.000	29%	200.000.000	31%	200.000.000	33%	200.000.000	35%	249.000.000	35%	1.069.000.000	Kesbangpol
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBAN GAN KETAHANAN EKONOMI , SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	N/A	65% (631/972)	66%	3.905.000.000	67%	500.000.000	68%	540.000.000	69%	600.000.000	70%	640.000.000	70%	6.185.000.000	Kesbangpol
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIO NAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Jenis Pelaksanaan Terkait Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	N/A	4 Jenis	4 Jenis	150.000.000	4 Jenis	525.000.000	4 Jenis	580.000.000	4 Jenis	600.000.000	4 Jenis	650.000.000	5 Jenis	2.505.000.000	Kesbangpol

			Tujuan : Meningkatnya Penegakkan Demokrasi	**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu**	**N/A**	**73,6**	**74**		**75**		**75,40**		**76**		**76,5**		**76,5**		
			Sasaran : Meningkatnya Pemahaman Politik Masyarakat di Provinsi Bengkulu	**Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bengkulu**	**N/A**	**73,6**	**74**		**75**		**75,40**		**76**		**76,5**		**76,5**		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEM BANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	77,73%	77,78%	78%	2.275.000.000	79%	380.000.000	80%	420.000.000	81%	400.000.000	82%	498.000.000	82%	3.973.000.000	Kesbangpol
			JUMLAH					**15.398.734.188**		**11.550.000.000**		**11.975.000.000**		**12.400.000.000**		**12.825.000.000**		**64.148.734.188**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BENGKULU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																			
			Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Niai Evaluasi SAKIP**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
			Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Niai Evaluasi SAKIP**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
			Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	100	100	100	8.887.000.000	100	8.894.000.000	100	9.172.500.000	100	9.414.000.000	100	9.737.500.000	100	46.105.000.000	
			Tujuan : Meningkatnya Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	**Persentase Penegakan Perda**	50	50	70		70		80		80		90		90		
			Sasaran : Berkurangnya pelanggaran terhadap Perda	**Persentase Penanganan kasus pelanggaran Perda yang terselesaikan**	20	20	20		20		30		30		30		30		
			Program: Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus trantibum dan trantibmas yang ditindak lanjuti	100	100	100	4.821.500.000	100	4.901.000.000	100	4.951.000.000	100	4.901.000.000	100	5.011.000.000	100	24.585.500.000	
			Program: Penanggulangan Bencana	persentase penanggulangan bencana	NA	NA		-		50.000.000	100	10.000.000	100	60.000.000	100	10.000.000	100	130.000.000	
			Program: Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatann Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	NA	NA	100	16.500.000	100	130.000.000	100	141.500.000	100	150.000.000	100	91.500.000	100	529.500.000	
			jumlah					**13.725.000.000**		**13.975.000.000**		**14.275.000.000**		**14.525.000.000**		**14.850.000.000**		**71.350.000.000**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DINAS SOSIAL																		
	Tujuan : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	**Nilai SaKIP Dinas Sosial**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		A		
	Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	**Nilai SaKIP Dinas Sosial**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		A		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	%	100%	100%	100%	19.228.858.000,00	100%	19.623.500.000,00	100%	20.183.000.000,00	100%	20.764.000.000,00	100%	21.356.000.000,00	100%	101.155.358.000	Dinas Sosial
	Tujuan : Meningkatnya pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS))	**Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial**	**%**	**69,5**	**69,9**	**70,5**		**71,2**		**71,5**		**72**		**72,5**		**72,5**	**0**	
	Sasaran : Meningkatnya kapasitas PSKS dan lembaga kesejahteraan sosial	**Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial**	**%**	**42,6**	**55**	**56**		**56**		**57**		**58**		**59**		**285,8**	**0**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial	%	42,6	55	56	95.000.000	56	250.000.000	57	250.000.000	58	250.000.000	59	250.000.000	286	1.095.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terlaksananya Pengelolaan Taman Makan Pahlawan	%	0	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	500	50.000.000	
	Sasaran : Meningkatnya Penanganan permasalahan Sosial	**Persentase PMKS yang tertangani**	**%**	**69,5**	**69,9**	**70,5**		**71,2**		**71,5**		**72**		**72,5**		**72,5**	**0**	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi Sosial dalam panti	%	N/a	12,36	12,5	157.142.000	12,8	367.500.000	13	408.000.000	13,2	427.000.000	13,4	435.000.000	13,4	1.794.642.000	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase KPM yang memperoleh bantuan sosial	%	69,5	69,5	70,2	1.159.000.000	70,9	1.484.000.000	71,2	1.484.000.000	71,7	1.784.000.000	72,2	1.784.000.000	72,2	7.695.000.000	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Pesentase kejadian Bencanan alam dan Sosial yang tertanggulangi	%	N/a	100	100	95.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	455.000.000	
							20.745.000.000,00		**21.825.000.000,00**		**22.425.000.000,00**		**23.325.000.000,00**		**23.925.000.000,00**		**112.245.000.000**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BENGKULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI																		
	Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola OPD	**Nilai SAKIP Disnakertrans**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**BB**		**DISNAKERTRANS**
	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola OPD	**Nilai SAKIP Disnakertrans**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**BB**		**DISNAKERTRANS**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Jenis Kegiatan Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100%	100%	100%	29.599.164.100	100%	27.000.000.000	100%	27.300.000.000	100%	27.600.000.000	100%	27.900.000.000	100%	139.399.164.100	DISNAKERTRANS
	Tujuan: Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan	**Indeks pembangunan ketenagakerjaan**	**Angka**	**63,64**	**67,06**	**68,98**		**69,5**		**70,02**		**71**		**72,5**		**72,5**		**DISNAKERTRANS**
	Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**	**Persentase**	**71,73%**	**72,00%**	**73,15%**		**74,25%**		**75,10%**		**76,15%**		**77,22%**		**77,22%**		
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga kerja yang disusun	Persentase	40,00%	50,00%	50,00%	20.000.000	60,00%	125.000.000	70,00%	150.000.000	80,00%	175.000.000	90,00%	200.000.000	90,00%	670.000.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang dilatih	Persentase	84,00%	89,40%	90,65%	3.161.998.000	90,75%	750.000.000	90,85%	800.000.000	91,00%	750.000.000	91,20%	750.000.000	91,20%	6.211.998.000	
		Persentase Pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase	50,00%	50,20%	55,20		59,97		62,20		68,00		70,00		72,00%		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja yang di tempatkan	Persentase	50,00%	60,00%	61,20%	253.000.000	65,09%	440.000.000	66,10%	385.000.000	68,10%	415.000.000	70,50%	385.000.000	70,50%	1.878.000.000	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase	100%	100%	100%	290.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	255.000.000	100	277.000.000	100	1.342.000.000	
	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan Taat NSPK	Persentase	58,80%	58,84%	65,25%	187.500.000	70,00%	125.000.000	80,00%	150.000.000	90,00%	175.000.000	100,00%	200.000.000	100,00%	837.500.000	
	Tujuan :Membangun Infrastruktur Strategis dan Infrastruktur Dasar untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi	**terbentukanya kawasan Transmigrasi yang produktif, berdaya saing dan sejahterah**	**Kawasan**	**5 Kawasan**	**5 Kawasan**	**5 Kawasan**		**5 Kawasan**		**5 Kawasan**		**6 kawasan**		**7 Kawasan**		**7 Kawasan**		
	Sasaran : Terselenggaranya Pembangunan Transmigrasi	**Persentase Peningkatan Kawasan Transmigrasi Yang di Bangun dan Dikembangkan**	**Persentase**	**42%**	**44%**	**56,00%**		**57,14%**		**57,14%**		**71,42%**		**85,71%**		**85,71%**		
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	-	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2 DOkumen	450.000.000	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Dokumen Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kawasan	5 kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan	100.000.000	5 Kawasan	100.000.000	5 Kawasan	125.000.000	5 Kawasan	150.000.000	5 Kawasan	175.000.000	5 Kawasan	650.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	Kawasan	5 Kawasan	5 Kawasan		55.000.000	5 Kawasan	100.000.000	5 Kawasan	125.000.000	6 Kawasan	150.000.000	7 Kawasan	175.000.000	7 Kawasan	605.000.000	
	TOTAL PAGU						**33.666.662.100**		**28.900.000.000**		**29.445.000.000**		**29.820.000.000**		**30.212.000.000**		**152.043.662.100**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI BENGKULU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																			
			TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA OPD	**NILAI SAKIP OPD**	**Nilai**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**AA**	
			SASARAN : MENINGKATNYA TATA KELOLA OPD	**NILAI SAKIP OPD**	**Nilai**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**AA**	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	13.300.000.000	100	13.796.175.000	100	14.186.350.000	100	14.611.243.000	100	14.968.838.000	100	70.862.606.000
				Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	70	75	78		80		80		83		85		85	
				Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	75	75	77		78		80		85		85		85	
				Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
			TUJUAN I : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN PETANI PETERNAK	**Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT)**	**Nilai**	**95,69**	**95,80**	**97,00**		**98,05**		**100,00**		**101,00**		**102,00**		**102,00**	
			TUJUAN II : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SUB SEKTOR PETERNAKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	**Persentase Pertumbuhan Sub sektor Peternakan terhadap PDRB (%)**	**%**	**4,14**	**4,15**	**4,16**		**4,18**		**4,20**		**4,22**		**4,23**		**4,23**	
			SASARAN I : MENINGKATNYA PRODUKSI DAGING	**Produksi Daging Ternak Ruminansia Besar (ton)**	**Ton**	**3.242,96**	**3.659,84**	**4.130,66**		**4.662,41**		**5.263,04**		**5.941,49**		**6,707,89**		**6,707,89**	
				Produksi Daging Ternak Ruminansia Kecil (ton)	**Ton**	**111,81**	**120,44**	**129,75**		**139,77**		**150,57**		**162,21**		**174,74**		**174,74**	
				Produksi Daging Ternak Ruminansia Unggas (ton)	**Ton**	**17.913,16**	**22.965,06**	**29.456,53**		**37.801,14**		**48.532,08**		**62.336,98**		**80.102,84**		**80.102,84**	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak (%)	%	N/A	22,51	22,75	4.250.000.000	22,99	4.053.825.000	23,23	4.063.650.000	23,46	3.888.757.000	23,53	3.781.162.000	23,53	20.037.394.000
				Persentase Peningkatan Produksi Hijauan Pakan Ternak (%)	%	N/A	10	20		20		20		20		20		100	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketercukupan Prasarana Pertanian (%)	%	70	70	70	100.000.000	70	150.000.000	75	300.000.000	80	300.000.000	100	300.000.000	100	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelembagaan Kelompok (%)	%	33	33	33	50.000.000	50	100.000.000	67	150.000.000	83	200.000.000	100	250.000.000	100	750.000.000
			SASARAN II MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN HEWAN	**Persentase Status Kesehatan Hewan**	**%**	**25**	**25**	**30**		**35**		**40**		**45**		**50**		**50**	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penurunan Angka Kematian hewan	%	20	20	20	500.000.000	20	600.000.000	20	700.000.000	20	800.000.000	20	900.000.000	100	3.500.000.000
				Peningkatan Penyediaan Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Jenis	3	3	3		3		3		3		3		3	
J U M L A H (Rp.)									**18.100.000.000**		**18.550.000.000**		**19.100.000.000**		**19.500.000.000**		**19.900.000.000**		**95.150.000.000**

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																				
			Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja DP3A&PPKB	**Nilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB**		**B**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
			Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja DP3A&PPKB	**Nilai Evaluasi SAKIP DP3A&PPKB**		**B**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase administrasi perkantoran yang dilakukan	%	100	100	100	10.566.895.200	100	10.820.549.050	100	11.077.049.050	100	11.287.000.000	100	11.483.049.050	100	55.234.542.350	DP3APPKB
			Tujuan : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	**Indek Pemberdayaan Gender (IDG)**	**%**	**69,9**	**71,21**	**71,35**		**71,40**		**71,45**		**71,5**		**71,55**		**71,55**		DP3APPKB
			Sasaran : Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	**Indek Pemberdayaan Gender (IDG)**	**%**	**69,9**	**71,21**	**71,35**		**71,40**		**71,45**		**71,5**		**71,55**		**71,55**		DP3APPKB
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keterwakilan perempuan di bidang politik	%	14,02	30	71,35	22.000.000	71,40	113.000.000	71,45	127.000.000	71,5	152.000.000	71,55	180.000.000	71,55	594.000.000	DP3APPKB
				Persentase keterwakilan perempuan di bidang profesional	%	51,9	52	52,1		52,2		52,3		52,4		52,5		52,5		
				Persentase Sumbangan pendapatan perempuan	%	35,24	35,34	35,44		35,54		35,64		35,74		35,84		35,84		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan peningkatan kapasitas keluarga	%		100			100	18.000.000	100	26.000.000	100	27.000.000	100	32.000.000	100	103.000.000	DP3APPKB
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase tersedianya data gender dan anak yang akurat dan berkesinambungan	%	100	100	100	22.000.000	100	22.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	30.000.000	100	126.000.000	
			Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan serta TPPO	**Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan layanan pendampingan**	%	**85**	**87**	**90**		**92,5**		**95**		**97,5**		**100**		**100**		DP3APPKB
			Sasaran : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, , serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan	**Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan layanan pendampingan**	%	**85**	**87**	**90**	**0**	**92,5**	**0**	**95**	**0**	**97,5**	**0**	**100**	**0**	**100**	**0**	DP3APPKB
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan layanan pendampingan	%	85	87	90	147.000.000	92,5	302.450.950	95	349.950.950	97,5	377.000.000	100	444.950.950	100	1.688.352.850	DP3APPKB
			Tujuan : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta TPPO	**Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan layanan pendampingan**	**%**	**70**	**75**	**80**		**85**		**90**		**95**		**100**		**100**	-	DP3APPKB
			Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak	**Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan layanan pendampingan**	**%**	**70**	**75**	**80**		**85**		**90**		**95**		**100**		**100**	-	DP3APPKB
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan layanan pendampingan	%	70	75	80	22.000.000	85	41.000.000	90	47.000.000	95	58.000.000	100	81.000.000	100	249.000.000	DP3APPKB
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang Mendapatkan layanan pendampingan	kali	-	-	80	20.000.000	85	50.000.000	90	72.000.000	95	86.000.000	100	122.000.000	100	350.000.000	DP3APPKB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
			Tujuan : Meningkatnya laju pengendalian pertumbuhan penduduk	**Total Fertility Rate (TFR) Angka kelahiran Total 15 s.d 49**	**Angka**	**2,28**	**2,25**	**2,21**		**2,19**		**2,1**		**2,0**		**1,9**		**1,9**		DP3APPKB
			Sasaran : Meningkatnya Kesehatan Reproduksi	**Total Fertility Rate (TFR) Angka kelahiran Total 15 s.d 49**	**Angka**	**2,28**	**2,25**	**2,21**		**2,19**		**2,1**		**2,0**		**1,9**		**1,9**		DP3APPKB
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Angka	65,09	65,49	65,90	22.000.000	66,30	22.000.000	66,83	23.000.000	67,53	30.000.000	67,63	37.000.000	67,73	134.000.000	DP3APPKB
				unmeed need	Angka	7,17	7,01	6,84		6,67		6,52		6,54		6,50				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kehamilan tidak diinginkan (KTD) /Wanita Usia Subur (WUS) 1	%	46,23	46,05	45,88	0	45,69	16.000.000	45,50	20.000.000	45,31	33.000.000	45,30	41.000.000	45, 29	110.000.000	DP3APPKB
			TOTAL PAGU						**10.821.895.200**		**11.405.000.000**		**11.767.000.000**		**12.077.000.000**		**12.451.000.000**		**55.234.542.350**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS KETAHANAN PANGAN																				
			Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	65,72	65,72	65,74		65,80		65,85		65,90		66,00		66,00		
			Sasaran : Meningkatkan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan	Nilai Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan	Nilai	82	82,5	83		83,5		84		84		85		85		
				Nilai Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan	Nilai	82,6	83,5	84,5		85		85,5		86		86,5		86,5		
				Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	N/A	5%	5%		5%		5%		5%		5%		25%		
				Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar	Persentase	N/A	85%	85%		85%		85%		85%		85%		85%		
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Daerah Rentan Rawan Pangan		N/A	10%	5%	175.000.000	10%	350.000.000	10%	350.000.000	10%	350.000.000	10%	350.000.000	45%	1.575.000.000	
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Stabilitas Harga Pangan	Persentase	4,94%	5%	5%	524.000.000	5%	571.000.000	5%	565.000.000	5%	576.000.000	5%	580.000.000	5%		
				Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Persentase	103%	104%	104%		104%		104%		104%		104%		104%		
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase	N/A	N/A	5	175.000.000	5	265.000.000	5	285.000.000	5	302.500.000	5	310.000.000	25		
				Jumlah komoditi yang disertifikasi, diregistrasi dan dilakukan pengawasan (surveylent)	Komoditi	18	16	4		7		7		7		7		32		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
			Tujuan : Meningkatnya Tata kelola OPD	**Nilai SAKIP OPD**		**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
			Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola OPD	**Nilai SAKIP OPD**		**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**	-	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	Persentase	100%	100%	100%	*9.301.000.000*	100%	*9.564.000.000*	100%	*9.825.000.000*	100%	##########	100%	##########	100%	##########	
				Persentase layanan adminitrasi perkantoran	Persentase	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	Persentase	80%	80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
				Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase	N/A	N/A	-		3%		3%		3%		3%		12%		
			J U M L A H						**10.175.000.000**		**10.750.000.000**		**11.025.000.000**		**11.300.000.000**		**11.575.000.000**		**54.825.000.000**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BENGKULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung
				Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN																		
	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan sub sektor kehutanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	**Persentase pertumbuhan sub sektor kehutanan terhadap PDRB**	%	0,034	**0.45**	**0,45**		**0,5**		**0,55**		**0,6**		**0,65**		**0,65**		**DLHK Provinsi Bengkulu**
	Sasaran: Meningkatnya nilai produksi hasil	**Volume Produksi Hasil Hutan**	**m3**	**N/A**	**14000**	**15400**		**16940**		**18630**		**20493**		**22542**		**108005**		
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentasi peningkatan volume Produksi hasil hutan	%	10	10	10	1.564.000.000	10	1.330.000.000	10	1.480.000.000	10	1.540.000.000	10	1.515.000.000	*10*	7.429.000.000	
	Tujuan : Meningkatnya Cakupan Tutupan Lahan	**Indeks tutupan lahan**	**angka**	**53,15**	**57,06**	**58,84**		**60,62**		**62,40**		**64,18**		**65,96**		**65,96**	**-**	
	Sasaran : Meningkatnya Area Tutupan Lahan	**Persentase Kawasan Deforestrasi**	**%**	**30,07**	**30,07**	**29,86**		**29,65**		**29,44**		**29,22**		**29,01**		**29,01**	**-**	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Kawasan Deforestasi	ha	278.047	278.047	276.089	1.116.482.000	274.130	97.500.000	272.172	155.000.000	270.214	190.000.000	268.256	190.000.000	268.256	1.748.982.000	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial	%	2%	2%	2%	660.000.000	2%	660.000.000	2%	695.000.000	2%	695.000.000	2%	695.000.000	10%	3.405.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase tutupan lahan di wilayah DAS	%	3.8 %	3.8 %	3,80%	57.500.000	3,80%	100.000.000	3,80%	150.000.000	3,80%	150.000.000	3,80%	150.000.000	0,19	607.500.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen Pengelolaan KEHATI	dok	1	1	1	83.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	483.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas Kawasan Deforestasi	ha	278.047	278.047	276.089	568.500.000	274.130	100.000.000	272.172	100.000.000	270.214	100.000.000	268.256	150.000.000	268.256	1.018.500.000	
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	**Indeks Kualitas Air**	**angka**	**42,5**	**50,24**	**50,34**		**50,44**		**50,54**		**50,64**		**50,74**		**50,74**	**-**	
		Indeks Kualita Udara	**angka**	**90,52**	**90,18**	**90,28**		**90,39**		**90,49**		**90,59**		**90,69**		**90,69**	**-**	
	Sasaran : meningkatnya Pengelolaan kualitas air dan Udara	**Persentase Limbah industri dan domestik yang tertangani**	**%**	**N/A**	**74**	**75**		**77**		**79**		**81**		**83**		**395**	**-**	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Lingkungan hidup	dok	1	1	1	166.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	7	466.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah industri dan domestik yang tertangani	%	74	74	75	27.500.000	77	100.000.000	79	100.000.000	81	100.000.000	83	100.000.000	395	427.500.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi	dok	15	15	15	62.000.000	27	175.000.000	28	175.000.000	28	175.000.000	28	225.000.000	126	812.000.000	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN	Jumlah MHA yang dibina	kelompok	2	2	2	13.000.000	2	35.000.000	2	45.000.000	2	55.000.000	2	65.000.000	10	225.000.000	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup	dok	-	0	1	22.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	5	472.000.000	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani	laporan	6	6	6	27.500.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	30	227.500.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah rumah tangga	%	N/A	24	26	90.000.000	27	90.000.000	28	90.000.000	30	110.000.000	31	110.000.000	142	490.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan Pencemaran air dan udara	%	95%	95%	95%	1.405.000.000	95%	340.000.000	95%	415.000.000	95%	415.000.000	95%	415.000.000	95%	2.990.000.000	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	**Nilai Evaluasi SAKIP DLHK**	**nilai**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**	**-**	
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP DLHK**	**nilai**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**	**-**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BENGKULU	Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Dilaksanakan	jenis	8 Jenis	8 Jenis	8	43.447.420.950	8	43.782.500.000	8	43.935.000.000	8	44.230.000.000	8	44.460.000.000	*40*	219.854.920.950	
							49.309.902.950		**47.010.000.000**		**47.590.000.000**		**48.160.000.000**		**48.575.000.000**		**240.656.902.950**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI BENGKULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
	Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**Nilai Evaluasi SAKIP**	**Kategori**	**BB**	**BB**	**BB**	**11.775.000.000**	**BB**	**11.931.200.000**	**BB**	**12.260.000.000**	**A**	**12.505.000.000**	**A**	**12.760.000.000**	**A**	**61.231.200.000**	
	Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**Nilai Evaluasi SAKIP**	**Kategori**	**BB**	**BB**	**BB**	**11.775.000.000**	**BB**	**11.931.200.000**	**BB**	**12.260.000.000**	**A**	**12.505.000.000**	**A**	**12.760.000.000**	**A**	**61.231.200.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu	%	100	100	100	11.775.000.000,00	100	##############	100	##############	100	##############	100	12.760.000.000,00	100	61.231.200.000,00	
	Tujuan : Meningkatnya status desa di Provinsi Bengkulu	**Persentase peningkatan status desa mandiri**	**%**	**0,67**	**0,82**	**0,97**		**1,12**		**1,27**		**1,42**		**1,49**		**1,49**		
		Persentase peningkatan status desa maju	**%**	**9,62**	**9,99**	**10,37**		**10,74**		**11,11**		**11,48**		**11,86**		**11,86**		
		persentase peningkatan status desa berkembang	**%**	**67,71**	**70,40**	**72,63**	**3.800.000.000**	**74,57**	**3.700.000.000**	**76,81**	**3.900.000.000**	**82,03**	**4.100.000.000**	**84,27**	**4.075.000.000**	**84,27**	**19.575.000.000**	
		persentase penurunan status desa tertinggal	**%**	**21,63**	**18,64**	**16,03**		**13,57**		**10,81**		**5,07**		**2,39**		**2,39**		
		persentase penurunan status desa sangat tertinggal	**%**	**0,37**	**0,15**	**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		
	Sasaran : Meningkatnya fasilitasi peningkatan status desa di Provinsi Bengkulu	**Jumlah peningkatan status desa mandiri**	**Desa**	**9**	**11**	**13**		**15**		**17**		**19**		**20**		**20**		
		Jumlah peningkatan status desa maju	**Desa**	**129**	**134**	**139**		**144**		**149**		**154**		**159**		**159**		
		Jumlah peningkatan status desa berkembang	**Desa**	**908**	**944**	**974**	**3.800.000.000**	**1000**	**3.700.000.000**	**1030**	**3.900.000.000**	**1100**	**4.100.000.000**	**1130**	**4.075.000.000**	**1130**	**19.575.000.000**	
		Jumlah penurunan status desa tertinggal	**Desa**	**290**	**250**	**215**		**182**		**145**		**68**		**32**		**32**		
		Jumlah penurunan status desa sangat tertinggal	**Desa**	**5**	**2**	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		
	PROGRAM PENATAAN DESA :	Persentase Penanganan Penataan Desa	%	100	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	25.000.000	100	225.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase kerjasama desa yang dilaksanakan yang menjadi kewenangan provinsi	%	0	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	500.000.000	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	%	100	100	100	800.000.000	100	700.000.000	100	800.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	4.100.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	%	100	100	100	2.850.000.000	100	2.850.000.000	100	2.950.000.000	100	3.050.000.000	100	3.050.000.000	100	14.750.000.000	
	TOTAL						**15.575.000.000,00**		**##############**		**##############**		**##############**		**16.835.000.000,00**		**80.806.200.000,00**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI BENGKULU

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
		2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tujuan : Meningkatnya capaian kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP**	**B**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**DUKCAPIL**
Sasaran : Meningkatnya capaian kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP**	**B**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**DUKCAPIL**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	persentase layanan administrasi perkantoran	N/A	100%	100%	7.400.000.000,00	100%	7.600.000.000,00	100%	7.800.000.000,00	100%	8.000.000.000,00	100%	8.200.000.000,00	100%	39.000.000.000,00	DUKCAPIL
	Persentase sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	N/A	N/A	N/A		20%		20%		20%		20%		80%		
	Persentase dokumen penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	N/A	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	**Persentase peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil**	**83,97%**	**87,00%**	**91%**	**300.000.000,00**	**92,83%**	**600.000.000,00**	**94,67%**	**600.000.000,00**	**96,33%**	**600.000.000,00**	**97,83%**	**650.000.000,00**	**97,83%**	**2.750.000.000,00**	**DUKCAPIL**
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	**Persentase peningkatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil**	**83,97%**	**87,00%**	**91%**	**300.000.000,00**	**92,83%**	**600.000.000,00**	**94,67%**	**600.000.000,00**	**96,33%**	**600.000.000,00**	**97,83%**	**650.000.000,00**	**97,83%**	**2.750.000.000,00**	**DUKCAPIL**
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase wajib KTP yang telah melakukan perekaman KTP-el di Provinsi Bengkulu	99%	99,00%	99%	150.000.000,00	99,00%	250.000.000,00	99,00%	250.000.000,00	99,00%	250.000.000,00	99,00%	300.000.000,00	99,00%	1.200.000.000,00	DUKCAPIL
	Persentase kepemilikan KIA bagi anak usia 0-16 tahun di Provinsi Bengkulu	49,44%	49,75%	50%		60,00%		70,00%		80,00%		90,00%		90,00%		
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 Tahun	97%	97%	97%	100.000.000,00	98,00%	250.000.000,00	99,00%	250.000.000,00	99,00%	250.000.000,00	99,00%	250.000.000,00	99,00%	1.100.000.000,00	DUKCAPIL
	Persentase Kepemilikan akta kematian pada semua penduduk meninggal yang dilaporkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan menikah yang dilaporkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Kepemilikan akta perceraian pada semua individu bercerai yang dilaporkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK)	**Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) perangkat daerah provinsi Bengkulu**	**8,33%**	**11,11%**	**19,44%**	**-**	**30,56%**		**41,67%**		**41,67%**		**41,67%**		**42%**	**-**	**DUKCAPIL**
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan PIAK	8,33%	11,11%	19,44%	50.000.000,00	30,56%	100.000.000,00	41,67%	100.000.000,00	41,67%	100.000.000,00	41,67%	100.000.000,00	42%	450.000.000,00	DUKCAPIL
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	50.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	450.000.000,00	DUKCAPIL
					7.750.000.000,00		**8.300.000.000,00**		**8.500.000.000,00**		**8.700.000.000,00**		**8.950.000.000,00**		**42.200.000.000,00**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BENGKULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS PERHUBUNGAN																		
1.	**Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD**	**Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan**		**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan**		**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	10.559.048.300	100	10.914.054.300	100	11.079.054.300	100	11.089.054.300	100	11.197.054.300	100	54.838.265.500	Dishub
2.	**Tujuan : Meningkatnya pemenuhan pengembangan dan pelayanan transportasi**	**Persentase pemenuhan pengembangan dan pelayanan transportasi**	**%**	**54,8**	**59,4**	**61,4**		**64,5**		**65,8**		**67,3**		**68,7**		**68,7**		
	Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Fasilitas, Pelayanan dan Dokumen Transportasi	**Persentase Pemenuhan Fasilitas Perhubungan Darat**	**%**	**36,38**	**36,38**	**36,50**		**40,00**		**41,50**		**44,00**		**46,00**		**46,00**		
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan	%	72,75	72,75	73,00	442.500.000	75,00	700.000.000	77,00	840.000.000	80,00	1.030.000.000	82,00	1.260.000.000	82,0	4.272.500.000	Dishub
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana terminal	%	0	0			5,00		6,00		8,0		10,00		10,00		
	Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Fasilitas, Pelayanan dan Dokumen Transportasi	**Persentase pemenuhan fasilitas perhubungan laut dan penyeberangan**	**%**	**52,50**	**70,00**	**75,00**		**75,00**		**75,00**		**75,00**		**75,00**		**75,00**		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelabuhan regional	%	55,00	70,00	70,00	0	70,00	45.000.000	70,00	60.000.000	70,00	60.000.000	70,00	45.000.000	70	210.000.000	Dishub
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan	%	50	70	80	0	80	25.000.000	80		80		80	25.000.000	80,00	50.000.000	Dishub
	Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Fasilitas, Pelayanan dan Dokumen Transportasi	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Publik Sektor Perhubungan**	**%**	**54,7**	**55,84**	**58,50**		**62,00**		**65,50**		**69,00**		**72,50**		**72,50**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Pelayanan Publik Bidang LLAJ	%	41,67	41,67	45,00	82.500.000	50	125.000.000	55	190.000.000	60	190.000.000	65	170.000.000	65	610.000.110	Dishub
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Publik Bidang Pelayaran	%	67,68	70,00	72,00	55.000.000	74	52.500.000	76	80.000.000	78	80.000.000	80	75.000.000	80	763.500.000	Dishub
	Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Fasilitas, Pelayanan dan Dokumen Transportasi	**Persentase Pemenuhan Dokumen Transportasi**	**%**	**75,56**	**75,56**	**75,56**		**81,11**		**81,11**		**81,11**		**81,11**		**81,11**		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pemenuhan dokumen transportasi darat	%	66,67	66,67	66,67	0	83,33	225.000.000	83,33	0	83,33	30.000.000	83,33	0	83,33	255.000.000	Dishub
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase pemenuhan dokumen transportasi Perkeretaapian	%	100	100	100	27.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	227.000.000	Dishub
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pemenuhan dokumen transportasi pelayaran	%	60,00	60,00	60,00	60.500.000	60,00	85.500.000	60,00	100.000.000	60,00	130.000.000	60,00	100.000.000	60,00	476.000.000	Dishub
TOTAL (APBD)							**11.226.548.300**		**12.197.054.300**		**12.399.054.300**		**12.659.054.300**		**12.897.054.300**		**61.378.765.500**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK																			
			Tujuan : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kominfotik Prov. Bengkulu**	**B**	**B**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
			Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kominfotik Prov. Bengkulu**	**B**	**B**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	12.012.500.000	100%	11.714.500.000	100%	12.007.249.400	100%	12.007.249.400	100%	12.012.249.400	100%	59.753.748.200	
			Tujuan : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	**Indeks Keterbukaan Informasi Publik**	**50-60**	**60-65**	**60-65**		**65-75**		**65-75**		**75-85**		**75-85**		**75-85**		
			Sasaran : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	**Indeks Keterbukaan Informasi Publik**	60%	60%	62%		64%		66%		68%		70%		70%		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	70 Persen	70 Persen	70 Persen	4.034.000.000	75 Persen	4.034.000.000	75 Persen	2.685.000.000	80 Persen	2.785.000.000	100 Persen	3.035.000.000	100 Persen	16.573.000.000	
			Tujuan : Meningkatnya pelaksanaan e-Government (SPBE)	**Nilai Indeks e- Government (SPBE)**	**2,6**	**2,9**	**3.0**		**3,1**		**3,2**		**3,3**		**3,4**		**3,4**		
			Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Layanan Pemerintahan Berbasis Elektonik	**Persentase Regulasi yang disusun dalam rangka pelaksanaan SPBE**	**100**	**100**	**20-40**		**40-60**		**60-75**		**75-80**		**75-80**		**75-80**		
				Persentase Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	**60 Persen**	**60 Persen**	**70 Persen**		**75 Persen**		**80 Persen**		**85 Persen**		**90 Persen**		**90 Persen**		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase ketersediaan infrastruktur TIK.	60 Persen	50 Persen	50 Persen	9.503.500.000	55 Persen	2.801.500.000	58 Persen	3.397.750.600	60 Persen	3.572.750.600	65 Persen	3.577.750.600	65 Persen	22.853.251.800	
				Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi	60 Persen	50 Persen	50 Persen		55 Persen		58 Persen		60 Persen		65 Persen		65 Persen		
			Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas Penyelenggara Statistik Sektoral	**Persentase data statistik sektoral yang terkelola**	**100%**	**70%**	**75%**		**75%**		**80%**		**85%**		**90%**		**90%**		
			Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas data statistik sektoral yang berkualitas	**Persentase OPD yang menggunakan dan mengelola data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**100%**	**70%**	**75%**		**75%**		**80%**		**85%**		**90%**		**90%**		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	70%	70%	75%	32.000.000	75%	82.000.000	80%	60.000.000	85%	110.000.000	90%	110.000.000	90%	394.000.000	
			Tujuan : Meningkatnya Pelaksanaan Persandian	**Nilai Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian (Indeks Persandian)**	**60**	**65**	**67,5**		**70**		**72,5**		**75**		**77,5**		**77,5**		
			Sasaran : Meningkatnya tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian	**Persentase kenaikan tata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian**	**60**	**65**	**2,5**		**5**		**7,5**		**10**		**12,5**		**12,5**		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	N/A	8%	19%	58.000.000	39%	58.000.000	58%	100.000.000	78%	125.000.000	100%	215.000.000	100%	556.000.000	
			TOTAL (APBD)					**25.640.000.000,00**		**18.840.000.000,00**		**18.300.000.000,00**		**18.650.000.000,00**		**19.000.000.000,00**		**100.130.000.000,00**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BENGKULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS KOPERAS, USAHA KECIL DAN MENENGAH																	
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dalam Rangka Pencapaian Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Government)	**Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu**	**BB**	**BB**	**BB**	**11.000.000.000**	**BB**	**11.250.000.000**	**BB**	**11.500.000.000**	**A**	**11.750.000.000**	**A**	**12.000.000.000**	**A**	**57.500.000.000**	
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kantor	**Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu**	**BB**	**BB**	**BB**	**11.000.000.000**	**BB**	**11.250.000.000**	**BB**	**11.500.000.000**	**A**	**11.750.000.000**	**A**	**12.000.000.000**	**A**	**57.500.000.000**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	11.000.000.000	100%	11.250.000.000	100%	11.500.000.000	100%	11.750.000.000	100%	12.000.000.000	100%	57.500.000.000	
	Tujuan: Meningkatnya Kontribusi Sektor Koperasi dan UMKM dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah	**Pertumbuhan Sektor Koperasi terhadap PDRB**	**5,54%**	**5,6%**	**5,7%**	**1.700.000.000**	**5,8%**	**1.900.000.000**	**5,8%**	**2.100.000.000**	**5,8%**	**2.300.000.000**	**5,9%**	**2.500.000.000**	**5,9%**	**10.500.000.000**	
		Pertumbuhan Sektor UMKM terhadap PDRB	**-13,54 %**	**5,6%**	**5,7%**		**5,8%**		**5,8%**		**5,8%**		**5,9%**		**5,9%**		
		Kontribusi Sektor Koperasi terhadap PDRB	**4,9%**	**5%**	**5,2%**		**5,3%**		**5,3%**		**5,4%**		**5,5%**		**5,5%**		
		Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB	**19%**	**19,5%**	**20%**		**20,0%**		**20,5%**		**21,0%**		**21,5%**		**21,5%**		
	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Koperasi	**Indikator Sasaran: Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi**	**6,36%**	**7,50%**	**8%**	**700.000.000**	**10%**	**700.000.000**	**12%**	**700.000.000**	**12%**	**700.000.000**	**14%**	**700.000.000**	**70%**	**3.500.000.000**	
		Pertumbuhan Koperasi Modern	**0,2%**	**0,2%**	**0,2%**		**0,2%**		**0,2%**		**0,3%**		**0,3%**		**1,6%**		
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Pelayanan Perizinan USP Binaan Provinsi	40%	50%	80%	150.000.000	80%	150.000.000	80%	150.000.000	85%	150.000.000	85%	150.000.000	85%	750.000.000	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Binaan Provinsi	100%	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi binaan Provinsi dan UMKM yang dididik dan dilatih	100%	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.000.000.000	
	Program Pemberdayaan dan Perlidungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	100%	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	750.000.000	
	Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas UMKM	**Indikator Sasaran: Pertumbuhan Omzet UMKM**	**-15,6%**	**3%**	**3%**	**1.000.000.000**	**6%**	**1.200.000.000**	**6%**	**1.400.000.000**	**8%**	**1.600.000.000**	**10%**	**1.800.000.000**	**33%**	**7.000.000.000**	
		Pertumbuhan Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	**NA**	**NA**	**4%**		**4%**		**4%**		**4%**		**4%**		**20%**		
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Pendampingan dan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	0,10%	0,10%	0,10%	300.000.000	0,20%	400.000.000	0,50%	450.000.000	0,60%	500.000.000	0,60%	500.000.000	2%	2.150.000.000	
	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu	10%	10%	10%	700.000.000	15%	800.000.000	15%	950.000.000	20%	1.100.000.000	25%	1.300.000.000	85%	4.850.000.000	
						12.700.000.000,00		**13.150.000.000,00**		**13.600.000.000,00**		**14.050.000.000,00**		**14.500.000.000,00**		**68.000.000.000,00**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PANGAN PROVINSI BENGKULU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung
						Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1			2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																				
			Tujuan : Meningkatnya tata kelola Kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP DPMPTSP**	**Niai**	**BB**	**A**	**A**	**12.700.000.000,00**	**A**	**12.901.700.000**	**A**	**13.109.396.500**	**A**	**13.400.000.000**	**A**	**13.475.500.000**	**A**	**65.586.596.500**	**DPMPTSP**
			Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP DPMPTSP**	**Nilai**	**BB**	**A**	**A**	**12.700.000.000,00**	**A**	**12.901.700.000**	**A**	**13.109.396.500**	**A**	**13.400.000.000**	**A**	**13.475.500.000**	**A**	**65.586.596.500**	**DPMPTSP**
			Program : Penunjang urusan Pemerintah daerah provinsi	Nilai persentase administrasi yg dilaksanakan	Persen	100%	100%	100%	12.700.000.000,00	100%	12.901.700.000	100%	13.109.396.500	100%	13.400.000.000	100%	13.475.500.000	100%	65.586.596.500	DPMPTSP
			Tujuan : Meningkatnya Investasi	**Nilai Realisasi Investasi**	**Trilyun**	**8,1 T**	**8,1 T**	**8,66 T**	**300.000.000,00**	**8,92 T**	**698.300.000**	**9,18 T**	**790.603.500**	**9,46 T**	**800.000.000**	**9,74 T**	**850.000.000**	**9,74 T**	**3.438.903.500**	**DPMPTSP**
			Sasaran : Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	**Nilai realisasi Investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)**	**Trilyun**	**8,1**	**8,1 T**	**8,66 T**	**300.000.000,00**	**8,92 T**	**698.300.000**	**9,18 T**	**790.603.500**	**9,46 T**	**800.000.000**	**9,74 T**	**850.000.000**	**9,74 T**	**3.798.300.000**	**DPMPTSP**
			Program : Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Cakupan deregulasi investasi	Persen	100	100	100	100.000.000,00	100	198.300.000	100	240.603.500	100	100.000.000	100	100.000.000	100	1.098.300.000	DPMPTSP
			Program : Promosi Penanaman Modal	Jumlah Minat Investor	Investor	20	20	25	100.000.000,00	25	300.000.000	25	350.000.000	25	500.000.000	25	450.000.000	125	1.700.000.000	DPMPTSP
			Program : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang dilakukan pengendalian	Persen	100%	100%	100%	50.000.000,00	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	200.000.000	100%	550.000.000	DPMPTSP
			Program : Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan informasi penanaman modal	Persentase	100	100	100	50.000.000,00	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	450.000.000	DPMPTSP
			Tujuan : Meningkatnya pelayanan publik	**Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP**	**Nilai**	**B (3,86)**	**B (3,86)**	**B (3,90)**	**200.000.000,00**	**B (3,92)**	**250.000.000**	**B (3,94)**	**250.000.000**	**B (3,96)**	**250.000.000**	**A-(4.01)**	**424.500.000**	**A-(4.01)**	**1.374.500.000**	**DPMPTSP**
			Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Publik	**Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP**	**Nilai**	**B (3,86)**	**B (3,86)**	**B (3,90)**	**200.000.000,00**	**B (3,92)**	**250.000.000**	**B (3,94)**	**250.000.000**	**B (3,96)**	**250.000.000**	**A-(4.01)**	**424.500.000**	**A-(4.01)**	**1.374.500.000**	**DPMPTSP**
			Program : Pelayanan Penanaman Modal	Indek Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan penanaman modal	Indek	89,58	90	91	200.000.000,00	92	250.000.000	93	250.000.000	94	250.000.000	95	424.500.000	95	1.374.500.000	DPMPTSP
			JUMLAH						**13.200.000.000,00**		**13.850.000.000**		**14.150.000.000**		**14.450.000.000**		**14.750.000.000**		**70.400.000.000**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BENGKULU

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																			
			Tujuan : Meningkatnya tata kelola Kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP**	**BB**	**B**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
			Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP**	**BB**	**B**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase administrasi perkantoran yang dilaksanakan	100%	100%	100%	11.500.000.000	100%	11.750.000.000	100%	12.000.000.000	100%	12.250.000.000	100%	12.500.000.000	100%	60.000.000.000	Dispora
			Tujuan : Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	**Jumlah pemuda yang aktif dalam pembangunan**	**96.724 orang**	**96.724 orang**	**5000**		**5000**		**5000**		**5000**		**5000**		**121.284**		
			Sasaran : Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	**Jumlah pemuda yang aktif dalam pembangunan**	**96.724 orang**	**96.724 orang**	**5000**		**5000**		**5000**		**5000**		**5000**		**121.284**		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda kader, pelopor dan kreatif yang aktif dalam pembangunan	96.724 orang	96.724 orang	5000	1.500.000.000	5000	1.700.000.000	5000	1.700.000.000	5000	1.700.000.000	5000	1.700.000.000	121.284	8.300.000.000	Dispora
			Tujuan : Meningkatnya Prestasi Olahraga (tingkat pelajar/Mahasiswa)	**Persentase nomor lomba yang dimenangkan tingkat nasional/ wilayah**		**55%**	**60%**		**60%**		**60%**		**60%**		**60%**		**60%**		
			Sasaran : Meningkatnya Prestasi Olahraga (tingkat pelajar/Mahasiswa)	**Persentase nomor lomba yang dimenangkan tingkat nasional/ wilayah**		**55%**	**60%**		**60%**		**60%**		**60%**		**60%**		**60%**		
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional/wilayah		56 medali emas	15 medali emas	9.700.000.000	15 medali emas	10.200.000.000	15 medali emas	10.700.000.000	15 medali emas	30.700.000.000	15 medali emas	30.700.000.000	75 medali emas	92.000.000.000	Dispora
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif		100	100	800.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.600.000.000	Dispora
			JUMLAH					**23.500.000.000**		**23.850.000.000**		**24.600.000.000**		**44.850.000.000**		**45.100.000.000**		**161.900.000.000**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI BENGKULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH																	
	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja PD	**Nilai evaluasi sakip PD**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**A**		
	Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu	**Nilai Evaluasi Sakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**A**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Administrasi perkantoran yang dilaksanakan	100%	100%	100%	12.600.000.000	100%	12.850.000.000	100%	13.100.000.000	100%	13.250.000.000	100%	13.400.000.000	100%	65.200.000.000	
	Tujuan: Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	**11%**	**12%**	**13%**		**14%**		**15%**		**16%**		**17%**		**17%**		
	Sasaran: Peningkatan budaya literasi masyarakat	**Persentase Peningkatan Jumlah pengunjung perpustakaan**	**0,371**	**0,371**	**2,333**		**4,00%**		**3,85%**		**3,70%**		**7,14%**		**4,00%**		
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	**0,00011**	**0,00011**	**0,00012**		**0,00015**		**0,00017**		**0,00018**		**0,00020**		**0,00020**		
		Persentase Ketermanfaatkan Perpustakaan oleh Masyarakat	**0,37%**	**0,37%**	**1,24%**		**1,28%**		**1,33%**		**1,38%**		**1,48%**		**1,48%**		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,045	0,045	0,053		0,061		0,069	300.000.000	0,077	400.000.000	0,085	500.000.000	0,085	1.600.000.000	
		Persentase tenaga perpustakaan yang bersertifikasi	0.01%	0.01%	0.0123%		0.0148%		0.0168%		0.018%		0.019%		0.019%	-	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	NA	1,33	3,17	150.000.000	4,87	250.000.000	6,46		7,93		9,16		9,16	-	
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	60	60	65		70		75		80		85		85	-	
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi yang dilestarikan	0,66%	0,66%	0,84%	75.000.000	0,97%	100.000.000	1,08%	100.000.000	1,16%	100.000.000	1,23%	100.000.000	1,23%	475.000.000	
	Tujuan: Meningkatnya Pengembangan dan sistem administrasi Kearsipan	**Jumlah arsip yang terkumpul, diselamatkan dan dilestarikan**	21672 berkas/ box/ bendel	**21672 berkas/ box/ bendel**	**21772 berkas/ box/ bendel**		**21872 berkas/ box/ bendel**		**21972 berkas/ box/ bendel**		**22072 berkas/ box/ bendel**		**22172 berkas/ box/ bendel**		**22172 berkas/ box/ bendel**		
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan	**Persentase unit kearsipan yang tertib arsip**	**30%**	**30%**	**35%**		**45%**		**55%**		**65%**		**75%**		**75%**		
		Persentase Tingkat ketersediaan arsip	**61.14%**	**63%**	**65%**		**67%**		**69%**		**71%**		**73%**		**73%**		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baik	15%	15%	18.75%	150.000.000	25%	150.000.000	31.25%	150.000.000	43.75%	150.000.000	56.25%	150.000.000	56.25%	750.000.000	
				Persentase ormas/orpol yang melakukan pengelolaan kearsipan yang baik	15%	15%	18.75%		25%		31.25%		43.75%		56.25%		56.25%		
				Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	NA	NA	1.66%		3.32%	10.000.000	4.98%	10.000.000	6.64%	10.000.000	8.30%	10.000.000	8.30%	40.000.000	
				Persentase arsip yang telah dibuatkan daftar arsip	89,47 persen	89,47 persen	90%		91%	40.000.000	92%	40.000.000	93%	40.000.000	95%	40.000.000	95%	160.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan	NA	16.15%	16.5%	50.000.000	17%	75.000.000	18%	75.000.000	19%	75.000.000	20%	75.000.000	20%	350.000.000	
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase arsip yang diizinkan penggunaannya	100%	100%	100%	25.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	225.000.000	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BENGKULU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2020	Tahun 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	
	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola OPD	**Indikator Tujuan : Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
	Sasaran : Meningkatnya tata kelola OPD	**Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100	13.198.673.650	100	11.253.004.650	100	11.549.282.731	100	11.499.392.765	100	11.559.180.549	100	59.059.534.345	
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	70%	75%	78		80		83		85		90		90		
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	50%	55%	60	-	65		70		75		80		80		
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	100%	100%	100		100		100		100		100		100		
	Tujuan : Tercapainya Pengurangan Risiko Bencana di daerah Rawan Bencana	**INDEKS RISIKO BENCANA**	**163,29**	**163,20**	**163,15**		**163,10**		**163,08**		**163,03**		**163,00**		**160,98**		
	SASARAN : MENURUNNYA RISIKO BENCANA	**INDEKS RISIKO BENCANA**	**163,29**	**163,20**	**163,15**		**163,10**		**163,08**		**163,03**		**163,00**		**163,00**	**-**	
	Program : PENANGGULANGAN BENCANA	1. Menurunnya Indeks Ancaman	10,3	10,3	10,3	1.183.656.500	10,3	1.100.000.000	10,3	950.000.000	10,3	1.250.000.000	10,3	1.125.000.000	10,3	5.608.656.500	
		2. Menurunnya Indeks Jiwa Terpapar	10,8	10,8	10,8		10,8		10,8		10,8		10,8		10,8		
		3. Menurunnya Indeks kerugian	12,9	12,89	12,87		12,86		12,85		12,84		12,83		12,83		
		4. Meningkatnya Indeks Kapasitas	1,49	1,49	1,49		1,49		1,49		1,49		1,51		1,51		
	JUMLAH					**14.382.330.150**		**12.353.004.650**		**12.499.282.731**		**12.749.392.765**		**12.684.180.549**		**64.668.190.845**	

TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP**		**BB**	**BB**	**BB**	**14.208.578.900**	**BB**	**14.359.978.900**	**BB**	**14.651.794.900**	**A**	**14.922.978.900**	**A**	**15.127.978.900**	**A**	**15.127.978.900**	
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP**		**BB**	**BB**	**BB**	**14.208.578.900**	**BB**	**14.359.978.900**	**BB**	**14.651.794.900**	**A**	**14.922.978.900**	**A**	**15.127.978.900**	**A**	**15.127.978.900**	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	14.208.578.900	100	14.359.978.900	100	14.651.794.900	100	14.922.978.900	100	15.127.978.900	100	15.127.978.900	
	Persentase Dokumen Perencanaan , Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap Pertumbuhan ekonomi daerah	**Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB**	**%**	**0,22**	**1,06**	**3,00**		**3,20**		**3,40**		**3,60**		**3,80**		**3,80**		
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan (NTN) dan Pembudidaya Ikan (NTPi)	**Nilai Tukar Nelayan**		**110**	**110**	**109**		**109**		**110**		**112**		**113**		**113**		
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		**132**	**132,56**	**133,56**		**134,56**		**135,56**		**136,56**		**137,56**		**137,56**		
Sasaran : Meningkatnya produksi perikanan	**Produksi Perikanan Tangkap**	**73.494-75.618**	**72.750**	**75.618**	**78.123**		**81.029**		**84.131**		**87.437**		**90.959**		**90.959**		
	Produksi Perikanan Budidaya		**226.885**	**228.584**	**230.045**		**231.164**		**232.957**		**233.108**		**234.759**		**234.759**		
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelompok	NA	NA	25	113.000.000	25	200.000.000	25	220.000.000	25	220.000.000	25	220.000.000	25	860.000.000	P2HP
PEROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat Tangkap	%	10	20	25	3.700.000.000	30	2.995.000.000	35	1.950.000.000	40	2.020.000.000	45	2.060.000.000	45	12.725.000.000	
	Persentase Pemilik Kapal yang belum Mempunyai Izin Usaha Perikanan Tangkap	%	20	23	25		28		30		32		35		35		
	Persentase Kapal yang Mempunyai Alat Bantu Penangkapan Ikan Sesuai Standar	%	80,37	81,97	83,60		85,27		86,97		88,70		89,37		86,37		
	Persentase Peningkatan Jumlah Nelayan yang di Tingkatkan Keterampilannya	%	5	5	10		15		20		25		30		30		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Pembudidaya Ikan yang Memiliki Izin	%	20	25	30	1.363.000.000	35	460.000.000	40	565.000.000	45	525.000.000	45	525.000.000	220	3.438.000.000	
	Persentase Pembudidaya Ikan yang Menggunakan Pakan dan Bibit Ikan Unggul	%	9,4	10,70	10,90		11,30		13,50		25,00		30,00		101,40		
	Persentase Peningkatan Luas Lahan Perikanan Budidaya	%	17,14	18,29	18,29		19,20		19,50		20,00		20,00		115,28		
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Biota Laut yang Telah dilakukan Upaya Pelestarian	%	50	52,45	52,69	150.000.000	53,69	100.000.000	54,69	180.000.000	55,69	180.000.000	56,69	210.000.000	56,69	1.601.000.000	
	Luas Vegetasi Pantai yang di Konservasi	%	9,35	14,02	20,5		22,7		24,5		26,2		26,5		31,5		
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan	%	30	35	35	300.000.000	46,23	315.000.000	46,34	165.000.000	47,34	165.000.000	48,34	165.000.000	258,25	1.435.000.000	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
DINAS PARIWISATA

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
		2020	2021	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	T	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tujuan : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**A**		
Sasaran : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**A**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	93,33%	98%	100	13.173.908.600	100	13.545.000.000	100	13.875.000.000	100	14.280.000.000	100	14.640.000.000	100%	############	
	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi baik	39,53%	50%	55		60		65		70		80		80%		
	Persentase ASN Yang ditingkatkan Kompetensinya	0	0	3		4		4		4		4		15%		
	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengenggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	100		100		100		100		100		100%		
Tujuan :Meningkatnya pertumbuhan pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah	**Persentase pertumbuhan pariwisata terhadap PDRB**	**1,82%**	**2,2%**	**2,2**		**2,4**		**2,6**		**2,8**		**3,2**		3,2%		
Sasaran : Berkembangnya Sektor Pariwisata	**Jumlah wisatawan**	**502.765 orang**	**445.500 org**	**1.500.000**		**1.650.000**		**1.760.000**		**1.945.000**		**2.100.000**		2.100.000 orang		
	Rata-rata lama tinggal	**1,23 hari**	**2.18 hari**	**2,1**		**2,2**		**2,4**		**2,6**		**2,8**		2.8 hari		
	Tingkat hunian hotel	**45%**	**63%**	**55%**		**58**		**62**		**65**		**67**		67%		
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwista	16%	18%	18%	1.275.000.000	20	1.520.000.000	20	1.400.000.000	22	1.435.000.000	25	1.305.000.000	87%	6.860.000.000	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Media Promosi Wisata,	25%	27%	30%	1.856.091.400	35	3.450.000.000	40	3.450.000.000	43	3.550.000.000	45	3.810.000.000	45%	16.116.091.400	
	Persentase Peningkatan Frekuensi Promosi Wisata	23%	25%	25%		30		33		36		40		40%		
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan HAKI yang dikembangkan	15%	18%	20%	185.000.000	20	250.000.000	30	200.000.000	35	0	40	60.000.000	40%	695.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kompetensinya	27,5%	23%	25%	560.000.000	30	510.000.000	35	750.000.000	50	810.000.000	60	660.000.000	60%	3.290.000.000	
					17.050.000.000		**19.275.000.000**		**19.675.000.000**		**20.075.000.000**		**20.475.000.000**		############	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
DINAS TPHP

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
				2020	2021	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
(1)	(1)	(2)		(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	**Tujuan PD: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD**	**Nilai Evaluasi SAKIP**	**Predikat**		**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
	Sasaran PD: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP**	**Predikat**		**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						39.574.741.593	19	39.889.400.338	19	40.251.004.520	19	41.433.695.237	19	41.137.972.575	76	202.286.814.262	
		Persentase Pelaksanaan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	%	80,00	82,00	84,00		86,00		88,00		90,00		92,00		80,00		
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		30,00		
		Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang disusun	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	**Tujuan: Meningkatnya Kesejahteraan Petani**	**Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan**	**Nilai**	**95,53**	**96,01**	**96,49**	**-**	**96,97**	**-**	**97,45**	**-**	**97,94**	**-**	**98,43**	**-**	**98,43**		
		Nilai Tukar Petani Hortikultura	**Nilai**	**102,56**	**103,08**	**103,59**	**-**	**104,11**	**-**	**104,63**	**-**	**105,15**	**-**	**105,68**	**-**	**105,68**		
		Nilai Tukar Petani Perkebunan	**Nilai**	**118,02**	**119,20**	**120,39**	**-**	**121,60**	**-**	**122,81**	**-**	**124,04**	**-**	**125,28**	**-**	**125,28**		
3	**Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan sub sektor pertanian dan perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah**	**Persentase Pertumbuhan PDRB Subsektor Tanaman Pangan, Hortukultura dan Perkebunan**	**Persen**	**2,11**	**1,36**	**1,36**	**-**	**1,37**	**-**	**1,37**	**-**	**1,37**	**-**	**1,37**	**-**	**1,37**		
	Sasaran: Meningkatnya Produksi Komoditas Tanaman Pangan Unggulan	**Produksi Padi**	**Ton**	**292.815**	**294.279**	**295.750**	**-**	**297.229**	**-**	**298.715**	**-**	**300.209**	**-**	**301.710**	**-**	**1.493.614**		
		Produksi Jagung	**Ton**	**89.397**	**90.291**	**91.194**	**-**	**92.106**	**-**	**93.027**	**-**	**93.957**	**-**	**94.897**	**-**	**465.180**		
		Produksi Bawang	**Ton**	**587**	**599**	**611**	**-**	**623**	**-**	**635**	**-**	**648**	**-**	**661**	**-**	**3.178**		
		Produksi Cabai	**Ton**	**51.113**	**51.624**	**52.140**	**-**	**52.662**	**-**	**53.188**	**-**	**53.720**	**-**	**54.257**	**-**	**265.968**		
		Produksi Jeruk	**Ton**	**16.215**	**16.539**	**16.870**	**-**	**17.207**	**-**	**17.552**	**-**	**17.903**	**-**	**18.261**	**-**	**87.793**		
		Produksi Kopi	**Ton**	**62.507**	**63.757**	**65.032**	**-**	**66.333**	**-**	**67.660**	**-**	**69.013**	**-**	**70.393**	**-**	**338.431**		
		Produksi Kelapa Sawit Rakyat	**Ton**	**735.221**	**749.925**	**764.924**	**-**	**780.222**	**-**	**795.827**	**-**	**811.743**	**-**	**827.978**	**-**	**3.980.695**		
		Produksi Karet Rakyat	**Ton**	**85.238**	**86.090**	**86.951**	**-**	**87.821**	**-**	**88.699**	**-**	**89.586**	**-**	**90.482**	**-**	**443.539**		
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						6.092.000.000,00		3.250.000.000		3.400.000.000		2.750.000.000		3.550.000.000		19.042.000.000	
		Persentase Petani yang mendapatkan alokasi Pupuk bersubsidi	Persen	47,20	49,56	52,04		52,56		53,08		53,61		54,15		54,15		
		Persentase pemenuhan kebutuhan Alsintan	Persen	9,24	10,90	11,93		16,07		18,14		34,70		51,26		51,26		
		Persentase kelompok tani yang menggunakan bibit unggul (Padi, Jagung, Bawang, Cabai, Jeruk, Kopi, Kelapa Sawit dan Karet)	Persen	30,40	30,40	47,10		51,34		51,34		51,34		51,34		51,34		

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung Jawab
				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
						T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	
(1)	(1)	(2)		(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Persentase Luas Tanaman Bawang, Cabai dan Jeruk yang direhabilitasi/intensifikasi/ekstensifikasi	Persen	6,77	6,77	10,00		12,00		15,00		20,00		25,00		25,00		
		Persentase Luas Tanaman Kopi, Kelapa Sawit, dan Karet yang direhabilitasi/intensifikasi/ekstensifikasi	Persen	3,74	4,00	4,00		5,00		7,00		10,00		11,00		11,00		
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						8.038.509.200,00		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000		16.438.509.200	
		Indeks Pertanaman Padi	Nilai	1,27	1,27	1,3	8.038.509.200,00	1,31	2.100.000.000,00	1,33	2.100.000.000,00	1,35	2.100.000.000,00	1,37	2.100.000.000,00	1,37	16.438.509.200,00	
		Total luas Areal rehabilitasi/intensifikasi/ekstensifikasi Tanaman Kopi, Kelapa Sawit, dan Karet	Persen	3,74	4,00	9,00		10,00		10,00		10,00		11,00		50,00		
IV	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								150.000.000		165.000.000		175.000.000		180.000.000		670.000.000	
		Persentase luas lahan sawah yang memiliki asuransi	Persen	-	-	-		5,00		7,00		8,00		10,00				
		Persentase kerusakan Puso Tanaman Padi dan Jagung Karena OPT	Persen	-	-	-		2,00		2,00		2,00		2,00				
		Persentase kerusakan Puso Tanaman Bawang, Cabai dan Jeruk Karena OPT	Persen	-	-	-		2,00		2,00		2,00		2,00				
V	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Fasilitasi Usaha Perkebunan besar swasta/nasional	Jenis	1	1	3	40.000.000,00	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	440.000.000	
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						1.027.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.627.000.000	
		Persentase Peningkatan Skor Kelompok Tani Tanaman Pangan	Persen	n/a	n/a	2,50		3		3		3		3				
		Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani Tanaman Pangan	Persen	n/a	n/a	10,00		10		10		10		10				
		Persentase Peningkatan Skor Kelompok Tani Hortikultura	Persen	n/a	n/a	2,50		3		3		3		3				
		Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani Hortikultura	Persen	n/a	n/a	10,00		10		10		10		10				
		Persentase Peningkatan Skor Kelompok Tani Perkebunan	Persen	n/a	n/a	2,50		3		3		3		3				
		Persentase Peningkatan Klas Kelompok Tani Perkebunan	Persen	n/a	n/a	10,00		10		10		10		10				
JUMLAH							**54.772.250.793**		**45.889.400.338**		**46.416.004.520**		**46.958.695.237**		**47.467.972.575**		**241.504.323.462**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
DINAS ESDM

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026				
			2020	2021	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	**Nilai SAKIP OPD**		**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
Sasaran 1 : Meningkatkan tata kelola kinerja OPD	**Nilai SAKIP OPD**		**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
Program : Penunjang Urusan PD	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	10.150.000.000	100	10.298.100.000	100	10.473.100.000	100	10.563.100.000	100	10.783.100.000	100	52.267.400.000	
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	75	75	77		80		82		85		90		90		
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	60	60	62		65		67		70		75		75		
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Tujuan 2 : Meningkatnya akses energi yang handal dan berkeadilan bagi masyarakat	**Rasio elektrifikasi**	**%**	**99,9**	**99,93**	**99.94%**		**99.95%**		**99.96%**		**99.97%**		**99.98%**		**99.99%**	**-**	
Sasaran 2.1 : Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Listrik	**Rasio elektrifikasi PLN**	**%**	**98,95**	**99,05**	**99.15%**		**99.35%**		**99.45%**		**99.65%**		**99.8%**		**99.9%**	**-**	
Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah rumah tangga miskin yang mendapat bantuan listrik	RTM	84 RTM	166	350	300.000.000	600	300.000.000	400	300.000.000	500	350.000.000	500	350.000.000	3050	1.600.000.000	
Tujuan 3 : Meningkatkan kepatuhan badan usaha terhadap aspek perizinan dan keselamatan ketenagalistrikan	**Persentase Badan Usaha yang patuh terhadap aspek Perizinaan dan Keselamatan Ketenagalisrikan**	**%**	**42**	**-**	**44**		**46**		**47**		**49**		**51**		**51**	**-**	
Sasaran 3.1 : Meningkatnya kepatuhan badan usaha terhadap aspek perizinan dan keselamatan ketenagalistrikan	**Persentase Badan Usaha yang patuh terhadap aspek Perizinaan dan Keselamatan Ketenagalisrikan**	**%**	**42**	**-**	**44**		**46**		**47**		**49**		**51**		**51**	**-**	
Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan	Jumlah Badan Usaha yang patuh terhadap aspek Perizinaan dan Keselamatan Ketenagalisrikan	badan usaha	235	-	245	50.000.000	255	50.000.000	265	50.000.000	275	90.000.000	285	100.000.000	285	340.000.000	
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Jumlah Badan Usaha/ Instansi yang patuh terhadap Intruksi Presiden No.13 Tahun 2011 tentang penghematan energi dan air	badan usaha / instansi	-	-	3	250.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	1.450.000.000	
Tujuan 4 : Meningkatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah	**Persentase pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB**	**%**	**3**	**3,1**	**3,2**		**3,3**		**3,4**		**3,5**		**3,6**		**3,6**	**-**	
Sasaran 4.1 : Meningkatkan produksi di sektor pertambangan unggulan	**Persentase Volume Produksi Mineral dan Barubara**	**%**	**1**	**1**	**1,5**		**2**		**2,5**		**3**		**3,5**		**3,5**	**-**	
Program : Pengelolaan Mineral dan Barubara	Jumlah produksi mineral logam dan batubara	Ton	2.500.000	2.700.000	2.900.000	75.000.000	##########	100.000.000	##########	100.000.000	3.300.000	100.000.000	##########	100.000.000	##########	475.000.000	
Program Pengelolaan Mineral dan Barubara	Jumlah produksi mineral bukan logam dan batuan	M3	469.136	475.000	500.000	50.000.000	525000	50.000.000	550000	80.000.000	575000	50.000.000	600000	50.000.000	2.750.000	280.000.000	
Sasaran 4.1 : Meningkatnya produksi di sektor pertambangan unggulan	**Persentase perusahaan Pertambangan yang menerapkan Good Mining Practice**	**%**	**80**	**85**	**90**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**	**-**	

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan / Sasaran / Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir Periode RENSTRA PD		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026				
			2020	2021	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program : Pengelolaan Mineral dan Barubara	Jumlah perusahaan Pertambangan yang menerapkan Good Mining Practice	IUP	13	13	13		13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	100.000.000	13	400.000.000	
Sasaran 4.2 : Meningkatnya penerimaan daerah melalui sektor ESDM	**Persentase Peningkatan Nilai Dana Bagi Hasil**	**%**	**1,5**	**1,8**	**2**		**2,5**	**50.000.000**	**3**	**50.000.000**	**3,5**	**50.000.000**	**4**	**50.000.000**	**4**		
Program : Pengelolaan Mineral dan Barubara	Persentase Peningkatan Nilai Dana Bagi Hasil	%	1,5	1,8	2		2,5	50.000.000	3	50.000.000	3,5	50.000.000	4	50.000.000	4	200.000.000	
Sasaran 4.2 : Meningkatnya penerimaan daerah melalui sektor ESDM	**Persentase peningkatan pendapatan asli daerah sektor ESDM**	**%**	**0,75%**	**0,75%**	**1%**		**2%**		**3%**		**4%**		**5%**		**15%**		
Program : Penunjang Urusan PD Provinsi (UPTD PPL)	Persentase proses Akreditasi laboratorium analisa batubara	%	-	-	25%	150.000.000	75%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	950.000.000	
Program : Pengelolaan Aspek Kegeologian	Persentase kepatuhan terhadap regulasi perizinan air tanah	%	10	10	10	100.000.000	20	175.000.000	40	165.000.000	60	175.000.000	80	290.000.000	80	905.000.000	
Jumlah						**11.125.000.000**		**11.573.100.000**		**11.818.100.000**		**11.978.100.000**		**12.373.100.000**			

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
DINAS PERINDAG

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
			2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tujuan : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD	**NILAI SAKIP**	**Nilai**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**Perindag**
Sasaran : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA OPD	**NILAI SAKIP**	**Nilai**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**			**-**	**Perindag**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Program Penunjang yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	12.350.000.000,00	100	12.595.000.000,00	100	12.825.000.000,00	100	13.065.000.000,00	100	13.350.000.000,00	100	64.185.000.000	Perindag
TUJUAN 1 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	**Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian Terhadap PDRB**	**Persen**	**-3,88**	**1,0**	**3,0**	**13.450.000.000**	**3,2**	**13.845.000.000**	**3,4**	**14.075.000.000**	**3,6**	**14.315.000.000**	**3,8**	**14.550.000.000**	**3,8**	**70.235.000.000**	**Perindag**
SASARAN 1 : MENINGKATNYA NILAI PRODUKSI INDUSTRI	**- Nilai Produksi Industri Besar**	**Rupiah (Milyar)**	**10.900**	**11.000,00**	**11.000,00**	**1.100.000.000**	**11.500,00**	**1.250.000.000**	**11.700,00**	**1.250.000.000**	**12.200,00**	**1.250.000.000**	**12.500,00**	**1.200.000.000**	**12.500,00**	**6.050.000.000**	**Perindag**
	- Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	**Rupiah (Milyar)**	**120,00**	**100,00**	**150,00**		**200,00**		**250,00**		**300,00**		**350,00**		**350,00**		**Perindag**
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	- Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar	Persen	4,76	4,56	6,8	1.000.000.000,00	10,2	1.050.000.000,00	11,1	1.050.000.000,00	16,6	1.050.000.000,00	22,8	1.000.000.000,00	22,8	5.150.000.000	Perindag
	- Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah	Persen	3,5	4	4		4,5		5		5,5		6		6		Perindag
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Nilai Realisasi Investasi Industri	Rupiah (Milyar)	25,90	42,00	63,00	50.000.000	105,00	100.000.000	126,00	100.000.000	210,00	100.000.000	336,00	100.000.000	336,00	450.000.000	Perindag
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Perusahaan industri Dalam Sinas	Persen	6,8	13	18	50.000.000,00	26	100.000.000,00	39	100.000.000,00	55	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	450.000.000	Perindag
TUJUAN 2 : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP	**Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**	**Persen**	**-2,44**	**2**	**2**	**475.000.000**	**2,2**	**605.000.000**	**2,4**	**650.000.000**	**2,6**	**685.000.000**	**2,8**	**745.000.000**	**2,8**	**3.160.000.000**	**Perindag**
SASARAN 2.1 : MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	**Nilai Perdagangan Besar dan Eceran**	**Rupiah (Milyar)**	**2000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**475.000.000**	**5.500,00**	**605.000.000**	**6.000,00**	**650.000.000**	**6.500,00**	**685.000.000**	**7.000,00**	**745.000.000**	**7.000,00**	**3.160.000.000**	**Perindag**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Teknis Pelayanan Admnistrasi Umum yang Dilaksanakan	Kegiatan	3	3	3	65.000.000	3	89.500.000	3	103.500.000	3	118.000.000	3	202.000.000	15	578.000.000	Perindag
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	10	10	20	100.000.000	20	100.000.000	25	125.000.000	30	100.000.000	35	120.000.000	35	545.000.000	Perindag
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Kestabilan Harga	Persen	5,9	5	4,5	175.000.000,00	4	205.000.000,00	4	225.000.000,00	3,5	285.000.000,00	3,6	275.000.000,00	4	1.165.000.000	Perindag
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penyelesaian Pereselisihan Antara Konsumen dan Produsen	Persen	35	40	42	50.000.000,00	44	100.000.000,00	46	100.000.000,00	48	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	450.000.000	Perindag
	Indeks Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang	Persen	N/A	N/A	80		85		87		90		95		95		
SASARAN 2.2 : MENINGKATNYA NILAI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	**NILAI EKSPOR**	**US $ (Juta)**	**130**	**175**	**180**	**150.000.000**	**190**	**200.000.000**	**200**	**200.000.000**	**210**	**200.000.000**	**220**	**250.000.000**	**220**	**1.000.000.000**	**Perindag**
	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI EKSPOR	**Persen**	**NA**	**5**	**5,5**		**6**		**6,5**		**7**		**7,5**		**32,5**	**-**	**Perindag**
Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komuditi Ekspor	Jumlah	7	4	7	150.000.000,00	8	200.000.000,00	8	200.000.000,00	9	200.000.000,00	9	250.000.000,00	11	1.000.000.000	Perindag
JUMLAH						**13.665.000.000,00**		**14.134.500.000,00**		**14.378.500.000,00**		**14.633.000.000,00**		**15.002.000.000,00**		**71.813.000.000,00**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
BAPPEDA

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026				
			2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Nilai SAKIP**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**A**		
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Nilai SAKIP**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**A**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	%	100	100	100	19.021.500.000	100	18.000.000.000	100	18.500.000.000	100	19.000.000.000	100	19.500.000.000	100	94.021.500.000	
	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ASN Yang ditingkatkan kompetensinya	%	75,76	75,76	78,06		80,36		82,66		84,96		87,26		87,26		
	Persentase Layanan Umum perangkat umum yang dilaksanakan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan evaluasi yang disusun	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan	**Nilai Komponen perencanaan, pengukuran dan capaian kinerja pada SAKIP Daerah**	**Nilai**	**51,43**	**53**	**56,8**		**60,8**		**64,8**		**69,3**		**73,3**		**73,3**		
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	**Nilai perencanaan kinerja**	**Nilai**	**24,19**	**24,50**	**25,19**		**26,19**		**27,19**		**28,69**		**29,69**		**29,69**		
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	**Nilai pengukuran kinerja**	**Nilai**	**15,17**	**16,00**	**16,67**		**18,17**		**19,67**		**21,17**		**22,67**		**22,67**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase OPD yang menyusun dokumen PK, IKU, Rencana Aksi	%	100	100	100	175.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	1.525.000.000	
	Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam PK dan IKU yang berorientasi hasil	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase indikator kinerja program dalam PK yang berorientasi hasil	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	2.225.000.000	100	1.600.000.000	100	1.600.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	8.425.000.000	
	Persentase indikator kinerja tujuan dan sasaran dalam Renja yang berorientasi hasil	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase indikator kinerja program dalam Renja yang berorientasi hasil	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase indikator kinerja program yang mendukung capaian indikator kinerja sasaran dan tujuan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis TI	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Sasaran 3 : Meningkatnya capaian target pembangunan	**Nilai pencapaian kinerja**	**Nilai**	**12,07**	**13,00**	**14,94**		**16,44**		**17,94**		**19,44**		**20,94**		**20,94**		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	%	100	100	100	160.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	1.310.000.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	%	100	100	100	2.625.000.000	100	2.000.000.000	100	2.150.000.000	100	2.300.000.000	100	2.450.000.000	100	11.525.000.000	
Sasaran : Meningkatnya indeks inovasi daerah	**Indeks inovasi daerah**	**Predikat**	**Inovatif**	**Inovatif**	**Inovatif**		**Inovatif**		**Inovatif**		**Inovatif**		**Inovatif**				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase OPD dengan kategori inovatif**	**%**	**17,07**	**19,51**	**36,59**		**60,98**		**85,37**		**92,68**		**100,00**		**100**		
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	%	100	100	100	1.275.000.000	100	950.000.000	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.100.000.000	100	5.375.000.000	
						25.481.500.000		**23.100.000.000**		**23.875.000.000**		**24.500.000.000**		**25.225.000.000**		**122.181.500.000**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
BPKD

Tujuan /Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra		Unit Kerja OPD Penanggung
					2022		2023		2024		2025		2026				
			2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	*3*	*4*		*5*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**B**	**B**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**		**B**	**B**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	71.379.777.784,00	100	72.195.977.181,40	100	75.820.778.294,90	100	79.274.216.467,40	100	82.155.315.852,70	100	380.826.065.580	BPKD
Tujuan : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu, Peresentase Perangkat Daerah Yang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Sesuai SAP, Persentase Dokumen Penganggaran Daerah yang ditetapkan Tepat Waktu	%	100	100	100	516.664.872.916	100	390.569.022.819	100	410.904.221.705	100	432.750.783.833	100	455.569.684.347	100	2.206.458.585.620	BPKD
Tujuan : Meningkatnya KualitasTata Kelola Aset Daerah	**Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola dengan akuntabel**	**%**	**79**	**81,89**	**87,5**		**92**		**97**		**100**		**100**		**100**		
Sasaran : Meningkatnya KualitasTata Kelola Aset Daerah	**Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan Baik**	**%**	**79**	**81,89**	**87,5**		**92**		**97**		**100**		**100**		**100**		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Daerah yang diamankan	Unit	1954	1954	1954	4.495.349.300	1954	4.675.000.000	1954	4.075.000.000	1954	2.924.999.700	1954	2.974.999.800	1954	19.145.348.800	BPKD
	Jumlah BMD yang ditertibkan	Unit	204	204	204		204		204		204		204		204		
	Jumlah Aset Daerah yang dimanfaatkan	Unit	100	100	100		100		100		100		100		100		
Tujuan : Meningkatnya kepuasan masyarakat di Bidang Pelayanan Samsat dan Meningkatnya PAD	**Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat dari Kemenpan RB dan Nilai PAD**	**Nilai**	**A-**	**A-**	**A-**				**A-**		**A-**		**A**		**A**		
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat di Bidang Pelayanan Samsat dan Meningkatnya PAD	**Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Samsat dari Kemenpan RB dan Nilai PAD**	**Nilai**	**A-**	**A-**	**A-**				**A-**		**A-**		**A**		**A**		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Nilai PAD	Rupiah	############	############	############	6.210.000.000	###########	7.810.000.000	894.258.289.287,43	7.700.000.000	############	7.550.000.000	############	7.550.000.000	############	36.820.000.000	BPKD
	Nilai Pajak Daerah	Rupiah	561.787.749.522	###############	622.737.354.454,31		##############		711.077.478.533,12		757.060.578.149,68		785.247.286.373,80		##############		
	Nilai Retribusi Daerah	Rupiah	3.007.003.756	4.775.123.226,00	5.765.093.572,00		6.487.764.817,00		7.185.395.981,00		7.832.476.890,00		8.370.334.234,00		35.641.065.494,00		
	Nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Ynag dipisahkan	Rupiah	14.669.299.693,56	17.310.732.877,04	18.191.924.256,71		##############		20.092.733.847,31		21.117.220.854,24		22.194.560.236,69		100.714.906.779,18		
	Nilai Lain-lain PAD yang sah	Rupiah	###############	###############	149.848.789.817,00		##############		155.902.680.926,00		159.020.734.544,00		162.201.149.235,00		779.819.120.135,00		
TOTAL						**598.750.000.000**		**475.250.000.000,00**		**498.500.000.000,00**		**522.500.000.000,00**		**548.250.000.000,00**		**2.643.250.000.000,00**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
BKD

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir Periode Renstra		
			2020	2021	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tujuan : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	**Nilai SAKIP**	**(Nilai)**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	**Nilai SAKIP**	**(Nilai)**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun**	**%**	**100%**	**100**	**100**	**80.000.000**	**100**	**140.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**170.000.000**	**100**	**190.000.000**	**100**	**730.000.000**	**BKD**
Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	**Nilai SAKIP**	**(Nilai)**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**	**-**	**BKD**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100	100	11.259.921.750	100	11.579.100.800	100	11.585.000.000	100	11.804.500.000	100	11.815.000.000	100	58.043.522.550	BKD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran		N/A	N/A	N/A	-	100	80.000.000	100		100		100	90.000.000	100	170.000.000	BKD
Sasaran : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD	**Nilai SAKIP**	**(Nilai)**	**BB Nilai**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**	**-**	**BKD**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran dalam kondisi baik	%	100%	100	100	171.250.000	100	173.000.000	100	176.500.000	100	192.000.000	100	198.000.000	100	910.750.000	BKD
Tujuan : Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintahan	**Indeks Profesionalitas ASN**	**Nilai**	**71,92**	**73**	**74**		**75**		**76**		**77**		**78**		**78**	**-**	**BKD**
Sasaran : Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN	**Persentase ASN yang sesuai dengan Standar Kompetensi**	**%**	**75%**	**87,1**	**87,20**		**87,30**		**88,3**		**88,4**		**88,5**		**88,5**	**-**	**BKD**
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	%	75%	87,1	87,16	183.000.000	87,18	128.000.000	87,22	211.000.000	87,27	225.000.000	87,3	228.000.000	87,3	975.000.000	BKD
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Standar Kompetensi	%	75%	87,1	87,2	145.000.000	87,3	135.000.000	88,3	151.000.000	88,4	215.000.000	88,5	217.000.000	88,5	863.000.000	BKD
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	%	75%	87	87,16	156.000.000	87,18	142.000.000	87,22	160.000.000	87,27	202.000.000	87,31	207.000.000	87,31	867.000.000	BKD
Sasaran : Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi ASN	**Persentase ASN yang sesuai dengan Standar Kualifikasi**	**%**	**75%**	**87,1**	**N/A**	**-**	**89,9**		**90,29**	**-**	**90,39**	**-**	**90,44**	**-**	**90,44**	**-**	**BKD**
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN	%	N/A	N/A	N/A	-	89,9	100.000.000	90,29	100.000.000	90,39	120.000.000	90,44	120.000.000	90,44	440.000.000	BKD
Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Tingkat Kedisiplinan ASN	**Persentase Peningkatan Kinerja ASN**	**%**	**N/A**	**N/A**	**86,48**	**-**	**87,95**	**-**	**88,1**	**-**	**88,15**	**-**	**88,3**	**-**	**88,3**	**-**	**BKD**
Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang berkinerja Baik	%	N/A	N/A	86,48	262.700.000	87,95	315.000.000	88,1	347.000.000	88,15	507.000.000	88,3	515.000.000	88,3	1.946.700.000	BKD
Sasaran : Meningkatnya Kinerja dan Tingkat Kedisiplinan ASN	**Persentase peningkatan Disiplin ASN**	**%**	**N/A**	**N/A**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**100**	**-**	**BKD**
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN yang ditindaklanjuti	%	N/A	N/A	100	30.000.000	100	30.000.000	100	42.000.000	100	70.000.000	100	73.000.000	100	245.000.000	BKD
JUMLAH						**12.950.000.000**		**13.550.000.000**		**13.900.000.000**		**14.250.000.000**		**14.600.000.000**		**69.250.000.000**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
BPSDM

Tujuan/Sasaran/Program		Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja , Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
				Tahun 2020	Tahun 2021	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	T	Rp	
1		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	**Tujuan : Meningkatnya Capaian Kinerja OPD**	**Nilai Evaluasi SAKIP**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**BPSDM**
	Sasaran : Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran	**Nilai Evaluasi SAKIP**	**Predikat**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		**BPSDM**
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase layanan administrasi perkantoran	%	75%	100%	100%	16.790.000.500	100%	18.592.000.500	100%	18.402.000.500	100%	17.392.000.500	100%	18.217.000.500	100%	89.393.002.500	BPSDM
		persentase sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	75%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPSDM
		persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	75%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPSDM
		persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan Evaluasi yang	%	75%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPSDM
	Tujuan : Meningkatnya Akreditasi BPSDM	**Nilai Akreditasi BPSDM**	**Nilai**	**B**	**B**	**B**		**B**		**A**		**A**		**A**		**A**		**BPSDM**
	Sasaran : Mengingkatnya Akreditasi Kelembagaaan dan Meningkatnya Akreditasi Program Kediklatan	**Nilai Akreditasi BPSDM**	**Nilai**	**B**	**B**	**B**		**B**		**A**		**A**		**A**		**A**		**BPSDM**
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	Persentase Lembaga Yang Memenuhi Akreditasi A	%	75%	75%	75%	9.282.248.000	75%	9.952.248.000	100%	11.367.248.000	100%	10.817.248.000	100%	11.717.248.000	100%	53.136.240.000	BPSDM
		Persentase Program Kediklatan yang Memenuhi Akreditasi A	%	75%	75%	75%		75%		100%		100%		100%		100%		BPSDM
	TOTAL						**26.072.248.500**		**28.544.248.500**		**29.769.248.500**		**28.209.248.500**		**29.934.248.500**		**142.529.242.500**	**BPSDM**

0

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
SETDA

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
			2020	2021	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	
Tujuan : Meningkatnya pelayanan dan administrasi bidang urusan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat	**Indikator Tujuan 1 : Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**	**Nilai**	**2,96**	**2,96**	**3,45**		**4**		**4,25**		**4,5**		**4,7**		**4,7**		
	Indikator Tujuan 2 : Nilai Laporan Penerapan SPM	**Nilai**	**60**	**60**	**70**		**75**		**80**		**85**		**95**		**95**		
Sasaran : Peningkatan pelayanan dan administrasi bidang urusan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kesejahteraan rakyat	**Indikator sasaran 1 : Indikator Kinerja Kegiatan**	**Nilai**	**60**	**60**	**70**		**75**		**80**		**85**		**95**		**95**		
	Indikator sasaran 2 : Persentase program dan kegiatan pelaksanaan SPM di Perangkat Daerah Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**%**	**NA**	**60**	**70**		**75**		**80**		**85**		**95**		**95**		
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	%	80	100	100	399.000.000	100	399.000.000	100	399.000.000	100	399.000.000	100	549.000.000	100	2.145.000.000	Biro Pemkesra
	Persentase sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	80	100	90		100		100		100		100		100		
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	%	80	100	90		100		100		100		100		100		
Program : Pemerintahan dan Otonomi Daerah	- Persentase pelayanan pada urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%	100	100	100	1.385.250.000	100	1.450.250.000	100	1.515.250.000	100	1.609.500.000	100	1.384.500.000	100	7.344.750.000	Biro Pemkesra
	- Persentase administrasi pada urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Indikator sasaran 3 : Persentase Fasilitasi layanan Urusan Kesejahteraan rakyat	**Persentase fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan umat beragama dan event-event keagamaan**	**%**	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program : Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi layanan mental dan spiritual	%	100	100	100	39.690.750.000	100	40.250.750.000	100	40.810.750.000	100	41.341.500.000	100	42.041.500.000	100	204.135.250.000	Biro Pemkesra
Jumlah						**41.475.000.000**		**42.100.000.000**		**42.725.000.000**		**43.350.000.000**		**43.975.000.000**		**213.625.000.000**	

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
			2020	2021	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BIRO HUKUM																	
Tujuan : Meningkatnya perumusan kebijakan teknis dibidang peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan hukum.	**Persentase perumusan kebijakan teknis dibidang peraturan perundang-undangan dan penyelesaian permasalahan hukum.**	**%**	**100**	**100**	**100**	**1.025.000.000**	**100**	**1.150.000.000**	**100**	**1.275.000.000**	**100**	**1.400.000.000**	**100**	**1.525.000.000**	**100**	**6.375.000.000**	**Biro Hukum dan HAM**
Sasaran 1 : Meningkatnya fasilitasi dan evaluasi serta harmonisasi, dan dokumentasi produk hukum daerah	**Meningkatnya persentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan, dan terdokumentasi**	**%**	**100**	**100**	**100**	**1.025.000.000**	**100**	**1.150.000.000**	**100**	**1.275.000.000**	**100**	**1.400.000.000**	**100**	**1.525.000.000**	**100**	**6.375.000.000**	**Biro Hukum dan HAM**
Sasaran 2 : Tingkat Penanganan Penyelesaian Permasalahan Hukum dan Bantuan Hukum di Pengadilan dan diluar Pengadlan, serta laporan RANHAM	**Persentase Tingkat Kemenangan perkara di pengadilan dan persentase masalah hukum yang diselesaikan, serta laporan RANHAM**	**%**	**100**	**100**	**100**	**1.025.000.000**	**100**	**1.150.000.000**	**100**	**1.275.000.000**	**100**	**1.400.000.000**	**100**	**1.525.000.000**	**100**	**6.375.000.000**	**Biro Hukum dan HAM**
PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan evaluasi serta harmonisasi, dan dokumentasi produk hukum daerah	%	100	100	100	925.000.000	100	1.025.000.000	100	1.125.000.000	100	1.225.000.000	100	1.325.000.000	100	5.625.000.000	Biro Hukum dan HAM
PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana penunjang	%	100	100	100	100.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	750.000.000	Biro Hukum dan HAM
	Jumlah					**1.025.000.000**		**1.150.000.000**		**1.275.000.000**		**1.400.000.000**		**1.525.000.000**		**6.375.000.000**	

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
			2020	2021	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM																	
Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Perekonomian dan SDA	**Indikator Tujuan : Persentase rumusan Kebijakan Perekonomian Dan SDA Yang Ditindak lanjuti dalam tahun N+1**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	**Indikator Sasaran : Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah Yang Ditindak lanjuti dalam tahun N+1**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD	**Indikator Sasaran : Persentase Rumusan Kebijakan BUMD dan BLUD Yang Ditindak lanjuti**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)	**Indikator Sasaran : Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA) yang Ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Program : Program Perekonomian dan Pembangunan	Indikator Program : 1) Persentase Pemenuhan Rumusan Kebijakan Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro	%	100	100	100	550.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	100	700.000.000	100	750.000.000	100	3.250.000.000	Biro Adm.Perekonomian dan SDA
	2) Persentase Pemenuhan Kebijakan BUMD dan BLUD	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	3) Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA) yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	**Indikator Sasaran : Persentase Peningkatan Tata Kelola Kinerja OPD**	%	100	100	100		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Indikator Program : Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%	100	100	100	300.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	100	375.000.000	100	400.000.000	100	1.750.000.000	Biro Adm.Perekonomian dan SDA
Jumlah						**850.000.000**		**925.000.000**		**1.000.000.000**		**1.075.000.000**		**1.150.000.000**		**5.000.000.000**	

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
			2020	2021	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN																	
Tujuan Terwujudnya Administrasi Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu	**Persentase evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah**	**%**	**67,90**	**82**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sasaran Meningkatnya Administrasi Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu	**Indikator Sasaran 1 Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**%**	**66,70**	**95**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah dokumen administrasi perencanaan pembangunan daerah	Laporan	8	-	12	425.000.000	12	440.000.000	12	450.000.000	12	455.000.000	12	460.000.000	60	2.230.000.000	Biro Adm. Pembangunan
	Idikator Sasaran 2 Persentase pelaksanaan dan Pembinaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	**%**			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Laporan	19	1 Dok, 31	2 Dok, 31	1.086.895.500	2 Dok, 31	1.154.500.000	2, 31	1.247.000.000	2, 32	1.330.000.000	2, 32	1.445.000.000	10 132	6.263.395.500	Biro Adm. Pembangunan
	Idikator Sasaran 3 Persentase Peningkatan Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	**%**			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Pembangunan Pemerintah	Dokumen/ Laporan	21, 1	25, 1	25, 1	713.104.500	25, 1	805.500.000	25, 1	853.000.000	25, 1	910.000.000	25, 1	940.000.000	125 5	4.221.604.500	Biro Adm. Pembangunan
Jumlah						**2.225.000.000**		**2.400.000.000**		**2.550.000.000**		**2.695.000.000**		**2.845.000.000**		**12.715.000.000**	

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
			2020	2021	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BIRO ORGANISASI																	
Tujuan : Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja	**Nilai Komponen Pengungkit Area Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**31,8**	**33**	**36**		**40,2**		**43,65**		**47,52**		**49,05**		**49,05**		
Sasaran 1 : Meningkatnya Tata kelola Kinerja OPD	**Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	**%**	**100**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		
Sasaran 2 : Meningkatnya pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah	**Nilai Komponen Reformasi Birokrasi area penataan dan penguatan organisasi**	**Nilai**	**3,18**	**3,3**	**3,6**		**4,02**		**4,5**		**4,86**		**5,04**		**5,04**		
	Nilai Komponen Reformasi Birokrasi area manajemen perubahan	**Nilai**	**2,65**	**2,75**	**3,00**		**3,35**		**3,75**		**4,05**		**4,2**		**4,2**		
	Nilai Komponen Reformasi Birokrasi area peningkatan akuntabilitas	**Nilai**	**3,18**	**3,3**	**3,6**		**4,02**		**4,5**		**4,86**		**5,04**		**5,04**		
	Nilai Komponen Reformasi Birokrasi area penataan tatalaksana	**Nilai**	**2,65**	**2,75**	**3,00**		**3,35**		**3,75**		**4,05**		**4,2**		**4,2**		
	Nilai Komponen Reformasi Birokrasi area peningkatan kualitas pelayanan publik	**Nilai**	**3,18**	**3,3**	**3,6**		**4,02**		**4,5**		**4,86**		**5,04**		**5,04**		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	175.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	100	1.125.000.000	Biro Organisasi
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase dokumen perencanaan, penganggara, pelaporan dan evaluasi yang disusun	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang dibina dan difasilitasi	%	100	100	100	575.000.000	100	650.000.000	100	725.000.000	100	800.000.000	100	875.000.000	100	3.625.000.000	Biro Organisasi
	Persentase kabupaten/kota yang dibina dan difasilitasi	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
Jumlah						**750.000.000**		**850.000.000**		**950.000.000**		**1.050.000.000**		**1.150.000.000**		**4.750.000.000**	

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
			2020	2021	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	T	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BIRO UMUM																	
Tujuan PD: Meningkatnya tata kelola kinerja Biro Umum	**Nilai SAKIP**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
Sasaran PD: Meningkatnya tata kelola kinerja Biro Umum	**Nilai SAKIP**	**BB**	**BB**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		**A**		
Program :Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran	Jenis	3	3	3	88.000.000.000	3	89.423.648.520	3	91.377.148.520	3	95.152.148.520	3	97.377.148.520	3	461.330.094.080	Biro Umum
Tujuan PD: Meningkatnya kualitas pelayanan umum	**Nilai hasil survey pelayanan umum**	**%**	**80**	**80**	**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		
Sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan Kerumahtanggaan KDH, WKDH, dan Sekda	**Nilai hasil survey kepuasan pelayanan kerumahtanggan KDH,WKDH, Sekda**	**%**	**80**	**80**	**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		**80**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis pelayanan kerumahtanggaan KDH WKDH dan Sekda yang dilaksanakan	Jenis, Kali	6,6	6,6	6,6	8.359.500.000	6,6	8.406.000.000	6,6	8.406.000.000	6,6	8.406.000.000	6,6	8.406.000.000	6,6	41.983.500.000	Biro Umum
Sasaran PD :Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan	**Nilai hasil survey kepuasan pelayanan tamu daerah**	**%**	**80**	**80**	**82**		**84**		**86**		**88**		**90**		**90**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah jenis pelayanan keprotokolan yang Persentase pelayanan keprotokolan yang dilaksanakan	%	100	100	100	966.851.480	100	966.851.480	100	966.851.480	100	966.851.480	100	966.851.480	100	4.834.257.400	Biro Umum
	Jumlah					**97.326.351.480**		**98.796.500.000**		**100.750.000.000**		**104.525.000.000**		**106.750.000.000**		**508.147.851.480,00**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
SEKRETARIAT DPRD

Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Konerja Progaram dan Kerangka Pendanaan												Unit Kinerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
			2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola DPRD	**nilai sakip sekretariat DPRD**	**Predikat**	**B**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		set-DPRD
Sasaran : Nilai Evaluasi Sakip DPRD	**nilai sakip sekretariat DPRD**	**Predikat**	**B**	**BB**	**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**		set-DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase layanan Administrasi Perkantoran	%	84,15%	90%	93%	Rp 58.500.000.000	95%	Rp 59.500.000.000	97%	Rp 60.500.000.000	98%	Rp 61.500.000.000	99%	Rp 62.500.000.000	100%	Rp 302.500.000.000	set-DPRD
	Persentase sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	%	57,40%	75%	80%		83%		85%		90%		95%		100%		set-DPRD
	persentase ASN yang di tingkatkan Kompetensinya	%	91,30%	93%	95%		97%		98%		100%		100%		100%		set-DPRD
	Persentase Dokumen Perencanaan, penggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	%	99,39%	99,80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		set-DPRD
Tujuan : Meningkatnya kinerja fungsi legislasi	**Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan**	**%**	**70**	**70**	**70**		**75**		**80**		**90**		**100**		**100**		
Sasaran : Perda yang dihasilkan sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan	**Persentase produk hukum daerah yang diselesaikan**	**%**	**70**	**70**	**70**		**75**		**80**		**90**		**100**		**100**		
Tujuan : Meningkatnya pelayanan aspirasi masyarakat	**Persentase Aspirasi Yang Ditindaklajuti**	**%**	**75**	**80**	**80**		**85**		**90**		**95**		**100**		**100**		
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Aspirasi Masyarakat	**Persentase Aspirasi Yang Ditindaklajuti**	**%**	**75**	**80**	**80**		**85**		**90**		**95**		**100**		**100**		
Tujuan : Meningkanya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	**Persentase jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi minimal 3 kali dalam setahun**	**%**	**68**	**75**	**80**		**85**		**90**		**95**		**100**		**100**		
Sasaran : Meningkatnya kompetensi Pimpinan dan Anggota DPRD	**Persentase jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi minimal 3 kali dalam setahun**	**%**	**68**	**75**	**80**		**85**		**90**		**95**		**100**		**100**		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Prosentase dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	71%	75%	77%	Rp 28.500.000.000	80%	Rp 29.500.000.000	85%	Rp 30.500.000.000	85%	Rp 31.500.000.000	90%	Rp 32.500.000.000	100%	Rp 152.500.000.000	set-DPRD
JUMLAH						**Rp 87.000.000.000**		**Rp 89.000.000.000**		**Rp 91.000.000.000**		**Rp 93.000.000.000**		**Rp 95.000.000.000**		**Rp 455.000.000.000**	**set-DPRD**

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
INSPEKTORAT

	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit kerja OPD Penanggung Jawab
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Tujuan : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola keuangan	**Nilai komponen evaluasi internal Provinsi Bengkulu**	**Nilai**	**6,57**	**6,62**	**6,7**		**6,75**		**7,00**		**7,25**		**7,50**		**7,50**		**INSPEKTORAT**
	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola keuangan	**Nilai komponen evaluasi internal Provinsi Bengkulu**	**Nilai**	**6,57**	**6,62**	**6,7**		**6,75**		**7,00**		**7,25**		**7,50**		**7,50**		
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	- Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100%	100%	15.864.963.730	100%	16.280.000.000	100%	16.642.800.000	100%	17.082.550.000	100%	17.568.300.000	100%	83.438.613.730	INSPEKTORAT
		- Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran dalam Kondisi Baik	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		- Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	20,17%	30%	35%		40%		45%		50%		55%		55%		
		- Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi yang disusun	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		- Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB	%	85,29%	85,5%	86%		87%		88%		89%		90%		90%		
	Tujuan : Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan internal	**Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan PKPPT**	**%**	**65%**	**70%**	**75%**		**76%**		**77%**		**78%**		**79%**		**79%**		**INSPEKTORAT**
	Sasaran : Meningkatnya kinerja pembinaan dan pengawasan internal	**Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan PKPPT**	**%**	**65%**	**70%**	**75%**		**76%**		**77%**		**78%**		**79%**		**79%**		
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang dilakukan pemeriksaan, reviu, monitoring, dan evaluasi	%	60%	65%	70%	1.875.000.000	71%	2.150.000.000	72%	2.445.000.000	73%	2.732.450.000	74%	2.946.700.000	74%	12.149.150.000	INSPEKTORAT
		Persentase pengaduan masyarakat/laporan/ limpahan dari Pemerintah Pusat yang dilakukan pemeriksaan	%	70%	75%	80%		81%		82%		83%		84%		84%		
III.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level	level 2	level 2	level 3	510.036.270	level 3	620.000.000	level 3	762.200.000	level 3	835.000.000	level 3	935.000.000	level 3	3.662.236.270	INSPEKTORAT
		- Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	level	level 2	level 2	level 3		level 3		level 3		level 3		level 3		level 3		
		- Nilai Monitoring Center of Prevention (MCP)	Nilai	83,33	84	85		87		88		89		90		90		
		- Nilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	Nilai	63,13	64	65		67		68		69		70		70		
		- Tingkat Kepatuhan ASN/Penyelenggara Negara	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
							18.250.000.000		**19.050.000.000**		**19.850.000.000**		**20.650.000.000**		**21.450.000.000**		**99.250.000.000**	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI BENGKULU
BADAN PENGHUBUNG

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perencanaan (2026)		Unit Kerja (Bid/UPTD)
					2022		2023		2024		2025		2026				
			2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)			(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola OPD	**Nilai SAKIP**			***BB***	***BB***		***BB***		***BB***		***BB***		***A***		***A***		Badan Penghubung
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola OPD	**Nilai SAKIP**			***BB***	***BB***		***BB***		***BB***		***BB***		***A***		***A***		Badan Penghubung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase layanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100	100	7.879.618.500	100	8.614.188.099	100	9.077.272.621	100	9.518.185.437	100	9.662.763.278	100	Badan Penghubung	Badan Penghubung
	Persentase sarana prasarana perkantoran dalam kondisi baik	Persentase	100	100	100			100		100		100		100	100		
	persentase ASN yang di tingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	100	100			100		100		100		100	100		
	Persentase Dokumen Perencanaan, penggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	Persentase	100	100	100			100		100		100		100	100		
Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan umum	**Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung**	Persentase	89	90	91		92		93	-	94	-	95	-	95	-	Badan Penghubung
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan umum	**Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung**	Persentase	1	1	1		1		1	-	1	-	1	-	1	-	Badan Penghubung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan unsur muspida terhadap layanan Badan Penghubung	Persentase		90	92	176.760.000	93	180.811.901	94	152.400.000	95	151.760.000	96	230.000.000	96	894.471.901	Badan Penghubung
	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Badan Penghubung	Persentase		90	92		93		94	-	95	-	96	-	96	-	Badan Penghubung
	Tingkat Kepuasan pengunjung penginapan yang puas terhadap layanan penginapan	Persentase		90	92		93		94	-	95	-	96	-	96	-	Badan Penghubung
Program Pelayanan Penghubung	Tingkat kepuasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan unsur muspida terhadap layanan Badan Penghubung	Persentase	90	90	92	150.000.000	93	100.000.000	94	125.000.000	95	166.000.000	96	225.000.000	96	766.000.000	Badan Penghubung
	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan Badan Penghubung	Persentase	90	90	92	-	93	-	94	-	95	-	96	-	96	-	Badan Penghubung
	Tingkat Kepuasan pengunjung penginapan yang puas terhadap layanan penginapan	Persentase	90	90	92		93	-	94	-	95	-	96	-	96	-	Badan Penghubung

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Perencanaan (2026)		Unit Kerja (Bid/UPTD)
					2022		2023		2024		2025		2026				
			2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan : Meningkatnya Kinerja Badan Penghubung dalam Promosi Daerah	**Persentase Peningkatan jumlah Pengunjung Promosi Daerah Bengkulu**	**Persentase**	**3**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**3**		**Badan Penghubung**
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Badan Penghubung dalam Pameran Daerah	**Persentase Peningkatan jumlah Pengunjung pameran**	**Persentase**	**3**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**3**	**-**	**Badan Penghubung**
	Persentase Peningkatan jumlah Pengunjung Anjungan Bengkulu	**Persentase**	**3**	**1**	**1**		**1**		**1**		**1**		**1**		**3**		**Badan Penghubung**
Program Pelayanan Penghubung	Jumlah Pengunjung Pameran	orang	-	300	309	133.621.500	319	80.000.000	328	110.000.000	338	112.454.446	348	327.236.722	1942	763.312.668	Badan Penghubung
	Jumlah Pengunjung Anjungan Bengkulu	orang	-	1820	1875		1932		1990		2049		2110		11776		Badan Penghubung
JUMLAH						**Rp 8.450.000.000**		**Rp 9.100.000.000**		**Rp 9.600.000.000**		**Rp 10.100.000.000**		**Rp 10.600.000.000**		**47.850.000.000**	

PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2021

BAB VIII
Kinerja Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah

PROVINSI
BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan *(outcomes).* Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indicator capaian kinerja program *(outcome)* terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap tahunnya meliputi; pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Atau dengan kata lain dapat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada aspek daya saing daerah penentuan capaian indikator tiap tahunnya mencakup pada kemampuan ekonomi, fasilitas wilayah/infrastuktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Provinsi Bengkulu

No	Indikator	Satuan	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,9 - 5,2	5,05 - 5,35	5,2 - 5,5	5,35 - 5,65	5,5 - 5,8
2	Indeks Gini	Poin	0,332	0,330	0,328	0,326	0,324
3	Angka Kemiskinan	Persen	14,5 - 14,9	14 - 14,5	13,5 - 14	13 - 13,5	12,5 - 12
4	Angka Pengangguran	Persen	3,6 - 3,8	3,5 - 3,6	3,4 - 3,5	3,3 - 3,4	3,2 - 3,3
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,6	71,7	71,8	71,9	72
6	PDRB Perkapita	Juta Rp	37,03	38,14	39,29	40,47	41,68

Selain itu, adapun penetapan Indikator Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bengkulu yang menjadi Indikator Kinerja Kunci RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Provinsi Bengkulu

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
I.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**							
1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	-0,02	4,9 - 5,2	5,05 - 5,35	5,2 - 5,5	5,35 - 5,65	5,5 - 5,8	5,5 - 5,8
1.2.	Inflasi (Persen)	2,51	2,41	2,3	2,2	2,11	2,02	2,02
1.3.	PDRB Perkapita (ADHB) (Rp. Juta)	36,31	37,03	38,14	39,29	40,47	41,68	41,68
1.4.	PDRB Perkapita (ADHK) (Rp. Juta)	23,04	23,27	23,74	24,21	24,70	25,19	25,19
1.5.	Indeks Gini	0,334	0,332	0,330	0,328	0,326	0,324	0,324
1.6.	Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan (Persen)	84,7	85,1 - 85,5	85,5 - 86	86 - 86,5	86,5 - 87	87,5 - 88	87,5- 88
1.7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,40	71,6	71,7	71,8	71,9	72	72
1.8.	Angka melek huruf (Persen)	98,01	98,11	98,21	98,30	98,40	98,50	98,50
1.9.	Angka rata-rata lama Sekolah (Tahun)	8,84	9	9,1	9,2	9,3	9,4	9,4

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.10.	Angka usia harapan hidup (Tahun)	69,35	69,5	69,65	69,8	69,95	70,1	70,1
1.11.	Prevalensi Stunting (Persen)	21,1	18,4	16	14	14	14	14
1.12.	Prevalensi Wasting (Persen)	7,8	7,5	7,3	7	7	7	7
1.13.	Peningkatan Ketersediaan UKBM aktif (Persen)	NA	80	81	82	83	84	84
1.14.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	72	73,15	74,25	75,10	76,15	77,22	77,22
1.15.	Angka Partisipasi angkatan kerja (Persen)	71,73	72,27	72,99	73,72	74,46	75,20	75,20
1.16.	Tingkat pengangguran Terbuka (Persen)	4,07	3,6 - 3,8	3,5 - 3,6	3,4 - 3,5	3,3 - 3,4	3,2 - 3,3	3,2 - 3,3
1.17.	Rasio penduduk yang bekerja	95,93	96,2-96,4	96,4-96,5	96,5-96,6	96,6-96,7	96,7-96,8	96,7-96,8
1.18.	Nilai Pelayanan Publik	B	B	B	A-	A-	A-	A-
1.19.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	A	A	A
1.20.	Persentase PAD terhadap pendapatan (Persen)	26,80	27,62	28,88	29,99	31,16	31,90	31,90
1.21.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.22.	Nilai Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan	82	83	83,5	84	84	85	85

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.23.	Nilai Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan	82,6	83	83,5	84	84,5	85	85
1.24.	Persentase pemenuhan cadangan pangan (Persen)	14,5	20	20	20	20	20	100
1.25.	Persentase Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen)	5	5	5	5	5	5	25
1.26.	Persentase Pertumbuhan sektor Pertanian Tanaman Pangan (Persen)	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
1.27.	Persentase Pertumbuhan sektor Pertanian Hortikultura (Persen)	1,50	1,50	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
1.28.	Persentase Pertumbuhan sektor Pertanian Perkebunan (Persen)	2,00	2.00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
1.29.	Produksi sektor Pertanian :							
1.29.1	Produksi Padi (Ton)	292.815	295.750	297.229	298.715	300.209	301.710	1.492.143
1.29.2	Produksi Jagung (Ton)	89.397	91.194	92.106	93.027	93.957	94.897	464.278
1.29.3	Produksi Bawang (Ton)	587	611	623	635	648	661	3.166
1.29.4	Produksi Cabai (Ton)	51.113	52.140	52.662	53.188	53.720	54.257	265.452
1.29.5	Produksi Jeruk (Ton)	16.215	16.870	17.207	17.552	17.903	18.261	87.462

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.29.6	Produksi Kopi (Ton)	62.507	65.032	66.333	67.660	69.013	70.393	337.155
1.29.7	Produksi Kelapa Sawit Rakyat (Ton)	735.221	764.924	780.222	795.827	811.743	827.978	3.965.696
1.29.8	Produksi Karet Rakyat (Ton)	85.238	86.951	87.821	88.699	89.586	90.482	442.678
1.30.	Persentase pertumbuhan sub sektor kehutanan terhadap PDRB (Persen)	0,45	0,45	0,5	0,55	0,6	0,65	*0,65*
1.31.	Persentase pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB (Persen)	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6
1.32.	Persentase pertumbuhan pariwisata terhadap PDRB (Persen)	1,82	2,2	2,4	2,6	2,8	3,2	3,2
1.33.	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan terhadap PDRB (Persen)	1,06	3,00	3,20	3,4	3,6	3,8	3,8
1.34.	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (Persen)	8	7	7	7	8	8	37
1.35.	Persentase Pertumbuhan Sektor Perindustrian Terhadap PDRB (Persen)	-6,32	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	17
1.36.	Persentase Pertumbuhan Unit Industri Besar (Persen)	4,5	6,8	10,2	11,1	16,6	22,8	67,5

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1.37.	Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah (Persen)	3,6	4	4	4	4	4	20
II.	**Aspek Daya Saing Daerah**							
2.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per Kapita (Juta)	10,38	10,6	10,8	11	11,2	11,4	11,4
2.2.	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan	96,01	96,49	96,97	97,45	97,94	98,43	98,43
2.3.	Nilai Tukar Petani Hortikultura	103,08	103,59	104,11	104,63	105,15	105,68	105,68
2.4	Nilai Tukar Petani Pekebun	119,20	120,39	121,60	122,81	124,04	125,28	125,28
2.5	Persentase peningkatan status desa mandiri (Persen)	0,82	0,97	1,12	1,27	1,42	1,49	1,49
2.6	Persentase peningkatan status desa maju (Persen)	9,99	10,37	10,74	11,11	11,48	11,86	11,86
2.7	Persentase konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM Yang ditangani (Persen)	67	67	68	69	70	71	71
III.	**Aspek Pelayanan Umum**							
III.a.	**Layanan Urusan Wajib Dasar**							
3.1.	**Pendidikan**							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.1.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SLTA (Persen)	68,64	70 ,00	72,00	74	76	78	78
3.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA (Persen)	94,14	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00
3.1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA (Persen)	79,33	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	84,00
3.1.4	Persentase Siswa SLTA yang Putus Sekolah (Persen)	3,84	3,69	3,44	3,2	2,95	2,7	2,7
3.1.5	Persentase Angka Kelulusan SMA/SMK (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	65	70	75	80	85	90	90
3.1.7	Rasio Guru Terhadap siswa Pendidikan Menengah	1 : 12	1 : 13	1 : 14	1 : 15	1 : 16	1 : 17	1: 17
3.1.8	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99,93	99,94	99,95	99,96	99,97	99,98	99,98
3.1.9	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,01	98,03	98,05	98,07	98,09	98,11	98,11
3.2.	**Kesehatan**							
3.2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8	8	8	8	8	8	8

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	995	992	992	992	992	992	992
3.2.3.	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi (usia 0-11 bulan) dan Imunisasi dasar Lengkap (IDL) (Persen)	94	94,1	94,6	95	95	95,5	95,5
3.2.4.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	9	8	8	8	8	8	8
3.2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	100	100	98	95	92	89	89
3.2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	1:3.074	1:3.051	1:3.028	1:3.005	1:2.983	1:2961	1:2.961
3.2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1:83.778	1:83.778	1:83.778	1:80.427	1:80.427	1:77.333	1:77.333
3.2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	1:2.558	1:2.525	1:2.494	1:2.464	1:2.434	1:2.405	1:2.405
3.2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1:180	1:177	1:174	1:171	1:168	1:165	1:165
3.2.11.	Persentase pemenuhan tenaga kesehatan berkualitas (Persen)	23	23	25	30	59	70	70
3.2.12.	Persentase desa Universal Child immunization (UCI) (Persen)	94	94,1	94,6	95	95	95,5	95,5
3.2.13.	Jumlah Puskesmas yang dilatih dalam Tata Laksana Gizi Buruk untuk Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan (PKM)	8	10	15	20	25	30	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.2.14.	Angka Kesakitan TB per 100.000 penduduk	11	10	10	9	9	9	9
3.2.15.	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	<49	2,22	2,21	2,20	2,19	2,19	2,19
3.2.16.	Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
3.2.17.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (Jiwa)	23000	34871	35974	37007	38180	39283	39283
3.2.18.	Cakupan Kunjungan Antenatal dan Neonatal dan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
3.2.19.	Cakupan pelayanan kesehatan Bayi (usia 0-11 bulan) dan Imunisasi dasar Lengkap (IDL) (Persen)	94	94,1	94,6	95	95	95,5	95,5
3.2.20.	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.2.21.	Peresentase Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.2.22.	Jumlah Kabupaten/Kota yang mengalokasikan pengadaan Makanan Tambahan (MT) Bumil KEK (Kab/Kota)	4	10	10	10	10	10	10

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.2.23.	Cakupan Kejadian Luar Biasa yang ditanggulangi (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.2.24.	Cakupan Krisis Kesehatan yang ditanggulangi (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
3.3.1.	Pekerjaan Umum :							
3.3.1.1.	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik (Persen)	67,28	68,55	70,11	72,01	74,61	76,93	76,93
3.3.1.2.	Presentase rumah tangga yang terakses MCK (Persen)	76,54	78,69	80,85	85	89,15	93,3	93,3
3.3.1.3.	Presentase rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan air limbah (IPAL) komunal (Persen)	11	14	16,5	19	21	24	24
3.3.1.4.	Presentase rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (Persen)	24,21	26,41	27,16	27,35	27,35	27,54	27,54
3.3.1.5.	Persentase panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi (Persen)	0,423	0,64	0,82	1	1,18	1,36	1,36
3.3.1.6.	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang (Persen)	56,72	57,18	57,68	59,18	60,68	61,68	61,68
3.3.1.7.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	52,04	52,50	53	54,50	56	57	57

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.3.1.8.	Presentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak (Persen)	79,71	86,48	93,24	100	100	100	100
3.3.1.9.	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	460,41	440,41	430,41	410,41	390,41	370,41	370,41
3.3.2.	Penataan Ruang:							
3.3.2.1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang (Persen)	92	100	100	100	100	100	100
3.4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**							
3.4.1.	Persentase Rumah Layak Huni (Persen)	53,57	57,16	59,07	61,16	63,07	65,16	65,16
3.4.2.	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Persen)	0,52	2,10	2,10	1,93	2,06	2,70	12,49
3.4.3.	Persentase Penanganan Luas Kawasan Kumuh (Persen)	4,34	4,54	4,65	4,87	5,12	5,40	34,52
3.4.4.	Persentase Kecamatan yang dibangun PSU (Persen)	22,66	24,22	27,34	32,03	36,72	42,19	42,19
3.5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**							
3.5.1.	Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.5.2.	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan	10	10	10	10	10	10	10

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	kebakaran dan penyelamatan non kebakaran (Persen)							
3.5.3.	Persentase Penegakan PERDA (Persen)	50	70	70	80	80	90	90
3.6.	**Sosial**							
3.6.1.	Persentase PMKS yang mendapatkan manfaat pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial (Persen)	70,9	70,82	71,35	71,82	72,32	72,75	72,75
3.6.2.	Persentase keluarga penerima manfaat (KPM) yang memperolah bantuan dan jaminan sosial (Persen)	70	70,2	70,5	70,8	71	71,3	71,3
3.6.3	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi dalam panti (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.6.4	Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Persen)	55	55,8	56	57	58	59	59
3.6.5.	Pesentase kejadian Bencana alam dan Sosial yang ditanggulangi (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
III.b.	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.7	**Tenaga Kerja**							
3.7.1.	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.7.2.	Jumlah Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) (Perusahaan)	51	45	80	60	75	80	411
3.7.3.	persentase tenaga kerja yang di tempatkan (Persen)	60,5	65,20	70	75,10	80	83,33	83,33
3.7.4.	Persentase Perusahaan Taat NSPK (Persen)	58,84	65,25	70	80	90	100	100
3.7.5.	Persentase Pencari Kerja yang dilatih (Persen)	90,40	90,65	90,75	90,85	91	91,20	91,20
3.7.6.	Persentase Pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (Persen)	50,20	55,20	59,27	62,20	68	70	70
3.8.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
3.8.1.	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	71,21	71,35	71,40	71,45	71,5	71,55	71,55
3.8.2.	Pesentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan yang Mendapatkan layanan pendampingan (Persen)	87	90	92,5	95	97,5	100	100
3.8.3.	Persentase Kasus Korban Kekerasan Anak yang	75	80	85	90	95	100	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Mendapatkan layanan pendampingan (Persen)							
3.9.	**Pangan**							
3.9.1.	Nilai Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan	82,5	83	83,5	84	84	85	85
3.9.2.	Nilai Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan	82,6	83	83,5	84	84,5	85	85
3.9.3.	Persentase Tingkat Keamanan Pangan (Persen)	85	85	85	85	85	85	85
3.10.	**Pertanahan**							
3.10.1.	Persentase Penggunaan Lahan Permukiman (Persen)	12,02	12,20	12,38	12,55	12,73	12,90	12,90
3.11.	**Lingkungan Hidup**							
3.11.1.	Tersedianya dokumen Provinsi RPPLH Provinsi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3.11.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.11.3.	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3.11.4.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3.11.5.	Peningkatan Indeks Kualitas Air	50,24	50,34	50,44	50,54	50,64	50,74	50,74

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.11.6.	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	90,18	90,28	90,39	90,49	90,59	90,69	90,69
3.11.7.	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	57,06	58,84	60,62	62,4	64,18	65,96	65,96
3.11.8.	Laporan Inventarisasi GRK							
3.11.9.	Persentase penurunan emisi GRK (Persen)	20	20	20	20	20	20	20
3.11.10.	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang mengelola limbah B3	141	30	27	28	28	28	141
3.12.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
3.12.1.	Persentase kepemilikan KTP-el bagi wajib KTP di Provinsi Bengkulu (Persen)	99	99	99	99	99	99	99
3.12.2.	Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun (Persen)	97	97	98	99	99	99	99
3.12.3.	Persentase kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan menikah yang dilaporkan (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.12.4.	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) perangkat daerah provinsi Bengkulu	11	19	31	42	42	42	42

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	(Persen)							
3.13.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
3.13.1.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.13.2.	Jumlah Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Kabupaten/Kota)	10	10	10	10	10	10	10
3.14.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
3.14.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)							
3.14.2.	Total Fertility Rate (TFR)	**2,25**	**2,21**	**2,19**	**2,1**	**2,0**	**1,9**	**1,9**
3.14.3.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	61,90	62,54	62,92	63,41	63,90	64,39	64,39
3.15.	**Perhubungan**							
3.15.1.	Persentase pemenuhan pengembangan dan pelayanan transportasi	177,865	52,58	67,54	97,50	119,46	142,92	142,92

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.15.2.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelabuhan regional	N/A	8	10	12	14	20	20
3.15.3.	Persentase Pemenuhan Pelayanan Publik Bidang Pelayaran	N/A	7,5	13,75	20	26,25	32,5	32,5
3.16.	**Komunikasi dan Informatika**							
3.16.1.	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Persen)	70	70	75	75	80	100	100
3.16.2.	Persentase ketersediaan infrastruktur TIK (Persen)	50	50	55	58	60	65	65
3.16.3.	Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi (Persen)	50	50	55	58	60	65	65
3.17.	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**							
3.17.1.	Persentase Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.17.2.	Persentase Pendampingan dan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (Persen)	0,1	0,1	0,2	0,5	0,6	0,6	0,6
3.17.3.	Persentase UMKM binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (Persen)	10	10	15	15	20	25	25

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.18.	**Penanaman Modal**							
3.18.1.	Nilai Realisasi Investasi (Triliun)	8,1	8,66	8,92	9,18	9,46	9,74	9,74
3.18.2.	Jumlah tujuan promosi investasi (Investor)	20	25	25	25	25	25	145
3.19.	**Kepemudaan dan Olah Raga**							
3.19.1.	Jumlah pemuda yang aktif dalam pembangunan (Orang)	96.724	5000	5000	5000	5000	5000	121724
3.19.2.	Persentase nomor lomba yang dimenangkan tingkat nasional/ wilayah (Persen)	55	60	60	60	60	60	60
3.20.	**Statistik**							
3.20.1.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral (Persen)	70	75	75	80	85	90	90
3.21.	**Persandian**							
3.21.1.	Persentase perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk pengamanan informasi (Persen)	8	19	39	58	78	100	100
3.22.	**Kebudayaan**							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.22.1.	Persentase IPK (Persen)	59	59,20	59,40	59,60	59,80	60,00	60,00
3.22.2.	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (Persen)	13,14	14,2	15,2	16,2	17,2	18,2	18,2
3.22.3.	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Persen)	13,14	13,2	13,26	13,32	13,38	13,44	13,44
3.23.	**Perpustakaan**							
3.23.1.	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan (Persen)	1,36	1,41	1,46	1,51	1,56	1,61	1,61
3.23.2.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	5,31	6,11	6,91	7,71	8,51	9,31	9,31
3.23.3.	Persentase tenaga perpustakaan yang bersertifikasi (Persen)	0,0100	0,0123	0,0148	0,0168	0,018	0,019	0,019
3.24.4.	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (Persen)	7	9,18	17	24,81	32,63	40,45	40,45
3.25.5.	Persentase Koleksi yang dilestarikan (Persen)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
3.26.	**Kearsipan**							
3.26.1.	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan kearsipan secara baik (Persen)	15%	18,75	25,00	31,25	43,75	56,25	56,25

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.26.2.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (Persen)	0	1,66	3,32	4,98	6,64	8,31	8,31
3.26.3.	Persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan (Persen)	16,15	16,50	17,00	18	19	20	20
III.c.	**Layanan Urusan Pilihan**							
3.27.	**Pariwisata**							
3.27.1.	Jumlah wisatawan (Orang)	445.500 org	1.500.000	1.650.000	1.760.000	1.945.000	2.100.000	2.100.000
3.27.2.	Rata-rata lama tinggal (Hari)	2.18	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	2,8
3.28.	**Pertanian**							
3.28.1.	Persentase Pertumbuhan sektor Pertanian Tanaman Pangan (Persen)	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
3.28.2.	Persentase Pertumbuhan sektor Pertanian Hortikultura (Persen)	1,50	1,50	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
3.28.3.	Persentase Pertumbuhan sektor Pertanian Perkebunan (Persen)	2,00	2.00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.29.	**Kehutanan**							
3.29.1	Persentasi Penurunan Deforestasi (Persen)	9	9	9	9	9	9	9
3.29.2.	Persentase Lahan Kritis (Persen)	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	17,1
3.30.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
3.30.1.	Persentase Rumah Tangga dengan penerangan Listrik (Persen)	99,9	100	100	100	100	100	100
3.30.2.	Jumlah perusahaan Pertambangan yang menerapkan Good Mining Practice	13	13	13	13	13	13	13
3.31.	**Perdagangan**							
3.31.1.	Nilai Ekspor	175	180	190	200	210	220	1000
3.32.	**Perindustrian**							
3.32.1.	Jumlah kelompok pengrajin dan usaha bersama yang dibina	3	4	5	6	8	10	33
3.32.2.	Jumlah IKM dan sentra yang berpotensi yang dibina	N/A	1	1	1	2	2	7

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.33.	**Transmigrasi**							
3.33.1.	Persentase transmigran swakarsa (Persen)							
3.33.2.	Persentase Peningkatan Kawasan Transmigrasi Yang di Bangun dan Dikembangkan (Persen)	N/A	N/A	57,14	57,14	71,42	85,71	85,71
3.34.	**Kelautan dan Perikanan**							
3.34.1.	Produksi Perikanan Tangkap	72.750	78.123-82.029	82.029-86.131	86.131-90.437	90.437-94.959	94.959-99.707	94.959-99.707
3.34.2.	Produksi Perikanan Budidaya	127.580	131.538-131.560	131.560-131.678	131.678-131.732	131.732-131.752	131.752-131.802	131.752-131.802
3.34.3.	Persentase Kelompok Nelayan Tradisional yang Mempunyai Alat Tangkap (Persen)	20	25	30	35	40	45	45
3.34.4.	Persentase Biota Laut yang Telah dilakukan Upaya Pelestarian (Persen)	52,45	52,69	53,69	54,69	55,69	56,69	56,69
3.34.5.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	132,56	133,56	134,56	135,56	136,56	137,56	137,56
III.d.	**Penunjang Urusan**							
3.35.	**Perencanaan Pembangunan**							
3.35.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	ditetapkan dengan PERDA							
3.35.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3.35.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3.35.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3.35.5.	Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.36.	**Keuangan**							
3.36.1.	Opini BPK terhad laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.36.2.	Persentase belanja pendidikan (20%)	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
3.36.3.	Persentase belanja kesehatan (10%)	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
3.36.4.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.37.	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.37.1.	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN (Persen)	87,10	66,63	67,61	68,60	69,57	70,55	70,55
3.37.2.	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Standar Kompetensi (Persen)	87,10	66,63	67,61	68,60	69,57	70,55	70,55
3.37.3.	Persentase ASN yang berkinerja Baik (Persen)	54	60	65	70	75	80	80
3.37.4.	Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN (Persen)	0	0	83,5	84	84,5	85	85
3.38.	**Pengawasan**							
3.38.1.	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai dengan PKPPT (Persen)	70	75	76	77	78	79	79
3.38.2.	Tingkat Kepatuhan ASN/Penyelenggara Negara (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
3.38.3.	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang sesuai rekomendasi (Persen)	59,50	60	61	62	63	63	63
3.39.	**Sekretariat Dewan**							
3.39.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
3.39.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
3.39.3.	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

PERATURAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2021

BAB IX

Penutup

PROVINSI

BENGKULU



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

https://bappeda.bengkuluprov.go.id/

BAB IX

PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Gubernur Bengkulu yang sedang memimpin pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu untuk tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur Bengkulu berikutnya, dengan mengacu kepada RPJMD ini. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur Bengkulu berikutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah. Dokumen RPJMD memuat kebijakan umum, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program kerja OPD, program lintas OPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 bukan hanya merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang mendapat legitimasi Peraturan Daerah yang menjadi instrumen penting untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan Provinsi Bengkulu. Selain itu, RPJMD merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pembangunan daerah. Dengan

demikian RPJMD merupakan perwujudan komitmen pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pembangunan lima tahun ke depan. Komitmen yang terbangun dalam RPJMD ini sepatutnya dijadikan pegangan, patokan dan ukuran dalam mengimplementasikan program pembangunan Provinsi Bengkulu hingga Tahun 2026.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026 maka seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memahami substansi dokumen perencanaan ini dan menterjemahkannya secara kreatif dan inovatif tanpa keluar dari aturan yang ada. Bagi OPD lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026 menjadi acuan utama untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2021-2026 serta dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD dan Renja OPD digunakan sebagai bahan penyusunan APBD selama periode 2021-2026. Dokumen-dokumen tersebut menjadi bahan dalam evaluasi dan pelaporan kinerja kepemimpinan daerah Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2021-2026.

Implementasi RPJMD ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas program dan kegiatan, lintas instansi serta lintas pemerintahan dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Bengkulu. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala OPD menyusun Renstra OPD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. OPD, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
2. OPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja OPD setiap tahun;
3. OPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra OPD;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra OPD.
5. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD sampai dengan Tahun 2026 dan akan diatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang akan mengatur tentang penyusunan RPJMD pasca Pilkada Tahun 2024;

GUBERNUR BENGKULU

Ir. H. ROHIDIN MERSYAH